



Brigjen Pol. (Purn) Dr. dr. ANTONIUS GINTING, Sp. OG., M. Kes
KOMANDO TARIGAN, S.P
BUPATI KARO & WAKIL BUPATI KARO

RPJMD 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARO



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
22. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Karo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun

2029.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
20. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

RPJM DAERAH

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- (2) RPJM Daerah berpedoman pada RPJPN, RPJMN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, RPJPD, RTRW Daerah serta memperhatikan KLHS.

Pasal 4

RPJM Daerah menjadi pedoman:

- a. penyusunan RKPD, Renstra, dan Renja PD;
- b. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- c. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2025-2029.

Pasal 5

RPJM Daerah wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 6

- (1) Sistematika RPJM Daerah terdiri dari:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Uraian dari sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJM DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah; dan
 - b. pelaksanaan RPJM Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJM Daerah;

- b. pelaksanaan RPJM Daerah; dan
 - c. hasil RPJM Daerah.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJM Daerah dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar;
 - d. merugikan kepentingan nasional;
 - e. merugikan kepentingan Daerah; dan/atau
 - f. adanya perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau pemekaran daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJM Daerah terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan capaian sasaran Tahunan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

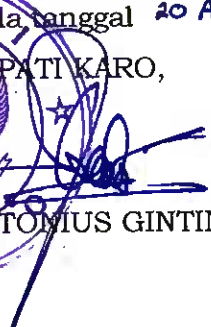
Dalam hal RPJM Daerah belum ditetapkan pada saat penyusunan RKPD, maka RKPD disusun dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING



Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


EDDI SURIANTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025 NOMOR 03.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (2. - 31 / 2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025–2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas pembangunan daerah dan keuangan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan yang terhitung mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan perencanaan pembangunan Daerah tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 menjadi sangat penting dalam keberlanjutan pelaksanaan pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud pedoman dalam penyusunan RKPD termasuk juga sebagai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Sistematika RPJM Daerah berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 03 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DOKUMEN

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025-2029**



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karo
Tahun 2025-2029



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR PETA	xii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.....	I-5
1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029	I-6
1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPIJPID Kabupaten Karo Tahun 2025-2029	I-7
1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara	I-7
1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD	I-8
1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karo	I-8
1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RTRW Kabupaten Karo	I-9
1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RIPPARDA	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penulisan	I-11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	II-16
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-20
2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Pangan.....	II-42
2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-45
2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-47
2.1.1.7. Aspek Demografi	II-49
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-53
2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-53
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua	II-61
2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata.	II-65
2.1.2.4. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	II-70
2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif....	II-71
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah	II-80
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-91

2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-126
2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	II-126
2.2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD	II-127
2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030	II-139
2.2.4. Proyeksi Alternatif Sumber Pendanaan Lain	II-144
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-145
2.3.1. Permasalahan Pembangunan	II-145
2.3.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum mencapai standar optimal	II-146
2.3.1.2 Kinerja produktivitas ekonomi belum optimal.....	II-149
2.3.1.3. Sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal..	II-158
2.3.1.4. Stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan HAM belum mencapai kondisi yang ideal.....	II-159
2.3.1.5. Ketahanan sosial, budaya, ekologi dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal.....	II-161
2.3.2. Isu Strategis	II-170
2.3.2.1 Isu Global.....	II-170
2.3.2.2. Isu Strategis Nasional.....	II-174
2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara	II-179
2.3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Karo.....	II-183
2.3.2.5. Isu Strategis Kabupaten Karo	II-184
2.3.2.6. Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026	II-200
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	
III-1	
3.1. Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	III-1
3.1.1. Visi Pembangunan Daerah	III-1
3.1.2. Misi Pembangunan Daerah.....	III-4
3.1.3. Tujuan dan Sasaran	III-10
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-23
3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	III-23
3.2.2. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah .	III-50
3.2.3. Program Strategis Daerah.....	III-50
3.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah	III-66
3.2.5. Arah Kebijakan Pengembangan Kewilayahan.....	III-80
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	
IV-1	
4.1. Program Perangkat Daerah.....	IV-2
4.1.1. Urusan Pendidikan.....	IV-4
4.1.2. Urusan Kesehatan.....	IV-4
4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ...	IV-5
4.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman...	IV-5
4.1.5. Urusan Pertanahan	IV-6
4.1.6. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.....	IV-6
4.1.7. Urusan Sosial.....	IV-7
4.1.8. Urusan Tenaga Kerja.....	IV-7

4.1.9. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	IV-7
4.1.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	IV-8
4.1.11. Urusan Pangan	IV-9
4.1.12. Urusan Perikanan	IV-9
4.1.13. Urusan Lingkungan Hidup	IV-10
4.1.14. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	IV-10
4.1.15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.....	IV-11
4.1.16. Urusan Perhubungan.....	IV-11
4.1.17. Urusan Komunikasi dan Informatika.....	IV-12
4.1.18. Urusan Statistik.....	IV-12
4.1.19. Urusan Persandian.....	IV-12
4.1.20. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	IV-12
4.1.21. Urusan Kepemudaan dan Olahrag.....	IV-13
4.1.22. Urusan Kebudayaan.....	IV-13
4.1.23. Urusan Pariwisata.....	IV-13
4.1.24. Urusan Perpustakaan	IV-14
4.1.25. Urusan Kearsipan	IV-14
4.1.26. Urusan Pertanian.....	IV-14
4.1.27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	IV-15
4.1.28. Urusan Perdagangan.....	IV-15
4.1.29. Urusan Perindustrian.....	IV-15
4.1.30. Unsur Sekretariat Daerah	IV-15
4.1.31. Unsur Sekretariat DPRD	IV-16
4.1.32. Unsur Perencanaan.....	IV-16
4.1.33. Unsur Penelitian dan Pengembangan	IV-16
4.1.34. Unsur Keuangan	IV-16
4.1.35. Unsur Kepegawaian.....	IV-16
4.1.36. Unsur Pendidikan dan Pelatihan	IV-17
4.1.37. Unsur Pengawasan.....	IV-17
4.1.38. Unsur Kewilayahan	IV-17
4.1.39. Unsur Pemerintahan Umum.....	IV-17
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-104
4.2.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Karo.....	IV-104
4.2.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo	IV-104
4.2.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo	IV-106
BAB V PENUTUP	V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.....	V-2
5.1.2. Kerangka Pengendalian dan Penjaminan Kualitas Pembangunan Daerah	V-3
5.1.3. Sistem Insentif	V-12
5.1.4. Mekanisme Perubahan	V-13
5.1.5. Komunikasi Publik.....	V-14
5.2. Pembiayaan Pembangunan.....	V-15
5.3. Kesimpulan	V-16

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo	II-2
Tabel 2.2	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Karo	II-5
Tabel 2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo	II-7
Tabel 2.4	Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Karo	II-8
Tabel 2.5	Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Karo 2020-2024..	II-9
Tabel 2.6	Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo	II-11
Tabel 2.7	Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo	II-11
Tabel 2.8	Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-12
Tabel 2.9	Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-13
Tabel 2.10	Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-14
Tabel 2.11	Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-15
Tabel 2.12	Potensi Bahaya Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-16
Tabel 2.13	Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Kabupaten Karo	II-17
Tabel 2.14	Hasil Produksi Perkebunan Kabupaten Karo Tahun 2022-2024 (Ribuan ton)	II-17
Tabel 2.15	Realisasi Intensifikasi Tanaman Palawija (Ha) Tahun 2024.....	II-18
Tabel 2.16	Populasi Ternak Kabupaten Karo Menurut Kecamatan Tahun 2024 (ekor)	II-18
Tabel 2.17	Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-19
Tabel 2.18	Jenis, Jumlah Produksi dan Nilai Kalori Bahan Pangan di Kabupaten Karo.....	II-20
Tabel 2.19	Jenis Penutupan Lahan 2022 dan Alokasi Ruang pada RTRW	II-23
Tabel 2.20	Ketersediaan Pangan 2022 dan Proyeksi Ketersediaan Pangan Tahun 2025-2029	II-23
Tabel 2.21	Kebutuhan Pangan 2022 dan Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2025-2029	II-24
Tabel 2.22	Status Daya Dukung Pangan 2022 dan Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	II-24
Tabel 2.23	Ketersediaan Air Kabupaten Karo	II-25
Tabel 2.24	Kebutuhan Air Domestik dan Penggunaan Lahan Kabupaten Karo Tahun 2023.....	II-25
Tabel 2.25	Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Karo Tahun 2023	II-26
Tabel 2.26	Status Ketersediaan Air Kabupaten Karo	II-28
Tabel 2.27	Proyeksi Kebutuhan Air Domestik dan Lahan Kabupaten Karo	II-30
Tabel 2.28	Proyeksi Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	II-30
Tabel 2.29	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Karo	II-31

Tabel 2.30	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih	II-32
Tabel 2.31	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Per Kecamatan	II-33
Tabel 2.32	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Karo	II-34
Tabel 2.33	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Karo	II-36
Tabel 2.34	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah di Wilayah Kabupaten Karo	II-37
Tabel 2.35	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Wilayah Kabupaten Karo ..	II-38
Tabel 2.36	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Budaya Ekowisata di Wilayah Kabupaten Karo	II-39
Tabel 2.37	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah di Wilayah Kabupaten Karo Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2.38	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Karo	II-41
Tabel 2.39	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-43
Tabel 2.40	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-43
Tabel 2.41	Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-44
Tabel 2.42	Persentase Penduduk berakses air minum layak dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 ..	II-45
Tabel 2.43	Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.44	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.45	Capaian Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-46
Tabel 2.46	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-47
Tabel 2.47	Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-48
Tabel 2.48	Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-49
Tabel 2.49	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-49
Tabel 2.50	Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo 2020-2024.....	II-50
Tabel 2.51	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Karo 2020-2024.....	II-50
Tabel 2.52	Kepadatan Penduduk Kabupaten Karo 2020-2024.....	II-51
Tabel 2.53	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2024.....	II-51

Tabel 2.54	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	II-53
Tabel 2.55	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	II-53
Tabel 2.56	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-54
Tabel 2.57	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo.....	II-55
Tabel 2.58	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo.....	II-56
Tabel 2.59	PDRB perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-56
Tabel 2.60	Gini Ratio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-57
Tabel 2.61	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-60
Tabel 2.62	Realisasi Rencana Indikator Bidang Kesehatan untuk daerahdi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-63
Tabel 2.63	Realisasi SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-64
Tabel 2.64	Realisasi SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo Tahun 2021-2024.....	II-69
Tabel 2.65	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-71
Tabel 2.66	Kegiatan Keagamaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-71
Tabel 2.67	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-72
Tabel 2.68	Persentase organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-75
Tabel 2.69	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024.....	II-75
Tabel 2.70	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-76
Tabel 2.71	Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-76
Tabel 2.72	Perkembangan dan Pengobatan TBC di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-77
Tabel 2.73	Data Penerima Bantuan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-78
Tabel 2.74	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	II-79
Tabel 2.75	Realisasi SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-79
Tabel 2.76	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Karo Tahun 2019-2024.....	II-81
Tabel 2.77	Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.78	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-83
Tabel 2.79	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-83
Tabel 2.80	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2019-2023.....	II-84
Tabel 2.81	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo Tahun	

	2020-2024.....	II-85
Tabel 2.82	Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-85
Tabel 2.83	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-87
Tabel 2.84	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah	II-88
Tabel 2.85	Net Ekspor Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 (miliar Rp)	II-89
Tabel 2.86	Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-89
Tabel 2.87	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.88	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-90
Tabel 2.89	Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-90
Tabel 2.90	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Karo Tahun 2022-2024.....	II-91
Tabel 2.91	Indeks Integritas Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-93
Tabel 2.92	Capaian Indeks SPBE Kabupaten Karo Tahun 2021-2024.....	II-93
Tabel 2.93	Persentase Capaian Aksi HAM	II-95
Tabel 2.94	Indikator Demokrasi, Narkoba dan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-95
Tabel 2.95	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-95
Tabel 2.96	Realisasi Persentase Penegakan Perda dan Perkada Di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-96
Tabel 2.97	Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-96
Tabel 2.98	Capaian SPM Kebencanaan Kab. Karo Tahun 2020-2024.....	II-97
Tabel 2.99	IDSD Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-98
Tabel 2.100	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2024.....	II-102
Tabel 2.101	Realisasi APBD Tahun 2020-2024	II-127
Tabel 2.102	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.103	Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026-2030.....	II-141
Tabel 2.104	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	II-198
Tabel 2.105	Capaian Indikator Makro Kabupaten Karo Tahun 2022-2024.....	II-200
Tabel 2.106	Capaian Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 Tahun Ketiga (Tahun 2024) ...	II-202
Tabel 3.1	Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN	III-8
Tabel 3.2	Sasaran Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Karo	

	Tahun 2025-2029.....	III-9
Tabel 3.3	Pemetaan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029	III-15
Tabel 3.4	Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	III-17
Tabel 3.5	Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD Tujuan, Sasaran dan Strategi RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	III-22
Tabel 3.6	Penyelarasan sasaran pembangunan RPJMD Karo dengan sasaran pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.....	III-24
Tabel 3.7	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	III-45
Tabel 3.8	Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2026-2030.....	III-51
Tabel 3.9	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Karo	III-74
Tabel 3.10	Potensi Wisata berdasarkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	III-95
Tabel 3.11	Komoditi Unggulan di setiap Kecamatan di Kabupaten Karo	III-96
Tabel 3.12	Potensi Wisata Prioritas Provinsi Sumatera Utara	III-98
Tabel 3.13	Penyelarasan PHTC/PSD Kabupaten Karo terhadap Proyek Strategis Nasional	III-101
Tabel 4.1	Rencana Pagu Indikatif Bidang Urusan Tahun 2026-2030.....	IV-19
Tabel 4.2	Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2030.....	IV-21
Tabel 4.3	Dukungan Daerah terhadap Astacita/Prioritas Nasional Tahun 2025-2029	IV-61
Tabel 4.4	Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Utama dalam RPJMN 2025-2029	IV-68
Tabel 4.5	Dukungan Program Daerah terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2030 ...	IV-69
Tabel 4.6	Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.....	IV-81
Tabel 4.7	Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Karo Tahun 2025-2030.....	IV-104
Tabel 4.8	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.....	IV-105
Tabel 4.9	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2030	IV-107
Tabel 4.10	Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Karo dengan sasaran pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara.....	IV-129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1.2	Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah	I-6
Gambar 2.1	Persentase Produksi Bahan Pangan dari Berbagai Sektor di Kabupaten Karo.....	II-22
Gambar 2.2	Peta Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Wilayah Kabupaten Karo.....	II-35
Gambar 2.3	Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 dan 2023	II-88
Gambar 2.4	Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kab. Karo Tahun 2024 per Pilar	II-100

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Karo	II-26
Grafik 2.2. Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Karo	II-27
Grafik 2.3. Daya Dukung Air Kabupaten Karo.....	II-28
Grafik 2.4. Status Air Kabupaten Karo	II-29
Grafik 2.5. Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-44
Grafik 2.6. Piramida Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2024	II-51
Grafik 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2020-2024	II-54
Grafik 2.8. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-57
Grafik 2.9. Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-58
Grafik 2.10. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-59
Grafik 2.11. Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-59
Grafik 2.12. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-60
Grafik 2.13. Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024.....	II-61
Grafik 2.14. Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Karo Tahun 2020- 2024	II-62
Grafik 2.15. Perkembangan Prevalensi Stunting Kab. Karo Berdasarkan Data SSGI/SKi	II-62
Grafik 2.16. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024	II-65
Grafik 2.17. Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024	II-66
Grafik 2.18. Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat Nasional untuk Kemampuan Literasi SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2024-2025	II-67
Grafik 2.19. Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat Nasional untuk Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2023-2024	II-68
Grafik 2.20. Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024	II-68
Grafik 2.21. Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Di Sumatera Utara Tahun 2023	II-69
Grafik 2.22. Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024.....	II-70
Grafik 2.23. Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2022-2023.....	II-73
Grafik 2.24. Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2019- 2023	II-73
Grafik 2.25. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024	II-74

Grafik 2.26. Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-81
Grafik 2.27. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-82
Grafik 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-84
Grafik 2.29. Bagan Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	II-92
Grafik 2.30. Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-127
Grafik 2.31. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-128
Grafik 2.32. Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Kabupaten Karo Tahun 2020-2024.....	II-129
Grafik 2.33. Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-130
Grafik 2.34. Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-131
Grafik 2.35. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-132
Grafik 2.36. Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-132
Grafik 2.37. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-133
Grafik 2.38. Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-134
Grafik 2.39. Perkembangan Belanja Transfer Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-134
Grafik 2.40. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-135
Grafik 2.41. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024	II-136

DAFTAR PETA

Peta 2.1	Administrasi Kabupaten Karo.....	II-1
Peta 2.2	Topografi Kabupaten Karo	II-3
Peta 2.3	Geologi Kabupaten Karo	II-4
Peta 2.4	Peta Sebaran Mata Air Kabupaten Karo.....	II-5
Peta 2.5	Peta Ketersediaan Air Tanah Kabupaten Karo.....	II-6
Peta 2.6	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Karo.....	II-6
Peta 2.7	Peta Tutupan Lahan Kabupaten Karo.....	II-8
Peta 2.8	Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo	II-11
Peta 2.9	Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo	II-12
Peta 2.10	Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo.....	II-13
Peta 2.11	Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo	II-14
Peta 2.12	Peta Selisih Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air dalam setiap grid 5” x 5” di Kabupaten Karo Tahun 2023	II-27
Peta 2.13	Sebaran Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan	II-32
Peta 2.14	Sebaran Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih	II-33
Peta 2.15	Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Wilayah Kabupaten Karo	II-34
Peta 2.16	Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Karo	II-36
Peta 2.17	Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah di Wilayah Kabupaten Karo	II-37
Peta 2.18	Sebaran Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Wilayah Kabupaten Karo.....	II-38
Peta 2.19	Sebaran Jasa Lingkungan Budaya Ekowisata di Wilayah Kabupaten Karo	II-40
Peta 2.20	Sebaran Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah di Wilayah Kabupaten Karo.....	II-41
Peta 2.21	Sebaran Jasa Lingkungan Pendukung Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Karo.....	II-42

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tidak lanjutnya, pemerintah daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah juga harus mendukung terhadap pencapaian target pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, maka daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang oleh pemerintah daerah sesuai dengan periodisasi dan substansinya baik untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, program kepala daerah Bapak Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp. OG., M. Kes dan Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, S.P. masa bakti tahun 2025-2030 yang telah dilantik oleh Presiden RI Bapak Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025 berdasarkan hasil Pemilukada Serentak pada tanggal 27 Nopember 2024. Penyusunan RPJMD tersebut disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJMD Tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan

Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pelantikan kepala daerah terpilih. Apabila penyelenggara pemerintahan daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RPJMD dalam waktu tersebut, maka kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) di Aceh dan Papua dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya selama 3 (tiga) bulan.

Penyusunan RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan

penyusunan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, maka daerah berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, dimana sebagian substansinya dapat dijadikan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang juga akan dijadikan pedoman dalam penyusunan visi dan misi serta program prioritas calon kepala daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang mengacu pada RPJPD Tahun 2025-2045.

Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Karo tahun 2025-2029 merupakan bahan masukan utama dalam penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagai periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2025-2045. Rancangan ini juga disusun berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang periodisasinya disesuaikan dengan diselenggarakannya Pilkada serentak Tahun 2024 dan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk dari akademisi dan masyarakat, serta mempertimbangkan dinamika geostrategis dan analisis atas berbagai tantangan utama dalam pembangunan daerah yang akan dihadapi Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Penyusunan rancangan awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, penyusunan rancangan awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan. Rancangan Awal disusun dan disempurnakan dengan hasil konsultasi publik, pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Karo serta hasil konsultasi ke Gubernur Sumatera Utara. Rancangan Awal yang telah disempurnakan selanjutnya menjadi dasar bagi perangkat daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hasil dari penyempurnaan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan Renstra menjadi masukan untuk perumusan Rancangan

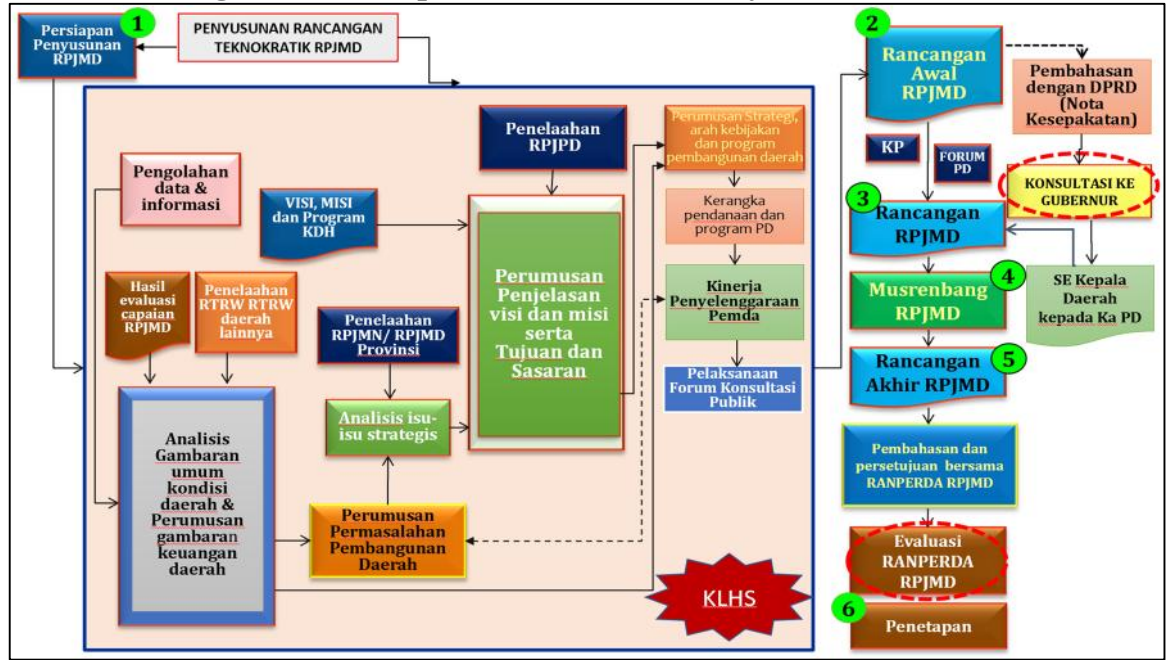
RPJMD dan siap untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD. Hasil musrencang RPJMD menjadi masukan untuk penyempurnaan menjadi rancangan Akhir RPJMD.

Rancangan Akhir RPJMD selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD. Setelah disetujui, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dievaluasi oleh Gubernur. Hasil evaluasi Gubernur menjadi dasar penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029.

Selanjutnya proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029. Sebagian substansi Renstra PD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan mengintegrasikan substansi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah ditindaklanjuti dengan penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah dengan menggunakan asas-asas pembangunan berkelanjutan serta diperkuat dengan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dokumen ini juga sudah memasukkan kebijakan umum pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah.

Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 01);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

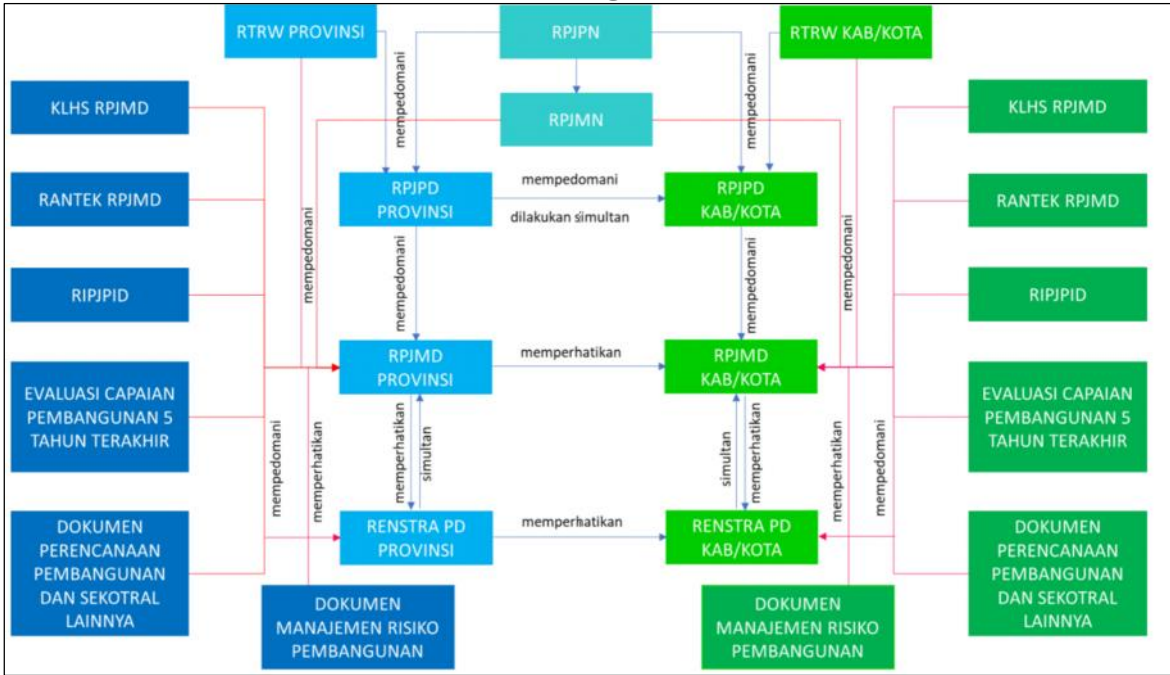
1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Penyusunan RPJMD ini merupakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu RPJMD harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), bahwa RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah, sehingga dalam penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap I Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah. Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kemudian, pelaksanaan RPJMD ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun Renja PD. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Gambar 1.2
Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah



Sumber: Inmendagri Nomor 02 Tahun 2025

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Karo disusun mengacu dan diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sebagai bentuk sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam pencapaian tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagai satu kesatuan dokumen perencanaan pembangunan yang harus memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Hal ini tentu dilaksanakan melalui penyelarasan misi Bupati dan wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Karo

Tahun 2025-2029 dengan misi Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Visi dan misi Kabupaten Karo dalam RPJMD harus mendukung pencapaian visi misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara. Jika provinsi menekankan pada penguatan ekonomi hijau dan inklusif, Kabupaten Karo harus menyesuaikan program daerahnya ke arah tersebut. RPJMD Provinsi menetapkan prioritas pembangunan seperti penguatan sektor pertanian, pariwisata, infrastruktur dan SDM. Kabupaten Karo sebagai daerah agraris dan destinasi wisata unggulan seperti Berastagi, harus mensinergikan program pembangunan daerah dengan arah tersebut.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RIPJPID Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (RIPJPID) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. RIPJPID Kabupaten Karo disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yaitu Tahun 2025-2029. RIPJPID Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 disusun untuk mempercepat pencapaian target beberapa pencapaian program tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)” dan “Mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui optimalisasi pemanfaatan potensi lokal berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)”. Penyusunan RIPJPID Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 masih dalam tahap Rancangan RIPJPID Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 dengan tema dan prioritas yang sudah disepakati. RIPJPID Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029. Penyelarasan dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang dengan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 untuk mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara tersebut, meliputi antara lain:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan transportasi, rencana sistem jaringan energi, rencana sistem jaringan telekomunikasi, rencana sistem jaringan sumber daya air, serta rencana sistem jaringan prasarana lingkungan;
3. Rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
4. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan
 - b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun–Batubara–Asahan
 - c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
 - d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya
 - e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias
- Dari kelima Kawasan Strategis provinsi tersebut Kabupaten Karo di arahkan sebagai kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan.
5. Arahkan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
 6. Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RPJPD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah pada periode pertama tersebut.

Selanjutnya RPJMD nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang menjabarkan RPJMD menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 ini nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Karo yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam pelaksanaan tahunannya, RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karo

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPJMD. KLHS adalah kajian yang memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak dari pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan kompensasi program dan kegiatan.

Selain itu, RPJMD juga memperhatikan berbagai kesepakatan internasional dan dokumen perencanaan multisektor, antara lain Standar Pelayanan Minimal (SPM), RAD *Sustainable Development Goal's* (SDG's), Strategi Penanggulangan Kemiskinan (SPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan, rencana, dan/ atau program pada tingkat nasional, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan KLHS merupakan mandat dari UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan tata cara penyelenggaraannya diatur di dalam PP 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Karo menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung dan melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang tercermin dalam berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang mengedepankan prinsip inklusif, partisipatif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Salah satunya dengan mengintegrasikan SDGs dalam dokumen perencanaan pembangunan yaitu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RTRW Kabupaten Karo

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata dan mitigasi bencana pada dataran tinggi Bukit Barisan. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan penelaahan RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW. RTRW Kabupaten Karo menjadi instrumen yang efektif untuk menjaga keberlanjutan lingkungan, mendukung pengendalian perubahan iklim, dan memastikan bahwa daya dukung lingkungan tetap terjaga dalam setiap rencana pembangunan daerah. Hal ini juga akan membantu Kabupaten Karo menjadi model daerah yang seimbang dalam aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. RPJMD Kabupaten Karo memastikan bahwa alih fungsi lahan dikendalikan secara ketat, sesuai batasan RTRW, untuk mendukung keberlanjutan lingkungan hidup dan pengurangan emisi karbon.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara:

a. Menelaah rencana struktur ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

b. Menelaah rencana pola ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

c. Menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.

Program pemanfaatan ruang adalah program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Langkah-langkah penyelarasan antara RTRW dan RPJMD sebagai berikut:

- 1) Merumuskan visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD dengan memperhatikan Tujuan Penataan Ruang pada RTRW melalui pencermatan isi substansi arah pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 2) Merumuskan arah kebijakan dalam RPJMD dengan mempedomani arah kebijakan dan strategi pada RTRW melalui pencermatan isi substansi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- 3) Merumuskan sasaran pokok dalam RPJMD dengan memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW yang menjadi program prioritas daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam rencana tata ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan.

1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Karo dengan RIPPARDA

RIPPARDA atau Rencana Induk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022-2025. Pembangunan kepariwisataan meliputi destinasi pariwisata daerah, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan. Adapun tujuan RIPPARDA adalah sebagai pedoman dan arahan dalam pembangunan kepariwisataan untuk:

- a. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. perluasan lapangan kerja;
- d. pelestarian alam dan lingkungan;
- e. pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- f. peningkatan citra daerah;
- g. peningkatan rasa cinta tanah air;
- h. penguatan kearifan lokal; dan
- i. peningkatan persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

RPJMD dan RIPPARDA memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pariwisata. Sinkronisasi antara keduanya sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Karo berjalan sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah Kabupaten Karo (pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya) dalam mewujudkan visi misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karo yang unggul dan sejahtera.

Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD;
3. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Karo di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Menjadi instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan

menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan

5. Memungkinkan terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagai perwujudan dari visi misi Kepala Daerah yang akan diimplementasikan melalui program dan kegiatan dengan tolok ukur indikator yang menjadi acuan dalam penentuan arah keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan secara ringkas tentang isi dokumen secara keseluruhan meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Karo sebagai dasar awal dalam penyusunan dokumen RPJMD yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah dan Aspek Pelayanan Umum. Bagian ini juga menjelaskan gambaran tentang pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan dalam 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2020-2024) yang dijelaskan dalam kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan serta proyeksi keuangan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Lebih lanjut bagian ini juga menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi lainnya untuk memahami permasalahan daerah yang paling pokok dan isu strategis yang akan dipecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi permasalahan pembangunan dan isu strategis.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Pasangan Kepala Daerah yang menjadi fondasi transformasi pembangunan tahap pertama untuk jangka panjang daerah. Visi dan misi disusun dengan pendekatan teknokratik untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan. Tujuan yang diturunkan dari visi dan misi mencakup fokus pembangunan seperti ekonomi inklusif, peningkatan infrastruktur, produktivitas daerah, kualitas lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran disusun untuk menggambarkan hasil konkret dari penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun. Strategi pembangunan yang komprehensif, termasuk tahapan, lokus, dan program prioritas, dirancang untuk menghadapi tantangan lingkungan dinamis dan mencapai sasaran RPJMD, dengan penekanan pada pencapaian outcome dan output yang berkelanjutan dan menyeluruh serta terukur.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bagian ini menguraikan untuk alokasi program perangkat daerah yang mencakup rencana program dari tahun 2026 hingga 2030, dengan penekanan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 untuk kepala daerah periode 2030-2034. Program perangkat daerah ini mencakup seluruh program dalam Renstra Perangkat Daerah, termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 menjadi tahun transisi yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang merangkum kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029, termasuk konsistensi perencanaan dan pendanaan, serta kaitannya dengan perencanaan pembangunan lainnya. Dibahas juga skema pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik untuk mendukung implementasi. Bab ini juga menjelaskan pembiayaan pembangunan dan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum hasil dan rekomendasi untuk pelaksanaan RPJMD yang berkelanjutan dan terukur.

Tabel 2.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase thd Luas Kab. (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kel/Desa
1	Mardinding	325,30	14,740	12	-	12
2	Laubaleng	184,16	8,345	15	-	15
3	Tigabinanga	176,44	7,995	19	1	20
4	Juhar	220,02	9,970	25	-	25
5	Munte	140,63	6,372	22	-	22
6	Kutabuluh	259,38	11,753	16	-	16
7	Payung	31,36	1,421	8	-	8
8	Tiganderket	67,17	3,044	17	-	17
9	Simpang Empat	65,13	2,951	17	-	17
10	Naman Teran	121,89	5,523	14	-	14
11	Merdeka	42,45	1,923	9	-	9
12	Kabanjahe	34,31	1,555	8	5	13
13	Berastagi	33,76	1,530	6	4	10
14	Tigapanah	127,04	5,756	26	-	26
15	Dolat Rayat	22,85	1,035	7	-	7
16	Merek	229,36	10,393	19	-	19
17	Barusjahe	125,63	5,693	19	-	19
Jumlah		2.206,88	100	259	10	269

Sumber: *Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi, Pemerintahan, dan Pulau.*

Dari tabel pembagian wilayah administrasi tersebut dapat dilihat bahwa kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Mardinding dengan luas 325,301 km² (14,740 persen dari luas kabupaten) dan luas terkecil adalah Kecamatan Dolatrayat seluas 22,852 km² (1,035 persen dari luas kabupaten).

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis 2°50’ sampai 3°19’ lintang utara dan 97°55’ sampai 98°38’ bujur timur, dan berada pada wilayah dataran tinggi bukit barisan.

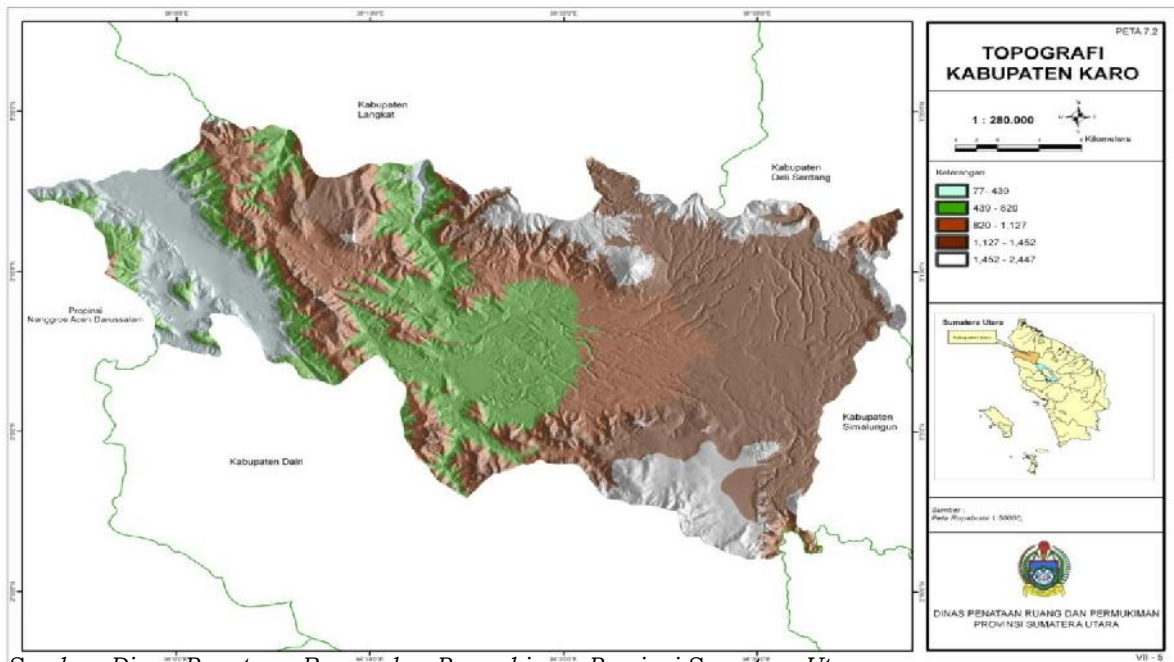
Letak geografis Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata. Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris yang ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk lahan sawah seluas 10.750 hektar, luas lahan pertanian bukan sawah seluas 191.010 hektar dan luas lahan bukan pertanian seluas 18.928,00 hektar.

A. Topografi

Kondisi topografi adalah bentuk permukaan bumi dan karakteristik fisiknya, seperti gunung, lembah, dan lainnya. Tujuan utama topografi adalah mengetahui posisi geografis dan ketinggian di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di gunung Sinabung.

Wilayah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal.

Peta 2.2
Topografi Kabupaten Karo



Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

B. Geologi

Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat bermacam-macam batuan dan diantar lapisan-lapisan kerak bumi terdapat air yang digunakan sehari-hari, sedangkan peta geologi adalah gambaran kecil permukaan bumi, gambaran ini mengenai informasi sebaran dan juga jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain-lain yang berhubungan dengan adanya sumber daya.

Keadaan geologi di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- Qh: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini banyak terdapat di Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- Qvsn, Erupsi Sinabung: Lava andesit-dasit. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Tiganderket dan Payung.
- Qvba, Erupsi Sibayak, Satuan Sibayak: Andesit, Dasit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Berastagi dan Merdeka.
- Qvbr, Erupsi Barus: Lava andesit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah utara Kecamatan Dolat Rayat.
- Qvbs, Erupsi Sibayak, Satuan Singkut: Andesit, dasit, mikrodiorit, tufa. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Simpang Empat, Payung, Dolat Rayat, Berastagi, Merdeka, Naman Teran dan Tigapanah.
- Qpm, Formasi Melaboh: Gravel, pasir dan lempung
- Qvss, Erupsi Sipiso-piso: Dasit dan Andesit. Jenis batuan ini terdapat di bagian Timur Kecamatan Merek.
- Qpk, Formasi Kotacane: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- Qvtsu, Erupsi Toba, Satuan Sibutar: Campuran lava riolitik dan piroklastik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Merek.
- Qvt, Erupsi Toba: Tufa riodasit sebagian terelaskan. Jenis batuan ini merupakan jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Karo. Hampir semua kecamatan memiliki jenis batuan ini, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah Kecamatan Merek, Tiga Panah, Munte dan Kutabuluh.

dalam bentuk danau yakni Danau Lau Kawar di Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.

Kabupaten Karo merupakan daerah hulu bagi sejumlah sungai primer di Sumatera Utara. Sungai-sungai di Kabupaten Karo termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli, DAS Wampu, dan DAS-DAS lainnya.

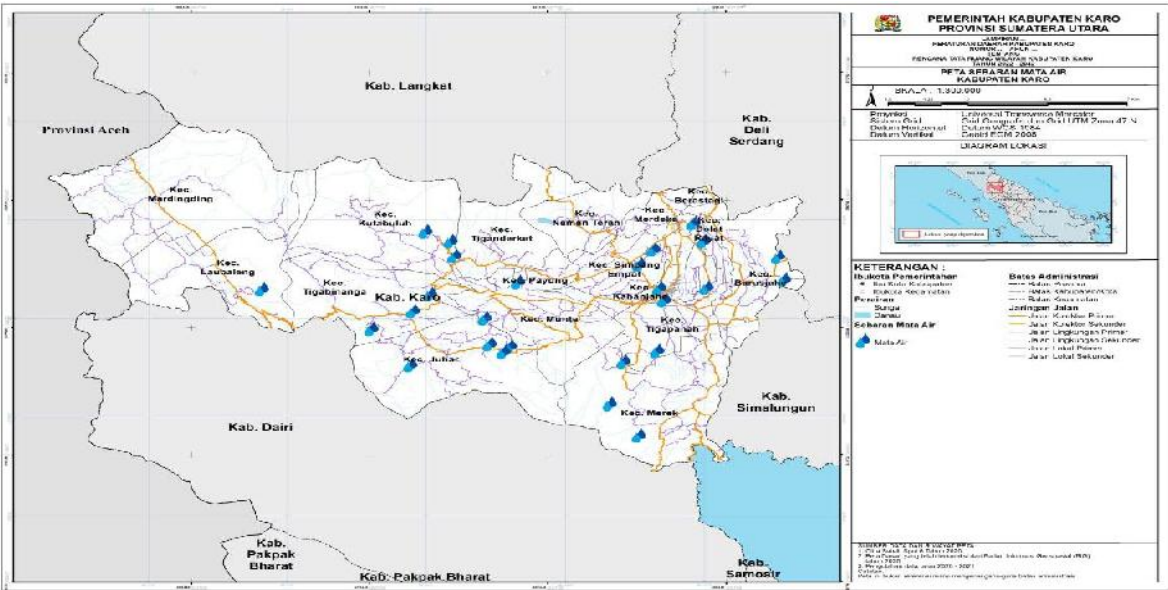
Tabel 2.2
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Karo

No	DAS	Sub DAS	Luas (Ha)
1	Belumai	Belumai	10,38
2	Deli	Lau Petani	1.417,66
3	Percut	Percut	2.898,94
4	Singkil	➤ Lau Gunung/Lau Bengap	43.895,43
		➤ Lau Renun Hilir	2.170,26
		➤ Lau Renun Hulu	150,73
		➤ Lau Soraya	1.733,13
		➤ Lau Pakam	32.713,33
			80.662,88
5	Ular	Buaya	28,19
6	Wampu	➤ Lau Bekulap	81,52
		➤ Lau Biang/Lau Dah - Lau Cimba	17.585,86
		➤ Lau Meriah/Lau Mbelin	85.994,00
		➤ Lau Tegah	10.506,72
		➤ Sei Bingei	9.015,38
			206,65
			3.159,87
			126.550,00
7	Asahan	Aek Bolon	8.049

Sumber: RTRW Kabupaten Karo Tahun 2022-2042

Selanjutnya, mata air mempunyai manfaat penting dalam penyediaan air baku. Potensi sebaran mata air di Kabupaten Karo hamper merata di seluruh kecamatan.

Peta 2.4
Peta Sebaran Mata Air Kabupaten Karo

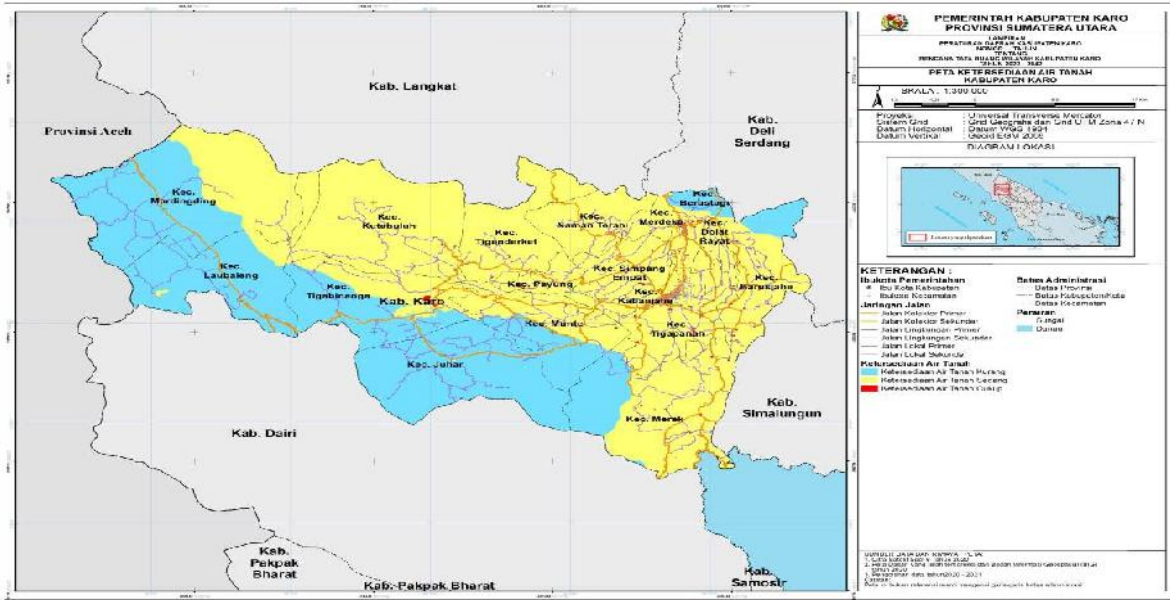


Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo

Selain air tanah, potensi air tanah di Kabupaten Karo diperoleh melalui sumur bor dan mata air. Untuk sumur bor terbagi menjadi dua jenis yaitu sumur bor yang dibangun oleh masyarakat dan sumur bor yang dibangun oleh pihak provinsi dan pusat. Sumur bor yang dibangun oleh masyarakat memiliki debit air 0-10 m³/jam, sedangkan sumur bor yang dibangun oleh pihak provinsi memiliki debit air 0-150 m³/jam. Untuk mata air yang terdapat di Kabupaten Karo memiliki debit 25 liter/detik yang dikelola oleh PT. Tirta Sibayakindo. Adapun mata air yang terdapat di

Kabupaten Karo tersebar hampir di seluruh kecamatan yang dapat dilihat dari peta di bawah.

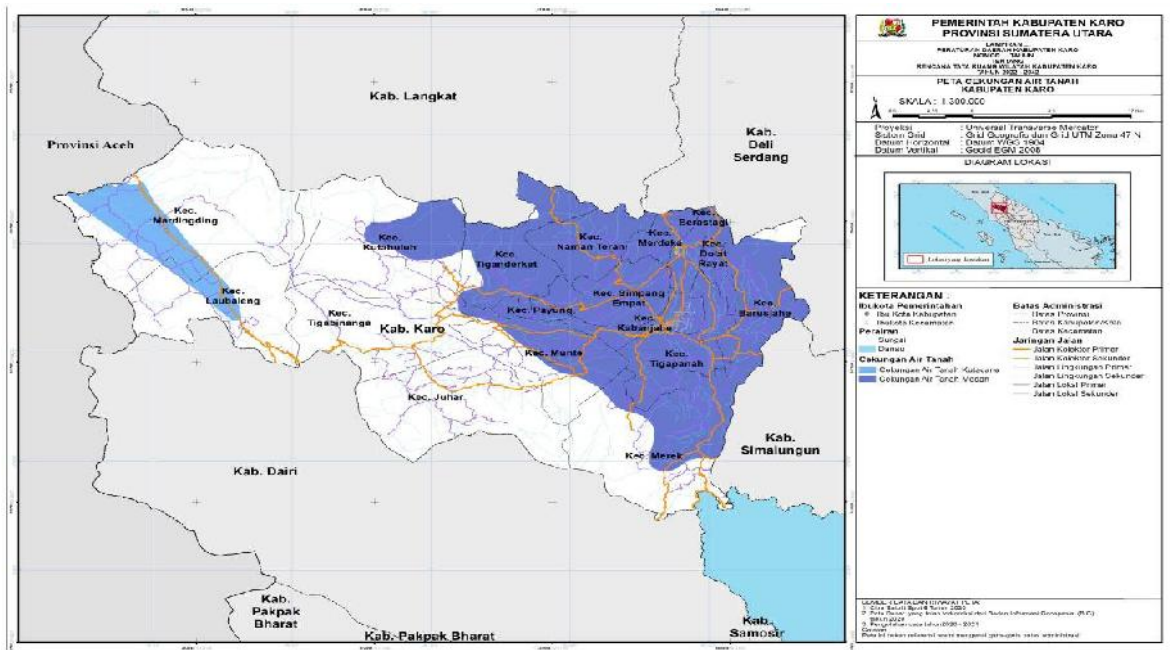
Peta 2.5
Peta Ketersediaan Air Tanah Kabupaten Karo



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo

Persebaran mata air di Kabupaten Karo dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah yang mengalami proses geologi di bawah tanah. Adapun ketersediaan air tanah di Kabupaten Karo dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu ketersediaan air kurang, ketersediaan air sedang, dan ketersediaan air cukup. Adapun wilayah yang memiliki ketersediaan air kurang berada di sebagian wilayah Kecamatan Mardinding, sebagian wilayah Kecamatan Lau Baleng, sebagian wilayah Kecamatan Tigabinanga, Juhar, Munte, dan sebagian wilayah Kecamatan Berastagi dan Dolat Rayat. Secara keseluruhan, wilayah Kabupaten Karo didominasi oleh ketersediaan air sedang yang tersebar di seluruh kecamatan. Sedangkan untuk cekungan air tanah di Kabupaten Karo terbagi menjadi 2 bagian yaitu cekungan air tanah Kutacane dan cekungan air tanah Medan. Untuk peta ketersediaan air tanah dan cekungan air tanah di Kabupaten Karo dapat dilihat dari peta.

Peta 2.6
Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Karo



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

D. Klimatologi

Kabupaten Karo terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga keadaan iklim di Kabupaten Karo tergolong ke dalam daerah beriklim tropis yang mempunyai 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tipe iklim daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi *Oldeman* dengan bulan basah lebih tiga bulan dan bulan kering berkisar 2-3 bulan atau A menurut *Koppen* dengan curah hujan rata-rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000-4.000 mm/tahun. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli. Curah hujan dan hari hujan Kabupaten karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo

Bulan (Month)	Jumlah Curah Hujan Number of Precipitation (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari) Number of Rainy Days (day)
Januari/January	348	17
Februari/February	21	2
Maret/March	39	10
April/April	74	15
Mei/May	73	10
Juni/June	206	18
Juli/July	189	12
Agustus/August	346	16
September/September	331	18
Oktober/October	317	12
November/November	395	25
Desember/December	206	15

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2023

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di Kabupaten Karo tahun 2021 tertinggi pada bulan November sebesar 395 mm dan terendah pada bulan Februari sebesar 21 mm. Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi pada bulan November sebanyak 25 hari dan terendah pada bulan Februari sebanyak 2 hari.

Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 17,4^oC-23,6^oC dengan kelembaban udara antara 86,9-117,7 persen. Sedangkan arah angin di Kabupaten Karo terbagi atas dua musim yakni:

- a. Angin berhembus dari arah Barat, kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.
- b. Angin berhembus dari arah Timur dan Tenggara, antara bulan April sampai dengan bulan September.

E. Penggunaan Lahan

Tutupan Lahan di Kabupaten Karo tutupan hutan seluas 78.688,13 Ha atau 36 persen, kemudian perkebunan dan ladang masing-masing 40.427,95 ha dan 62.805,73 ha, atau keduanya 47,22 persen. Lahan non budidaya masih cukup luas sebesar semak belukar seluas 21.598,35 ha atau 9,88 persen. Lahan permukiman hanya seluas 2.939,22 ha atau 1,34 persen. Area yang rawan akan bencana berupa lahan hamparan lahar/lava seluas 1.528 ha atau 0,7 persen.

Tabel 2.4

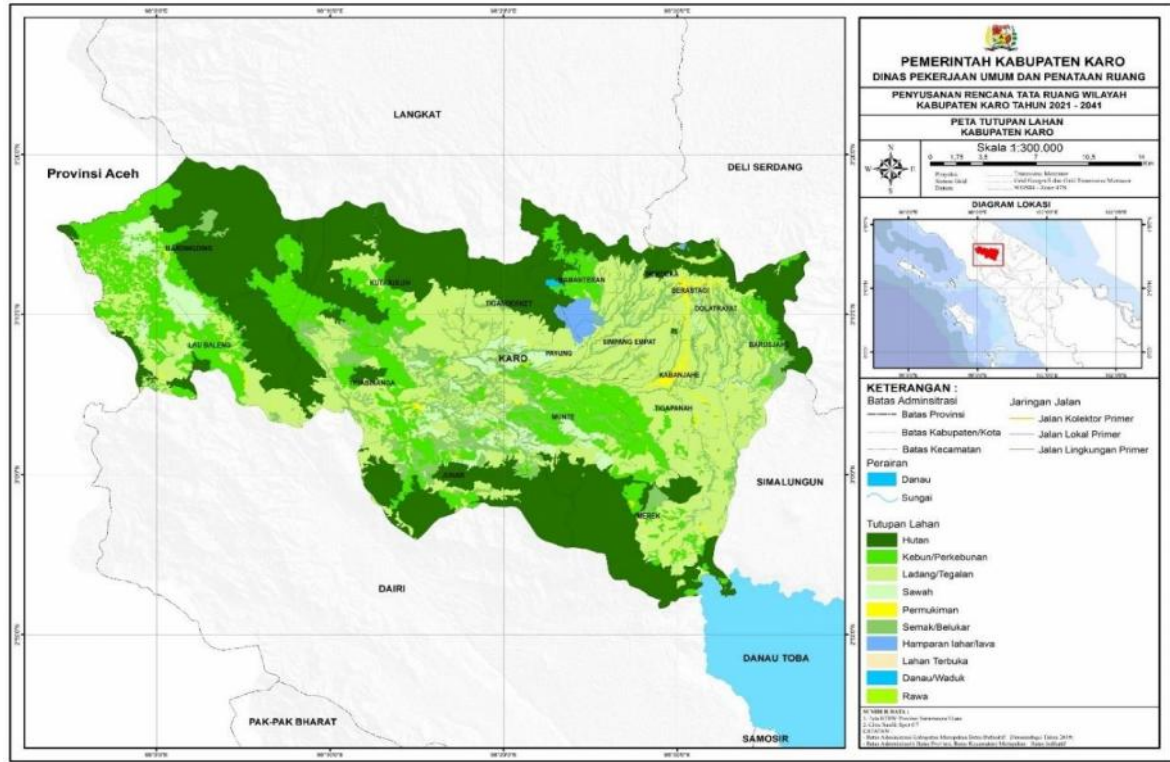
Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Karo

Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
Permukiman	2.939,22	1,34
Kebun/Perkebunan	40.427,95	18,49
Ladang/Tegalan	62.805,73	28,73
Sawah	10.280,39	4,70
Hutan	78.688,13	36,00
Kolam	12,70	0,01
Lahan Terbuka	48,02	0,02
Semak/Belukar	21.598,35	9,88
Hamparan lahar/lava	1.528,73	0,70
Rawa	2,65	0,00
Danau/Waduk	5,71	0,00
Danau	108,20	0,05
Sungai	145,69	0,07
Total	218.591,47	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Karo

Peta 2.7

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Karo



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045

F. Pemanfaatan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo baru ditetapkan pada tahun 2022, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2045. Ketaatan terhadap tata ruang belum dapat dilaksanakan 100 persen, hal ini akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat dan kurang optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2024 ketaatan terhadap tata ruang baru mencapai 73 persen. Oleh karena itu, ke depan pengendalian pemanfaatan ruang dimaksud harus menjadi perhatian untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Tabel 2.5

Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Karo 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketaatan terhadap RTRW (%)	N/A	N/A	72	72	73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo

Kedepannya, kondisi tutupan lahan Kabupaten Karo pasti ada perubahan. Perubahan dimaksud akibat pertumbuhan penduduk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Karo. Lahan pertanian dan perkebunan cenderung akan berkurang, akan tetapi alih fungsi lahan tersebut akan dikendalikan secara ketat. Bahkan pada saat ini Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga mendapat tekanan yang besar akibat kebutuhan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum maupun kepentingan umum lainnya. Alih fungsi lahan dimaksud akan dikendalikan secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Karo merupakan salah satu Kabupaten yang berada pada Kawasan rawan bencana. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Risiko Bencana yang diterbitkan oleh BNPB. Indeks risiko bencana dipengaruhi oleh komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Dari ketiganya, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) ini dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$Risk = Hazard \times Vulnerability/Capacity$$

Dimana *hazard* (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu:

- 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan;
- 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- 4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana;
- 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana;
- 6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan
- 7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (*capacity*) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan uraian pengaruh komponen dalam penurunan indeks risiko bencana serta strategi pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas, capaian penanggulangan bencana dinilai berdasarkan investasi peningkatan komponen kapasitas. Untuk itu, komponen bahaya dan kerentanan diasumsikan konstan atau sama dengan baseline IRBI 2013. Untuk itu, data-data yang digunakan dalam perhitungan IRBI adalah sebagai berikut:

- a) Komponen bahaya: mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011.
- b) Komponen kerentanan: mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011.
- c) Komponen kapasitas: dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah menggunakan perangkat Penilaian IKD (24 Indikator) tahun 2023.

Menurut laman <https://inarisk.bnnpb.go.id/irbi> tingkat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana adalah dalam Tingkatan Sedang. Sistem Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Baru terdiri dari 24 Indikator. Perangkat pengukuran IKD Baru dikembangkan oleh BNPB pada tahun 2020 hingga 2023. IKD Baru terdiri atas empat (4) pilar berdasarkan kuadran bencana, yang meliputi:

1. Standar Tata Kelola, Kebijakan, dan Perencanaan
 2. Standar Pelayanan Kesiapsiagaan dan Penguatan Sosial Ekonomi
 3. Standar Perlindungan dan Pemulihan Infrastruktur Kritis
 4. Standar Pelayanan Kedaruratan Bencana.
- Empat pilar dari IKD Baru dipecah menjadi 24 Indikator. Pada IKD Baru, dikenalkan pembobotan sebagai upaya untuk memodelkan realita dan melalui proses refleksi berbasis pengetahuan dan pengalaman pakar-pakar kebencanaan di Indonesia. Selain itu, alat ukur IKD Baru telah melalui proses ujicoba penilaian di tahun 2021 pada 243 Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan dalam penyempurnaannya. Adapun 24 Indikator pada perhitungan IKD adalah sebagai berikut:
- a. Perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Kelembagaan penanggulangan bencana;
 - c. Pendanaan untuk penanggulangan pengurangan risiko bencana;
 - d. Pengarusutamaan PRB ke dalam pembangunan dan penataan ruang daerah;
 - e. Sistem manajemen data dan informasi;
 - f. Koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana lintas daerah;
 - g. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi penanggulangan bencana bagi aparatur pemerintah daerah;
 - h. Latihan dan kesiapsiagaan masyarakat;
 - i. Sistem peringatan dini bencana daerah;
 - j. Sistem kesehatan aman bencana;
 - k. Sistem pendidikan aman bencana;
 - l. Desa/kelurahan siaga dan tangguh bencana;
 - m. Penguatan peran dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
 - n. Perlindungan sosial dan penyediaan akses asuransi perlindungan sosial dan akses asuransi kebencanaan
 - o. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-air;
 - p. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-energi;
 - q. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-telekomunikasi;
 - r. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur kritis-transportasi;
 - s. Perlindungan dan kesiapan pemulihan ketersediaan kebutuhan pangan;
 - t. Perlindungan dan kesiapan pemulihan infrastruktur hijau;
 - u. Perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana;
 - v. Kesiapan sistem komando dan sumberdaya manusia untuk operasi darurat;
 - w. Kesiapan pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops); dan
 - x. Sistem manajemen logistik, peralatan dan sumber daya darurat.

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana terdapat beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan

dan lahan. Rekapitulasi kajian bahaya di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo

Jenis Bahaya	Bahaya	
	Total Luas (ha)	Kelas
Banjir	7.542	Tinggi
Banjir Bandang	3.185	Tinggi
Cuaca Ekstrim	164.569	Tinggi
Gempa Bumi	212.723	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	66.117	Tinggi
Kekeringan	212.723	Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak	10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung	44.635	Tinggi
Longsor	103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal, antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan sejenisnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia.

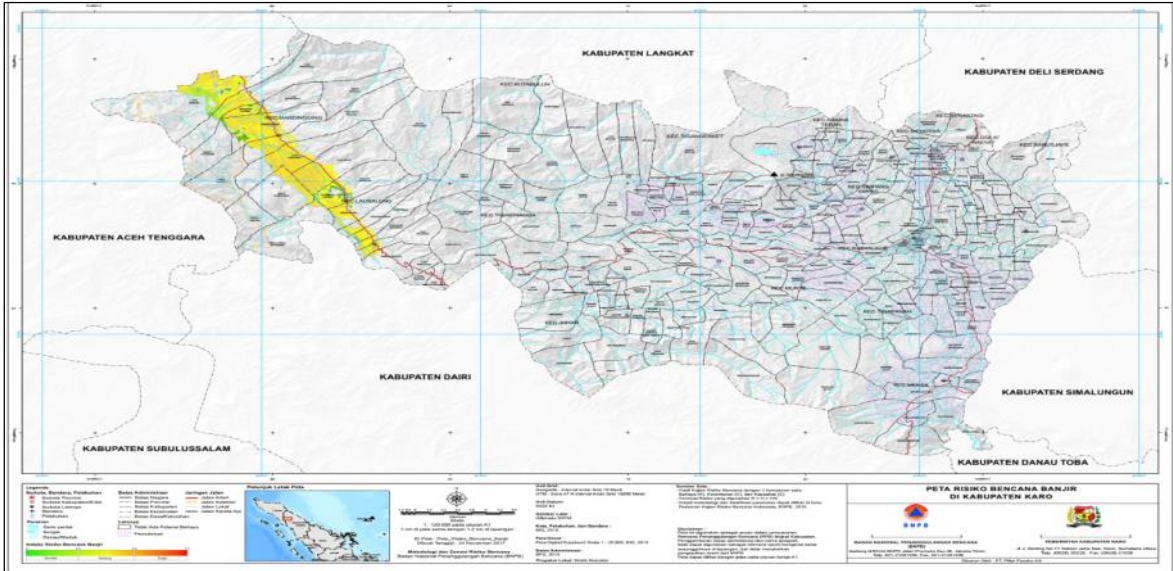
Tabel 2.7
Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Laubaleng	2.951	Tinggi
2	Mardinding	4.591	Tinggi
Total Kabupaten Karo		7.542	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut, dilihat bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Laubaleng dan Mardinding. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di Kabupaten Karo adalah **7.542 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak.

Peta 2.8
Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Banjir Bandang**

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.

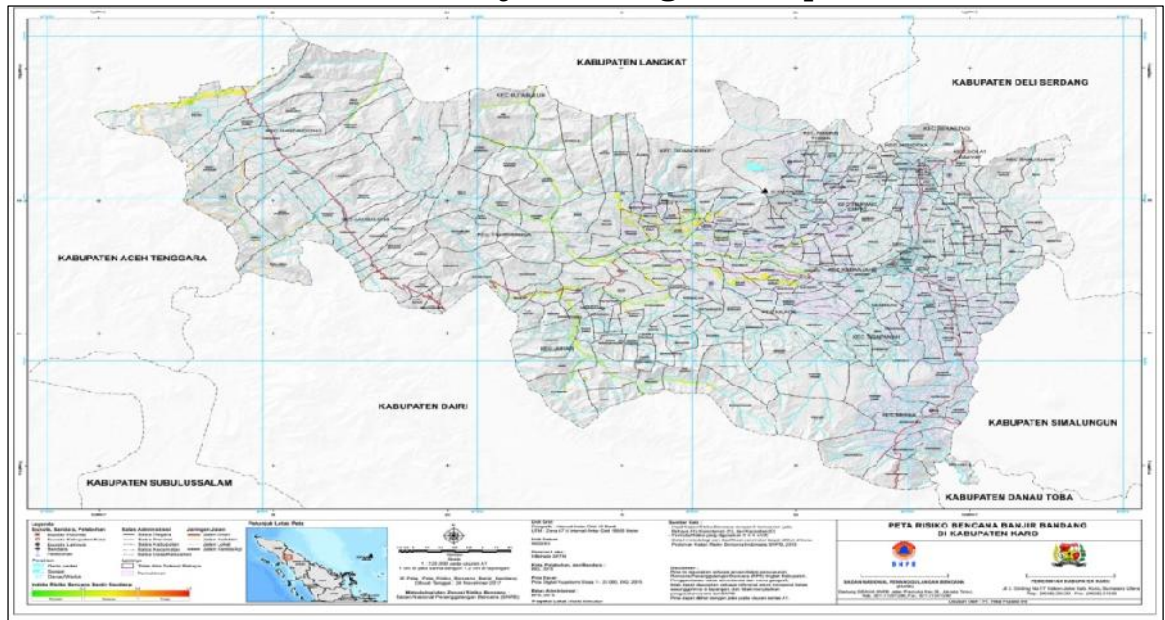
Tabel 2.8
Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Juhar	518	Tinggi
2	Kabanjahe	51	Tinggi
3	Kutabuluh	624	Tinggi
4	Laubaleng	7	Tinggi
5	Mardingding	397	Tinggi
6	Munte	465	Tinggi
7	Payung	160	Tinggi
8	Simpang Empat	54	Tinggi
9	Tigabinanga	515	Tinggi
10	Tiganderket	393	Tinggi
Total Kabupaten Karo		3.185	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang, diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir bandang di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **3.185 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Peta 2.9
Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Cuaca Ekstrim**

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5 persen distribusi.

Tabel 2.9

Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo

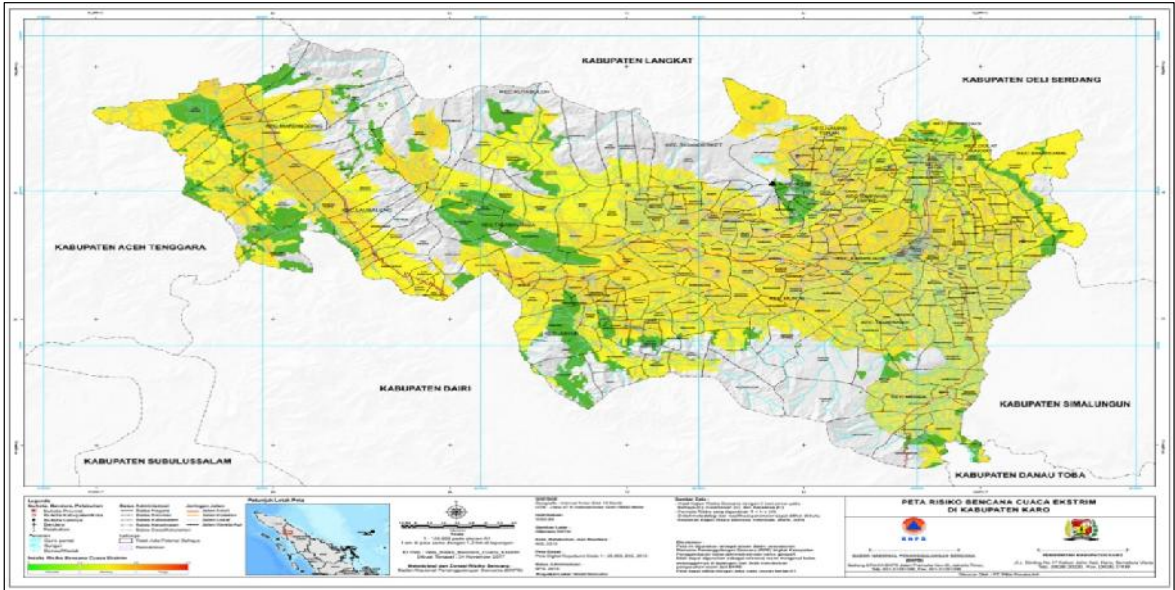
No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.267	Tinggi
2	Berastagi	3.050	Tinggi
3	Dolat Rakyat	3.225	Tinggi
4	Juhar	13.789	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Tinggi
6	Kutabuluh	11.153	Tinggi
7	Laubaleng	16.620	Tinggi
8	Mardingding	17.910	Tinggi
9	Merdeka	4.393	Tinggi
10	Merek	7.292	Tinggi
11	Munte	11.326	Tinggi
12	Naman Teran	6.884	Tinggi
13	Payung	4.517	Tinggi
14	Simpang Empat	9.346	Tinggi
15	Tigabinanga	14.277	Tinggi
16	Tiganderket	5.371	Tinggi
17	Tigapanah	18.684	Tinggi
Total Kabupaten Karo		164.569	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo, sebagaimana tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **164.569 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak.

Peta 2.10

Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Gempa Bumi**

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan (*BNPB, Definisi dan Jenis bencana*, <http://www.bnpb.go.id>).

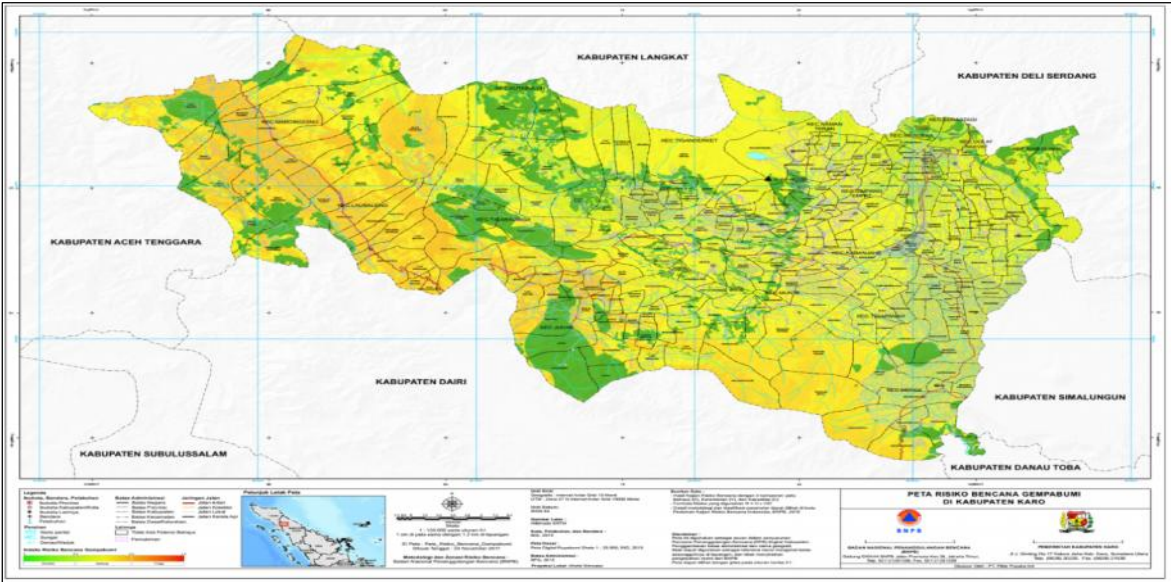
Tabel 2.10
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.804	Sedang
2	Berastagi	3.050	Sedang
3	Dolat Rakyat	3.225	Sedang
4	Juhar	21.857	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Sedang
6	Kutabuluh	19.569	Tinggi
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Sedang
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Sedang
12	Naman Teran	8.782	Sedang
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Sedang
15	Tigabinanga	16.039	Tinggi
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Sedang
Total Kabupaten Karo		212.723	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada pada peta berikut.

Peta 2.11
Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

❖ **Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung**

Letusan gunung api bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun dan banjir lahar (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Paramater yang digunakan untuk menghitung luas bahaya letusan gunung api antara lain zona aliran (aliran lava, aliran piroklastik, gas beracun, lahar erupsi, dan *suage*), dan zona jatuhan (jatuhan piroklastik). Hasil dari pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter tersebut menentukan kelas bahaya setiap wilayah Kabupaten Karo. Maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak
per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
Letusan Gunung Api Sibayak			
1	Berastagi	1.042	Rendah
2	Merdeka	7.389	Sedang
3	Naman Teran	1.679	Tinggi
Total Kabupaten Karo		10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung			
1	Kabanjahe	144	Rendah
2	Kutabuluh	31	Rendah
3	Merdeka	90	Rendah
4	Munte	444	Rendah
5	Naman Teran	13.687	Tinggi
6	Payung	14.771	Tinggi
7	Simpang Empat	8.812	Tinggi
8	Tigabinanga	12	Rendah
9	Tiganderket	6.639	Tinggi
Total Kabupaten Karo		44.635	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung, diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah **10.110 ha** yang berada pada kelas **tinggi** dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah **44.635 ha** yang berada pada kelas **tinggi**.

❖ **Longsor**

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (*BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id*). Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah jenis tanah pada lapisan atas permukaan (*top soil*), vegetasi penutup, kemiringan lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan.

Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Karo. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12

Potensi Bahaya Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	6.438	Sedang
2	Berastagi	1.101	Sedang
3	Dolat Rakyat	1.172	Sedang
4	Juhar	14.992	Sedang
5	Kabanjahe	373	Sedang
6	Kutabuluh	15.032	Sedang
7	Laubaleng	16.257	Sedang
8	Mardingding	16.570	Sedang
9	Merdeka	2.434	Sedang
10	Merek	4.634	Sedang
11	Munte	3.038	Sedang
12	Naman Teran	3.770	Sedang
13	Payung	1.366	Sedang
14	Simpang Empat	1.794	Sedang
15	Tigabinanga	8.756	Sedang
16	Tiganderket	4.426	Sedang
17	Tigapanah	1.694	Sedang
Total Kabupaten Karo		103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Tabel tersebut menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas) kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya adalah **103.845 ha** yang berada pada kelas **sedang**.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Karo, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam. Wilayah ini dikenal dengan kondisi geografisnya yang berbukit, tanahnya yang subur, serta iklimnya yang sejuk, menjadikannya daerah yang kaya akan hasil pertanian, kehutanan, pertambangan, sumber daya air, dan pariwisata. Jika dikelola dengan baik, sumber daya ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

A. Pertanian

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2024 sekitar 54,02 persen untuk harga berlaku. Sektor pertanian dikelompokkan menurut subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor kehutanan.

❖ Subsektor Tanaman Pangan

Beberapa kategori dari intensifikasi padi di Kabupaten Karo yaitu Intensifikasi Padi Sawah (Insus) dan Intensifikasi Padi Ladang (Inmum). Secara keseluruhan perkembangan produksi padi sawah dan ladang di Kabupaten Karo realisasi mencapai 185.858 Ton dengan Luas Tanam 20.233 ha untuk Padi Sawah melebihi dari target 19.327 ha. Kecamatan Mardingding memiliki realisasi tertinggi seluas 8.766 ha dibandingkan target 6.444 ha, menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebaliknya, Kecamatan Munte dan Barusjahe mengalami realisasi yang jauh di bawah target. Munte hanya mencapai 699 ha dari target 1.737 ha, dan Barusjahe 384 ha dari target 625 ha.

Secara keseluruhan Intensifikasi Padi Ladang (Inmum) Realisasi lebih rendah dari target, yaitu 6.050 ha dari target 9.652 ha. Kecamatan dengan realisasi tertinggi yaitu Tigapanah realisasi 829 ha dari target 1.250 ha dan Mardinding realisasi 954 ha dari target 843 ha. Kecamatan dengan realisasi terendah yaitu Tigabinanga realisasi 91 ha dari target 650 ha dan Juhar realisai 115 ha dari target 426 ha.

Tabel 2.13
Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang Kabupaten Karo

Kecamatan		Intensifikasi PadiSawah/ Wet Land Paddy		Intensifikasi Padi Ladang/ Dry Land Paddy			
		Insus		Insus		Inmum	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mardinding	6,444	8766.17	-	-	843	954
2	Laubaleng	5,661	6258.1	-	-	621	457
3	Tigabinanga	270	145.94	-	-	650	91
4	Juhar	3,653	3167.23	-	-	426	115
5	Munte	1,737	698.77	-	-	565	510.5
6	Kutabuluh	20	11.6	-	-	1,125	300
7	Payung	868	773.2	-	-	643	275
8	Tiganderket	14	10.65	-	-	991	688.5
9	Simpang Empat	-	0	-	-	980	870
10	Naman Teran	-	0	-	-	30	45
11	Merdeka	-	0	-	-	-	0
12	Kabanjahe	-	0	-	-	162	152
13	Berastagi	-	0	-	-	-	0
14	Tigapanah	30	14.5	-	-	1,250	829
15	Dolat Rayat	-	0	-	-	15	15
16	Merek	5	1.94	-	-	641	246
17	Barusjahe	625	383.71	-	-	710	502
	Karo	19,327	20,232	-	-	9,652	6,050

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

❖ Subsektor Perkebunan

Tahun 2024 luas area perkebunan di Kabupaten Karo seperti kelapa sawit sebesar 1.723 ha, perkebunan kelapa sebesar 1.703 ha, karet sebesar 205 ha, kopi sebesar 7.618 ha, kakao sebesar 4.123 ha, dan tembakau sebesar 479 ha. Sedangkan untuk produksi perkebunan di Kabupaten Karo, untuk kelapa sawit sebesar 6.588,29 ton, kelapa sebesar 1.360,75 ton, karet sebesar 160,75 ton, kopi sebesar 7.698,73 ton, kakao sebesar 3.640,68 ton, dan tembakau sebesar 499,74 ton. Pada umumnya usaha perkebunan di Kabupaten Karo adalah usaha perkebunan rakyat. Jenis tanaman yang biasa ditanam ialah karet, kopi, kelapa, tembakau, coklat, dan kelapa sawit. Untuk data hasil produksi perkebunan dapat dilihat pada Tabel dan data realisasi Intensifikasi tanaman Palawija di Kabupaten Karo dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.14
Hasil Produksi Perkebunan Kabupaten Karo Tahun 2022–2024 (Ribuan ton)

Jenis Tanaman	2022	2023	2024
Kelapa Sawit	6,60	6,55	6,59
Kelapa	1,37	1,45	1,36
Karet	0,08	0,08	1,60
Kopi	8,34	7,57	7,70
Kakao	3,43	3,47	3,64

Jenis Tanaman	2022	2023	2024
Tebu	-	-	-
Teh	-	-	-
Tembakau	0,40	0,40	0,50

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2025

Tabel 2.15
Realisasi Intensifikasi Tanaman Palawija (Ha) Tahun 2024

No	Kecamatan	Jagung	Kacang Tanah	Kacang Kedele
1	Mardingding	28,230	-	-
2	Lau Baleng	16,325	-	-
3	Tigabinanga	19,215	-	-
4	Juhar	10,765	-	-
5	Munte	14,322	-	-
6	Kutabuluh	11,562	2	-
7	Payung	710	6	-
8	Tiganderket	4,481	-	-
9	Simpang Empat	1,731	-	-
10	Naman Teran	0	-	-
11	Merdeka	10	-	-
12	Kabanjahe	487	-	-
13	Berastagi	0	-	-
14	Tigapanah	831	-	-
15	Dolatrayat	18	-	-
16	Merek	839	-	-
17	Barus Jahe	810	-	-
Jumlah		110.336	-	-

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2025

❖ Subsektor Peternakan

Usaha Peternakan umumnya diusahakan oleh rakyat yang bertujuan untuk dikonsumsi dan juga menambah pendapatan rumah tangga. Ternak yang umum dipelihara masyarakat Karo adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, kelinci, ayam buras, itik dan itik manila. Beberapa populasi ternak pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Populasi Ternak Kabupaten Karo Menurut Kecamatan Tahun 2024 (ekor)

Kecamatan	Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kuda	Kambing/ Domba	Babi	Kelinci
Mardingding	1,789	-	98	-	1,145	674	-
Lau Baleng	3,195	-	636	-	1,037	910	-
Tigabinanga	1,214	-	19	-	1,000	2,137	-
Juhar	1,201	-	346	-	1,352	1,533	-
Munte	964	-	89	-	3,141	2,083	37
Kutabuluh	639	-	67	-	771	404	-
Payung	755	-	31	-	1,075	401	-
Tiganderket	1,044	-	35	-	1,499	493	-
Simpang Empat	1,356	-	8	-	2,960	1,105	155
Naman Teran	84	-	15	-	439	-	-
Merdeka	156	-	8	88	767	84	562
Kabanjahe	611	-	31	-	975	2,188	113
Berastagi	341	16	6	119	1,013	379	1,582
Tigapanah	1,372	6	233	-	2,719	2,117	17
Dolatrayat	109	-	15	-	878	90	250
Merek	232	2,995	87	23	581	2,241	283
Barus Jahe	901	-	79	-	3,171	346	950
Jumlah	15,983	3,017	1,803	230	23,940	17,185	3,949

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2025

B. Pariwisata

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi yang luar biasa yang tidak kalah menariknya dengan daerah wisata lainnya yang ada di Indonesia. Pariwisata Kabupaten Karo memiliki prospek yang sangat strategis bagi daerah dan menjadi sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat untuk mengenal alam dan budaya ke beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Karo.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Karo perlu diarahkan pada terciptanya kesempatan kerja dan lapangan usaha, setidaknya di daerah sekitar obyek wisata. Oleh karena itu, penataan dan pemeliharaan obyek-obyek wisata perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk mendukung pengembangan kepariwisataan tersebut maka keterlibatan masyarakat luas baik dalam bentuk sadar wisata maupun keterlibatan langsung sebagai investor di bidang kepariwisataan perlu dikembangkan. Oleh karena itu, bentuk kerjasama pengelolaan obyek/kawasan wisata dengan pihak swasta/investor perlu mendapat perhatian khusus, terutama bagi obyek wisata yang potensial dipasarkan.

Kabupaten Karo juga berada pada posisi strategis dalam pengembangan pariwisata yaitu letak geografis yang strategis terletak pada jajaran Bukit Barisan, Sebagian besar wilayah merupakan dataran tinggi, menjadi perlintasan antar kabupaten dan Provinsi, memiliki banyak potensi wisata antara lain wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata Sejarah dan memiliki potensi alam seperti pertanian yang berlimpah dengan udara pegunungan yang sejuk dan asri. Sektor pariwisata diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik obyek wisata yang meliputi keindahan dan kekayaan alam flora, daya tarik tradisi yang mengandung seni dan budaya serta adat istiadat. Semua itu didukung oleh jasa dan sarana pariwisata seperti biro perjalanan, penyediaan akomodasi serta pembangunan dan pembenahan fasilitas wisata. Adapun obyek wisata di Kabupaten Karo antara lain: wisata alam, seperti obyek wisata Air Terjun Sipiso-piso, Air terjun Pola Tebu, Kawasan wisata Air Panas Semangat Gunung-Daulu, Gunung Sibayak, Taman Mejuah-juah Berastagi, Bukit Gundaling, Danau Lau Kavar, Gunung Sinabung, Gua Liang Dahar, Deleng Kutu, Air Terjun Sipiso-piso, Tongging, dan lain-lain; wisata Sejarah dan Budaya, seperti Rumah Adat (Desa Lingga, Desa Dokan dan Desa Pengambatan), pakaian adat, budaya kerja tahun, benda-benda peninggalan sejarah, rumah interniran Soekarno, tugu pertempuran, atraksi wisata, even wisata, dll. Selain itu, wilayah Kabupaten Karo juga merupakan wilayah Destinasi unggulan provinsi Sumatera Utara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba serta bagian Geopark Kaldera Toba. Kabupaten Karo merupakan salah satu *Key Tourism Area* (KTA) yang sangat potensial untuk terus dikembangkan sebagai destinasi wisata tematik. Untuk melihat perkembangan kunjungan wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.17
Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tamu Domestik	227.812	262.250	500.656	780.322	1.402.549
2	Tamu Asing	0	0	0	0	32.248
Jumlah		227.812	262.250	500.656	780.322	1.434.797

Sumber : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah dua konsep penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Daya dukung lingkungan Hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, termasuk menyediakan sumber daya alam seperti air, udara bersih, tanah subur, dan energi. Jika kebutuhan manusia melebihi daya dukung, maka lingkungan bisa rusak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Daya tampung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan untuk menyerap, menampung, dan menetralisasi limbah atau zat pencemar yang dihasilkan oleh aktivitas manusia tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Jika limbah yang dihasilkan melebihi daya tampung, maka pencemaran dan kerusakan lingkungan akan terjadi.

a) Daya Dukung Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Daya dukung pangan merupakan kemampuan lingkungan untuk menyediakan bahan pangan bagi penduduk di suatu wilayah. Kondisi daya dukung pangan dibedakan menjadi sudah terlampaui dan belum terlampaui, yang ditentukan berdasarkan selisih antara kebutuhan dan ketersediaan pangan yang dikonversi ke dalam bentuk energi dengan satuan kalori. Ketersediaan pangan di Kabupaten Karo dihitung berdasarkan produksi komoditas pangan sebagai berikut:

- a. Komoditas perkebunan, antara lain: Pinang, Aren, Kemiri, kulit manis, cengkeh, kelapa sawit, kelapa, kopi dan kakao.
- b. Komoditas peternakan, antara lain: sapi, kerbau, kambing dan babi.
- c. Komoditas unggas, antara lain: ayam kampung, ayam petelur, itik/itik manila baik daging maupun telur.
- d. Komoditas tanaman pangan, antara lain: beras, ubi, kacang-kacangan dan jagung.
- e. Komoditas perikanan, antara lain: lele, nila dan ikan mas.
- f. Komoditas hortikultura, antara lain buah-buahan, tanaman biofarmaka, serta tanaman sayuran.

Adapun produksi berbagai komoditas pangan di Kabupaten Karo yang merupakan akumulasi produksi pada Kabupaten Tahun 2022, yang menjadi basis perhitungan ketersediaan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18

Jenis, Jumlah Produksi dan Nilai Kalori Bahan Pangan di Kabupaten Karo

No	Komoditas	Volume (ton)	Nilai K Kalori
	A. PERKEBUNAN		109.288.935
1	Pinang	67	228.249
2	Aren	873	3.292.793
3	Kemiri	2.318	15.648.053
4	Kulit Manis	148	386.985
5	Cengkeh	188,70	622.710,00
6	KelapaSawit	6.553	59.109.774
7	Kelapa	1.457	990.515
8	Kakao	3.480	10.821.556,00
9	Kopi	7.571	18.224.182
	B. TANAMAN PANGAN		1.683.044.916
1	Beras	162.049,30	578.516.001
2	Ubi Jalar	9.033,00	10.749.270
3	Kacang Tanah	48,38	253.995,00
4	Jagung	743.896,00	1.093.527.120

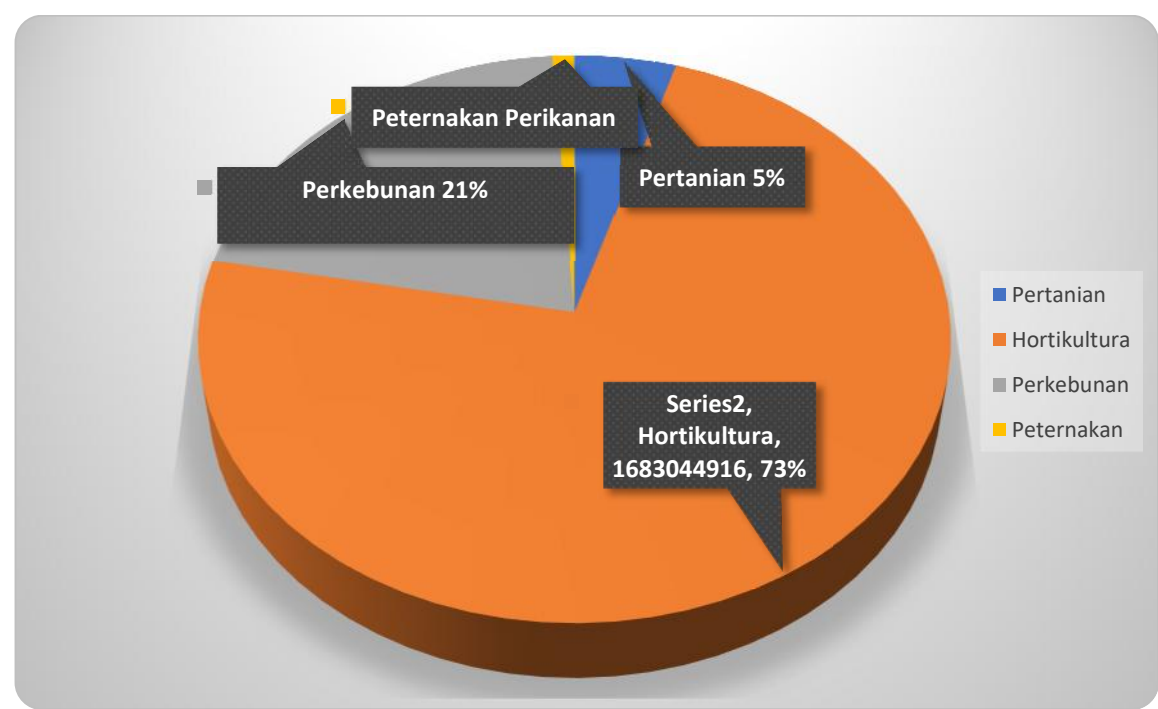
No	Komoditas	Volume (ton)	Nilai K Kalori
	C. TANAMAN SAYURAN		314.455.092
1	Bawang Daun	96.123,00	3.941.043,00
2	Bawang Merah	217.984,00	10.027.264,00
3	Bawang Putih	115	12.880
4	Buncis	215.946,00	7.342.164,00
5	CabaiRawit	200.004	24.000.480
6	Kacang Panjang	13.749,00	426.219,00
7	Kembang Kol	1.296.100,00	32.402.500,00
8	Kentang	844.910,00	52.384.420,00
9	Ketimun	878.5	70.280
10	Kubis	1.460.215,00	74.470.965,00
11	Labu Siam	43.155,00	1.294.650,00
12	Melon	6.380,00	236.060,00
13	Petsai	561.275,00	15.715.700,00
14	Semangka	6.080	170.240
15	Stroberi	1.435	45.920
16	Tomat	1.424.025,00	34.176.600,00
17	Wartel	1.297.350,00	46.704.600,00
18	CabaiKeriting	702.897,00	25.304.292,00
	D. TANAMAN BUAH-BUAHAN		166.746.246
1	Alpukat	7.828,6	6.654.310
2	Duku/Langsar/Kokosan	180,00	113.400,00
3	Durian	2.612	3.500.080
4	Jambu Air	575,00	264.500,00
5	JambuBiji	17,00	8.330,00
6	Jeruk Siam/Keprok	249.809,80	219.488.324,00
7	Mangga	3.048,80	1.585.376,00
8	Manggis	6.015,00	3.789.450,00
9	Nenas	256,60	102.640,00
10	Pepaya	289,60	133.216,00
11	Petai	445,00	409.400,00
12	Pisang	17.538,00	18.941.040,00
13	Salak	57.295,00	44.117.150,00
14	Sawo	1.154,00	1.061.680,00
15	Sirsak	7.019,00	4.562.350,00
16	Buah Naga	90.755,00	64.436.050,00
	E. PETERNAKAN		23.403.053
1	Sapi	553	1.111.112
2	Kerbau	333,6	247.744
3	Kambing	29,94	44.603,15
4	Babi	1.255,22	5.686.146,60
5	Ayam Kampung	2.135,25	6.363.042,02
6	Ayam Petelur	444,49	1.324.577
7	Itik/Itik Manila	157.488,00	505.536.480,00
8	Telur Ayam Kampung	330.378,40	574.858.416,00
9	Telur Ayam Petelur	7.812,00	12.030.480,00
10	TelurItik	147.603,00	276.017.610,00
	F. PERIKANAN BUDIDAYA	1.186,25	1.078.992
1	Ikan Nila	1.155	1.028.290
2	Ikan Lele	40,00	42.000,00
3	Ikan Mas	53	45.264

No	Komoditas	Volume (ton)	Nilai K Kalori
	G. TANAMAN BIOFARMAKA		15.045
1	Jahe	29.500,00	15.045,00

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Dilihat dari produksi pangan yang dihasilkan, Kabupaten Karo memiliki ketersediaan pangan yang relatif tinggi. Hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan, serta biofarmaka merupakan sumber pangan utama di Kabupaten Karo (73%), disusul oleh perkebunan (21 %), pertanian (5%) sedangkan bahan pangan yang bersumber dari peternakan dan perikanan hanya sekitar (1,05%) dari total bahan pangan seluruhnya.

Gambar 2.1
Persentase Produksi Bahan Pangan dari Berbagai Sektor di Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Produksi pangan yang dihasilkan oleh masing-masing Kecamatan di Kabupaten Karo secara umum dihasilkan paling tinggi di Kecamatan Tiga Binanga, Merdeka, Mardinding, Lau Baleng, Juhar, Munte, Kuta Buluh dan Simpang Empat yaitu bahan pangan di sektor perkebunan, pertanian dan hortikultura, sedangkan bahan pangan dari sektor peternakan dan perikanan masing-masing dihasilkan oleh Kecamatan Juhar, Munte, Tigapanah dan Merek.

Dari data tahun 2022, bahan pangan dari hortikultura seperti kentang, kembang kol, tomat, wartel dan cabe rawit dihasilkan oleh Kecamatan Simpang Empat, Merdeka, Barusjahe dan Merek. Produksi perikanan Kabupaten Karo didominasi oleh ikan mas dan nila yang dihasilkan oleh Kecamatan Merek dan Munte. Bahan pangan yang bersumber dari peternakan paling banyak dihasilkan oleh Kecamatan Juhar, Munte, Simpang Empat dan Tiga Panah dengan komoditas peternakan utama berupa sapi, babi dan ayam. Bahan pangan yang bersumber dari perkebunan paling banyak dihasilkan oleh Kecamatan Mardinding, Lau Baleng dan Namanteran dengan komoditas utama berupa kelapa sawit, aren, pinang dan kelapa.

Tabel 2.19

Jenis Penutupan Lahan 2022 dan Alokasi Ruang pada RTRW

No	Jenis PL	Luas PL (Ha) 2020	Arahan RTRW s/d 2045		Proyeksi Perubahan Penggunaan Lahan (Ha)				
			Jenis PL	Luas	2025	2026	2027	2028	2029
1	Perkebunan	2.939	Perkebunan	21.620	6.613	7.609,25	8.387,63	9.166	9.944,38
2	Ladang	62.805	Ladang	47.370	59.665	58.946,25	58.303,13	57.660	57.016,88
3	Sawah	10.280	Sawah	37.092	15.420	16.983	18.100,17	19.217,33	20.334,5
4	Peternakan	708	Peternakan	708	708	708	708	708	708
5	Kolam	13	Kolam	13	13	13	13	13	13
	TOTAL (Ha)	76.745		106.803	82.419	84.259,5	85.511,93	86.764,33	88.016,75

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Perubahan luasan masing-masing jenis penutupan lahan pada Tabel 3.21 diasumsikan linier dengan perubahan produksi bahan pangan. Produksi bahan pangan di Kabupaten Karo pada tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.20 diasumsikan merupakan produksi dari kondisi penutupan lahan pada tahun 2022. Jika jumlah produksi tersebut dikonversi menjadi energi berdasarkan wilayah administrasi, maka produksi energi untuk kebutuhan pangan di Kabupaten Karo disajikan pada table Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan. Hasil perhitungan ketersediaan pangan digunakan untuk melakukan pemodelan distribusi ketersediaan pangan, sedangkan pemodelan kebutuhan pangan (dalam satuan energi) dilakukan dengan menggunakan Angka Kecukupan Energi (AKE) per orang (2.100 kkal/hari). Kebutuhan energi bahan pangan dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk, sehingga model kebutuhan energi bahan pangan ini cenderung memiliki pola yang sama dengan pola distribusi populasi. Kebutuhan pangan terbesar terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, yaitu Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.

Setelah diketahui ketersediaan dan kebutuhan energi pangan, dihitung selisih keduanya untuk mengindikasikan wilayah yang daya dukung pangannya belum terlampaui atau sudah terlampaui.

Berikut data Ketersediaan Pangan dan Proyeksi Ketersediaan Pangan Tahun 2022, 2025 sampai dengan 2029 di Kabupaten Karo berdasarkan jumlah produksi dikonversi menjadi energi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.20

Ketersediaan Pangan 2022 dan Proyeksi Ketersediaan Pangan Tahun 2025-2029

Ketersediaan Pangan Per Sub Sektor	2022	2025	2026	2027	2028	2029
Perkebunan	109.288.935	191.255.636	218.577.870	245.900.104	273.222.338	300.544.571
Hortikultura	481.216.383	466.779.892	461.967.728	457.155.564	452.343.400	447.531.236
Pangan	1.683.044.916	2.187.958.391	2.356.262.882	2.524.567.374	2.692.871.866	2.861.176.357
Peternakan	23.403.053	23.403.053	23.403.053	23.403.053	23.403.053	23.403.053
Perikanan	1.078.992	1.078.992	1.078.992	1.078.992	1.078.992	1.078.992
Jumlah Ketersediaan Pangan	2.298.032.279	2.870.475.964	3.061.290.525	3.252.105.087	3.442.919.648	3.633.734.210
10 ^{^3} Juta K Kal	2.298.032	2.870.476	3.061.291	3.252.105	3.442.920	3.633.734

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan pangan di Kabupaten Karo juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dengan menggunakan angka kecukupan kalori sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, maka kebutuhan energi masyarakat Kabupaten Karo pada tahun 2022 dan proyeksi kebutuhan hingga tahun 2029 ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.21

Kebutuhan Pangan 2022 dan Proyeksi Kebutuhan Pangan Tahun 2025-2029

No	Keterangan	Tahun 2022-2029 (10 ³ Juta Kkal)					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
1	Kebutuhan Pangan dan Proyeksi Kebutuhan Pangan	317.659,83	348.995.12	354.027,95	359.068,46	364.101,29	369.141,80

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Tabel 2.22

Status Daya Dukung Pangan 2022 dan Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

No	Keterangan	Status Daya Dukung Pangan Tahun2022-2029					
		2022	2025	2026	2027	2028	2029
1	Status Daya Dukung Pangan	BT	BT	BT	BT	BT	BT

*BT :Belum Terlampaui

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Mengingat ketersediaan pangan di Kabupaten Karo didukung oleh keanekaragaman hayati yang tinggi, maka kelestarian keanekaragaman hayati ini menjadi sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan kedepan.

b) Daya Dukung Air

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, selain pangan. Air dimanfaatkan baik secara langsung untuk konsumsi, kegiatan maupun dalam kegiatan penggunaan lahan untuk menghasilkan produk, termasuk pangan.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia, selain pangan. Airdimanfaatkan baik secara langsung untuk konsumsi, kegiatan domestik (mandi,mencuci, dsb), maupun dalam kegiatan penggunaan lahan untuk menghasilkanproduk, termasuk pangan. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung AirNasional, kondisi daya dukung air dinyatakan dalam surplus dan defisit, yangditentukan berdasarkan selisih kebutuhan dan ketersediaan dalam bentuk debit airdengan satuan m³/tahun.

Ketersediaan air di Kabupaten Karo dimodelkan menggunakan peta wilayah aliran sungai. Sebaran ketersediaan air akan dilakukan melalui sistem grid ukuran5” x 5” atau 0.15 km x 0.15 km. Total ketersediaan air di KabupatenKaromencapai 2.186.883.251 m³/tahun, yang terdistribusi pada wilayah kecamatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3. 25 di bawah ini.

Kebutuhan Data dalam Menghitung Ketersediaan Air:

- a. Peta Indikasi DDDTLH (Indeks Jasa Ekosistem)
- b. Peta Grid Penggunaan Lahan
- c. Potensi ketersediaan air (m3/tahun)
- d. Peta Grid Populasi (data yang dubutuhkan: Peta Batas Administrasi, Data Jumlah Penduduk, Peta JaringanJalan, Peta TutupanLahan, dan peta grid ukuran 5” x 5”.

Ketersediaan air di Kabupaten Karo berdasarkan kerangka penentuan status daya dukung penyediaan air permukaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.23

Ketersediaan Air Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Ketersediaan Air (m ³ /tahun)
1	Mardingding	351.063.986
2	Laubaleng	184.809.759
3	TigaBinanga	186.156.692
4	Juhar	234.156.027
5	Munte	155.654.668
6	Kutabuluh	225.102.125
7	Payung	32.989.155
8	Tiganderket	124.203.090
9	SimpangEmpat	67.888.669
10	NamanTeran	72.868.693
11	Merdeka	25.782.783
12	Kabanjahe	42.758.531
13	Berastagi	24.610.561
14	Tigapanah	98.002.661
15	DolatRayat	20.407.794
16	Merek	234.955.174
17	Barusjahe	105.472.884
Jumlah		2.186.883.251

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Dari aspek kebutuhan air, kebutuhan air yang diperhitungkan meliputi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan. Kebutuhan air domestik atau rumah tangga didistribusikan berdasarkan hasil model distribusi penduduk dengan grid, menentukan kebutuhan air rumah tangga dengan cara mengkalikan populasi penduduk dengan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar 43,8 m³/tahun/kapita. Sementara itu, kebutuhan air untuk lahan yang diperhitungkan meliputi tutupan lahan sawah, perkebunan, ladang dan tambak. Kebutuhan air Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24

Kebutuhan Air Domestik dan Penggunaan Lahan
Kabupaten Karo Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air (m ³ /tahun)		
		Domestik	Lahan	Total
1	Mardingding	911.566	116.217.672	117.129.238
2	Laubaleng	942.532	60.186.608	61.129.141
3	TigaBinanga	1.011.605	63.115.796	64.127.401
4	Juhar	666.417	61.986.291	62.652.708
5	Munte	1.045.725	65.462.197	66.507.922
6	Kutabuluh	578.598	42.752.903	43.331.501
7	Payung	554.026	22.277.409	22.831.435
8	Tiganderket	653.890	30.675.620	31.329.510
9	SimpangEmpat	964.038	26.954.236	27.918.274
10	NamanTeran	663.439	15.548.347	16.211.785
11	Merdeka	711.838	6.969.433	7.681.271
12	Kabanjahe	3.354.730	15.116.081	18.470.811
13	Berastagi	2.184.131	11.131.693	13.315.823
14	Tigapanah	1.564.755	44.329.177	45.893.932
15	DolatRayat	451.797	6.978.155	7.429.952
16	Merek	1.061.712	63.077.742	64.139.454
17	Barusjahe	1.110.987	33.001.283	34.112.270
Jumlah		18.431.785	685.780.641	704.212.425

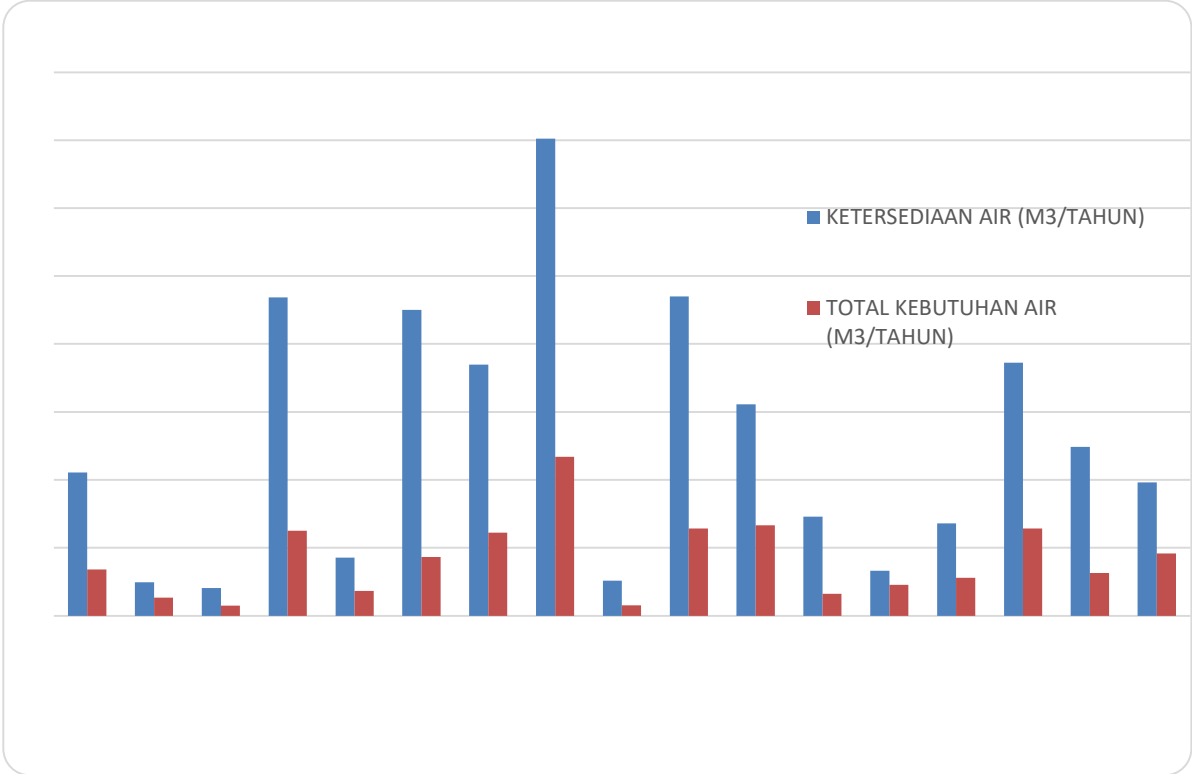
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Tabel 2.25
Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Karo Tahun 2023

No	Kecamatan	Kesediaan Air (m³/tahun)	Kebutuhan Air (m³/tahun)	Selisih (m³/tahun)
1	Mardingding	351.063.986	117.129.238	233.934.748
2	Laubaleng	184.809.759	61.129.141	123.680.619
3	TigaBinanga	186.156.692	64.127.401	122.029.291
4	Juhar	234.156.027	62.652.708	171.503.319
5	Munte	155.654.668	66.507.922	89.146.746
6	Kutabuluh	225.102.125	43.331.501	181.770.625
7	Payung	32.989.155	22.831.435	10.157.720
8	Tiganderket	124.203.090	31.329.510	92.873.580
9	SimpangEmpat	67.888.669	27.918.274	39.970.395
10	NamanTeran	72.868.693	16.211.785	56.656.908
11	Merdeka	25.782.783	7.681.271	18.101.512
12	Kabanjahe	42.758.531	18.470.811	24.287.720
13	Berastagi	24.610.561	13.315.823	11.294.737
14	Tigapanah	98.002.661	45.893.932	52.108.729
15	DolatRayat	20.407.794	7.429.952	12.977.842
16	Merek	234.955.174	64.139.454	170.815.720
17	Barusjahe	105.472.884	34.112.270	71.360.614
Jumlah		2.186.883.251	704.212.425	1.482.670.826

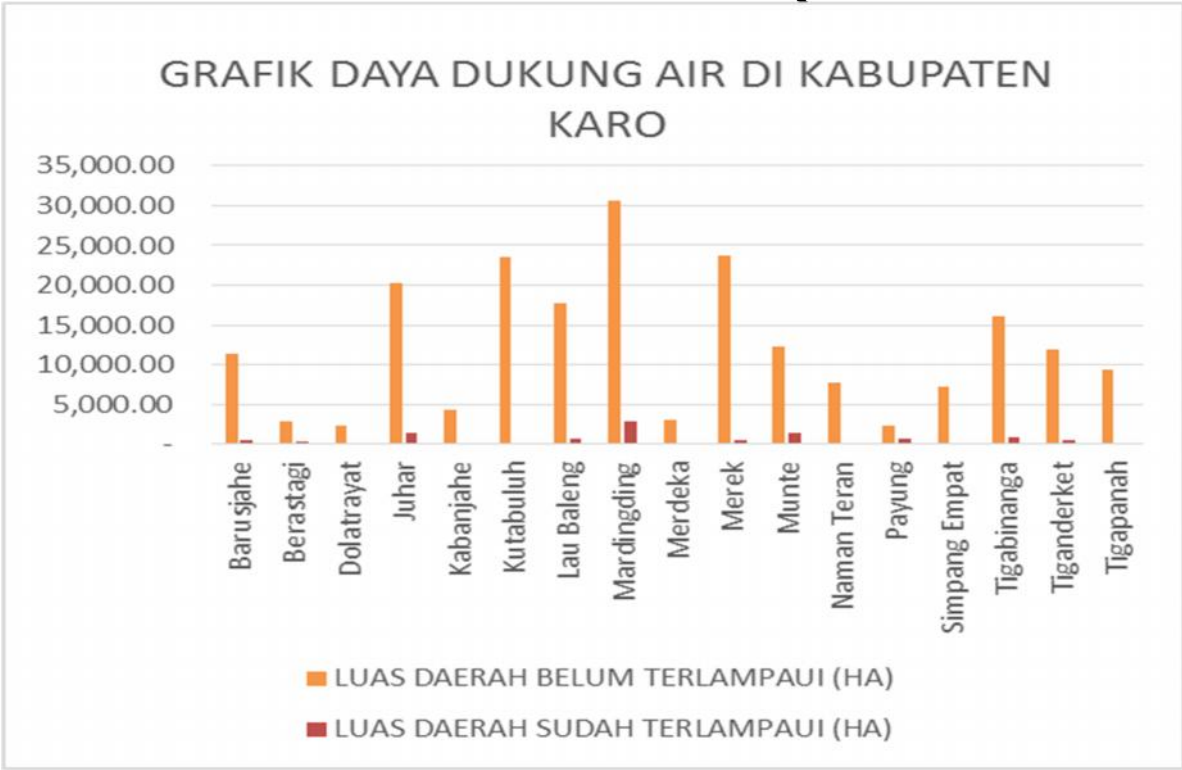
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Grafik 2.1
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Karo



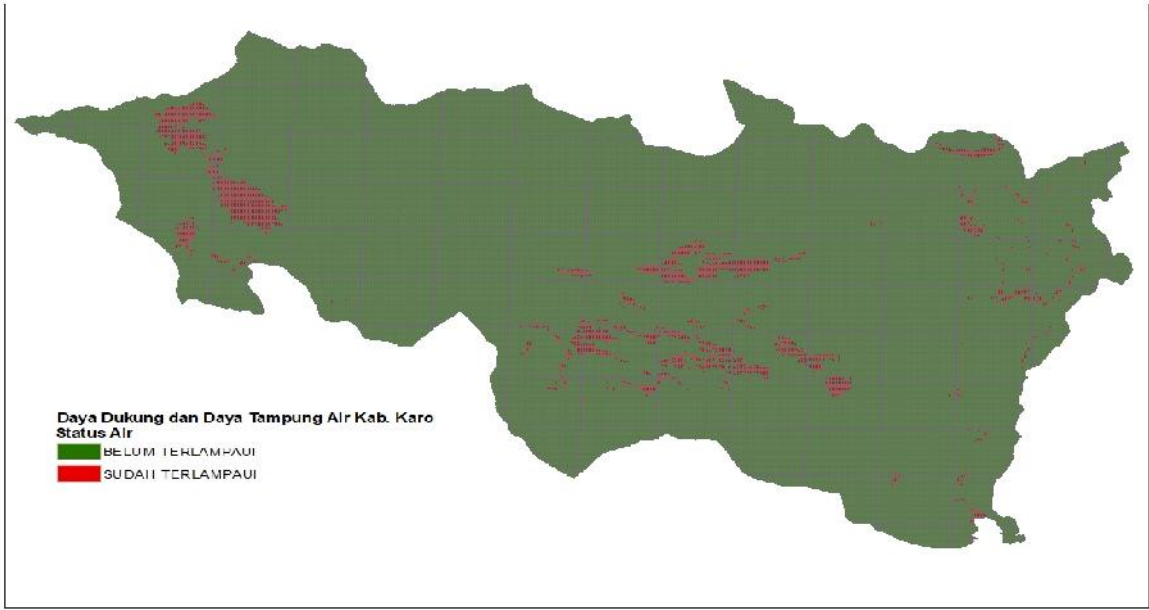
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Grafik 2.2
Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Peta 2.12
Peta Selisih Ketersediaan Air dan Kebutuhan Air dalam setiap grid 5” x 5” di Kabupate Karo Tahun 2023



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

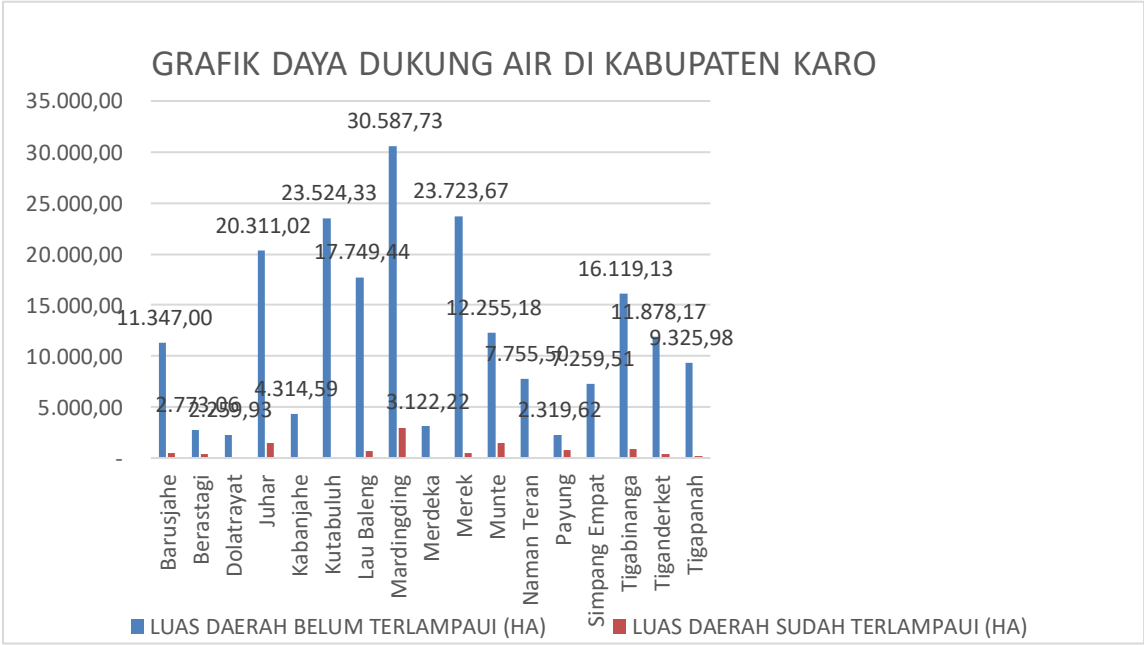
Wilayah dengan selisih ketersediaan air negatif (terlampau) direpresentasikan dengan warna merah dan warna hijau menunjukkan selisih positif (belum terlampau). Luas wilayah pada masing-masing kecamatan yang selisih ketersediaan air dan kebutuhannya belum terlampau atau terlampau ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Status Ketersediaan Air Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Belum Terlampaui		Terlampaui		Luas Total (ha)
		(Ha)	%	(Ha)	%	
1	Barusjahe	11.564	96	482	4	12.045
2	Berastagi	2.853	88	389	12	3.242
3	Dolatrayat	2.286	99	23	1	2.309
4	Juhar	20.292	93	1.527	7	21.819
5	Kabanjahe	4.324	100	0	0	4.324
6	Kutabuluh	23.582	100	0	0	23.582
7	Lau Baleng	18.125	96	755	4	18.880
8	Mardingding	30.215	91	2.988	9	33.203
9	Merdeka	3.216	96	134	4	3.350
10	Merek	23.914	98	488	2	24.402
11	Munte	12.241	89	1.513	11	13.754
12	NamanTeran	7.955	100	0	0	7.955
13	Payung	2.315	75	772	25	3.087
14	SimpangEmpat	7.308	100	0	0	7.308
15	Tigabinanga	16.432	95	865	5	17.297
16	Tiganderket	12.104	96	504	4	12.608
17	Tigapanah	9.375	98	191	2	9.567
Jumlah		208.100	95	10.632	5	218.733

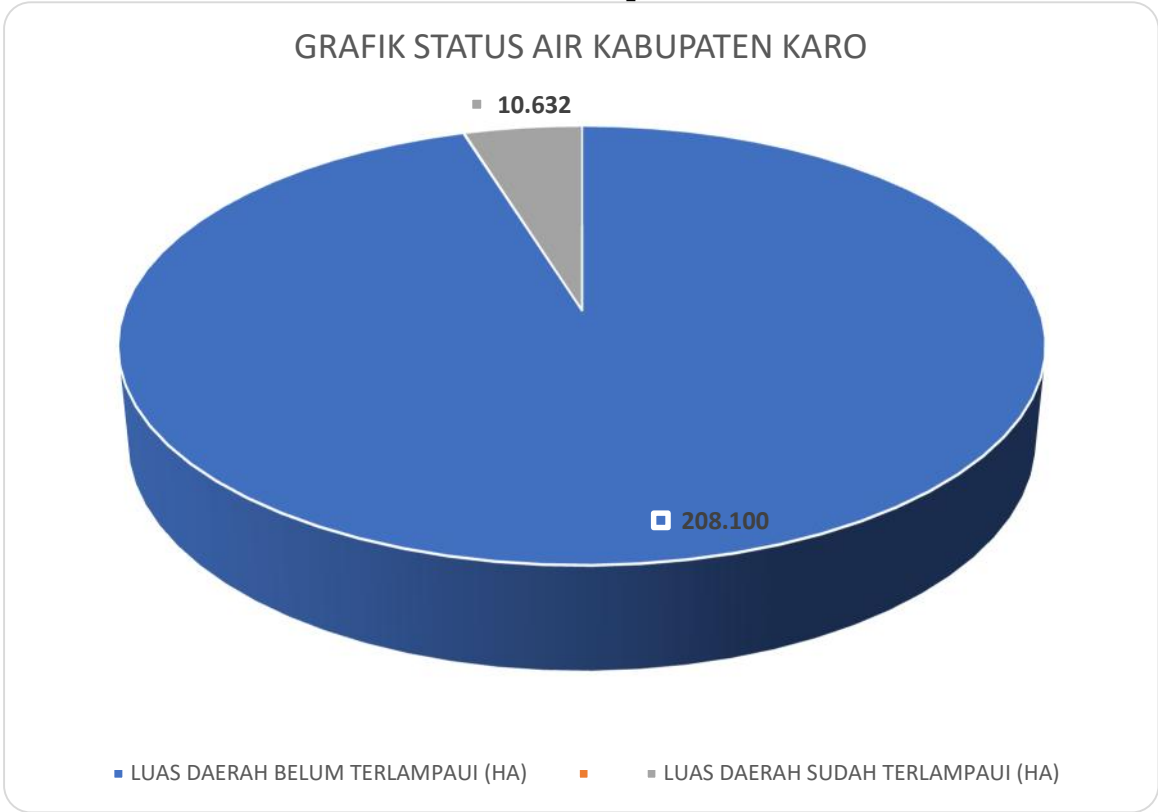
Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Grafik 2.3
Daya Dukung Air Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Grafik 2.4
Status Air Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Ketersediaan air di Kabupaten Karo sebesar 2.186.883.251 m³/tahun, dimana ketersediaan air terbesar di Kecamatan Mardinding sebesar 351.063.986 m³/tahun, dan yang paling sedikit di Kecamatan Dolat Rayat 20.407.794 m³/tahun.

Kebutuhan air di Kabupaten Karo tahun 2023 sebesar 704.212.425 m³/tahun, dimana Kebutuhan air terbesar di Kecamatan Mardinding sebesar 117.129.238 m³/tahun, dan yang paling sedikit di Kecamatan Dolat Rayat 7.429.952 m³/tahun.

Status air semua kecamatan di Kabupaten Karo belum terlampaui, namun di beberapa wilayah ada yang sudah terlampaui. Luas wilayah yang belum terlampaui seluas 208.100 ha dan luas wilayah yang sudah terlampaui seluas 10.632 ha.

Proyeksi Kebutuhan Air

Kebutuhan air domestik akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Jika diasumsikan kebutuhan air lahan tetap (tidak mempertimbangkan perubahan tutupan lahan) dan kebutuhan air domestik adalah sebesar 43,8 m³/kapita/tahun, maka proyeksi kebutuhan air domestik dan lahan Kabupaten Karo pada tahun 2025-2029 adalah berikut ini :

Tabel 2.27

Proyeksi Kebutuhan Air Domestik dan Lahan Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Kebutuhan Air (M ³ /tahun)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Mardingding	117.187.317	117.201.289	117.215.305	117.229.277	117.243.293
2	Laubaleng	61.195.804	61.210.127	61.224.493	61.238.816	61.253.182
3	TigaBinanga	64.224.506	64.240.055	64.255.604	64.271.153	64.286.702
4	Juhar	62.712.189	62.723.051	62.733.913	62.744.776	62.755.638
5	Munte	66.546.203	66.562.847	66.579.491	66.596.135	66.612.779
6	Kutabuluh	43.332.683	43.341.049	43.349.415	43.357.781	43.366.146
7	Payung	22.881.936	22.890.653	22.899.369	22.908.085	22.916.801
8	Tiganderket	31.388.158	31.397.750	31.407.343	31.416.935	31.426.527
9	Simpang Empat	27.997.026	28.012.049	28.027.117	28.042.140	28.057.207
10	NamanTeran	16.289.881	16.302.758	16.315.679	16.328.556	16.341.477
11	Merdeka	7.772.024	7.785.515	7.799.005	7.812.495	7.825.986
12	Kabanjahe	18.806.713	18.859.317	18.911.965	18.964.568	19.017.216
13	Berastagi	13.632.804	13.668.370	13.703.979	13.739.545	13.775.154
14	Tigapanah	46.015.564	46.038.734	46.061.948	46.085.119	46.108.333
15	DolatRayat	7.449.749	7.456.538	7.463.371	7.470.160	7.476.993
16	Merek	64.095.829	64.109.539	64.123.292	64.137.001	64.150.754
17	Barusjahe	34.194.833	34.211.170	34.227.551	34.243.889	34.260.270
Jumlah		705.723.219	706.010.810	706.298.838	706.586.429	706.874.458

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Dengan mengasumsikan ketersediaan air tetap (tanpa memperhitungkan faktor perubahan tutupan lahan dan perubahan iklim) maka selisih ketersediaan dan kebutuhan air Kabupaten Karo secara total masih surplus sebesar 1.480.008.793 m³/tahun pada tahun 2029. Selisih ketersediaan pada setiap kecamatan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.28

Proyeksi Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Selisih (Ketersediaan - Kebutuhan) (M3/tahun)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Mardingding	233.876.669	233.862.697	233.848.681	233.834.709	233.820.693
2	Laubaleng	123.613.955	123.599.632	123.585.266	123.570.943	123.556.577
3	TigaBinanga	121.932.187	121.916.638	121.901.089	121.885.540	121.869.991
4	Juhar	171.443.839	171.432.976	171.422.114	171.411.252	171.400.389
5	Munte	89.108.465	89.091.821	89.075.177	89.058.533	89.041.889
6	Kutabuluh	181.769.442	181.761.076	181.752.710	181.744.345	181.735.979
7	Payung	10.107.219	10.098.502	10.089.786	10.081.070	10.072.354
8	Tiganderket	92.814.932	92.805.340	92.795.747	92.786.155	92.776.563
9	Simpang Empat	39.891.643	39.876.620	39.861.552	39.846.529	39.831.462
10	NamanTeran	56.578.812	56.565.935	56.553.014	56.540.137	56.527.216

No	Kecamatan	Selisih (Ketersediaan - Kebutuhan) (M3/tahun)				
		2025	2026	2027	2028	2029
11	Merdeka	18.010.759	17.997.268	17.983.778	17.970.288	17.956.797
12	Kabanjahe	23.951.817	23.899.214	23.846.566	23.793.962	23.741.315
13	Berastagi	10.977.757	10.942.191	10.906.582	10.871.016	10.835.407
14	Tigapanah	51.987.096	51.963.926	51.940.712	51.917.542	51.894.328
15	DolatRayat	12.958.044	12.951.255	12.944.423	12.937.634	12.930.801
16	Merek	170.859.345	170.845.635	170.831.882	170.818.173	170.804.419
17	Barusjahe	71.278.051	71.261.714	71.245.333	71.228.995	71.212.614
Jumlah		1.481.160.032	1.480.872.442	1.480.584.413	1.480.296.822	1.480.008.793

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

c) **Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan**

Secara umum wilayah Kabupaten Karo dengan indeks jasa lingkungan penyediaan pangan yang didominasi berkategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 64 persen, sedangkan jasa lingkungan penyediaan pangan dengan kategori sangat rendah hingga rendah hanya mencapai 24 persen.

Daerah dengan indeks jasa lingkungan penyediaan pangan terendah adalah Kecamatan Laubaleng seluas 3,661.08 ha, sedangkan indeks jasa lingkungan penyediaan pangan tertinggi adalah Kecamatan Merek seluas 17,106.34 ha.

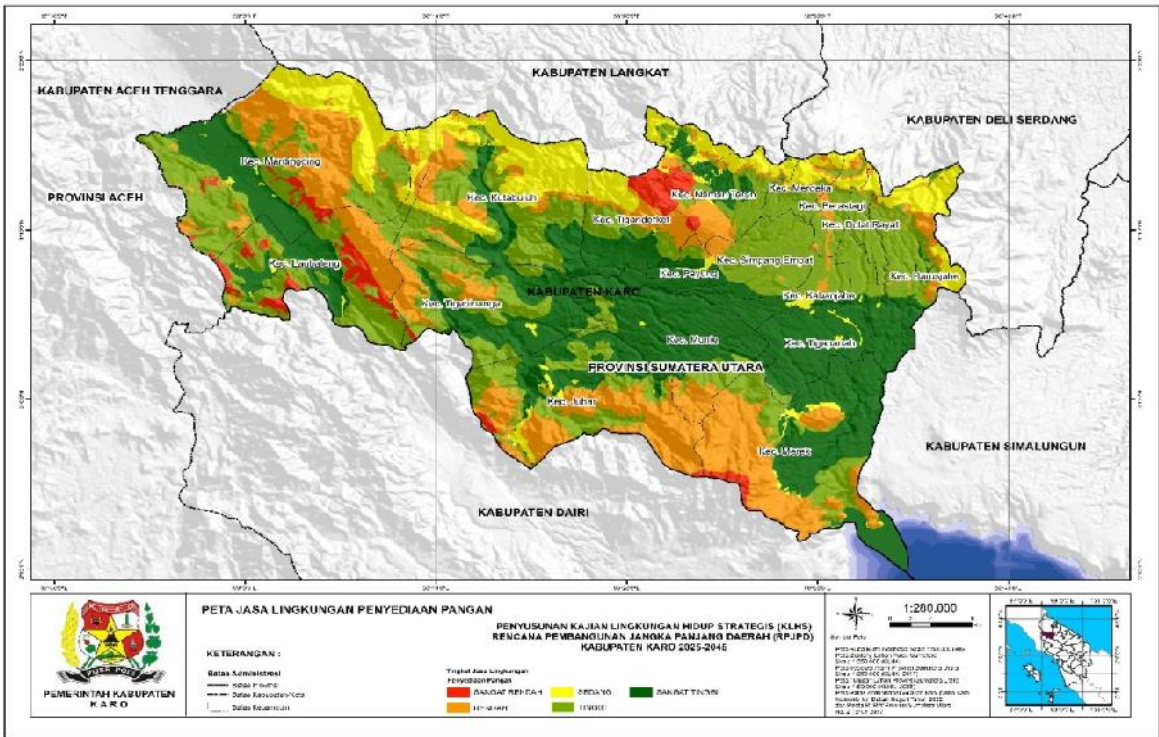
Tabel 2.29
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	5,134.78	6,672.89	4,592.67	1,790.98	20.58	18,211.91
2	Berastagi	-	2,752.49	939.21	1,202.70	-	4,894.39
3	Dolat Rayat	-	2,895.17	490.26	94.53	7.24	3,487.20
4	Juhar	7,712.06	9,605.63	1,053.74	13,948.90	439.35	32,759.68
5	Kabanjahe	3,515.61	2,190.53	470.33	343.95	-	6,520.42
6	Kutabuluh	6,051.43	12,627.05	11,897.31	4,760.02	2.47	35,338.28
7	Laubaleng	5,947.12	11,883.89	1,556.76	5,141.48	3,661.08	28,190.33
8	Mardingding	8,939.03	16,269.77	9,167.60	13,623.53	1,287.97	49,524.01
9	Merdeka	-	2,814.24	1,588.17	650.80	-	5,053.21
10	Merek	17,106.34	6,527.31	732.93	14,467.61	930.69	39,764.89
11	Munte	15,475.60	3,030.17	34.07	2,150.13	-	20,689.97
12	Naman Teran	2,093.80	3,661.02	1,889.21	2,632.28	1,701.99	11,978.32
13	Payung	3,635.65	460.66	212.83	334.58	-	4,643.73
14	Simpang Empat	1,303.52	9,037.83	2.80	670.66	-	11,014.81
15	Tigabinanga	11,043.66	10,632.23	117.11	4,005.77	115.69	25,914.46
16	Tiganderket	5,304.79	3,881.04	4,835.64	3,205.35	1,725.03	18,951.86
17	Tigapanah	11,139.27	3,001.35	296.61	-	-	14,437.22
Total		104,402.67	107,943.29	39,877.25	69,023.29	9,892.10	331,374.69

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Peta 2.13

Sebaran Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

d) Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih

Secara umum luas wilayah Kabupaten Karo dengan indeks jasa lingkungan penyediaan air bersih yang berkategori tinggi hingga sangat tinggi hanya mencapai 12 persen, kabupaten ini didominasi oleh jasa lingkungan penyediaan air bersih kategori sangat rendah hingga rendah yang mencapai 56 persen. Daerah dengan indeks jasa lingkungan penyediaan air bersih terendah adalah Kecamatan Naman Teran seluas 1.305,44 ha, sedangkan indeks jasa lingkungan penyediaan air bersih tertinggi adalah Kecamatan Merek seluas 2.925,24 ha.

Tabel 2.30

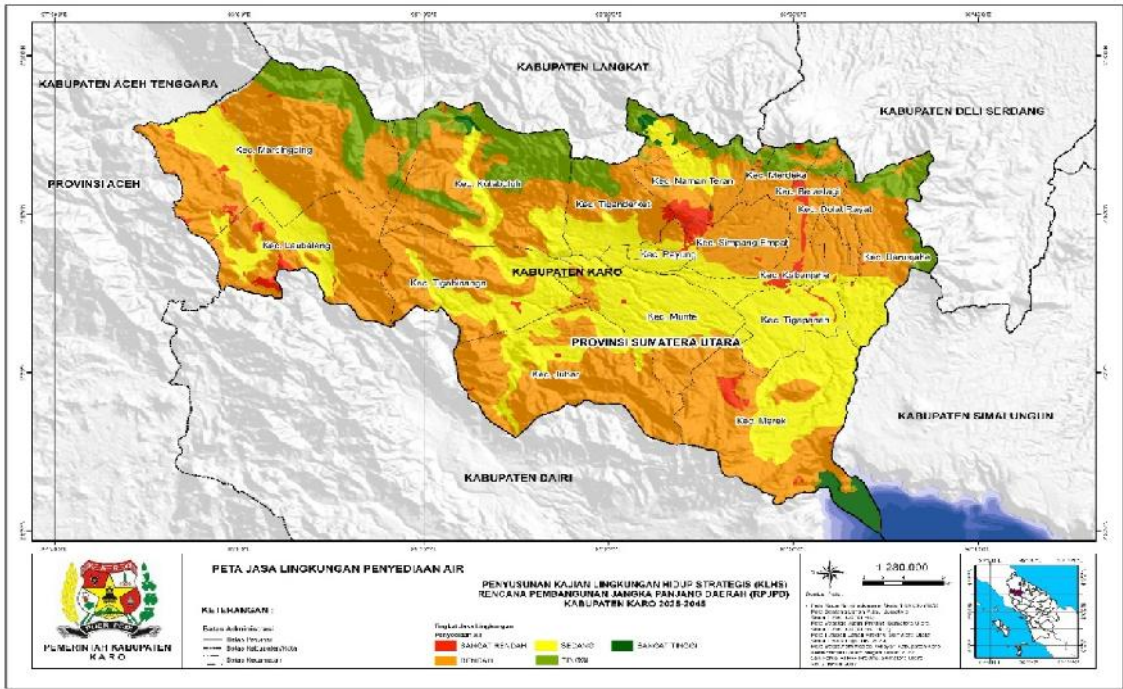
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	-	4.569,02	4.835,25	8.708,02	99,63	18.211,91
2	Berastagi	-	939,21	-	3.247,26	707,93	4.894,39
3	Dolat Rayat	-	490,26	-	2.959,49	37,45	3.487,20
4	Juhar	-	-	8.076,52	24.599,39	83,77	32.759,68
5	Kabanjahe	-	-	3.515,61	2.190,53	814,28	6.520,42
6	Kutabuluh	384,12	11.773,68	6.167,61	16.945,48	67,39	35.338,28
7	Laubaleng	-	1.397,54	6.540,72	19.212,48	1.039,59	28.190,33
8	Mardinding	-	8.998,38	9.330,10	30.231,39	728,03	49.524,01
9	Merdeka	-	1.588,17	-	3.319,83	145,21	5.053,21
10	Merek	2.925,24	69,90	14.902,57	20.780,84	1.086,34	39.764,89
11	Munte	-	-	15.379,62	5.276,29	34,07	20.689,97
12	Naman Teran	207,80	1.658,75	2.592,85	6.213,48	1.305,44	11.978,32
13	Payung	-	-	3.671,56	708,91	263,26	4.643,73
14	Simpang Empat	-	-	1.303,52	9.117,69	593,60	11.014,81
15	Tigabinanga	-	-	11.048,02	14.705,71	160,73	25.914,46
16	Tiganderket	526,52	4.377,82	5.768,71	8.046,34	232,47	18.951,86
17	Tigapanah	-	-	11.118,51	3.022,10	296,61	14.437,22
Total		4.043,67	35.862,73	104.251,17	179.285,24	7.695,77	331.374,69

Sumber: Analisis DDDT LHKab Karo, 2023

Peta 2.14

Sebaran Jasa Lingkungan Penyediaan Air Bersih



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

e) Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Dominan wilayah Kabupaten Karo memiliki kemampuan yang baik dalam mengatur iklim. Wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan iklim kategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 45%, sedangkan wilayah dengan jasa lingkungan pengatur iklim kategori sangat rendah hingga rendah meliputi 20%. Daerah dengan indeks jasa lingkungan pengaturan iklim terendah adalah Kecamatan Mardinding seluas 8.716,15 ha, sedangkan indeks jasa lingkungan pengaturan iklim tertinggi adalah Kecamatan Mardinding seluas 18.137,25 ha.

Tabel 2.31

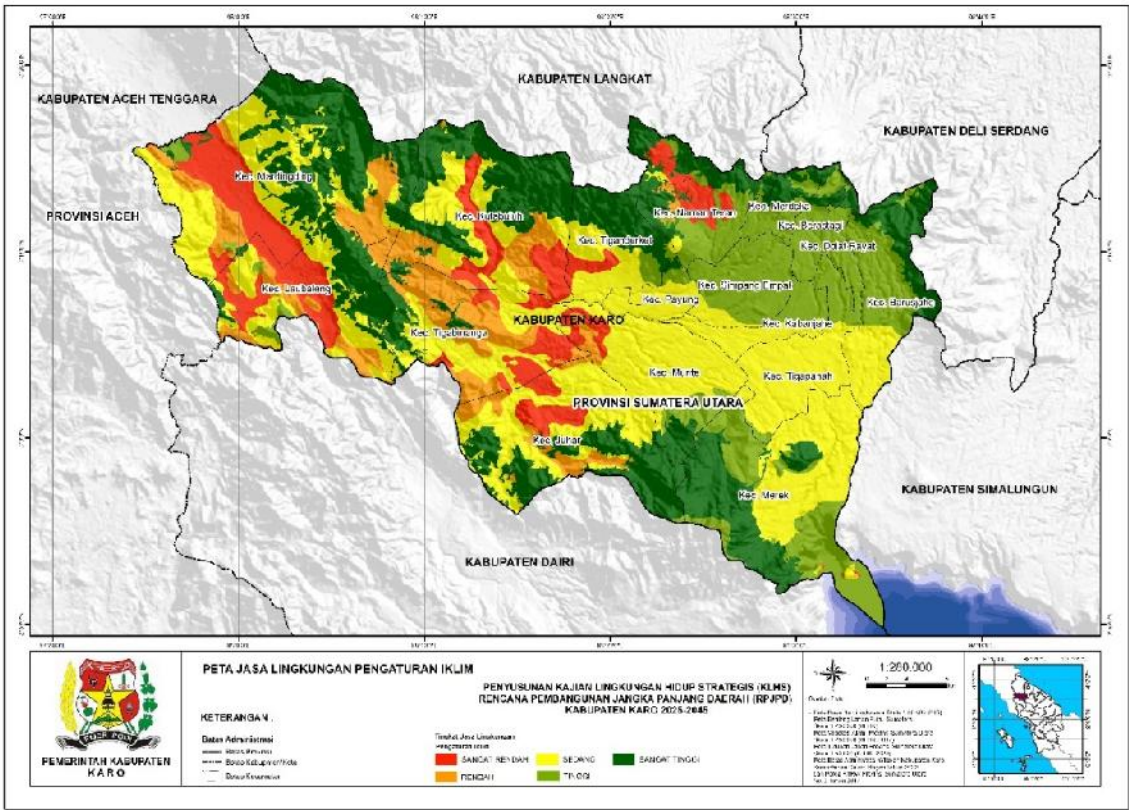
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Per Kecamatan

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	5.654,27	7.698,74	4.858,90	-	-	18.211,91
2	Berastagi	977,62	3.916,78	-	-	-	4.894,39
3	Dolat Rayat	490,26	2.996,94	-	-	-	3.487,20
4	Juhar	11.889,85	92,44	14.246,97	3.377,12	3.153,31	32.759,68
5	Kabanjahe	-	2.534,48	3.985,94	-	-	6.520,42
6	Kutabuluh	15.528,86	15,95	8.486,23	5.477,86	5.829,38	35.338,28
7	Laubaleng	8.467,33	851,53	7.466,22	4.780,68	6.624,57	28.190,33
8	Mardinding	18.137,25	689,61	14.886,12	6.858,77	8.716,15	49.524,01
9	Merdeka	1.771,55	3.281,65	-	-	-	5.053,21
10	Merek	12.130,77	12.915,32	14.641,37	6,74	70,68	39.764,89
11	Munte	1.922,85	2.344,02	14.382,06	795,65	1.245,40	20.689,97
12	Naman Teran	3.707,70	5.200,84	181,09	429,06	2.459,62	11.978,32
13	Payung	190,43	604,81	3.848,49	-	-	4.643,73
14	Simpang Empat	-	9.708,49	1.306,32	-	-	11.014,81
15	Tigabinanga	3.052,24	-	8.758,74	9.626,59	4.476,89	25.914,46
16	Tiganderket	9.335,10	1.291,06	5.912,38	46,91	2.366,41	18.951,86
17	Tigapanah	-	3.022,10	11.415,12	-	-	14.437,22
Total		93.256,09	57.164,76	114.375,95	31.399,38	34.942,41	331.374,69

Sumber: Analisis DDDT LHKab Karo, 2023

Peta 2.15

Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Wilayah Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

f) Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Wilayah Kabupaten Karo memiliki kemampuan yang kurang baik dalam mengatur tata aliran air dan banjir. Wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir kategori tinggi hingga sangat tinggi hanya sebesar 32%, sedangkan wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir kategori sangat rendah hingga rendah mencapai 34 persen.

Daerah dengan indeks jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir terendah adalah Kecamatan Mardinding seluas 21.406,97 ha, sedangkan indeks jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir tertinggi adalah Kecamatan Merek seluas 13.462,83 ha.

Tabel 2.32

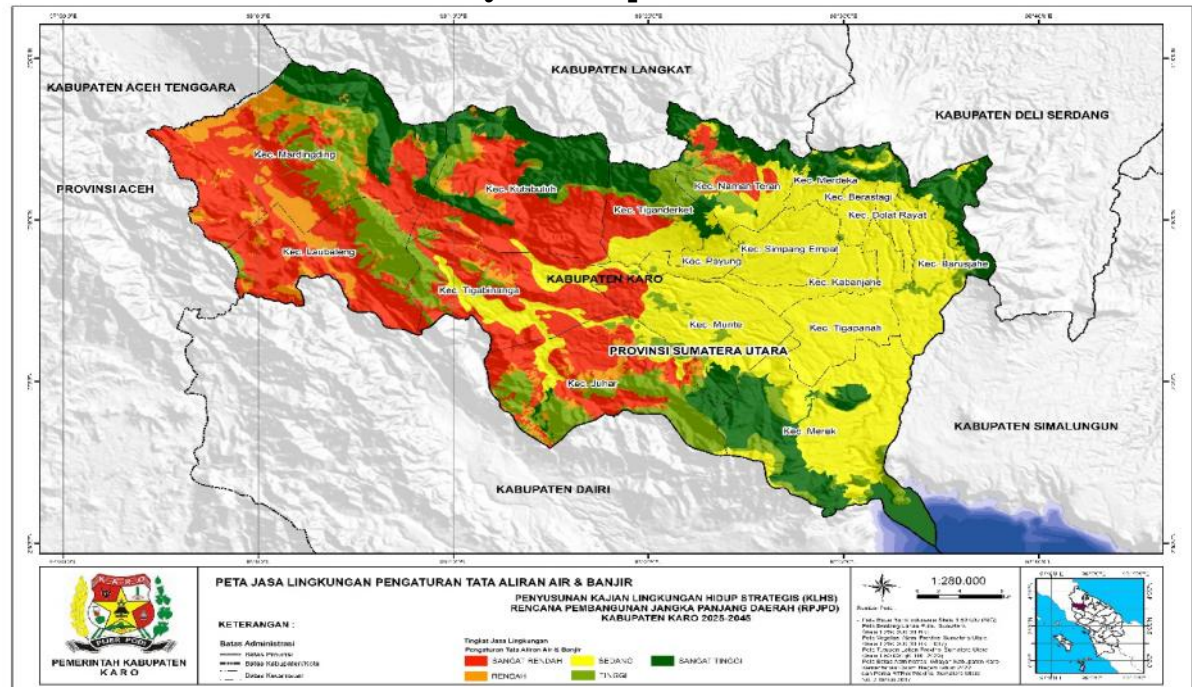
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	5.654,27	1.258,01	11.299,64	-	-	18.211,91
2	Berastagi	977,62	456,37	3.460,41	-	-	4.894,39
3	Dolat Rayat	490,26	64,32	2.932,62	-	-	3.487,20
4	Juhar	1.482,21	11.953,81	3.204,39	3.796,81	12.322,46	32.759,68
5	Kabanjahe	-	-	6.520,42	-	-	6.520,42
6	Kutabuluh	12.141,84	3.402,97	287,42	1.431,72	18.074,33	35.338,28
7	Laubaleng	1.397,54	6.975,14	-	3.772,96	16.044,69	28.190,33
8	Mardinding	8.998,38	8.694,79	-	10.187,76	21.406,97	49.524,01
9	Merdeka	1.771,55	322,21	2.959,45	-	-	5.053,21
10	Merek	13.462,83	4.580,36	21.714,17	7,52	-	39.764,89
11	Munte	1.782,90	1.452,16	15.200,09	178,38	2.076,44	20.689,97
12	Naman Teran	2.306,08	2.510,75	4.272,81	309,02	2.579,66	11.978,32
13	Payung	190,43	158,95	4.294,34	-	-	4.643,73

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
14	Simpang Empat	-	79,86	10.934,95	-	-	11.014,81
15	Tigabinanga	4,36	3.047,88	6.679,52	1.025,60	15.157,10	25.914,46
16	Tiganderket	5.911,35	3.636,36	4.432,07	512,37	4.459,71	18.951,86
17	Tigapanah	-	67,39	14.369,84	-	-	14.437,22
	Total	56.571,64	48.661,30	112.562,14	21.222,13	92.121,38	331.374,69

Sumber: Analisis DDDT LHKab Karo, 2023

Gambar 2.2
Peta Sebaran Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir di Wilayah Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

g) Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam

Wilayah Kabupaten Karo memiliki kemampuan yang kurang baik dalam pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam. Wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam kategori tinggi hingga sangat tinggi hanya sebesar 31%, sedangkan dominan wilayah dengan jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam kategori sangat rendah hingga rendah mencapai 62%.

Daerah dengan indeks jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam terendah adalah Kecamatan Kutabuluh seluas 17.497,27 ha, sedangkan indeks jasa lingkungan pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam tertinggi adalah Kecamatan Kutabuluh seluas 12.141,84 ha.

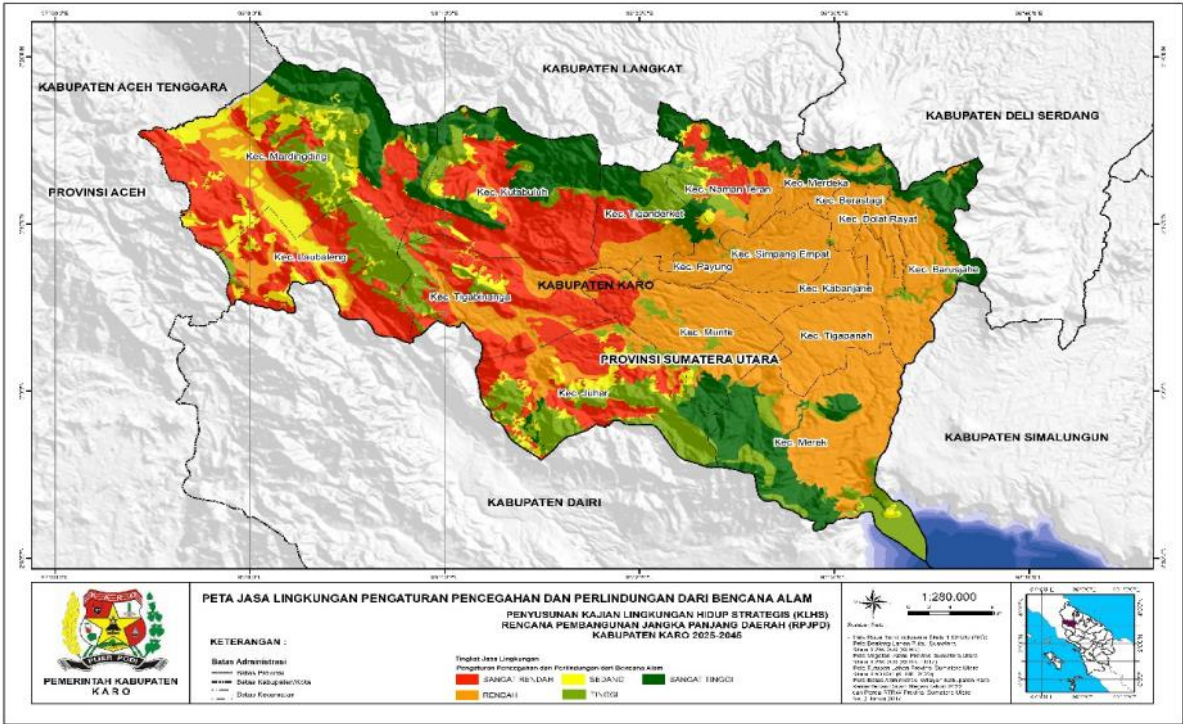
Tabel 2.33
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	5.654,27	1.258,01	-	11.299,64	-	18.211,91
2	Berastagi	977,62	456,37	-	3.460,41	-	4.894,39
3	Dolat Rayat	490,26	64,32	-	2.932,62	-	3.487,20
4	Juhar	1.574,65	11.953,81	3.796,81	4.264,48	11.169,94	32.759,68

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
5	Kabanjahe	-	-	-	6.520,42	-	6.520,42
6	Kutabuluh	12.141,84	3.402,97	1.431,72	864,47	17.497,27	35.338,28
7	Laubaleng	1.397,54	6.977,71	4.043,83	3.228,62	12.542,63	28.190,33
8	Mardinding	8.998,38	8.711,96	10.542,82	4.521,39	16.513,35	49.524,01
9	Merdeka	1.771,55	322,21	-	2.959,45	-	5.053,21
10	Merek	11.538,60	7.124,28	299,36	20.786,55	16,10	39.764,89
11	Munte	1.782,90	1.452,16	178,38	15.200,09	2.076,44	20.689,97
12	Naman Teran	2.306,08	2.510,75	490,12	4.091,71	2.579,66	11.978,32
13	Payung	190,43	158,95	-	4.294,34	-	4.643,73
14	Simpang Empat	-	79,86	-	10.934,95	-	11.014,81
15	Tigabinanga	4,36	3.047,88	1.025,60	6.916,46	14.920,17	25.914,46
16	Tiganderket	5.911,35	3.636,36	586,76	4.357,67	4.459,71	18.951,86
17	Tigapanah	-	67,39	-	14.369,84	-	14.437,22
	Total	54.739,85	51.224,95	22.395,39	121.003,12	81.775,27	331.374,69

Sumber: Analisis DDDT LH Kab Karo, 2023

Peta 2.16
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Alam di Wilayah Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

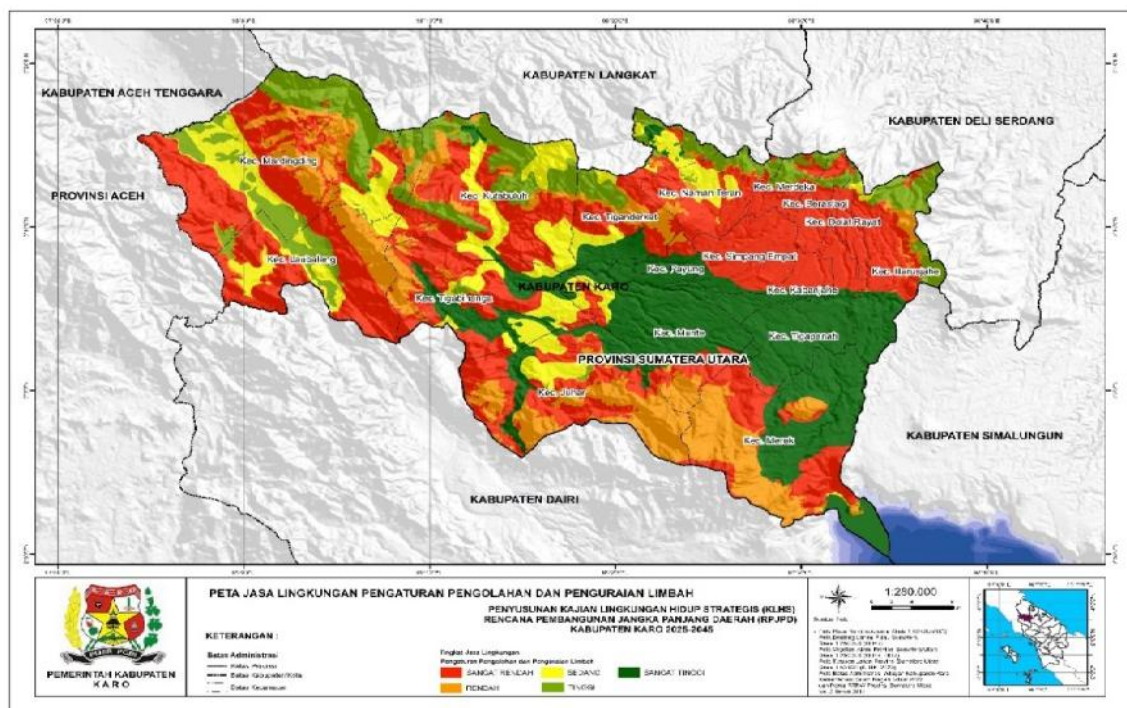
h) Jasa Lingkungan Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah
Jasa lingkungan pengolahan dan penguraian limbah di Kabupaten Karo pada wilayah yang memiliki kemampuan tinggi hingga sangat tinggi hanya 35%. Sedangkan dominasi wilayah yang memiliki kemampuan sangat rendah hingga rendah mencapai 54%.Daerah dengan indeks jasa lingkungan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah terendah adalah Kecamatan Mardinding seluas 19.522,62 ha, sedangkan indeks jasa lingkungan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah tertinggi adalah Kecamatan Merek seluas 17.774,98 ha.

Tabel 2.34

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	4.858,90	4.404,07	164,95	1.384,79	7.399,21	18.211,91
2	Berastagi	-	939,21	-	38,41	3.916,78	4.894,39
3	Dolat Rayat	-	288,68	201,58	-	2.996,94	3.487,20
4	Juhar	4.953,82	173,50	2.996,45	11.957,82	12.678,09	32.759,68
5	Kabanjahe	3.985,94	-	-	-	2.534,48	6.520,42
6	Kutabuluh	655,58	9.409,72	8.442,97	3.332,05	13.497,96	35.338,28
7	Laubaleng	-	4.901,78	3.937,05	4.857,19	14.494,31	28.190,33
8	Mardingding	64,81	13.791,58	7.893,34	8.015,55	19.522,62	49.524,01
9	Merdeka	-	1.588,17	-	183,39	3.281,65	5.053,21
10	Merek	17.774,98	33,25	99,56	11.913,72	9.943,38	39.764,89
11	Munte	14.168,29	-	1.245,40	2.018,83	3.257,46	20.689,97
12	Naman Teran	0,02	1.779,41	2.423,96	837,08	6.937,85	11.978,32
13	Payung	3.848,49	-	-	190,43	604,81	4.643,73
14	Simpang Empat	1.306,32	-	-	-	9.708,49	11.014,81
15	Tigabinanga	6.683,88	315,71	5.371,89	2.616,85	10.926,14	25.914,46
16	Tiganderket	3.805,74	3.812,78	3.048,43	2.677,06	5.607,85	18.951,86
17	Tigapanah	11.415,12	-	-	20,76	3.001,35	14.437,22
	Total	73.521,89	41.437,85	35.825,56	50.043,92	130.309,36	331.374,69

Sumber: Analisis DDDT LHKab Karo, 2023

Peta 2.17



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

Informasi Jasa Lingkungan pengolahan dan penguraian limbah dapat menggambarkan kondisi sisi suplai kemampuan alam menampung limbah. Jasa Lingkungan pengaturan pengolahan dan penguraian limbah berhubungan dengan kemampuan ekosistem dalam menetralsir, mengurai, dan menyerap limbah atau sampah, dalam bentuk kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah.

i) **Jasa Lingkungan Tempat Tinggal dan Ruang Hidup**

Berdasarkan jenis ekoregion dan tutupan lahannya, Kabupaten Karo terhadap jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup yang sangat rendah hingga rendah hanya sekitar 10%. Sedangkan Kabupaten Karo didominasi oleh jasa lingkungan budaya tempat tinggal dan ruang hidup yang tinggi hingga sangat tinggi mencapai 68 persen.

Daerah dengan indeks budaya tempat tinggal dan ruang hidup terendah adalah Kecamatan Mardinding seluas 23.569,83 ha. Sedangkan indeks budaya tempat tinggal dan ruang hidup tertinggi adalah Kecamatan Kabanjahe seluas 814,28 ha.

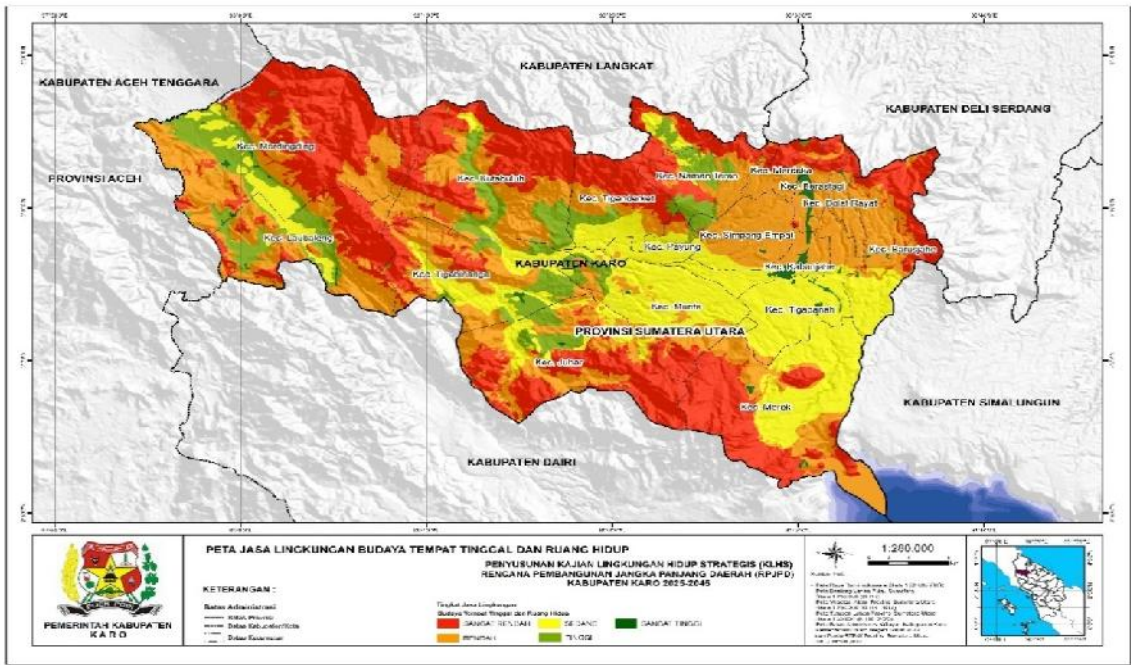
Tabel 2.35
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	99,63	-	4.527,12	6.981,02	6.604,15	18.211,91
2	Berastagi	707,93	-	-	2.752,49	1.433,98	4.894,39
3	Dolat Rayat	37,45	-	-	2.895,17	554,58	3.487,20
4	Juhar	48,52	2.677,94	3.591,96	11.447,50	14.993,76	32.759,68
5	Kabanjahe	814,28	-	3.515,61	2.190,53	-	6.520,42
6	Kutabuluh	1,67	5.823,95	783,31	12.248,71	16.480,63	35.338,28
7	Laubaleng	105,59	4.703,03	1.936,00	11.340,34	10.105,37	28.190,33
8	Mardinding	249,12	6.273,03	3.357,54	15.838,39	23.569,83	49.524,01
9	Merdeka	56,79	88,42	-	2.814,24	2.093,76	5.053,21
10	Merek	159,45	-	14.238,61	9.940,95	15.425,87	39.764,89
11	Munte	34,07	1.245,40	12.966,89	4.197,50	2.246,12	20.689,97
12	Naman Teran	-	3.642,54	255,77	3.209,92	4.870,08	11.978,32
13	Payung	-	263,26	3.570,42	561,79	248,25	4.643,73
14	Simpang Empat	32,77	560,83	1.303,52	9.037,83	79,86	11.014,81
15	Tigabinanga	112,75	4.437,01	6.654,64	10.636,59	4.073,48	25.914,46
16	Tiganderket	-	2.283,69	4.224,82	3.367,96	9.075,39	18.951,86
17	Tigapanah	296,61	-	11.071,88	3.047,98	20,76	14.437,22
	Total	2.756,61	31.999,09	71.998,11	112.508,90	111.875,87	331.374,69

Sumber: Analisis DDDT LHKab Karo, 2023

Peta 2.18

Sebaran Jasa Lingkungan Budaya Tempat Tinggal dan Ruang Hidup di Wilayah Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

j) **Jasa Lingkungan Budaya Ekowisata**

Kabupaten Karo memiliki wilayah dengan jasa lingkungan budaya ekowisata dengan kategori tinggi hingga sangat tinggi hanya sekitar 34 persen, sedangkan didominasi oleh wilayah yang memiliki jasa lingkungan rendah hingga sangat rendah mencakup sekitar 52 persen dari seluruh wilayah.

Daerah dengan indeks budaya ekowisata terendah adalah Kecamatan Mardinding seluas 24.040,61 ha. Sedangkan indeks budaya ekowisata tertinggi adalah Kecamatan Merek seluas 13.018,19 ha.

Tabel 2.36

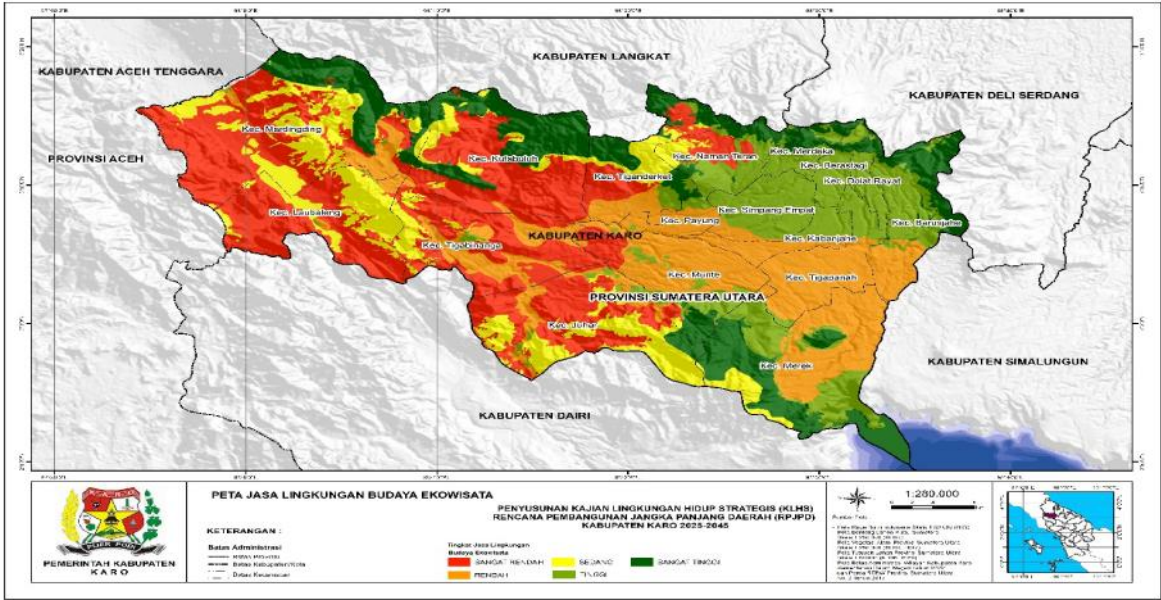
Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Budaya Ekowisata di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	5.953,80	7.707,34	-	4.550,77	-	18.211,91
2	Berastagi	977,62	3.916,78	-	-	-	4.894,39
3	Dolat Rayat	490,26	2.996,94	-	-	-	3.487,20
4	Juhar	1.186,51	1.463,85	11.298,97	3.489,97	15.320,38	32.759,68
5	Kabanjahe	-	2.534,48	-	3.985,94	-	6.520,42
6	Kutabuluh	12.157,80	-	3.387,02	468,60	19.324,86	35.338,28
7	Laubaleng	1.397,54	119,24	8.839,90	973,22	16.860,42	28.190,33
8	Mardinding	8.998,38	105,56	12.938,96	3.204,39	24.040,61	49.524,01
9	Merdeka	1.771,55	3.281,65	-	-	-	5.053,21
10	Merek	13.018,19	9.830,12	2.516,35	14.392,70	7,52	39.764,89
11	Munte	1.853,83	3.440,42	165,00	13.000,96	2.229,76	20.689,97
12	Naman Teran	2.482,36	5.174,15	1.433,12	-	2.888,68	11.978,32
13	Payung	190,43	670,04	-	3.783,26	-	4.643,73
14	Simpang Empat	-	9.708,49	-	1.306,32	-	11.014,81
15	Tigabinanga	-	320,07	2.732,17	7.574,51	15.287,71	25.914,46
16	Tiganderket	5.911,35	1.365,45	3.423,75	3.279,22	4.972,08	18.951,86
17	Tigapanah	20,76	3.047,98	-	11.368,49	-	14.437,22
	Total	56.410,38	55.682,57	46.735,25	71.378,36	100.932,03	331.374,69

Sumber: Analisis DDDT LHKab Karo, 2023

Peta 2.19

Sebaran Jasa Lingkungan Budaya Ekowisata di Wilayah Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

k) Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah

Jasa lingkungan pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah di Kabupaten Karo didominasi oleh tingkat jasa rendah hingga sangat rendah mencapai 40%, sedangkan tingkat tinggi hingga sangat tinggi sekitar 31 persen. Daerah dengan indeks pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah terendah adalah Kecamatan Mardinding seluas 21.882,77 ha. Sedangkan indeks pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan tanah tertinggi adalah Kecamatan Kutabuluh seluas 12.194,34 ha.

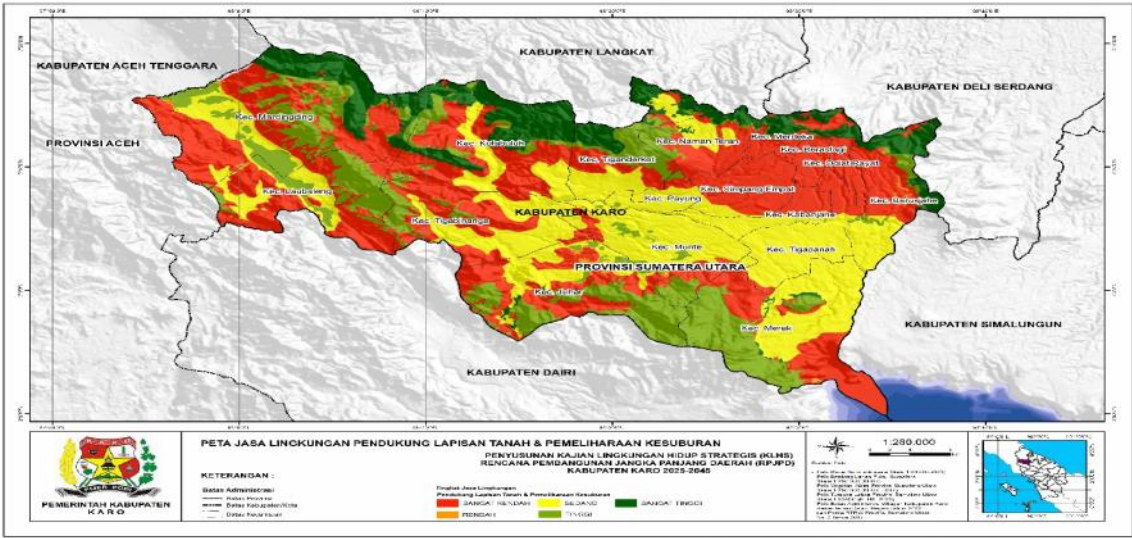
Tabel 2.37

Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	4.569,02	1.393,38	4.550,77	299,54	7.399,21	18.211,91
2	Berastagi	939,21	38,41	-	-	3.916,78	4.894,39
3	Dolat Rayat	490,26	-	-	-	2.996,94	3.487,20
4	Juhar	312,34	12.994,97	6.486,41	642,03	12.323,93	32.759,68
5	Kabanjahe	-	-	3.985,94	-	2.534,48	6.520,42
6	Kutabuluh	12.194,34	3.334,53	6.122,57	-	13.686,85	35.338,28
7	Laubaleng	1.410,03	8.805,38	4.788,07	141,28	13.045,57	28.190,33
8	Mardinding	8.998,38	12.868,55	5.362,23	175,97	21.882,77	49.524,01
9	Merdeka	1.588,17	183,39	-	-	3.281,65	5.053,21
10	Merek	509,87	12.544,08	14.392,70	65,22	12.253,01	39.764,89
11	Munte	-	3.090,17	14.246,36	95,98	3.257,46	20.689,97
12	Naman Teran	1.792,00	1.915,70	2.459,62	-	5.810,99	11.978,32
13	Payung	-	255,66	3.783,26	-	604,81	4.643,73
14	Simpang Empat	-	-	1.306,32	-	9.708,49	11.014,81
15	Tigabinanga	4,36	3.047,88	11.156,41	-	11.705,81	25.914,46
16	Tiganderket	5.027,42	4.307,68	5.645,63	-	3.971,13	18.951,86
17	Tigapanah	-	46,63	11.368,49	20,76	3.001,35	14.437,22
	Total	37.835,39	64.826,40	95.654,78	1.440,78	131.381,23	331.374,69

Peta 2.20

Sebaran Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan Tanah di Wilayah Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

1) **Jasa Lingkungan Pendukung Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati**

Di Kabupaten Karo, didominasi oleh jasa lingkungan pendukung ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (biodiversitas) dengan tingkat jasa berkategori tinggi hingga sangat tinggi mencapai 66%, sedangkan tingkat jasa lingkungan rendah hingga sangat rendah hanya sekitar 1% dari keseluruhan wilayah.

Daerah dengan indeks pendukung ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (biodiversitas) terendah adalah Kecamatan Mardingding seluas 3.097,27 ha. Sedangkan indeks pendukung ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati (biodiversitas) tertinggi adalah Kecamatan Merek seluas 12.579,71 ha.

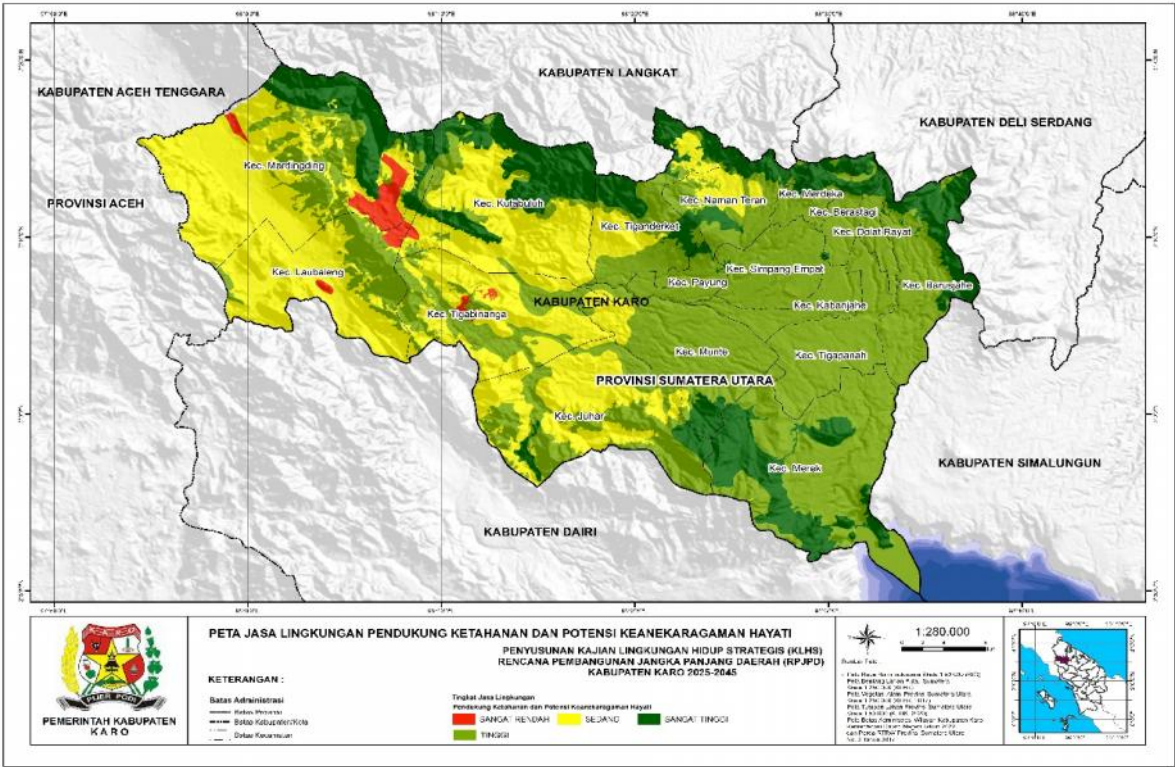
Tabel 2.38

Sebaran Kinerja Jasa Lingkungan Pendukung Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Status Jasa Lingkungan					Total
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Barusjahe	6.304,61	11.907,30	-	-	-	18.211,91
2	Berastagi	1.433,98	3.460,41	-	-	-	4.894,39
3	Dolat Rayat	554,58	2.932,62	-	-	-	3.487,20
4	Juhar	1.860,23	14.780,19	16.119,27	-	-	32.759,68
5	Kabanjahe	-	6.520,42	-	-	-	6.520,42
6	Kutabuluh	12.141,84	3.690,38	19.324,86	-	181,19	35.338,28
7	Laubaleng	1.397,54	6.975,14	18.910,06	-	907,58	28.190,33
8	Mardingding	8.998,38	8.694,79	28.497,46	-	3.097,27	49.524,01
9	Merdeka	2.093,76	2.959,45	-	-	-	5.053,21
10	Merek	12.579,71	27.171,80	13,38	-	-	39.764,89
11	Munte	1.856,86	16.578,29	2.254,82	-	-	20.689,97
12	Naman Teran	3.207,43	5.882,20	2.888,68	-	-	11.978,32
13	Payung	284,16	4.359,57	-	-	-	4.643,73
14	Simpang Empat	79,86	10.934,95	-	-	-	11.014,81
15	Tigabinanga	4,36	9.727,40	15.633,87	-	548,84	25.914,46
16	Tiganderket	6.123,95	7.855,82	4.972,08	-	-	18.951,86
17	Tigapanah	-	14.437,22	-	-	-	14.437,22
Total		58.921,26	158.867,96	108.614,48	-	4.734,88	331.374,69

Sumber: Analisis DDDT LHKab Karo, 2023

Peta 2.21
Sebaran Jasa Lingkungan Pendukung Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati di Wilayah Kabupaten Karo



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Pangan

Energi, air, dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Ketahanan energi yang baik menunjukkan bahwa daerah memiliki akses yang memadai dan pemanfaatan energi yang efisien. Hal ini penting karena akses yang memadai terhadap energi listrik mendukung produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, efisiensi energi yang tinggi mengurangi dampak lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Akses listrik yang luas juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan fasilitas dasar seperti penerangan, pemanas/memasak, dan perangkat elektronik. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mengukur persentase penduduk yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan yang cukup dalam jangka waktu tertentu, mencerminkan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di masyarakat. Ketahanan pangan yang baik penting untuk memastikan bahwa seluruh penduduk memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Hal ini penting karena kecukupan gizi meningkatkan kesehatan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Selain itu, gizi yang baik mendukung kemampuan belajar anak-anak dan produktivitas kerja orang dewasa. Memastikan semua penduduk mendapatkan cukup pangan juga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Ketahanan air yang baik menunjukkan bahwa daerah mampu menyediakan sumber daya air yang memadai dan aman bagi penduduknya. Hal ini penting karena akses terhadap air minum yang aman mengurangi risiko penyakit yang ditularkan melalui air. Selain itu, ketersediaan air baku mendukung irigasi dan produksi pertanian, yang penting untuk ketahanan pangan. Ketersediaan air yang memadai juga mendukung industri dan kebutuhan ekonomi lainnya, mendukung pembangunan ekonomi daerah.

A. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat pencapaian pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional, berikut adalah skor IKP Kabupaten Karo dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.39
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	83,37	83,22	80,36	81,35	82,28

Sumber: Badan Pangan Nasional

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Karo mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2024, IKP kembali meningkat menjadi 82,28, menunjukkan tren pemulihan yang positif. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek ketahanan pangan, baik dari segi produksi, distribusi, maupun kebijakan yang mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Karo. Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, indeks ketahanan pangan Kabupaten Karo tetap berada dalam kategori yang cukup baik, dengan tren perbaikan dalam dua tahun terakhir. Upaya peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk memastikan stabilitas pangan di Kabupaten Karo, selain itu diversifikasi pangan perlu terus ditekankan untuk mengurangi ketergantungan konsumsi pangan yang cenderung fokus pada satu komoditas.

B. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment/ PoU*) merupakan indikator yang mengukur proporsi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah standar kecukupan energi yang diperlukan untuk hidup sehat, aktif dan produktif.

Tabel 2.40
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	4,56	3,78	6,42	5,42	6,13

Sumber: Badan Pangan Nasional

Dari data di atas dapat diartikan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah penduduk yang mengonsumsi pangan dibawah kebutuhan energi minimum dari tahun 2023-2024. Artinya penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi energi meningkat sekitar 0,71 persen. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak dari tahun sebelumnya, artinya penduduk di Kabupaten Karo yang mengonsumsi makanan tetapi kebutuhan energinya kurang. Angka tersebut perlu untuk terus ditekan. Peningkatan PoU mengindikasikan adanya penurunan dalam akses atau ketersediaan pangan yang memadai bagi Masyarakat dan sebaliknya. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya pangan dapat berkontribusi terhadap peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi yang dapat diterapkan antara lain peningkatan produksi pangan lokal, perbaikan distribusi pangan, penyuluhan gizi, serta program bantuan sosial yang tepat sasaran. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Karo dapat ditekan, sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik.

C. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita merujuk pada jumlah total konsumsi listrik yang digunakan oleh setiap individu dalam suatu wilayah atau negara, yang dihitung berdasarkan pembagian total konsumsi listrik dengan jumlah penduduk. Konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Karo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan semakin meningkatnya kualitas hidup masyarakat sehingga banyaknya kebutuhan akan listrik di berbagai sektor kehidupan seperti rumah tangga, industri, dan teknologi. Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya infrastruktur yang mendukung akses Listrik. Listrik menjadi salah satu kebutuhan pokok yang tidak hanya mendukung kegiatan rumah tangga, tetapi juga mendukung sektor industri, pendidikan, dan kesehatan.

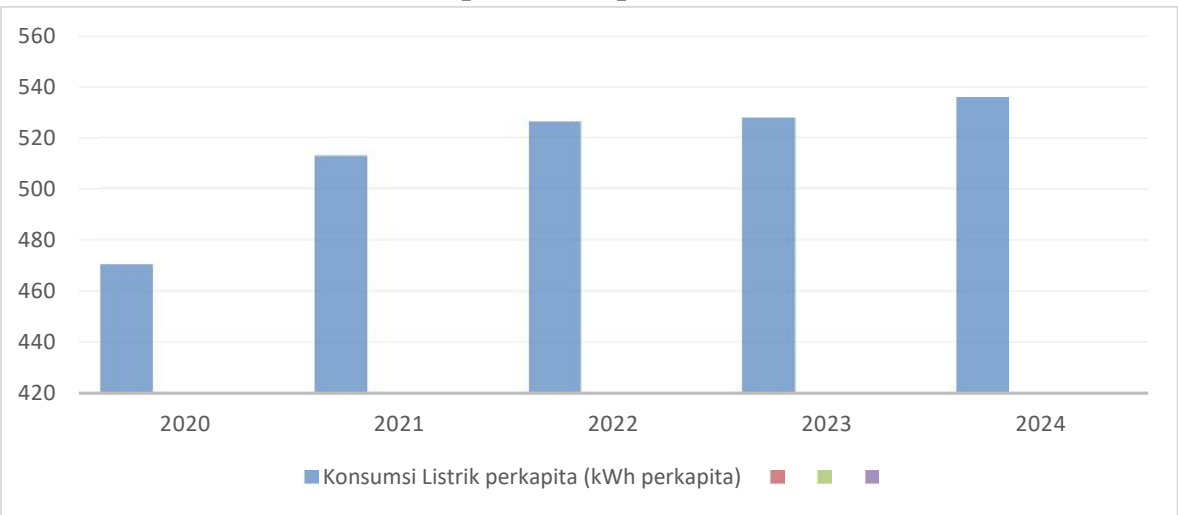
Seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk periode selanjutnya, maka permintaan untuk listrik dari sektor industri dan komersial akan semakin meningkat. Untuk itu pemerintah harus terus berusaha untuk meningkatkan infrastruktur, mengembangkan infrastruktur, efisiensi energi dan diversifikasi energi dengan cara mendorong energi terbarukan. Konsumsi Listrik perkapita tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	421.997	409.077	414.429	420.799	426,471
2	Konsumsi Listrik (kWh)	198.492.250	209.737.646	218.076.914	222.021.744	228.492.886
3	Konsumsi Listrik perkapita	470,364	512,709	526,210	527,619	535,776

Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe, 2025

Grafik 2.5
Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Kabanjahe, 2025

D. Persentase penduduk berakses air minum layak dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan

Untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum layak termasuk akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan maka diperlukan beberapa hal untuk dilakukan yakni perluasan, peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada serta pembangunan SPAM baru pada daerah daerah yang belum tersedia. Dalam meningkatkan akses tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo menghadapi beberapa kendala antara lain sumber-sumber mata air yang berada di kawasan hutan, dan dibeberapa lokasi sulit menemukan sumber mata air. Untuk mempertahankan peningkatan persentase penduduk berakses air minum layak dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan maka diperlukan pendanaan secara kolektif yaitu APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan alternatif yang memungkinkan.

Tabel 2.42
Persentase Penduduk berakses air minum layak dan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk berakses air minum layak (%)	69,7	69,23	70,35	74,59	68,71
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	36,75	37,28	37,40	38,00	38,12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, 2025

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup yang baik sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting karena lingkungan yang bersih dan sehat mengurangi risiko penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan yang baik mendukung pembangunan berkelanjutan dan penggunaan sumber daya yang efisien. Lingkungan hidup yang berkualitas juga meningkatkan daya tarik daerah bagi wisatawan dan investor. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang tinggi menunjukkan bahwa daerah berhasil melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati. Hal ini penting karena keanekaragaman hayati yang terjaga mendukung ekosistem yang seimbang dan berfungsi dengan baik. Selain itu, keanekaragaman hayati yang kaya dapat menjadi daya tarik pariwisata dan mendukung ekonomi hijau. Ekosistem yang sehat juga mendukung ketahanan pangan, air bersih, dan kesehatan masyarakat.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan indeks tutupan lahan. Capaian IKLH Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.43
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	66,55	66,05	71,66	72,21

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian IKLH di Kabupaten Karo menunjukkan kecenderungan yang meningkat hingga tahun 2024 Nilai IKLH sebesar 72,21 poin. Hal ini mengidentifikasikan bahwa terjadi perbaikan dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, nilai ini juga mencerminkan bahwa kondisi lingkungan telah mengalami perbaikan dan berada pada tingkat yang lebih baik selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Karo.

B. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Karo hanya terdapat pada lokasi yang telah dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah dikarenakan Kabupaten Karo belum memiliki Instalasi Penegelolaan Lumpur Tinja sebagai tempat pembuangan akhir lumpur tinja yang di sedot dari tangka septik rumah tangga. Untuk meningkatkan Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman maka selain pembangunan IPLT juga diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat agar membangun tangki septik kedap air.

Tabel 2.44
Rumah tangga dengan akses sanitasi aman
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,88	3,03	3,32	3,50	3,64

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Karo, 2025

C. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah artinya adalah jumlah atau porsi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat yang kemudian berhasil diproses, dikelola, dan diolah melalui fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah, seperti TPA (Tempat Pembuangan Akhir), TPST (Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu), atau SPA (Sentra Pengolahan Sampah). Untuk melihat perkembangan Capaian Timbulan sampah yang ditangani Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 yaitu:

Tabel 2.45
Capaian Timbulan sampah yang ditangani
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan sampah yang ditangani (%)	74,86	84	85	78,06	78,03

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Secara garis besar, terdapat peningkatan pengelolaan sampah, namun penurunan terjadi di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya tantangan atau perubahan kondisi yang mempengaruhi efektivitas penanganan sampah. Sudah ada upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Karo namun tantangan infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan pendanaan masih menjadi kunci permasalahan yang perlu segera diatasi agar pengelolaan sampah dapat lebih efektif dan ramah

lingkungan. Hal ini menjadi perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi atau kebijakan yang diterapkan guna memperbaiki kinerja pada penanganan timbulan sampah di Kabupaten Karo secara berkelanjutan.

D. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Upaya peningkatan layanan pengumpulan sampah di Kabupaten Karo terus dilakukan melalui pembenahan infrastruktur, peningkatan koordinasi antar instansi, serta program edukasi kepada masyarakat agar partisipasi dalam pengelolaan sampah dapat meningkat. Berikut capaian proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah:

Tabel 2.46
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cakupan area Pelayanan (%)	28,72	35,32	35	35	41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dalam 5 (lima) tahun terakhir persentase cakupan area pelayanan mengalami peningkatan, dari kondisi tahun 2020 sebesar 28,72 persen menjadi 41 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam memperluas jangkauan layanan. Ini dapat diartikan bahwa secara bertahap, lebih banyak wilayah atau rumah tangga mendapatkan akses terhadap layanan yang disediakan dari tahun ke tahun.

2.1.1.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Karo merupakan wilayah rawan bencana, dimana beberapa potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Indeks Risiko Bencana yang rendah menunjukkan bahwa daerah memiliki tingkat risiko bencana yang rendah atau telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang efektif. Hal ini penting karena mengurangi risiko bencana membantu melindungi nyawa dan properti masyarakat. Selain itu, mengurangi dampak bencana alam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi, serta mempercepat pemulihan pasca bencana. Daerah dengan risiko bencana rendah juga lebih menarik bagi investor karena menawarkan lingkungan bisnis yang lebih aman dan stabil.

Kabupaten Karo menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim, terutama karena posisi geografisnya yang rawan bencana dan ketergantungannya pada sektor pertanian dan pariwisata. Pembangunan berkelanjutan dan adaptif terhadap iklim sangat penting untuk memastikan daya tahan sosial, ekonomi, dan lingkungan daerah. Isu pembangunan terkait perubahan iklim di Kabupaten Karo sangat relevan mengingat karakteristik wilayah Karo yang bergunung-gunung, memiliki kawasan hutan lindung, dan sangat bergantung pada sektor pertanian serta pariwisata alam. Kenaikan suhu dan ketidakpastian iklim, banjir dan longsor, degradasi hutan dan lahan, ketahanan pangan dan energi, ketahanan sektor pariwisata

Penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan menunjukkan komitmen daerah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini penting karena mengurangi emisi GRK adalah langkah penting dalam

mitigasi perubahan iklim global yang berdampak pada suhu, pola cuaca, dan fenomena alam ekstrem. Selain itu, penurunan emisi GRK mengurangi polusi udara, yang berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Daerah yang berhasil mengurangi emisi GRK juga mendukung pembangunan berkelanjutan dan menunjukkan tanggung jawab lingkungan yang tinggi.

A. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Pemerintah menyadari perubahan iklim merupakan persoalan krusial, berdampak luas pada berbagai sendi kehidupan serta dapat mempengaruhi capaian pembangunan nasional atas dasar itu persoalan perubahan iklim memerlukan respon yang cepat, tepat, dan terintegrasi. Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan indikator penting dalam pembangunan rendah karbon, yang mengukur jumlah emisi GRK per unit output ekonomi. Penurunan intensitas emisi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan emisi GRK yang lebih rendah, mencerminkan efisiensi dan keberlanjutan dalam Pembangunan.

Tabel 2.47
Penurunan Intensitas Gas Rumah Kaca
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Potensi Penurunan Emisi dan intensitas emisi (ton CO2eq)	924,005	50.408,939	50.425,018	83.532,448	--

sumber: AKSARA, Bappenas

Di Kabupaten Karo Realisasi penurunan emisi dan intensitas emisi ditopang oleh beberapa faktor antara lain dari sektor pertanian, transportasi dan persampahan. Angka 83.532,44817 ton CO₂ eq pada Tahun 2023 mengacu pada jumlah total pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berhasil direduksi atau diproyeksikan dalam suatu periode tertentu. Ini adalah ukuran absolut dari penurunan emisi, yang menyatukan berbagai jenis GRK ke dalam satu nilai perbandingan (dengan dasar efek pemanasan yang setara dengan CO₂). Sementara itu, **intensitas emisi** mengukur jumlah emisi yang dihasilkan per unit *output* ekonomi, misalnya per unit Produk Domestik Bruto (PDB) atau per unit produksi. Jadi, penurunan intensitas emisi menunjukkan bahwa dalam setiap unit kegiatan ekonomi, emisi yang dilepaskan semakin sedikit. Artinya, meskipun angka 83.532,44817 ton CO₂ eq menunjukkan pengurangan total yang signifikan, jika intensitas emisi juga menurun, hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi dengan dampak lingkungan yang lebih rendah, karena setiap unit output ekonomi menghasilkan emisi yang lebih sedikit.

B. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Indeks Risiko Bencana (IRBI) adalah alat untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah. IRBI juga menunjukkan riwayat bencana yang pernah terjadi di wilayah tersebut. IRBI disusun oleh BNPB dan dapat memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Nilai-nilai dalam IRBI dapat menjadi panduan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana. Tujuan IRBI adalah:

-) Memberikan informasi tingkat risiko bencana di setiap kabupaten/kota di Indonesia
-) Memberikan gambaran capaian upaya penanggulangan bencana
-) Memberikan panduan untuk menentukan prioritas upaya penanggulangan bencana

) Meningkatkan ketangguhan masyarakat

IRBI mencakup nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Karo dapat terlihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel 2.48
Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
IRBI	120,99	117,09	112,15	112,97	110,22

Sumber: <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi>

C. Indeks Kapasitas Daerah (IKD)

Kapasitas daerah adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana. Indeks Kapasitas Daerah (IKD) adalah alat untuk mengukur kemampuan daerah dalam menghadapi bencana. Tujuan IKD Mengukur kapasitas penanggulangan bencana, Membantu menyusun peta kapasitas, Memutakhirkan peta risiko bencana, Membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kapasitas. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Berdasarkan <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> Tingkat Kapasitas Daerah dalam menghadapi bencana adalah Tingkatan Sedang.

Tabel 2.49
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah	-	0.37	0.47	0.49	0.48

Sumber: BPBD Kabupaten Karo, 2025

Pada tabel tersebut Penurunan Nilai IKD pada tahun 2024 disebabkan karena dokumen KRB dan RPB belum diupdate dan dinilai oleh BNPB.

2.1.1.7. Aspek Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Secara demografi berdasarkan hasil proyeksi penduduk hasil sensus penduduk 2020, pada tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Karo adalah berjumlah 426.471 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.206,87 km². Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 77.672 jiwa, sedangkan Laju Pertumbuhan tertinggi berada di Kecamatan Merek sebesar 2,20% dan kepadatan tertinggi ada di Kecamatan Kabanjahe sebesar 2.263,97 km².

A. Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun

ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. rasio ketergantungan juga bisa diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk angkatan kerja di suatu wilayah atau Negara.

Tabel 2.50
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Ketergantungan (%)	57,17	51,84	49,17	47,64	47,42

Sumber: BPS, 2025

Rasio ketergantungan Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun menunjukkan tren positif menurun dari tahun ke tahun sehingga setiap tahunnya yang berarti beban ketergantungan terhadap penduduk yang tidak produktif semakin menurun. Pada tahun 2024 rasio ketergantungan sebesar 47,42 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 47-48 penduduk nonproduktif. Rasio ketergantungan tersebut dikategorikan rendah karena angka sudah mencapai di bawah 50. Rasio ketergantungan tersebut dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi Kabupaten Karo, hal ini diartikan ketika rasio ketergantungan tinggi maka pertumbuhan ekonomi terganggu atau penghasilan masyarakat rendah karena beban tinggi, sementara itu rasio yang rendah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

B. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan, rasio jenis kelamin bermanfaat dalam perencanaan pembangunan berwawasan gender.

Tabel 2.51
Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Karo 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Jenis Kelamin	97,80	98,51	98,00	98,30	98,42

Sumber: BPS, 2025

Secara umum jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karo lebih sedikit dibanding pendudukan perempuan. Pada tahun 2024 mencapai nilai 98,42 artinya bahwa terdapat 98 penduduk laki-laki berbanding 100 penduduk perempuan. Data diatas juga menunjukkan bahwa hampir setiap tahun kelahiran anak laki-laki selalu lebih sedikit dari perempuan akan tetapi trennya menuju keseimbangan dengan penduduk perempuan.

C. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, perkembangan wilayah, dan dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan data kepadatan penduduk selama lima tahun terakhir, pada tahun 2024 merupakan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 193,25 km². Dilihat dari kewilayahannya 3 (tiga) kecamatan kepadatan tertinggi berada di Kecamatan Kabanjahe dengan kepadatan 2.263,97 km², Berastagi sebesar 1.494,46 km², dan Dolat Rayat kepadatan 458 km². Sedangkan kepadatan yang rendah berada di Kecamatan Kutabuluh sebesar 51,77 km², Mardinding dengan kepadatan 64,92 km², dan Juhar sebesar 69,86 km².

Tabel 2.52
Kepadatan Penduduk Kabupaten Karo 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Wilayah	2.206,87 km ²				
Jumlah Penduduk	404.998	409.077	414.429	420.799	426.471
Kepadatan Penduduk	183,52	185,37	187,79	190,68	193,25

Sumber: BPS, 2025

D. Kondisi Laju Pertumbuhan Penduduk, Piramida Penduduk berdasarkan kelompok umur dan jensi kelamin

Penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2015 berjumlah 389.591 jiwa dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 193.397 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 196.194 jiwa. Tahun 2020, penduduk Kabupaten Karo meningkat menjadi 421.997 dengan rincian yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 209.389 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan 212.608 jiwa.

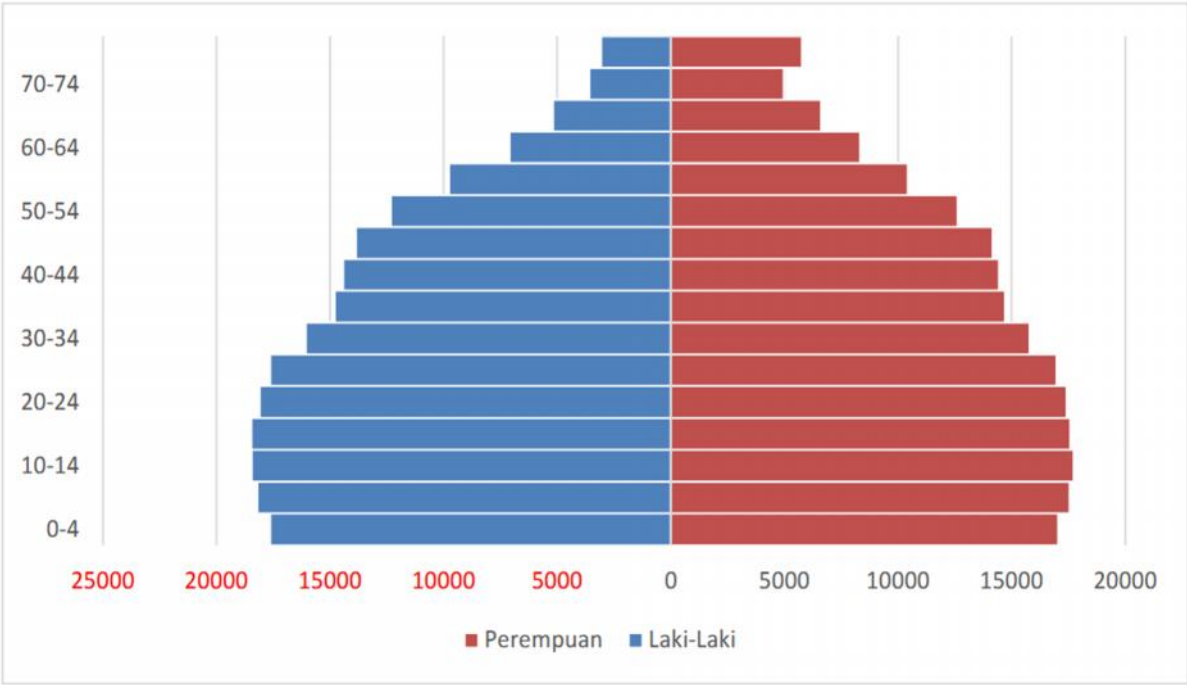
Tabel 2.53
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2024

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2010	174.970	177.626	352.596
2015	193.397	196.194	389.591
2020	209.389	212.608	421.997
2021	202.327	206.750	409.077
2022	205.035	209.394	414.429
2023	208.600	212.199	420.799
2024	211.531	214.940	426.471

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2024, penduduk Kabupaten Karo mencapai 426.471 jiwa. Dibanding jumlah penduduk pada tahun 2023, terjadi pertambahan penduduk sebesar 5.672 jiwa (1,32 persen). Dengan luas wilayah mencapai 2.206,87 km², kepadatan penduduk Kabupaten Karo di tahun 2023 diperkirakan sebesar 193,25 jiwa/km². Komposisi penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki, dimana pada tahun 2024 terdapat 214.940 jiwa penduduk Kabupaten Karo berjenis kelamin perempuan sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 211.531 jiwa.

Grafik 2.6
Piramida Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Piramida penduduk tersebut merupakan piramida penduduk muda yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk berusia muda lebih banyak dari jumlah penduduk usia tua. Jumlah Penduduk Kabupaten Karo paling banyak pada kelompok umur 25-29 tahun yang diikuti oleh kelompok umur 30-34 tahun dan kelompok umur 0-4 tahun. Sedangkan kelompok umur 70 tahun ke atas merupakan jumlah penduduk yang paling sedikit dibandingkan kelompok umur lainnya. Komposisi ini menunjukkan potensi kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki Kabupate Karo untuk 30-40 tahun kedepan sebagai salah satu modal dasar pembangunan ekonomi yang juga harus diikuti dengan perbaikan serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga menjadi motor penggerak perekonomian yang pada akhirnya mampu mendorong perbaikan kehidupan sosial penduduk 30-40 tahun mendatang. Piramida penduduk muda menunjukkan bahwa sebagian besar populasi berada di kelompok usia muda, biasanya 0-14 tahun, bentuknya melebar di bagian bawah dan mengecil ke atas. Implikasi dari piramida penduduk muda pada berbagai aspek antara lain kebutuhan pendidikan dan kesehatan dibutuhkan peningkatan pelayanan pendidikan seperti guru dan sarana prasarana pendidikan, fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk melayani populasi muda. Jika pendidikan dan lapangan kerja tidak memadai ada potensi meningkatnya masalah sosial seperti penangguran, kriminalitas dan ketidakstabilan sosial. Kedepannya dibutuhkan investasi besar di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial untuk menyiapkan generasi muda menjadi tenaga kerja produktif di masa depan.

E. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun kedepan

Proyeksi jumlah penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi-asumsi dari komponen laju pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian dan perpindahan (migrasi). Jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2025 mencapai 432.050 jiwa, diproyeksi lima tahun kedepan akan mengalami peningkatan. Pada tahun 2026 mencapai 437.550 jiwa dan pada tahun 2030 mencapai 458.450 jiwa. Pada tahun sebelumnya komposisi penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki, diproyeksikan kedepannya komposisi jumlah penduduk perempuan

masih lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki. Pada tahun 2030 jumlah penduduk perempuan mencapai 230.570 jiwa dan proyeksi jumlah penduduk laki-laki mencapai 227.880 jiwa.

Tabel 2.54
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Karo	432.050	437.550	442.940	448,240	453.410	458.450
2.	Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kabupaten Karo	214.410	217.240	220.000	222.700	225.330	227.880
3.	Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Karo	217.640	220.310	222.940	225.540	228.080	230.570

Sumber: BPS, 2025

Proyeksi penduduk Kabupaten Karo menurut kelompok umur diperkirakan adanya penurunan jumlah penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun pada tahun 2025 sebanyak 107.140 jiwa atau 24,80 persen dari jumlah penduduk sedangkan pada tahun 2030 diproyeksikan mencapai 109.170 (23,81 persen), penurunan tersebut diasumsikan dari faktor jumlah kelahiran yang menurun bahwa jumlah kelahiran dari 1 perempuan pada usia suburanya berkurang. Proyeksi pada kelompok umur produktif usia 15-64 tahun cenderung menurun, hal ini dampak dari menurunnya jumlah kelahiran. Sedangkan pada kelompok usia di atas 64 tahun diproyeksikan meningkat hal ini terlihat pada tahun 2025 mencapai 31.540 jiwa atau 7,30 persen dari jumlah penduduk dan pada tahun 2030 meningkat mencapai 38.820 jiwa atau 8,46 persen dari jumlah penduduk. Hal ini diasumsikan meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan umur harapan hidup.

Tabel 2.55
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Kelompok umur 0-14 tahun	107.140 (24,80%)	107.430 (24,55%)	107.770 (24,34%)	108.230 (24,14%)	108.710 (23,97%)	109.170 (23,81%)
2.	Kelompok umur 15-64 tahun	293.370 (67,90%)	297.260 (67,94%)	300.940 (67,93%)	304.320 (67,90%)	307.470 (67,82%)	310.460 (67,71%)
3.	Kelompok umur diatas 64 tahun	31.540 (7,30%)	32.860 (7,51%)	34.250 (7,73%)	35.690 (7,96%)	37.230 (8,21)	38.820 (8,46%)
Jumlah total		432.050	437.560	442.950	448.250	453.400	458.450

Sumber: BPS, 2025

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat mengacu pada tingkat kemakmuran dan kualitas hidup yang dinikmati oleh suatu kelompok atau komunitas dalam suatu wilayah. Aspek ini mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mencapai kehidupan yang layak dan

berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat:

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Perlambatan yang sangat dominan terjadi pada tahun 2020, Laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 0.80 persen. Hal ini akibat *pandemi Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi. Pada tahun 2021 kembali mengalami akselerasi hingga tahun 2024 menjadi 4,22 persen. Tabel di bawah menunjukkan gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo.

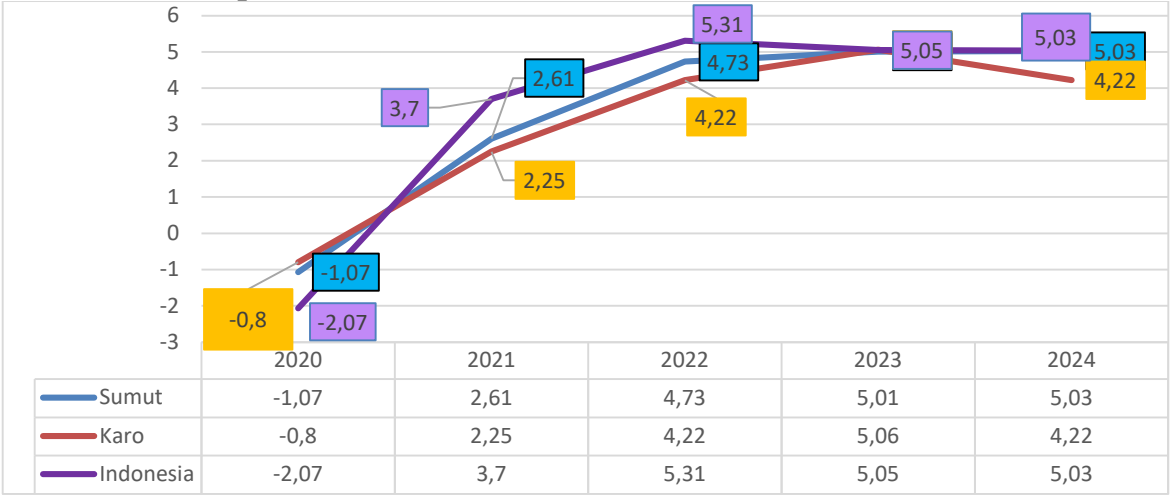
Tabel 2.56
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-0,80	2.25	4,22	5,06	4,22

Sumber: BPS Kabupaten Karo

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang mirip namun pada periode tahun 2021 hingga tahun 2024 cenderung lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi Sumut dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Karo, Sumut dan Nasional Tahun 2020-2024



Berdasarkan kondisi diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Masyarakat Kabupaten Karo mengalami peningkatan kesejahteraan walaupun pertumbuhan tahun 2024 mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, pada tahun 2023 pertumbuhan mencapai 5,06 persen, sedangkan pada tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 4,22 persen. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan Pembangunan di suatu wilayah, untuk itu pertumbuhan ekonomi diharapkan semakin berakselerasi dengan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya lokal.

B. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode

tertentuyang dihitung berdasarkan 17 (Tujuh belas) sektor strategis. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku (PDRB ADHB) dan berdasarkan atas harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara rill karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024**	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.268,55	53,72	11.779,76	53,98	13.005,30	54,24	14.193,51	53,75	15.312,17	53,04
2	Pertambangan dan Penggalian	43,60	0,21	45,13	0,21	49,09	0,20	53,89	0,20	57,87	0,20
3	Industri Pengolahan	779,12	3,71	829,08	3,80	923,06	3,85	1.007,98	3,82	1.076,36	3,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15,16	0,07	15,86	0,07	16,90	0,07	17,83	0,07	17,71	0,06
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	17,68	0,08	17,96	0,08	18,52	0,08	19,44	0,07	20,45	0,07
6	Konstruksi	1.558,61	7,43	1.605,89	7,36	1.728,21	7,21	1.849,38	7,00	2.038,07	7,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.217,78	10,57	2.370,49	10,86	2.668,59	11,13	3.000,17	11,36	3.244,23	11,24
8	Transportasi dan Pergudangan	948,64	4,52	969,86	4,44	1.107,80	4,62	1.363,86	5,16	1.654,90	5,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	537,68	2,56	546,07	2,50	589,96	2,46	650,67	2,46	746,75	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	165,95	0,79	181,03	0,83	198,46	0,83	215,12	0,81	231,13	0,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	284,02	1,35	313,91	1,44	354,53	1,48	368,64	1,40	399,25	1,38
12	Real Estate	733,56	3,50	743,09	3,40	813,29	3,39	880,29	3,33	847,43	3,28
13	Jasa Perusahaan	42,73	0,20	43,71	0,20	47,85	0,20	53,20	0,20	59,02	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.283,32	6,12	1.259,39	5,77	1.274,18	5,31	1.409,08	5,34	1.622,53	5,62
15	Jasa Pendidikan	510,59	2,43	530,66	2,43	557,11	2,32	616,15	2,33	675,52	2,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	279,72	1,33	278,51	1,28	296,11	1,24	337,10	1,28	357,56	1,24
17	Jasa Lainnya	287,88	1,37	293,73	1,35	326,61	1,36	372,67	1,41	406,94	1,41
PDRB ADHB		20.974,57	100,00	21.824,14	100,00	23.975,57	100,00	26.408,97	100,00	28.867,89	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku untuk tahun 2020-2024 cenderung meningkat setiap tahunnya yaitu dari Rp20.974,57 miliar pada tahun 2020 terus meningkat hingga menjadi Rp28.867,89 miliar pada tahun 2024. Terdapat 3 (Tiga) lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHB tahun 2024 yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan sektor konstruksi.

Tabel 2.58

Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2020-2024 (dalam Miliar Rupiah) Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Lapangan Usaha	2020		2021		2022		2023		2024**	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.876,71	55,23	8.106,36	55,59	8.421,76	55,42	8.767,6	54,91	8.990,20	53,04
2	Pertambangan dan Penggalian	32,56	0,23	33,28	0,23	34,91	0,23	36,76	0,23	39,00	0,20
3	Industri Pengolahan	467,42	3,28	480,79	3,30	506,93	3,34	528,43	3,31	544,68	3,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13,83	0,10	14,37	0,10	14,96	0,10	15,52	0,10	15,93	0,06
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	12,2	0,09	12,25	0,08	12,52	0,08	12,87	0,08	13,25	0,07
6	Konstruksi	958,86	6,72	960,59	6,59	988,31	6,50	1.051,06	6,58	1.126,86	7,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.458,89	10,23	1.519,81	10,42	1.604,46	10,56	1.725,71	10,81	1.813,63	11,24
8	Transportasi dan Pergudangan	658,7	4,62	654,79	4,49	711,77	4,68	793,52	4,97	864,34	5,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	369,98	2,59	375,29	2,57	396,89	2,61	418,91	2,62	459,64	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	148,72	1,04	158,76	1,09	169	1,11	181,83	1,14	197,15	0,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	184,42	1,29	195,29	1,34	203,65	1,34	215,263	1,35	228,07	1,38
12	Real Estate	475,93	3,34	469,35	3,22	490,27	3,23	515,33	3,23	542,17	3,28
13	Jasa Perusahaan	27,37	0,19	27,36	0,19	28,57	0,19	30,09	0,19	32,00	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	831,03	5,83	815,96	5,60	818,69	5,39	821,52	5,15	875,87	5,62
15	Jasa Pendidikan	373,09	2,62	386,25	2,65	404,73	2,66	435,2	2,73	466,58	2,34
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	182,25	1,28	179,49	1,23	187,49	1,23	202,45	1,27	206,49	1,24
17	Jasa Lainnya	189,51	1,33	192,34	1,32	202,63	1,33	214,24	1,34	225,32	1,41
PDRB ADHK		14.261,47	100,00	14.582,33	100,00	15.197,52	100,00	15.966,67	100,00	16.641,17	100,00

Sumber: BPS Karo,2025

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp14.261,47 miliar terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp16.641,17 miliar. Kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB ADHK sama dengan PDRB ADHB mencakup 3 (tiga) sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

C. PDRB Per Kapita

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. Perkembangan produk domestik regional bruto perkapita per tahun Kabupaten Karo ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 2.59

PDRB perkapita Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Perkapita ADHB (juta rupiah)	51,96	53,35	57,76	62,76	67,69
PDRB Perkapita ADHK (juta rupiah)	35,21	35,65	36,67	37,94	39,02

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2025

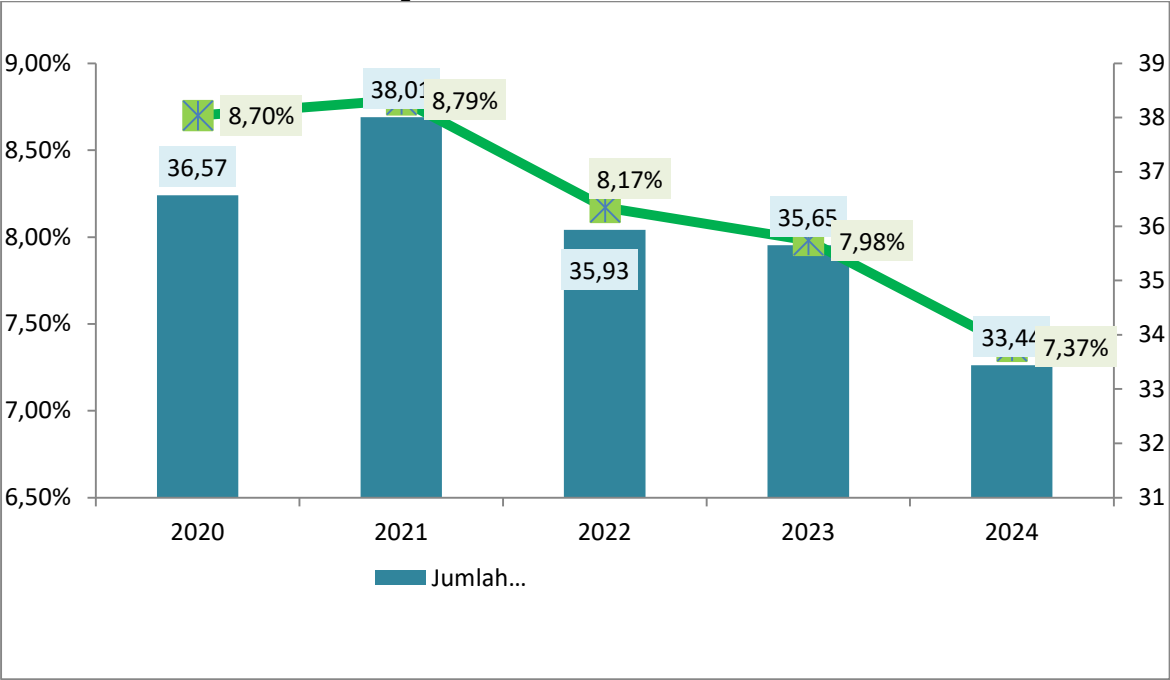
PDRB perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2020 sampai 2024 cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo yang dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

D. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Karo dari tahun 2020-2024 berlangsung fluktuatif. Secara *trend* dalam periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan nilai positif dimana persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dari tahun 2020 sebesar 8,70 persen berangsur-angsur menurun menjadi 7,37 persen di tahun 2024.

Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak *Covid-19*. Sedangkan penurunan kemiskinan pada tahun 2024 didukung dari program pengurangan beban pengeluaran masyarakat misalnya program bantuan langsung tunai (BLT), pemberian bantuan pangan, pemberian bantuan jaminan kesehatan dan lain sebagainya.

Grafik 2.8
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Garis kemiskinan adalah jumlah minimum pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Garis kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2024 adalah Rp656.812 per kapita per bulan, berdasarkan garis kemiskinan tersebut didapatkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karo sekitar 7,37 persen dari penduduk Kabupaten Karo.

E. Indeks Gini

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin

mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Koefisien Gini Kabupaten pada periode tahun 2020 sampai 2024 fluktuatif setiap tahunnya. Akan tetapi, secara umum dapat disimpulkan dari periode 5 (lima) tahun tersebut menunjukkan hasil yang positif yaitu penurunan dari angka 0,271 tahun 2020 menjadi 0,214 tahun 2024.

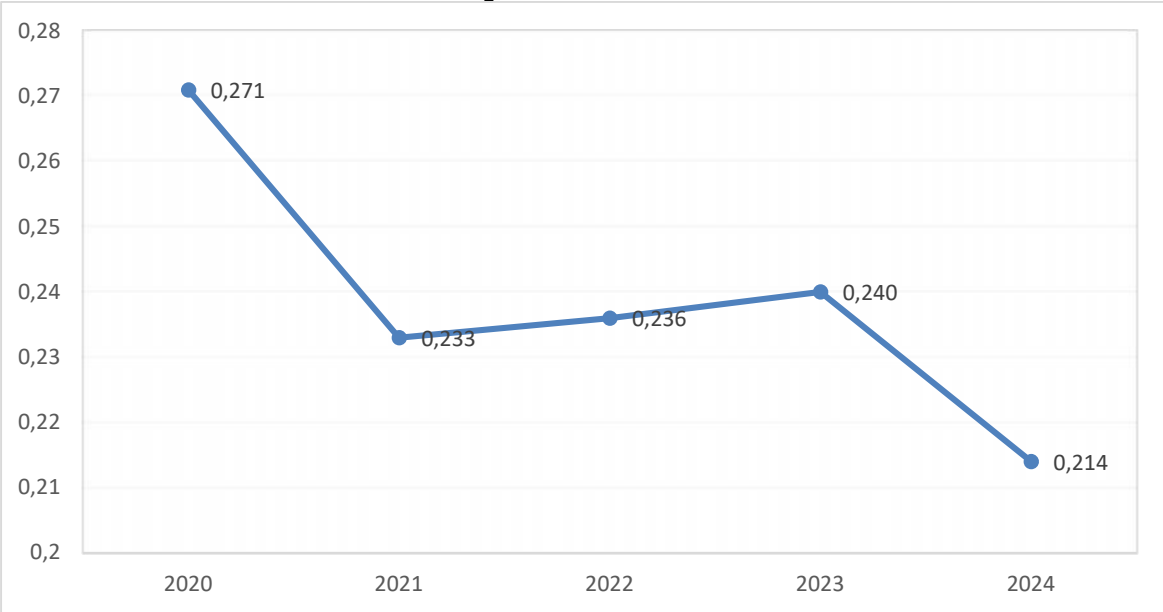
Tabel 2.60
Gini Ratio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Gini Ratio	0,271	0,233	0,236	0,240	0,214

Sumber: BPS Sumatera Utara

Nilai Rasio Gini Kabupaten Karo tersebut dapat diartikan berada pada kategori rendah atau semakin merata. Pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

Grafik 2.9
Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS

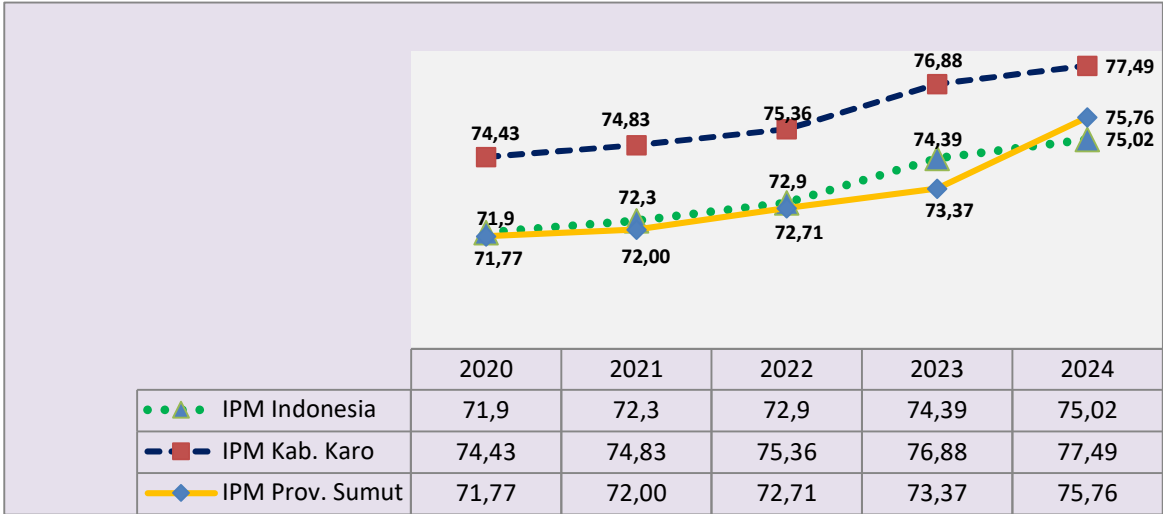
F. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Karo tetap konsisten mengalami peningkatan setiap tahun dari 74,43 pada 2020 menjadi 77,49 pada 2024. Peningkatan yang stabil ini menunjukkan perbaikan yang terus-menerus dalam berbagai aspek pembangunan manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2024 lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara sebesar 75,76 poin dan Nasional sebesar 75,02 poin tahun 2024. Selama tahun 2022-2024 IPM Kabupaten Karo rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun.

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kelompok. Pengelompokkan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo tahun 2024 mencapai 77,49 tahun. Dengan capaian IPM tersebut, Kabupaten Karo berada pada posisi status pembangunan manusia kategori “tinggi”.

Grafik 2.10

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

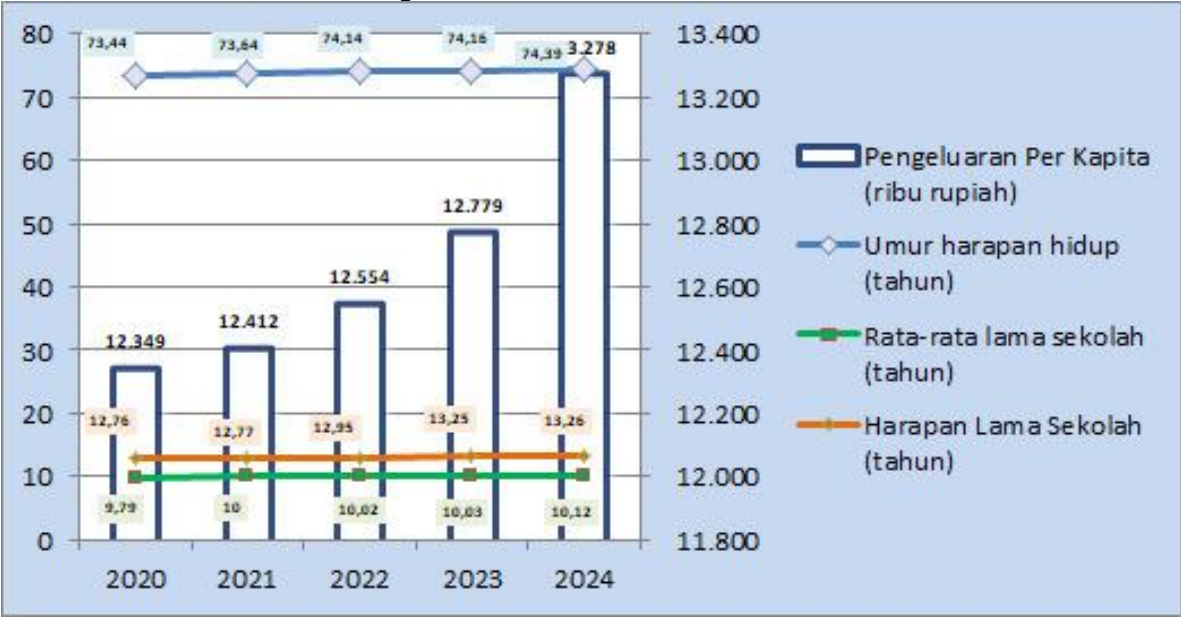


Sumber: BPS, (2025)

Terdapat 4 (empat) indikator yang mendukung IPM di Kabupaten Karo mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Seperti dilihat pada grafik selama 5 (lima) tahun indikator Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,52 poin. Indikator Harapan Lama sekolah sebesar 0,10 dan Rata-rata Lama Sekolah rata-rata kenaikan per tahunnya sebesar 0,10 poin. Sedangkan pada indikator Pengeluaran per Kapita berfluktuasi dengan rata-rata 161 setiap tahunnya. Pada indikator pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana keberhasilan pembangunan suatu wilayah dapat ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan.

Grafik 2.11

Perkembangan Dimensi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2024

G. Tingkat Pengangguran Terbuka

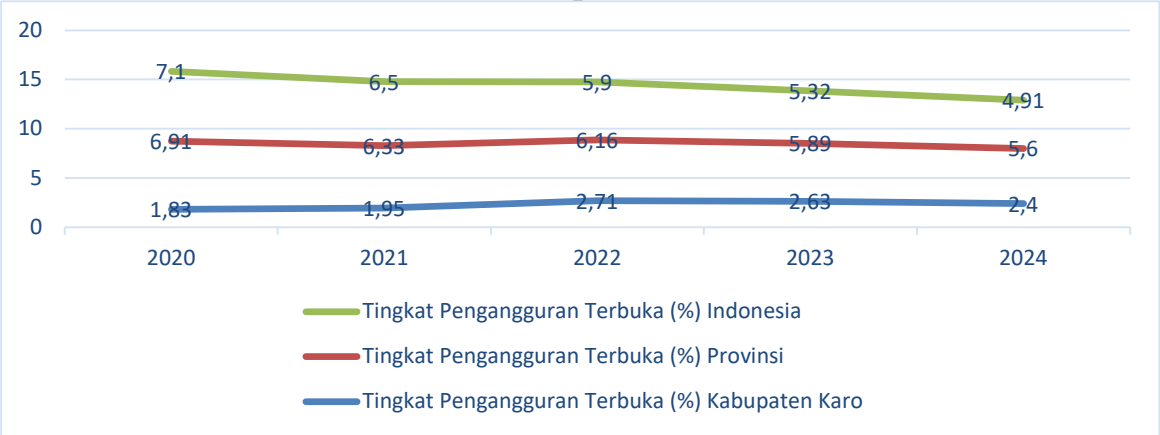
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat

Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.61
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,83	1,95	2,71	2,63	2,40

Grafik 2.12
Tingkat Pengangguran Terbuka
Nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Grafik di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Karo memiliki TPT yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia. Selain itu Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dilihat dari sektor pekerjaan, dominan penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian hal ini sejalan dengan kontribusi sektor pertanian memiliki peran dominan terhadap perekonomian daerah, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun masih ada yang bekerja sebagai pekerja keluarga. Angkatan kerja yang bekerja masih dominan memiliki pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar.

Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan dengan permintaan pasar (keterbatasan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja, kurangnya akses terhadap pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, kurangnya keahlian dan kompetensi digital), sistem perlindungan tenaga kerja yang belum optimal, sarana dan prasarana ketenagakerjaan masih kurang, belum optimalnya iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum serta informasi pasar kerja, pengangguran terselubung akibat migrasi masuk, belum optimalnya penciptaan wirausaha baru. Hal tersebut dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik serta berkelanjutan. Untuk itu peningkatan kompetensi tenaga kerja harus terus ditingkatkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja. Dengan peningkatan kompetensi ini diharapkan tenaga kerja juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberi peluang kerja bagi tenaga kerja lainnya sehingga akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi yang lebih baik.

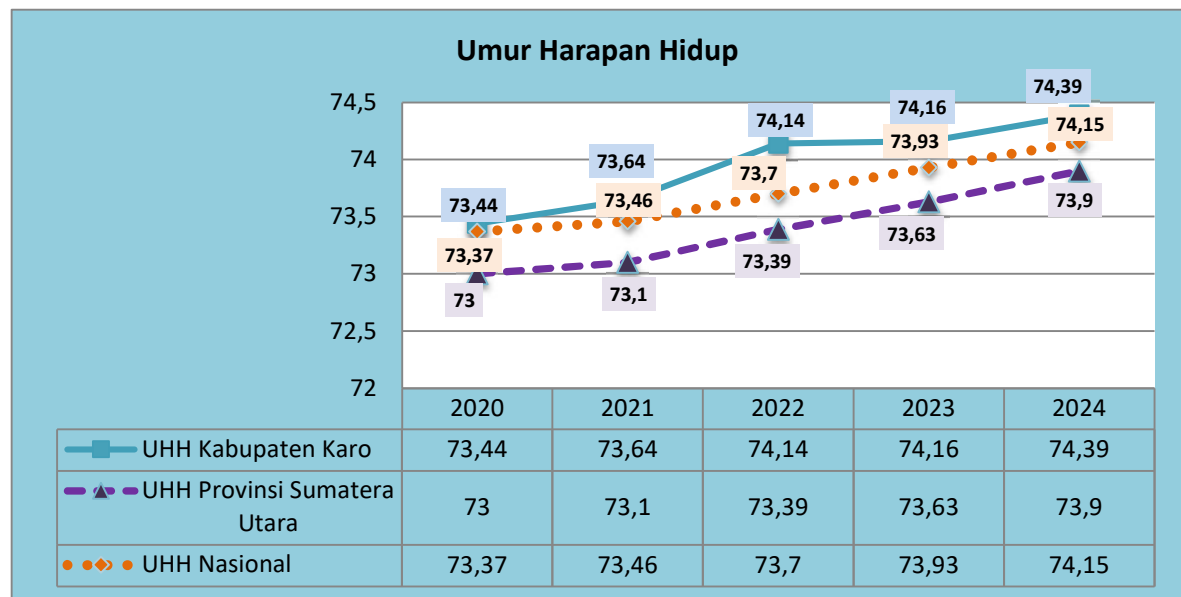
2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan antara lain:

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari 73,44 tahun pada tahun 2020 menjadi 74,39 tahun pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, Usia Harapan Hidup Kabupaten Karo pada tahun 2024 berada di atas UHH nasional dan Provinsi Sumatera Utara, serta diantara 33 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Karo berada pada posisi paling tinggi atau terbaik.

Grafik 2.13
Perbandingan Umur Harapan Hidup
Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS, 2025

B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan untuk mengetahui seberapa sehat suatu keluarga. IKS didapatkan dari penilaian 12 indikator keluarga sehat yaitu 1. Keluarga mengikuti program KB, 2. Ibu melahirkan difasilitas kesehatan, 3. Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, 4. Bayi mendapatkan ASI eksklusif, 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, 6. Penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai standar, 7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, 8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, 9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok, 10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN, 11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, 12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

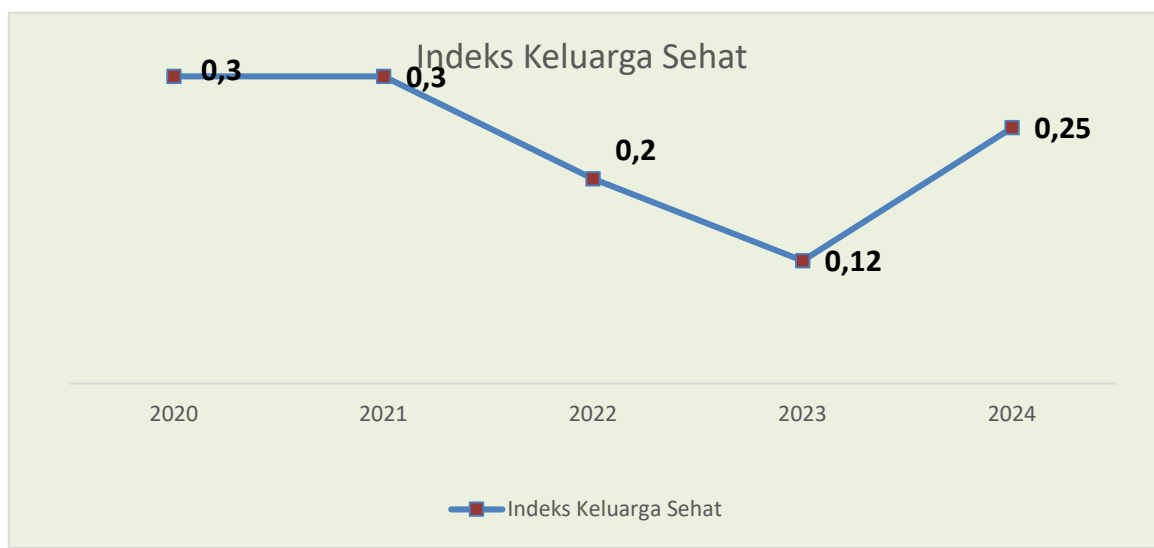
Berdasarkan nilai IKS, keluarga dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- ↳ Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8
- ↳ Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS 0,5 – 0,8
- ↳ Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5

Berdasarkan data yang didapat dari perhitungan yang dilakukan oleh Puskesmas, dimana masing-masing puskesmas melakukan survei secara langsung dengan menggunakan kuesioner ke masyarakat didapatkan bahwa masyarakat Kabupaten Karo masih masuk kedalam kategori Tidak Sehat. Faktor penyumbang terbesar yaitu dari indikator masih tingginya anggota keluarga yang merokok, masih adanya keluarga yang belum

mempunyai akses sarana air bersih dan masih adanya keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Grafik 2.14
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

C. Prevalensi Stunting

Prevalensi *stunting* adalah persentase jumlah balita yang mengalami *stunting* di suatu wilayah atau negara. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Prevalensi balita *stunting* digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau Negara. Berdasarkan hasil *Survey Status Gizi (SSGI)* yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tren selama 5 tahun survei yang dilakukan menunjukkan tren yang menurun, akan tetapi ada kecenderungan penurunan yang kecil khususnya periode tahun 2021-2023. Capaian angka tersebut menunjukkan prevalensi *stunting* yang masih tinggi di Kabupaten Karo. Hal ini disebabkan masih minimnya pengetahuan masyarakat dalam menerapkan kesehatan pada siklus 1000 hari pertama kehidupan anak serta faktor kondisi sosial ekonomi keluarga.

Grafik 2.15
Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Karo Berdasarkan Data SSGI/SKi



Sumber: SSGI/SKi

D. Rencana Induk Bidang Kesehatan

Rencana Induk Bidang Kesehatan merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran bidang Kesehatan secara nasional yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kesehatan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka menengah nasional, yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat, daerah dan swasta dalam merencanakan, menganggarkan dan mengimplementasikan pembangunan kesehatan.

Indikator kinerja Rencana Induk Bidang Kesehatan mencakup peningkatan usia harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan prevalensi stunting dan anemia pada remaja, serta peningkatan cakupan jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan primer. Terdapat 11 indikator menjadi indikator capaian daerah, dengan realisasi digambarkan melalui data berikut:

Tabel 2.62
Realisasi Rencana Indikator Bidang Kesehatan untuk daerah
di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Usia harapan hidup	Tahun	71,40	71,58	72,03	72,28	72,44
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	7,04	10	49	0,2	5,13
3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	91,79	98,3	32,59	149	76,1
4	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	98	75	70	58,3	70,9
5	Persentase Balita Stunting	%		25,35	24,90	24,70	17,60
6	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	18,5	61,45	34	100	35,03
7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	82,3	100	109	95	94,5
8	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%		90,84	90,84	90,84	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo

Berdasarkan data diatas, ada beberapa realisasi indikator belum tercapai antara lain tren peningkatan pada angka kematian Ibu Per 1000 kelahiran dan angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup. Penyebab angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Karo adanya keterlambatan rujukan dari daerah sehingga terlambat dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah dan terlambat untuk ditangani, yang menyebabkan kematian. Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi kesehatan dan bidan di desa terkait layanan rujukan maternal untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi terutama dalam kondisi yang darurat. Sedangkan meningkatnya angka kematian balita disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan orang tua dalam mengenali tanda bahaya pada kehamilan, persalinan atau kondisi bayi yang memerlukan pertolongan medis segera sehingga resiko kematian meningkat.

E. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan saat ini sehingga diterbitkan Permenkes terbaru yakni Permenkes Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, yang mana terdapat 12 jenis pelayanan Kesehatan dasar pada SPM Kesehatan daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.63
Realisasi SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	36,93	77.8	78	75.85	78.72
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	36,47	72.4	72	73.86	67.41
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	36,72	75.7	82	72.14	69.05
4	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	58,09	70.7	75	65.32	61.46
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	13,67	25.2	91	58.16	95.60
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	30,99	44.4	25	41.11	44.67
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	18,61	8.8	61.15	77.07	87.36
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	21,21	15.4	34	39.7	35.03
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	26,34	88.7	24	82.33	60.91
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	48,55	35.99	20	38.49	49.75
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart	Persen	14,46	31.5	70	81.04	92.16
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	5,41	13.9	32	44.6	53.08

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo

Berdasarkan data pencapaian SPM Bidang Kesehatan, ada beberapa indikator yang meningkat dan ada yang fluktuatif. Indikator SPM bidang Kesehatan belum mencapai target 100%, secara umum hal ini disebabkan oleh karena target sasaran/proyeksi yang ditetapkan terlalu tinggi dari data riil, kondisi pencatatan dan pelaporan SPM sampai tahun 2022 belum terkoordinir dengan baik karena masih menggunakan pelaporan manual, kurangnya kunjungan rumah/pelayanan tatap muka khususnya anak sekolah tidak masuk sekolah selama pandemi Covid-19 dan pasca pandemi Covid-19 (tahun 2020-2022). Realiasi rendah pada beberapa pelayanan antara lain pada:

1. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, realisasi rendah dimana realisasi tahun 2020 sebesar 21,21%, 2021 sebesar 15,4%, tahun 2022 sebesar 34%, tahun 2023 sebesar 39,7% dan tahun 2024 realisasi sebesar 35,03%,

- disebabkan karena Masyarakat akan memeriksakan Kesehatan jika kondisinya sudah akut, mempunyai keluhan yang berat.
2. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, realisasinya rendah karena kekurangan tenaga pelayanan kesehatan di Puskesmas khususnya Dokter dan Perawat yang terlatih dalam pelayanan Kesehatan Jiwa.
 3. Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) realisasinya masih rendah karena petugas kesehatan susah untuk mendapatkan data masyarakat yang rentan dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri secara mandiri sangat rendah.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningkatan kualitas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, antara lain:

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun keatas, RLS menggambarkan tingkat dan kualitas pendidikan suatu daerah. RLS Kabupaten Karo tahun 2024 adalah 10,12 tahun, ini berarti rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 10,12 tahun artinya rata-rata lama sekolah di Kabupaten Karo mencapai kelas 2 SMP, ini menggambarkan kualitas pendidikan di Kabupaten Karo belum mengalami perbaikan yang signifikan. Angka Rata-rata lama sekolah pada tahun 2024 masih di angka 10,12 tahun belum mencapai target nasional program wajib belajar 13 tahun, penyebabnya antara lain tingginya angka putus sekolah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya motivasi atau dukungan dari keluarga dan masyarakat RLS Kabupaten Karo pada mulai tahun 2023-2024 berada di atas capaian propinsi dan nasional atau lebih baik dari RLS Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.16
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Karo,
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024



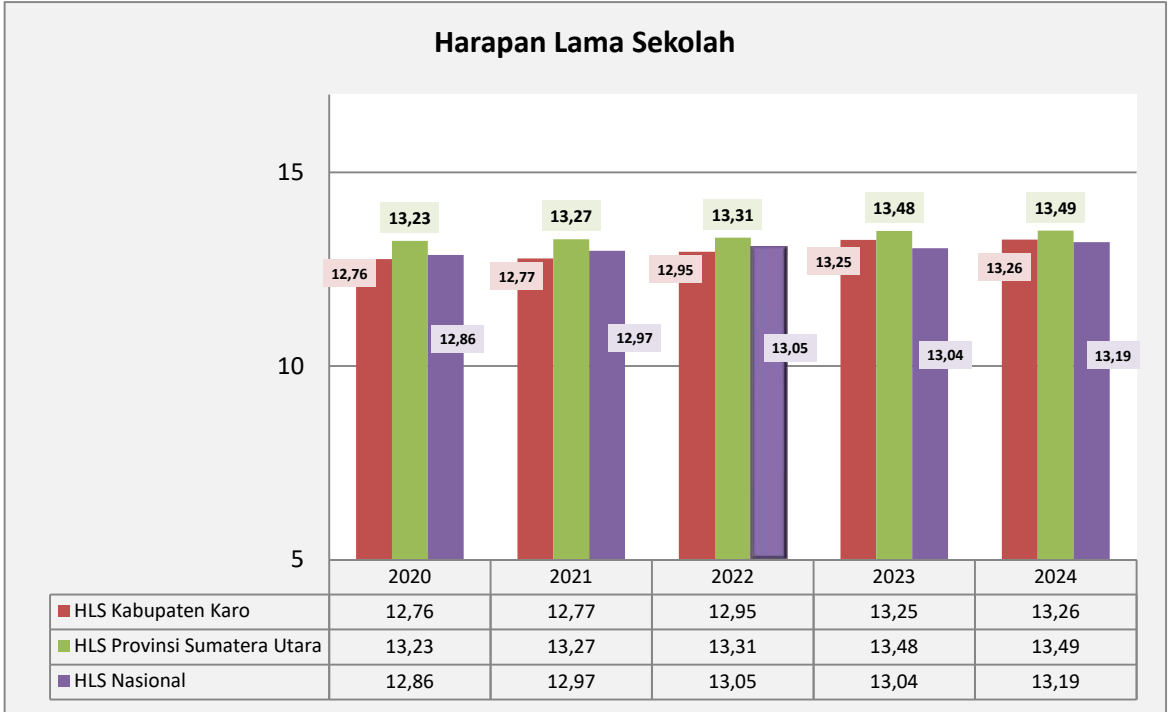
Sumber: BPS Kabupaten Karo

Indikator rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

B. Harapan Lama Sekolah

HLS menggambarkan lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang peluang anak 7 tahun keatas untuk mengenyam pendidikan formal. Capaian Harapan Lama Sekolah berada dibawah capaian Propinsi Sumatera Utara dan Nasional artinya system pendidikan Karo tidak sebaik ssstem pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Angka HLS Kabupaten Karo pada tahun 2024 sebesar 13,26 tahun artinya harapan lama sekolah di Kabupaten Karo setara dengan kelas 3 sekolah menengah atas atau menuju Perguruan Tinggi Diploma 1. HLS Kabupaten Karo pada tahun 2020-2024 berada dibawah atau lebih buruk dari HLS Provinsi Sumatera Utara sedangkan jika dibandingkan HLS Nasional HLS mulai tahun 2023-2024 HLS Kabupaten Karo lebih bagus dari HLS nasional. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2.17
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Karo

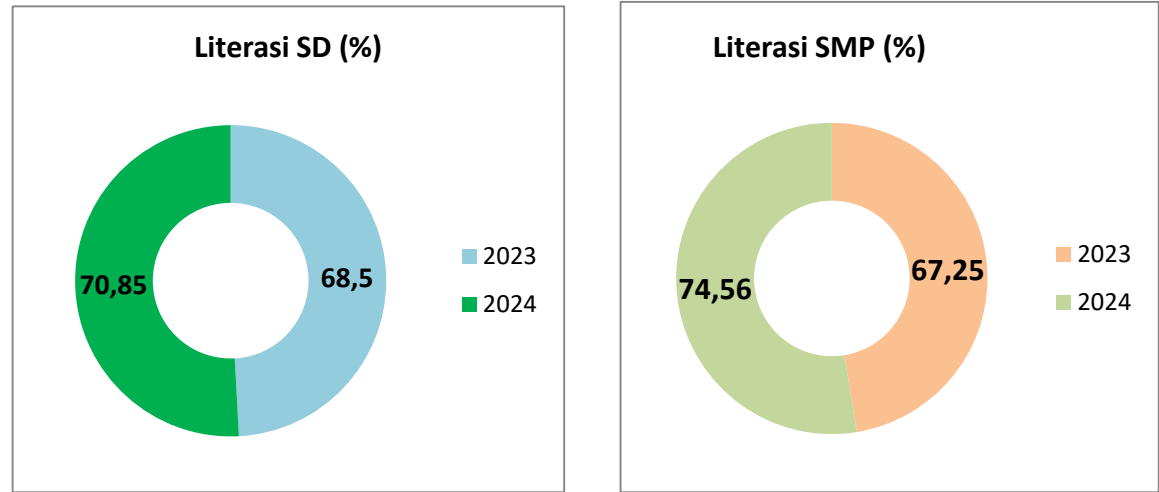
C. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi digambarkan melalui kemampuan literasi dan numerasi pada jenis pendidikan. Kemampuan literasi yaitu Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan fiksi). Sedangkan Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

Berdasarkan Asesmen Nasional yaitu Asesmen Kompetensi Minimum (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi) Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen

tingkat nasional untuk literasi membaca SD Tahun 2023 sebesar 68,5 persen (kategori sedang) dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 70,85 persen (kategori baik), peningkatan sebesar 2,35 persen. Sedangkan literasi membaca tingkat SMP pada tahun 2023 angkanya sebesar 67,25 persen (kategori sedang) dan pada tahun 2024 menjadi 74,56 persen (kategori baik) meningkat sebesar 7,31 persen. Pada tahun 2024 kemampuan literasi tingkat SD dan tingkat SMP memiliki beberapa kendala yang dihadapi antara lain karena belum meratanya distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan, kurangnya pendampingan ke Satuan Pendidikan dalam membangun kemampuan dasar literasi, kurangnya konten pembelajaran dalam meningkatkan literasi siswa, masih kurangnya buku teks dan non teks menjadi sumber baca siswa serta kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Grafik 2.18
Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat Nasional untuk Kemampuan Literasi SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2024-2025

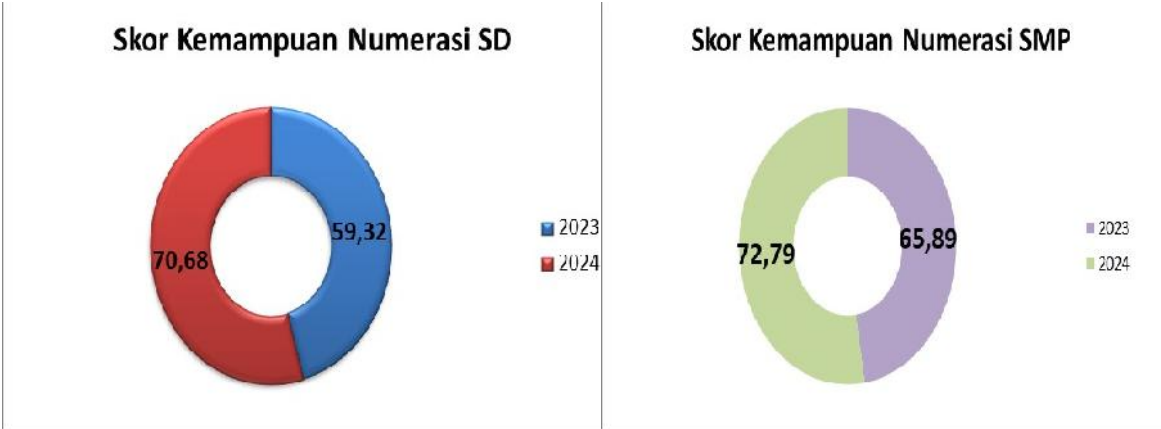


Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi SD pada tahun 2023 sebanyak 59,32 persen (kategori sedang) meningkat menjadi 70,68 persen (kategori tinggi) pada tahun 2024 artinya ada peningkatan sebesar 11,36 persen. Sedangkan tingkat SMP pada tahun 2023 sebesar 65,89 persen dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 72,79 persen artinya ada peningkatan sebesar 6,9 persen.

Pada tahun 2024 kemampuan numerasi tingkat SD dan SMP memiliki beberapa kendala antara lain karena belum mencukupinya jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan, kurangnya pendampingan ke Satuan Pendidikan dalam membangun kemampuan dasar numerasi, kurangnya konten pembelajaran dalam meningkatkan numerasi siswa, masih kurangnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran terkait numerasi serta kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru.

Grafik 2.19
Persentase Peserta Didik yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen tingkat Nasional untuk Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Karo Tahun 2023-2024

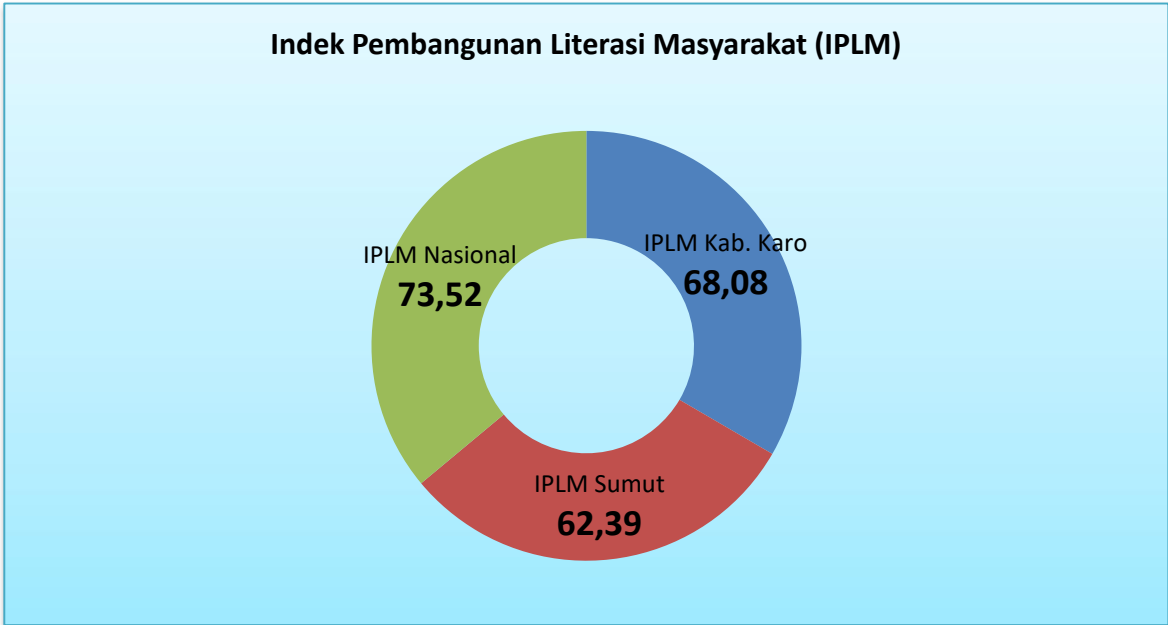


Sumber: Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang menggambarkan kinerja pemerintah dalam pembangunan literasi, pada tahun 2024 IPLM Kabupaten Karo mencapai angka 68,08 berada pada kategori sedang, capaian ini lebih tinggi dari IPLM Propinsi Sumatera Utara dengan capaian angka 62,39 berada pada kategori sedang, akan tetapi lebih rendah dari capaian nasional dengan angka 73,52 berada pada kategori sedang. Berdasarkan data tersebut Propinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Karo perlu strategi untuk mengejar ketertinggalan dari capaian nasional.

Grafik 2.20
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2024

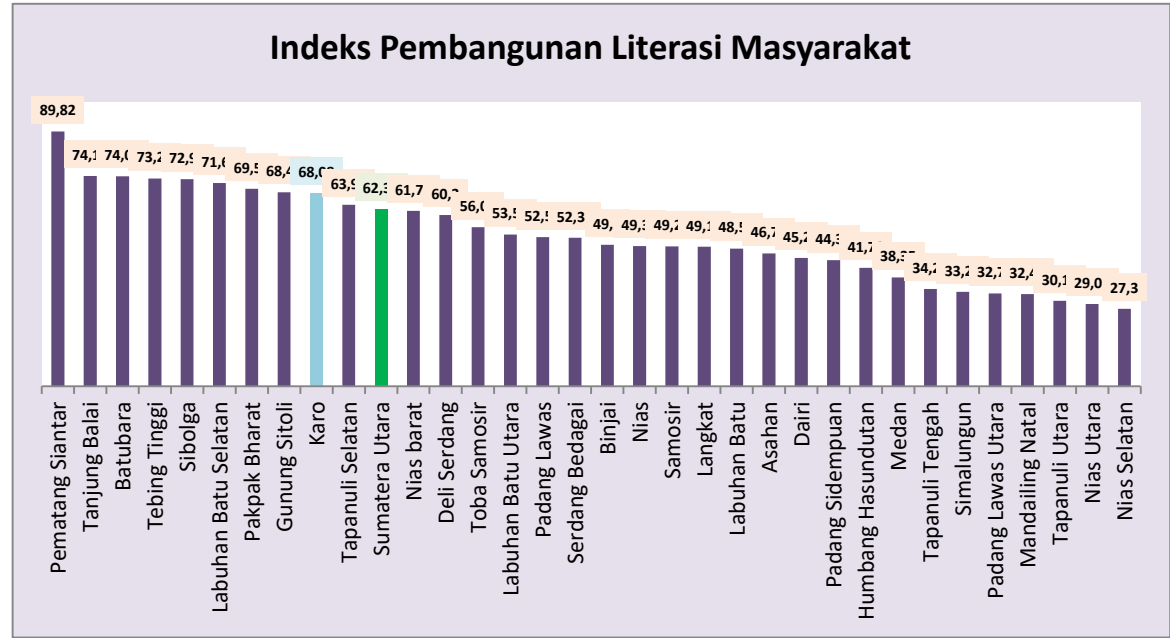


Sumber: BPS

Pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada tingkat Kabupaten/Kota di Sumatera Utara pada tahun 2024, IPLM Kabupaten Karo berada diposisi urutan ke 9 (sembilan), posisi paling tinggi dicapai Kabupaten Pematang Siantar dengan angka 89,82, disusul Kota Tanjung Balai dengan angka 74,1 sedangkan angka terendah di Kabupaten Nias Selatan dengan angka 27,3. Capaian IPLM Kabupaten Karo tahun

2024 dilihat dari unsur pembangunan literasi masyarakat yaitu pemerataan layanan perpustakaan (0,3881), ketercukupan koleksi perpustakaan (0,3547), rasio ketercukupan tenaga perpustakaan (0,8199), tingkat kunjungan masyarakat perhari (0,2032), perpustakaan yang dibina sesuai SNP (1,0000), keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (1,0000) dan jumlah anggota perpustakaan (1,0000). Dari uraian tersebut capaian terendah pada tingkat kunjungan masyarakat perhari.

Grafik 2.21
Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Sumatera Utara Tahun 2024



Sumber : BPS

E. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal, sesuai urusan wajib pemerintah daerah. Secara umum capaian SPM Pendidikan Kabupaten Karo mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun belum mencapai target pada layanan anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS), layanan anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) dan layanan anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS).

Tabel 2.64
Realisasi SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Karo Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Target	Capaian SPM Pendidikan			
				2021	2022	2023	2024
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Persen	100	53,88	53,88	51,19	57,17
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persen	100	96,87	99,11	99,42	98,38
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS)	Persen	100	1,16	2,98	2,77	3,98

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo

Angka partisipasi sekolah yang tidak tercapai menunjukkan banyaknya anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan sesuai jenjangnya, yang disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi, kesehatan,

dan aksesibilitas. Meskipun angka partisipasi sekolah menunjukkan peningkatan dari dukungan program pemerintah seperti Program Indonesia Pintar (PIP), BOS dan Beasiswa Siswa Miskin telah dijalankan, akan tetapi target kinerja layanan belum tercapai disebabkan beberapa faktor seperti pada jenjang PAUD ketidaktersediaan satuan pendidikan di setiap desa, pada jenjang Pendidikan Dasar dan kesetaraan disebabkan terdapat anak putus sekolah yang tidak meneruskan pendidikan sehingga capaian tidak 100 persen. Banyaknya penduduk pendatang yang tidak memiliki kelengkapan data kependudukan juga menjadi menjadi faktor tambahan tidak melanjutkan untuk bersekolah. Untuk mencapai target di tahun-tahun selanjutnya maka Pemerintah Kabupaten Karo bekerja sama dengan Perangkat Desa untuk mendata anak yang tidak bersekolah dan mengembalikannya ke sekolah. Anak kembali bersekolah mendapat bantuan beasiswa dan yang mengikuti pendidikan kesetaraan diberikan kemudahan dalam mengikuti proses pendidikan.

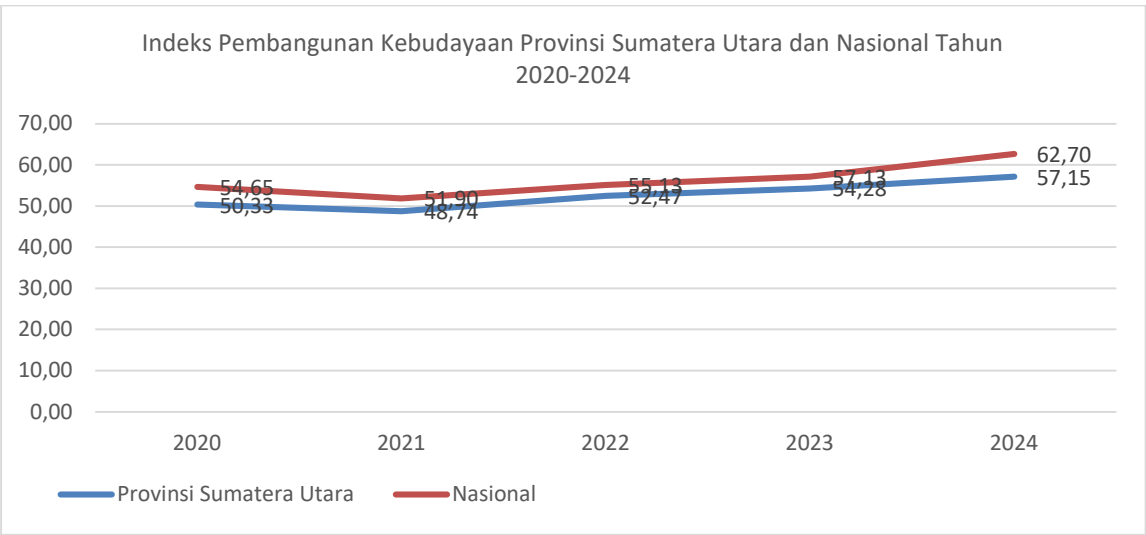
2.1.2.4. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa, antara lain:

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Karo belum dapat dihitung mengingat ada beberapa data dimensi pengukuran yang belum tersedia di tingkat kabupaten/kota yaitu dimensi ekonomi budaya, dimensi Pendidikan, dimensi ketahanan sosial budaya, dimensi warisan budaya, dimensi ekspresi budaya, dimensi budaya literasi dan dimensi gender. Saat ini, Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Karo mengacu pada Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan hasil yang cukup baik dan mengalami perubahan yang fluktuatif.

Grafik 2.22
Indeks Pembangunan Kebudayaan
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk menggambarkan kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dibidang kebudayaan serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor untuk melaksanakan pemajuan kebudayaan. Untuk melihat perkembangan kemajuan kebudayaan di Kabupaten Karo, indikatornya meliputi Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan.

Tabel 2.65

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Ditetapkan	0	3	10	10	11

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Ditetapkan di Kabupaten Karo masih terbilang cukup rendah sehingga pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Ditetapkan ini. Saat ini Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Karo masih diduga sebagai warisan cagar budaya di Kabupaten Karo sehingga perlu untuk dikaji dan pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat dilakukan penetapan sebagai cagar budaya. Salah satu permasalahan penetapan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya saat ini adalah kepemilikan akses cagar budaya oleh pribadi sehingga sulitnya dilakukan penetapan terhadap cagar budaya. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan dan berkoordinasi secara rutin dengan ahli waris objek cagar budaya.

B. Pembangunan Keagamaan

Beragama Maslahat digambarkan melalui sikap, tindakan, dan kebijakan keagamaan yang membawa kebaikan dan manfaat (maslahat) bagi diri sendiri, orang lain, dan masyarakat secara luas, tanpa menimbulkan kerusakan (mafsadat) atau perpecahan. Hal ini sejalan dengan moderasi beragama yaitu cara memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem (tidak berlebih-lebihan), menjaga keseimbangan antara teks dan konteks, serta mengedepankan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip moderasi beragama yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Untuk mendukung moderasi beragama, Kabupaten Karo melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan mengakomodatif budaya lokal. Hal ini ditunjukkan melalui data berikut.

Tabel 2.66

Kegiatan Keagamaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan Keagamaan	N/A	N/A	9	8	8

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Karo

Kegiatan keagamaan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada karena adanya covid 19, kegiatan yang dilaksanakan dari tahun 2022-2024 berupa MTQ, pesparawi, pesparani, Natal Bersama Korpri, Natal oikumene, dialog lintas agama, pemberangkatan haji dan pemulangan haji, buka puasa Bersama. Untuk tahun 2023 dan 2024 hanya dilaksanakan 8 kegiatan karena Pesparani tidak dilaksanakan. Dengan adanya kegiatan keagamaan ini dapat memperkuat ikatan sosial antara umat beragama dan dapat membangun moderasi dan toleransi antar umat beragama.

2.1.2.5. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, antara lain:

A. Indeks Perlindungan Anak

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) dapat dilihat melalui penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA. Pada tahun 2020 tidak dilakukan penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak karena terjadinya pandemi Covid 19 dan pengukuran Indeks Perlindungan Anak tahun 2024 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena belum selesainya pelaksanaan evaluasi penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak untuk tahun evaluasi.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Karo mengalami peningkatan sekitar 5,80 poin pada tahun 2021 ke tahun 2022, serta peningkatan 0,59 poin pada Tahun 2022 ke 2023. Dalam Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2024 tahap pra-evaluasi memperoleh nilai 592,32 (nilai maksimal 1000). Permasalahan yang dihadapi dalam Penilaian KLA Tahun 2024 yaitu Belum tersedia infrastruktur (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), taman terbuka hijau, tempat bermain aman yang dikelola pemerintah daerah serta tidak berbayar, aksesibilitas untuk anak penyandang disabilitas di sekolah dan di kantor pemerintah, peraturan-peraturan terkait pelayanan terhadap anak masih belum diadaptasi oleh daerah, pusat pengasuhan alternatif belum semua terstandarisasi untuk memenuhi kategori penilaian kabupaten layak anak dan kurangnya koordinasi antar OPD dalam memenuhi sarana prasarana yang menunjang KLA.

Dalam penanganan kasus belum ada tenaga ahli dalam pendampingan, pemulihan dan penguatan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, demikian pula dengan tenaga hukum, Sarjana Psikologi yang sudah ada belum mengikuti Pelatihan sebagai Konselor dalam rangka memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan.

Tabel 2.67
Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

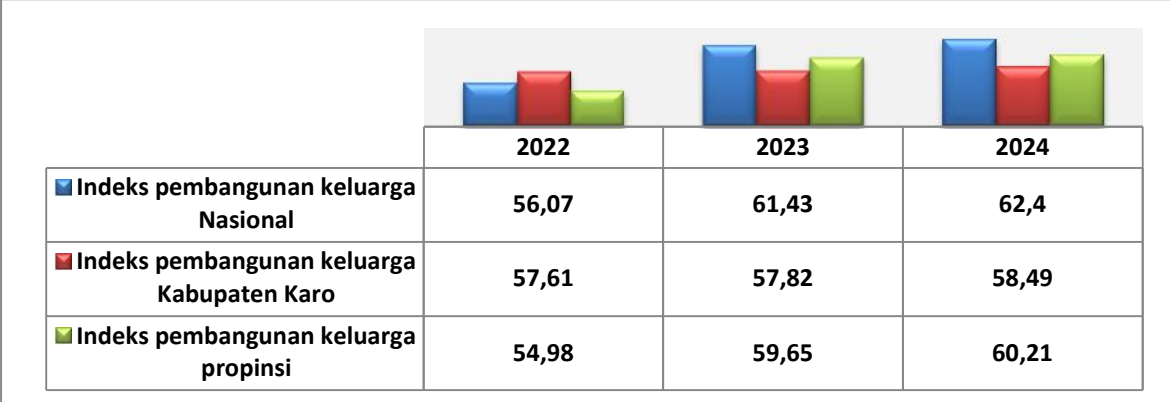
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perlindungan Anak (%)	N/A	57,582	63,39	63,98	N/A

Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia oleh KemenPPPA

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Konteks pembangunan dan peningkatan kualitas SDM tidak bisa terlepas dari pentingnya peran keluarga. Keluarga sebagai institusi sosial memiliki peran sentral dalam pembangunan manusia, pembinaan generasi baru, serta pemenuhan kebutuhan dalam berbagai aspek kehidupan. Pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul harus dimulai dari penyiapan keluarga berkualitas sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu berperan penting dalam perekonomian, politik, dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Nilai Bangsa berkisar antar 0-100 dengan kategori nilai >70 (baik/Tangguh), 40-70 (cukup baik/berkembang) dan <40 (kurang baik/rentan), Jika dilihat dari grafik di bawah ini capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Karo terus mengalami peningkatan, namun capaiannya masih dalam kategori cukup baik/berkembang, begitu juga dengan nasional belum mencapai 70 persen dan capaian Sumatera Utara masih berada di bawah.

Grafik 2.23
Indeks Pembangunan Keluarga Tahun 2022-2024



Sumber: BPS, 2024

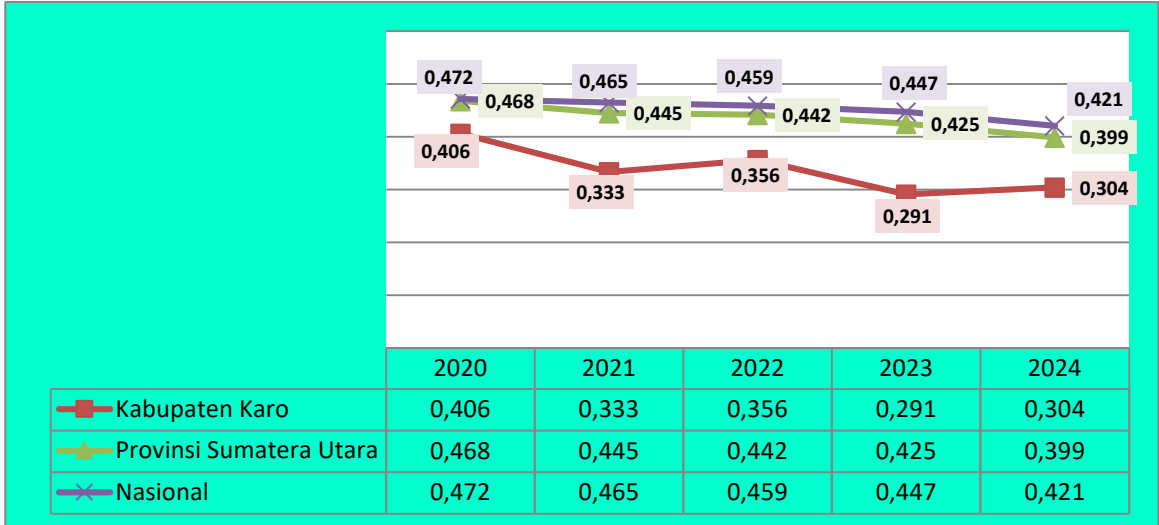
Capaian yang terus meningkat tidak terlepas dari upaya pemerintah diantaranya menyiapkan kehidupan keluarga melalui bimbingan perkawinan dan pendampingan calon pengantin serta penyediaan konseling keluarga, memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan, memberikan pengasuhan tentang tumbuh kembang anak dan memperkuat data keluarga sebagai dasar intervensi pembangunan keluarga.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender mengukur seberapa besar ketimpangan gender yang diukur dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten tahun 2020-2024 disparitas IKG terendah pada tahun 2023 dengan angka 0,291 dan tertinggi di tahun 2020 dengan angka 0,406. Untuk menurunkan disparitas akibat ketimpangan gender perlu penguatan kesetaraan gender diberbagai upaya lintas sektor, mulai dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, hingga lembaga lainnya. Peningkatan kesadaran dan kolaborasi antar berbagai pihak dapat mempercepat proses menuju masyarakat yang lebih setara secara gender.

Posisi Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo tahun 2024 dengan angka 0,304 berada dibawah Propinsi Sumatera Utara dengan angka 0,399 dan Nasional dengan angka 0,421 dan selama tahun 2020-2024 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo disparitasnya lebih rendah dari Provinsi dan Nasional.

Grafik 2.24
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



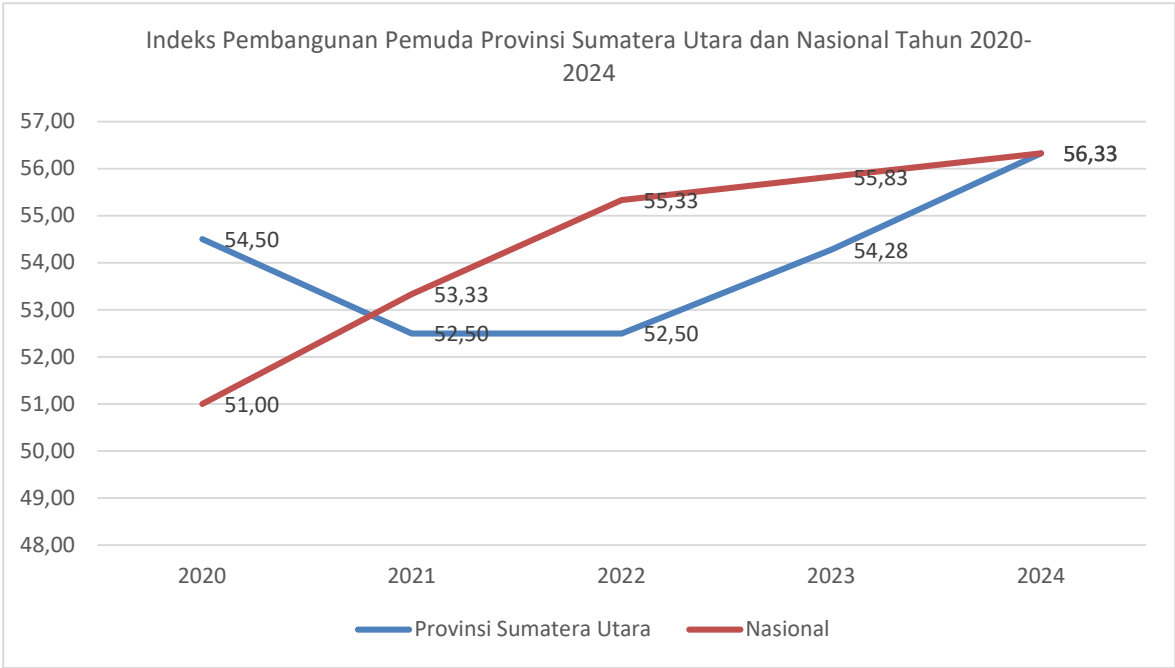
Sumber: Badan Pusat Statistik

D. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks pembangunan pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Indeks Pembangunan Pemuda dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakannya sekaligus menjadi peringatan kondisi pemuda terutama dari sisi lapangan kerja. Indikator-indikator Indeks Pembangunan Pemuda terdiri dari: Pendidikan; Kesehatan dan kesejahteraan; Kesempatan dan lapangan kerja; Kepemimpinan dan partisipasi; Gender dan diskriminasi.

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Karo belum dapat dihitung mengingat ada beberapa data aspek pembangunan pemuda yang belum tersedia di tingkat kabupaten/kota yaitu domain Pendidikan, domain Kesehatan dan kesejahteraan, domain lapangan dan kesempatan kerja, domain partisipasi dan kepemimpinan serta domain gender dan diskriminasi. Saat ini, Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Karo mengacu pada Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara yang menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Sumatera Utara masih berada di bawah Indeks Pembangunan Pemuda Nasional dikarenakan sejumlah domain yang lebih rendah disbanding capaian nasional yaitu domain kesehatan dan kesejahteraan, domain partisipasi dan kepemimpinan perlu mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah. Pemerintah Daerah perlu mendorong, mengupayakan dan memfasilitasi untuk memaksimalkan potensi pemuda sebagai generasi produktif, kreatif dan inovatif serta meningkatkan koordinasi antar Lembaga kepemudaan dan keolahragaan dan menyelaraskan program kerja pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Grafik 2.25
Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2025

Tabel 2.68
Persentase organisasi pemuda yang aktif Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif	28	28	28	28	15
2	Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda	28	28	28	28	28
3	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	53

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

Pelaksanaan Pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada Upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam Pembangunan dalam Upaya untuk meningkatkan kehidupan Masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam Pembangunan maka dilakukan berbagai fasilitas kegiatan kepemudaan.

E. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi dan balita adalah jumlah bayi dan balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi dan balita berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan tempat anak-anak tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Indikator ini juga berkaitan langsung dengan kehamilan dan pelayanan kesehatan pasca melahirkan. Formula untuk menghitung Angka Kematian Bayi dan Balita adalah $\text{Angka Kematian Bayi} = \frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$.

Tabel 2.69
Perkembangan Angka Kematian Bayi
Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kematian Bayi	Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran
2020	6.537	47	7,19
2021	6.101	16	2,62
2022	6.136	30	4,73
2023	6.062	26	4,15
2024	5260	21	3,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo

Perkembangan angka kematian bayi dan balita dari tahun 2020-2024 masih cenderung fluktuatif. Pada tahun 2020 angka kematian bayi 7,19 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2021 menurun menjadi 2,62 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2022 meningkat menjadi 4,73 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2023 menurun menjadi 4,15 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2024 menurun menjadi 3.99 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup.

F. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.70
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran
2020	6.528	6	91,79
2021	6.099	6	98,34
2022	6.136	2	32,59
2023	6.028	9	149,28
2024	5.260	5	94,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo

Perkembangan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2020-2024 di Kabupaten Karo bersifat fluktuatif. Angka kematian ibu tahun 2020 meningkat menjadi 91,79 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus), tahun 2021 meningkat menjadi 98,34 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus), pada tahun 2022 turun menjadi 32,59 per 100.000 kelahiran hidup (2 kasus), dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 149,28 per 100.000 kelahiran hidup (9 kasus) dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 94,98 per 100.000 kelahiran hidup (5 kasus).

Penyebab angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Karo adanya keterlambatan rujukan dari daerah sehingga terlambat dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit Daerah dan terlambat untuk ditangani, yang menyebabkan kematian. Hal ini terjadi karena kurangnya kompetensi kesehatan dan bidan di desa terkait layanan rujukan maternal untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi ibu dan bayi terutama dalam kondisi yang darurat.

G. Prevalensi Tuberculosis

Tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Prevalensi Tuberkulosis adalah banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dibagi jumlah penduduk dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan tingkat prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan tabel.

Tabel 2.71
Prevalensi Tuberculosis Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Penduduk	Prevalensi Tuberklosis per 100.000 penduduk
2020	589	404.998	145
2021	508	409.077	124
2022	812	434.246	186
2023	1053	448.535	235
2024	1172	418.705	387

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo

Berdasarkan data diatas periode tahun 2020-2024 terjadi fluktuasi penurunan prevalensi *tuberculosis* per 100.000 penduduk, pada tahun 2020 Prevalensi Tuberklosis menjadi 145 atau sebanyak 589 kasus, pada tahun 2021 menurun menjadi 124 atau sebanyak 508 kasus, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 186 atau sebanyak 812 kasus, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 235 sebanyak 1.053 kasus dan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan menjadi 387 sebanyak 1.172 kasus.

Penyebab terjadinya *tuberculosis* di Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun karena meningkatnya individu yang terinfeksi kuman mikobakterium tuberkulosis hal ini didukung dengan adanya kegiatan *active case finding* melalui skrining *tuberculosis* ke populasi padat dan pelacakan kontak serumah target penemuan kasus 90 % dari perkiraan kasus, semakin tinggi kasus ditemukan maka akan lebih meningkatkan target penemuan kasus. Faktor yang lain karena gaya hidup yang kurang sehat atau ketidakperdulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan belum optimalisasi Pemerintah Kabupaten Karo dalam mendukung pencegahan *tuberculosis* serta kurangnya anggaran yang diperlukan untuk pencegahan *tuberculosis* di Kabupaten Karo.

Tabel 2.72
Perkembangan dan Pengobatan TBC di Kabupaten Karo
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Penemuan kasus TC (<i>Treatment Coverage</i>) TBC	Persen	43,60	37,00	44,70	58,70	71,30
Pengobatan (<i>Treatment Succes Rate</i>) (kohort) TBC	Persen	104,35	91,60	91,90	94,00	94,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Karo

Berdasarkan data di atas, capaian Penemuan kasus TC di Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 43,60 persen meningkat pada tahun 2024 menjadi 71,3 persen. Tren Umum dapat disimpulkan engalami peningkatan signifikan sejak 2021 sampai tahun 2024. Untuk Pengobatan (*Treatment Succes Rate*) (kohort) TBC mulai 2021 hingga 2024, data lebih realistis dan stabil, berada di atas 91 persen, yang menunjukkan program pengobatan TBC cukup berhasil. TSR >90 persen adalah standar baik menurut WHO, menunjukkan kepatuhan pengobatan tinggi, keberhasilan terapi, dan manajemen kasus yang efektif.

H. Kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif

Kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif adalah sistem dukungan sosial yang dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (seperti bantuan tunai, layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan), tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau krisis ekonomi.

Bantuan Sosial

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyaraka maka pemerintah memberikan batuan sosial ke masyarakat Kabupaten Karo. Data terkait Penerimaan Bantuan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.73
Data Penerima Bantuan Sosial
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	PKH (Program Keluarga Harapan)	PBI (Penerima Bantuan Iuran)	Penerima Alat Bantu
2020	16.253	13.152	145.276	170
2021	20.037	13.070	115.316	0
2022	18.998	12.282	129.159	85
2023	17.733	13.735	131.928	50
2024	17.947	12.899	127.931	43

Sumber : Siks-NG Kemensos
Dinas Sosial Kabupaten Karo

Berdasarkan data di atas periode tahun 2020-2024 Masyarakat Kabupaten Karo mendapat bantuan sosial dari BPNT, PKH, PBI dan Alat Bantu. BPNT (Bantuan Pemerintah Nontunai) merupakan Bantuan yang diberikan Pemerintah berupa Sembako saja atau sering disebut Non PKH. PKH adalah Program Keluarga Harapan, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah berupa uang tunai. PBI (Penerima Bantuan Iuran) adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program ini diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan, seperti keluarga miskin atau rentan miskin yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan alat bantu yang diberikan kepada disabilitas berupa kursi roda, Matras, atau tongkat.

Data penerima bantuan sosial pada tabel diatas dapat dilihat pada aplikasi Siks-NG Kementerian Sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Karo. Pada Tahun 2020 penerima BPNT sebanyak 16.253 jiwa, tahun 2021 untuk 20.037 jiwa, tahun 2022 menurun menjadi 18.998 jiwa, tahun 2023 menurun lagi menjadi 17.733 jiwa dan tahun 2024 menjadi 17.947 jiwa. Untuk PKH pada tahun 2020 untuk 13.152 jiwa, tahun 2021 menurun untuk 13.070 jiwa, pada tahun 2022 menurun lagi menjadi 12.282, pada tahun 2023 meningkat lagi menjadi 13.737 dan pada tahun 2024 menurun lagi menjadi 12.899. Pada Tahun 2020 penerima PKH sebanyak 145.276 jiwa, tahun 2021 untuk 115.316 jiwa, tahun 2022 meningkat menjadi 129.159 jiwa, tahun 2023 meningkat lagi menjadi 131.928 jiwa dan tahun 2024 menurun menjadi 127.931 jiwa. Untuk alat Bantu pada tahun 2020 alat bantu untuk 170 jiwa, tahun 2021 tidak ada bantuan alat bantu, tahun 2022 sebanyak 85 alat bantu, tahun 2023 sebanyak 50 alat bantu dan pada tahun 2024 menurun menjadi 43 alat bantu.

Penyebab bantuan setiap tahun berubah karena adanya verifikasi data, terdapatnya masyarakat yang sudah mampu dan tidak layak menerima bantuan sehingga dikeluarkan dari aplikasi, dan bertambah penerima bantuan karena pertambahan kuota penerima dari kemeterian sosial untuk masyarakat di Kabupaten Karo.

I. Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja untuk menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan perlindungan dari risiko kerja. Program ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Program ini mewajibkan perusahaan dan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya serta membayar iuran secara rutin. Meski

tingkat partisipasi pekerja dalam program ini sudah cukup tinggi, kesadaran akan pentingnya kepesertaan masih perlu ditingkatkan, khususnya di kalangan pekerja sektor informal dan pekerja kontrak. Potensi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Karo terus mengalami peningkatan, hal ini dapat di lihat dari Komitmen Pemerintah Kabupaten Karo atas *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) dalam memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Tabel 2.74
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kabupaten Karo Tahun 2021-2024

Tahun	Potensi Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Realisasi Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			Persentase Universal Coverage Jamsostek (UCJ)		
	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	Total
2021	38,350	99,730	138,080	16,047	4,470	20,517	41.84	4.48	14.86
2022	38,350	99,730	138,080	17,476	8,304	25,780	45.57	8.33	18.67
2023	40,125	108,025	148,150	21,558	15,612	37,170	53.73	14.45	25.09
2024	41,733	110,038	151,771	23,689	20,766	44,455	56.76	18.87	29.29

Sumber: BPJS Tenaga Kerja Kabupaten Karo

F. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial berkomitmen untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Suburusan Sosial.

Tabel 2.75
Realisasi SPM Bidang Sosial di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Persen	75,48	75,48	75,48	92,73	94,81
2	Rahabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Persen	100	100	100	100	92,82
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persen	3,68	3,68	3,68	95,80	98,46
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna daksa khusus gelandangan dan pengemis diluar panti	Persen	8,21	8,21	8,21	94,55	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persen	77,66	77,66	77,66	90,00	88,00

Berdasarkan data pada tabel di atas ada beberapa realisasi indikator yang belum tercapai antara lain rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti disebabkan oleh pendataan yang belum optimal, keterbatasan SDM dan sarana, keterlambatan pengadaan bantuan dan rendahnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan anggaran. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh pendataan yang belum valid, keterbatasan tenaga pendamping dan sarana, keterlambatan penyaluran bantuan, rendahnya peran keluarga/masyarakat, serta keterbatasan anggaran.

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh pendataan yang belum akurat, keterbatasan tenaga pendamping dan sarana layanan, keterlambatan bantuan, rendahnya dukungan keluarga /masyarakat, serta terbatasnya anggaran. Pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna daksa

khusus gelandangan dan pengemis diluar panti permasalahan yang dihadapi disebabkan oleh data yang belum akurat, keterbatasan tenaga dan sarana pendukung, sulitnya menjangkau sasaran di lapangan, rendahnya kesadaran serta partisipasi masyarakat, dan keterbatasan anggaran. Sedangkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten, disebabkan tingginya angka kejadian kebakaran rumah hunian warga sehingga mengakibatkan jumlah barang bantuan *bufferstock* sandang dan permakanan yang ada terbatas.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah mengacu pada kemampuan suatu wilayah untuk menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya dalam menghadapi persaingan ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global. Daya saing daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan seberapa efektif suatu daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya.

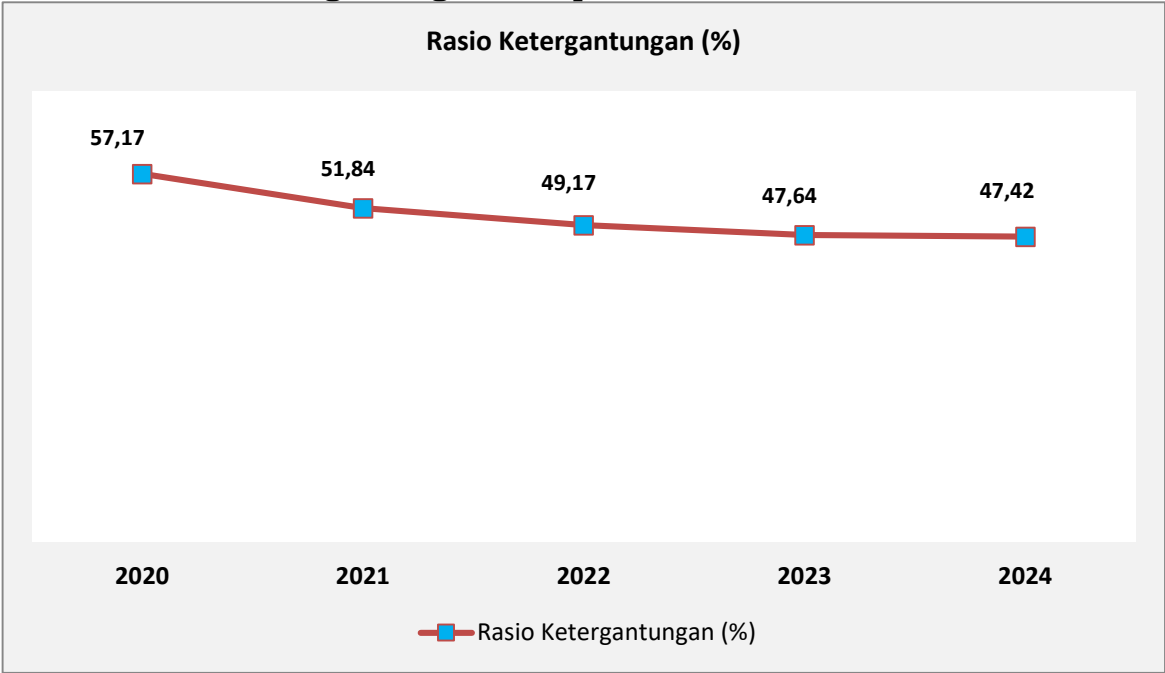
2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja di suatu daerah sangat menentukan daya saingnya. Daerah dengan SDM yang unggul cenderung lebih inovatif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pasar. Salah satu gambaran tentang daya saing sumber daya manusia dalam suatu daerah adalah angka ketergantungan. Angka ketergantungan adalah suatu indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif (usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk produktif (usia 15–64 tahun). Angka ini digunakan untuk mengukur beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif dalam suatu wilayah.

Angka ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif. Angka ketergantungan tinggi jika lebih dari 40, angka ketergantungan sedang bila 30-40, dan angka ketergantungan rendah bila kurang dari 30.

Hasil analisis *trend* angka ketergantungan Kabupaten Karo tahun 2020-2024, terlihat bahwa angka ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2020 mencapai 57,17, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 47,42. Angka rasio ketergantungan pada tahun sebesar 47,42 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung 48 penduduk non produktif dan berada di tingkat angka ketergantungan tinggi. Angka ketergantungan tinggi dipengaruhi dari komposisi usia muda yang menggambarkan masih tinggi angka kelahiran.

Grafik 2.26
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Untuk mengurangi beban ketergantungan Pemerintah Kabupaten Karo perlu menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan serta upaya peningkatan pendapatan penduduk karena adanya peningkatan jumlah usia produktif.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Iptek dan inovasi yang menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang.

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

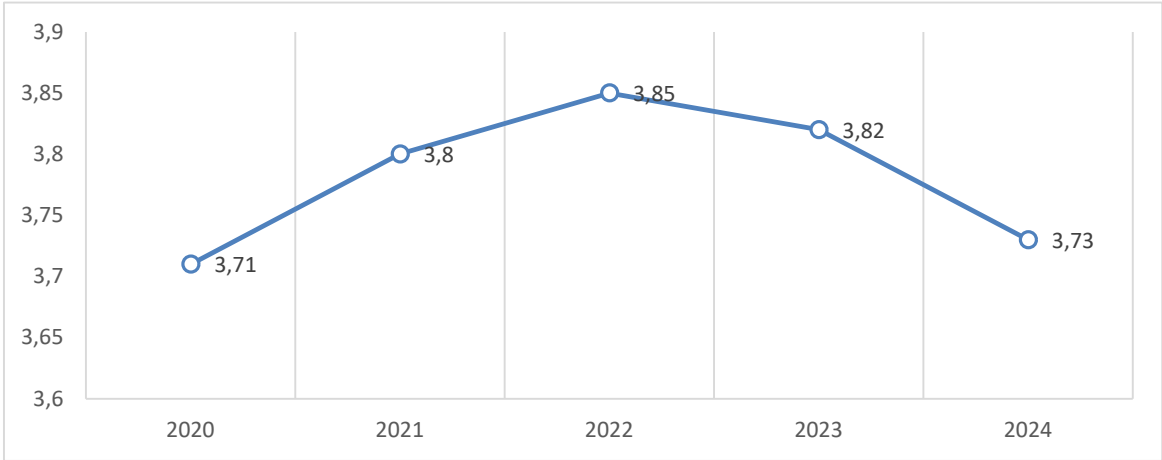
Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah indikator yang dapat mengindikasikan sejauh mana sektor lapangan usaha industri berkembang dan mempengaruhi perekonomian suatu daerah. Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. Kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan pariwisata. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut:

Tabel 2.76
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
Kabupaten Karo Tahun 2019-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB	3,71	3,80	3,85	3,82	3,73

Sumber: BPS Kab. Karo, 2025

Grafik 2.27
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Jika dilihat dari Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB selama lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif namun pada periode tahun 2022 sampai tahun 2024 kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan dari 3,85 persen menjadi 3,73 persen. Sektor ini sangat penting dalam perekonomian Kabupaten Karo yang berperan dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja melalui proses produksi yang dilaksanakan sehingga dimasa yang akan datang, penting untuk terus ditingkatkan dan menentukan strategi untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

B. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan dan Minum

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Karo belum menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan PDRB Kabupaten Karo sehingga pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum ini. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo berupaya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karo, melalui kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum. Salah satu permasalahan peningkatan PDRB Akomodasi dan Makan Minum saat ini adalah bencana alam yang mengakibatkan aksesibilitas menuju Kabupaten Karo rawan bencana sehingga menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Karo selain itu belum optimalnya promosi pariwisata, pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif belum optimal, masih terbatasnya 6A di Destinasi Wisata (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, Ancillary dan Available Packages), Belum Optimalnya Pengembangan Industri Pariwisata, Belum optimalnya peran Masyarakat sadar wisata dan pelaku pariwisata (Pemandu Wisata, Pokdarwis, Pengelola Desa Wisata dan Destinasi Wisata) dalam menerapkan Sapta Pesona, kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata belum optimalnya, Kolaborasi dan sinergitas stakeholders dalam pengembangan pariwisata belum optimal. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.77
Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PDRB Akomodasi dan Makan Minum	537.680.000.000	546.070.000.000	589.960.000.000	650.670.000.000	746.750.000.000
2	Total PDRB	20.974.570.000.000	21.824.140.000.000	23.9750.570.000.000	26.408.980.000.000	28.867.890.000.000

3	Rasio Akomodasi dan Makan Minum	PDRB	2,56	2,50	2,46	2,46	2,59

Sumber: BPS Kabupaten Karo

C. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif (Ekraf) merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu menjadi kekuatan baru ekonomi nasional yang berkelanjutan dan menekankan pada penambahan nilai barang lewat daya pikir serta kreativitas manusia. Kontribusi Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karo dapat dilihat melalui perkembangan Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI. Dari data diperoleh bahwa Jumlah produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI masih terbilang cukup rendah sehingga pemerintah masih butuh upaya keras untuk meningkatkan ekosistem industri ekonomi kreatif dan akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual dalam peningkatan produk ekonomi yang memiliki HAKI. Pelaku ekonomi kreatif juga perlu terus difasilitasi dalam pendaftaran produk HAKI. Selain itu, untuk peningkatan produk ekonomi kreatif yang memiliki HAKI dilakukan melalui peningkatan SDM, peningkatan akses pasar, permodalan, kolaborasi, inovasi dan promosi.

Tabel 2.78
Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produk Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	-	-	67	15	27

Sumber: Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo

D. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Rasio kewirausahaan Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.79
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kewirausahaan (%)	3,69	3,87	3,79	4,65	3,78

Sumber: Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara (diolah)

Rasio kewirausahaan Kabupaten Karo mengalami fluktuasi selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 sektor ini mengalami penurunan dari periode sebelumnya tahun 2023, beberapa permasalahan perlu untuk terus dibenahi antara lain melalui peningkatan kemampuan UMKM untuk terus naik kelas dan berdaya saing, meningkatkan produktivitas Koperasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan infrastruktur pendukung, kebijakan untuk mendukung kewirausahaan yang kondusif, mendorong implementasi IPTEKIN, mengembangkan kemitraan, memfasilitasi akses ke sumber daya, dll.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sendiri merupakan suatu indikator yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang rendah dapat disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan, tingginya jumlah penduduk yang tidak

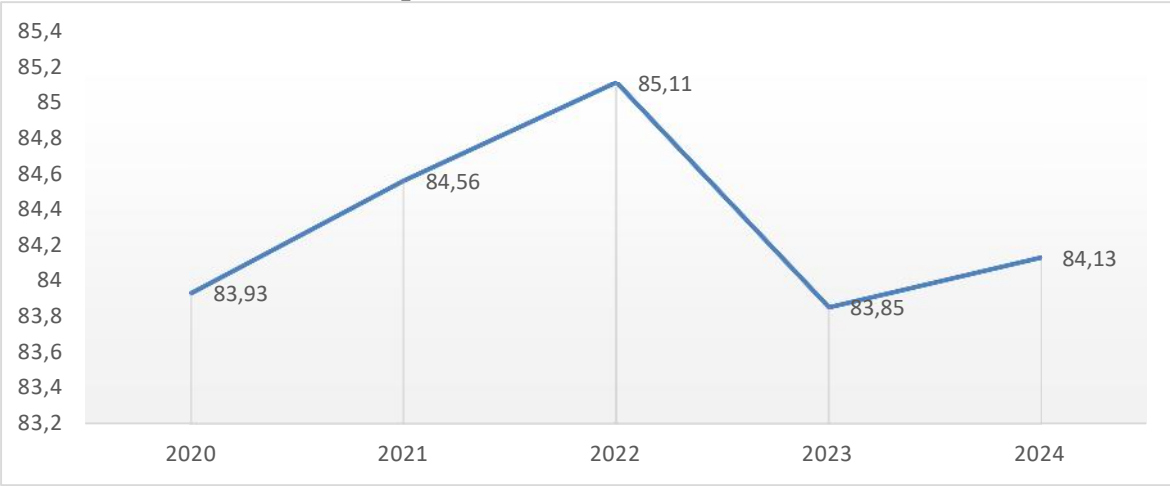
aktif dalam ekonomi, kurangnya kompetensi tenaga kerja, sebaliknya TPAK yang tinggi dapat mengindikasikan adanya lebih banyak peluang kerja dan partisipasi aktif dalam perekonomian. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2019-2023

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	83,93	84,56	85,11	83,85	84,13

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2025

Grafik 2.28
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Karo cenderung meningkat disetiap tahun kecuali pada tahun 2023 mengalami penurunan namun pada tahun 2024 kembali meningkat. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan perlu tetap ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan. Selain itu infrastruktur dan peningkatan investasi juga sangat dibutuhkan untuk ketersediaan lapangan pekerjaan.

F. Indeks Inovasi Daerah

Komitmen Pemerintah Kabupaten Karo untuk meningkatkan Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo diwujudkannyatakan dengan menetapkan:

1. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah.

Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 secara perlahan terus meningkat, dengan melakukan perubahan-perubahan strategi setiap tahun. Peningkatan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karo ini masih tetap harus dilakukan untuk mempertahankan predikat Kabupaten Karo Sangat Inovatif dan mencapai Kabupaten Karo Terinovatif ke depannya.

Tidak hanya pada 2 (dua) regulasi di atas, komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karo juga terlihat lebih serius ketika menetapkan Peraturan Bupati Karo 01 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo, yang memuat “pengurangan TPP akan dikenakan kepada seluruh ASN pada perangkat daerah tersebut apabila tidak memenuhi pelaporan

kinerja berupa “Laporan Inovasi Perangkat Daerah” setiap triwulan dan akhir tahun. Implementasi ketiga regulasi ini, sangat berdampak terhadap pencapaian IID Kabupaten Karo saat ini dan ke depannya. Itu dapat dilihat seperti dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IID (skor/indeks)	3.319 (skor)	53,24 (Indeks)	53,69 (Indeks)	55,96 (Indeks)	62,02 (Indeks)
2	Predikat Kabupaten Karo	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif
3	Peringkat Kab/Kota Se-Sumut	3	3	2	2	1
4	Peringkat Kab Se-Indonesia	49	67	107	61	63

Sumber: BSKDN Kemendagri Tahun 2020-2024

Disamping itu, persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah capaiannya 100 persen dimana semua perangkat daerah mau difasilitasi dalam melaksanakan dan menerapkan inovasi. Begitu jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah terus meningkat karena jumlah inovasi yang diusulkan meningkat, seperti digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.82
Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penerapan SIDA					
1.1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	60	59	46	46	46
1.2	Jumlah total perangkat daerah	60	59	46	46	46
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	100	100	100	100	100
2.1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	43	27	43	71	111
2.2	Jumlah inovasi yang diusulkan	21	22	49	62	49
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	205	123	88	115	227

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo, 2024;
* Jumlah inovasi yang diusulkan ke IGA/Siindahkaka mulai 2 tahun terakhir sampai tahun berjalan

Bappedalitbang Kabupaten Karo sebagai penyelenggara Inovasi Daerah Kabupaten Karo juga berinovasi dengan menyediakan Ruang Diskusi Rutin Inovasi *Learning Organization Innovation Based* sejak tahun 2021 sebagai media yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi, setiap jam dan hari kerja untuk dapat berdiskusi terkait kendala dan permasalahan pelaksanaan dan penerapan inovasi pada instansinya. Tahun 2025, Ruang Diskusi Rutin Inovasi *Learning Organization Innovation Based* dikembangkan menjadi RUDII/MO/RO dimana ruang diskusi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu RUDII (Ruang Diskusi Inovasi) via WhatsApp, RUDIIMO (Ruang Diskusi Inovasi Mingguan *Online*) dan RUDIIRO (Ruang Diskusi Inovasi Rutin *Offline*). Inovasi ini dibuat dalam rangka menyelaraskan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi. Disamping itu, ada pertemuan-pertemuan rutin inovasi, *workshop* dan desk inovasi untuk fasilitator inovasi instansi.

2.1.3.3. Transformasi Digital

Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kemajuan transformasi digital. Transformasi digital membawa banyak potensi dan berbagai manfaat, beserta dengan potensi dampak negatif, tantangan dan risiko yang perlu diantisipasi. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk merespon perkembangan teknologi digital dengan berbagai regulasi kebijakan. Transformasi Digital terdiri dari:

1. Infrastruktur Digital

Infrastruktur Digital merupakan Fondasi Akselerasi Inovasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Pada awal tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 79.5% atau 221,6 juta penduduk. Penggunaan jumlah *mobile connection* meningkat sebesar 3.6% sejak terjadi pandemi *Covid-19*. Saat ini, penetrasi *fiber optic* mencapai 60.84% dari seluruh kecamatan. Jaringan *fiber optic* menjangkau sekitar 4.398 Kecamatan dari total 7.281 kecamatan di Indonesia. Total pembangunan jaringan *fiber optic* hingga saat ini adalah 460.000 Km. Di beberapa provinsi di Indonesia, kecepatan unduh mobile broadband telah lebih dari 25 Mbps. Saat ini, memasuki era 5G, sudah terdapat penetrasi jaringan 5G di 48 kota. Penetrasi jaringan *broadband* meningkatkan penggunaan data dan *traffic internet*.

2. Pemerintahan Digital

Pemerintahan Digital membuka Akses dan Kemudahan Pelayanan Publik. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif. Dengan menginisiasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai landasan konseptual dalam mengelola pemerintahan digital di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan dalam mencapai keterjangkauan merata, pemerintah fokus pada percepatan pembangunan pusat data nasional dan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia untuk memastikan layanan digital yang andal di seluruh pelosok negeri. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengangkat peringkat Indonesia dalam indeks global e-government dan mempercepat transformasi digital yang inklusif. Integrasi aplikasi pemerintah juga mulai menunjukkan hasil positif, dengan upaya konsolidasi 24 ribu aplikasi yang tersebar di berbagai lembaga. Pemerintah aktif mendorong penerapan standar interoperabilitas, memperkuat efisiensi tata kelola dan mencegah duplikasi data. Dengan terobosan ini, proses administrasi pemerintahan diharapkan akan semakin cepat, efisien, dan transparan, memberikan layanan publik yang lebih baik.

Di bidang keamanan siber, Indonesia terus memperkuat regulasi dan implementasi UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk melindungi masyarakat dari ancaman kebocoran data. Pemerintah berkomitmen mempercepat pembahasan regulasi keamanan siber yang lebih komprehensif dan memastikan sistem perlindungan yang lebih kuat, menciptakan fondasi yang kokoh untuk kepercayaan publik terhadap transformasi digital di Indonesia.

3. Ekonomi Digital

Ekonomi Digital berperan sebagai Pengungkit Baru Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Nilai ekonomi digital Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021, nilai ekonomi digital Indonesia diestimasi berkontribusi sebesar Rp1,490 Triliun dimana kontribusi industri digital mencapai 6.12% terhadap PDB. Pada tahun 2022, jumlah startup di Indonesia mencapai 2.341 startup-kedua tertinggi di Asia setelah India. Lebih lanjut, Jakarta menempati peringkat 12 dari 100 kota di dunia dalam Top 100 Emerging Ecosystems. Nilai ecosystem

value Jakarta mencapai USD71 Miliar, melampaui nilai rata-rata global sebesar USD34.6 Miliar. Pesatnya pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia juga didukung oleh kehadiran 120 inkubator dan akselerator startup, serta 200 institusi keuangan yang mendukung finansial startup. Adopsi teknologi digital pada sektor manufaktur, pertanian, logistik, dan keuangan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah juga mendorong adopsi teknologi untuk sektor UMKM agar memiliki produktivitas lebih tinggi.

4. Masyarakat Digital

Masyarakat Digital akan mengalami Peningkatan Keterampilan Digital, Perkuat Daya Saing Bangsa. Di tahun 2045 proyeksi penduduk dengan kelompok umur 15-64 tahun akan mencapai 214,2 juta dari total populasi sebanyak 329,1 juta. Artinya, pada tahun 2045 penduduk usia produktif menyumbang 65 persen dari total populasi penduduk Indonesia. Pertumbuhan penduduk usia produktif di Indonesia menghadirkan peluang besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi kunci untuk mewujudkan potensi tersebut. Dengan membekali generasi produktif dengan keterampilan digital yang relevan, Indonesia dapat memperkuat posisi di tengah persaingan global. Pemerintah dan ekosistem digital berkolaborasi untuk meningkatkan literasi digital melalui kampanye edukasi yang masif dan inklusif. Dengan pendekatan ini, bonus demografi dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkuat daya saing bangsa.

Tabel 2.83
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesi (IMDI)	N/A	N/A	39,21	47,12	39,99

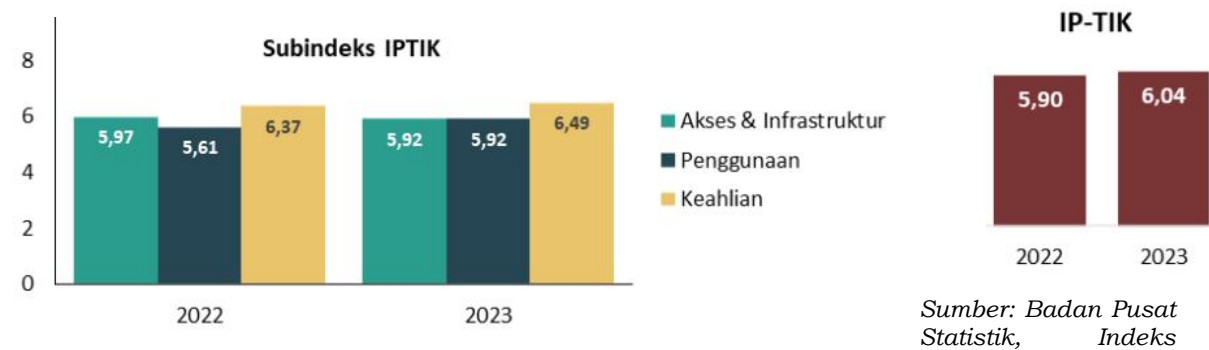
Tahun 2024 IMDI Kabupaten Karo menurun dari 47,12 tahun 2023 menjadi 39,99 poin. Penurunan dimaksud disebabkan rendahnya pilar pemberdayaan.

Untuk meningkatkan masyarakat digital Indonesia di Kabupaten Karo, diperlukan pemberdayaan kemampuan digital masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka (pemberdayaan ekonomi) atau aktivitas digital masyarakat yang menghasilkan pendapatan, pengembangan digital skill dan diperoleh dari tingkat intensitas aktivitas digital masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan, *e-commerce*, *marketplace*, media sosial, dan platform e-learning. Sebagai penunjang diperlukan program kerja yang berbasis Platform integrasi yang memungkinkan pertukaran data secara efisien antara sistem, aplikasi, layanan SPBE, dan perangkat IoT melalui API.

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU) dengan nama *ICT Development Index* (ICT-DI). Indeks Pembangunan TIK merupakan ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat diperbandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, Indeks Pembangunan TIK mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK.

Gambar 2.3
Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2022 dan 2023



Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi 2023

2.1.3.4. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Karo terbilang cukup baik namun pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto ini. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo telah Menyusun peraturan daerah untuk pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi. Salah satu permasalahan Pembentukan Modal Tetap Bruto saat ini adalah iklim investasi dan kemudahan berusaha. Iklim investasi yang tidak kondusif dapat menghambat peningkatan Pembentukan Modal Tetap Bruto, kemudahan berusaha yang terbatas serta kurangnya minat investasi. Untuk itu perlu dilakukan mendorong investor untuk berminat berinvestasi di Kabupaten Karo serta menyiapkan dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*) untuk ditawarkan kepada investor. PMTB Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.84
Pembentukan Modal Tetap Bruto
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB ADHK)	30,76	30,91	30,88	31,69	31,80

Sumber: BPS Kabupaten Karo

B. Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor. Jika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, maka net ekspor akan bernilai positif. Sebaliknya, jika nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka net ekspor akan bernilai negatif. Net ekspor yang positif menunjukkan kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang diinginkan oleh pasar. Sebaliknya, net ekspor yang negatif menunjukkan bahwa lebih banyak mengimpor barang dan jasa daripada yang dihasilkan.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi. Data net ekspor kabupaten Karo tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.85

Net Ekspor Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 (miliar Rp)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Net Ekspor	6,35	151,93	-17.027	860,47	1.691,13

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2025

Kualitas produk yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar sangat diperlukan untuk itu pendidikan dan pelatihan bagi petani dalam menghasilkan produk yang berkualitas maupun dalam pengolahan pasca panen agar produk yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu pemerintah perlu meningkatkan kerjasama dengan asosiasi perdagangan atau pihak yang terkait untuk menciptakan peluang pemasaran dan memperluas akses pasar.

2.1.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang berkelanjutan dinilai dari beberapa indikator, antara lain:

A. Indeks Daya Saing Infrastruktur

Capaian Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Karo tahun 2024 sebesar 3,85 menunjukkan kondisi infrastruktur daerah yang relatif baik karena lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,97, meskipun masih sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,92. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Karo telah memiliki daya saing infrastruktur yang cukup kompetitif di tingkat nasional, namun tetap perlu percepatan peningkatan kualitas pada aspek-aspek tertentu agar mampu mengejar bahkan melampaui rata-rata provinsi. Oleh karena itu, penguatan investasi infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pemeliharaan aset, serta pengembangan konektivitas dan layanan publik berbasis infrastruktur menjadi langkah strategis untuk mendorong daya saing daerah secara berkelanjutan. Namun demikian Indeks daya saing infrastruktur Kabupaten Karo mengalami peningkatan dengan melaksanakan pembangunan jalan dan penyediaan air minum layak yang dilakukan secara berkesinambungan. Di sisi lain, Kabupaten Karo belum memiliki Stasiun Kereta Api serta Bandara yang juga menjadi salah satu faktor penunjang indeks daya saing infrastruktur.

Tabel 2.86

Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Indeks)	3,00	3,25	1,54	2,62	3,85

Sumber: BRIN

B. Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau

Penyediaan hunian layak dan terjangkau merupakan salah satu kendala dalam pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Karo. Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau belum 100. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun pada tahun 2024 akses hunian layak dan terjangkau masih 98,91%. Pembangunan rumah layak huni dan terjangkau akan menjadi program ke depan untuk memnuhi akses rumah layak huni dan terjangkau 100%

Tabel 2.87
Rumah Tangga dengan Akses hunian layak dan terjangkau
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	n/a	n/a	63.30	95.14	98.91

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Karo

C. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, akan tetapi masih jauh dari apa yang diharapkan, berdasarkan analisis angka Desa Maju menuju Mandiri tahun 2024 Kabupaten Karo, terdapat beberapa kendala dari faktor dimensi pendukung, antara lain:

- Dimensi Pendidikan: tujuh (7) dari 47 Desa Maju memiliki akses menuju PAUD, SD, SMP dan SMA/SMK sangat rendah.
- Dimensi Kesehatan: 29 dari 47 Desa Maju memiliki layanan dokter dan tenaga kesehatan lainnya serta kepemilikan jaminan kesehatan yang rendah.
- Dimensi Aktivitas Desa: 20 dari 47 Desa Maju memiliki aktivitas kegiatan olah raga yang rendah berupa keberadaan kelompok olah raga dan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga.
- Dimensi Fasilitas Pendukung Ekonomi: 16 dari 47 Desa Maju memiliki akses pendidikan nonformal (pusat keterampilan dan kursus) yang rendah.

Tabel 2.88
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Desa Mandiri (Persen)	0,38	0,38	0,38	1,93	2,31

2.1.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan.

A. Rasio Pajak terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Karo masih terbilang cukup rendah walaupun terjadi peningkatan setiap tahunnya sehingga pemerintah masih butuh upaya keras dalam peningkatan Ratio pajak daerah ini. Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak daerah ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan data wajib pajak yang belum akurat. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi teknologi, intensifikasi serta ekstensifikasi pengelolaan pajak daerah dalam rangka peningkatan pajak daerah di Kabupaten Karo.

Tabel 2.89
Rasio Pajak terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pajak Daerah	36.711.550.305,76	41.674.222.166,31	51.640.157.978,00	58.674.293.730,00	61.540.045.940,28
2	Total PDRB	20.974,57	21.824,14	23.975,57	26.408,98	28.867,89
3	Rasio Pajak terhadap PDRB	0,0017	0,0019	0,0021	0,0022	0,0021

Sumber: BPS Kabupaten Karo dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karo

2.1.4.Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merujuk pada kualitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga terkait kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pelayanan ini mencakup berbagai sektor seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan keamanan. Tujuan utama pelayanan umum adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan sosial dan ekonomi.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum.

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengukur reformasi hukum. IRH merupakan salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi, penilaian dimulai pada tahun 2022 tetapi Kabupaten Karo mulai ikut penilaian pada tahun 2023. Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Karo pada Tahun 2024, Skor IRH mencapai 87.22, skor ini menunjukkan kinerja yang baik. Peningkatan ini didorong oleh beberapa faktor yang menjadi indikator dari penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH), antara lain:

- a. Penguatan sistem regulasi yakni Upaya peningkatan koordinasi ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi.
- b. Peningkatan pelayanan hukum kepada Masyarakat yakni dengan penataan database peraturan perundang-undangan dan memperluas akses Masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas dan terjangkau

Beberapa hal yang yang menjadi permasalahan sehingga belum tercapainya Skor Indeks Reformasi Hukum yang maksimal yakni:

- 1. belum tersedianya kegiatan peningkatan Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan Bimtek untuk Analis Hukum
- 2. belum terlaksananya kegiatan regulasi/deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu.

Tabel 2.90
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Karo Tahun 2022-2024

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	0	0	87.22

Sumber: Kemenkumham, 2024

B. Indeks Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat sebagai pengguna layanan publik tentunya mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Melihat hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Karo bekerja keras untuk meningkatkan layanan yang dimaksud dengan berbagai cara.

Laporan Hasil Kepatuhan terhadap Komponen Standar Pelayanan yang dilakukan Ombudsman RI untuk Kabupaten Karo senantiasa berubah ke arah yang lebih baik, sebagaimana di bawah ini:

Grafik 2.29
Bagan Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik



Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009) dinyatakan bahwa Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) dan dari hasil pemantauan yang dilakukan ke Kabupaten Karo diperoleh nilai sebagai berikut :

1. Tahun 2021 dengan Lokus Penilaian 2 (dua) Perangkat Daerah (DPM-PTSP dan DISDUKCAPIL), dengan Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Karo berada pada Kategori C dengan Skor 2,73.
2. Tahun 2022 dengan Lokus Penilaian 2 (dua) Perangkat Daerah (DPM-PTSP dan DISDUKCAPIL), dengan Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Karo berada pada Kategori - B dengan Skor 3,45.
3. Tahun 2023 dengan Lokus Penilaian 3 (tiga) Perangkat Daerah (Kecamatan Tiganderket, Dinas Sosial dan RSUD), dengan Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Karo NA (Not Available) tidak ternilai karena kesalahan teknis diaplikasi.
4. Tahun 2024 dengan Lokus Penilaian 3 (tiga) Perangkat Daerah (Dinas Sosial, RSUD dan Disdukcapi), dengan Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Karo berada pada Kategori B dengan Skor 3,63 poin.

Pencapaian Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik di Kabupaten Karo, pelaksanaanya memiliki kendala antara lain:

- 1) Perangkat Daerah sebagai Unit Pelayanan Publik Kabupaten Karo belum seluruhnya menyusun dan menetapkan visi misi pelayanan standar Pelayanan Publik, maklumat pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan publik sebagaimana ketentuan berlaku.
- 2) Masyarakat masih ada yang merasakan pelayan public yang mereka terima tidak sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga dibutuhkan media komunikasi antara masyarakat sebagai penerima Layanan Publik dan Perangkat Daerah sebagai unit Pelayanan Publik Kabupaten Karo.

C. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur tingkat risiko korupsi di kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Indeks Integritas Daerah. Indeks Integritas Nasional diperoleh dari Nilai Aregat Survey Penilaian Integritas pada setiap daerah, sehingga Nilai SPI Daerah ini dapat diartikan sebagai Indeks Integritas Daerah. Survey Penilaian Integritas menjadi Instrumen untuk mengetahui dampak atas berbagai upaya pemberantasan korupsi yang telah di lakukan pemerintah dalam perspektif responden.

Responden SPI berasal dari Internal (ASN Pemkab Karo); Eksternal (Masyarakat pengguna layanan atau mitra kerja sama K/L/PD); Eksper (Ahli yang terdiri dari ahli/tokoh yang di pandang mengetahui keadaan pemerintahan diwilayah sampel yaitu Pensiunan PNS, Auditor BPK, Auditor BPKP, Perwakilan Ombusman, PIC Program Stranas KPK, Asosiasi Pengusaha, Pimpinan DPRD/Ketua Komisi DPRD, Advokat , Aparat Penegak Hukum terkait Saber Pungli, Jurnalis, LSM, Akademisi, Lembaga Donor, Penyuluh Anti Korupsi dan ahli lainnya.

Indeks Integritas Daerah Kabupaten Karo menunjukkan tren yang meningkat, tetapi belum mencapai 80, hal ini menggambarkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Karo Belum Optimal, yang beberapa hal antara lain SDM belum mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitas serta sistem Merit belum berjalan dalam proses mutasi dan promosi ASN.

Tabel 2.91
Indeks Integritas Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Integritas Daerah	-	61,76	71,85	72,60	76,07

Sumber: KPK

D. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. SPBE juga dikenal sebagai *e-Government*. Tujuan SPBE adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan. Peningkatan penyelenggaraan SPBE untuk pembangunan daerah meliputi:

- 1. Instansi pusat
- 2. Pemerintah daerah
- 3. Aparatur sipil negara (ASN)
- 4. Perorangan
- 5. Masyarakat
- 6. Pelaku usaha
- 7. Pihak lain yang memanfaatkan SPBE

Untuk mendukung penerapan SPBE, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral. Manajemen SPBE dilakukan melalui Pengoperasian layanan SPBE, Pengelolaan aplikasi SPBE, Pelayanan pengguna SPBE, Audit teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 2.92
Capaian Indeks SPBE Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	N/A	N/A	2.42	2.57	3.04

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Karo

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penentuan kategori Indeks SPBE sebagai berikut a. 1.00–1.99: Rintisan; b. 2.00–2.99: Berkembang; c. 3.00–3.49: Maju; d. 3.50–4.50: Unggul dan e. 4.51–5.00: Digital. Maka, capaian Indeks SPBE Kabupaten Karo diperoleh pada tahun 2022–2023 dalam kategori “Berkembang” dan tahun 2024 sebesar 3,04 telah masuk kategori “Maju”.

Kabupaten Karo mengalami kemajuan positif dan konsisten dalam transformasi digital pemerintahan. Lonjakan nilai pada 2024 menunjukkan adanya perbaikan signifikan. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan agar bisa mencapai kategori Unggul dan bahkan Digital.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

A. Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Pemerintah Kabupaten Karo telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa permasalahan yang perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat dan Kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi masyarakat di Kabupaten Karo. Capaian Aksi HAM di Kabupaten Karo mencakup berbagai bidang yakni

- a. pemberian bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah
- b. optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum
- c. penyediaan layanan Pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.
- d. penyediaan layanan Kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan Kesehatan tingkat pertama.
- e. implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya, dan;
- f. pembangunan sarana dan prasarana transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Capaian Aksi HAM Kabupaten Karo menunjukkan tren positif atau meningkat, tetapi terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya antara lain:

1. Indikator yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan Aksi HAM berbeda setiap tahunnya dan disampaikan kementerian terkait pada saat tahun berjalan Pemerintah Daerah sering mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sub kegiatan yang telah ditetapkan dengan tujuan pelaksanaan Aksi HAM.
2. Pelaksanaan penilaian Aksi HAM belum menjadi salah satu prioritas Perangkat Daerah dalam pelaksanaannya.

Tabel 2.93
Persentase Capaian Aksi HAM

No	Uraian	2021	2022	2023	2024
1	Capaian Aksi HAM	34.20	56.18	85.7	93.3

Sumber: Kemenkumham

B. Demokrasi Substansial, Narkoba dan Wawasan Kebangsaan

Pada bidang politik dan wawasan kebangsaan berdasarkan data menggambarkan bahwa jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik, wawasan kebangsaan dan revolusi mental mengalami kenaikan sedangkan jumlah kawasan bahaya narkoba menjadi kawasan waspada cenderung fluktuatif paling tinggi pada tahun 2021 sebanyak 92 desa sedangkan pada tahun 2024 belum mendapatkan angka realisasi. Data kawasan narkoba cenderung tinggi artinya masih tingginya peredaran narkoba di desa dan perkotaan serta tingginya generasi muda yang terjerumus narkoba. Hal ini kedepannya menjadi ancaman keamanan dan ancaman produktivitas serta daya saing sumber daya manusia khususnya generasi muda yang akan menjadi beban non produktif bahkan generasi emas Kabupaten Karo terancam gagal karena narkoba.

Tabel 2 .94
Indikator Demokrasi, Narkoba dan Wawasan Kebangsaan
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik	Orang	-	-	150	300	500
2.	Jumlah Ormas yang terbina dan aktif	Ormas	63	76	89	97	108
3.	Jumlah kawasan bahaya narkoba menjadi kawasan waspada	Desa	57	92	82	37	-
4.	Laporan rencana aksi penanganan konflik	Peringkat	3	2	2	3	1
5.	Jumlah masyarakat yang menerima pendidikan politik wawasan kebangsaan dan revolusi mental	Orang	-	-	200	150	420

Sumber : Bakesbangpol Kab. Karo, 2025

C. Keamanan daerah

Keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Selain angka kriminalitas, kejadian unjuk rasa juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Kegiatan unjuk rasa di Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali sedangkan tahun 2021-2022 tidak ada unjuk rasa. Akan tetapi pada tahun 2023-2024 terjadi 4 kali demonstrasi. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan dan keamanan serta perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Karo.

Jumlah demonstrasi atau unjuk rasa di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 .95
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah unjuk rasa	7	-	-	4	2

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Karo, 2025

D. Penegakan Perda dan Perkada

Penegakan Perda dan Perkada merupakan upaya menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum melalui pembinaan, pengawasan, penyidikan dan penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat serta untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Tabel 2 .96
Realisasi Persentase Penegakan Perda dan Perkada
Di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	72,72	73,15	73,59	73,97	81,82

Sumber: Satpol PP Kab. Karo

Penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Karo selama lima tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi dalam penyelenggaraanya mengalami permasalahan yaitu belum optimalnya sistem penegakan perda secara preventif pendekatan kepada masyarakat dikarenakan upaya penegakan perda yang dilakukan selama ini masih bersifat represif sehingga banyak menimbulkan perlawanan dan penolakan dari masyarakat.

G. Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan pelayanan dasar wajib. Pelaksana utama adalah Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2 .97
Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satpol PP di Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja/Layanan SPM	Satuan	Target	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	81	83	87	91	95
2	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persen	100	74	72	80	85	89
3	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persen	100	77	79	82	88	91

Sumber: Satpol PP Kab. Karo

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun menunjukkan kinerja yang meningkat setiap tahunnya walaupun belum mencapai 100 persen. Capaian layanan ketenteraman dan ketertiban umum telah mendekati target, yaitu 95 persen, penegakan Perda/Perkada mencapai 91 persen, dan layanan penyelamatan serta evakuasi kebakaran sebesar 89 persen. Dalam pelaksanaannya menghadapi kendala, antara lain:

- a. Cakupan Layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Lokasi desa terpencil dengan medan yang sulit diakses menyebabkan keterlambatan waktu tanggap.
 - Jumlah personel dan armada patroli belum sebanding dengan luas wilayah yang harus dilayani.
 - Terjadinya beberapa kejadian secara bersamaan pada jam-jam puncak menghambat kecepatan penanganan.
- b. Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

- Jarak antara pos pemadam kebakaran dan lokasi kejadian di desa terpencil cukup jauh, sehingga memperlambat waktu tanggap.
 - Tidak semua lokasi kejadian memiliki *hydrant* atau sumber air yang memadai untuk pemadaman.
 - Ketersediaan armada dan peralatan pemadam belum merata di seluruh pos yang ada di kecamatan.
 - Dari 17 kecamatan di Kabupaten Karo, baru 7 kecamatan yang memiliki pos pemadam kebakaran.
- C. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- Koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada penanganan pelanggaran yang melibatkan perizinan usaha atau aspek lingkungan.
 - Resistensi atau penolakan dari masyarakat maupun pelaku usaha terhadap upaya penertiban.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah. Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) suburusan bencana daerah kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara, melalui tahapan pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, perhitungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar, pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh Kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana terdiri dari: pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Berikut Capaian SPM Kebencanaan Kab. Karo Tahun 2020-2024.

Tabel 2 .98
Capaian SPM Kebencanaan Kab. Karo Tahun 2020-2024

IKK Perangkat Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	9.864	10.799	11.261	11.816	11.816
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.044	4.787	5.062	5.598	5.666
Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	19.082	20.305	21.455	22.694	23.713
Indeks Kapasitas Daerah	0,37	0,37	0,49	0,45	0,48

Sumber: BPBD Kab. Karo

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di kawasan.

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Karo menggambarkan kondisi dan kemampuan daerah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki melalui peningkatan produktivitas, nilai

tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Skor IDSD dapat dijadikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian daerah Kabupaten Karo. Skor IDSD Kabupaten Karo merupakan gambaran keberhasilan daerah Kabupaten Karo untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. IDSD Kabupaten Karo ini dapat dijadikan sebagai salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah Kabupaten Karo yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 sampai Tahun 2024 dapat dikatakan meningkat walaupun sedikit berfluktuasi dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut di atas adalah komponen lingkungan pendukung dan pasar. Komponen lingkungan pendukung ditentukan oleh pilar institusi yang dipengaruhi oleh kemananan, modal, sosial, *check and balance*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah; Pilar infrastruktur yang dipengaruhi oleh infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas; Pilar adopsi TIK dipengaruhi oleh pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, Pelanggan internet *fixed-broadband* dan pengguna internet; Pilar stabilitas ekonomi makro ditentukan oleh indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, dan nilai investasi. Komponen Pasar ditentukan oleh Pilar pasar produk yang dipengaruhi oleh persaingan domestik menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) sejak tahun 2021 sampai 2024, skor IDSD Kabupaten Karo berdasarkan komponen seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 .99
IDSD Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 Berdasarkan Komponen

Tahun	Skor IDSD (skala 5)	KOMPONEN			
		Lingkungan pendukung	SDM	Pasar	Ekosistem Inovasi
2024	3,58	4,09	4,11	2,92	3,34
2023	3,38	3,60	3,98	2,78	3,53
2022	2,93	2,83	3,77	2,55	3,08
2021	3,04	3,05	3,25	3,25	2,60

Sumber: Laporan IDSD BRIN Tahun 2021-2024

Skor IDSD Kabupaten Karo paling tinggi pada Tahun 2024, skor ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan yang akan diambil ke depan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Karo. Skor IDSD ini ditentukan dari penilaian 4 komponen dan 12 pilar yaitu:

1. Komponen lingkungan pendukung terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu:
 - a. Pilar institusi yang ditentukan oleh kemananan, modal, sosial, *check and balance*, transparansi, hak atas kepemilikan, dan orientasi masa depan pemerintah dengan skor 4,44 poin.
 - b. Pilar infrastruktur yang ditentukan oleh infrastruktur transportasi dan infrastruktur utilitas dengan skor 3,85 poin.
 - c. Pilar adopsi TIK ditentukan oleh pengguna telepon seluler, jangkauan jaringan 4G, Pelanggan internet *fixed-broadband* dan pengguna internet dengan skor 4,44 poin.
 - d. Pilar stabilitas ekonomi makro ditentukan oleh indikator inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat

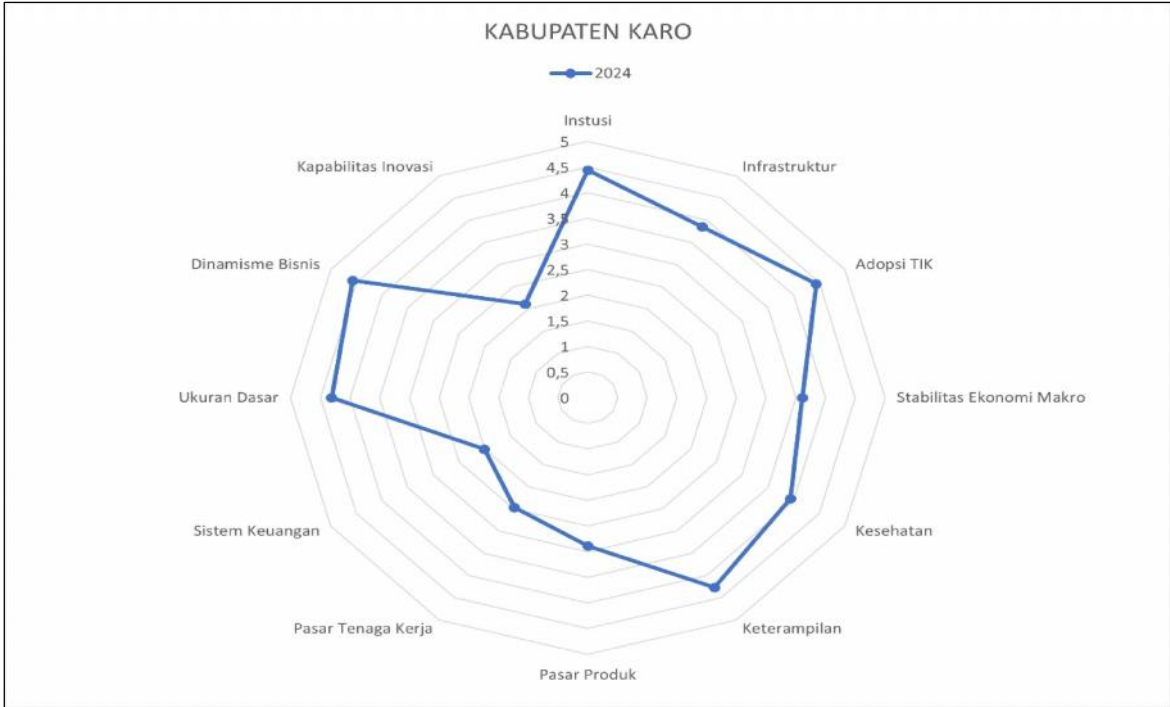
- pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan, dan nilai investasi dengan skor 3,61 poin.
2. Komponen SDM terdiri dari 2 (dua) pilar yaitu:
 - a. Pilar kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dengan skor 3,94 poin.
 - b. Pilar keterampilan ditentukan oleh tenaga kerja saat ini dan tenaga kerja masa depan, erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dengan skor 4,27 poin.
 3. Komponen pasar terdiri dari 4 (empat) pilar yaitu:
 - a. Pilar pasar produk dengan skor 2,89 ditentukan oleh persaingan domestik menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara fair dan kompetitif. Berbagai praktek monopoli dan oligarki ekonomi serta adanya hambatan- hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar produk dan jasa tertentu menciptakan inefisiensi pasar. kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar.
 - b. Pilar pasar tenaga kerja dengan skor 2,47 ditentukan oleh fleksibilitas, meritokrasi dan insentif. Fleksibilitas tenaga kerja dan layakannya upah merupakan faktor penentu pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja yang efisien akan mempertemukan kepentingan pelaku bisnis dan tenaga kerja. Dari sisi permintaan (*demand side*), pelaku bisnis dan investor sangat mempertimbangkan tingkat keterampilan dan upah tenaga kerja yang akan menjadi biaya dalam proses produksi. Di sisi penyediaan (*supply side*), tenaga kerja mempertimbangkan upah yang akan diterima, termasuk jaminan sosial pekerja lainnya, dalam memutuskan untuk bekerja. Kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif memberi kemudahan bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kapabilitasnya dan masuk ke pasar tenaga kerja.
 - c. Pilar sistem keuangan dengan skor 2,01 ditentukan oleh kedalaman dan stabilitas. Sistem keuangan terdiri atas sejumlah institusi keuangan, sekumpulan pasar keuangan, infrastruktur sistem keuangan, dan sejumlah prosedur dan peraturan yang menjamin terlaksananya simpan pinjam secara baik (Gunadi et al., 2013). Sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian dengan meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta memediasi lalu lintas dana melalui jasa sistem pembayaran. Sistem keuangan yang mampu memediasi sumber daya keuangan secara efisien dan memitigasi risiko krisis keuangan dengan penuh kehati-hatian akan memfasilitasi pelaku usaha untuk lebih produktif dan ekspansif.
 - d. Pilar ukuran pasar dengan skor 4,31 ditentukan oleh PDRB harga konstan tahun 2010 dan rasio impor terhadap PDRB harga berlaku. Ukuran pasar ini mempengaruhi produktivitas karena pasar yang besar memungkinkan pelaku bisnis untuk mengeksploitasi skala ekonomi. Ukuran pasar menguatkan struktur industri sehingga meningkatkan nilai tambah. Ukuran pasar berpeluang meningkatkan produktivitas bisnis dengan mengeksploitasi skala ekonomi.
 4. Komponen ekosistem inovasi terdiri dari 2 (dua) pilar yaitu:
 - a. Pilar dinamisme bisnis dengan skor 4,57 ditentukan oleh biaya untuk memulai usaha dan waktu untuk memulai usaha. Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (*market*) di suatu wilayah. Di satu sisi, semua daerah tentunya

mengharapkan kedatangan investasi baru dan perusahaan yang inovatif ke wilayahnya. Di sisi lain, daerah juga menginginkan perusahaan yang tidak efisien bisa dengan mudah untuk keluar agar tidak membebani wilayahnya. Secara administratif, mudahnya pelayanan dan rendahnya hambatan untuk memulai bisnis, serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan memudahkan perusahaan untuk keluar-masuk pasar. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif, yaitu daerah yang mendatangkan investasi dan pelaku usaha yang inovatif serta melepas perusahaan yang tidak efisien keluar dari pasar, akan menjadikan daerah tersebut jauh lebih kompetitif dan produktif. Daerah yang mampu menciptakan dinamisme bisnis yang positif akan menjadikan daerah tersebut kompetitif dan produktif.

- b. Pilar kapabilitas inovasi dengan skor 2,11 ditentukan oleh keberagaman tenaga kerja, status pengembangan kluster, kekayaan intelektual dan kolaborasi, riset dan komersialisasi. Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Akumulasi dan diversifikasi pengetahuan menawarkan peluang merekombinasi pengetahuan untuk menghasilkan ide inovatif dan model bisnis baru.

Berdasarkan analisa skor IDSD Kabupaten Karo Tahun 2024 tersebut di atas, maka masih perlu beberapa kebijakan yang harus dan mendesak dilaksanakan dalam rangka meningkatkan IDSD Kabupaten Karo di tahun yang akan datang. Adapun kebijakan tersebut terkait 4 (empat) pilar, yaitu: pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, kapabilitas inovasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.4
Nilai Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 per Pilar



2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja urusan pemerintahan daerah mencerminkan efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat undang-undang. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengelola berbagai urusan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang berkualitas, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Daerah.

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Gambaran kinerja ini dapat juga disebut *cascading* yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah. Capaian indikator kinerja kunci Kabupaten Karo Tahun 2022-2024 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.100
Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2024

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT													
1	Pertumbuhan PDRB	-0,8	%	3,40-3,80	3,80-4,20	4,20-4,60	4.22	5.06	4.22	100.00%	100.00%	100.00%	
2	PDRB per kapita	49.703.130	ADHB	52,218,108	54,306,833	57,022,174	57,852,057	62,759,132	67,690,000	100.00%	100.00%	100.00%	
		33.795.190	ADHK	34,815,805	35,512,121	36.577.484	36,670,986	37,942,825	39,020,63	100.00%	100.00%	100.00%	
3	Indeks Gini	271	indeks	0.27	0.27	0.27	0.24	0.24	0,214	100.00%	100.00%	100.00%	
4	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	91,3	%	91.10	91.15	91.20	91.83	92.02	92.63	100.00%	100.00%	100.00%	
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,43	indeks	74.53	74.63	74.73	75.36	76.88	77.49	100.00%	100.00%	100.00%	
6	Angka rata-rata lama sekolah	9,79	tahun	9.86	9.92	9.99	10.02	10.03	10.12	100.00%	100.00%	100.00%	DIKNAS
7	Angka usia harapan hidup	71,4	Angka	71.65	71.75	71.90	72.03	72.28	72.44	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
8	Persentase balita gizi buruk	0,03	%	2.00	2.00	2.00	0,01	0,03	0.01	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
9	Prevalensi balita gizi kurang	1,01	%	3.00	3.00	2.00	2.06	2.48	2.98	31.33%	17.33%	-49.00%	DINKES
10	Cakupan Desa Siaga Aktif	35,3	%	35.30	42.80	50.20	35.00	36.00	36.00	99.15%	84.11%	71.71%	
11	Angka partisipasi angkatan kerja	83,93	%	83.94	83.94	83.95	85.12	85.12	84.13	100.00%	100.00%	100.00%	DISNAKERKUKM
12	Tingkat partisipasi angkatan kerja	83,93	%	83.94	83.94	83.95	85.12	85.12	84.13	100.00%	100.00%	100.00%	DISNAKERKUKM
13	Tingkat pengangguran terbuka	1,83	%	1.75	1.65	1.45	2.71	2.71	2.40	-54.86%	-64.24%	-65.52%	DISNAKERKUKM
14	Rasio penduduk yang bekerja	90,54	%	98.25	98.27	98.32	97.25	97.25	97.60	98.98%	98.96%	99,27%	DISNAKERKUKM
15	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	26	%	0.04	0.05	0.06	27.60	27.60	0.06	100.00%	100.00%	100.00%	DISNAKERKUKM
16	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	83,93	%	83.94	83.95	83.95	85.11	85.11	97.60	100.00%	100.00%	100.00%	DISNAKERKUKM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
17	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	24.67	%	25.00	25.50	25.60			47.69	0.00%	0.00%	100.00%	DISNAKERKUKM
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,25	indeks	83.00	86.00	89.00	N/A	80.06	84.78	0.00%	93.09%	95.26%	SETDA
19	Persentase PAD terhadap pendapatan	7,97	%	7.38	7.78	7.99	11.71	7.50	7.31	100.00%	96.40%	91.49%	BAPENDA
20	Opini BPK	WTP	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	100.00%	100.00%	n/a	BKAD
21	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,5	persen	87.50	89.00	90.50	86.40	89.10	92.00	98.74%	100.00%	100.00%	DKPP
22	Penguatan Cadangan Pangan	35	ton	100	100	100	18.00	14.15	14.15	18.00%	14.15%	14.15%	DKPP
23	Penanganan daerah rawan pangan	0	persen	0.12	0.09	0.06	0.00	0.00		100.00%	100.00%	100.00%	DKPP
24	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	53,18	%	51.94	51.50	51.00	54.24	53.74	51.00	N/A	N/A	100.00%	DISTAN
25	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A	100.00%	DISTAN
26	Produksi sektor pertanian	11.155.191	Ton	12,298,598.00	12,913,528.00	13,559,204.00	13,321,977.00	13,976,181.00	15,224,150.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISTAN
27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	5,84	%	5.78	5.75	5.72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DISTAN
28	Produksi sektor perkebunan	1.255.265	Ton	1,383,930.00	1,453,127.00	1,525,783.00	2,381,020.00	2,314,240.00	2,357,580.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISTAN
29	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	N/A	N/A	N/A	DISTAN
30	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	13,35	Persen	14.01	14.71	15.45		1.36	1.41	0,00%	9.25%	9.13%	DKPOP
31	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	10,57	persen	10.58	10.88	11.18	12.60	11.36	11.36	100.00%	100.00%	100.00%	DISPERINDAG
32	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	3,71	persen	3.75	3.78	3.82	3.80	3.82	3.82	100.00%	100.00%	100.00%	DISPERINDAG
33	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	0	persen	34.75	35.31	35.61	3.80	29.27	29.27	10.94%	82.89%	82.20%	DISPERINDAG
34	Pertumbuhan Industri	0,18	persen	3.64	3.79	3.92	0.18	3.92	3.92	4.95%	100.00%	100.00%	DISPERINDAG

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
ASPEK DAYA SAING DAERAH													
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.364.192	ribu	1,469,630.00	1,375,069.00	1,680,507.00	1,328,079.00	1,556,980.00		90.37%	100.00%	100.00%	
2	Nilai tukar petani	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DISTAN
3	Persentase pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita	38,2	%	38.40	38.50	38.40				0.00%	0.00%	0.00%	
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	27,4	persen	28.51	29.08	29.66	12.69	0.00	0.00	44.51%	0.00%	0.00%	DISPERINDAG
5	Rasio ketergantungan	57,34	rasio	46.93	47.25	47.57	48.96	34.08	45.03	100.00%	72.13%	94.66%	DISDUKCAPIL
6	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	1519	izin	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,560.00	3,210.00	2,353.00	100.00%	100.00%	100.00%	DPMPTSP
INDIKATOR KINERJA KUNCI													
1	Pendidikan												DIKNAS
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	17,13	%	17.70	20.00	25.00	12.69		25.00	71.69%	0.00%	100.00%	DIKNAS
1.2.	Angka Partisipasi Kasar												
1.2.1.	Angka partisipasi kasar SD	105,95	%	105.00	104.50	104.00	109.57	108.79	101.85	100.00%	100.00%	97.93%	DIKNAS
1.2.2.	Angka partisipasi kasar SMP	91,69	%	93.00	95.00	97.00	92.78	92.78	108.52	99.76%	97.66%	100.00%	100.00%
1.3.	Angka pendidikan yang ditamatkan												
1.3.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/Paket A	15,86	%	16.00	17.00	18.00			18.00	0.00%		100,00%	DIKNAS
1.3.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP/MTs/Paket B	16,91	%	17.00	17,5	18.00			18.00	0.00%	0,00%	100,00%	DIKNAS
1.4.	Angka Partisipasi Murni												DIKNAS
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,74	%	99.00	100.00	100.00	99.50	93.95	94.85	100.00%	93,95%	94,85%	DIKNAS
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	84,05	%	88.37	90.17	91.98	84.17	80.92	85.70	95.25%	89,74%	93,17%	DIKNAS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.5.	Angka partisipasi sekolah	97,36	%										DIKNAS
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	N/A	%	97.00	97.40	97.80	96.42	98.79	99.34	99.40%	100.00%	100.00%	DIKNAS
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	N/A	%	92.50	93.00	93.50	77.61	93.24	99.54	83.90%	100.00%	100.00%	DIKNAS
1.6.	Angka Putus Sekolah:												DIKNAS
1.6.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	%	0.02	0.02	0.01	0.05	0.05	0.01	-150.00%	-150.00%	100.00%	DIKNAS
1.6.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,04	%	0.02	0.02	0.01	0.12	0.12	0.02	-500.00%	-500.00%	-100.00%	DIKNAS
1.7.	Angka Kelulusan:												DIKNAS
1.7.1.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100	%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DIKNAS
1.7.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	94,21	%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DIKNAS
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):												DIKNAS
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	%	100	100	100		100.00	100.00	0.00%	100.00%	100.00%	DIKNAS
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	94,21	%	94.50	95.00	95.50		94.50	85.00	0.00%	99.47%	89.01%	DIKNAS
1.9.	Fasilitas Pendidikan:												DIKNAS
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	89,54	%	96.00	97.00	98.00	47.00	81.60	60.80	48.96%	84.12%	62.04%	DIKNAS
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	81,76	%	83.00	84.00	85.00	48.00	82.00	75.64	57.83%	97.62%	88.99%	DIKNAS
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	52,04	%	52.04	52.04	52.04	52.53	64.44	52.00	100.00%	100.00%	99.92%	DIKNAS
1.11.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	673,56	%	674.00	674.50	675.00		666.40	650.00	0.00%	98.80%	96.30%	DIKNAS
1.12.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	15,5	%	16.00	16.50	17.00	6.66	16.00	17.00	41.63%	96.97%	100.00%	DIKNAS
1.13.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	N/A	%	96.00	97.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DIKNAS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.14.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100	%	100.00	100.00	100.00		99.53	99.83	0.00%	99.53%	99.83%	DIKNAS
1.15.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,53	%	99.65	99.70	99.75		96.35		0.00%	96.64%	0.00%	DIKNAS
1.16.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	89,47	%	94.74	97.86	100.00	91.30	94.74	50.00	96.37%	96.81%	50.00%	DIKNAS
2	Kesehatan												DINKES
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	6,73	Rasio	6.74	6.74	6.50	4.70	3.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7,04	Rasio	10.00	10.00	9.00	4.90	3.00	4.70	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.3.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	5,05	Rasio	5.00	5.00	5.00	3.60	2.70	3.40	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.4.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	91,79	Rasio	90.00	88.00	86.00	32.60	149.00	75.90	100.00%	-69.32%	100.00%	DINKES
2.5.	Rasio posyandu per 1000 balita	8,84	Rasio	8.80	9.00	9.30	9.60	9.40	9.30	109.09%	100.00%	100.00%	DINKES
2.6.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	0,05	Rasio	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	80.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.7.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	0,11	Rasio	0.11	0.11	0.11	0.18	0.10	0.00	100.00%	90.91%	0.00%	DINKES
2.8.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	0,5	Rasio	0.50	0.50	0.50	0.50	0.47	0.50	100.00%	94.00%	100.00%	DINKES
2.9.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	0,01	Rasio	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.10.	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	0,27	Rasio	0.27	0.27	0.27	0.25	0.20	0.29	92.59%	74.07%	100.00%	DINKES
2.11.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	13,2	Rasio	13.15	13.20	13.05	7.60	12.04	8.68	57.79%	91.21%	66.51%	DINKES
2.12.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	0,08	Rasio	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	87.50%	100.00%	100.00%	DINKES
2.13.	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	0,48	Rasio	0.49	0.49	0.50	0.40	0.40	0.47	81.63%	81.63%	94.00%	DINKES
2.14.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	73,24	%	100.00	100.00	100.00	84.30	63.40	75.48	84.30%	63.40%	75.48%	DINKES
2.15.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	72,6	%	100.00	100.00	100.00	72.60	71.00	67.60	72.60%	71.00%	67.60%	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2.16.	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96	%	96.00	96.00	96.00	98.14	96.65	96.00	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.17.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.18.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	86,68	%	90.00	90.00	90.00	104.00	95.00	92.60	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.19.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0	rasio	2.00	2.00	2.00	tidak ada kasus	6.00	tidak ada kasus	100.00%	300.00%	100.00%	DINKES
2.20.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0	%	10.00	10.00	10.00	tidak ada kasus	7.00	tidak ada kasus	100.00%	70.00%	100.00%	DINKES
2.21.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	72,4	%	73.00	75.00	75.00	54.87	58.30	70.90	75.16%	77.73%	94.53%	DINKES
2.22.	Tingkat prevalensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	137,67	rasio	231.00	211.00	190.00	40.00	233.00	273.00	82.68%	-10.43%	-43.68%	DINKES
2.23.	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	4	rasio	4.00	4.00	4.00	0.95	2.80	6.00	76.25%	30.00%	-50.00%	DINKES
2.24.	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	72,98	%	75.00	75.00	75.00	63.50	58.30	70.90	84.67%	77.73%	94.53%	DINKES
2.25.	Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	96,27	%	90.00	90.00	90.00	89.60	99.00	93.87	99.56%	100.00%	100.00%	DINKES
2.26.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.27.	Cakupan penderita diare yang ditangani	77,18	%	78.00	78.00	78.00	93.50	81.45	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.28.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,11	%	0.50	0.50	0.50	1.00	0.07	0.06	100.00%	14.00%	12.00%	DINKES
2.29.	Cakupan kunjungan bayi	80,36	%	100.00	100.00	100.00	85.90	90.80	73.90	85.90%	90.80%	73.90%	DINKES
2.30.	Cakupan puskesmas	111,76	%	111.76	111.76	117.65	111.80	111.80	111.80	100.00%	100.00%	95.03%	DINKES
2.31.	Cakupan pembantu puskesmas	78,07	%	79.60	79.90	80.30	78.40	78.40	78.80	98.49%	98.12%	98.13%	DINKES
2.32.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	73,23	%	100	100	100	68.00	76.10	77.70	68.00%	76.10%	77.70%	DINKES
2.33.	Cakupan pelayanan nifas	69,02	%	100	100	100	70.20	78.10	69.30	70.20%	71,30%	69.30%	DINKES
2.34.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	9,78	%	20	30	40	73.50	13.60	9.49	367.50%	45,33%	23.73%	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2.35.	Cakupan pelayanan anak balita	54.6	%	100	100	100	73.00	63.70	55.60	73.00%	63,70%	55.60%	DINKES
2.36.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	100	%	100	100	100	100.00	96,25	86.00	100.00%	96,25%	86.00%	DINKES
2.37.	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	25,2	%	100	100	100	91.90	96.60	92.36	91.90%	96,60%	92.36%	DINKES
2.38.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	80	%	80	80	80	80.00	80.00	80.00	100.00%	100,00%	100.00%	DINKES
2.39.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00%	100,00%	100.00%	DINKES
2.40.	Persentase balita stunting	15,28	%	28	28	25	16.26	8.88	8.70	41.93%	68.29%	65.20%	DINKES
2.41.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	73.2	%	100	100	100	100.00	77.20	79.10	100.00%	66,10%	79.10%	DINKES
2.42.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	72.6	%	100	100	100	100.00	67.30	67.30	100.00%	70,30%	67.30%	DINKES
2.43.	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	74.1	%	100	100	100	100.00	69.20	69.10	100.00%	72,40%	69.10%	DINKES
2.44.	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar	54.6	%	100	100	100	100.00	55.60	55.60	100.00%	59,00%	55.60%	DINKES
2.45.	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	25,2	%	100	100	100	100.00	96.90	92.36	100.00%	96,90%	92.36%	DINKES
2.46.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48	%	100	100	100	41.20	34.00	41.52	41.20%	34,00%	41.52%	DINKES
2.47.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	48.16	%	100	100	100	100.00	35.07	87.36	100.00%	35,07%	87.36%	DINKES
2.48.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18,5	%	100	100	100	100.00	31.00	35.03	100.00%	31,00%	35.03%	DINKES
2.49.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	50.5	%	100	100	100	100.00	87.70	61.00	100.00%	87,70%	61.00%	DINKES
2.50.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	31,8	%	100.00	100.00	100.00	27.50	27.00	51.38	27.50%	27,00%	51.38%	DINKES

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2.51.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	42.34	%	100.00	100.00	100.00	71.30	90.00	99.90	71.30%	90,00%	99.90%	DINKES
2.52.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	9.79	%	100	100	100	33.32	38.96	53.08	33.32%	38,96%	53.08%	DINKES
2.53.	Cakupan Vaksinasi Covid-19	N/A	%	80	80	80	89.30	0.00		100.00%	N/A	N/A	DINKES
2.54.	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	80,7	%	86	88	90	109.60	94.00	94.50	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.55.	Persentase Posyandu aktif	100	%	100	100	100	100.00	92.70	96.51	100.00%	92,70%	96.51%	DINKES
2.56.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	68	%	78.95	78.95	84.21	78.95	78.95	78.95	100.00%	100.00%	93.75%	DINKES
2.57.	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	42,11	%	47.37	57.89	68.42	36.84	36.84	68.42	77.77%	63,64%	100.00%	DINKES
2.58.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	66	%	69.05	71.43	73.81	75.83	75.83	73.58	100.00%	100.00%	99.69%	DINKES
2.59.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	71	%	75.05	75.75	76.25	85.27	89.79	96.03	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.60.	Persentase Puskesmas terakreditasi	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.61.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DINKES
2.62.	Persentase ketersediaan obat esensial di Puskesmas	100	%	90.00	93.00	93.00	90.00	90.00	95.00	100.00%	96,77%	100.00%	DINKES
2.63.	Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar	36,84	%	63.16	63.00	79.00	63.16	89.47	78.95	100.00%	100.00%	99.94%	DINKES
2.64.	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	75	%	80.00	85.00	90.00	94.69	85.00	90.00	100.00%	100.00%	100.00%	RSU
2.65.	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	94	%	95.00	95.00	95.00	Nihil			N/A	N/A	N/A	RSU
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												DPUTR
3.1.	Pekerjaan Umum:												DPUTR

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	61,65	%	63.00	65.00	66.00	61.54	63,04	63.43	97.68%	96,98%	96,10%	DPUTR
3.1.2.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	73,58	%	74.08	74.58	74.68	74.57	74.57	74.68	100.00%	99.99%	100.00%	DPUTR
3.1.3.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	60	%	61.00	62.00	63.00	59.50	59.50	63.69	97.54%	95.97%	100.00%	DPUTR
3.1.4.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	49,61	%	50.11	50.61	51.11	49.35	49.35	55.21	98.48%	97.51%	100.00%	DPUTR
3.1.5.	Persentase penduduk berakses air minum layak	68,7	%	68.70	68.70	68.71	70.35	70.35	68.71	100.00%	100.00%	100.00%	DPUTR
3.1.6.	Persentase penanganan sampah	74,86	%	75.00	76.00	77.00	-	76.00	84.00	-	100.00%	100.00%	DPUTR
3.2.1.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	20	%	25.00	26.00	27.00	25.00	25.00	25.00	100.00%	96.15%	92.59%	DPUTR
3.2.2.	Ketaatan terhadap RTRW	N/A	%	75.00	76.00	77.00	72.00	72.00	73.00	96.00%	94,74%	94,81%	DPUTR
3.2.3.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	N/A	Orang	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0,00%	DPUTR
3.2.4.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	60	%	62.00	64.00	66.00	61.50	61.50	61.50	99.19%	96,09%	93,18%	DPUTR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman												DPKPP
4.1.	Rasio rumah layak huni	95,14	%	100.00	100.00	100.00	63.30	95.14	98.91	63.30%	95.14%	98.91%	DPKPP
4.2.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	-	%	25.09	46.59	64.52	25.09	46.59	46.79	100.00%	100.00%	72.52%	DPKPP
4.3.	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	96,28	%	97.10	97.90	98.70	97.10	97.90	98.70	100.00%	100.00%	100.00%	DPKPP
4.4.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	%	100.00	100.00	100.00	81.30	81.30	100.00	81.30%	81.30%	100.00%	DPKPP
4.5.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyedia rumah yang layak huni	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DPKPP
4.6.	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	2	lokasi	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	DPKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
5.1	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat												SATPOL PP & BPBD
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	N/A	%	267.00	267.00	521.00	267.00	63.49	64.76	100.00%	23.78%	12.43%	SATPOL PP
5.2.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	N/A	%	2.05	2.40	2.48	1.86	58.62	80.00	90.73%	100.00%	100.00%	SATPOL PP
5.3.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	0,02	%	0.41	0.45	0.51	0.41	41.00	41.18	100.00%	100.00%	100.00%	SATPOL PP
5.4.	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	N/A	%	1.60	1.70	1.80	1.60	80.00	91.43	100.00%	100.00%	100.00%	SATPOL PP
5.5.	Persentase Penegakan PERDA	72,72	%	73.83	74.16	74.38	73.83	73.97	81.82	100.00%	99.74%	110.00%	SATPOL PP
5.2.	Bencana												BPBD
5.2.1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	9864	Orang	12,414.00	13,014.00	13,514.00	11,261.00	11,816.00	11,816.00	90.71%	90.79%	87.44%	BPBD
5.2.2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4044	Orang	5,694.00	7,519.00	9,219.00	5,062.00	5,598.00	5,666.00	88.90%	74.45%	61.46%	BPBD
5.2.3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	19082	Orang	19,326.00	19,576.00	19,956.00	21,455.00	22,694.00	23,713.00	100.00%	100.00%	100.00%	BPBD
	Indeks Kapasitas Daerah	0,37	indeks	0.52	0.53	0.54	0.49	0.45	0.48	94.23%	84.91%	88.89%	
6	Sosial												DINSOS
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	34	%	50.00	53.85	58.00	50.00	52.00	58.00	100.00%	96.56%	100.00%	DINSOS
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	34	%	50.00	53.85	58.00	50.00	52.00	58.00	100.00%	96.56%	100.00%	DINSOS
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemuahan kebutuhan dasar	34	%	62.08	63.35	63.72	53.85	60.89	57.69	86.74%	96.12%	90.54%	DINSOS
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	3,53	%	13.00	18.00	24.00	9.41	0.00	0.00	72.38%	0.00%	0.00%	DINSOS

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	DINSOS
6.6.	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	3	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00%	100.00%	0.00%	DINSOS
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	99	%	100.00	100.00	100.00	100.00	93.33	100.00	100.00%	93.33%	100.00%	DINSOS
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	99,8	%	100.00	100.00	100.00	100.00	93.33	-	100.00%	93.33%	N/A	DINSOS
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	1,1	%	16.98	18.15	18.74	13.51	15.34	-	79.56%	84.52%	N/A	DINSOS
6.10.	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	27,28	%	39.06	58.59	78.13	66.54	58.59	58.59	100.00%	100.00%	74.99%	DINSOS
Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
1	Tenaga Kerja												DISNAKERKUKM
1.1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	0	%	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	DISNAKERKUKM
1.2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	3	%	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	DISNAKERKUKM
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	60,2	%	64.00	66.00	68.00	79.97	71.62	71.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISNAKERKUKM
1.4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	92,75	%	93.00	93.50	94.00	93.00	84.62	87.69	100.00%	90.50%	93.29%	DISNAKERKUKM
1.5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISNAKERKUKM
1.6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	29,21	%	40.00	50.00	60.00	16.00	48.00	0.00	40.00%	96.00%	0.00%	DISNAKERKUKM
1.7.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	49,77	%	50.00	50.00	50.00	16.00	20.00	11.00	32.00%	40.00%	22.00%	DISNAKERKUKM

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
1.8.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	16,36	%	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	5.56	0.00%	0.00%	27.80%	DISNAKERKUKM
1.9.	Rasio lulusan S1/S2/S3	14,43	%	15.00	15.00	15.00	1.21		13.31	8.07%	0.00%	88.73%	DISNAKERKUKM
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												DP3AP2KB
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,85	%	3.67	3.72	3.76	3.57	3.57	3.60	97.28%	95.97%	95.74%	DP3AP2KB
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	28,57	%	28.57	28.57	30.00	28.57	28.57	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.3.	Rasio KDRT	2	%	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.4.	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.5.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	98,64	%	98.65	98.66	98.67	98.65	98.65		100.00%	99.99%	0.00%	DP3AP2KB
2.6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	%	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.8.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	61	%	75	75	75	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.9.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80	%	80	80	80	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.10.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	23	%	50	50	50	50	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2.11.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.12.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
2.13.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	56,52	%	70	70	70	70	70	100	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
3	Pangan												DKPP
3.1.	Ketersediaan pangan utama	41,94	Persen	43.09	43.56	44.04	45.86	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DKPP
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Energi = 9941	Kkal/kap/hari	Energi = 2.400	Energi = 2.400	Energi = 2.400	Energi=4400	Energi= 2490	2,430.00	100.00%	100.00%	100.00%	DKPP
		Protein =216,69	gr/hari	Protein =63	Protein =63	Protein =63	Protein=99,89	Protein=84,26	68.00	100.00%	100.00%	100.00%	DKPP
3.3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	90	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DKPP
4	Pertanahan												DPKPP
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	77	Ha	2.50	3.60	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	DPKPP
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	01-Jan	kasus	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00%	0.00%	100.00%	DPKPP
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	0	lokasi	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00%	0.00%	100.00%	DPKPP
5	Lingkungan Hidup												DLH
5.1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	ada		ada	-	Ada	Tidak Ada	-	100.00%	0.00%	-	DLH
5.2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	ada			ada		Ada	Tidak Ada		100.00%	0.00%	DLH
5.3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	ada	ada	ada	ada	Ada	Ada	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	DLH
5.4.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	80	indeks	53.81	53.91	54.01	50.00	64.29	60.91	92.92%	100.00%	100.00%	DLH
5.5.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	87,88	indeks	86.81	86.91	87.01	88.78	88.45	93.37	100.00%	100.00%	100.00%	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
5.6.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	49.308	indeks	54.41	56.45	58.48	51.60	53.26	52.47	94,84%	94,35%	89,72%	DLH
5.7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	86,36	%	100.00	100.00	100.00	100.00		104.00	100.00%	0.00%	100.00%	DLH
5.8.	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	orang	4.00	6.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	DLH
5.9.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	kali	13.00	13.00	13.00	3.00	14.00	13.00	23.08%	100.00%	100.00%	DLH
5.10.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	-	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	100.00%	100.00%	100.00%	DLH
5.11.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DLH
5.12.	Timbulan sampah yang ditangani	74,86	%	80.00	82.00	84.00	85.11	84.00	78.03	100.00%	100.00%	92.89%	DLH
5.13.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Belum ada	ton	30.00	50.00	70.00	4.00	4.00	78.00	13.33%	8.00%	100.00%	DLH
5.14.	Persentase cakupan area pelayanan	28,72	%	30.00	32.00	35.00	35.00	35.00	41.00	100.00%	100.00%	100.00%	DLH
5.15.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	92	%	80.00	82.00	84.00	85.00	84.00	78.03	100.00%	100.00%	92.89%	DLH
5.16.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	nilai	0.00	71.00	75.00	N/A	n/a	n/a	N/A	0.00%	0.00%	DLH
5.17.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Tidak ada	Tidak Ada	-	-	-	DLH
5.18.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	N/A	Tidak ada	Tidak Ada	-	-	-	DLH
5.19.	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	0	jumlah izin	1,00	10.00	10.00	1.00	Tidak ada	3.00	100,00%	0,00%	30,00%	DLH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												DISDUKCAPIL
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	104,31	%	100.00	100.00	100.00	109.32	106.54	99.99	100.00%	100.00%	99.99%	DISDUKCAPIL
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	92,81	%	97.00	98.00	100.00	98.00	98.50	99.15	100.00%	100.00%	99.15%	DISDUKCAPIL
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	41,69	%	60.00	80.00	100.00	57.03	62.30	60.03	95.05%	77.88%	60.03%	DISDUKCAPIL
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	100.00%	100.00%	100.00%	DISDUKCAPIL
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah	100.00%	100.00%	100.00%	DISDUKCAPIL
6.6.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	104,31	%	100.00	100.00	100.00	109.32	100.95	99.51	100.00%	100.00%	99.51%	DISDUKCAPIL
6.7.	Cakupan penerbitan akta kelahiran	47,44	%	60.00	70.00	80.00	60.72	64.86	62.18	100.00%	92.66%	77.73%	DISDUKCAPIL
6.8.	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	20,41	%	40.00	50.00	60.00	47.55	60.03	60.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISDUKCAPIL
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												DPMD
7.1.	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	70,66	%	70.66	72.28	73.90	57.91	59.06	70.00	81.96%	81.71%	94.72%	DPMD
7.2.	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0	kelompok	0.10	0.10	0.15	0.10	0.10	0.15	100.00%	100.00%	100.00%	DPMD
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan pkk	100	%	100.00	100.00	100.00	85.00	95.00	100.00	85.00%	95.00%	100.00%	DPMD
7.4.	Persentase LPM Berprestasi	0	%	0.10	0.20	0.20	0.10	0.20	0.20	100.00%	100.00%	100.00%	DPMD
7.5.	Persentase PKK Aktif	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DPMD
7.6.	Persentase Posyandu Aktif	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DPMD
7.7.	Persentase LSM aktif	75	%	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	100.00%	100.00%	100.00%	BAKESBANGPOL
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												DP3AP2KB
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,61		1.10	1.07	1.05	1.10	1.10	0.82	100.00%	100.00%	78.10%	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)	3		2.25	2.22	2.21	2.22	2.19	2.35	98.67%	98.65%	100.00%	DP3AP2KB
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	30,97	%	37.96	44.96	51.95	100.00	100.00	81.82	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	60		60.00	62.00	63.00	60.00	60.00	63.64	100.00%	96.77%	100.00%	DP3AP2KB
8.5.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	4	Kelompok	4.00	6.00	7.00	4.00	4.00	7.00	100.00%	66.67%	100.00%	DP3AP2KB
8.6.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3		3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.35	100.00%	66.67%	78.33%	DP3AP2KB
8.7.	Ratio Akseptor KB	68	%	65.54	68.96	69.09	63.23	68.86	53.04	96.48%	99.85%	76.77%	DP3AP2KB
8.8.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	65	%	65.64	65.90	66.36	45.00	45.00	46.70	68.56%	68.29%	70.37%	DP3AP2KB
8.9.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	18	%	17.78	17.53	17.23	25.00	25.00	22.90	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
8.10.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	42,25	%	43.00	43.50	44.20	44.00	44.00	41.86	100.00%	100.00%	94.71%	DP3AP2KB
8.11.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	45,35	%	46.28	46.45	46.67	45.00	45.00	53.04	97.23%	96.88%	100.00%	DP3AP2KB
8.12.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	533	orang	581.00	690.00	800.00	580.00	620.00	800.00	99.83%	89.86%	100.00%	DP3AP2KB
8.13.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	455	orang	500.00	590.00	700.00	358.00	452.00	580.00	71.60%	76.61%	82.86%	DP3AP2KB
8.14.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	472	orang	499.00	525.00	552.00	450.00	520.00	458.00	90.18%	99.05%	82.97%	DP3AP2KB
8.15.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	416	orang	457.00	497.00	538.00	360.00	500.00	461.00	78.77%	100.60%	85.69%	DP3AP2KB
8.16.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
8.17.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	64	orang	50.00	100.00	150.00	50.00	100.00	150.00	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
8.18.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	269.00	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
8.19.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
8.20.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	63,04	%	70.00	75.00	80.00	70.00	75.00	80.00	100.00%	100.00%	100.00%	DP3AP2KB
8.21.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	1989	orang	2,010.00	2,057.00	2,098.00	15.49	15.49	1,816.00	0.77%	0.75%	86.56%	DP3AP2KB
8.22.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	710	orang	800.00	875.00	950.00	700.00	700.00	690.00	87.50%	80.00%	72.63%	DP3AP2KB
9	Perhubungan												DISHUB
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	3.696.720	orang	4,697,705.00	5,078,158.00	5,458,610.00	5,078,158.00	5,078,158.00	4,095,356.00	100.00%	100.00%	75.03%	DISHUB
9.2.	Rasio ijin trayek	0.088149	%	0.088148	0.036946	0.036855	0.088148	0.036946	0.036855	100.00%	100.00%	100.00%	DISHUB
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	2212	unit	2673	5346	5346	535	119.00	945.00	20.01%	22.25%	17.7%	DISHUB
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	2	buah	3.00	3.00	4.00	3.00	3.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISHUB
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	93,94	%	93.94	95.00	95.00	95.00	95.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISHUB
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	26,35	%	26.99	27.00	70.00	27.00	27.00	13.00	100.04%	100.00%	18.57%	DISHUB
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	0,1	%	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	100.00%	100.00%	100%	DISHUB
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	378	%	384.00	375.00	366.00	375.00	375.00	366.00	97.66%	100.00%	100.00%	DISHUB

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	3.696.720	orang	4,697,705.00	5,078,158.00	5,458,610.00	5,078,158.00	5,078,158.00	4,095,356.00	100.00%	100.00%	75.03%	DISHUB
9.10.	Rasio konektivitas kabupaten	93,94	%	93.94	95.00	95.00	95.00	95.00	97.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISHUB
9.11.	Kinerja lalu lintas kabupaten	0,18	rasio	0.35	0.30	0.28	0.77	0.30	0.32	-85%	100.00%	87,50	DISHUB
10	Komunikasi dan Informatika												DISKOMINFO
10.1.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	85,5	%	86.99	86.99	86.99	85.50	85.50	85.50	98.29%	98.29%	98.29%	DISKOMINFO
10.2.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	50	%	62.00	70.00	78.00	60.44	67.19	60.64	97.48%	95.99%	77.74%	DISKOMINFO
10.3.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	50	%	62.00	70.00	78.00	53.31	71.21	48.49	85.98%	100.00%	62.17%	DISKOMINFO
10.4.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	10	%	14.00	15.50	17.00	16.17	14.55	15.78	100.00%	93.87%	92.82%	DISKOMINFO
10.5.	Indeks SPBE	1,7	indeks	2.20	2.50	2.70	2.42	2.57	3.04	100.00%	100.00%	100.00%	DISKOMINFO
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah												DISNAKERKUKM
11.1.	Persentase koperasi aktif	62,7	%	63.87	64.19	64.51	52.26	52.26	51.00	81.82%	81.41%	79.06%	DISNAKERKUKM
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	90,96	%	91.00	92.00	93.00	90.00	90.00	93.00	98.90%	97.83%	100.00%	DISNAKERKUKM
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0.00	0.00	n/a	-	-	-	DISNAKERKUKM
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,13	%	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	95.00	100.00%	100.00%	95.96%	DISNAKERKUKM
12	Penanaman Modal												DPMPPTSP
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	70	investor	77.00	81.00	84.00	81.00	93.00	96.00	100.00%	100.00%	100.00%	DPMPPTSP
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	6,02	Rp. (dalam triliun)	6.24	6.37	6.51	6.44	6.67	7.16	100.00%	100.00%	100.00%	DPMPPTSP
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	91,27	persen	83.75	80.36	78.20	84.70	76.60	75.30	100.00%	95,32%	96,29%	DPMPPTSP
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	1,22	persen	1.80	2.08	2.19	19.07	12.89	18.52	100.00%	100.00%	100.00%	DPMPPTSP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
13	Kepemudaan dan Olah Raga												DKPOP
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	33,33	%	40.00	43.00	47.00	100.00	100.00	33.30	100.00%	100.00%	70.85%	DKPOP
13.2.	Persentase wirausaha muda	12,5	%	13.50	14.50	15.50	-	0.43	47.00	0.00%	2.97%	100.00%	DKPOP
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	46,1	%	54.00	62.00	69.00	39.00	47.00	56.00	72.22%	75.81%	81.16%	DKPOP
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	25,5	%	35.00	45.00	55.00	35.00	25.00	N/A	100.00%	55.56%	0.00%	DKPOP
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	-	%	7.00	10.00	13.00	7.00	47.00	7.00	100.00%	100.00%	53.85%	DKPOP
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	-	atlet	378.00	400.00	450.00	117.00	501.00	238.00	30.95%	100.00%	52.89%	DKPOP
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	12	Cabor	14.00	16.00	18.00	16.00	14.00	12.00	100.00%	87.50%	66.67%	DKPOP
14	Statistik												DISKOMINFO
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak ada	ada/tidak	ada	ada	ada	Tidak	tidak	Tidak	0,00%	0,00%	0,00%	DISKOMINFO
14.2.	Buku "Kabupaten Karo Dalam Angka"	ada	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	Ada	100,00%	100,00%	100,00%	DISKOMINFO
14.3.	Buku "PDRB"	ada	ada/tidak	ada	ada	ada	tidak	tidak	Tidak	0,00%	0,00%	0,00%	DISKOMINFO
15	Persandian												DISKOMINFO
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	%	2.00	6.00	10.00	3.60	3.60	25.00	100.00%	60.00%	100.00%	DISKOMINFO
16	Kebudayaan												DKPOP
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	0	Kali	7.00	10.00	11.00	12.00	10.00	15.00	100.00%	100.00%	100.00%	DKPOP
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	0	Cagar Budaya	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	11.00	100.00%	66.67%	55.00%	DKPOP
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	10	Karya Budaya	18.00	22.00	26.00	67.00	15.00	27.00	100.00%	68.18%	100.00%	DKPOP
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	0	Cagar Budaya	-	-	-	10.00			100.00%	-	-	DKPOP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
17	Perpustakaan												DPA
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1,09	%	9.70	10.30	11.00	36.50	366.00	0.30	100.00%	100.00%	2.73%	DPA
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	46	rasio	0.20	0.21	0.23	25.60	347.00	299.00	100.00%	100.00%	100.00%	DPA
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,224	rasio	1.22	1.11	1.12	0.14	163.00	0.16	11.50%	100.00%	14.31%	DPA
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	4476	orang	40,000.00	43,000.00	47,000.00	121,885.00	122,000.00	128,208.00	0,30%	100.00%	100.00%	DPA
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	3399	buku	7,000.00	8,000.00	9,200.00	7,234.00	9,007.00	10,892.00	0,10%	100.00%	100.00%	DPA
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	1,303	%	1,3	1,309.00	1,318.00	0,17	12,92	0,61	13,08%	100.00%	46,28%	DPA
18	Kearsipan												DPA
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	66,6	%	75.00	78,3	83,3	69,05	69,05	78,8	92,07%	88,19%	94,60%	DPA
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	Kegiatan	2.00	2.00	3.00	-	0.00	1.00	0,00%	0,00%	33,33%	DPA
Layanan Urusan Pilihan													
1	Pariwisata												DKPOP
1.1.	Kunjungan wisata	227.812	Orang	728.50	1.003.500	1.101.000	600.66	780.32	1.434.797	82,45%	77,76%	100.00%	DKPOP
1.2.	Lama kunjungan Wisata	n/a	Hari	1,3	1,4	1,5	1,3	1,6	2,5	100,00%	100,00%	100.00%	DKPOP
1.3.	PAD sektor pariwisata	0.95	Persentase	50.00	50.00	50.00	87.00	109,01	81,44	100.00%	100.00%	100.00%	DKPOP
2	Pertanian												DISTAN
2.1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%)	53,18	%	51.94	51.50	51.00	54.24	53.74	51.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISTAN
2.2.	Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%)	5,84	%	5.78	5.75	5.72	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DISTAN
2.3.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	%	100	100	100	100	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	DISTAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2.4.	Produktivitas padi per hektar	55,28	Kw/Ha	55.83	56.11	56.39	60.32	60.75	60.61	100.00%	100.00%	100.00%	DISTAN
2.5.	Produktivitas palawija per hektar	70,66	Kw/Ha	71.37	71.73	72.08	69.21	68.29	68.45	96.97%	95.20%	94.96%	DISTAN
2.6.	Cakupan bina kelompok petani	5,84	%	6.44	6.76	7.10	10.38	10.86	12.25	100.00%	100.00%	100.00%	DISTAN
2.7.	Produksi sektor pertanian	11.155.191	Ton	12,298,598.00	12,913,528.00	13,559,204.00	13,321,977	13,976,181	15,224,150	100.00%	100.00%	100.00%	DISTAN
2.8.	Produksi sektor perkebunan	1.255.265	Ton	1,383,930.00	1,453,127.00	1,525,783.00	2,381,023.00	2,314,240.00	2,357,580.00	100.00%	100.00%	100.00%	DISTAN
4	Energi dan Sumber Daya Mineral												DISPERINDAG
4.4	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	0	pengusaha	-	-	50.00	-	N/A	1.00	0,00%	0,00%	0,00%	DISPERINDAG
5	Perdagangan												DISPERINDAG
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan	6,35	miliar	65.00	72.00	80.00	277.00		682.67	100.00%	0.00%	100.00%	DISPERINDAG
5.2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	50		50.00	67.00	75.00	42.00		13.00	84.00%	0.00%	17.33%	DISPERINDAG
6	Perindustrian												DISPERINDAG
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	12,73	persen	21,05	27,12	33,33	17,86	28,57	33,33	84,85%	100.00%	100,00%	DISPERINDAG
8	Kelautan dan Perikanan												DKPP
8.1.	Produksi perikanan	132,12	%	95.00	80.00	85.00	247,16	136,72	172,82	100.00%	100.00%	100.00%	DKPP
8.2.	Konsumsi ikan	90	%	93.00	94,7	96.80	67,7	91,89	97.97	72,80%	97,03%	100.00%	DKPP
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	75	%	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	DKPP
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	75	%	68.23	69.59	72.23	76.13	33.05	145.00	100.00%	47.49%	100.00%	DKPP
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	75	%	68.23	69.59	72.23	76.13	33.05	145.00	100.00%	47.49%	100.00%	DKPP
8.6.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	10	%	11.00	10,9	22.00	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%	100.00%	DKPP

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Penunjang Urusan													
1	Perencanaan Pembangunan												BAPPEDA LITBANG
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	ADA	Ada	100,00%	100,00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	ADA	Ada	100,00%	100,00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	ADA	Ada	100,00%	100,00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
1.4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	86	%	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPd ke dalam APBD	92,9	%	100	100	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
2	Keuangan												BKAD
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*		100,00%	100,00%		BKAD
2.2.	Persentase SILPA	15,5	%	13,26	11,934.00	10,741.00	-	8.45	2.43	0	99.93%	99.98%	BKAD
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD		%	13,26	11,934.00	10,741.00	-	8.45	2.43	0	70,81%	99.98%	BKAD
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana		%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	BKAD
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana		%	0.00	0.00	0.00	0	0	0	100,00%	100,00%	100,00%	BKAD
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	20,84	%	20.00	20.00	20.00	28.00	27,52	30,99	100.00%	100.00%	100.00%	BKAD
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	14,02	%	10.00	10.00	10.00	26.00	22,17	18,74	100.00%	100.00%	100.00%	BKAD
2.9.	Proporsi Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah		%	64,73	66,83	66,74	70,23	67,76	66,71	100.00%	100.00%	99,96%	BKAD
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah		%	16,04	13,32	13,44	8,85	11,93	14,71	55,17%	89,56%	109,45%	BKAD
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah		%	43,62	45,04	44,98	44,02	39,33	42,12	100.00%	87,32%	93,64%	BKAD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah		%	0,14	0,14	0,14	0,99	0,24	0,19	100.00%	100.00%	100.00%	BKAD
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		%	0,36	0,37	0,37	0,62	20,06	0,65	100.00%	100.00%	100.00%	BKAD
2.14.	Penetapan APBD	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu		100,00%	100,00%	BKAD
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan												BKDSDM
3.1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	N/A	%	11.00	13.00	11.00	11.00	0.64	1.10	100.00%	4.92%	10.00%	BKDSDM
3.2.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	N/A	%	2.23	5.02	8.36	0.00	2.29	0.42	0.00%	45.62%	5.02%	BKDSDM
3.3.	Persentase keterisian jabatan	82,37	%	100.00	100.00	100.00	89.91	94.03	90.60	89,91%	94,03%	90,60%	BKDSDM
3.4.	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	19	ASN	19.00	18.00	17.00	3.00	9.00	11.00	84.21%	50.00%	35.29%	BKDSDM
4	Penelitian dan Pengembangan												BAPPEDA LITBANG
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%	100.00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	%	100	100	100	N/A	100	100	0,00%	100.00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
	Penerapan SIDA:												
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00%	100.00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	100	%	100	100	100	100	80	100	100,00%	80.00%	100,00%	BAPPEDA LITBANG
5	Pengawasan												INSPEKTORAT
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	83,08	%	85.00	86.00	90.00	83,16	83.00	83,42	97,84%	96.51%	92,69%	INSPEKTORAT
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	-	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	INSPEKTORAT
6	Sekretariat Dewan												SETWAN

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja Awal Periode RPJMD	Satuan	TARGET			REALISASI			TINGKAT CAPAIAN			Perangkat Daerah
		2020		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA	ADA/ TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	100,00%	100,00%	100,00%	SETWAN
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA	ADA/ TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	100,00%	100,00%	100,00%	SETWAN
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA	ADA/ TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	100,00%	100,00%	100,00%	SETWAN

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Dalam kaidah perumusan kebijakan perencanaan dalam RPJMD diantaranya meliputi analisis keuangan daerah. Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan analisis keuangan daerah diperlukan gambaran keuangan daerah yang menggambarkan data-data perkembangan realisasi anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Analisis dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah serta ekuitas dana.

Gambaran umum keuangan daerah menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, meliputi Kinerja Keuangan Masa Lalu dan Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030. Masing-masing aspek diuraikan dengan analisis sebagaimana di bawah ini.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang mana setiap tahapan itu terjalin dalam sebuah siklus yang berkesinambungan. Misalnya, bagaimana kinerja pelaksanaan APBD yang ditatausahakan dan dilaporkan dalam LKPD menjadi hal yang perlu dievaluasi dan dianalisis yang kemudian menjadi salah satu referensi dalam menyusun kebijakan perencanaan di perencanaan berikutnya.

Sekaitan dengan terjadinya perubahan fundamental regulasi pengelolaan keuangan daerah, yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sejak tahun anggaran 2021 diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, terjadi perubahan kodifikasi dan nomenklatur pada Pendapatan Daerah yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024. Nomenklatur dan kodifikasi struktur APBD tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 masih menggunakan standarisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan struktur APBD tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2024 sudah mempedomani standarisasi sesuai dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Dalam konteks penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, analisis keuangan daerah dilakukan terhadap kinerja keuangan masa lalu yakni 5 (lima) tahun periode pelaksanaan APBD sejak tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024. Dan untuk mempermudah penyajian data realisasi APBD sebagaimana yang ditentukan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan “*mapping*” dengan ketentuan kodifikasi dan nomenklatur sesuai dengan peraturan terbaru.

Adapun substansi yang dianalisis dalam kinerja keuangan masa lalu adalah sektor keuangan pada kinerja pelaksanaan APBD dan sektor kekayaan daerah pada Neraca.

2.2.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Aspek utama yang dilihat dalam kinerja pelaksanaan APBD adalah Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Perkembangan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024 dan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN					
	A. Pendapatan Asli Daerah	86.460.229.435,96	108.359.804.241,19	97.474.399.998,64	103.440.404.582,17	105.349.287.214,70
	B. Pendapatan Transfer	1.165.901.866.130,00	1.231.201.454.057,00	1.197.241.022.516,00	1.307.290.443.055,00	1.323.732.110.577,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.606.235.400,00	15.171.436.725,00	11.235.927.740,00	15.661.686.350,00	16.584.332.490,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.267.968.330.965,96	1.354.732.695.023,19	1.305.951.350.254,64	1.426.392.533.987,17	1.445.665.730.281,70
2	BELANJA					
	A. Belanja Operasi	906.605.677.815,00	896.003.961.282,96	925.618.228.805,00	934.206.103.692,00	1.017.870.013.586,00
	B. Belanja Modal	131.636.983.833,00	187.057.684.057,00	165.488.852.924,00	214.008.503.256,00	214.619.621.202,00
	C. Belanja Tidak Terduga	22.016.151.347,00	4.774.436.078,00	10.970.155.806,00	0,00	193.476.000,00
	D. Belanja Transfer	271.799.084.520,00	275.196.776.791,00	267.725.484.842,00	283.286.785.796,00	292.161.039.100,00
	JUMLAH BELANJA	1.332.057.897.515,00	1.363.032.858.208,96	1.369.802.722.377,00	1.431.501.392.744,00	1.524.844.149.888,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(64.089.566.549,04)	(8.300.163.185,77)	(63.851.372.122,36)	(5.108.858.756,83)	(79.178.419.606,30)
3	PEMBIAYAAN					
	A. Penerimaan Pembiayaan	239.655.843.336,13	175.042.236.012,09	165.879.127.706,32	102.027.755.583,96	96.777.470.943,13
	B. Pengeluaran Pembiayaan	529.665.775,00	862.945.120,00	0,00	0,00	2.800.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	239.126.177.561,13	174.179.290.892,09	165.879.127.706,32	102.027.755.583,96	93.977.470.943,13
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	175.036.611.012,09	165.879.127.706,32	102.027.755.583,96	96.918.896.827,13	14.799.051.336,83

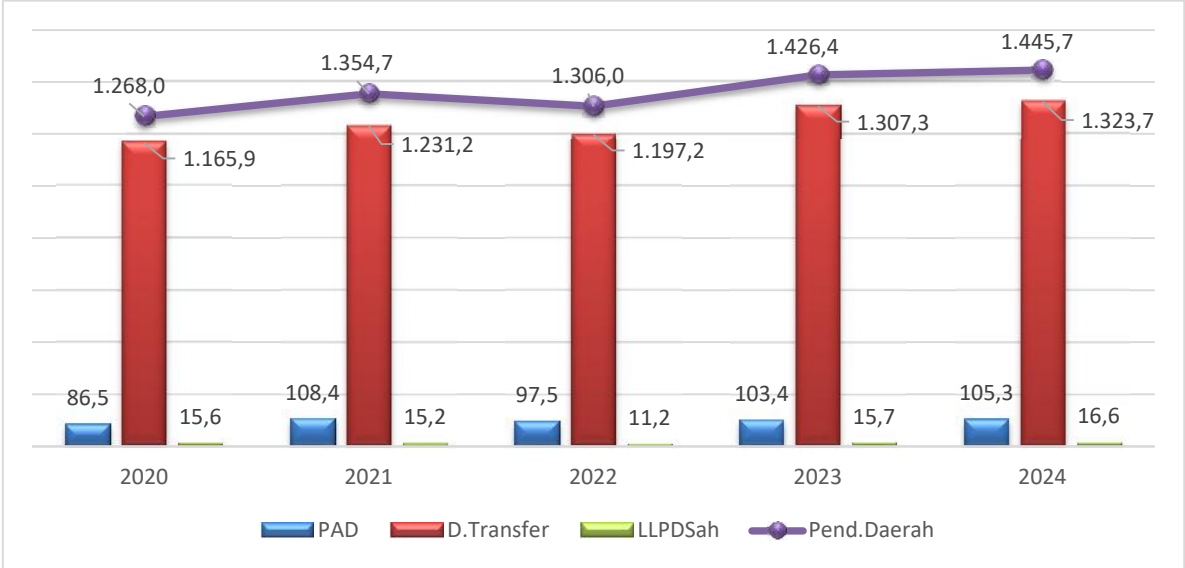
Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2025

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang sah. Kapasitas Keuangan Daerah akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan pembangunan dan pembiayaan.

Mencermati data diatas, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karo pada Tahun 2020 sebesar Rp 1.267.968.330.965,96, cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp1.445.665.730.281,70. Adapun tren perkembangan realisasi pendapatan daerah, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.30
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



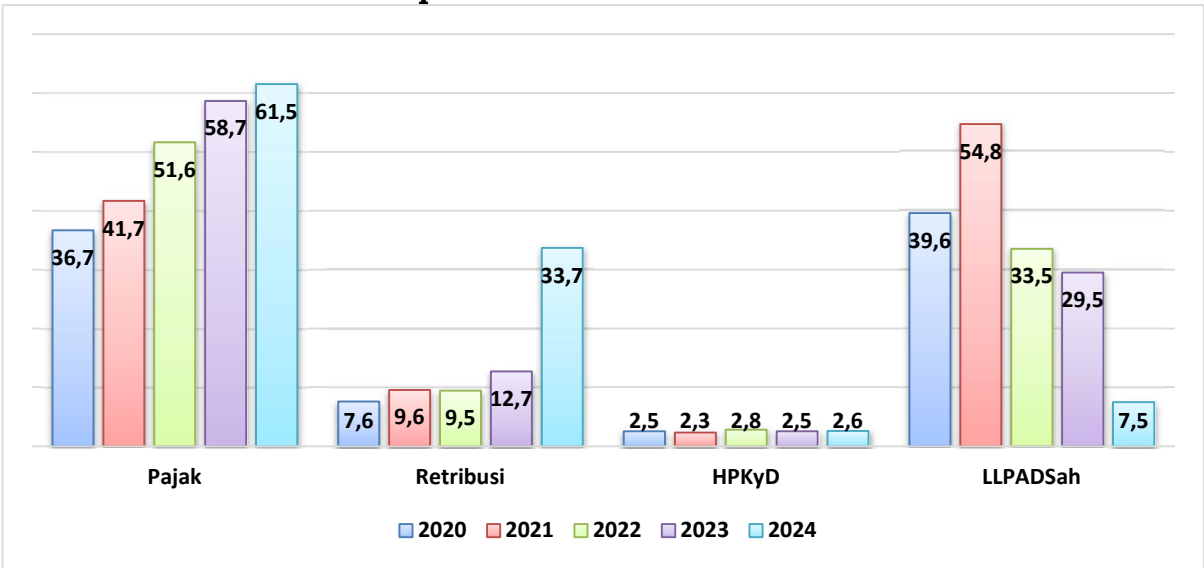
Sumber : BKAD Kabupaten Karo, 2025

Kondisi masing-masing kelompok pendapatan daerah seperti yang disajikan pada di atas, cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Baik PAD maupun Dana Transfer mengalami peningkatan di tahun 2021, namun mengalami penurunan di tahun 2022, dan berangsur meningkat di tahun 2023 hingga tahun 2024. Sementara Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penurunan dalam kurun tahun 2021 dan 2022, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Menggunakan metode perhitungan rata rata pertumbuhan Aritmatika sederhana, pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 3,45%, PAD sebesar 5,81%, Dana Transfer sebesar 3,32% dan Lain Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 4,14%.

Memperhatikan komposisi pembentuk pendapatan daerah, selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, masih terlihat tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih tinggi. Rata rata tingkat ketergantungan dengan dana transfer pusat dalam realisasi pendapatan daerah adalah 91,55%. Sedangkan PAD hanya mampu menyumbang sebesar 7,36% dan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,09%.

Apabila dilihat lebih jauh, komponen Pendapatan Asli Daerah berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain Lain PAD yang Sah, juga mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Perkembangan Komponen PAD disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.31
Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber : BKAD Kabupaten Karo, 2025

Dari angka dasar realisasi tahun 2020 sebesar Rp36.711.550.305,76, Pajak Daerah mengalami tren peningkatan sehingga menjadi Rp61.540.045.940,28 di tahun 2024 dengan rata-rata peningkatan Pajak Daerah sebesar 13,98%.

Realisasi retribusi daerah juga cenderung mengalami peningkatan dengan sedikit penurunan di tahun anggaran 2022. Dari semula sebesar Rp7.587.660.501 pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp33.697.123.306,00 di tahun 2024. Apabila diperhatikan grafik tersebut, peningkatan realisasi retribusi daerah di tahun 2024 yang sangat signifikan merupakan akibat adanya perubahan pos penerimaan pendapatan BLUD yang sebelumnya (tahun 2020 sampai dengan 2023) berada pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, direstrukturisasi kedalam kelompok retribusi daerah sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

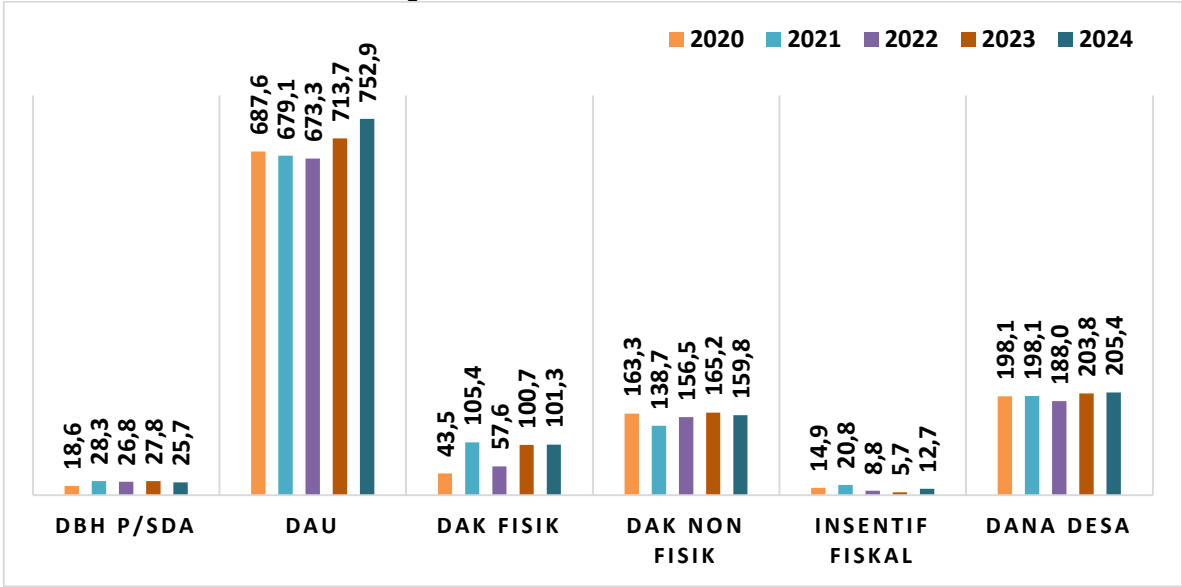
Selanjutnya, kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Disipisahkan menunjukkan adanya tren yang fluktuatif dimana terjadi penurunan di tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2023. Dari sebesar Rp2.526.770.335,00 menjadi Rp2.624.980.942,59. dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,63%.

Lain Lain PAD yang Sah juga menunjukkan tren realisasi yang cenderung menurun. Pergerakan realisasi Lain Lain PAD yang Sah semula sebesar Rp39.634.248.294,20 di tahun 2020 mejadi hanya Rp7.487.137.025,83 di tahun 2024. Dari data yang disajikan dalam grafik diatas, Peningkatan realisasi hanya terjadi pada tahun anggaran 2021. Peningkatan yang signifikan dimaksud, merupakan perolehan pendapatan BLUD akibat kondisi Pandemi Covid-19 yang bersumber dari klaim pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Kabanjahe. Di tahun 2024 pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan penurunan yang sangat signifikan akibat restrukturisasi pos pendapatan BLUD yang semula berada dalam Kelompok Lain-Lain PAD yang Sah menjadi berada dalam kelompok Retribusi Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Hingga saat ini, dana transfer merupakan kelompok Pendapatan Daerah yang merupakan sumber utama penerimaan daerah yang terdiri atas Dana transfer Pusat dan Dana Transfer Antar Daerah. Dana Transfer Pusat bersumber dari dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD melalui pos Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Sedangkan Transfer Antar Daerah merupakan alokasi sumber pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Lainnya seperti Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Gambaran Tren Realisasi Pendapatan Transfer Pusat dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2024, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.32
Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber : BKAD Kabupaten Karo, 2025

Peningkatan dan/atau penurunan dana transfer pusat tentunya sangat bergantung terhadap kondisi penerimaan negara di setiap tahunnya. Situasi ekonomi global, goepolitik, perubahan iklim, dan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2024 tentunya memiliki pengaruh terhadap keuangan negara. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/SDA sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 cenderung fluktuatif. Mengalami peningkatan di tahun

2021 dan tahun 2023 dan mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2024. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/SDA pada tahun 2020 adalah sebesar Rp18.588.604.257,00 menjadi Rp25.748.210.000,00 dengan rata rata pertumbuhan pada angka 10,86%.

Realisasi penerimaan DAU mengalami penurunan hingga tahun 2022 dan kembali mengalami peningkatan sejak 2023 hingga 2024. Dari semula sebesar Rp687.569.658.00,00 di tahun 2020 menjadi Rp752.945.824.000,00 di tahun 2024. Adapun rata rata pertumbuhannya berada pada angka 2,35%.

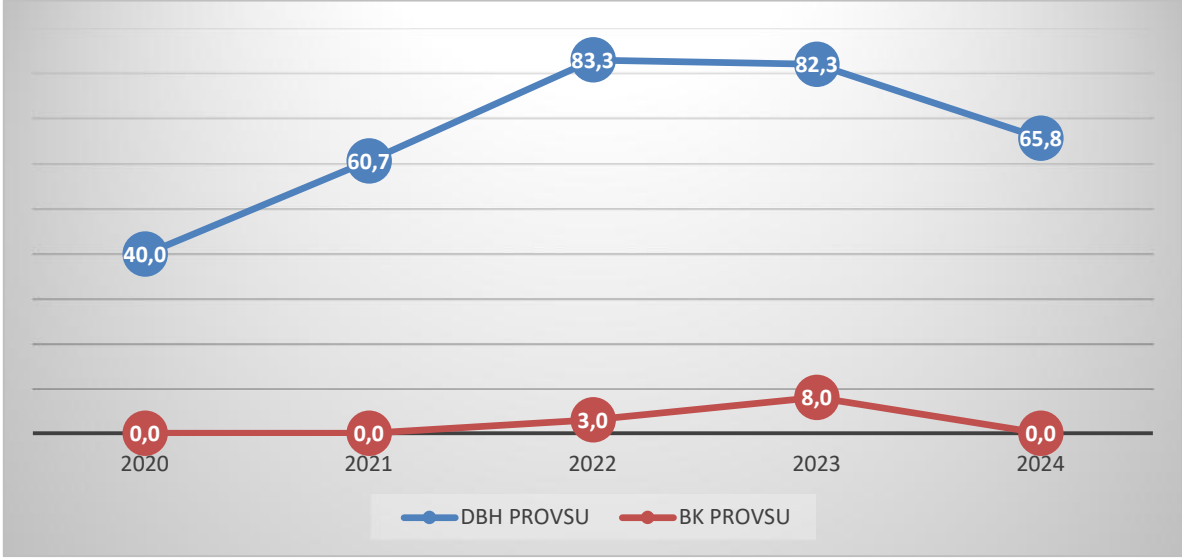
Perkembangan DAK Fisik juga mengalami fluktuasi yang sangat dinamis di kurun waktu 2020 sampai dengan 2024. Realisasi DAK Fisik tahun 2020 sebesar Rp43.506.149.842,00 menjadi Rp101.278.750.464,00 di tahun 2024. Sama halnya dengan realisasi DAK Non Fisik juga mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024. Depresiasi terjadi di tahun 2021 dan tahun 2024, sedangkan di tahun 2022 dan 2023. Realisasi DAK Non Fisik pada tahun 2020 sebesar Rp163.306.015.189,00 menjadi sebesar Rp159.787.725.589,00.

Insentif Fiskal atau Dana Insentif Daerah juga sangat membantu Pemerintah Kabupaten Karo dalam menyokong sumber pendanaannya. Pemerintah Kabupaten Karo menerima Insentif Fiskal/DID sejak tahun 2020 dengan nilai yang bervariasi, tergantung pada tingkat penilaian kinerja daerah yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Di tahun 2020 perolehan Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal sebesar Rp14.905.745.000,00 menurun menjadi Rp12.716.954.000,00 di tahun 2024.

Selanjutnya, realisasi Dana Desa cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Realisasi Dana Desa pada tahun 2020 adalah sebesar Rp198.067.760.758,00 dan meningkat di tahun 2024 sebesar Rp205.413.540.000,00 dengan rata rata pertumbuhan pada angka 1,03%.

Selain transfer pemerintah pusat, transfer antar pemerintah daerah juga merupakan salah satu komponen dana transfer. Transfer antar daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Karo adalah Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi. Perkembangan realisasi transfer antar daerah, disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.33
Perkembangan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber : BKAD Kabupaten Karo, 2025

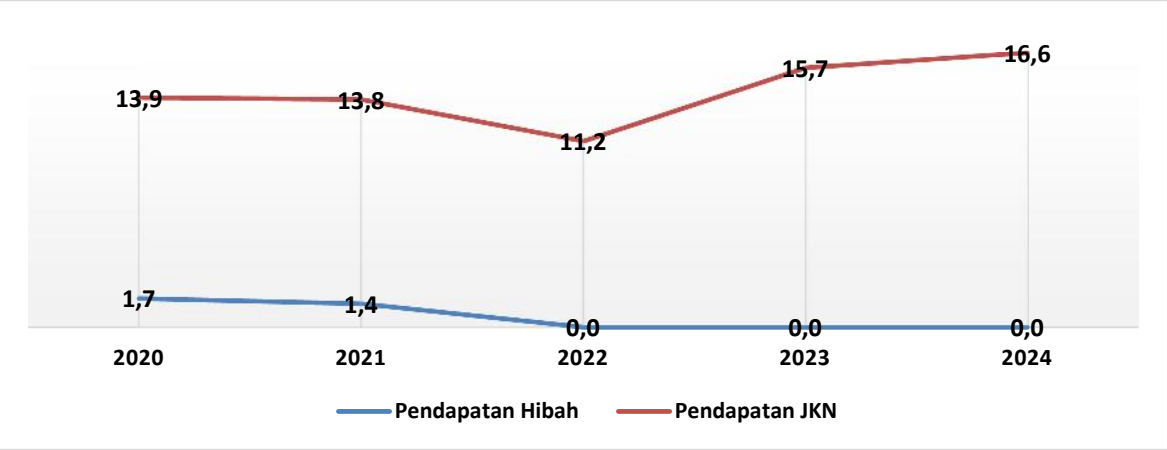
Perkembangan realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara untuk Kabupaten Karo periode tahun 2020 hingga tahun 2024, menggambarkan

terjadinya peningkatan yang signifikan terutama dalam kurun 2020 sampai dengan 2022, namun cenderung stagnan pada tahun 2023 dan di tahun 2024 mengalami penurunan. Realisasi Bagi Hasil Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp39.957.933.084,00 dan di tahun 2024 sebesar Rp65.841.106.524,00.

Beda hal dengan Bantuan keuangan Provinsi Sumatera Utara, dalam kurun periode tahun 2020 sampai dengan 2024, Pemerintah Kabupaten Karo memperoleh bantuan keuangan hanya sebesar Rp2.983.340.000,00 ditahun 2022 dan Rp8.012.940.111,00 pada tahun 2023.

Selain PAD dan Dana Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga merupakan salah satu kelompok penerimaan daerah. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Karo selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 adalah pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Adapun gambaran perkembangannya sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik 2.34
Perkembangan Realisasi Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber : BKAD Kabupaten Karo, 2025

Dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Karo menerima hibah yakni pada tahun 2020 sebesar Rp1.731.640.000,00 yaitu hibah dari Kementerian pariwisata dan pada tahun 2021 sebesar Rp1.420.899.758,00 yaitu hibah luar negeri Indonesia-Australia untuk Program Sanitasi.

Selanjutnya terkait Dana Kapitasi JKN pada FKTP, cenderung mengalami penurunan realisasi dari 2020 sampai dengan 2022 dan kenaikan baru terjadi di tahun 2023 hingga 2024. Perkembangan realisasi Dana Kapitasi JKN di tahun 2020 sebesar Rp13.874.595.400,00 mengalami peningkatan menjadi Rp16.584.332.490,00 di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan pada angka 6,52 persen.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Perkembangan Belanja Daerah disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.35
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



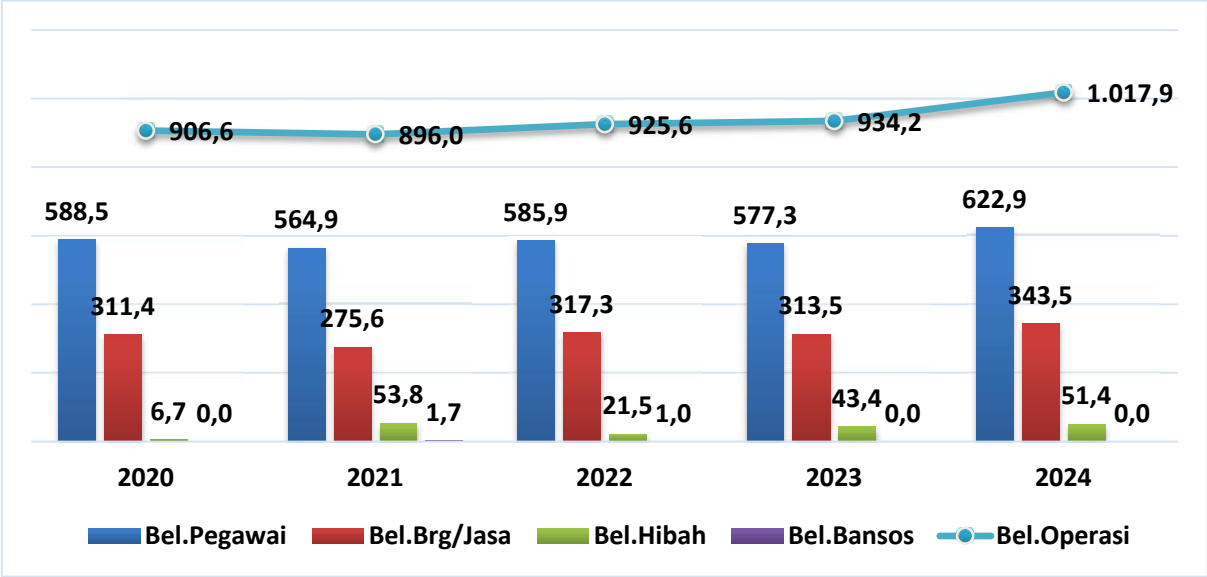
Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2025

Mencermati grafik di atas, Kemampuan Daerah untuk melaksanakan realisasi belanja dalam kurun waktu 2020-2024 rata-rata berada pada angka 91%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah di klasifikasikan mejadi 4 (empat) kelompok yang terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Perkembangan belanja operasi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada grafik berikut:

Grafik 2.36
Perkembangan Belanja Operasi Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



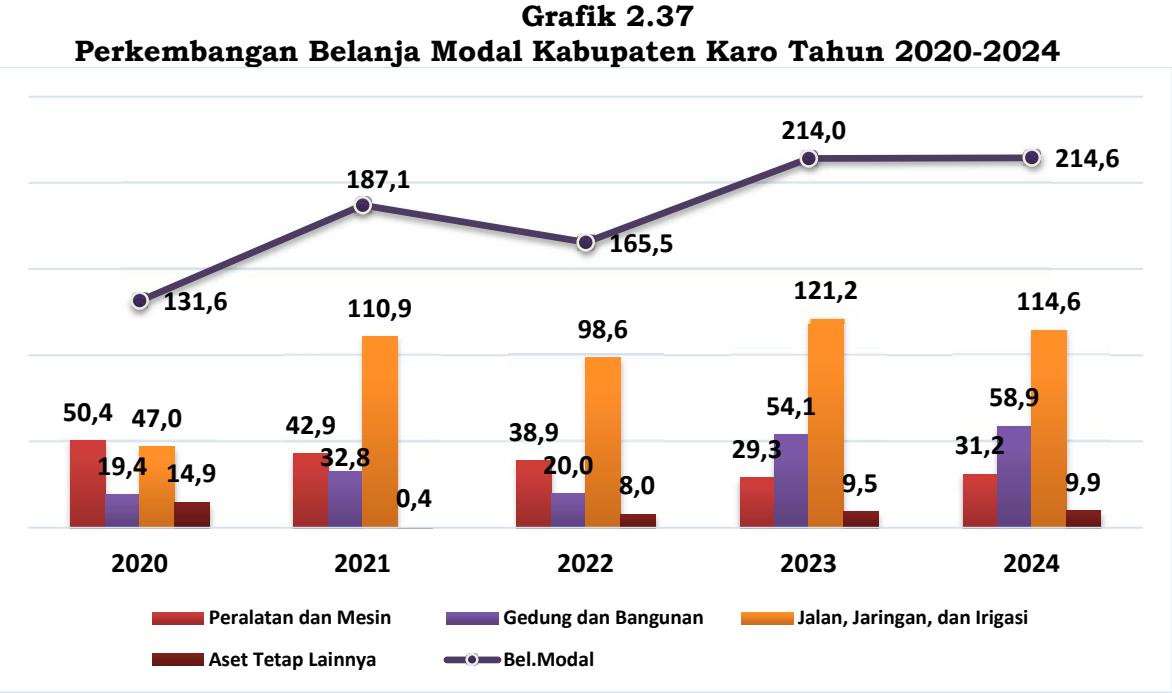
Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2025

Mencermati Grafik di atas, dari tahun anggaran 2020 realisasi belanja operasi sebesar Rp906.605.677.815,00 menjadi Rp1.017.870.013.586,00 di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan pada angka 3%. Lebih lanjut, perkembangan jenis belanja dalam belanja operasi dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai dari sebesar Rp588.531.768.277,00 di tahun 2020 menjadi Rp622.939.163.784,00 ditahun 2024 dengan rata rata pertumbuhan pada angka 1,53%;
- 2) Belanja Barang dan Jasa dari sebesar Rp311.373.847.456,00 di tahun 2020 menjadi Rp343.502.153.763,00 ditahun 2024 dengan rata rata pertumbuhan pada angka 3%;
- 3) Belanja Hibah dari sebesar Rp6.700.062.082,00 di tahun 2020 menjadi Rp51.428.696.039,00 ditahun 2024.
- 4) Belanja Bantuan Sosial dengan realisasi sebesar Rp1.653.150.000,00 di tahun 2021 dan Rp950.000.000,00 di tahun 2022.

2) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Perkembangan belanja modal dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana pada grafik 3.8 berikut:



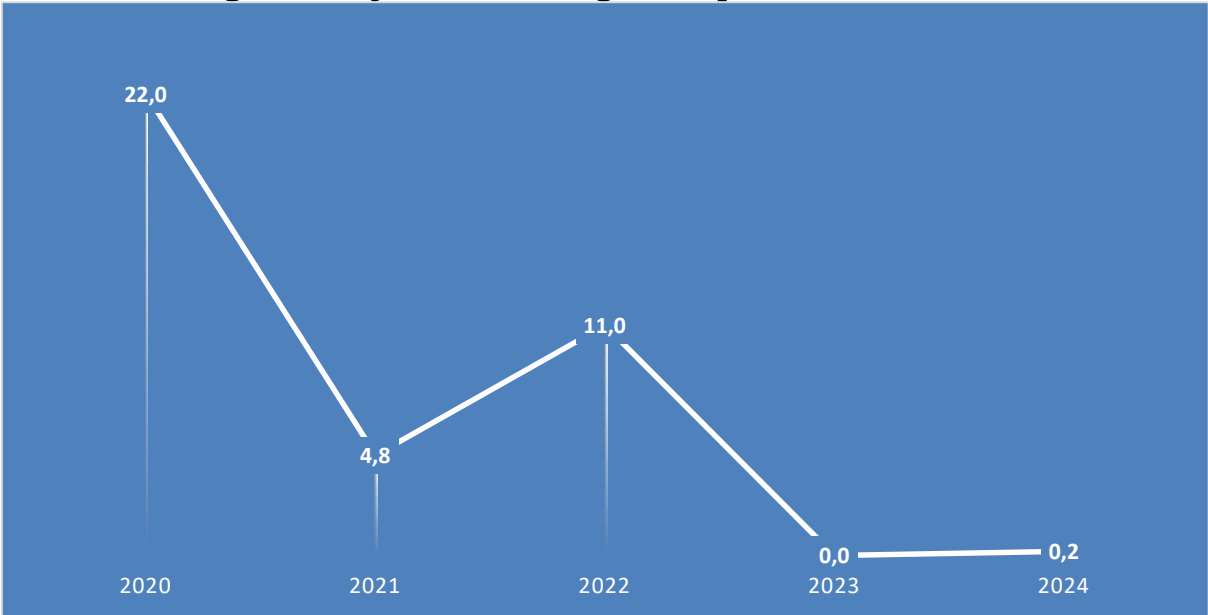
Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2025

Mencermati Grafik diatas, dari tahun anggaran 2020 realisasi belanja modal sebesar Rp131.636.983.833,00 menjadi Rp214.619.621.202,00 di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan pada angka 15,04%.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Perkembangan Belanja Tidak Terduga disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.38
Perkembangan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

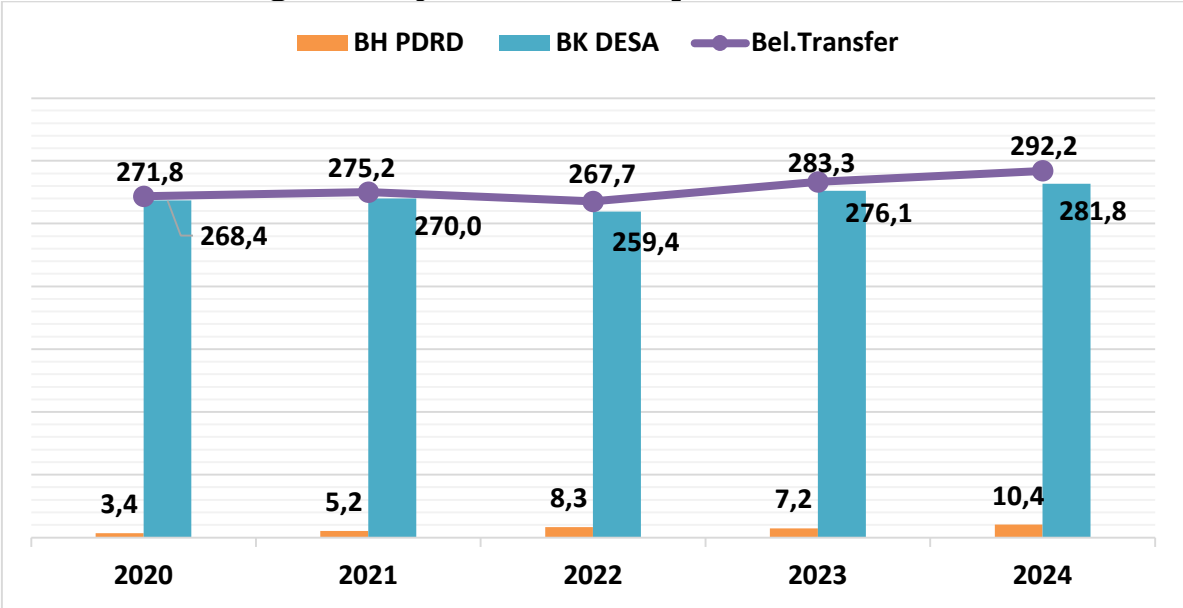


Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2025

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Perkembangan Belanja Tidak Terduga disajikan pada grafik berikut:

Grafik 2.39
Perkembangan Belanja Transfer Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Mencermati Grafik diatas, dari tahun anggaran 2020 realisasi belanja transfer sebesar Rp271.799.084.520,00 menjadi Rp292.161.039.100,00 di tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan pada angka 1,87 persen.

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Karo berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir.

Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Karo menunjukkan tren penurunan dari sebesar Rp239.680.537.856,- pada tahun 2020 menjadi Rp96.777.470.943,13,- pada tahun 2024. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.40
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

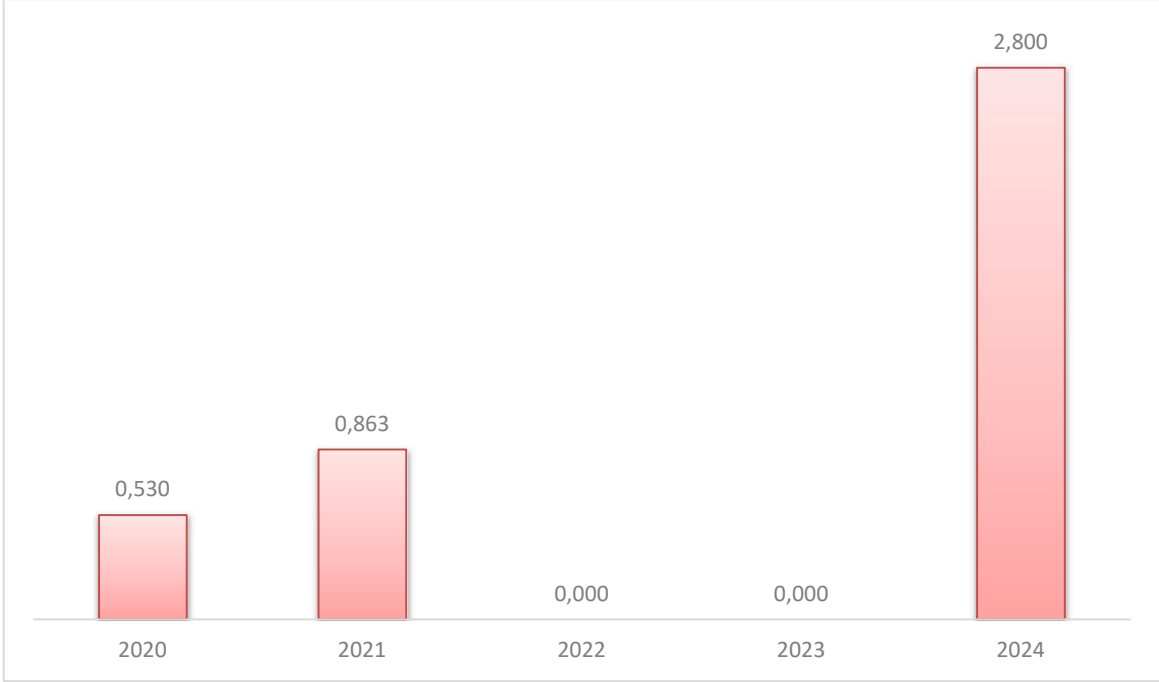


Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2025

Penerimaan pembiayaan yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2020-2024 hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Melihat tren yang disajikan pada Grafik di atas, rata-rata penurunan penerimaan pembiayaan dari Silpa berada pada kisaran angka minus 21,48%. Perkembangan Silpa sejak tahun 2020-2024 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dari nilai Silpa tahun 2019 yang digunakan di tahun 2020 sebesar Rp239.680.537.856 mengalami penurunan sebesar 26,97% atau Rp64.643.926.844,00 menjadi Rp175.036.611.012,00 pada silpa tahun 2020 yang digunakan ditahun anggaran 2021. Silpa tahun 2021 yang digunakan di tahun anggaran 2022 mengalami sedikit penurunan sebesar 5,23% atau Rp9.157.483.306,00. Kemudian silpa tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 38,49% atau Rp63.851.372.123,00 sehingga silpa 2022 yang digunakan di tahun 2023 adalah sebesar Rp102.027.755.583,00. Silpa tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 5,15% sehingga Silpa 2023 yang digunakan di tahun 2024 adalah sebesar Rp96.777.470.943,00.

Pengeluaran pembiayaan Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Karo digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Dalam kurun waktu 2020-2024, Pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan pada tahun 2020 sebesar Rp 529.665.775,00, pada tahun 2021 sebesar Rp 862.945.120,00, dan pada tahun 2024 sebesar Rp2.800.000.000,00. Perkembangan Pengeluaran pembiayaan terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.41
Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Karo Tahun 2020-2024



Sumber: BKAD Kabupaten Karo, 2025

D. Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001 neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas danamerupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi subrekening sampai level rincian obyek.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Karo tahun 2020-2024 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 102
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020-2024

ASET	2.584.259.754.958,83	2.634.355.939.415,11	2.479.276.805.499,05	2.573.012.325.366,66	2.569.862.584.418,50
ASET LANCAR	311.152.846.052,22	300.232.070.855,33	159.233.377.166,56	191.149.559.119,88	124.407.858.822,43
Kas dan Setara Kas	90.114.590.260,09	165.957.106.974,92	102.105.734.831,96	97.051.278.637,13	14.931.433.146,83
Investasi Jangka Pendek	85.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	37.061.647.223,48	39.292.928.717,48	41.063.385.874,48	41.281.360.081,48	44.590.446.703,48
Piutang Retribusi Daerah	1.030.334.000,00	972.097.400,00	910.711.700,00	885.972.650,00	6.326.814.327,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.132.943.094,00	11.541.217.141,00	5.074.166.964,94	3.629.135.453,00	42.658.343,61
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.852.905.786,00	293.867.285,00	258.804.569,00	419.362.388,00	1.366.344.000,00
Piutang Transfer Antar Daerah	27.848.794.170,00	0,00	0,00	50.513.907.227,00	62.420.747.682,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	88.125.000,00	0,00
Penyisihan Piutang	(26.435.467.623,35)	(31.088.404.778,07)	(32.640.077.023,82)	(35.176.558.888,73)	(38.757.531.723,99)
Beban Dibayar Dimuka	3.539.741.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	83.007.357.385,00	113.263.258.115,00	42.460.650.250,00	32.456.976.572,00	33.486.946.343,50
INVESTASI JANGKA PANJANG	17.775.091.583,00	22.216.645.811,00	22.168.180.811,00	18.935.538.403,00	18.725.757.539,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	392.662.500,00	3.367.349.085,00	3.318.884.085,00	3.291.907.252,00	3.285.157.252,00
Investasi Jangka Panjang Permanen	17.382.429.083,00	18.849.296.726,00	18.849.296.726,00	15.643.631.151,00	15.440.600.287,00
ASET TETAP	2.168.968.411.189,61	2.226.638.986.106,78	2.267.180.095.952,49	2.328.430.377.785,04	2.377.774.897.237,07
Tanah	622.221.866.074,00	639.184.309.074,00	654.015.076.074,00	652.406.470.032,00	639.883.445.532,00
Peralatan dan Mesin	441.884.349.164,65	487.688.739.921,13	522.976.442.765,13	545.502.752.955,13	486.891.796.904,67
Gedung dan Bangunan	682.874.027.872,54	721.635.687.107,03	758.755.911.044,03	812.353.713.806,17	883.795.231.952,53
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.766.698.348.219,30	1.869.140.279.710,30	1.995.708.277.523,30	2.107.373.137.584,37	2.232.811.830.415,10
Aset Tetap Lainnya	80.989.585.394,00	89.335.829.694,00	93.924.072.202,00	103.205.411.843,00	111.413.949.841,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	7.701.565.811,00	646.810.973,00	15.160.329.550,00	1.306.980.147,11
Akumulasi Penyusutan	(1.425.699.765.534,88)	(1.588.047.425.210,68)	(1.758.846.494.628,97)	(1.907.571.437.985,63)	(1.978.328.337.555,34)
DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASET LAINNYA	86.363.406.134,00	85.268.236.642,00	30.695.151.569,00	34.496.850.058,74	35.367.437.320,00
Tagihan Jangka Panjang	218.081.790,00	2.822.864.483,00	2.822.864.483,00	2.822.864.483,00	3.012.794.783,00
Aset Tidak Berwujud	69.957.500,00	485.286.000,00	485.286.000,00	485.286.000,00	279.798.200,00
Aset Lain-lain	86.144.766.844,00	82.054.873.479,00	22.885.513.863,00	32.262.468.046,79	127.559.117.616,37
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(69.400.000,00)	(94.787.320,00)	(117.327.140,00)	(139.866.960,00)	(146.849.280,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	(3.822.697.511,05)	(95.410.691.999,37)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	4.618.814.363,00	2.888.796.000,00	73.268.000,00
PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586.633.500,00
JUMLAH ASET	2.584.259.754.958,83	2.634.355.939.415,11	2.479.276.805.499,05	2.573.012.325.366,66	2.569.862.584.418,50
KEWAJIBAN	13.408.529.974,00	19.822.718.145,00	8.465.614.721,00	20.743.400.088,00	16.650.390.291,61
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.408.529.974,00	19.822.718.145,00	8.465.614.721,00	20.743.400.088,00	16.650.390.291,61
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	77.979.248,00	77.979.248,00	77.979.248,00	77.979.248,00	77.979.248,00
Utang Belanja	13.330.550.726,00	19.744.738.897,00	8.387.635.473,00	20.665.420.840,00	16.572.411.043,61
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS	2.570.851.224.984,83	2.614.533.221.270,11	2.470.811.190.778,05	2.552.268.925.278,66	2.553.212.194.126,89
EKUITAS	2.570.851.224.984,83	2.614.533.221.270,11	2.470.811.190.778,05	2.552.268.925.278,66	2.553.212.194.126,89
Ekuitas	2.570.851.224.984,83	2.614.533.221.270,11	2.470.811.190.778,05	2.552.268.925.278,66	2.553.212.194.126,89
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.584.259.754.958,83	2.634.355.939.415,11	2.479.276.805.499,05	2.573.012.325.366,66	2.569.862.584.418,50

Sumber: LKPD Kabupaten

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang harus disajikan oleh Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya. Nilai aset Kabupaten Karo sebesar Rp2.569.862.584.418,50 pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,07% persen sejak tahun 2020 sebesar Rp2.584.259.754.958,83. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2024 mencapai Rp2.377.774.897.237,07 dan rata-rata pertumbuhan 2,33%. Proporsi aset tetap rata-rata 88,58% dari seluruh aset pemerintah Kabupaten Karo.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo pada tahun 2024 adalah sebesar Rp16.650.390.291,61. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah kewajiban relatif fluktuatif dan dinamis, nilai terendah tahun 2022 dan tertinggi tahun 2023. Karena itu nilai pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kabupaten Karo Tahun 2024 mencapai Rp2.553.212.194.126,89 dengan nilai rata rata pertumbuhan sebesar -0,12 persen.

2.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030

Proyeksi keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dalam APBD dengan menganut azas-azas, tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Keuangan daerah dalam APBD Kabupaten Karo dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karo yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan yang diproyeksikan pada tahun-tahun mendatang akan terus berkembang. Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber dana, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Proyeksi Keuangan bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu, juga dialokasikan untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Proyeksi Keuangan Daerah meliputi proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta pembiayaan daerah untuk tahun 2026 sampai dengan 2030. Untuk menghitung proyeksi tersebut, gambaran tren realisasi APBD periode 5 (lima) tahun yang lalu (2020-2024) menjadi referensi, serta kebijakan keuangan terbaru dan kondisi pendanaan yang dinamis. Adapun baseline yang digunakan adalah kondisi APBD Induk 2024 dengan memperhatikan kondisi terkini di tahun anggaran 2025. Proyeksi Keuangan Daerah 2026-2030 sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 103
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	2026	2027	PROYEKSI TAHUN 2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	PENDAPATAN						
	A. Pendapatan Asli Daerah	122.751.275.000,00	152.273.291.918,00	165.882.448.380,00	171.108.599.494,00	176.534.670.532,00	182.168.474.532,00
	B. Pendapatan Transfer	1.354.465.549.332,00	1.273.686.799.055,00	1.310.185.422.054,00	1.337.302.401.301,00	1.365.053.358.610,00	1.393.454.332.941,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.055.132.871,00	18.755.090.239,00	19.028.914.556,00	19.306.736.709,00	19.588.615.065,00	19.874.608.845,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.494.271.957.203,00	1.444.715.181.212,00	1.495.096.784.990,00	1.527.717.737.504,00	1.561.176.644.207,00	1.595.497.416.318,00
2	BELANJA						
	A. Belanja Operasi	1.059.461.027.370,00	1.026.042.119.707,00	1.019.648.566.144,00	1.011.019.071.588,00	1.005.503.787.359,00	1.001.425.233.162,00
	B. Belanja Modal	233.728.825.458,00	189.838.031.926,00	219.821.835.119,00	241.804.018.631,00	265.984.420.494,00	292.582.862.543,00
	C. Belanja Tidak Terduga	3.039.572.202,00	3.191.550.812,00	3.351.128.353,00	3.518.684.771,00	3.694.619.010,00	3.879.349.961,00
	D. Belanja Transfer	292.161.429.000,00	288.390.793.492,00	293.588.443.178,00	298.010.209.270,00	302.515.560.301,00	307.106.477.284,00
	JUMLAH BELANJA	1.588.390.854.030,00	1.507.462.495.937,00	1.536.409.972.794,00	1.554.351.984.260,00	1.577.698.387.164,00	1.604.993.922.950,00
	SURFLUS/(DEFISIT)	-94.118.896.827,00	-62.747.314.725,00	-41.313.187.804,00	-26.634.246.756,00	-16.521.742.957,00	-9.496.506.632,00
3	PEMBIAYAAN						
	A. Penerimaan Pembiayaan	96.918.896.827,00	65.827.314.725,00	44.701.187.804,00	30.361.046.756,00	20.621.222.957,00	14.005.934.632,00
	B. Pengeluaran Pembiayaan	2.800.000.000,00	3.080.000.000,00	3.388.000.000,00	3.726.800.000,00	4.099.480.000,00	4.509.428.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	94.118.896.827,00	62.747.314.725,00	41.313.187.804,00	26.634.246.756,00	16.521.742.957,00	9.496.506.632,00

A. Kebijakan Pendapatan

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo periode tahun 2026-2030 sebagaimana tercantum pada tabel di atas dihitung dengan menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional meningkat sesuai dengan target dalam RPJMN tahun 2026-2030 berada pada angka 5,3-8,0 persen.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo berada pada angka di atas 5 persen.
3. Pendapatan Asli Daerah diasumsikan bertumbuh secara agregat sebesar 4,6 persen dengan komposisi pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah sekitar 5 persen, sedangkan dan Lain-Lain PAD yang sah diasumsikan menurun sebesar 1,8 persen.
4. Dana Transfer diasumsikan bertumbuh secara agregat sebesar 2,07 persen, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebijakan TKDD dan Bagi Hasil Provinsi yang dinamis.
5. Dana Transfer diasumsikan bertumbuh secara sebesar 1,46 persen dengan memperhatikan tren anggaran dan realisasi JKN dalam kurun waktu 2020-2024.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada:

- 1) Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat perolehan dana transfer pemerintah pusat melalui optimalisasi sinkronisasi kebijakan daerah yang mendukung kebijakan prioritas nasional.
- 3) Meningkatkan akurasi data pendukung perhitungan dasar penentuan alokasi dana transfer pusat dan koordinasi intensif untuk validasi data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pihak KPP Pratama dalam rangka peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak pusat;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam perolehan dana transfer bagi hasil dan bantuan keuangan serta perolehan Opsen Pajak.
- 6) Meningkatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
- 7) Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efektifitas tatalaksana pendapatan daerah. Diantaranya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- 8) Meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan pola umum keuangan Kabupaten Karo, struktur pendapatan daerah Kabupaten Karo didominasi oleh Transfer dari Pemerintah Pusat (DAU, DAK, DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Isu fiskal daerah meliputi ketergantungan pada pusat, fluktuasi pendapatan, ruang fiskal yang sempit serta kebutuhan pembangunan tinggi diharapkan dapat diatasi dengan strategi optimalisasi belanja dan alokasikan belanja produktif, diversifikasi PAD & penguatan BUMD serta penggunaan skema KPBU, obligasi daerah, dan BLUD.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2026-2030 sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2026-2030 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pendanaan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan usulan musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah melalui penelaahan dan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah;
5. Pemenuhan porsi belanja tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Pemenuhan kewajiban daerah untuk mendanai program dan kegiatan yang bersifat "*mandatory*" atau yang telah ditentukan dan diwajibkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional.
7. Belanja daerah disinkronisasikan dan diharmonisasikan untuk mendukung "tematik" dan target capaian prioritas pembangunan nasional maupun prioritas Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah.
8. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja operasional kantor dan tupoksi dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.
9. Mengalokasikan kewajiban belanja transfer ke Desa menurut formulasi perhitungan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Berikut ini beberapa poin penting terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.
2. SiLPA tahun 2026-2030 secara moderat diproyeksikan menurun rata-rata per tahun sebesar 32,08 persen dengan tahun dasar 2024.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).
6. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Karo, khususnya bidang infrastruktur publik.

2.2.4. Proyeksi Alternatif Sumber Pendanaan Lain

Pemerintah daerah dalam era otonomi saat ini dituntut untuk dapat mandiri dalam menyelenggarakan keuangan daerahnya. Akan tetapi, daerah masih sering dihadapkan dengan adanya keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu masih ada kesenjangan pendanaan yang dilihat dari tingginya kebutuhan

pendanaan pembangunan dibandingkan dengan ketersediaan dana pembangunan pemerintah. Kebutuhan investasi penyediaan infrastruktur daerah untuk mendorong pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mengurangi ketimpangan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik masih sangat tinggi, namun ketersediaan APBD masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang ada.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dan mengurangi kesenjangan pendanaannya, dibutuhkan adanya peningkatan pendapatan daerah serta alternatif pendanaan lain seperti penguatan pembiayaan melalui pendanaan inovatif yang sebaiknya dipenuhi dari sumber dana nonpemerintah.

Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat berinovasi dalam pemenuhan potensi pendanaan dan pembiayaan alternatif selain dari APBD dan APBN. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mengamanatkan implementasi Sinergi Pendanaan serta Pembiayaan Utang Daerah melalui pemanfaatan pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah, untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam penyediaan infrastruktur.

Adapun beberapa skema pendanaan yang dapat dimanfaatkan diantaranya hibah, pinjaman daerah, KPBU, BUMD, BLUD, CSR, filantropi, dan skema pendanaan lainnya. Penggunaan pendanaan alternatif pada pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pendanaan daerah dalam mengelola pelayanan publik, meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, serta meningkatkan potensi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Namun, permasalahan yang sering dihadapi dalam perencanaan dapat menghambat keberhasilan pembangunan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, optimalisasi alokasi sumber daya, serta meningkatkan kualitas perencanaan. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah di masa datang. Perumusan ini melihat kesenjangan antara harapan dan tujuan yang diinginkan serta potensi permasalahan yang akan dihadapi pada periode perencanaan. Untuk mendapatkan permasalahan secara menyeluruh maka dalam perumusannya turut memperhatikan permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam skala Nasional maupun lingkup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini sangat penting karena tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Karo yang akan dirumuskan nantinya selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara. Beberapa permasalahan yang didapatkan tidak akan dapat dituntaskan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Karo dengan batasan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan Pembangunan didapatkan dari hasil analisis gambaran umum daerah dengan memperhatikan aspek pembangunan secara

menyeluruh meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan periode perencanaan sebelumnya, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang telah diamanatkan. Untuk memudahkan pengelompokan permasalahan dan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan maka penyajian permasalahan pembangunan diurutkan berdasarkan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi dan akar masalah yang menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah, antara lain:

2.3.1.1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum mencapai standar optimal

Permasalahan SDM dan dan kesejahteraan masyarakat dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kesehatan yang belum merata dan inklusif, pendidikan yang belum berkualitas, merata dan inklusif serta kesejahteraan masyarakat yang belum terlindungi seutuhnya. Penyelesaian permasalahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, resilien, unggul, dan berdaya saing. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada masing-masing bidang pembangunan.

A. Pelayanan kesehatan yang belum merata dan inklusif

Permasalahan pembangunan kesehatan untuk semua tergambar dari beberapa indikator pembangunan kesehatan antara lain tingginya prevalensi *stunting*, tingginya kasus TB dan penyakit menular lainnya, meningkatnya penyakit tidak menular serta belum tersedianya rumah sakit umum daerah. Prevalensi *stunting* tahun 2023 di Kabupaten Karo masih tinggi yaitu sebesar 24,70 persen, hal ini disebabkan antara lain karena tingkat pemahaman masyarakat tentang gizi masih rendah, kompetensi kader posyandu masih rendah dalam menerapkan 25 keterampilan dasar. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya kader posyandu yang dilatih, kondisi tahun 2023 jumlah kader posyandu ada sebanyak 1800 orang yang sudah dilatih masih sebanyak 187 orang atau 10,40 persen. Selanjutnya yang menyebabkan tingginya prevalensi *stunting* yaitu kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti posyandu, kurangnya kerjasama lintas sektor, dan rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat dimana masih sekitar 52,15 persen rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat.

Masih tingginya jumlah kasus TB sebanyak 812 orang pada tahun 2022 dan tahun 2023 meningkat menjadi 1.248 orang, disebabkan antara lain angka penemuan kasus yang masih rendah, tingginya angka pasien TB

mangkir, kurangnya kedisiplinan Faskes. Begitu juga dengan penyakit menular seperti HIV masih tinggi dan cenderung meningkat hal ini disebabkan karena stigma negatif masyarakat tentang penyakit HIV sehingga orang yang beresiko HIV takut memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan dan bagi orang yang terinfeksi HIV tetapi belum mengetahui bahwa dia penderita HIV tidak mendapat pengobatan sehingga menjadi sumber penular penyakit.

Trend penyakit tidak menular juga mengalami peningkatan pada tahun 2022-2023 antara lain penyakit hipertensi sebanyak 26.439 orang meningkat menjadi 38.360 orang, gangguan *lipid hipercolestrol* sebanyak 590 orang menjadi 941 orang dan gangguan *lipid hipertrigiliserida* sebanyak 182 orang meningkat menjadi 307 orang. Begitu juga dengan penyakit tidak menular lainnya dengan kasus tinggi yaitu diabetes mellitus sebanyak 1.522 dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ada sebanyak 170 orang. Tingginya angka penyakit tidak menular tersebut disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, misalnya konsumsi karbohidrat dan lemak yang berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, Tingginya tingkat stress, merokok dan alkohol.

Permasalahan kesehatan lainnya bahwa status lahan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karo yang beroperasi saat ini bukan milik Pemerintah Kabupaten Karo, tetapi beroperasi dengan sistem kontrak dengan Yayasan Moderamen GBKP. Pelayanan Kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dimana pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat (UU RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 6).

Permasalahan terkait belum memadainya sarana dan prasarana olahraga dalam mendukung kesehatan yang lebih baik merupakan isu penting yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat antara lain ketersediaan fasilitas yang terbatas, kualitas sarana dan prasarana olahraga, aksesibilitas fasilitas olahraga yang jauh dari pemukiman warga atau tidak mudah dijangkau dengan transportasi umum dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk rutin berolahraga, biaya untuk menggunakan fasilitas olahraga sering kali menjadi kendala, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan rendah. Fasilitas olahraga yang gratis atau terjangkau sangat penting untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat berolahraga. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya olahraga untuk kesehatan mungkin masih rendah. Program edukasi dan kampanye tentang manfaat olahraga sangat diperlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan dan dukungan dari pemerintah dalam membangun dan merawat fasilitas olahraga sangat penting.

Terkait sarana prasarana Kesehatan yang ramah difabel dan inklusif dalam sistem pelayanan kesehatan, masih banyak masalah yang dihadapi antara lain akses fisik yang terbatas misalnya pengadaan jalur landai (*ramp*), pegangan tangan, ruang tunggu dan toilet ramah difabel dll, kemudian kurangnya alat bantu khusus misalnya minimnya alat bantu dengar, sistem visual/audio untuk tuna rungu atau tuna netra, belum tersedianya tenaga kesehatan belum terlatih yang bisa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, seperti bahasa isyarat.

Permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan desa atau kelurahan yang belum Stop BABS (buang air besar sembarangan) merupakan salah satu tantangan serius dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencapaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Data menunjukkan dari 269 desa/kelurahan, masih 200 desa yang sudah melaksanakan STBM, khususnya pada pilar 1 STBM yaitu stop buang air besar sembarangan dari 5 pilar STBM. Dari 200 desa tersebut, 52 desa yang

sudah deklarasi stop BABS, selebihnya belum dapat terverifikasi untuk stop BABS. Kendalanya antara lain masih di jumpai perilaku masyarakat yang buang air besar ke sungai, masih ditemukan saluran pembuangan *septiktank* ke sungai, masih ada warga masyarakat yang belum mempunyai jamban keluarga.

B. Pendidikan yang belum berkualitas, merata dan inklusif

Pembangunan pendidikan yang berkualitas dihadapkan dengan permasalahan fasilitas sarana prasarana pendidikan (yang belum sesuai standar berdasarkan Permendikbud No 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan). Kondisi sarana prasarana sekolah berdasarkan data Dapodik Tahun 2023 meliputi ruang kelas kondisi rusak sebanyak 32 persen, perpustakaan rusak berat sebanyak 40 persen, laboratorium IPA kondisi berat 37,84 persen, laboratorium computer rusak berat 31,71 persen, ruang pimpinan rusak berat 21,95 persen, ruang guru rusak berat 45,45 persen, ruang tata usaha rusak berat 31,71 persen, ketersediaan tempat beribadah 26,47 persen, ruang konseling tidak ada 69,12 persen, ruang UKS tidak ada 82,35 persen, ruang organisasi kesiswaan tidak ada 85,29 persen, jamban tidak ada 11,75 persen, listrik tidak ada 5,88 persen dan air tidak ada 4,4 persen.

Kualitas pendidikan masih rendah yang tergambar pada indikator rata-rata lama sekolah masih di angka 10,03 tahun yaitu belum mencapai target nasional program wajib belajar 12 tahun. Penyebabnya antara lain tingginya angka putus sekolah, sesuai data Pusdatin terdapat 7.567 orang anak tidak sekolah dengan kondisi belum pernah sekolah (BPB), *drop out* (DO), dan lulus tidak melanjutkan (LTM).

Permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimal pada asesmen tingkat nasional untuk literasi dan numerasi jenjang SD dan SMP. Hal ini disebabkan oleh kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah belum sesuai dengan kebutuhan, dimana Indeks Distribusi Guru untuk Tingkat SMP masih sebesar 13,5930, SD sebesar 18,1277 dan TK sebesar 50,9429 persen. Selain itu, yang mengakibatkan belum optimalnya satuan pendidikan yang mencapai standar adalah menurunnya kualitas pembelajaran. Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2025 (kinerja tahun 2024) menunjukkan penurunan kualitas pembelajaran tingkat SD sebesar -0,02 dan jenjang SMP -0,75 disebabkan oleh kurangnya refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang tergambar dari kinerja guru yang masih mencapai di bawah angka 42,27 persen.

Kualitas pendidikan tidak terlepas dari pembangunan literasi, tantangan yang dihadapi masih rendahnya capaian unsur pendukung Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diantaranya jumlah perpustakaan koleksi perpustakaan, SDM Perpustakaan, kunjungan perpustakaan/hari, perpustakaan yang dibina sesuai SNP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan anggota perpustakaan. Masih rendahnya capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat juga diakibatkan karena kurang memadainya kompetensi SDM dan sarana prasarana pendukung serta kurang tepatnya persepsi masyarakat tentang literasi.

Peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja sumber daya manusia yang juga mendukung terhadap peningkatan ekonomi tidak terlepas dari penguatan Pendidikan Olahraga. Jika dilihat dari perkembangan olahraga di Kabupaten Karo pada tahun 2023 cakupan pembinaan olahraga hanya sebesar 52 persen, jumlah atlet yang berprestasi tingkat nasional dan internasional sebanyak 55 atlet. Permasalahan sektor olahraga adalah belum optimalnya prestasi dan pengelolaan olahraga, beberapa hal yang mempengaruhi antara lain belum memadainya sarana dan prasarana

olahraga, masih kurangnya pelaksanaan kejuaraan di tingkat kabupaten, kurangnya jumlah atlet yang berprestasi.

Permasalahan pendidikan yang belum berkualitas, merata dan inklusif belum memuat akses sarana prasarana ramah difabel dan guru keahlian, sangat relevan dengan tantangan nyata dalam dunia pendidikan, hal ini tergambar dengan beluma adanya sekolah inklusi atau sekolah yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus yang bisa bersekolah disekolah umum setelah mendapat asemen dari tenaga psikologi, sedangkan hasil verifikasi banyak siswa berkebutuhan khusus yang tersebar di satuan pendidikan perkotaan maupun pedesaan belajar dengan sarana prasarana yang belum memenuhi kebutuhan disabilitas, kurikulum belum kontekstual disabilitas, dan masih belum adanya tenaga pendamping khusus disabilitas.

C. Kesejahteraan masyarakat yang belum terlindungi seutuhnya dan inklusif

Masyarakat sejahtera dan terlindungi dilakukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan sosial melalui perlindungan sosial adaptif membantu membangun ketahanan rumah tangga miskin dan rentan dengan berinvestasi pada kapasitas mereka dalam mempersiapkan, mengatasi terhadap guncangan sehingga mereka tidak jatuh (lebih dalam) ke dalam kemiskinan. Tantangan pelaksanaan perlindungan sosial yang adaptif yaitu akurasi program bantuan sosial masih rendah hal ini tergambar melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebanyak 58 persen masyarakat terdata dalam SIK-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*), hal ini berkaitan dengan prilaku/mental masyarakat yang sangat berminat untuk mendapatkan bantuan walaupun tidak masuk dalam kelompok miskin atau rentan.

Kurangnya akurasi data menyebabkan belum optimalnya jaminan sosial dimana masih adanya kesempatan yang belum merata bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan. Program jaminan sosial sosial dianggap kurang optimal karena masih sedikitnya kelompok miskin dan rentan yang telah ditangani tetapi belum bisa mandiri dan keluar dari data kesejahteraan sosial.

2.3.1.2. Kinerja produktivitas ekonomi belum optimal

Rendahnya produktivitas tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam memperluas kelas pendapatan menengah, karena sebagian besar angkatan kerja berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah. Hal tersebut terjadi juga di sektor pertanian, bahkan penyerapan tenaga kerja berpendidikan menengah ke bawah pada sektor pertanian relatif tinggi. Selain itu, sektor pertanian masih memiliki tantangan untuk meningkatkan nilai tambah dan produktivitas. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya adopsi teknologi. Lambatnya regenerasi petani serta degradasi kualitas lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dihadapkan pada pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang belum berkualitas karena SDM, dukungan fasilitas, serta sarana dan prasarana yang terbatas Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan sektor ekonomi, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dorongan terhadap inovasi dan investasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

A. IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi yang belum optimal

Perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pertanian, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah, investasi, infrastruktur pendukung konektivitas dan distribusi barang jasa, serta wilayah yang kondusif. Struktur ekonomi Kabupaten Karo masih berbasis pada sektor primer dan dominan tenaga kerja berada pada sektor pertanian yang memiliki produktivitas yang belum

optimal, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya lokal belum optimal untuk membentuk struktur ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Disisi lain, sektor pertanian masih belum dikelola secara optimal masih terdapat Permasalahan yang timbul dalam peningkatan kinerja pertanian antara lain terjadinya penyusutan kualitas Sumber Daya Alam, terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul bersertifikat, belum optimalnya sarana dan prasarana pertanian dan peternakan, pertanian yang masih dipengaruhi musim, infrastruktur pertanian masih kurang dan belum merata, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia penyuluh dan petani masih terbatas, potensi sektor pertanian yang belum terkelola dengan optimal, rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian, masih tingginya serangan hama penyakit tanaman, pemanfaatan lahan pertanian dan peternakan/pengembalaan belum optimal, belum optimalnya penerapan ilmu pengetahuan, adopsi teknologi modern dan inovasi (IPTEKIN) pada sektor pertanian, kurangnya kesadaran petani/peternak akan pentingnya asuransi pertanian, kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagian besar belum membentuk kelompok ekonomi petani, panjangnya rantai pemasaran, masih minimnya pengelolaan pasca panen (GHP), sarana pengolahan (GMP), dan kesesuaian sarana transportasi (GDP), bencana pertanian, fragmentasi lahan yang membutuhkan intensifikasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian, serta permasalahan lainnya yang mengakibatkan daya saing pertanian belum optimal.

Selain itu, produksi perikanan juga belum optimal akibat tingginya biaya produksi, belum memadainya sarana dan prasarna produksi budidaya perikanan, belum optimalnya kompetensi SDM pembudidaya perikanan. Gambaran permasalahan tersebut perlu diselesaikan sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Karo.

Sesuai data kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2020-2024, sektor tersebut mengalami fluktuasi yang kecil, kontribusi naik dari 3,71 persen pada tahun 2020 menjadi 3,73 persen pada tahun 2024. Meskipun meningkat namun peningkatan pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Karo belum optimal, hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya produksi dan produktivitas serta Daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM). Faktor penyebab terjadinya masalah tersebut antara lain masih kurangnya kapasitas dan kompetensi pelaku Industri Kecil dan Menengah dalam pengelolaan produk dengan pemanfaatan IPTEKIN, Kurangnya sarana dan prasarana pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan Kurangnya pemanfaatan sarana yang telah ada, belum optimalnya kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu memiliki nilai tambah tinggi, pemasaran produk dan integrasi rantai pasok antarindustri belum optimal, kurangnya legalitas produk, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh belum optimalnya ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, infrastruktur pendukung industri pengolahan yang ramah lingkungan, iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan, serta penumbuhan sentra kawasan industri/kawasan peruntukan industri.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam menyokong perekonomian daerah di Kabupaten Karo, sektor ini menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata serta meningkatkan minat investasi. Namun pengelolaan sektor pariwisata masih belum optimal untuk penciptaan nilai tambah ekonomi. Beberapa permasalahan pada sektor pariwisata antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun manca

negara masih belum optimal, masih rendahnya pengeluaran wisatawan kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain belum optimalnya promosi/pemasaran pariwisata, masih terbatasnya 6A di Destinasi Wisata (*Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, Ancillary dan Available Packages*), kapasitas pengelolaan penerapan pariwisata berkelanjutan belum optimal, Belum Optimalnya Pengembangan Industri Pariwisata, Belum optimalnya peran Masyarakat sadar wisata dan pelaku pariwisata (Pemandu Wisata, Pokdarwis, Pengelola Desa Wisata dan Destinasi Wisata) dalam menerapkan Sapta Pesona, kemitraan, kolaborasi maupun sinergitas *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata belum optimal.

Selain sektor di atas, ekonomi kreatif dapat juga menjadi katalisator peningkatan perekonomian di Kabupaten Karo. Namun demikian saat ini pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif belum optimal. Beberapa permasalahan menjadi faktor yang menghambat antara lain Belum Optimalnya Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, Masih rendahnya sarana prasarana dan infrastruktur pendukung Ekonomi Kreatif, Masih Kurangnya Permodalan, Pemasaran dan daya saing produk ekonomi kreatif, sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, belum ada regulasi terkait pengembangan ekonomi kreatif, Masih kurangnya apresiasi kepada masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, belum ada jejaring kabupaten/kota kreatif, dan desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan.

Sektor usaha kecil dan menengah serta koperasi masih belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo. Beberapa permasalahan pokok dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah adalah belum optimalnya daya saing produk UMKM dan masih rendahnya koperasi yang sehat, hal tersebut akibat beberapa hal antara lain Belum optimalnya pengembangan dan pemasaran produk UMKM berbasis IPTEKIN (*Akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan/standar produk, manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas pengelolaan dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi*), masih banyak koperasi yang tidak aktif, minimnya variasi jenis usaha koperasi, rendahnya pengawasan koperasi.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen, hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun dominan sebagai pekerja keluarga. Selain itu, angkatan kerja yang bekerja masih dominan memiliki pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Dasar, serta masih terfokus pada sektor primer, hal tersebut dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal. Produktivitas tenaga kerja yang rendah menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik serta berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kualitas tenaga kerja belum sesuai dengan dengan permintaan pasar (*keterbatasan keterampilan dan pendidikan tenaga kerja, kurangnya akses terhadap pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, kurangnya keahlian dan kompetensi digital*), sistem perlindungan tenaga kerja yang belum optimal, sarana dan prasarana ketenagakerjaan masih kurang, belum optimalnya iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum serta informasi pasar kerja, pengangguran terselubung akibat migrasi masuk, belum optimalnya penciptaan wirausaha baru.

Realisasi investasi dan jumlah PMA/PMDN di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahun namun peningkatan belum signifikan. Selain itu, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan PMA/PMDN. Hal ini antara lain disebabkan karena pengaruh mekanisme PMA/PMDN. Untuk mengoptimalkan serapan tenaga kerja diperlukan keahlian dan keterampilan yang dapat mengimbangi mekanisme dalam proses produksi. Beberapa permasalahan yang perlu diatasi dalam meningkatkan sektor ini antara lain Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan satu pintu untuk mewujudkan pelayanan prima, mudah, transparan dan akuntabel, belum optimalnya ketersediaan regulasi pengelolaan penanaman modal dan investasi, strategi promosi investasi, belum optimalnya infrastruktur pendukung, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat/pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha/memiliki izin usaha dan nonusaha.

B. Penerapan ekonomi hijau yang belum optimal

Pemanasan global dan perubahan iklim semakin mendapat perhatian serius dari seluruh negara di dunia. Fenomena ini terutama disebabkan oleh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas industri, deforestasi, dan konsumsi bahan bakar fosil. Usaha konservasi berbasis komunitas menjadi penting untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia dan perlindungan lingkungan. Namun, tantangan besar muncul dari ketergantungan ekonomi pada bahan bakar fosil, kurangnya investasi dalam energi terbarukan, serta kebijakan yang perlu terus diperkuat dan diperluas. Kurangnya kesadaran masyarakat dan kebiasaan konsumsi yang tidak ramah lingkungan juga turut mempengaruhi situasi ini.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Karo didominasi oleh pemanfaatan sumber daya alam, terutama di sektor pertanian dan pariwisata. Meskipun telah ada upaya dalam perlindungan lingkungan, tantangan masih ada karena keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan perlu terus ditingkatkan. Prioritas ekonomi jangka pendek seringkali menyulitkan penerapan praktik-praktik berkelanjutan. Pertanian industri memiliki dampak terhadap kesehatan tanah dan keanekaragaman hayati. Edukasi tentang keberlanjutan dan penegakan regulasi lingkungan yang lebih kuat dapat membantu mengatasi tantangan ini. Praktik tradisional yang perlu diperbarui dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian juga sangat penting.

Kabupaten Karo menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti pencemaran air dan tanah, penurunan kualitas tanah, kebakaran hutan, dan alih fungsi lahan pertanian. Penyebab utamanya adalah praktik pertanian yang memerlukan peningkatan keberlanjutan, deforestasi, dan perencanaan tata guna lahan yang perlu terus disempurnakan. Degradasi lingkungan ini juga dipengaruhi oleh spekulasi lahan dan keterlibatan komunitas yang masih bisa ditingkatkan. Kebijakan penggunaan lahan dan penegakan hukum yang terus diperkuat akan sangat membantu dalam mengatasi masalah ini. Pencemaran air dan tanah mengurangi kualitas sumber daya alam, sementara kebakaran hutan dan alih fungsi lahan mengakibatkan kerugian ekologis yang besar.

Penurunan produktivitas sumber daya alam akibat degradasi lingkungan berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya tersebut. Integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan sangat penting untuk memastikan kesehatan ekonomi dan lingkungan jangka panjang. Degradasi lingkungan mengurangi ketersediaan dan kualitas sumber daya, yang pada akhirnya mengurangi hasil pertanian dan pendapatan dari sektor pariwisata, serta mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penerapan

praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam yang bijak sangat penting.

Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan harus menjadi perhatian utama dan dilakukan secara seimbang dan holistik bersama dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Perencanaan dan pelaksanaan yang terintegrasi sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Berbagai aktivitas pembangunan harus dipastikan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mencegah kerusakan ekosistem dan pencemaran. Integrasi antara pembangunan ekonomi dan lingkungan sangat penting demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Pendekatan berbasis komunitas dan pertanian berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Hal ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta/dunia usaha untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama.

C. Transformasi digital yang belum berjalan

Saat ini, digitalisasi merupakan keharusan dalam pengembangan perekonomian daerah. Kabupaten Karo memiliki potensi daerah yang sangat besar, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata. Namun, kelemahan terdapat pada transformasi digital. Hal ini tercermin dari beberapa indikator berikut:

-) Indeks SPBE masih di angka 3.04 dengan kategori cukup;
-) Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) masih di angka 39,99 atau kategori cukup
-) Indeks Pembangunan Statistik berada di angka 2,14 dengan kategori cukup.

Kabupaten Karo menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan infrastruktur konektivitas digital yang masih perlu ditingkatkan dan belum merata. Tantangan ini disebabkan oleh investasi yang terbatas pada infrastruktur digital, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau secara geografis. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan infrastruktur di daerah terpencil menyebabkan akses internet yang belum merata, yang dapat memperbesar kesenjangan digital antara wilayah pusat dan pinggiran. Selain itu, upaya dari pemerintah daerah dan sektor swasta untuk memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur digital masih memerlukan peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh koordinasi dan perencanaan strategis dalam pembangunan infrastruktur digital yang perlu dioptimalkan. Akibatnya, terjadi kesenjangan digital antara berbagai wilayah, yang dapat berpengaruh pada daya saing ekonomi di daerah-daerah tertentu, serta mengurangi kualitas layanan publik dan peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil.

Selain itu, pengelolaan ekosistem infrastruktur digital di Kabupaten Karo juga masih memerlukan perbaikan, mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), tata kelola, dan regulasi. Salah satu faktor utamanya adalah program pelatihan dan pengembangan kompetensi untuk SDM lokal yang perlu lebih ditingkatkan, sehingga dapat mengelola ekosistem digital dengan lebih baik. Program pelatihan yang ada belum sepenuhnya mencakup kebutuhan teknologi terbaru dan tidak berkelanjutan, sehingga SDM belum dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan cepat. Selain itu, regulasi yang ada perlu lebih jelas dan terintegrasi untuk mendukung inovasi dan fleksibilitas dalam mengadopsi teknologi baru, serta memperkuat kerangka kerja yang mendukung kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Hal ini berujung pada efisiensi dan efektivitas yang belum optimal dalam pemanfaatan teknologi digital, serta meningkatkan risiko kegagalan proyek-proyek digital di Kabupaten Karo.

Lebih jauh lagi, adopsi perangkat teknologi infrastruktur digital di Kabupaten Karo berjalan dengan kecepatan yang masih perlu ditingkatkan.

Penyebab utamanya adalah dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk implementasi teknologi baru masih terbatas, serta adanya resistensi terhadap perubahan teknologi di kalangan SDM lokal. Anggaran yang terbatas menghambat kemampuan daerah untuk mengadopsi teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Kebijakan penganggaran yang belum fokus pada prioritas teknologi dan inovasi menyebabkan alokasi dana yang kurang memadai untuk pengembangan teknologi baru. Selain itu, pemahaman dan penerimaan terhadap perubahan teknologi perlu lebih ditingkatkan untuk mengurangi resistensi yang memperlambat proses transformasi digital. Banyak SDM yang merasa terancam dengan perubahan dan tidak yakin dengan manfaat teknologi baru, sehingga enggan untuk beradaptasi. Akibatnya, Kabupaten Karo tertinggal dalam perkembangan teknologi global, yang berimbas pada produktivitas dan efisiensi yang belum optimal serta kurangnya daya saing ekonomi.

Selain itu, penyelenggaraan satu data di Kabupaten Karo juga masih memerlukan peningkatan, sehingga dapat lebih baik dalam mengintegrasikan dan mengelola data dari berbagai sumber. Penyebab utamanya adalah penggunaan berbagai sistem yang belum kompatibel dan kebijakan yang mendukung integrasi data lintas perangkat daerah dan sektor yang perlu lebih ditingkatkan. Banyaknya sistem informasi yang berjalan secara silo tanpa integrasi membuat data yang dihasilkan tidak konsisten dan sulit diakses secara menyeluruh. Akibatnya, pengambilan keputusan menjadi kurang tepat dan tidak berbasis data yang solid. Keputusan yang diambil berdasarkan data yang tidak akurat atau tidak lengkap dapat mengarah pada strategi yang kurang efektif, pemborosan sumber daya, dan kegagalan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Lebih lanjut, penerapan keamanan ekosistem digital di Kabupaten Karo perlu lebih dioptimalkan untuk mengurangi risiko keamanan. Masalah ini disebabkan oleh kesadaran dan penerapan praktik keamanan digital yang masih dapat ditingkatkan, serta keterbatasan teknologi keamanan yang digunakan. Program edukasi tentang keamanan digital untuk masyarakat dan SDM lokal perlu lebih dimaksimalkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan data dan keamanan siber. Banyak SDM yang belum memahami ancaman keamanan digital dan cara mengatasinya, sehingga belum menerapkan langkah-langkah keamanan yang diperlukan. Selain itu, anggaran dan prioritas untuk investasi pada teknologi keamanan yang canggih masih perlu ditingkatkan agar ekosistem digital menjadi lebih tahan terhadap ancaman dan serangan siber. Teknologi keamanan yang ada perlu terus ditingkatkan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang, sehingga dapat mengurangi risiko kebocoran data, kehilangan data penting, dan serangan siber yang dapat merugikan ekonomi dan reputasi daerah. Akibatnya, kepercayaan publik dan investor terhadap keamanan ekosistem digital di Kabupaten Karo perlu terus dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial.

Dengan memahami akar penyebab dari setiap tantangan ini, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi hambatan dalam transformasi digital di Kabupaten Karo, sehingga dapat memanfaatkan potensi daerah secara maksimal dan meningkatkan daya saing ekonomi serta kualitas hidup masyarakat. Strategi yang diusulkan meliputi peningkatan investasi infrastruktur digital, pengembangan SDM melalui program pelatihan yang berkelanjutan, adopsi teknologi baru dengan dukungan kebijakan yang fleksibel, integrasi sistem data yang terpadu, serta peningkatan kesadaran dan teknologi keamanan digital.

D. Ekonomi domestik dan global yang belum terintegrasi

Integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Karo memiliki potensi yang besar namun belum sepenuhnya terealisasi. Meskipun terdapat peningkatan realisasi investasi dan jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) serta Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) setiap tahun, peningkatan ini masih dapat dioptimalkan lebih lanjut. Selain itu, serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan PMA/PMDN juga belum maksimal. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan sistem pendidikan dan pelatihan yang lebih inklusif untuk memastikan tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Karo sudah berjalan, namun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal efisiensi dan transparansi guna menarik lebih banyak investasi. Penyempurnaan proses perizinan yang lebih cepat dan implementasi sistem pelayanan terpadu yang lebih baik dapat menjadi kunci untuk mencapai hal ini. Regulasi pengelolaan penanaman modal dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan juga perlu terus didorong untuk memberikan kepastian bagi investor dan meningkatkan daya tarik Kabupaten Karo sebagai tujuan investasi.

Strategi promosi investasi yang lebih efektif juga diperlukan untuk menarik minat investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Karo. Integrasi strategi yang lebih baik dan penetapan target yang jelas dapat membantu dalam menarik investor. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan pelaporan perkembangan kegiatan usaha juga penting untuk mendukung pertumbuhan sektor formal. Edukasi dan sosialisasi yang lebih inklusif dan efektif dari pemerintah dapat berperan besar dalam hal ini.

Sektor perdagangan di Kabupaten Karo memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, namun masih menghadapi berbagai tantangan yang dapat diatasi untuk meningkatkannya. Daya saing produk ekspor dapat ditingkatkan dengan memastikan kualitas dan kuantitas produk memenuhi standar pasar internasional. Penyediaan informasi yang mudah diakses dan dukungan untuk calon eksportir juga perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi dalam pasar ekspor.

Pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi masih dapat ditingkatkan untuk menghindari fluktuasi inflasi yang merugikan perekonomian. Mendorong inovasi dan adopsi teknologi oleh pelaku usaha, terutama pedagang kecil, juga penting untuk meningkatkan daya saing mereka. Akses terhadap teknologi dan dukungan untuk inovasi harus terus diperluas untuk memajukan usaha lokal. Selain itu, sistem distribusi dan infrastruktur yang lebih optimal akan mendukung efisiensi perdagangan di Kabupaten Karo, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Investasi dalam infrastruktur sangat penting untuk mendukung perdagangan yang lebih efisien. Kualitas SDM pengelola pasar lokal yang dapat ditingkatkan akan mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas perdagangan. Pengembangan keterampilan dan kompetensi SDM melalui pelatihan dan pendidikan yang adaptif menjadi langkah penting dalam mencapai hal ini.

Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, diperlukan upaya bersama dalam reformasi regulasi dan birokrasi, peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, serta penyediaan informasi yang memadai untuk calon eksportir. Dukungan inovasi dan teknologi bagi pelaku usaha juga sangat penting. Pemerintah perlu terus mengembangkan strategi promosi investasi yang lebih efektif dan memastikan pelayanan perizinan satu pintu berjalan dengan efisien dan

transparan. Peningkatan infrastruktur dan sistem distribusi, serta pengembangan kompetensi SDM pengelola pasar sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo secara keseluruhan. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya akan memperkuat integrasi ekonomi domestik dan global Kabupaten Karo.

E. Kawasan perdesaan dan perkotaan belum optimal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Karo, sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, menghadapi sejumlah tantangan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, dan perumahan yang layak masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan mengurangi permasalahan permukiman kumuh.

Di wilayah perkotaan, hanya 38,12 persen penduduk yang memiliki akses ke air minum perpipaan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan investasi dalam infrastruktur penyediaan air dan penguatan regulasi untuk memastikan distribusi air yang lebih merata. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi operator dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam memperbaiki situasi ini. Solusinya melibatkan peningkatan investasi dalam teknologi pengolahan dan distribusi air serta implementasi kebijakan yang mendukung penggunaan sumber air secara berkelanjutan. Kampanye edukasi juga penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya air bersih dan cara pemanfaatannya secara efisien.

Akses sanitasi yang aman juga masih perlu ditingkatkan, dengan hanya 3.64 persen penduduk yang saat ini mendapatkannya. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan infrastruktur sanitasi dan kebijakan yang lebih mendukung, disertai dengan peningkatan dana dan edukasi tentang sanitasi. Investasi yang lebih besar dalam infrastruktur sanitasi, reformasi kebijakan yang menyediakan insentif untuk pembangunan sanitasi, serta program edukasi masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program-program sanitasi yang berkelanjutan.

Selain itu, 5,6 persen dari 97.525 unit rumah di Kabupaten Karo masih tidak layak huni. Peningkatan standar bangunan dan pemeliharaan yang lebih baik dapat membantu memperbaiki kondisi ini. Pemerintah dapat memperketat regulasi bangunan, meningkatkan frekuensi inspeksi, dan menyediakan program bantuan untuk renovasi rumah. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan bahwa lebih banyak warga memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

Urbanisasi yang cepat juga memerlukan kebijakan zonasi yang efektif untuk mengurangi munculnya permukiman kumuh di wilayah perkotaan. Perbaikan dalam perencanaan urban, peningkatan pengawasan pembangunan, dan implementasi program regenerasi perkotaan dapat mengurangi kepadatan penduduk dan memperbaiki kualitas hidup. Dengan mengimplementasikan kebijakan yang lebih terarah, pemerintah dapat mengelola pertumbuhan kota dengan lebih baik dan mencegah munculnya masalah-masalah baru terkait dengan urbanisasi.

Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Karo juga perlu ditingkatkan, dengan modernisasi fasilitas pengelolaan sampah dan pengenalan sistem pemilahan sampah di sumber. Kampanye edukasi tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sangat diperlukan untuk memperbaiki situasi ini. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa lebih banyak sampah dikelola dengan baik, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

Infrastruktur permukiman, termasuk jalan, drainase, dan ruang terbuka hijau, memerlukan peningkatan melalui perencanaan yang efisien dan alokasi anggaran yang memadai. Meningkatkan alokasi anggaran dan menggunakan teknologi konstruksi modern dapat memperbaiki situasi ini. Pemerintah dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan infrastruktur yang lebih baik dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

Penyediaan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit juga memerlukan peningkatan melalui distribusi sumber daya yang lebih adil dan perencanaan yang efektif. Revisi kebijakan distribusi sumber daya dan peningkatan investasi di daerah terpencil bisa menjadi solusi untuk memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap layanan publik. Dengan meningkatkan akses ke fasilitas publik, pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Penguatan regulasi zonasi dan koordinasi antar lembaga dapat membantu mengatasi penggunaan lahan yang tidak terkontrol. Memperkuat regulasi zonasi, meningkatkan kolaborasi antarlembaga, dan memanfaatkan teknologi GIS akan membantu mengatasi masalah ini. Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mengelola penggunaan lahan dan memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara berkelanjutan.

Kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Karo juga menghadapi tantangan berupa degradasi lingkungan permukiman dan ketangguhan terhadap bencana. Perencanaan yang baik dan integrasi manajemen risiko bencana dalam tata ruang dapat menjadi solusi. Proyek pembangunan perlu mematuhi standar lingkungan yang ketat, disertai dengan penguatan regulasi dan peningkatan investasi dalam infrastruktur tahan bencana. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap menghadapi berbagai risiko bencana dan dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Tingkat pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas yang tinggi merupakan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan di Kabupaten Karo. Peningkatan akses ke pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan dapat membantu mengatasi masalah ini. Reformasi kebijakan ekonomi untuk mendorong investasi dan inovasi, serta implementasi program kesejahteraan sosial yang lebih efektif, juga dapat berkontribusi dalam memperbaiki situasi ini. Dengan menyediakan lebih banyak peluang ekonomi dan pendidikan, pemerintah dapat membantu masyarakat mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Perubahan lanskap perdesaan, termasuk kepadatan permukiman desa yang tinggi dan alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian, merupakan hasil dari urbanisasi dan tekanan ekonomi. Peningkatan peluang ekonomi di pedesaan dan kebijakan perlindungan lahan pertanian dapat membantu mengatasi masalah ini. Solusi yang dapat diterapkan meliputi perencanaan tata ruang yang efektif, peningkatan jumlah desa mandiri dan penggunaan teknologi pertanian yang modern. Dengan demikian, pemerintah dapat membantu mempertahankan karakter pedesaan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Banyak lahan di perkotaan dan perdesaan belum bersertifikat dan mengalami konflik kepemilikan. Penyederhanaan sistem pendaftaran lahan dan modernisasi administrasi lahan dapat memperbaiki situasi ini. Reformasi sistem pendaftaran lahan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses sertifikasi, peningkatan transparansi dan akurasi data kepemilikan lahan, serta penyelesaian konflik kepemilikan melalui mekanisme mediasi yang efektif adalah beberapa solusi yang dapat diusulkan. Dengan demikian,

pemerintah dapat membantu menciptakan kepastian hukum dan stabilitas sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Setiap masalah ini membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan berdasarkan bukti untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan efektif. Solusi yang diusulkan memerlukan peningkatan kesadaran dan edukasi, reformasi kebijakan, peningkatan investasi dalam infrastruktur, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Implementasi strategi yang tepat dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi kawasan perkotaan dan perdesaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.1.3. Sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal

Sistem tata kelola pemerintahan merupakan konsep penting dalam pembangunan sebagai elemen krusial dalam menentukan strategi pembangunan daerah. Ruang lingkup tata kelola pemerintahan meliputi wilayah politik, administrasi, dan hukum. Tata kelola tidak hanya menyangkut kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, namun juga terkait dengan bagaimana pengelolaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, inklusif, bermanfaat, serta berdampak secara sosial dan ekonomi. Transformasi tata kelola diperlukan untuk merespon munculnya kecenderungan besar (*global megatrends*) dan adanya perubahan lingkungan strategis di level global maupun nasional, terutama terkait dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat. Selain itu, transformasi tata kelola menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan, konsistensi, dan sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dan sektoral.

Tantangan dalam mewujudkan tata kelola yang berintegrasi, adaptif, efektif dan efisien terkait belum maksimalnya kinerja birokrasi, politik dan hukum. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dilakukan melalui reformasi birokrasi yaitu upaya untuk mengubah system penyelenggaraan pemerintah agar lebih efektif dan efisien. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Karo sudah mencapai kategori B dengan nilai 68,51, tetapi masih ada beberapa faktor yang belum maksimal pelaksanaannya.

Adapun tantangan tata kelola dari sisi pengawasan yaitu Maturitas SPIP masih level 2, karena belum adanya pelaksanaan komitmen dengan baik dari seluruh jajaran organisasi mulai dari pimpinan sampai pegawai, hal ini dikarenakan kinerja perangkat daerah belum berorientasi outcome, belum memenuhi kriteria SMART dan belum mendukung target yang tepat. Begitu juga Kapabilitas APIP masih Level 3 karena belum sepenuhnya Perangkat Daerah telah menjadi mitra strategis dalam mencapai tujuan Perangkat Daerah.

Permasalahan terkait peningkatan kualitas ASN tergambar melalui Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Karo yang masih kategori sedang (75,69), hal ini disebabkan antara lain terkait kualifikasi ASN masih diposisi rata-rata sesuai persyaratan jabatan, untuk kompetensi belum semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan kompetensi minimal 20 JP per Tahun. Selanjutnya masalah persentase belanja pegawai melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Persentase Perangkat Daerah belum tepat fungsi dan tepat ukuran, Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi jabatan (*The Right Man on The Right Place*).

Permasalahan lainnya terkait Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah antara lain digambarkan dengan skor evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Karo masih berada pada

kategori sedang, batas wilayah antar Kecamatan dan antar kelurahan/desa belum dilakukan penegasan batas antar wilayah.

Kabupaten Karo mengalami tantangan dalam upaya peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), yang saat ini menduduki kategori predikat 'baik' dengan nilai 5,48. Tetapi masih perlu dioptimalkan untuk peningkatan infrastruktur, di mana alokasi anggaran saat ini lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari ketimbang untuk investasi berkelanjutan yang dapat membawa manfaat jangka panjang. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk lebih fokus pada pengembangan infrastruktur teknologi yang modern dan efisien, yang akan mendukung penggunaan teknologi yang lebih up-to-date dan efektif.

Selanjutnya, peningkatan kompetensi SDM juga menjadi prioritas utama, mengingat terdapat kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh pegawai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Program pelatihan yang ada saat ini perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi operasional yang dinamis, memastikan bahwa pegawai terus termotivasi dan dapat mempertahankan kestabilan kerja yang efektif. Ini menunjukkan pentingnya investasi berkelanjutan dalam pengembangan SDM yang tidak hanya teknis, tapi juga motivasional.

Koordinasi antar pemangku kepentingan juga perlu ditingkatkan. Saat ini, terdapat kebutuhan untuk memperkuat platform komunikasi yang akan memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antar departemen dan dengan penyedia layanan. Ini akan membantu mengeliminasi redundansi dan memperjelas proses pembuatan kebijakan, mengindikasikan sebuah peluang untuk memperbaiki alur kerja dan efisiensi operasional yang berkesinambungan.

Berdasarkan hasil analisis Pareto dan diagram scatter, menjadi jelas bahwa infrastruktur merupakan area kunci yang memerlukan perhatian dan investasi lebih lanjut untuk menghasilkan peningkatan paling signifikan dalam kinerja dan kepuasan layanan. Investasi ini tidak hanya akan memperbaiki kondisi fisik layanan tetapi juga akan memfasilitasi peningkatan dalam pengelolaan SDM dan efektivitas koordinasi. Keputusan berbasis data ini dapat membantu Kabupaten Karo mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, menargetkan area-area yang paling mempengaruhi kinerja mereka dalam SPBE, dan mengarahkan strategi pembangunan mereka untuk masa depan.

2.3.1.4. Stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan HAM belum mencapai kondisi yang ideal

Dalam rangka menjamin stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan HAM melalui pemerintahan yang efektif dan responsif maka arah kebijakan tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan praktik penegakan hukum belum terpadu, efisien, dan berlandaskan HAM, rendahnya kepatutan hukum masyarakat karena minimnya literasi dan pemberdayaan, serta akses terhadap keadilan yang terbatas.

Tantangan dalam mencapai kondisi ideal terkait stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi di bidang-bidang ini termasuk ketidakstabilan politik, konflik internal, atau perbedaan ideologi dapat mengganggu stabilitas, krisis ekonomi atau ketidakadilan ekonomi dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Tingkat kejahatan yang tinggi atau kekerasan dapat mengancam ketenteraman masyarakat. Kelemahan dalam penegakan hukum atau korupsi dapat merusak ketertiban umum. Kurangnya pendidikan tentang kebangsaan dan identitas nasional dapat menyebabkan kurangnya rasa

kebangsaan dan solidaritas. Terkait pemenuhan HAM tergambar dari belum optimalnya pelayanan terhadap disabilitas, dan masih terjadinya pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak (terjadinya pelecehan seksual, KDRT dan perdagangan anak).

Masih rendahnya stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karo tergambar dari masih tingginya tingkat pelanggaran K3 (ketenteraman, ketertiban dan keindahan). Selanjutnya, pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang tertangani juga masih rendah, dimana berdasarkan data dari Satpol PP Kabupaten Karo pada tahun 2023 sebesar 73,97 dan tahun 2024 sebesar 80%. Salah satu penyebabnya adalah karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas PPNS (Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karo yang saat ini hanya berjumlah 5 orang. Kurangnya pemahaman masyarakat dan badan hukum terhadap pentingnya ketaatan terhadap Perda dan Perkada juga masih rendah sehingga stabilitas ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Karo juga masih rendah.

Peran serta masyarakat dalam menjaga kerukunan, ketenteraman, ketertiban umum sangat dibutuhkan. Peran serta masyarakat pada tingkat Desa dan Kelurahan pada tahun 2022 sebesar 12,45% dan tahun 2023 sebesar 63,49 persen, hal ini disebabkan karena masih kurangnya tingkat kesadaran dan jiwa sukarelawan masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum lingkungannya.

Permasalahan lainnya dalam hal layanan proteksi ancaman bencana kebakaran yaitu masih rendahnya persentase luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) layanan proteksi ancaman bencana kebakaran masih mencapai 41,17%, hal ini disebabkan Keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran belum merata di semua wilayah kecamatan dan di wilayah rentan kebakaran, sehingga jangkauan layanan bencana kebakaran belum maksimal dan masih banyaknya lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK (*unprotected area*) masih dibentuk di 10 Kecamatan.

Kabupaten Karo merupakan wilayah baru yang menjadi basis perhitungan IHK 2024. Secara historis data inflasi Kabupaten Karo baru tersaji mulai awal tahun 2024. Pada April 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Karo sebesar 4,78 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,58. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, Pada Mei 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Karo sebesar 5,37 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,05. Inflasi y-on-y, Pada Juni 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Karo sebesar 3,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,50.

Selama triwulan II sebagian besar harga-harga komoditas bahan pokok stabil. Harga komoditas yang sedikit mengalami kenaikan adalah bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, daging sapi, daging ayam ras, telur, gula, minyak goreng, ikan kembung dan tepung terigu kenaikan harga dikarenakan hari besar keagamaan nasional. Untuk harga komoditas yang lain terjadi kenaikan dan penurunan tapi tidak begitu signifikan.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di kabupaten karo antara lain in-efisiensi struktur pasar komoditas pangan, produksi pangan yang tidak merata, rantai pasok tidak efisien, petani tidak memiliki daya tawar dan akses terhadap pasar, akses distribusi yaitu infrastruktur pendukung yang masih terbatas, pembangunan infrastruktur masih terkendala, kesenjangan informasi kurangnya akses informasi terkait pangan dan masih belum meratanya akses informasi dan infrastruktur di daerah, kapasitas produksi

terbatas, teknologi produksi terbatas, manajemen pola tanam belum terkelola.

2.3.1.5. Ketahanan sosial, budaya, ekologi dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal

Dalam proses pembangunan diperlukan keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

Seiring dengan meningkatnya populasi, penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam akan menjadi tantangan kedepan. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan telah mengurangi fungsi lingkungan hutan. Isu pengelolaan sampah juga perlu diwaspadai, mengingat daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi akan penuh di masa yang akan datang.

Dampak perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan intensitas bencana lingkungan, terutama di sektor air, laut dan pesisir, pertanian, serta kesehatan. Ancaman kelangkaan air muncul dari rendahnya efisiensi pengelolaan dan daya rusak sumber daya air. Akses terhadap air minum dan sanitasi yang buruk juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak.

A. Pelestarian kebudayaan yang belum optimal

Pada tahun 2024, dari 24 objek yang diduga sebagai cagar budaya yang diinventarisasi, hanya 9 yang telah ditetapkan. Proses penetapan yang panjang dan kompleks masih dihadapkan pada regulasi yang ketat, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan dana untuk penelitian dan verifikasi. Selain itu, terbatasnya jumlah tenaga ahli di bidang cagar budaya juga menjadi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk melindungi warisan budaya, upaya untuk mewujudkannya masih menghadapi berbagai kendala administratif dan sumber daya.

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya masih minim. Meski demikian, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran dan promosi yang masih perlu ditingkatkan, yang sering kali dipengaruhi oleh dukungan yang belum optimal dari pemerintah serta kurangnya sponsor. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam festival-festival tersebut seringkali terhambat oleh keterbatasan akses informasi dan kurang menariknya kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mempromosikan seni dan budaya masih memiliki ruang untuk peningkatan. Tantangan serupa juga terjadi pada jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh minat masyarakat terhadap kesenian yang masih perlu ditingkatkan, yang berakar pada kurangnya pendidikan dan apresiasi seni di kalangan masyarakat. Selain itu, dukungan yang lebih besar dari pemerintah dan peningkatan fasilitas untuk latihan dan pertunjukan juga diperlukan untuk mendorong perkembangan grup kesenian. Masalah ini mencerminkan bahwa kesenian masih membutuhkan integrasi yang lebih kuat dalam kehidupan masyarakat.

Ketersediaan gedung kesenian/sarana dan prasarana kesenian masih belum mengalami peningkatan yang signifikan, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran pembangunan dan prioritas pembangunan yang beragam. Investasi dari sektor swasta dan perencanaan yang lebih baik dapat

berkontribusi positif terhadap solusi ini. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun ada kebutuhan yang jelas akan sarana dan prasarana kesenian, upaya untuk memenuhinya masih dapat diperkuat melalui berbagai langkah yang lebih strategis. Pelestarian kesenian dan kebudayaan daerah secara keseluruhan juga masih dapat dioptimalkan, sebagaimana ditunjukkan oleh dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat yang dapat lebih ditingkatkan.

Pemeliharaan terhadap cagar budaya yang telah ditetapkan juga merupakan area yang perlu perhatian lebih. Keterbatasan alokasi anggaran dan insentif untuk tenaga ahli, serta kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, menjadi faktor yang mempengaruhi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menetapkan cagar budaya, pemeliharaan dan perawatannya masih membutuhkan perhatian dan dukungan yang lebih besar. Selain itu, penetapan cagar budaya dan karya budaya masih menghadapi tantangan dalam proses verifikasi yang panjang dan rumit serta keterbatasan sumber daya. Koordinasi yang lebih baik dan kolaborasi dengan ahli budaya dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak karya budaya yang berpotensi untuk diakui, proses untuk mencapai pengakuan tersebut masih dapat ditingkatkan.

B. Kualitas keluarga yang belum optimal, ketidaksetaraan gender dan masyarakat yang belum inklusif

Tantangan dalam pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai 8 fungsi keluarga yang terdiri dari keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi, perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran dan peran orangtua dalam keluarga dimana adanya ketimpangan peran ibu dan ayah baik dalam pola asuh keluarga hal ini dapat digambarkan melalui indikator Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2024 sebesar 0,304 poin artinya adanya ketimpangan peran laki-laki dan perempuan dari dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 0,304 poin. Permasalahan kesetaraan gender lainnya dapat dilihat pada indikator Indeks Pembangunan Gender pada tahun 2023 sebesar 96,36 dimana hal ini masih terdapat kesenjangan pembangunan kesehatan, pendidikan dan pendapatan sebesar 3,64 antara laki-laki dan perempuan. Peran keluarga yang dominan bagi perempuan akan tetapi tidak diimbangi dengan akses pembangunan yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan.

Kualitas keluarga juga masih menjadi permasalahan, hal ini dikarenakan masih kurangnya perencanaan dalam keluarga yang terlihat dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini pada tahun 2022 sebanyak 9 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 30 kasus. Begitu juga dengan masyarakat inklusif yang masih minim menerima akses pembangunan misalnya belum adanya infrastruktur jalan, fasilitas transportasi darat yang mengakomodasi kebutuhan disabilitas.

Permasalahan pada sektor pemuda dan olah raga yaitu belum optimalnya daya saing Pemuda dan Olahraga, hal ini tercermin dari belum optimalnya pengembangan olahraga dan belum optimalnya peran pemuda, hal tersebut diakibatkan antara lain masih minimnya persentase organisasi pemuda yang aktif, kemudian partisipasi pemuda dalam pembangunan yakni peran pemuda pelopor masih rendah dalam melakukan terobosan dalam beberapa bidang antara lain pendidikan, sosial budaya, lingkungan, pariwisata, pangan, inovasi teknologi dll, belum optimalnya perkembangan wirausaha muda, kurangnya sinergitas stakeholders terkait dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Selanjutnya, sektor olahraga juga menghadapi beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya prestasi

olahraga, hal tersebut akibat dari belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga serta kurangnya kualitas dan kuantitas pelatihan atlet di Kabupaten Karo.

Permasalahan lainnya terkait arus migrasi masuk dan keluar yang tidak terkontrol. Hal ini terlihat dari struktur kependudukan pada usia produktif pada usia 20 ke atas yang sudah berkurang dan tingginya migrasi masuk yang secara kasat mata tinggi dan tidak terdata.

C. Degradasi lingkungan hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang berat lima tahun ke depan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Karo akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pencemaran lingkungan. Kebutuhan air akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan pengelolaan air limbah. Kondisi saat ini akses sanitasi aman di Kabupaten Karo masih sangat kecil yakni 5,01 persen dari seluruh masyarakat Kabupaten Karo dan belum tersedia IPLT yang standar. Sampah yang dihasilkan masyarakat hanya 49,86 persen yang terolah dan Kabupaten Karo belum memiliki TPA standar.

Menurunnya ketersediaan air bersih merupakan tantangan penting yang harus dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Masalah ini dapat diakibatkan oleh over ekstraksi air tanah, pencemaran badan air, serta dampak perubahan iklim yang memengaruhi pola curah hujan. Overekstraksi air tanah berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya air, sementara pencemaran kualitas air menjadi tantangan besar dalam pengelolaannya. Faktor-faktor seperti penggunaan berlebihan, kurangnya kesadaran tentang konservasi, perubahan iklim, dan deforestasi yang mempengaruhi retensi air, semuanya dapat memperumit hal ini. Selain itu, kebijakan manajemen air dan teknologi pengolahan yang ada perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan ini.

Penurunan keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian serius yang terkait dengan deforestasi, perubahan iklim, dan aktivitas manusia seperti perluasan pertanian dan urbanisasi. Penghancuran habitat alami dan kegiatan ilegal, seperti penebangan liar, berperan dalam berkurangnya biodiversitas. Kebijakan terkait konservasi dan perlindungan kawasan perlu diperkuat agar lebih efektif dalam menjaga keanekaragaman hayati.

Permasalahan limbah dan pengelolaan sampah masih memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan infrastruktur yang ada, kesadaran publik, dan efektivitas program daur ulang. Urbanisasi yang cepat sering kali melebihi kemampuan infrastruktur pengelolaan limbah yang tersedia. Pembuangan limbah yang tidak sesuai, keterbatasan ruang untuk TPA, dan kurangnya insentif untuk program daur ulang adalah faktor-faktor yang memperburuk masalah ini. Penguatan kebijakan dan peningkatan teknologi pengolahan limbah dapat membantu mengatasi tantangan ini.

Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem dan gangguan ekosistem juga merupakan masalah penting. Emisi gas rumah kaca dari berbagai aktivitas, bersama dengan deforestasi dan polusi, turut berkontribusi pada masalah ini. Ketergantungan pada bahan bakar fosil dan kurangnya penggunaan sumber energi terbarukan memperburuk dampak perubahan iklim. Variabilitas iklim alami dan kebijakan iklim yang perlu diperkuat juga menjadi bagian dari tantangan ini.

Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan menghadapi tantangan karena penegakan hukum lingkungan yang perlu diperkuat dan infrastruktur pemantauan yang mungkin belum optimal. Ketidakpatuhan dalam industri, serta bencana alam yang dapat menyebarkan polutan, berkontribusi pada tantangan ini. Peningkatan kebijakan dan penegakan hukum, serta teknologi pengendalian pencemaran, akan sangat membantu dalam memperbaiki situasi ini.

Penurunan kualitas air dan tanah sering kali berkaitan dengan penanganan limbah dan sampah yang belum optimal, serta fasilitas pengolahan limbah yang perlu ditingkatkan. Praktik pembuangan limbah yang tidak tepat, pencemaran tanah dan air, serta kebijakan yang perlu diperkuat, menjadi bagian dari permasalahan ini. Peningkatan teknologi pengolahan limbah dan pengelolaan yang lebih baik dapat mendukung perbaikan kualitas air dan tanah.

Penurunan persentase tutupan lahan disebabkan oleh konversi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Deforestasi yang terjadi untuk kebutuhan pertanian dan penebangan hutan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan erosi tanah. Kebijakan penggunaan lahan dan praktik pertanian yang berkelanjutan perlu diperkuat untuk mengatasi masalah ini.

Keterbatasan penggunaan energi baru terbarukan sering kali disebabkan oleh biaya awal yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Resistensi terhadap perubahan dan kurangnya insentif untuk penggunaan energi terbarukan turut menjadi tantangan. Peningkatan kebijakan dan dukungan untuk teknologi energi terbarukan akan membantu mengatasi keterbatasan ini.

Implementasi pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular yang belum optimal disebabkan oleh kebutuhan akan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung, serta rendahnya kesadaran publik. Kurangnya pengetahuan dan resistensi terhadap perubahan, serta biaya awal yang tinggi, menjadi faktor yang mempengaruhi transisi ini. Dukungan kebijakan yang lebih kuat dan inovasi dalam ekonomi sirkular akan membantu mengatasi tantangan ini.

Pertumbuhan populasi dan gaya hidup konsumtif menyebabkan peningkatan volume sampah yang signifikan. Konsumerisme yang tinggi dan infrastruktur daur ulang yang belum memadai menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada masalah ini. Peningkatan kebiasaan konsumsi, penanganan sampah yang lebih baik, dan regulasi yang lebih ketat akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan ini.

Sistem pengelolaan sampah yang belum optimal sering kali disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai dan kesadaran publik yang perlu ditingkatkan. Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah dan dukungan kebijakan akan memperbaiki sistem pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup merupakan tantangan yang signifikan. Program edukasi yang lebih baik dan peningkatan kesadaran publik akan membantu mengatasi masalah ini. Pengetahuan yang lebih luas dan dukungan kebijakan yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan praktik pengelolaan lingkungan yang baik.

D. Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan yang belum optimal

Permasalahan utama terkait ketahanan air di Kabupaten Karo mencakup penyediaan air baku untuk kebutuhan dasar masyarakat dan sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Meskipun kapasitas air baku di wilayah ini mencapai 3,03 m³/detik, yang secara teoritis cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang hanya sekitar 200 liter/detik, pengelolaan air baku tetap menjadi tantangan besar. Efisiensi distribusi dan pengelolaan air baku perlu ditingkatkan agar kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Infrastruktur irigasi di Kabupaten Karo juga menghadapi masalah signifikan, dengan hanya 52,95% dari sistem irigasi dalam kondisi baik. Masalah ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran yang menghambat perawatan dan peningkatan infrastruktur. Alih fungsi lahan sawah menjadi

permukiman atau lahan pertanian kering turut menyebabkan berkurangnya ketersediaan air baku untuk irigasi. Perubahan fungsi lahan secara signifikan mengurangi kemampuan daerah tangkapan air untuk menyerap dan menyimpan air, sehingga mengurangi ketersediaan air untuk irigasi.

Pengelolaan air baku di Kabupaten Karo juga terkendala oleh kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan air. Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi tenaga pengelola air berdampak negatif pada efektivitas pengelolaan sumber daya air. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya air di daerah-daerah dengan masalah serupa. Keterbatasan teknologi pengelolaan dan distribusi air juga memperparah masalah ini. Teknologi irigasi yang ada sering kali usang atau tidak memadai untuk kebutuhan saat ini. Adopsi teknologi modern, seperti sistem irigasi pintar dan pemantauan real-time, dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi pengelolaan air dan mengurangi kehilangan air.

Manajemen pengelolaan air baku menghadapi tantangan besar, dengan kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab dan tidak adanya strategi pengelolaan air yang komprehensif dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem pengelolaan air yang efektif dan efisien.

Fluktuasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan ketidakstabilan dalam ketahanan pangan. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim yang mempengaruhi produksi pangan, serta variasi dalam kebijakan. Konflik dan bencana alam juga berkontribusi terhadap penurunan ketahanan pangan. Secara keseluruhan, meskipun mengalami fluktuasi, IKP Kabupaten Karo tetap berada pada kategori yang cukup baik. Upaya peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk memastikan stabilitas pangan di Kabupaten Karo.

Kurangnya keberagaman pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat merupakan masalah yang perlu diatasi. Masyarakat cenderung mengonsumsi pangan yang kurang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menurunkan ketahanan pangan, kurangnya pemahaman ini juga dapat mengakibatkan kualitas gizi dan kesehatan yang buruk. Akses yang terbatas dan pengetahuan yang rendah tentang pentingnya variasi pangan adalah faktor utama yang mempengaruhi situasi ini. Edukasi dan program penyuluhan untuk meningkatkan variasi dan kualitas pangan yang dikonsumsi sangat diperlukan.

Pengawasan terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan serta mengurangi risiko kesehatan bagi konsumen. Pengawasan yang ketat dan sistematis terhadap keamanan pangan sangat penting untuk mencegah kontaminasi dan risiko kesehatan. Kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk pengawasan pangan juga harus diperhatikan. Untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, serta memastikan ketahanan air dan energi yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan yang stabil, peningkatan akses dan distribusi pangan dan air, edukasi masyarakat, serta pengawasan yang lebih baik terhadap pangan segar. Implementasi program-program yang berfokus pada edukasi dan pengawasan serta peningkatan infrastruktur dapat membantu mengatasi masalah ini secara efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang, edukasi, dan pengawasan yang ketat, serta peningkatan teknologi dan koordinasi antar lembaga untuk mencapai ketahanan yang berkelanjutan di berbagai sektor.

E. Rendahnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Kabupaten Karo menghadapi tantangan besar terkait tingginya risiko bencana. Pada tahun 2023, dengan Indeks Risiko Bencana mencapai 111,2 poin menunjukkan bahwa Kabupaten Karo berada pada kategori risiko bencana yang tinggi, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang dapat dikategorikan ke dalam bahaya bencana alam dan ketahanan daerah yang perlu ditingkatkan.

Bahaya bencana alam di Kabupaten Karo sangat beragam, meliputi letusan gunung api, longsor, banjir, dan angin puting beliung. Aktivitas vulkanik di Gunung Sinabung, yang sering mengalami erupsi membawa abu vulkanik yang berdampak pada kesehatan, pertanian, dan infrastruktur. Longsor menjadi ancaman serius karena struktur tanah di daerah perbukitan rentan terhadap pergerakan tanah, terutama setelah hujan deras atau gempa bumi. Curah hujan yang tinggi tanpa sistem drainase yang memadai sering menyebabkan banjir di permukiman. Selain itu, penggundulan hutan mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, memperburuk risiko banjir. Perubahan iklim global juga meningkatkan frekuensi dan intensitas angin puting beliung, yang dapat merusak bangunan, mengganggu listrik, dan menyebabkan cedera atau kerugian lainnya.

Ketahanan daerah terhadap bencana di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan, meskipun dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, regulasi yang masih perlu dioptimalkan, kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) yang lebih terlatih, dan keterbatasan infrastruktur penanggulangan bencana. Anggaran pemerintah daerah yang ada belum dapat sepenuhnya mencakup semua kebutuhan penanggulangan bencana, termasuk mitigasi dan pemulihan. Kebijakan dan regulasi yang ada perlu terus diperbaiki dan diterapkan dengan lebih efektif untuk mengurangi risiko bencana secara signifikan. Pengembangan dan pelatihan lebih banyak tenaga ahli dalam manajemen bencana sangat penting untuk meningkatkan respons yang lebih cepat dan efektif saat terjadi bencana. Selain itu, peningkatan fasilitas dan peralatan penanggulangan bencana, seperti tempat penampungan darurat, alat komunikasi, dan kendaraan evakuasi, diperlukan untuk mendukung upaya mitigasi dan respons bencana.

Secara keseluruhan, kombinasi antara bahaya bencana alam yang tinggi dan ketahanan daerah yang perlu ditingkatkan menciptakan risiko bencana yang signifikan di Kabupaten Karo. Upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana harus difokuskan pada peningkatan alokasi anggaran, penguatan regulasi dan pelaksanaannya, pelatihan lebih banyak personel dalam manajemen bencana, serta peningkatan dan perluasan infrastruktur penanggulangan bencana. Dengan demikian, Kabupaten Karo dapat lebih baik dalam menghadapi dan mengurangi dampak dari berbagai bencana alam.

Permasalahan pembangunan kewilayahan yang belum merata dan berkeadilan diharapkan dapat ditangani dengan peningkatan kualitas dan efisiensi infrastruktur dengan cara 1) Peningkatan kualitas jalan melalui perbaikan dan pemeliharaan jalan yang berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi yang tepat dalam pembangunan jalan, seperti aspal yang tahan lama; 2) Peningkatan sistem drainase melalui pembenahan sistem drainase untuk mencegah banjir dan dampak negatif lainnya; dan 3) Perbaikan sistem penerangan melalui peningkatan kualitas dan efisiensi sistem penerangan jalan umum untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

F. Pembangunan kewilayahan yang belum merata dan berkeadilan

Kabupaten Karo menghadapi tantangan dalam mengkoordinasikan pembangunan di 269 desa dan kelurahan. Koordinasi yang efektif memerlukan sistem manajemen yang memadai dan koordinasi yang jelas

antara berbagai tingkat pemerintahan dan sektor. Pentingnya struktur manajemen yang terorganisir dan komunikasi yang efektif dalam memastikan pembangunan yang merata menjadi perhatian. Desa-desa dan kelurahan yang belum mendapatkan perhatian yang cukup dapat tertinggal dalam hal infrastruktur dasar dan layanan publik.

Meningkatkan perekonomian di setiap wilayah merupakan tantangan karena ketidakmerataan kesempatan ekonomi. Beberapa wilayah mengalami keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi dan investasi. Hal ini dipengaruhi oleh ketergantungan antara wilayah pusat dan perifer, di mana sumber daya lebih terkonsentrasi di wilayah pusat seperti Kabanjahe dan Berastagi. Sumber daya ekonomi, peluang usaha, dan investasi cenderung terkonsentrasi di wilayah pusat, menyebabkan wilayah perifer memiliki sedikit kesempatan untuk berkembang. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah yang memiliki akses lebih baik dengan wilayah yang kurang terfasilitasi.

Kesenjangan antar wilayah, terutama antara wilayah yang jauh dari pusat kota seperti Kabanjahe dan Berastagi, menjadi salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan. Kebijakan pembangunan yang perlu lebih adil dan inklusif adalah kunci untuk mengatasi ketimpangan ini. Wilayah perkotaan sering kali menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sementara daerah pinggiran memerlukan perhatian lebih. Pertumbuhan ekonomi yang terpusat di kota-kota besar mengakibatkan wilayah yang jauh dari pusat kota memerlukan perencanaan pembangunan yang lebih inklusif dan adil. Sehubungan dengan kesenjangan tersebut, peningkatan kualitas jalan, peningkatan system drainase dan juga fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan seperti lampu penerangan jalan harus ditingkatkan ke daerah-daerah yang tertinggal.

Ketersediaan infrastruktur yang tidak merata merupakan faktor yang memerlukan perhatian untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Alokasi anggaran yang proporsional dan prioritas pembangunan yang merata dapat membantu mengatasi ketidakmerataan ini. Infrastruktur yang belum memadai di beberapa wilayah memerlukan peningkatan agar akses terhadap layanan dan fasilitas penting dapat terwujud. Jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik di seluruh daerah akan mengakselerasi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur yang merata sangat penting untuk memastikan bahwa semua wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.

Wilayah perkotaan di Kabupaten Karo memiliki peluang ekonomi yang lebih baik dibandingkan wilayah pedesaan, terutama dalam hal ketersediaan lapangan kerja. Konsentrasi industri dan bisnis di wilayah perkotaan serta perlunya pengembangan sektor ekonomi di wilayah pedesaan menjadi perhatian untuk mengatasi ketidakmerataan ini. Kebijakan ekonomi yang lebih merata dapat menguntungkan seluruh wilayah, mencegah migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan memastikan bahwa wilayah pedesaan juga berkembang dengan baik. Pengembangan sektor ekonomi di wilayah pedesaan perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha yang lebih merata.

G. Pembangunan sarana dan prasarana yang belum optimal

Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Karo merupakan fondasi penting dalam mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini. Masih banyak daerah di Kabupaten Karo yang belum memiliki akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana penting seperti pendidikan, kesehatan, jalan, sanitasi, air minum, listrik, telekomunikasi, pengelolaan sampah, dan perumahan. Beberapa kebijakan pemerataan yang

ada masih perlu ditingkatkan, dan anggaran serta sumber daya manusia yang ada masih memerlukan optimalisasi. Selain itu, infrastruktur yang sudah ada kadang mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan lebih lanjut. Distribusi infrastruktur yang belum merata seringkali disebabkan oleh kebijakan yang memerlukan penyesuaian agar lebih mendukung daerah rural dan mengurangi fokus pembangunan yang terlalu terkonsentrasi di perkotaan. Kurangnya infrastruktur dasar di daerah terpencil juga memerlukan perencanaan yang lebih berbasis data yang akurat.

Anggaran yang tersedia memerlukan penyesuaian agar mencukupi untuk membangun dan merawat infrastruktur yang ada. Hal ini disebabkan oleh pendapatan daerah yang dapat lebih ditingkatkan, serta masih adanya ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga terus ditingkatkan untuk menghindari pemborosan dan penggunaan yang tidak optimal. Keterbatasan anggaran sering kali disebabkan oleh basis pajak lokal yang perlu diperkuat dan rendahnya partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur. Peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik adalah salah satu upaya penting yang sedang dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas alokasi anggaran bagi infrastruktur.

Proses memperoleh lahan untuk pembangunan juga memerlukan perhatian khusus, karena harga lahan yang tinggi dan adanya konflik lahan dengan masyarakat dapat menjadi tantangan. Komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat setempat sedang diupayakan untuk mengatasi konflik lahan. Proses administrasi yang rumit dan memerlukan transparansi lebih lanjut juga sedang disederhanakan untuk mempercepat akuisisi lahan bagi pembangunan infrastruktur.

Penerapan teknologi dan inovasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur terus diupayakan agar lebih optimal. Pengetahuan dan keterampilan tentang teknologi baru sedang ditingkatkan melalui berbagai program pelatihan, dan upaya untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan serta biaya implementasi teknologi yang tinggi sedang diintensifkan. Investasi dalam teknologi modern diharapkan dapat mengurangi biaya pemeliharaan infrastruktur. Pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja menjadi kunci dalam mengoptimalkan penerapan teknologi dalam pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan. Praktik pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan regulasi lingkungan yang ketat sedang diterapkan untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan.

Lembaga yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur terus berupaya meningkatkan koordinasi antar lembaga, kompetensi sumber daya manusia, dan efisiensi struktur organisasi. Koordinasi yang lebih efektif antar lembaga sangat penting untuk keberhasilan proyek infrastruktur. Pelatihan dan pengembangan kapasitas institusional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas lembaga yang bertanggung jawab atas infrastruktur.

H. Pembangunan yang berkesinambungan belum dilaksanakan secara optimal

Kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sarana dan prasarana yang memadai merupakan tulang punggung bagi pengoptimalan PAD. Di Kabupaten Karo, terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan perawatan sarana prasarana, serta proses pengadaan yang masih memerlukan perbaikan, menjadi tantangan utama. Inefisiensi birokrasi juga turut memengaruhi kondisi ini. Akibatnya, infrastruktur yang seharusnya

mendukung pengumpulan PAD tidak dapat berfungsi dengan optimal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan PAD yang efektif memerlukan petugas yang kompeten dan terlatih. Namun, di Kabupaten Karo, terdapat kekurangan dalam hal pelatihan dan pengembangan SDM, rekrutmen yang perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan, serta motivasi dan insentif bagi petugas yang masih perlu ditingkatkan. Kualitas dan kuantitas petugas yang perlu ditingkatkan menyebabkan pengelolaan PAD belum maksimal.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di Kabupaten Karo masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta pengawasan dan penegakan hukum yang perlu diperkuat. Rendahnya kesadaran ini berdampak langsung pada rendahnya penerimaan PAD dari sektor pajak.

Penegakan peraturan daerah terkait pajak dan retribusi di Kabupaten Karo masih perlu dioptimalkan. Tantangan seperti sanksi yang belum cukup tegas, koordinasi antar instansi terkait yang perlu ditingkatkan, serta sumber daya untuk penegakan hukum yang terbatas menjadi beberapa hambatan. Desentralisasi yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas di tingkat lokal dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam penegakan peraturan, sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pajak dan retribusi.

Proses legislasi yang lambat, kurangnya pemahaman pembuat kebijakan terhadap kebutuhan daerah, serta regulasi yang perlu diperbarui menjadi kendala utama dalam pengelolaan pajak dan retribusi di Kabupaten Karo. Regulasi yang belum memadai menghambat upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan dari pajak dan retribusi.

Kurangnya media komunikasi yang efektif, strategi sosialisasi yang perlu disesuaikan, serta dana untuk kampanye informasi yang terbatas menjadi faktor penghambat dalam penyebaran informasi tentang peraturan dan regulasi pajak serta retribusi daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Kurangnya informasi membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami kewajiban pajak dan retribusi mereka, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan.

Komunikasi yang perlu ditingkatkan antara instansi, tidak adanya forum rutin untuk koordinasi, serta perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan menyebabkan koordinasi dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Karo menjadi kurang optimal. Koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Tanpa koordinasi yang baik, upaya pengelolaan PAD menjadi kurang efisien dan tidak terarah.

Birokrasi yang perlu ditingkatkan efisiensinya di Kabupaten Karo memperlambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Struktur pemerintahan yang kompleks, perlunya sistem pengawasan yang lebih baik, serta peningkatan akuntabilitas di tingkat lokal menjadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Peningkatan efisiensi birokrasi akan membantu mengoptimalkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan PAD dan kemandirian daerah.

Manajemen keuangan daerah yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Karo ditandai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas dan pengetahuan di bidang manajemen keuangan, pelatihan yang lebih intensif, serta pemahaman yang lebih baik tentang anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan aset. Peningkatan kapasitas dalam manajemen keuangan daerah akan mendukung otonomi dan efisiensi fiskal.

Desentralisasi yang belum sepenuhnya optimal di Kabupaten Karo menyebabkan ketergantungan yang berkelanjutan pada pemerintah pusat. Desentralisasi yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas di tingkat lokal menyebabkan inefisiensi dan kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan sumber daya manusia dan finansial yang memadai di daerah akan memperbaiki kondisi ini.

Infrastruktur teknologi informasi yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Karo menghambat efisiensi operasional dan pengelolaan data yang penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik. Peningkatan infrastruktur TIK akan mendukung banyak inisiatif untuk meningkatkan PAD dan kemandirian daerah.

Pengelolaan sumber daya alam yang perlu dioptimalkan di Kabupaten Karo disebabkan oleh perlunya aturan yang lebih jelas, pengawasan yang lebih baik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pengelolaan sumber daya alam yang baik memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan aturan yang jelas untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan optimal. Pengelolaan yang lebih baik akan berdampak positif pada penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis berbeda dengan permasalahan pembangunan dimana isu strategis lebih fokus ke masa depan yaitu sesuatu yang belum menjadi masalah namun jika tidak ada tindakan dapat menjadi masalah. Dilain sisi bukan hanya potensi permasalahan tetapi potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan juga dapat dijadikan isu strategis.

Untuk penyajian isu strategis akan diurutkan berdasarkan skalanya yaitu isu strategis global, nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten sebagai berikut:

2.3.2.1. Isu Global

Isu global yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Karo ialah sebagai berikut:

1) Krisis Lingkungan Global (*Triple Planetary Crisis*)

Krisis Lingkungan Global, yang dikenal sebagai *Triple Planetary Crisis*, mencakup tiga tantangan utama yang saling terkait perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi lingkungan. Ketiga krisis ini saling memperkuat dampaknya, menciptakan ancaman serius terhadap keberlanjutan kehidupan di Bumi. Perubahan Iklim menjadi salah satu aspek paling menonjol dari krisis ini. Emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, menyebabkan peningkatan suhu global. Hal ini berdampak pada pola cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan ancaman terhadap ekosistem yang ada.

Hilangnya Keanekaragaman Hayati juga menjadi perhatian utama. Perubahan iklim mempercepat kepunahan spesies karena banyak organisme tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi lingkungan yang berubah. Selain itu, aktivitas manusia seperti perburuan liar, deforestasi, dan perubahan penggunaan lahan menyebabkan hilangnya habitat alami flora dan fauna.

Polusi Lingkungan, baik udara, air, maupun tanah, memperburuk kondisi ekosistem dan kesehatan manusia. Polusi udara, misalnya, berkontribusi terhadap penyakit pernapasan dan kardiovaskular, sementara polusi air dan tanah mengancam ketersediaan air bersih dan keamanan

pangan. Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam menghadapi krisis ini. Pada tahun 2024, pemerintah berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 147,61 juta ton CO₂, melampaui target yang ditetapkan sebesar 142 juta ton CO₂. Selain itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia mencapai skor 72,54 poin pada tahun 2023, menunjukkan peningkatan kualitas lingkungan secara nasional. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan iklim, pengelolaan polusi, dan pelestarian keanekaragaman hayati. Kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan komunitas internasional sangat penting untuk mengatasi krisis ini secara efektif.

2) Ketidakpastian dan Ketegangan Geopolitik Global

Ketidakpastian dan ketegangan geopolitik global telah menjadi faktor dominan yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keamanan internasional pada tahun 2025. Konflik bersenjata seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik Israel-Hamas, telah mengganggu pasokan energi dan pangan global, menyebabkan lonjakan harga dan inflasi di berbagai negara. Selain itu, rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, terutama terkait Selat Taiwan, semakin memperburuk ketegangan regional dan mengancam stabilitas jalur perdagangan internasional.

Dampak dari ketegangan ini tidak hanya terbatas pada aspek geopolitik, tetapi juga berdampak langsung pada ketahanan energi dan pangan nasional. Krisis energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah dan ketergantungan pada impor bahan bakar fosil menimbulkan risiko terhadap keamanan energi Indonesia. Demikian pula, gangguan pada rantai pasok global akibat konflik bersenjata dan proteksionisme berdampak pada stabilitas makroekonomi dan ketahanan pangan nasional. Dalam menghadapi dinamika global yang kompleks ini, Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memperkuat posisi dan pengaruhnya di kancah internasional. Menurut Lowy Institute Asia Power Index 2024, Indonesia mengalami peningkatan skor sebesar 2,9 poin, menjadikannya negara dengan peningkatan terbesar dalam indeks tersebut. Peningkatan ini mencerminkan upaya Indonesia dalam memperkuat sumber daya masa depan dan kapasitas diplomasi ekonomi. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat ke-13 dalam Global Firepower Index 2024, menunjukkan peningkatan kapasitas militer sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.

Dalam konteks diplomasi ekonomi, Indonesia aktif menjalin kerja sama dengan berbagai negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Langkah ini sejalan dengan strategi Indonesia untuk mendiversifikasi mitra ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada satu blok kekuatan global.

3) Transformasi Teknologi dan Kompetisi Ekonomi Digital

Transformasi teknologi dan kompetisi ekonomi digital telah menjadi pilar utama dalam dinamika global saat ini. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk adopsi kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), dan komputasi awan, telah mengubah lanskap ekonomi dan sosial di berbagai negara. Negara-negara berlomba untuk meningkatkan daya saing digital mereka guna memperoleh keunggulan dalam ekonomi berbasis pengetahuan.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi besar, telah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan daya saing digitalnya. Menurut laporan East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2023, skor daya saing digital Indonesia meningkat dari 27,9 pada 2020 menjadi 38,5 pada 2023, menunjukkan tren positif dalam pengembangan infrastruktur digital, literasi digital, dan inovasi teknologi di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan peningkatan peringkat daya saing digital Indonesia dari posisi 43 pada 2023 menjadi 40 pada 2029, sebagai bagian dari upaya

strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Namun, peningkatan konektivitas digital juga membawa tantangan baru dalam bentuk ancaman keamanan siber. Serangan siber yang semakin kompleks dan canggih menuntut negara untuk memperkuat sistem pertahanan digitalnya. Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam insiden serangan siber, dengan sekitar 42.000 serangan per hari, menjadikannya salah satu target utama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons, pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menginisiasi pembentukan 121 Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber (Computer Security Incident Response Teams/CSIRT) dan meluncurkan program Intelijen Ancaman Siber (Cyber Threat Intelligence Program) untuk memperkuat ketahanan siber nasional. Peningkatan kapasitas keamanan siber juga tercermin dalam peringkat Indonesia dalam National Cyber Security Index (NCSI), di mana Indonesia naik ke posisi ke-49 secara global dengan skor 63,64 pada 2023, meningkat dari peringkat ke-83 pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, tantangan masih ada, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keamanan siber, mengatasi kekurangan tenaga ahli di bidang ini, dan memperkuat kerangka regulasi yang ada.

Dalam konteks global, transformasi teknologi dan kompetisi ekonomi digital menuntut negara untuk tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur dan adopsi teknologi, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, penguatan regulasi, dan kolaborasi internasional. Indonesia, melalui berbagai inisiatif strategis dan kebijakan yang terintegrasi, berupaya untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga sebagai inovator dan pemimpin dalam ekonomi digital global.

4) Ketidaksetaraan Sosial dan Mobilitas Penduduk Secara Global

Ketidaksetaraan sosial dan mobilitas penduduk secara global merupakan isu yang semakin kompleks di era globalisasi, dengan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Mobilitas tenaga kerja lintas negara, baik yang terampil maupun tidak, telah meningkat seiring dengan kebutuhan pasar global. Namun, peningkatan ini tidak selalu diiringi dengan perlindungan hak-hak pekerja migran, yang sering kali menghadapi diskriminasi, eksploitasi, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Ketidaksetaraan sosial dan mobilitas penduduk global telah menjadi tantangan yang semakin kompleks di era modern, dengan dampak signifikan terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu manifestasi nyata dari dinamika ini adalah kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia, khususnya Provinsi Aceh.

Menurut data dari UNHCR, pada tahun 2023, Indonesia mencatat kedatangan 2.288 pengungsi Rohingya melalui jalur laut, menjadikannya tahun dengan jumlah kedatangan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini berlanjut pada tahun 2024, di mana hingga Mei, tercatat 15 kapal membawa 2.026 pengungsi Rohingya tiba di Aceh dan Sumatera Utara. Sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, yang menyoroti kerentanan kelompok ini dalam situasi pengungsian. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menangani situasi ini, termasuk bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM dalam menyediakan tempat penampungan sementara dan bantuan kemanusiaan. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam memastikan integrasi sosial pengungsi dan mencegah konflik dengan masyarakat lokal. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tekanan untuk menyelaraskan kebijakan nasionalnya dengan standar internasional terkait perlindungan pengungsi, meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Dalam konteks yang lebih luas, isu pengungsi Rohingya di Indonesia mencerminkan ketidaksetaraan global dalam menangani krisis pengungsian. Negara-negara berkembang sering kali menjadi tujuan utama bagi pengungsi, meskipun memiliki kapasitas terbatas untuk menampung dan memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional yang lebih kuat untuk berbagi tanggung jawab dan memastikan bahwa hak-hak pengungsi dihormati di mana pun mereka berada.

5) Kergantungan Energi Fosil dan Transisi Energi

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil, seperti batu bara dan minyak bumi, telah menimbulkan tantangan serius dalam konteks perubahan iklim global dan ketahanan energi nasional. Sektor energi menyumbang lebih dari 30% emisi gas rumah kaca (GRK) nasional, menjadikannya kontributor utama terhadap pemanasan global. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius dalam transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis adalah peningkatan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Meskipun pada tahun 2023 realisasi EBT baru mencapai 13,1%, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan hingga mencapai 23% pada tahun 2025. Namun, pencapaian ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebutuhan investasi besar dan pengembangan infrastruktur yang memadai.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan biofuel sebagai alternatif energi bersih. Program biodiesel B35 telah diterapkan secara nasional pada Agustus 2023, dengan rencana peningkatan menjadi B40 pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi biodiesel hingga 13 miliar liter, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan mendukung industri kelapa sawit domestik.

Efisiensi energi juga menjadi prioritas nasional dalam upaya menurunkan intensitas energi dan emisi GRK. Pemerintah menargetkan penurunan konsumsi energi final sebesar 17% dibandingkan skenario business as usual pada tahun 2025, serta penurunan intensitas energi final sebesar 1% per tahun. Implementasi program efisiensi energi di sektor industri dan transportasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi nasional. Namun, transisi energi ini tidak lepas dari tantangan, termasuk kebutuhan investasi yang besar, resistensi dari industri energi fosil, dan perlunya dukungan kebijakan yang konsisten. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan keberhasilan transisi menuju sistem energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan berketahanan.

6) Ketidakpastian Ekonomi dan Perdagangan Global

Ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global telah menjadi tantangan signifikan bagi perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Salah satu faktor utama yang memicu ketidakpastian ini adalah kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Pada April 2025, Trump memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk hampir semua barang impor ke AS, dengan tambahan tarif hingga 32% untuk negara-negara tertentu, termasuk Indonesia. Langkah ini memicu ketegangan dagang internasional dan memperburuk kondisi perdagangan global.

Perang dagang antara negara-negara besar, seperti AS dan China, telah menciptakan ketidakpastian yang luas dalam ekonomi global. Ketegangan ini menyebabkan gangguan pada rantai pasokan internasional, peningkatan biaya produksi, dan penurunan investasi global. Menurut laporan UNCTAD, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat menjadi 2,3% pada tahun 2025 akibat dampak perang dagang.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia telah mengadopsi strategi diplomasi ekonomi yang adaptif dan strategis. Pemerintah berupaya memperkuat kerja sama internasional melalui forum multilateral seperti WTO, G20, dan APEC, serta menjalin kemitraan strategis dengan negaranegara mitra dagang utama. Selain itu, Indonesia juga fokus pada diversifikasi pasar ekspor dan peningkatan daya saing produk domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang terdampak oleh kebijakan proteksionis.

Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Dengan diplomasi ekonomi yang proaktif dan kebijakan perdagangan yang fleksibel, Indonesia berupaya mengatasi tantangan global dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam dinamika perdagangan internasional.

7) Peningkatan Risiko Bencana Global

Peningkatan risiko bencana global, baik yang bersifat alamiah maupun non-alamiah, telah menjadi tantangan signifikan bagi ketahanan nasional Indonesia. Perubahan iklim telah menyebabkan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan meningkat secara signifikan. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terjadi lebih dari 3.000 kejadian bencana di Indonesia, dengan dampak yang meluas pada sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia telah memperkuat sistem deteksi dini dan respons krisis melalui pengembangan teknologi dan peningkatan kapasitas institusi terkait. Implementasi sistem peringatan dini berbasis teknologi, seperti Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), telah ditingkatkan untuk memberikan informasi yang lebih akurat dan cepat kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan dan simulasi bencana secara rutin dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan aparat terkait.

Dalam konteks keamanan non-tradisional, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam penanggulangan terorisme. Menurut *Global Terrorism Index* (GTI) 2024, Indonesia berada pada peringkat ke-31 dengan kategori dampak terorisme rendah, mencerminkan efektivitas strategi nasional dalam mengurangi ancaman terorisme. Namun, tantangan tetap ada dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Indeks *Fragile States Index* (FSI) 2024 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-102 dengan skor 63,7, menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, skor ini masih mencerminkan kerentanan dalam aspek-aspek tertentu seperti tekanan demografis dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan ketahanan institusional dan sosial. Keamanan maritim juga menjadi perhatian utama, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas. Ancaman seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah perairan memerlukan respons yang komprehensif. Badan Keamanan Laut (Bakamla) telah meluncurkan Indeks Keamanan Laut Indonesia untuk memantau dan meningkatkan keamanan maritim secara sistematis.

2.3.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional yang dipertimbangkan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Karo ialah sebagai berikut:

a) Rendahnya Produktivitas

Produktivitas nasional Indonesia masih berada pada tingkat yang rendah di tengah meningkatnya persaingan global. Mengacu pada laporan *Asian Productivity Organization* (2024), pertumbuhan rata-rata produktivitas Indonesia yang diukur melalui indikator Total Factor Productivity (TFP)

selama periode 2015–2022 hanya mengalami peningkatan sebesar 60 basis poin dibandingkan periode sebelumnya (2010–2015), yakni dari -0,9 persen menjadi -0,3 persen. Capaian ini menunjukkan perbaikan yang sangat terbatas dan masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang pernah berada pada tahap transisi menuju negara maju. Sebagai perbandingan, Korea Selatan mampu mencatat pertumbuhan TFP sebesar 1,78 persen selama periode 1971–1995, sedangkan Tiongkok mencatat 2,12 persen pada kurun waktu 2005–2022.

Rendahnya produktivitas di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia—terutama pada kelompok perempuan, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, serta kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi yang belum memadai. Selain itu, kelembagaan yang belum kuat, seperti lemahnya sistem insentif, regulasi yang belum mendukung transformasi ekonomi, dan rendahnya kepastian hukum, turut memperburuk kondisi produktivitas nasional.

Secara khusus, produktivitas tenaga kerja perempuan masih tertinggal karena lingkungan kerja yang belum ramah gender. Hambatan utama yang dihadapi perempuan untuk masuk dan bertahan di pasar kerja antara lain adalah norma sosial budaya yang membebankan tanggung jawab domestik dan pengasuhan anak, kurangnya fleksibilitas jam kerja, serta minimnya akses terhadap layanan penitipan anak (*daycare*) yang berkualitas dan terjangkau. Dampak dari rendahnya produktivitas ini terlihat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada periode 2001–2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai rata-rata 5,7 persen. Namun, angka ini melambat menjadi 4,7 persen pada periode 2010–2015. Meskipun terjadi perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,0 persen selama 2015–2019 dan mencapai 5,05 persen pada tahun 2023, pertumbuhan tersebut tetap berada dalam kisaran yang stagnan.

Kondisi ini mencerminkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi potensial Indonesia, yang menyebabkan kesulitan untuk mencapai percepatan pertumbuhan yang lebih tinggi secara berkelanjutan. Untuk keluar dari stagnasi ini, peningkatan produktivitas harus menjadi agenda prioritas nasional dalam jangka menengah dan panjang.

b) Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Berdasarkan laporan Asian Productivity Organization (2024), tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) per pekerja pada tahun 2022 masih tergolong rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan Amerika Serikat yang mencapai US\$149.100 per pekerja, serta di bawah rata-rata kawasan ASEAN yang tercatat sebesar US\$40.200 per pekerja.

Rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Salah satu indikatornya terlihat dari hasil Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022, di mana skor rata-rata siswa Indonesia untuk seluruh aspek (membaca, matematika, dan sains) hanya sebesar 369,3. Skor ini menurun dari tahun 2018 yang berada di angka 382, dan masih jauh tertinggal dibandingkan dengan rata-rata skor negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) yang mencapai 488,33.

Tantangan pembangunan manusia unggul juga tercermin dari rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia, khususnya terkait kualifikasi pendidikan. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Agustus 2024, diketahui bahwa 52,32% angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (maksimal SMP/MTs atau sederajat), 34,82% merupakan lulusan pendidikan menengah (SMA/SMK atau sederajat), dan hanya 12,86%

yang memiliki pendidikan tinggi. Rendahnya kualifikasi pendidikan ini berimplikasi langsung terhadap struktur pasar tenaga kerja nasional. Hanya sekitar 41,23% pekerja yang terserap di bidang pekerjaan dengan keterampilan menengah hingga tinggi, sementara sisanya berada pada sektor dengan nilai tambah dan produktivitas yang lebih rendah.

Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Indonesia dalam mengejar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan investasi besar-besaran dan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik melalui pendidikan formal, pelatihan vokasional, pengembangan keterampilan, maupun perbaikan ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja nasional.

c) Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Kelompok calon kelas menengah kini menjadi bagian terbesar dalam struktur sosial ekonomi Indonesia. Selama periode 2019–2024, jumlahnya bertambah sebanyak 8,65 juta orang, sehingga mencapai 137,5 juta jiwa atau sekitar 49,2 persen dari total populasi nasional. Namun di sisi lain, terdapat kecenderungan yang mengkhawatirkan: jumlah masyarakat rentan miskin juga meningkat sebesar 12,72 juta jiwa dalam kurun waktu yang sama, mencapai 67,69 juta orang atau 24,33 persen dari populasi pada tahun 2024 (BPS, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi ekspansi pada kelompok calon kelas menengah dan rentan miskin, jumlah masyarakat kelas menengah justru mengalami penurunan. Pergeseran status ekonomi ini sebagian besar disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Hingga Agustus 2024, sebanyak 46.420 pekerja dilaporkan mengalami PHK (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024), dan angka ini diprediksi akan terus bertambah.

Salah satu pemicu utama dari meningkatnya PHK adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari tren deflasi pada beberapa kelompok harga. Berdasarkan laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak turun lebih drastis dari 3,04 persen menjadi 1,43 persen pada periode yang sama. Daya beli yang melemah berdampak langsung pada menurunnya permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan industri. Dalam kondisi tersebut, sektor usaha kesulitan menutup biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa pelaku usaha untuk mengurangi tenaga kerja atau bahkan menghentikan kegiatan usahanya sepenuhnya. Situasi ini menciptakan siklus ekonomi yang rentan, memperbesar risiko mobilitas menurun dari kelas menengah menjadi kelompok rentan, dan menantang upaya pencapaian pertumbuhan inklusif serta stabilitas sosial-ekonomi nasional.

d) Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Menurut data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Besarnya jumlah penduduk usia produktif ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya alam seperti pangan, energi, air, dan lahan.

Di samping itu, pemerintah juga dihadapkan pada kewajiban untuk menyediakan akses terhadap perlindungan sosial, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, serta menciptakan lapangan kerja yang memadai. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang besar dengan kapasitas pemenuhan layanan publik dan sumber daya yang terbatas berpotensi menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang lebih besar di masa depan.

Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kebutuhan penduduk dapat dipenuhi secara adil, efisien, dan inklusif, guna mendukung pencapaian kesejahteraan nasional dan stabilitas jangka panjang.

e) Krisis Lingkungan

Saat ini, dunia tengah menghadapi tiga krisis lingkungan utama (triple planetary crisis) yang secara serius mengancam masa depan bumi dan keberlangsungan hidup manusia, yaitu: perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (2022), sekitar 50–75 persen populasi global diproyeksikan akan terdampak oleh kondisi iklim ekstrem yang mengancam jiwa pada tahun 2100. Dampak ekonomi akibat risiko bencana di Indonesia diperkirakan mencapai Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), dengan jumlah korban jiwa akibat bencana selama satu dekade terakhir mencapai 9.176 orang (BNPB, 2024). Krisis biodiversitas juga menjadi perhatian serius. Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan saat ini berada dalam ancaman kepunahan (IPBES, 2019). Sementara itu, polusi udara telah menjadi salah satu penyebab utama penyakit dan kematian dini di dunia, dengan dampak kematian mencapai 4,2 juta jiwa setiap tahun (UNFCCC, 2022). Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di kawasan Asia Tenggara, terutama akibat konsentrasi particulate matter 2.5 (PM2.5) yang tinggi (WHO, 2021).

Di sisi lain, sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji menunjukkan tingkat pencemaran (BPS, 2022). Masalah sampah juga menjadi tantangan besar: pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan, dan diperkirakan akan mencapai 344 kg per kapita per tahun pada 2045 jika tidak ada intervensi (Report on Food Loss and Waste in Indonesia, 2021).

Krisis lingkungan juga berkaitan erat dengan krisis sumber daya alam. Dalam lima dekade terakhir, laju ekstraksi sumber daya alam global telah meningkat tiga kali lipat, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata lebih dari 2,3 persen. Indonesia, sebagai negara dengan tingkat ekstraksi tambang terbesar ke-8 di dunia (UNEP, 2023), turut menyumbang pada krisis ini. Kementerian ESDM (2022) mencatat terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan dan memperburuk degradasi ekosistem.

Pertumbuhan populasi yang pesat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan kelangkaan sumber daya seperti energi, air, dan pangan turut mendorong kompetisi global yang berpotensi menimbulkan konflik geopolitik.

Risiko triple planetary crisis ini membawa dampak besar terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran menuju aktivitas ekonomi rendah emisi gas rumah kaca, terutama di sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pertanian, pangan, limbah, serta penerapan ekonomi sirkular. Menyatukan agenda pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama demi menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

f) Geo Politik dan Geo Ekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan menjadi tantangan serius bagi seluruh negara, termasuk Indonesia. Eskalasi persaingan antarnegara besar serta kemunculan kekuatan-kekuatan baru telah memengaruhi konstelasi kawasan dan tatanan global, serta menuntut Indonesia untuk terus menyesuaikan peran dan sikapnya dalam hubungan internasional.

Salah satu contoh nyata dari ketegangan geopolitik adalah konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina, yang telah menimbulkan dampak luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Konflik ini telah memperbesar

kewaspadaan terhadap potensi krisis baru di berbagai kawasan seperti Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Dampaknya mencakup tekanan inflasi global, krisis energi dan pangan, serta meningkatnya belanja militer oleh banyak negara guna memperkuat kedaulatan nasional. Hal ini mendorong kemungkinan terjadinya konflik lanjutan yang dapat mengganggu stabilitas kawasan maupun global.

Kawasan Indo-Pasifik yang mencakup Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadi pusat perhatian baru karena proyeksinya sebagai poros pertumbuhan ekonomi global. Nilai strategis kawasan ini menimbulkan perebutan pengaruh antarnegara, baik yang berasal dari dalam maupun luar kawasan. Bagi Indonesia, dinamika ini menciptakan tantangan baru dalam menjaga stabilitas dan kepentingan nasional di tengah kompetisi geopolitik yang kian intens.

Ketidakstabilan geopolitik juga berdampak pada krisis energi dan pangan yang kemudian memicu ketidakpastian geoekonomi global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia oleh IMF (2024) menunjukkan perlambatan, dengan pertumbuhan sebesar 3,2 persen pada tahun 2024 dan 2025. Inflasi global juga diperkirakan menurun bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025. Namun, Indonesia tetap terpengaruh melalui saluran perdagangan dan keuangan global, termasuk fluktuasi nilai tukar, suku bunga global, dan kondisi pasar komoditas.

Suku bunga global yang tinggi diperkirakan akan bertahan dalam jangka menengah, meskipun ada pelonggaran oleh The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan terjadi secara serentak di banyak negara sejak paruh kedua 2023, termasuk oleh Bank of England dan negara-negara anggota G20 seperti Brasil, India, dan Indonesia. Tren ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi global dan meningkatkan risiko resesi.

Faktor-faktor lain seperti tekanan inflasi, penguatan dolar AS, perubahan pola konsumsi dari barang ke jasa, serta krisis pangan yang dipicu oleh kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi, turut berkontribusi terhadap perlambatan perdagangan global. Hal ini tercermin dari penurunan Baltic Dry Index menjadi rata-rata 1.393,56 poin pada 2023, jauh di bawah rata-rata 1.930,86 poin pada 2022. Volume perdagangan dunia juga mengalami penurunan setelah pertumbuhan pada 2021 dan 2022.

Dengan tantangan yang bersifat lintas batas dan kompleks tersebut, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas negara, serta arah kebijakan yang konsisten, adaptif, dan kuat guna mempercepat pemulihan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan dalam jangka menengah.

g) Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi tetap menjadi isu strategis yang memerlukan sinergi kuat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Upaya ini merupakan prasyarat utama untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta mendorong iklim investasi yang sehat. Keberhasilan dalam pemberantasan korupsi juga akan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi. Namun demikian, capaian terkini menunjukkan masih terdapat tantangan yang signifikan. Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia mengalami penurunan dari skor 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022, dan stagnan di angka yang sama pada tahun 2023, dengan menempati peringkat ke-115 dari 180 negara. Meskipun Indeks Perilaku Anti Korupsi sempat menunjukkan perbaikan selama periode 2019–2022, tren

tersebut mengalami hambatan pada tahun-tahun berikutnya, mencerminkan adanya risiko dalam menjaga momentum pemberantasan korupsi.

Selain itu, tantangan lain yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah penguatan tata kelola data nasional. Pengambilan keputusan pembangunan yang efektif, akurat, dan berkelanjutan sangat bergantung pada tersedianya data yang valid dan terkelola dengan baik. Namun, saat ini tingkat keamanan siber dan perlindungan privasi data pemerintah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi berbagai risiko, seperti peretasan, pembajakan, serta penyalahgunaan data dalam skala besar. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran hak privasi dan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan penguatan sistem keamanan informasi merupakan agenda krusial dalam RPJMN 2025–2029 guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berbasis data dalam mendukung transformasi pembangunan yang berkelanjutan.

2.3.2.3. Isu Strategis Provinsi Sumatera Utara

Isu Strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara dalam dirumuskan sebagai berikut:

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan Pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta *responsiveness*/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif.

Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal.

Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang

ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

B. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

C. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga.

Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup

merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba.

Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi. Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%. Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai.

Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

D. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Mebidangro (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum

mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

E. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan. Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan. Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan.

Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan *green waste* dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera.

Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian ekonomi langsung karena bencana, jumlah daerah bencana alam yang diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan peningkatan

kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

F. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

G. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan *core value*.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

2.3.2.4. Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan dalam KLHS RPJMD Kabupaten Karo

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Karo menyusun KLHS RPJMD guna mengidentifikasi dan menangani isu-isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Identifikasi isu-isu strategis ini penting untuk memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Karo tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karo disarikan dari analisis isu-isu pembangunan berkelanjutan yang dapat dilihat hubungan keterkaitan isu utama berdasarkan capaian TPB RPJMD dengan isu strategis RPJPN, isu strategis RPJPD/RPJMD Provinsi Sumatera Utara,

isu pokok RPPLH Provinsi Sumatera Utara, isu strategis RPJPD Kabupaten Karo dan isu kondisi umum wilayah.

Isu Strategis yang dihasilkan dari proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 terdiri dari 9 (sembilan) isu strategis, yaitu:

1. Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan;
2. Menekan indeks ketimpangan gender dan peningkatan pembangunan keluarga;
3. Pemenuhan jangkauan aksesibilitas secara merata (air minum, sanitasi, telekomunikasi, jalan, akses keuangan);
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Ketahanan bencana;
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dari multisektor (perbaikan struktur ekonomi, pariwisata, pertanian, industri/manufaktur, UMKM, tenaga kerja);
7. Layanan pendidikan berkualitas;
8. Transformasi digitalisasi tata kelola pemerintah; dan
9. Peningkatan layanan kesehatan.

2.3.2.5. Isu Strategis Kabupaten Karo

Isu strategis Kabupaten Karo dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

A. Pembangunan manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera.

Dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan masyarakat Sejahtera terlindungi. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, peningkatan kapasitas ketahanan kesehatan dan pemerataan kapasitas dan responsiveness system kesehatan di seluruh wilayah.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, perbaikan gizi masyarakat, dan transformasi perilaku hidup bersih dan sehat, promosi kesehatan yang inovatif serta pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui layanan yang inklusif dan berkualitas tinggi juga menjadi isu strategis penting. Keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, kurangnya tenaga medis yang terampil, dan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan merupakan tantangan utama di Kabupaten Karo. Akses universal terhadap layanan kesehatan berkualitas adalah salah satu tujuan utama di tingkat global. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta sistem kesehatan yang tangguh terhadap pandemi menjadi prioritas utama. Di Indonesia, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang inklusif dan berkualitas tinggi. Peningkatan fasilitas kesehatan dan penyuluhan kesehatan di pedesaan juga menjadi fokus utama. Solusi untuk Kabupaten Karo melibatkan peningkatan fasilitas kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan peningkatan pelatihan bagi tenaga medis untuk memberikan layanan yang lebih baik.

Sementara bidang pendidikan dihadapkan dengan tantangan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai standar untuk meningkatkan nilai asesmen nasional untuk literasi dan numerasi, peningkatan akses, mutu dan layanan pendidikan, peningkatan kompetensi sdm dan sarana prasarana pendukung serta persepsi masyarakat tentang literasi dan kearsipan, belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga serta kurangnya kualitas dan kuantitas pelatihan atlet di Kabupaten Karo. Selain itu, pentingnya pelaksanaan pemenuhan pendidikan

berkualitas yang merata, pengembangan inovasi pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan pedagogi modern (*Pedagogy, Technology, and Content Knowledge/PTCK*). Penguatan pendidikan dan pembinaan talenta pada bidang riset inovasi, seni budaya, dan olahraga serta penguatan karakter bangsa dan pemajuan kebudayaan yang mencakup pengembangan budaya literasi untuk mendukung kreativitas dan inovasi.

Dalam mewujudkan masyarakat Sejahtera dan terlindungi berfokus kepada penguatan perlindungan sosial yang adaptif melalui pemberdayaan ketahanan rumah tangga miskin dan rentan serta penguatan tata kelola data kesejahteraan sosial.

Kedepannya untuk optimalisasi perlindungan sosial akan menggunakan data kesejahteraan masyarakat menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional/DTSEN. Sesuai dengan Inpres 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dijelaskan bahwa terkait sasaran strategi penurunan Kemiskinan Ekstrem dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional/DTSEN untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat.

B. Peningkatan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi

Isu strategis terkait peningkatan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi antara lain peningkatan pertumbuhan industri, peningkatan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing dan perlindungan tenaga kerja, peningkatan daya saing produk UMKM melalui pemanfaatan IPTEKIN dan pengembangan kewirausahaan, peningkatan koperasi yang sehat dan peningkatan koperasi yang bergerak di sektor riil, peningkatan produksi pertanian serta perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan, pengembangan pertanian modern, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkualitas secara terpadu dan berkelanjutan, penerapan ekonomi hijau, peningkatan iklim investasi yang kondusif, peningkatan nilai ekspor/perdagangan, peningkatan fasilitas dan pengelolaan pasar serta pelestarian budaya sebagai karakter masyarakat.

Diversifikasi ekonomi dan penguatan sektor produktif menjadi isu strategis yang penting untuk Kabupaten Karo karena ketergantungan yang tinggi pada sektor-sektor ekonomi yang rentan terhadap perubahan eksternal dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Tantangan lokal seperti fluktuasi pertumbuhan ekonomi, produktivitas pertanian yang belum optimal, dan kontribusi sektor industri pengolahan yang masih perlu ditingkatkan menunjukkan perlunya pengembangan sektor-sektor lain seperti industri pengolahan dan ekonomi kreatif. Penguatan sektor koperasi dan UMKM serta optimalisasi sektor pariwisata juga penting. Jika tidak ditangani, ketergantungan ini dapat menyebabkan penurunan daya saing ekonomi dan peningkatan risiko ekonomi akibat perubahan eksternal. Isu global seperti perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian dan tren global menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi serta program nasional untuk ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Tanpa diversifikasi, Kabupaten Karo berisiko mengalami stagnasi ekonomi dan kehilangan peluang pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Penguatan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia merupakan isu strategis penting karena infrastruktur yang kurang memadai dan kualitas SDM yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tantangan lokal seperti kurangnya infrastruktur kesehatan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang belum optimal, perlu diatasi. Jika tidak,

Kabupaten Karo akan menghadapi kesulitan dalam menangani krisis kesehatan dan bencana, serta tidak mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Isu global seperti pandemi dan perubahan iklim, serta kebutuhan global akan tenaga kerja yang lebih terampil, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dan SDM. Di tingkat nasional, program peningkatan layanan kesehatan, sistem kesehatan, serta kualitas pendidikan dan pelatihan vokasional mendukung kebutuhan ini. Tanpa penguatan infrastruktur dan SDM, Kabupaten Karo berisiko mengalami penurunan kualitas hidup dan daya saing yang lebih rendah dalam ekonomi global.

Peningkatan infrastruktur konektivitas digital yang inklusif menjadi prioritas utama di Kabupaten Karo. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua wilayah, termasuk daerah terpencil dan terpinggirkan, memiliki akses yang memadai ke layanan digital. Untuk mencapai hal ini, peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur digital sangat diperlukan, disertai dengan perencanaan strategis yang memastikan distribusi yang merata dan kolaborasi antara pemerintah serta sektor swasta. Isu ini sejalan dengan strategi global yang menekankan akses internet universal dan menangani kesenjangan digital, serta strategi nasional seperti Program Palapa Ring dan Gerakan 100 Smart City. Saat ini, tantangan lokal yang dihadapi termasuk keterbatasan anggaran dan investasi, serta distribusi akses internet yang tidak merata antara wilayah pusat dan pinggiran.

Selain itu, pengelolaan ekosistem digital yang efektif dan berkelanjutan menjadi fokus penting. Ini melibatkan penerapan praktik tata kelola terbaik, mendorong inovasi, dan membangun kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks global, banyak negara yang menekankan tata kelola yang baik dan pengelolaan sumber daya digital yang berkelanjutan. Di tingkat nasional, regulasi digital seperti UU ITE dan program pengembangan SDM menjadi prioritas. Namun, di tingkat lokal, Kabupaten Karo menghadapi tantangan berupa keterbatasan program pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM, serta regulasi yang tidak mendukung inovasi dan fleksibilitas dalam pengelolaan ekosistem digital.

Pengadopsian dan pengembangan teknologi terbaru yang adaptif juga merupakan strategi penting. Ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan produktivitas dengan mengalokasikan dana yang fokus pada prioritas teknologi, memberikan insentif untuk investasi dalam teknologi terbaru, dan menjalankan program edukasi untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Di tingkat global, tren adopsi teknologi Industry 4.0 dan penciptaan ekosistem inovasi menjadi kunci. Secara nasional, program Making Indonesia 4.0 dan insentif teknologi didorong oleh pemerintah. Tantangan lokal yang dihadapi termasuk dana yang terbatas dan resistensi terhadap perubahan teknologi di kalangan SDM lokal.

Semua aktivitas ekonomi bergantung pada teknologi atau aktivitas ekonomi menciptakan nilai tambah secara signifikan akibat penggunaan digital, termasuk di dalamnya teknologi digital, infrastruktur digital, layanan digital dan data (OECD, 2020). Sektor digital mencakup sektor Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan E-commerce. Sektor digital mencakup semua industri yang menggunakan input digital dalam proses produksinya. Kombinasi dari efek yang dihasilkan akibat kemajuan dan adopsi teknologi digital oleh masyarakat. Untuk itu, perlu membangun infrastruktur digital (Digital-enabling infrastructure), E-commerce, media digital dan *cyber security*. Ekonomi digital yang utamanya berlandaskan infrastruktur digital membantu dalam peningkatan produktivitas modal dan tenaga kerja serta membantu dalam memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah (Dahlman et al., 2016). Penelitian Seo et al. (2009) menemukan bahwa negara dengan tingkat produktivitas yang relatif rendah dapat mengambil

keuntungan dari spillover pengetahuan TIK dalam rangka mengurangi kesenjangan dengan negara maju. Vu (2011) juga menemukan bahwa TIK dapat meningkatkan output dengan cara memfasilitasi inovasi teknologi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mengurangi biaya produksi. *Cyber security* (keamanan siber) juga merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Melalui sistem keamanan yang kuat, seluruh para pelaku bisnis dan juga masyarakat dapat melakukan transaksi secara digital dengan aman dan tenang.

Sektor pertanian atau perkebunan yang besar harus terintegrasi dengan transformasi digital sehingga dengan upaya itu, efisiensi dan efektifitas bahan baku dapat dilakukan untuk mendorong tingkat produktivitas serta penetrasi di pasar, bidang UMKM, digitalisasi mampu memperbesar skala yang menambah varian dan kontinuitas produk serta memperluas akses jaringan usaha. Transformasi digital harus dilakukan secara beriringan dengan mengadopsi teknologi dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM).

Optimalisasi sistem distribusi dan peningkatan infrastruktur sangat penting untuk mendukung efisiensi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo. Pembangunan infrastruktur yang kuat, cerdas, dan berkelanjutan akan membantu mengatasi kendala logistik dan meningkatkan konektivitas. Pengembangan keterampilan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola pasar melalui pelatihan dan pendidikan yang adaptif sangat penting untuk memastikan pengelolaan pasar yang efisien dan produktif. Peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha dan pelaporan kegiatan usaha melalui pendekatan yang inklusif juga diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam menghadapi perubahan iklim, upaya berkelanjutan untuk mengurangi emisi dan beradaptasi terhadap dampak lingkungan harus menjadi prioritas dalam pengelolaan pasar dan infrastruktur, menjadikan Kabupaten Karo lebih tangguh dan ramah lingkungan.

Kabupaten Karo menghadapi tantangan yang signifikan dalam peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan. Masalah utama adalah hanya 38,12 persen penduduk yang memiliki akses ke air minum aman, disebabkan oleh investasi yang kurang memadai dan regulasi yang lemah. Akses sanitasi yang aman juga sangat rendah, hanya mencakup 5,01 persen penduduk. Selain itu, 5,6 persen dari total rumah tidak layak huni karena standar bangunan yang rendah dan kurangnya pemeliharaan, diperparah oleh regulasi yang tidak memadai dan pengawasan yang lemah. Di tingkat global, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar adalah krusial untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama terkait dengan akses air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Di Indonesia, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur melalui berbagai program, termasuk pembangunan desa dan kota yang lebih terintegrasi. Program nasional seperti Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) berupaya mengurangi permukiman kumuh dengan meningkatkan akses air minum aman dan sanitasi. Pembangunan infrastruktur tahan bencana juga menjadi prioritas untuk meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam.

Penguatan ketahanan dan keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan adaptif dan inovatif juga merupakan isu strategis yang krusial. Kabupaten Karo masih mengalami erupsi Gunung Sinabung yang berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, seperti pertanian dan penebangan liar, serta infrastruktur yang tidak dirancang untuk menahan bencana, menambah kerentanan ini. Secara global, perubahan iklim adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Pendekatan adaptif dan inovatif diperlukan untuk

mengurangi dampak perubahan iklim melalui teknologi inovatif, konservasi biodiversitas, dan manajemen risiko bencana yang lebih baik. Di tingkat nasional, Indonesia berfokus pada mitigasi bencana alam, pengembangan energi terbarukan, dan kebijakan perlindungan lingkungan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Solusi untuk Kabupaten Karo meliputi peningkatan kesadaran masyarakat dan pelatihan dalam manajemen bencana, perencanaan tata ruang yang mengintegrasikan risiko bencana, penguatan regulasi lingkungan, dan peningkatan investasi dalam infrastruktur tahan bencana.

Pemanasan global (*global warming*) dan perubahan iklim (*climate change*) mendapat perhatian serius dari seluruh negara. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Kegiatan Pembangunan ekonomi di Kabupaten Karo dominan berbasis pada sumber daya alam antara lain pada sektor pertanian dan pariwisata, hal ini menyebabkan aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan masih sering terabaikan sehingga dapat berdampak ke permasalahan lingkungan seperti pencemaran air dan/atau tanah, kerusakan kualitas tanah, kebakaran dan kerusakan hutan, alih fungsi lahan pertanian dan sebagainya. Kondisi tersebut pada akhirnya akan menjadikan semakin menurunnya produktivitas sumber daya alam dan lingkungan sehingga akan mendorong timbulnya kantong kemiskinan pada masyarakat yang hidup bergantung pada sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu terus menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk terus dilaksanakan.

KepmenDesa PDTT Nomor 48 Tahun 2018 adalah untuk mendorong pembangunan Desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif & peka terhadap kebutuhan masyarakat desa sehingga dalam hal ini, upaya ini dapat mendorong produktivitas & pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan secara berkelanjutan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian desa.

C. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik secara prima.

Isu strategis tentang tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik secara prima antara lain:

- 1) Efektivitas dan efisiensi kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, kinerja, dan reformasi birokrasi.

Tata kelola pemerintahan belum terpadu, inovatif, dan kolaboratif sehingga untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik secara prima belum dapat dicapai sepenuhnya.

- 2) Modernisasi infrastruktur teknologi

Salah satu isu utama adalah kebutuhan mendesak untuk modernisasi infrastruktur teknologi yang saat ini mengalami keterbatasan signifikan dalam mendukung efisiensi operasional dan peningkatan aksesibilitas layanan publik. Upaya ini mendesak, mengingat tren global yang menuju digitalisasi pemerintahan dan mandat nasional yang mengharuskan layanan publik yang lebih efektif dan transparan. Ini mencakup upgrade teknologi untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, yang merupakan respons

terhadap infrastruktur yang usang yang membatasi integrasi dan efektivitas data.

3) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia menjadi isu kritis. Kabupaten Karo harus menangani kesenjangan keterampilan di antara pegawai pemerintahannya, dengan meningkatkan pelatihan yang relevan yang menyesuaikan keterampilan teknis dengan kebutuhan sistem SPBE yang kontemporer. Ini mendukung kebijakan nasional untuk peningkatan kualitas SDM dan mengikuti dorongan global untuk peningkatan adaptasi terhadap teknologi baru dan peningkatan daya saing.

4) Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi

Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antardepartemen dan antarinstitusi juga merupakan isu penting, terutama dalam konteks efisiensi dalam penyampaian kebijakan dan layanan. Kabupaten Karo perlu menangani sistem komunikasi yang kurang efektif yang sebelumnya menghambat integrasi kebijakan dan layanan yang efektif, sebuah respons terhadap tuntutan global untuk respons yang lebih terkoordinasi dan efisien terhadap krisis serta kebijakan nasional yang mengarah pada pengelolaan administrasi yang lebih sinergis.

5) Akuntabilitas dan Transparansi

Isu lain yang perlu diperhatikan adalah kekurangan dalam praktik transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan penggunaan sistem SPBE. Kabupaten ini harus memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan terdokumentasi dengan baik dan terbuka untuk audit dan pemeriksaan publik, sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik secara global dan nasional yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.

6) Kepatuhan Regulasi

Isu strategis yang tak kalah pentingnya adalah kepatuhan terhadap regulasi nasional dan standar internasional dalam perlindungan data dan privasi. Hal ini membutuhkan penyesuaian kebijakan lokal untuk memastikan operasional SPBE berjalan dalam kerangka hukum yang ditetapkan dan memenuhi standar keamanan siber global, mengamankan data dan privasi pengguna.

D. Demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan

Isu strategis demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan dihadapkan dengan pengoptimalan upaya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemenuhan HAM. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya pelaksana ketenteraman dan ketertiban umum. Peningkatan pemahaman masyarakat dan badan hukum terhadap pentingnya ketaatan terhadap Perda dan Perkada. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemenuhan hak dasar kelompok masyarakat rentan dan marjinal.

Selain itu, dalam stabilitas ekonomi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui pengendalian inflasi daerah, intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan dan sebagainya), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.

Komitmen dan kemauan politik (*Political Will*) Kepala daerah dalam memberikan *public service* dan menyediakan *public goods* kepada warganya serta kapasitas kepemimpinan inovatif Kepala Daerah yang ditinjau dari

pengembangan inovasi merupakan kunci keberhasilan terwujudnya ekosistem inovasi di daerah.

E. Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam.

Pelestarian dan pemeliharaan budaya lokal merupakan isu strategis yang penting bagi Kabupaten Karo karena budaya merupakan identitas dan aset berharga yang perlu dijaga. Jika tidak ditangani dengan baik, ancaman terhadap keberlanjutan warisan budaya dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi daya tarik wisata dan menghilangkan kekayaan sejarah lokal. Di tingkat global, banyak warisan budaya yang terancam hilang, sehingga ada urgensi untuk melestarikannya melalui kerjasama internasional dan teknologi. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan budaya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, memperkuat pelestarian dan pemeliharaan budaya lokal di Kabupaten Karo sangat penting untuk memastikan bahwa warisan budaya ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang dan tetap menjadi sumber kebanggaan serta daya tarik bagi masyarakat dan wisatawan.

Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pendukung kesenian menjadi isu strategis bagi Kabupaten Karo karena kesenian merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Tanpa infrastruktur yang memadai, perkembangan kesenian dapat terhambat, mengurangi kesempatan bagi seniman lokal untuk berkembang dan mengurangi minat masyarakat terhadap kegiatan seni. Di tingkat global, konsep pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya mengintegrasikan pelestarian budaya dan pengembangan fasilitas yang mendukung seni dan budaya untuk menarik wisatawan. Secara nasional, pengembangan ekonomi kreatif dan revitalisasi pariwisata pasca-pandemi adalah prioritas yang dapat memberikan dorongan ekonomi yang signifikan. Dengan mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung kesenian, Kabupaten Karo dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni, menarik lebih banyak wisatawan, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi lokal.

Peningkatan daya saing pemuda dan olahraga juga menjadi isu penting dalam meningkatkan kualitas keluarga, pemuda merupakan tulang punggung bangsa, sehingga pembangunan pemuda merupakan hal strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi pemuda dalam pembangunan terus didorong dengan melakukan terobosan dalam beberapa bidang antara lain pendidikan, sosial budaya, lingkungan, pariwisata, pangan, inovasi teknologi, dll serta meningkatkan kewirausahaan pemuda. Prioritas pembangunan pemuda dilakukan seiring dengan upaya pencapaian sumber daya manusia unggul untuk mewujudkan Kabupaten Karo yang unggul. Selanjutnya, pembangunan olahraga terus ditingkatkan melalui peningkatan pembinaan dan upaya motivasi untuk pemuda agar terlibat dalam pengembangan olahraga baik untuk kepentingan kesehatan maupun peningkatan prestasi.

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan menjadi isu strategis penting bagi Kabupaten Karo karena masalah ini langsung mempengaruhi keberlanjutan pembangunan wilayah tersebut. Penurunan ketersediaan air bersih, penurunan keanekaragaman hayati, serta penurunan kualitas air dan tanah dapat mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekosistem. Jika tidak diatasi, dampak-dampak ini dapat memperburuk kualitas hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem lokal.

Secara global, masalah ini berkaitan erat dengan dampak perubahan iklim, yang mengancam ketersediaan sumber daya alam dan mengintensifkan risiko bencana alam. Di tingkat nasional, kebijakan pembangunan yang berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efisien dan perlindungan lingkungan. Kegagalan dalam mengelola sumber daya alam dapat memperburuk masalah global seperti krisis air dan kehilangan keanekaragaman hayati, serta berkontribusi pada masalah nasional seperti deforestasi dan penurunan kualitas tanah.

Penanganan Limbah dan Pengelolaan Energi merupakan isu strategis yang krusial bagi Kabupaten Karo karena tantangan dalam pengelolaan limbah dan keterbatasan energi terbarukan dapat menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat yang serius. Kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah dan daur ulang dapat menyebabkan pencemaran dan masalah kesehatan, sementara keterbatasan penggunaan energi terbarukan menghambat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Di tingkat global, isu ini berhubungan dengan upaya untuk mengurangi limbah dan mempromosikan ekonomi sirkular, serta transisi energi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Di tingkat nasional, kebijakan energi dan pengelolaan limbah mencerminkan upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi dampak lingkungan. Jika masalah ini tidak diatasi, Kabupaten Karo dapat mengalami peningkatan pencemaran, krisis energi, dan ketidakmampuan untuk memenuhi target nasional terkait pengurangan emisi dan pengelolaan limbah.

Edukasi dan Kesadaran Publik adalah isu strategis yang sangat penting bagi Kabupaten Karo karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai pengelolaan lingkungan dapat menghambat upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Tanpa pemahaman yang memadai, masyarakat mungkin tidak akan mendukung atau mematuhi kebijakan lingkungan, yang dapat memperburuk masalah lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Hal tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan memperburuk dampak perubahan iklim serta kerusakan lingkungan.

Dengan fokus pada isu-isu strategis ini, Kabupaten Karo dapat mengatasi masalah yang ada dan mencegah potensi dampak negatif yang lebih besar di masa depan, sambil selaras dengan inisiatif global dan nasional untuk pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

F. Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan

1) Pengelolaan dan Penyediaan Air Baku yang Komprehensif

Pengelolaan air baku di Kabupaten Karo memerlukan peningkatan efisiensi distribusi dan manajemen agar kapasitas yang ada, sebesar 3,03 m³/detik, dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan pariwisata. Tantangan global seperti krisis ekonomi yang berdampak pada investasi infrastruktur serta isu nasional mengenai penurunan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung air harus diperhitungkan dalam perencanaan ini. Selain itu, infrastruktur irigasi di Kabupaten Karo yang hanya 52,95% dalam kondisi baik membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan yang tepat. Pengaruh perubahan iklim global terhadap ketersediaan air dan rendahnya produktivitas sektor pertanian nasional akibat infrastruktur yang tidak memadai menambah urgensi perbaikan.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi yang Berkelanjutan

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan air baku sangat penting. Tenaga ahli dan pelatihan berkelanjutan harus ditingkatkan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien. Disrupsi teknologi global menuntut peningkatan kapasitas tenaga kerja,

- sementara bonus demografi nasional memberikan peluang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Selain itu, adopsi teknologi modern seperti sistem irigasi pintar dan pemantauan real-time dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan air. Tantangan global dalam adopsi teknologi baru dan kebutuhan nasional untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi harus menjadi fokus utama.
- 3) **Manajemen dan Koordinasi Pengelolaan Air Baku yang Sinergis**
Pengelolaan air baku di Kabupaten Karo membutuhkan peningkatan koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab. Kurangnya koordinasi saat ini menghambat pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. Pengembangan strategi pengelolaan air yang komprehensif dan berkelanjutan sangat penting, mengingat tantangan global dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan kebutuhan nasional untuk strategi pengelolaan air yang lebih baik. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan pengelolaan air baku dapat lebih terstruktur dan efisien.
 - 4) **Adaptasi Terhadap Perubahan Fungsi Lahan yang Progresif**
Perubahan fungsi lahan sawah menjadi permukiman atau lahan pertanian kering di Kabupaten Karo perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan ini harus mencakup kebijakan untuk menjaga daerah tangkapan air dan mengurangi dampak negatif dari alih fungsi lahan. Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi global mempengaruhi penggunaan lahan, dan isu nasional tentang alih fungsi lahan serta dampaknya terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air harus dipertimbangkan. Dengan pengelolaan yang tepat, dampak negatif dari alih fungsi lahan dapat diminimalkan dan ketersediaan air untuk irigasi dapat dijaga.
 - 5) **Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Daya Dukung Sumber Daya Alam yang Responsif**
Perubahan iklim global menuntut implementasi strategi adaptasi dan mitigasi yang efektif di Kabupaten Karo. Pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat harus menjadi prioritas. Komitmen global untuk mengurangi emisi serta kebijakan nasional terkait perubahan iklim dan mitigasi emisi gas rumah kaca menjadi dasar dari upaya ini. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam secara optimal diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air. Upaya pelestarian lingkungan juga penting untuk menjaga daya dukung dan daya tampung sumber daya alam, sejalan dengan tantangan global mengenai krisis iklim dan degradasi lingkungan, serta isu nasional tentang penurunan daya dukung sumber daya alam.
 - 6) **Stabilitas Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan yang Terintegrasi**
Fluktuasi Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan ketidakstabilan dalam ketahanan pangan di Kabupaten Karo. Peningkatan IKP yang tidak konsisten mengindikasikan bahwa stabilitas dalam ketahanan pangan memerlukan perhatian serius. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan iklim, serta kebijakan yang bervariasi mempengaruhi ketahanan pangan. Selain itu, konflik dan bencana alam turut berkontribusi terhadap penurunan ketahanan pangan. Diversifikasi pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat juga merupakan isu penting yang perlu diatasi. Masyarakat cenderung mengonsumsi pangan yang kurang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, yang dapat menimbulkan masalah kesehatan dan menurunkan ketahanan pangan. Isu ini penting bagi pembangunan karena menciptakan ketahanan pangan yang stabil dan berkelanjutan adalah kunci untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani, ketidakstabilan dan kurangnya diversifikasi pangan dapat menyebabkan masalah kesehatan

masyarakat yang lebih luas, penurunan produktivitas, dan ketidakamanan pangan yang dapat memicu kerawanan sosial. Program edukasi dan penyuluhan yang intensif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan variasi dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Kebijakan yang stabil dan strategi jangka panjang untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan juga sangat diperlukan. Ini sejalan dengan isu global mengenai ketahanan pangan dan tantangan nasional terkait peningkatan kualitas gizi masyarakat.

7) Pengawasan Keamanan Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya yang Terpadu

Pengawasan terhadap keamanan pangan segar asal tumbuhan di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan serta mengurangi risiko kesehatan bagi konsumen. Pengawasan yang ketat dan sistematis terhadap keamanan pangan sangat penting untuk mencegah kontaminasi dan risiko kesehatan. Diperlukan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk pengawasan pangan agar kualitas dan keamanan pangan dapat terjaga. Selain itu, pengelolaan sumber daya air dan pangan yang terpadu dan efisien sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Isu ini penting bagi pembangunan karena tanpa pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang terpadu, risiko kesehatan masyarakat dapat meningkat akibat konsumsi pangan yang tidak aman. Hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Pengelolaan sumber daya yang efisien juga penting untuk mendukung ketahanan pangan, mengingat tantangan global terkait perubahan iklim dan degradasi lingkungan serta isu nasional tentang penurunan daya dukung sumber daya alam. Implementasi program-program yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengawasan dan pengelolaan terpadu dapat membantu mengatasi masalah ini secara efektif.

8) Pendekatan Holistik dan Terpadu untuk Ketahanan Pangan, Air, dan Energi

Untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan dan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, serta memastikan ketahanan air dan energi yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan yang stabil, peningkatan akses dan distribusi pangan dan air, edukasi masyarakat, serta pengawasan yang lebih baik terhadap pangan segar. Implementasi program-program yang berfokus pada edukasi dan pengawasan serta peningkatan infrastruktur dapat membantu mengatasi masalah ini secara efektif. Pendekatan ini menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang, edukasi, dan pengawasan yang ketat, serta peningkatan teknologi dan koordinasi antar lembaga untuk mencapai ketahanan yang berkelanjutan di berbagai sektor.

G. Bencana dan Perubahan Iklim

Isu strategis pembangunan daerah terkait bencana dan perubahan iklim meliputi:

1. Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Bencana Alam dan Perubahan Iklim

Kabupaten Karo sedang menghadapi tantangan serius dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam seperti letusan gunung api, longsor, banjir, dan angin puting beliung. Perubahan iklim global semakin memperburuk situasi ini. Jika tidak segera ditangani, bencana-bencana ini bisa menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi lokal. Mengelola hutan dan lahan pertanian secara berkelanjutan sangat penting untuk mengurangi risiko bencana dan menjaga kemampuan tanah dalam menyerap air. Ini menjadi krusial

karena perubahan iklim adalah isu global yang berdampak langsung pada kondisi lokal. Mengabaikan isu ini bisa meningkatkan kerentanan daerah terhadap bencana, mengganggu stabilitas sosial, dan menghambat pembangunan berkelanjutan.

2. Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Penanggulangan Bencana

Infrastruktur penanggulangan bencana di Kabupaten Karo masih perlu banyak perbaikan. Tanpa peningkatan fasilitas seperti tempat penampungan darurat, sistem drainase yang efektif, dan peralatan evakuasi yang memadai, daerah ini akan terus rentan terhadap dampak bencana yang parah. Optimalisasi anggaran dan kebijakan penanggulangan bencana juga sangat penting. Jika tidak diperkuat, keterbatasan anggaran dan regulasi yang kurang efektif akan menghambat kemampuan daerah untuk merespons dan memitigasi bencana dengan cepat dan efisien. Mengatasi isu ini penting untuk memastikan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, yang sejalan dengan tantangan ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi alokasi sumber daya.

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Berkelanjutan

Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel manajemen bencana di Kabupaten Karo sangat krusial untuk meningkatkan respons dan pemulihan bencana. Tanpa SDM yang mumpuni, respons terhadap bencana akan lambat dan kurang efektif, sehingga meningkatkan kerugian dan dampak negatif pada masyarakat. Mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan dan mendorong diversifikasi ekonomi juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi global. Jika tidak ditangani, ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor tertentu bisa meningkatkan risiko ekonomi daerah terhadap perubahan global dan nasional. Keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui program pendidikan dan sosialisasi akan mendukung pembangunan berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak, yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan internasional.

Dengan memahami pentingnya isu-isu strategis ini, Kabupaten Karo dapat fokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah masalah baru yang mungkin muncul jika isu-isu ini tidak ditangani dengan baik, memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap tantangan lokal, nasional, dan global.

H. Pembangunan kewilayahan yang merata dan adil

1. Penguatan Infrastruktur dan Ketahanan Lingkungan:

Ketidakmerataan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Karo menjadi isu strategis yang mendesak. Banyak desa dan kelurahan masih kesulitan mengakses layanan dan fasilitas dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Jika ketidakmerataan ini tidak ditangani, maka akan memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi dan menghambat pertumbuhan daerah secara keseluruhan. Di tingkat global, perubahan iklim menuntut pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam dan berkelanjutan. Sementara itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Indonesia mempengaruhi alokasi sumber daya dan prioritas infrastruktur nasional, yang bisa berdampak pada distribusi pembangunan di Kabupaten Karo. Oleh karena itu, memastikan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang merata menjadi sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Perdesaan

Ketidakmerataan kesempatan ekonomi di Kabupaten Karo, terutama di wilayah perdesaan, menjadi isu strategis yang harus diatasi. Banyak desa

mengalami keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi dan investasi, yang mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi pasar turut mempengaruhi investasi lokal dan daya saing ekonomi daerah. Pada skala nasional, deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas sektor pertanian memerlukan perhatian khusus untuk mengembangkan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Jika tidak ditangani, ketidakmerataan ini dapat menyebabkan peningkatan migrasi dari desa ke kota, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial-ekonomi di pedesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi lokal dan perdesaan menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan yang merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

3. Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Koordinasi Pembangunan

Koordinasi pembangunan di 269 desa dan kelurahan di Kabupaten Karo menghadapi tantangan besar karena kurangnya sistem manajemen yang efektif dan koordinasi yang jelas antar tingkat pemerintahan. Disrupsi teknologi global memerlukan sistem manajemen yang lebih adaptif dan terintegrasi untuk mendukung koordinasi yang efektif. Sementara itu, bonus demografi di tingkat nasional memberikan peluang besar dengan adanya potensi tenaga kerja muda yang melimpah, tetapi memerlukan manajemen pembangunan yang efisien untuk memanfaatkan potensi ini. Jika isu ini tidak diatasi, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah akan semakin lebar, menghambat pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas manajemen dan koordinasi pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan yang merata dan efektif di seluruh Kabupaten Karo.

I. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

a) Penguatan Infrastruktur dan Teknologi

Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar di Kabupaten Karo, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, sanitasi, air minum, listrik, telekomunikasi, dan pengelolaan sampah, menjadi prioritas penting. Tantangan utama yang dihadapi meliputi pemerataan akses infrastruktur, peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknologi, serta pengurangan resistensi terhadap perubahan. Selain itu, pengintegrasian teknologi dalam proses pembangunan menjadi kunci untuk mencapai efisiensi dan keberlanjutan. Apabila tidak ditangani, masalah ini dapat memperburuk kesenjangan infrastruktur dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Isu ini sejalan dengan tantangan global terkait disrupsi teknologi yang mengubah cara bisnis beroperasi dan memaksimalkan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Pada tingkat nasional, isu ini sesuai dengan upaya peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) serta adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

b) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan

Optimalisasi pengelolaan anggaran, pendapatan daerah, dan sumber daya alam merupakan isu strategis yang krusial. Tantangan yang dihadapi mencakup peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, penguatan basis pajak lokal, peningkatan partisipasi sektor swasta, serta penyelesaian masalah harga lahan dan konflik lahan. Selain itu, penerapan praktik pembangunan yang ramah lingkungan dan peningkatan regulasi serta pengawasan lingkungan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan. Jika tidak diatasi, masalah ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, menghambat pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi kualitas hidup masyarakat.

Isu ini relevan dengan tantangan global seperti perubahan iklim yang memerlukan pengurangan emisi dan adaptasi terhadap dampak iklim, serta

investasi pada energi alternatif yang bersih dan berkelanjutan. Pada tingkat nasional, isu ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lebih optimal serta dampak perubahan konektivitas logistik dan rantai pasok ekonomi nasional.

c) Peningkatan Kualitas Lembaga dan Pemanfaatan Potensi Ekonomi

Meningkatkan koordinasi antar lembaga, kompetensi sumber daya manusia, dan efisiensi struktur organisasi adalah langkah penting dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Tantangan yang dihadapi meliputi perbaikan koordinasi lintas sektor, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas sektor pertanian, dan dorongan terhadap ekonomi kreatif serta pemanfaatan potensi ekonomi laut. Jika tidak ditangani, masalah ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan mengurangi potensi ekonomi daerah.

Isu ini sejalan dengan pemulihan pariwisata global yang hampir mencapai tingkat sebelum pandemi dan pentingnya kerjasama keamanan maritim serta fasilitasi perdagangan dan investasi di Samudera Hindia. Pada tingkat nasional, isu ini mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan peningkatan nilai tambah ekonomi kreatif, pengelolaan sumber daya laut dan tata kelola ruang laut yang lebih baik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyesuaian keahlian dengan kebutuhan pasar kerja.

J. Kesisinambungan pembangunan

1. Peningkatan Efisiensi dan Tata Kelola Pemerintahan

Kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk meningkatkan PAD, efisiensi dan tata kelola pemerintahan perlu ditingkatkan. Di Kabupaten Karo, masih terdapat tantangan seperti terbatasnya anggaran untuk pembangunan dan perawatan sarana prasarana, serta proses pengadaan yang masih memerlukan perbaikan. Inefisiensi birokrasi turut memengaruhi kondisi ini, mengakibatkan infrastruktur yang seharusnya mendukung pengumpulan PAD tidak berfungsi optimal, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Koordinasi antar instansi yang perlu ditingkatkan dan reformasi regulasi untuk memastikan legislasi yang up-to-date dan relevan juga menjadi fokus penting. Jika tidak ditangani, hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, peningkatan biaya, dan kurangnya transparansi yang akhirnya menghambat pembangunan daerah. Peningkatan efisiensi birokrasi, akuntabilitas, dan koordinasi antar instansi akan membantu mengoptimalkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan PAD dan kemandirian daerah. Hal ini sejalan dengan upaya global dan nasional untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efisiensi birokrasi.

2. Penguatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur

Pengelolaan PAD yang efektif memerlukan petugas yang kompeten dan terlatih. Namun, di Kabupaten Karo, terdapat kekurangan dalam hal pelatihan dan pengembangan SDM, serta rekrutmen yang perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Selain itu, motivasi dan insentif bagi petugas masih perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pajak, serta pengawasan dan penegakan hukum yang perlu diperkuat. Jika tidak ditangani, kekurangan kompetensi SDM dan infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat efektivitas pengelolaan PAD, menyebabkan penurunan kualitas layanan publik, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pembangunan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan, akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengoptimalan PAD. Hal ini

mendukung strategi pembangunan SDM yang menjadi prioritas nasional dan global, serta mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan).

3. Transformasi Digital dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi sangat penting untuk mendukung pengelolaan keuangan dan pelayanan publik yang lebih baik, serta pengambilan keputusan berbasis data. Infrastruktur teknologi informasi yang perlu ditingkatkan di Kabupaten Karo menghambat efisiensi operasional dan pengelolaan data yang penting untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Pengelolaan sumber daya alam yang perlu dioptimalkan di Kabupaten Karo juga disebabkan oleh perlunya aturan yang lebih jelas, pengawasan yang lebih baik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jika tidak ditangani, kurangnya investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal dapat menghambat inovasi, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan, yang pada akhirnya menghambat peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital dan investasi dalam teknologi informasi akan mendukung banyak inisiatif untuk meningkatkan PAD dan kemandirian daerah. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang baik memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan aturan yang jelas untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dan optimal. Transformasi digital dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan prioritas global dan nasional, yang akan berdampak positif pada penerimaan daerah dari sektor sumber daya alam.

Tabel 2 .104
Perumusan Isu Strategis Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO		ISU STRATEGIS RPJMN 2025-2029		ISU KLHS RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2045		ISU KLHS RPJMD KABUPATEN KARO 2025-2029			ISU RPJMD KABUPATEN KARO 2025-2029	
1	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat belum mencapai standar optimal	1	Rendahnya Produktivitas	1	Peningkatan pelayanan dasar	1	1	Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan;	1	Pembangunan manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, berdaya saing dan Sejahtera.
2	Kinerja produktivitas ekonomi belum optimal	2	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	2	Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan	2	2	Menekan indeks ketimpangan gender dan peningkatan pembangunan keluarga;	2	Peningkatan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi
3	Sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum secara optimal	3	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	3	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	3	3	Pemenuhan jangkauan aksesibilitas secara merata (air minum, sanitasi, telekomunikasi, jalan, akses keuangan);	3	Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik secara prima.
4	Stabilitas, ketenteraman, ketertiban umum, wawasan kebangsaan, dan pemenuhan HAM belum mencapai kondisi yang ideal	4	Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif	4	Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	4	4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup;	4	Demokrasi substansial, stabilitas ekonomi, politik, hukum, keamanan dan peningkatan wawasan kebangsaan
5	Ketahanan sosial, budaya, ekologi dan pengelolaan lingkungan hidup belum optimal	5	Krisis Lingkungan	5	Penanganan perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana	5	5	Ketahanan bencana;	5	Ketahanan sosial, budaya dan ekologi yang berkebudayaan yang maju, kualitas keluarga, kesetaraan gender dan keberlanjutan sumber daya alam.
6	Pembangunan kewilayahan yang belum merata dan berkeadilan	6	Geo Politik dan Geo Ekonomi	6	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja	6	6	Peningkatan pertumbuhan ekonomi dari multisektor (perbaikan struktur ekonomi, pariwisata, pertanian, industri/manufaktur, UMKM, tenaga kerja);	6	Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KARO		ISU STRATEGIS RPJMN 2025-2029		ISU KLHS RPJPD PROVINSI SUMATERA UTARA 2025-2045		ISU KLHS RPJMD KABUPATEN KARO 2025-2029			ISU RPJMD KABUPATEN KARO 2025-2029	
7	Pembangunan sarana dan prasarana yang belum optimal	7	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	7	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan birokrasi	7	7	Layanan pendidikan berkualitas;	7	Bencana dan Perubahan Iklim
8	Pembangunan yang berkesinambungan belum dilaksanakan secara optimal				Isu RPPLH Provinsi Sumatera Utara	8	8	Transformasi digitalisasi tata kelola pemerintah; dan	8	Pembangunan kewilayahan yang merata dan adil
				1	Alih fungsi serta kerusakan hutan dan lahan	9	9	Peningkatan layanan kesehatan.	9	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
				2	Penurunan kuantitas dan mutu air permukaan				10	Kesinambungan pembangunan
				3	Ancaman kehilangan keanekaragaman hayati	1				
				4	Pengelolaan persampahan	2				
				5	Penurunan mutu udara	3				
						4				
						5				
						6				

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo 2025 (diolah)

2.3.2.6. Evaluasi Paruh Waktu RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

Evaluasi terhadap perencanaan strategis pembangunan daerah Kabupaten Karo mengungkapkan berbagai kemajuan dan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pada periode keempat ini, visi yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju, Mandiri dan Adil”, yang kemudian menjadi pedoman dalam penetapan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026. Visi tersebut adalah “Mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera”.

A. Evaluasi Indikator Makro Kabupaten Karo

Indikator kinerja makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Karo terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan manusia dan Rasio Gini. Indikator makro selain menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karo, juga sebagai indikator pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional. Capaian indikator kinerja makro Kabupaten Karo mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2 .105
Capaian Indikator Makro Kabupaten Karo Tahun 2022-2024

Indikator Pembangunan	RPJMD Kabupaten Karo Periode Tahun 2022-2024					
	2022		2023		2024	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,40-3,80	4,22	3,80-4-20	5,06	4,20-4,60	4,22
Tingkat Kemiskinan (%)	8,9	8,17	8,85	7,98	8,8	7,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,75	2,71	1,65	2,63	1,45	2,4
Indeks Pembangunan Manusia	74,53	75,36	74,63	76,88	74,73	77,49
Rasio Gini	0,270	0,236	0,268	0,24	0,266	n/a

Pada periode RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026, indikator makro menunjukkan pencapaian yang bervariasi di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Laju pertumbuhan ekonomi mengalami tren positif dengan capaian yang melampaui target pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 3,40 persen hingga 3,80 persen, tetapi realisasinya mencapai 4,22 persen. Tren positif berlanjut di tahun 2023 dengan target 3,80 persen hingga 4,20 persen, capaian sebesar 4,22 persen hanya sedikit di atas batas bawah target yang ditetapkan (4,20 persen -4,60 persen), mengindikasikan perlunya strategi yang lebih optimal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo menunjukkan penurunan yang cukup baik selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 8,9 persen, namun capaian menunjukkan hasil yang lebih baik, yakni 8,17 persen. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dengan target 8,85 persen dan capaian sebesar 7,98 persen, serta di tahun 2024 dengan target 8,8 persen dan capaian 7,37 persen. Penurunan tingkat kemiskinan ini mencerminkan efektivitas

kebijakan sosial dan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, meskipun indikator kemiskinan membaik, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Karo masih menjadi tantangan. Target pengangguran terbuka pada tahun 2022 sebesar 1,75 persen justru mengalami kenaikan dengan capaian 2,71 persen. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2023 dengan target 1,65 persen tetapi realisasi mencapai 2,63 persen, serta tahun 2024 dengan target 1,45 persen namun capaian tetap tinggi di angka 2,4 persen. Tingginya tingkat pengangguran dibandingkan target yang ditetapkan menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan peningkatan signifikan di Kabupaten Karo selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, target IPM ditetapkan sebesar 74,53, tetapi capaian berhasil mencapai 75,36. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan target 74,63 dan realisasi 76,88, serta tahun 2024 dengan target 74,73 dan capaian yang lebih tinggi di angka 77,49. Peningkatan IPM yang cukup pesat menunjukkan adanya perbaikan dalam sektor pendidikan, kesehatan, serta standar hidup masyarakat Kabupaten Karo.

Sementara itu, Rasio Gini yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan tren yang cukup stabil. Pada tahun 2022, target Rasio Gini ditetapkan sebesar 0,270 dengan realisasi sebesar 0,236, sedangkan pada tahun 2023 targetnya 0,268 dan capaian 0,24. Sayangnya, data untuk tahun 2024 belum tersedia. Secara umum, capaian Rasio Gini yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karo semakin berkurang, yang berarti distribusi pendapatan di masyarakat menjadi lebih merata. Hal ini mencerminkan keberhasilan program-program pemerataan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

B. Capaian Hasil RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Pada periode keempat ini, visi yang ditetapkan adalah “Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju, Mandiri dan Adil”, yang kemudian menjadi pedoman dalam penetapan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021-2026. Visi tersebut adalah “Mewujudkan Kabupaten Karo yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing Berbasis Pariwisata dan Pertanian Menuju Masyarakat Makmur dan Sejahtera”.

Hasil Evaluasi terhadap Hasil RPJMD ini dijabarkan menurut capaian indikator kinerja tujuan, sasaran dan indikator kinerja daerah yang ada dalam RPJMD. Dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026, terdapat 6 tujuan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja tujuan, 17 sasaran strategis daerah dengan 45 (empat puluh lima) indikator kinerja sasaran strategis. Capaian kinerja tujuan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.106

Capaian Indikator Kinerja Tujuan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 Tahun Ketiga (Tahun 2024)

MISI			TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024		
							REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan	1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berdaya Saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73.74	46.62	63,22%	75.56	48.7	64,45%	77,37	48,70	62,94%
	Capaian Kinerja (%)							63,22%			64,45%			62,94%
	Predikat Kinerja							Rendah			Rendah			Rendah
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	74,53	75.36	100%	74,63	76.88	100%	74,73	77,49	100%
5	Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi													
10	Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal													
11	Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan													
	Capaian Kinerja (%)							100%			100%			100%
	Predikat Kinerja							Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

MISI			TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024			
							REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
3	Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu		3	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis pada Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,40-3,80	4.22	100%	3,80-4,20	4.22	100%	4,20-4,60	4,22	100%
4	Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,75	2.71	45,14%	1,65	2.63	40,61%	1,45	2,4	34,48%	
				Persentase Kemiskinan	%	8,90	8.17	100%	8,85	7.98	100%	8,80	7,37	100%	
7	Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru														
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal														
	</														

MISI			TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	Tahun 2022		Tahun 2023			Tahun 2024		
							REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
12	Penggalian dan Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	5	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	104.715.231.925,00	103,413,183,549	98,75%	106.724.206.056,00	103,388,014,361	96,87%	110.825.754.862,00	105.417.387.536,00	95,12%
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)							98,75%			96,87%			95,12%
	Predikat Kinerja							Sangat Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi
9	Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antara Wilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien	6	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur yang baik untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berwawasan Lingkungan	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	indeks	3,2	1,54	48,13%	3,3	2,62	79,39%	3,4	N/A	N/A
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	67,31	66,05	98.13%	67,83	71.66	100%	68,35	72,21	100%
				Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	indeks	0,52	0.47	90.38%	0,53	0.49	92,45%	0,54	0,48	88.89%
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)							78,88%			90,61%			94,44
	Predikat Kinerja							Tinggi			Sangat Tinggi			Sangat Tinggi

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah menetapkan berbagai misi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, daya saing ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Evaluasi capaian kinerja dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target pembangunan yang lebih optimal.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), capaian Indeks Reformasi Birokrasi masih berada dalam kategori rendah, dengan pencapaian sebesar 63,22 persen pada tahun 2022, 64,45 persen pada tahun 2023, dan menurun menjadi 62,94 persen pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2023, angka ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya perbaikan dalam peningkatan profesionalisme aparatur serta optimalisasi reformasi birokrasi.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren positif, dengan pencapaian 100% dari target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi telah berjalan dengan baik. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun generasi muda yang berkualitas dan masyarakat yang berdaya saing.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi daerah terus menunjukkan capaian optimal, dengan pencapaian 100 persen dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 hingga 2024. Namun, indikator tingkat pengangguran terbuka masih menjadi tantangan, dengan capaian yang terus mengalami penurunan dari 45,14 persen pada tahun 2022 menjadi 34,48 persen pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi tingkat pengangguran di daerah. Persentase kemiskinan mengalami penurunan yang signifikan, dengan capaian 100 persen dari target setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Nilai investasi di daerah mengalami peningkatan yang signifikan, dengan capaian 100% setiap tahunnya, yang mencerminkan bahwa iklim investasi semakin kondusif dan menarik bagi para investor.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif, meskipun capaian kinerja mengalami sedikit penurunan dari 98,75 persen pada tahun 2022 menjadi 95,12 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa meskipun target pendapatan belum sepenuhnya tercapai, pemerintah daerah tetap mampu meningkatkan sumber pendapatannya dengan strategi optimalisasi pendapatan daerah.

Di bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, capaian Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI) menunjukkan peningkatan yang signifikan, dari 48,13 persen pada tahun 2022 menjadi 79,39 persen pada tahun 2023. Namun, data untuk tahun 2024 masih belum tersedia. Sementara itu, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) terus menunjukkan pencapaian yang optimal dengan capaian 100 persen pada tahun 2023 dan 2024. Indeks Kapasitas Daerah (IKD) mengalami sedikit fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, dengan capaian 90,38 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 92,45 persen pada tahun 2023, namun kembali turun menjadi 88,89 persen pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan masih perlu

ditingkatkan agar dapat lebih optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tujuan menunjukkan tren yang cukup baik, dengan beberapa indikator utama mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama dalam hal reformasi birokrasi, pengurangan tingkat pengangguran, serta peningkatan kapasitas daerah. Dengan strategi yang lebih efektif dan kebijakan yang tepat sasaran, diharapkan capaian pembangunan daerah dapat terus meningkat dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

3.1.1. Visi Pembangunan Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Visi kepala dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan daerah atau kondisi yang ingin dicapai pada masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi adalah tujuan, masa depan, cita-cita yang ingin diraih di masa depan. Terdapat tujuan yang dilengkapi dengan target-target yang akan dicapai. Dalam RPJMD Kabupaten Karo ini, visi yang disajikan sesuai dengan visi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah sebagaimana tertulis pada persyaratan ketika mendaftar di KPUD. Perumusan visi ini juga dengan memperhatikan capaian pembangunan periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo (RPJPD) Tahun 2005-2025. Hal ini sangat penting untuk terciptanya pembangunan Kabupaten Karo yang berkelanjutan dan tepat pada pemecahan permasalahan yang ada.

Merujuk pada pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Serta merujuk pada pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye.

Berpedoman kepada hal tersebut, maka visi pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 adalah:

“MEWUJUDKAN KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO MODERN, KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS”

Visi pembangunan daerah di atas telah mempedomani visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 yaitu *“Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju dan Berkelanjutan”* dimana periode RPJMD ini adalah periode pertama pada RPJPD tersebut. Periode pertama (tahun 2025-2029) pembangunan Kabupaten Karo berfokus pada penguatan pondasi transformasi.

Pada tahap ini, pembangunan akan diarahkan penguatan pondasi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan ketahanan sosial budaya serta ekologi. Dalam upaya mewujudkan transformasi, pemerintah akan melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam program pemerintah untuk meningkatkan pondasi pembangunan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana

pendidikan dimulai dari jenjang paling bawah hingga ke atas. Demikian pula dengan kesehatan, pemerintah akan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Transformasi ekonomi juga tercipta dengan dorongan peningkatan IPTEKIN dan peningkatan produktivitas ekonomi melalui pemanfaatan sektor-sektor unggulan, peningkatan nilai tambah/hilirisasi, peningkatan sektor industri maupun peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam penguatan pondasi transformasi, pemerintah juga akan berbenah dengan meningkatkan manajemen ASN untuk membangun karakter pemerintahan yang profesional serta infrastruktur sistem pelayanan publik dengan harapan akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, bersih, transparan, dan akuntabel.

Penjelasan atas muatan visi pembangunan Kabupaten Karo selama 5 (lima) tahun tersebut adalah :

- ✓ **Karo Beriman** merupakan komitmen mendalam dari Pemerintah Kabupaten Karo untuk menjadikan nilai-nilai spiritualitas sebagai landasan utama dalam membentuk karakter masyarakat yang berintegritas, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral universal. Dalam konteks ini, spiritualitas bukan hanya sekedar keyakinan pribadi, tetapi sebagai pedoman kolektif dalam kehidupan sehari-hari, yang mengarahkan interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan tata kelola pemerintahan. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang penuh kedamaian, saling menghargai, dan berbasis pada etika yang kokoh. Visi ini mendukung prinsip-prinsip yang terkandung dalam RPJMN yang mengutamakan penguatan Ideologi Pancasila sebagai pilar dalam pembentukan masyarakat yang berintegritas dan mampu mengelola keberagaman untuk keberlanjutan pembangunan nasional.
- ✓ **Karo Berbudaya** adalah tekad Pemerintah Kabupaten Karo untuk memelihara dan mengembangkan budaya lokal sebagai identitas yang memperkuat ikatan sosial dan rasa bangga masyarakat. Warisan budaya yang meliputi tradisi, adat istiadat, serta seni lokal tidak hanya dipandang sebagai bagian dari sejarah, tetapi juga sebagai sumber potensi kreatif yang dapat memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan pemanfaatan budaya sebagai landasan pembangunan, Kabupaten Karo berupaya membentuk masyarakat yang inovatif, adaptif, dan bangga akan warisan leluhur. Visi ini sejalan dengan RPJMN yang menjadikan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian budaya sebagai prioritas, untuk menciptakan masyarakat yang tangguh, kreatif, dan mampu bersaing dalam kancah nasional maupun internasional.
- ✓ **Karo Modern** menggambarkan visi Pemerintah Kabupaten Karo untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam setiap dimensi pembangunan. Modernisasi yang dijalankan dalam aspek pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam, serta pembangunan infrastruktur berbasis teknologi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Transformasi digital ini memastikan pemerataan manfaat teknologi di seluruh lapisan masyarakat, menjadikan setiap individu sebagai bagian dari masyarakat yang berdaya dan berkembang. Visi ini mendukung RPJMN yang menekankan pentingnya konektivitas dan digitalisasi sebagai sarana untuk mempercepat proses modernisasi tata kelola pemerintahan dan meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

- ✓ **Karo Unggul** adalah inisiatif Pemerintah Kabupaten Karo untuk memaksimalkan potensi daerah dengan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan mengoptimalkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, industri dan UMKM. Dalam upaya ini, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta kebijakan yang berbasis pada peningkatan produktivitas menjadi prioritas utama. Tujuan dari visi ini adalah menciptakan masyarakat yang mandiri, inovatif, dan kompetitif, siap menghadapi tantangan global. Visi ini juga sejalan dengan RPJMN yang mengutamakan transformasi ekonomi berbasis potensi lokal untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.
- ✓ **Karo Sejahtera** merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Karo untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan dengan menempatkan pariwisata berbasis alam dan budaya serta pertanian unggulan bernilai tambah sebagai sektor unggulan penggerak utama ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan destinasi wisata pegunungan dan agrowisata yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan hilirisasi komoditas pertanian khas Karo seperti hortikultura dan kopi, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan menjunjung prinsip keberlanjutan, pelestarian ekosistem, dan mitigasi bencana, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan. Visi ini sejalan dengan RPJMN yang mengedepankan pertumbuhan hijau dan pembangunan berkelanjutan, guna menyeimbangkan kemajuan ekonomi, ketahanan sosial, dan pelestarian alam, sekaligus memperkuat ketahanan Kabupaten Karo menghadapi tantangan masa depan.
- ✓ **Menuju Indonesia Emas** menggambarkan Kabupaten Karo tidak hanya berkembang sebagai entitas lokal yang adaptif dan kompetitif, tetapi juga berperan sebagai katalis yang mendukung terciptanya ekosistem pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia memiliki cita-cita besar untuk menjadikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dan Kabupaten Karo berkomitmen untuk menjadi bagian integral dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Setiap keunggulan daerah akan menjadi simpul kekuatan yang memperkuat fondasi bangsa, dengan mengoptimalkan potensi lokal, memperkuat sektor unggulan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga berkontribusi pada kemajuan Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Visi jangka menengah RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang mengusung Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul, dan Karo Sejahtera merupakan langkah konkret yang mendukung pencapaian visi jangka panjang RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045, yaitu *Karo Mejuah-juah, Maju, dan Berkelanjutan*. Melalui berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat aspek spiritual, budaya, teknologi, dan ekonomi, RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 menyiapkan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman, sehingga mendukung tercapainya keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 berperan penting sebagai landasan bagi kemajuan Kabupaten Karo dengan mengedepankan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan, berdaya saing tinggi, dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan komitmen ini, RPJMD Kabupaten Karo Tahun

2025-2029 memastikan bahwa tujuan jangka menengah akan memperkuat fondasi yang kokoh untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, menjadikan Kabupaten Karo sebagai wilayah yang *mejuah-juah*, maju dan berkelanjutan.

RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dalam membangun pondasi dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas Tahun 2045. RPJPD menetapkan arah dan visi besar selama 20 tahun, sedangkan RPJMD menjalankan misi dan langkah awal untuk mencapai visi tersebut secara bertahap. Keduanya mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial sebagai prinsip utama pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karo. Untuk mengukur keberhasilan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2045 dilakukan dengan capaian 45 (Empat Puluh Lima) Indikator Utama Pembangunan, kemudian indikator tersebut diturunkan menjadi indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045.

3.1.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah **“MEWUJUDKAN KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO MODERN, KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS”** dengan memperhatikan capaian pembangunan periode sebelumnya peluang dan tantangan di masa mendatang, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik;
6. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan pariwisata;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah; dan
9. Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas.

Kesembilan misi pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Misi Pertama: Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pencapaian visi akan terwujud jika didukung oleh birokrasi yang kuat dan profesional, sehingga misi pertama yang menjadi langkah awal adalah pembenahan dan penguatan struktur dan tata kelola pada Perangkat Daerah Kabupaten Karo. Dalam jangka pendek kami akan memastikan seluruh perangkat daerah khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat sehingga tercipta pelayanan publik yang bersih,

efektif dan efisien. Dalam jangka menengah kami akan melakukan pembenahan struktur birokrasi yang lincah dan penerapan “**merit sistem**” dalam tata kelola kepegawaian sehingga tercipta persaingan yang mengedepankan profesionalisme dan bersaing dalam pelayanan. Sejalan dengan semangat efisiensi yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, maka kita harus menindaklanjuti dengan menciptakan birokrasi yang efisien namun tetap efektif dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Karo. Birokrasi harus kreatif dan inovatif membuat ide-ide dan gagasan baru bukan hanya mengandalkan APBD yang terbatas tetapi berpikir untuk mencapai target pembangunan sesuai tupoksi masing-masing dengan memperhatikan semua sumber daya yang ada.

2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Karo beriman yang terdapat pada awal visi pembangunan merupakan landasan dalam bekerja. Karo beriman akan diwujudkan dengan menggandeng tokoh tokoh agama untuk berperan aktif dalam setiap pembangunan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo baik di sekolah-sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Hal ini bukan hanya untuk menanamkan nilai-nilai religius tapi juga menjadi pondasi dalam pembentukan karakter siswa dan masyarakat. Demikian juga tidak terlepas terhadap ASN yang ada di pemerintah Kabupaten Karo dalam bekerja haruslah dilandasi iman sehingga memiliki jiwa bekerja yang tulus dan ikhlas dalam melayani masyarakat. Nilai-nilai toleransi yang sudah terjaga selama ini di Kabupaten Karo harus tetap kita jaga dan lestarikan baik dalam hal beragama dan berbudaya. Masyarakat Kabupaten Karo terkenal dengan masyarakat yang terbuka untuk semua dengan falsafah **rakut sitelu, tutur siwaluh, perkade kaden sepuluh dua tambah sada**. Falsafah ini akan kita jadikan juga landasan sebagaimana penggalan visi Karo berbudaya. Karo beriman dan berbudaya akan kita padukan dengan Karo modern sehingga kita tetap dapat mengikuti modernisasi dalam pembangunan namun tidak tergerus ke arah yang salah. Modern adalah cara berpikir kita dan inovasi kita dalam mengembangkan teknologi, bukan pergaulan modern yang tidak sesuai dengan adat istiadat kita.

3. Misi Ketiga : Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang penting dan merupakan ukuran dari kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap individu Kabupaten Karo. Pemerintah pusat telah menetapkan pemeriksaan kesehatan gratis bagi setiap individu yang ditetapkan setiap tanggal ulang tahun. Pemerintah Kabupaten Karo akan mendukung program ini dengan meningkatkan kualitas layanan-layanan fasilitas kesehatan baik tingkat pratama maupun tingkat lanjutan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang bekerjasama dengan pihak swasta.

4. Misi Keempat : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata.

Sektor pertanian dan pariwisata merupakan bagian penting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Berdasarkan data BPS tahun 2024, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penyumbang tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Karo yaitu mencapai 53,04 persen Atas Dasar Harga Berlaku. Daya serap tenaga kerja

juga dominan pada sektor pertanian, untuk itu potensi pertanian penting ditingkatkan dalam rangka memperkuat kemandirian pangan, mendorong nilai tambah melalui hilirisasi/industri pengolahan dan mendorong sektor lainnya yang memanfaatkan sumber daya alam. Selain itu, sektor pariwisata juga penting dalam menyokong perekonomian daerah, sektor ini menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dan IKM pendukung pariwisata/ekonomi kreatif dan meningkatkan minat investasi, serta penciptaan nilai tambah ekonomi lainnya. Sektor pariwisata didukung oleh kegiatan perdagangan, transportasi, akomodasi perhotelan, makan minum dan kegiatan lain. Berdasarkan hal tersebut maka peningkatan kesejahteraan masyarakat harus fokus pada sektor pertanian dan pariwisata tanpa menyampingkan sektor lainnya.

5. Misi Kelima : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik.

Untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 Kabupaten Karo harus mempersiapkan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dimulai sejak dini khususnya di bidang pendidikan. Perhatian kita terhadap anak didik saat ini yang akan menentukan apakah Kabupaten Karo unggul pada tahun 2045 atau hanya menjadi penonton atas unggulan-unggulan daerah lain. Untuk itu diharapkan kita lebih fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimulai sejak dini termasuk anak didik yang sedang duduk di bangku sekolah. Penerapan kelas unggulan pada setiap sekolah akan mendorong anak didik untuk memiliki semangat daya saing diantara sesamanya sehingga jiwa kompetisi telah terasah sejak dini. Dengan penerapan kelas unggulan ditargetkan ke depannya akan tercipta Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi. Tanggung jawab pemerintah untuk memastikan tidak ada anak berprestasi yang gagal di tengah jalan dengan memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu dan berprestasi untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah unggulan. Pada gilirannya nanti anak didik ini akan menjadi generasi-generasi penerus yang akan membangun Kabupaten Karo dan dapat meningkatkan daya saing Kabupaten Karo dengan daerah-daerah lain. Untuk kualitas Sumber Daya Manusia khususnya para pekerja difokuskan pada pelatihan untuk pekerjaan utama di masyarakat Kabupaten Karo seperti pelatihan kepada para petani dan peningkatan keterampilan/kompetensi Masyarakat pencari kerja, selain itu pemerintah juga terus membangun pondasi kuat generasi yang sehat, maju dan produktif untuk memperkuat identitas dan kebanggaan daerah melalui peningkatan kompetensi dan daya saing pemuda dan prestasi olahraga.

6. Misi Keenam : Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan pariwisata.

Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo tahun 2024, angka pengangguran di Kabupaten Karo sebesar 2,4 persen dan masih di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang berada di angka 5,6 persen. Namun penurunan angka ini akan tetap kita tekan melalui peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah dengan memperkuat sektor UMKM, koperasi, industri kreatif, kewirausahaan, investasi dan akan menjadikan salah satu andalan dalam memperkuat

pertanian dan pariwisata di kabupaten karo. Produk yang dihasilkan haruslah memiliki daya saing yang diminati oleh masyarakat di luar Kabupaten Karo baik yang berbentuk kerajinan, makanan maupun hasil-hasil pertanian. Untuk mencapai hal itu tentunya kita akan membina agar produk telah memiliki standar yang layak dan memiliki daya saing terhadap produk sejenis lainnya. Secara umum peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian di Kabupaten Karo akan terus ditingkatkan sehingga akan menyerap tenaga kerja maupun mendorong penciptaan wirausaha baru dalam rangka meningkatkan perekonomian dan sejalan dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Karo.

7. Misi Ketujuh : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Karo masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang mengingat pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tahun 2029 akses air minum dan sanitasi harus menuju akses yang aman. Peningkatan jalan dan drainase harus terus dioptimalkan, serta penyediaan jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan. Untuk infrastruktur permukiman perlu ditingkatkan penyediaan rumah layak huni, pelayanan persampahan serta penyediaan jalan lingkungan yang memadai. Selain itu peningkatan keselamatan jalan dengan menyediakan perlengkapan jalan seperti rambu maupun lampu jalan juga masih diperlukan termasuk peningkatan transportasi darat lainnya seperti pembangunan jalur kereta api dan peningkatan dermaga Tongging juga akan dilaksanakan. Salah satu yang penting pada saat ini adalah peningkatan ketersediaan infrastruktur digital untuk pelaksanaan transformasi digital di seluruh sektor pembangunan. Infrastruktur digital bukan hanya di lingkungan kantor pemerintah tetapi di lingkungan swasta dari kabupaten sampai ke desa, sehingga kabupaten menjadi sangat terbuka dan sebaliknya wawasan masyarakat Kabupaten Karo akan perkembangan teknologi juga terbuka lebar. Hal penting lainnya yang harus tetap diperhatikan adalah pelestarian lingkungan dan ketahanan energi untuk pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Karo. Dibutuhkan strategi jangka panjang untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur di Kabupaten Karo yang salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan daya tahan infrastuktur yang ada. Umur infrastruktur yang tidak panjang mengakibatkan dana pemeliharaan menjadi tinggi. Selain daya tahan, kualitas infrastruktur juga harus memperhatikan estetika. Khusus untuk bangunan dalam rangka pelestarian budaya untuk karo berbudaya maka bangunan gedung pemerintah yang dibangun harus bercirikan nuansa adat karo termasuk kita menghimbau bangunan-bangunan swasta untuk ikut sehingga setiap pengunjung akan terkesan dengan nuansa Kabupaten Karo.

8. Misi Kedelapan : Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah.

Karo modern bukan berarti kita harus ikut budaya barat, Karo modern bukan harus terkesan mewah, Karo modern bukan harus meninggalkan tradisi nenek moyang tetapi Karo modern harus berpikiran maju, menggunakan teknologi terkini, berpikir inovatif dan kreatif sehingga kita memiliki daya saing yang tinggi. Khususnya dalam pelayanan masyarakat kami akan mendorong pemanfaatan teknologi IT yang akan menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif.

9. Misi Kesembilan : Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas.

Kabupaten Karo berkomitmen untuk mengikuti dan menyesuaikan kebijakan dari pemerintah pusat (Nasional) dan pemerintah Provinsi. Ini

berarti bahwa segala program dan rencana pembangunan di tingkat daerah akan selaras dengan visi dan misi yang lebih luas dari pemerintah di atasnya. Dengan mendukung program nasional dan provinsi, Kabupaten Karo berupaya memastikan bahwa pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, tetapi berkontribusi dalam pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam implementasinya, Kabupaten Karo tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat tetapi juga sebagai mitra yang aktif berinovasi dalam menyesuaikan program nasional dengan kebutuhan spesifik masyarakat daerah. Indonesia Emas merujuk pada visi Indonesia di tahun 2045 sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. Kabupaten Karo berperan dalam mewujudkan visi ini dengan mengoptimalkan potensi daerah, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat. Dalam mendukung Indonesia Emas, Kabupaten Karo akan memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, pariwisata, serta industri kreatif dalam mencapai Karo unggul dan sejahtera.

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Karo
dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN

Asta Cita/Prioritas Nasional		Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Misi Pembangunan Kabupaten Karo	
Astacita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Misi 4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Misi 2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
				Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik
Astacita 2	Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Misi 3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Astacita 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim dan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Misi 1	Optimalisasi Kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
				Misi 6	Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, Mendorong Kewirausahaan, Industri Kreatif serta Sentra Produksi memanfaatkan potensi Pertanian, dan Pariwisata
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Astacita 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Misi 2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Misi 3	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi
				Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik
Astacita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Misi 3	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Astacita 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	Misi 3	Peningkatan Pertumbuhan	Misi 4	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;

Asta Cita/Prioritas Nasional		Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara		Misi Pembangunan Kabupaten Karo	
	pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.		Ekonomi Inklusif	Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas
Astacita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Misi 4	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif	Misi 1	Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik;
				Misi 5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik
				Misi 8	Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah
				Misi 9	Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas
Astacita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Misi 1	Optimalisasi Kualitas pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Misi 2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
				Misi 7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

Sumber: Bappedalitbang Karo, 2025

Dalam rangka pencapaian visi “Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul dan Karo Sejahtera Menuju Indonesia Emas” dan mendukung Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Nasional untuk pencapaian sasaran utama pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Laju pertumbuhan ekonomi pada *baseline* 4,90-5,27 persen (2025) dengan target 7,15-7,53 persen (2029);
2. PDRB per kapita pada *baseline* 75,24-75,51 juta (2025) dengan target 101,78 juta (2029)
3. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota pada *baseline* 2,59 persen (2025) dengan target 2,55 persen (2029)
4. Tingkat kemiskinan pada *baseline* 6,20-6,53 persen (2025) dengan target 2,98-2,15 persen (2029)
5. Rasio gini pada *baseline* 0,214 (2025) dengan target 0,212-0,210 (2029)
6. Indeks IPM pada *baseline* 76,90-77,40 (2025) dengan target 80,52-81,02 (2029)
7. Penurunan Emisi GRK pada *baseline* 130.888 ton CO2eq (2025) dengan target 223.175 ton CO2eq (2029)
8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah pada *baseline* 79,23 (2025) dengan target 79,92 (2029)
9. Tingkat Pengangguran Terbuka pada *baseline* 2,38-2,07 persen (2025) dengan target 2,02-1,57 persen (2029)

Tabel 3.2
Sasaran Utama Pembangunan
RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

No	Indikator Makro Pembangunan	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	4,90-5,27	5,46-5,83	6,03-6,40	6,59-6,96	7,15-7,53	7,71-8,10
2	PDRB perkapita (Rp Juta)	67,69016	Rp Juta	75,24-75,51	82,17-82,76	89,73-90,67	98,03-99,27	107,10-109,02	116,94-119,68
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,52	persen	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55	2,54
4	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,20-6,53	5,36-4,79	4,40-3,70	3,61-2,86	2,98-2,15	2,46-1,62

No	Indikator Makro Pembangunan	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Rasio Gini	0,214	Rasio	0,214	0,214	0,213	0,212	0,212-0,210	0,210
6	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	Indeks	76,90-77,40	77,60-78,20	78,30-78,90	79,00-79,60	80,52-81,02	81,50-82,00
7	Penurunan Emisi GRK	N/A	ton CO2 Eq2	130.888	154.234	178.546	201.987	223.175	245.678
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,21	Indeks	79,23	79,46	79,69	79,92	79,92	80,3
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	persen	2,38-2,07	2,27-1,98	2,15-1,88	2,09-1,74	2,02-1,57	1,90-1,40

Sumber: Bappedalitbang Karo, 2025

3.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi dan misi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dalam pencapaian visi dan misi harus dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai strategi dan arah kebijakan yang didukung oleh program pembangunan yang jelas dan terukur, sehingga setiap program yang dijalankan saling mendukung untuk pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur.

Dari 9 (sembilan) misi pembangunan Kabupaten Karo tersebut, dirumuskan ke dalam 10 (sepuluh) tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan ini menekankan pentingnya peningkatan tata kelola pemerintahan, yaitu bagaimana pemerintahan diselenggarakan agar berjalan dengan baik, transparan, akuntabel, dan profesional. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Tujuan akhir dari peningkatan tata kelola ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat, yang mampu melayani dengan baik dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan antara lain penerapan e-government untuk pelayanan administrasi publik, sistem pengaduan masyarakat online yang transparan, reformasi birokrasi dengan sistem merit dalam perekrutan ASN serta peningkatan kapasitas dan pelatihan pegawai negeri secara berkelanjutan.

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dicapai dengan sasaran pembangunan berikut:

- 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- 2) Meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tujuan 2 : Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal.

Tujuan ini berfokus pada pembangunan karakter dan jati diri bangsa dengan menyeimbangkan antara nilai-nilai keagamaan, toleransi antarumat, dan warisan budaya. Masyarakat yang religius dan berbudaya akan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan kehidupan yang damai, adil, dan berkeadaban. Masyarakat yang religius menunjukkan masyarakat yang memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman hidup yang didorong melalui pendidikan agama, kegiatan keagamaan, dan penguatan peran lembaga keagamaan serta mendorong sikap jujur, adil, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat yang berbudaya menunjukkan masyarakat yang mencintai, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Budaya dijadikan kekuatan untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan daya saing global. Pelestarian budaya dan kearifan lokal dengan menjaga dan mengembangkan identitas lokal seperti bahasa daerah, seni tradisional, upacara adat, serta sistem nilai lokal. Kearifan lokal juga bisa menjadi solusi dalam menghadapi masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi secara kontekstual.

Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal dicapai dengan sasaran pembangunan terwujudnya masyarakat yang berbudaya, modern dan religius.

Tujuan 3 : Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat.

Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem layanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan medis secara optimal, dengan akses yang mudah, biaya yang terjangkau, dan koordinasi yang baik antar fasilitas dan program kesehatan, sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang sehat secara fisik dan mental, produktif, dan memiliki kualitas hidup yang tinggi dapat dicapai melalui peningkatan mutu layanan di Puskesmas dan rumah sakit umum daerah, perluasan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS, penerapan sistem rekam medis digital terintegrasi antar fasilitas kesehatan dan program promotif dan preventif seperti Posyandu, imunisasi, cek kesehatan gratis. Hal ini juga berdampak pada peningkatan produktivitas nasional dan pengurangan beban negara terhadap biaya kesehatan jangka panjang serta terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat.

Untuk mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat dicapai dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup.

Tujuan 4 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tujuan ini berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, yaitu pertanian dan pariwisata, dengan pendekatan yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional, maupun internasional dengan menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang memperoleh penghasilan yang lebih baik, memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta terciptanya lapangan kerja, peningkatan daya beli, serta pengurangan angka kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan atau daerah dengan potensi pariwisata dan pertanian.

Tujuan pembangunan ini juga tidak terlepas dari pengembangan sektor unggulan daerah yaitu pertanian dan pariwisata. Pengembangan sektor pertanian dengan meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian melalui teknologi, bibit unggul, pelatihan petani, dan infrastruktur pertanian, mengembangkan hilirisasi produk pertanian, seperti pengolahan hasil panen menjadi produk jadi serta mendorong akses pasar yang lebih luas bagi petani, termasuk digitalisasi pasar (*e-commerce* produk pertanian). Pengembangan Sektor Pariwisata dengan mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang dimiliki daerah secara profesional, meningkatkan kualitas destinasi wisata, infrastruktur pendukung (akses jalan, sanitasi, akomodasi), serta kapasitas SDM pariwisata serta memajukan ekowisata dan wisata berbasis komunitas agar masyarakat lokal menjadi pelaku utama, bukan hanya penonton.

Selain itu, tujuan pembangunan ini juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata harus mampu berdaya saing dan berkelanjutan. Produk dan layanan di sektor pertanian dan pariwisata mampu bersaing dari segi kualitas, harga, dan inovasi serta peningkatan branding, promosi, serta sertifikasi yang mendukung reputasi sektor tersebut. Pengelolaan sumber daya dilakukan dengan prinsip ramah lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan dicapai dengan sasaran pembangunan:

- 1) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya lokal
- 2) Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau
- 3) Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah.

Tujuan 5 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

Tujuan pembangunan ini menitikberatkan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Karo yang berkualitas, memiliki keterampilan, etos kerja, dan karakter yang baik. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDM Kabupaten Karo yang Unggul dimaknai dengan masyarakat Karo memiliki kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan zaman yang didorong melalui akses pendidikan yang merata, berkualitas, dan berorientasi pada teknologi dan inovasi termasuk pula penguatan nilai-nilai lokal (kearifan budaya Karo) yang membentuk karakter SDM yang berintegritas, disiplin, dan bermoral. Kabupaten Karo

juga mampu bersaing di pasar kerja regional, nasional, maupun global didukung dengan pelatihan vokasi, pengembangan kewirausahaan, dan penguasaan teknologi informasi. Masyarakat memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, seperti industri kreatif, pertanian modern, dan digitalisasi. Sehingga masyarakat menikmati pelayanan dasar yang layak, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perumahan. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata serta lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung kehidupan sosial yang harmonis.

Untuk mewujudkan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat dicapai dengan sasaran:

- a) Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda;
- b) Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni; dan
- c) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.

Tujuan 6 : Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata.

Tujuan pembangunan yang berbunyi "Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata" menunjukkan arah pembangunan ekonomi yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan pengangguran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan, dengan menggali potensi ekonomi daerah seperti pertanian dan pariwisata, melalui pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), IKM (Industri Kecil dan Menengah), koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dan sektor lainnya.

Tujuan pembangunan ini pada akhirnya akhirnya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan, pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan, kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, IKM, koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata dicapai dengan sasaran meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja.

Tujuan 7 : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan ini menggambarkan komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur yang mendukung kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar dan strategis dan menjamin kualitas dan keandalan layanan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik, internet, transportasi, dsb) dan memastikan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan. Infrastruktur yang baik menjadi pondasi penting bagi mobilitas, konektivitas, pelayanan publik, dan investasi.

Untuk mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan dicapai dengan sasaran:

1. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman; dan
3. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau.

Tujuan 8 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

Tujuan pembangunan yang berbunyi “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana” menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam, sekaligus membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Tujuan ini mencakup dua aspek utama pembangunan berkelanjutan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan menjaga dan memperbaiki kondisi lingkungan agar tetap sehat, lestari, dan mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Masyarakat berketahanan bencana dengan peningkatan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mencegah, merespons, dan memulihkan diri dari bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran hutan, dan erupsi gunung api.

Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dicapai dengan sasaran:

- a) Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan
- b) Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana

Tujuan 9 : Meningkatnya pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah.

Tujuan pembangunan ini menekankan pentingnya transformasi digital dalam proses pembangunan, baik di bidang pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan masyarakat secara luas dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kecepatan pembangunan daerah dan pengembangan inovasi digital lokal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu tujuan ini juga mempercepat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan berbasis digital.

Untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah

Tujuan 10 : Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Tujuan pembangunan ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat agar arah pembangunan saling mendukung dan mencapai tujuan bersama. Pembangunan daerah tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian yang menyatu (terintegrasi) dalam kerangka besar pembangunan nasional dan provinsi. Setiap program, kebijakan, dan kegiatan pembangunan daerah harus sejalan dengan prioritas nasional dan provinsi, agar tercipta efisiensi, keselarasan, dan dampak yang lebih luas. Dengan kata lain, pembangunan daerah diarahkan untuk menjadi kontributor aktif dalam mewujudkan visi Indonesia dan provinsi kedepan.

Untuk mewujudkan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi dicapai dengan sasaran Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi.

Tabel 3.3
Pemetaan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

No	Misi		Tujuan		Sasaran
1	Mewujudkan Roda Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Efektif dan Efisien untuk meningkatkan Pelayanan Publik	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
				1.2.	Meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi
				1.3.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal.	2	Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	2.1	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya, modern dan religius
3	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	3	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk Meningkatkan kesehatan masyarakat	3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup
4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian, dan Pariwisata	4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal
				4.2	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau
				4.3	Penguatan stabilitas ekonomi daerah
5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan non akademik	5	Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	5.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda
				5.2	Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni
				5.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa

No	Misi	Tujuan		Sasaran	
6	Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, Mendorong Kewirausahaan, Industri Kreatif serta Sentra Produksi memanfaatkan potensi Pertanian, dan Pariwisata	6	Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	6.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	7.1	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan
				7.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
				7.3	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau
		8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	8.1	Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan
				8.2	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
8	Meningkatkan Pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah	9	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	9.1	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah
9	Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas	10	Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	10.1	Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi

Sumber: Bappedalitbang Karo (diolah)

Tabel 3.4
Perumusan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

VISI : MEWUJUDKAN KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO MODERN, KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	69,9	70,1	70,4	70,8	71,3	71,8	
			Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	
		1.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Belanja Riset (%)	0,06	0,07	0,08	0,09	0,01	0,11	
			Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	63	64	65	66	67	68	
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	87,4	87,6	87,8	88	88,5	90	
			Indeks Integritas (Angka)	77	78	79	79	80	80	
			Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Nilai SAKIP kabupaten (Nilai)	61	6.125	6,15	6.175	62	62,5	
			Level Maturitas SPIP (Level)	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
		1.2. Meningkatnya layanan publik berbasis digital dan keamanan informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,49	3,51	3,53	3,55	3,57	3,59	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,7	3,8	3,9	4	4,01	4,02	
		1.3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalis me Aparatur Sipil Negara (ASN)	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	75,7	75,8	75,9	76	76,1	76,2	
II. Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan	2. Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal		Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	96	97	98	99	100	100	
			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	45	45	45	45	45	45	
		2.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya dan toleran	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (%)	96	97	98	99	100	100	
			Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)	45	45	45	45	45	45	
			Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	73	73,5	74	74,5	75	75	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
III. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	3. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat	3.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup	Angka Kematian Ibu (AKI) ((kasus)	5	4	4	4	4	4	
			Prevalensi Stunting	16,6	15,5	14,3	13,2	12	10,9	
			Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	90	90	90	90	90	90	
			Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	90	90	90	90	90	90	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	99	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	
IV. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata	4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.90-5.27	5.46-5.83	6.03-6.40	6.59-6.96	7.15-7.53	7.71-8.10	
			Tingkat Kemiskinan (%)	6.20-6.53	5.36-4.79	4.40-3.70	3.61-2.86	2.98-2.15	2.46-1.62	
			Rasio Gini (Rasio)	0,214	0,214	0,213	0,212	0,212	0,21	
			Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55	2,54	
		4.1. Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	PDRB perkapita (Rp Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	75.24-75.51	82.17-82.76	89.73-90.67	98.03-99.27	107.10-109.02	116.94-119.68	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	2,74	2,94	3,14	3,39	3,64	3,89	
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	3,85	3,88	3,92	3,95	3,98	4,02	
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,6	2,62	2,65	2,69	2,72	2,75	
			Net Ekspor (SBM/Milyar Rupiah)	1.741,86	1.794,11	1.847,93	1.903,36	1.960,46	2.019,27	
			Kontribusi Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)	11,58	11,81	12,04	12,28	12,52	12,77	
			Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha) (Pelaku Usaha)	57	87	117	147	177	207	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31,91	32,02	32,13	32,24	32,35	32,46	
		4.2. Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	82,28	82,3	82,32	82,34	82,36	82,4	
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	55,5	56	56,5	57	57,5	58	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
V. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik	5. Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	4.3. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	Tingkat Inflasi (%)	1-Mar	1-Mar	1-Mar	45717	1-Mar	1-Mar	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,33	4,34	4,36	4,38	4,4	4,4	
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	
		5.1. Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Indeks Pembangunan Manusia (Angka)	76.90-77.40	77.60-78.20	78.30-78.90	79.00-79.60	80.52-81.02	81.50-82.00	
			Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD (%)	73,35	75,85	78,35	80,85	83,35	85,85	
			Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk A Numerasi SD (%)	73,18	75,68	78,18	80,68	83,18	85,68	
			Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP (%)	77,06	79,56	82,06	84,56	87,06	89,56	
			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP (%)	75,29	77,79	80,29	82,79	85,29	87,79	
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	10.13-10.25	10.26-10.35	10.36-10.40	10.41-10.46	10.47-10.40	10.41-10.45	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.27-13.37	13.38-13.49	13.50-13.61	13.62-13.62	13.74-13.80	13.81-13.85	
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	69	69,3	69,5	69,7	70	70,2	
			Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	43	45	50	52	53	55	
			Indeks Pembangunan Keluarga (%)	59,9	61,3	62,6	63,8	65	66,2	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,303	0,302	0,301	0,3	0,299	0,298	
			Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Angka)	62,01	63,56	65,15	66,78	68,45	70,16	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,34	0,59	0,84	1,13	1,22	1,63	
			Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	32,82	37,5	40	42,5	45	47,5	
			Persentase prestasi olahraga (%)	20	21	22	23	24	25	
			Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	35	37	39	42	45	47	
		5.3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri (%)	3,9	5,4	6,6	7,7	9,3	10,4	
VI. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan pariwisata	6. Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.38-2.07	2.27-1.98	2.15-1.88	2.09-1.74	2.02-1.57	1.90-1.40	
		6.1. Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	Rasio kewirausahaan daerah (Rasio)	4,11	4,15	4,22	4,3	4,37	4,41	
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,95	1,95	1,96	1,97	1,98	1,99	
VII. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	7. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Angka)	65	66	67	68	69	70	
		7.1. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	64	64	64,5	65	65,5	66	
			Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman (%)	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,8	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		ekonomi yang baik dan berkelanjutan	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	38,12	38,3	38,5	38,7	38,9	39,1	
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	64	64	64,5	65	65,5	66	
			Gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)	62	63	63,2	63,4	63,7	64	
		7.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))	99,12	99,34	99,56	99,78	99,93	99,97	
			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	50	51	60,75	63,56	68,55	71,67	
		7.3. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	3,6	3,2	2,8	2,4	2	1,6	
VIII. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah	8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana		Penurunan Emisi GRK (TON CO2 EQ)	130.888	154.234	178.546	201.987	223.175	245.678	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	79,23	79,46	79,69	79,92	79,92	80,3	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	103	102,5	102	101,5	101	100,5	
		8.1. Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan	Timbulan sampah yang ditangani (%)	77	77	77	78	78	78	
			Ketaatan terhadap RTRW (%)	74	74	74,5	75	75,5	76	
		8.2. Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	
	9. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah		Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Angka)	3.04-0	3.1-1.3	3.2-1.4	3.3-1.5	3.4-1.6	3.5-1.7	
		9.1. Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Angka)	3.04-0	3.1-1.3	3.2-1.4	3.3-1.5	3.4-1.6	3.5-1.7	
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)	6,05	6,06	6,07	6,08	6,09	6,1	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Angka)	40	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	
			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,8	2,81	2,82	2,83	2,84	2,85	
IX. Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas	10.Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi		Tingkat pencapaian indikator makro bersama (<i>shared development indicators</i>) pusat-daerah (%)	82	84	86	88	90	92	
		10.1. Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (<i>shared development indicators</i>) pusat-daerah (%)	82	84	86	88	90	92	

Tabel 3.5

Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan RPJPD

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029					RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045				
Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul dan Karo Sejahtera Menuju Indonesia Emas					Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju dan Berkelanjutan				
No	Misi	Tujuan	Sasaran		Arah Pembangunan		Sasaran Pokok		
1	Mewujudkan Roda Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Efektif dan Efesien untuk meningkatkan Pelayanan Publik	1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	IE9	Tata Kelola yang berintegritas, adaptif, efektif dan efisien	9	Terwujudnya tata kelola yang berintegritas, adaptif, efektif dan efisien
				1.2.	Meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi				
				1.3.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)				
2	Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal.	2	Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	2.1	Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya dan toleran	IE13	Kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	13	Terwujudnya masyarakat yang religius dan mengedepankan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan sehari-hari
3	Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	3	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk Meningkatkan kesehatan masyarakat	3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Terwujudnya masyarakat sehat dan terjamin
4	Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian, dan Pariwisata	4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	IE4	Produktivitas Ekonomi, Iptek dan Inovasi	4	Terwujudnya kemandirian ekonomi daerah
				4.2	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	IE11	Stabilitas ekonomi makro daerah	11	Terwujudnya pengendalian inflasi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah
				4.3	Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah				
5	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan non akademik	5	Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	5.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	2	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata
				5.2	Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	IE3	Masyarakat Sejahtera dan Terlindungi	3	Terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi masyarakat
				5.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	14	Terwujudnya keluarga yang berkualitas serta masyarakat inklusif

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029					RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025-2045				
Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul dan Karo Sejahtera Menuju Indonesia Emas					Kabupaten Karo Mejuah-juah, Maju dan Berkelanjutan				
No	Misi	Tujuan		Sasaran		Arah Pembangunan		Sasaran Pokok	
						IE10	Stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemenuhan HAM	10	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif serta pemahaman wawasan kebangsaan dan pemenuhan HAM yang baik
6	Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, Mendorong Kewirausahaan, Industri Kreatif serta Sentra Produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan Pariwisata	6	Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	6.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	7	Terwujudnya ekonomi yang holistik dan berdaya saing
7	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	7.1	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan	IE8	Kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	8	Terwujudnya pemerataan ekonomi perdesaan dan perkotaan
				7.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman				
				7.3	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau				
		8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	8.1	Terwujudnya kelestarian lingkungan dan penataan ruang wilayah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan	IE15	Lingkungan hidup yang berkualitas	15	Terwujudnya pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan
						IE5	Penerapan Ekonomi Hijau berbasis sektor unggulan	5	Terwujudnya peningkatan ekonomi yang ramah lingkungan
				8.2	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	IE16	Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian pangan	16	Terwujudnya daerah yang berketahanan energi, air dan mandiri pangan
						IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	17	Terwujudnya daerah yang berketahanan iklim dan tangguh bencana
8	Meningkatkan Pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah	9	Meningkatnya pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	9.1	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	IE6	Transformasi Digital	6	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang unggul
9	Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas	10	Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	10.1	Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi	IE12	Peran Kepemimpinan Kepala Daerah	12	Terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pelayanan publik, peningkatan keberdayaan dan partisipasi masyarakat

Tabel 3.6

Penyelarasan sasaran pembangunan RPJMD Karo dengan sasaran pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN Tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029		
	(Sasaran Per Provinsi)			Indikator	Baseline 2025	Target 2029	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
	Indikator	Baseline 2025	Target 2029						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,3	7,6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	4,90-5,27	7,15-7,53
2	PDRB Per Kapita (Rp juta)	78,4	115,3	PDRB per Kapita (Rp juta)	78,4	115,3	PDRB per Kapita (Rp juta)	75,24-75,51	107,10-109,02
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	5,2	5,3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	2,59	2,55
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96 – 7,46	2,82 – 3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,20-6,53	2,98-2,15
5	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,303 - 0,305	0,287 - 0,291	Rasio Gini	0,214	0,212-0,210
6	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Modal Manusia	0,54	0,57	Indeks Pembangunan Manusia	76,90-77,40	80,52-81,02
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	1	16,88	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	130.888	223.175
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,23	79,92
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 – 5,56	4,74 - 5,20	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,38-2,07	2,02-1,57

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah adalah suatu rencana atau pendekatan yang dirancang secara sistematis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan di suatu wilayah tertentu. Strategi ini mencakup serangkaian kebijakan, program, dan tindakan yang disusun berdasarkan potensi serta permasalahan daerah guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Arah kebijakan pembangunan daerah adalah pedoman strategis yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan guna mencapai tujuan tertentu dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Arah kebijakan ini disusun berdasarkan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan secara menyeluruh tentang cara pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Secara menyeluruh, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi pemerintahan daerah. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat strategik diperlukan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang disertai arah kebijakan yang tepat untuk setiap strateginya. Setiap strategi dan arah kebijakan harus menampakkan hubungan yang jelas terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Setiap permasalahan pembangunan yang harus dipecahkan memiliki karakteristik sendiri yang disertai dengan faktor-faktor penentu keberhasilan dalam pemecahan permasalahan sehingga strategi dalam pemecahan setiap permasalahan berbeda. Untuk mencapai keterpaduan strategi juga harus dikolaborasikan antara masing-masing perangkat daerah sehingga terjalin keterpaduan dalam pemecahan permasalahan. Kolaborasi ini harus tergambarkan dalam matriks yang jelas dan dijabarkan ke dalam arah kebijakan sehingga masing-masing perangkat daerah dalam menjalankan program memiliki arah yang jelas dan kontribusi terhadap pencapaian sasaan pembangunan daerah.

Pengimplementasian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi dan arah kebijakan sebagai langkah-langkah untuk merumuskan program indikatif. Strategi merupakan langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan peraturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan merupakan pedoman dalam mengarahkan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar selaras dan sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dilaksanakan. Pada tiap tahun diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karo yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 Mewujudkan Roda Pemerintahan yang Profesional, Bersih, Efektif dan Efisien untuk meningkatkan Pelayanan Publik memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dengan sasaran:

- 1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- 2) Meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sasaran pertama dalam pencapaian misi ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,

dengan akuntabel. Sasaran ini diwujudkan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan, dengan arah kebijakan:

- a) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Arah kebijakan ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui penguatan tata kelola yang baik, reformasi birokrasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan evaluasi berbasis kinerja.
- b) Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Arah kebijakan ini bertujuan memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas pengawas internal, optimalisasi akuntabilitas kinerja berbasis SAKIP serta mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah.

2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan arah kebijakan mencakup antara lain meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran serta pengendalian belanja maupun evaluasi kinerja keuangan daerah, meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Melalui arah kebijakan tersebut diharapkan Kabupaten Karo terus memperoleh Opini Badan Pemeriksa Keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan dan akuntabel, selain itu tingkat serapan APBD dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka implementasi sistem anggaran berbasis kinerja, aset daerah dapat terkelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan aktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, dengan arah kebijakan pendekatan berbasis kemitraan strategis, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat, sinergi yang terjalin dapat mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya kolaborasi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini, berdasarkan kemitraan strategis, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat pembangunan yang mencakup semua kalangan dan memiliki dampak positif yang berkelanjutan saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama.

Kemitraan strategis yang memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama secara efektif, berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan bersama, melalui *memorandum of understanding (MoU)* atau perjanjian kerja sama antara pemerintah dan pelaku swasta/organisasi masyarakat sipil (OMS), membangun platform kemitraan multi-pihak untuk proyek bersama (contoh: pembangunan infrastruktur sosial, layanan pendidikan, kesehatan) dan kolaborasi dalam program CSR swasta yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Digitalisasi dengan mengembangkan platform digital seperti aplikasi pengaduan, perencanaan, dan sistem pemantauan partisipatif yang memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik terhadap kinerja pelayanan publik, program pemerintah atau kebijakan pemerintah

(*citizen feedback mechanism*) melalui survei kepuasan masyarakat, aplikasi SP4N dan LAPOR dan media sosial resmi pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan inklusi dengan memberikan ruang, kapasitas, dan kesempatan bagi masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan dan mendapat manfaat yang setara dari hasil pembangunan tersebut, tanpa diskriminasi terhadap kelompok rentan (perempuan, difabel, miskin, daerah terpencil, dll).

Pembangunan berkelanjutan menjamin bahwa hasil pembangunan tidak hanya bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan ramah lingkungan dan menurunkan ketimpangan sosial dan menjaga daya dukung lingkungan.

Sinergi yang terjalin mengurangi duplikasi kegiatan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan mempercepat capaian pembangunan inklusif dan kolaboratif.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya layanan publik yang responsif berbasis digital dan keamanan informasi. Diwujudkan melalui strategi **Penguatan Pemerintahan yang dinamis dan responsif**, dengan arah kebijakan:

- a. Optimalisasi sumber daya aparatur, sarana prasarana, dan regulasi dalam peningkatan pelayanan publik. Arah kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan, cepat merespons kebutuhan masyarakat, serta efektif dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dicapai dengan mengoptimalkan unsur-unsur utama pendukung penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pengembangan sumber daya aparatur, optimalisasi sarana dan prasarana (pemanfaatan teknologi dan penyederhanaan prosedur), peningkatan kualitas regulasi (reformasi regulasi dan partisipasi masyarakat) dan transparansi dan akuntabilitas (mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan)
- b. Peningkatan pelayanan *one day servis*. Upaya ini untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul dan prima yaitu Pelayanan publik yang responsif cepat melalui penerapan “*One Day Service*” dengan melakukan redesign proses bisnis pelayanan dasar seperti KTP, KK, akta kelahiran, perizinan dengan pendekatan *Business Process Reengineering* (BPR) dan automasi sistem.

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN). Diwujudkan melalui strategi **peningkatan manajemen kepegawaian ASN**, dengan arah kebijakan melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi. Peningkatan manajemen kepegawaian ASN merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, dengan upaya digitalisasi layanan kepegawaian, pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan kinerja ASN, manajemen talenta, dan sistem merit. Implementasi strategis yang akan dilakukan antara lain penguatan budaya kerja berbasis penerapan dan penilaian kinerja menggunakan teknologi informasi, pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi melalui teknologi informasi (SILATIH), dan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) bagi ASN.

Misi 2 Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal, memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal, adapun sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu terwujudnya masyarakat yang berbudaya, modern dan religius. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut dicapai melalui strategi dan arah kebijakan yaitu:

1. Pembangunan spritualitas dan toleransi antarumat beragama, dengan arah kebijakan penguatan spritualitas masyarakat dan kerukunan antar umat beragama. Pembangunan spritualitas dan toleransi antar umat beragama merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran spiritual, moral, dan etika masyarakat, membangun kerukunan antar umat beragama sebagai fondasi kehidupan sosial yang damai dan harmonis, menangkal radikalisme, intoleransi, dan konflik horizontal berbasis agama, memperkuat nilai-nilai Pancasila, kebhinekaan, dan persatuan nasional.

Implementasi strategis dalam penguatan spritualitas masyarakat dan kerukunan antar umat beragama yang akan dilakukan antara lain:

- Penguatan pendidikan agama dan nilai luhur dengan penguatan peran guru, dan lembaga keagamaan untuk membina moderasi beragama dan integrasi pendidikan agama dan karakter ke dalam kurikulum sekolah.
- Dialog lintas agama dan forum kerukunan melalui penguatan forum kerukunan umat beragama, dialog lintas iman dengan pendekatan budaya lokal dalam menyatukan keberagaman.
- Fasilitasi dan dukungan terhadap rumah ibadah dengan menjamin kebebasan beribadah dan menyelesaikan konflik keagamaan.
- Kampanye publik dan sosialisasi nilai toleransi melalui peringatan hari besar keagamaan secara inklusif dan terbuka untuk lintas komunitas serta mendorong tokoh masyarakat dan pemuka agama sebagai agen perubahan dan penyejuk publik.
- Membentuk keluarga tangguh spiritual dan moral dengan mendorong tokoh agama, masyarakat dan lembaga agama untuk memperkuat ketahanan spritualitas umat dengan membangun, memelihara, dan menerapkan nilai-nilai keagamaan dan moral dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai-nilai religious, keteladanan orangtua, komunikasi yang sehat, kegiatan keagamaan bersama dan pendidikan spritualitas anak (membangun empati, gotong royong dan pengendalian diri) sehingga menjadi dasar kekuatan emosional, sosial, dan budaya dalam menghadapi tantangan hidup, karena keluarga menjadi benteng utama dalam pembangunan karakter bangsa.

2. Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi dan lingkungan, dengan arah kebijakan mencakup antara lain penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat. Kabupaten Karo memiliki kekayaan budaya yang unik, mulai dari sistem sosial dan adat, bahasa hingga warisan kuliner dan arsitektur tradisional. Arah kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan identitas masyarakat Karo di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terutama generasi muda terhadap adat dan budaya Karo, meningkatkan identitas Budaya Karo dalam berbagai aktivitas termasuk penguatan tatakelola desa berbasis budaya, revitalisasi budaya melalui Pendidikan dan komunitas, penataan fasilitas dan arsitektur berbasis kearifan lokal,

meningkatkan peran lembaga adat dalam pembangunan. Penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak/kolaborasi multisektor dalam pelaksanaannya.

- 3. Pengembangan nilai dan warisan budaya daerah**, dengan arah kebijakan mencakup peningkatan inventarisasi, identifikasi dan pelestarian seni budaya daerah. Arah kebijakan ini berkaitan dengan kebijakan sebelumnya dan ruang lingkup pada kebijakan ini diperluas untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian kebudayaan daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan masyarakat Karo. Pelestarian yang dilakukan terhadap cagar budaya dan warisan budaya tak benda, selain itu kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi Masyarakat dengan keterlibatan berbagai pihak untuk mendukung ekonomi kreatif berbasis budaya dan menambah daya tarik wisata.

Misi 3 Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi. Misi 3 memiliki tujuan terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk Meningkatkan kesehatan masyarakat. Misi ini dijabarkan dalam sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup, yang diwujudkan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas sistem, tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan**, dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan secara merata dan terjangkau. Merupakan upaya menjamin semua masyarakat tanpa diskriminasi wilayah atau status sosial, Mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan antar wilayah dan Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat, hal ini dilakukan dengan beberapa langkah strategis:
 - Peningkatan akses layanan masyarakat melalui pembangunan dan revitalisasi fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, pustu, pembangunan rumah sakit umum daerah, pengelolaan distribusi tenaga kesehatan.
 - Peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan melakukan akreditasi dan reakreditasi fasilitas kesehatan, pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan dan penguatan layanan kesehatan primer dan rujukan
 - Penguatan Jaminan Kesehatan dengan perluasan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan ke masyarakat, khususnya menysasar masyarakat miskin dan rentan.
- b. Pengembangan layanan kesehatan berbasis *medical tourism*. Merupakan layanan kesehatan dengan mengintegrasikan potensi pariwisata untuk menarik wisatawan berobat sekaligus berwisata di Kabupaten Karo, yang berdampak pada peningkatan PAD dari layanan kesehatan dan jasa wisata, beberapa hal yang akan dilakukan yaitu pemetaan layanan unggulan, penguatan Infrastruktur dan SDM, kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas layanan, promosi dan branding daerah.
- c. Perbaikan layanan kesehatan secara manajerial maupun kualitas teknis profesional kesehatan. Upaya ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, klinik), meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, serta mewujudkan layanan kesehatan yang bermutu, cepat, ramah dan terstandar. Beberapa hal yang akan dilakukan yaitu penguatan manajemen kesehatan, digitalisasi layanan dan administrasi,

- standarisasi SOP, penguatan etika profesi dan budaya kerja kolaboratif.
- d. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak. Arah kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, nifas, bayi dan balita serta menurunkan angka stunting. Hal ini dilakukan dengan penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di fasilitas kesehatan seperti peningkatan kapasitas bidan dan tenaga kesehatan, pelayanan KIA terintegrasi di puskesmas dan rumah sakit. Pelayanan KIA di tingkat desa dengan penguatan posyandu dan poskesdes, penguatan kader posyandu, dan penguatan peran bidan desa.
 - e. Peningkatan gizi dan penurunan prevalensi stunting. Arah kebijakan ini bertujuan menurunkan angka stunting, meningkatkan status gizi ibu hamil, bayi, dan balita secara berkelanjutan dan menguatkan peran lintas 31 sektor dalam percepatan pencegahan stunting berbasis keluarga dan komunitas. Kebijakan ini dilakukan dengan menyasar 1.000 hari pertama kelahiran dengan memastikan ibu hamil dan balita pelayanan kesehatan dan mendapatkan asupan makanan bergizi, pendidikan gizi dan pola asuh keluarga, peningkatan ketahanan pangan keluarga, pendampingan keluarga beresiko stunting, pemantuan tumbuh kembang balita dll.
 - f. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Arah kebijakan ini bertujuan mengendalikan penyebaran penyakit menular, mencegah dan mengurangi beban penyakit tidak menular dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan memeriksakan kesehatan secara rutin. Hal ini dilakukan melalui penguatan deteksi dini, pengobatan tuntas, edukasi gaya hidup sehat, monitoring berkelanjutan, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, penguatan kemitraan multisektor.
 - g. Perluasan upaya promotif-preventif dan gerakan perilaku hidup bersih dan sehat. Arah kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan, mencegah timbulnya penyakit melalui perubahan perilaku dan lingkungan sehat. Hal ini dilakukan melalui penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di keluarga, sekolah, tempat kerja, fasilitas umum dan fasilitas kesehatan, serta kampanye dan edukasi hidup sehat.
 - h. Pengembangan kesehatan tradisional melalui Karo Health Village. Arah kebijakan ini memadukan potensi lokal desa dalam bidang kesehatan dengan pelayanan yang berbasis masyarakat. Konsep desa yang mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan baik promotif, preventif, maupun kuratif dengan melibatkan peran aktif masyarakat, seperti jamu, pijat tradisional, refleksi, dan tanaman obat keluarga (TOGA) dll. dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai bagian dari layanan kesehatan berbasis kearifan lokal.
 - i. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah. Arah kebijakan ini bertujuan pembangunan rumah sakit umum di lahan baru yang berlokasi di Desa Rumah Kabanjahe/Lingga dengan melakukan penguatan infrastruktur dan sarana pendukung layanan unggulan, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kesehatan, pengembangan layanan unggulan menjadi sentra kawasan layanan unggulan, transformasi tata kelola dan kelembagaan rumah sakit, digitalisasi dan inovasi pelayanan kesehatan, penguatan sistem rujukan dan kolaborasi jejaring pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien dan penguatan peran rumah sakit

dalam ketahanan kesehatan daerah serta pengembangan rumah sakit umum berbasis medical tourism.

- 2. Pengembangan kebudayaan olahraga yang inklusif**, dengan arah kebijakan mencakup peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, kebijakan ini untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif Masyarakat dalam berolahraga termasuk penyandang disabilitas, pengembangan olahraga masyarakat dimaksud agar meningkatkan kehidupan yang lebih berkualitas.

Misi 4 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis Pertanian, dan Pariwisata, memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, tujuan ini menekankan pentingnya transformasi ekonomi daerah yang tidak hanya tumbuh secara kuantitatif tetapi juga tangguh dalam jangka Panjang, hal ini dicapai melalui penguatan sektor-sektor produktif unggulan dengan pemanfaatan IPTEKIN, terdapat tiga sasaran untuk mewujudkan tujuan tersebut yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya lokal, meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau, penguatan stabilitas ekonomi daerah. Untuk mencapai sasaran pertama yaitu meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk berbasis sumber daya lokal ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan produksi dan produktivitas yang berkualitas sektor pertanian dan perikanan serta sektor lainnya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal**, arah kebijakan yaitu:
 - a. Penguatan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi dan implementasi IPTEKIN yang ramah lingkungan. Arah kebijakan ini bertujuan untuk transformasi pengelolaan dari tradisional ke modern menggunakan teknologi baru secara berkelanjutan antara lain meliputi akselerasi *smart farming* dan digitalisasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sektor pertanian dan perikanan dan penguatan kelembagaan, ekstensifikasi dan intensifikasi untuk peningkatan daya guna lahan pertanian melalui pemanfaatan IPTEKIN meliputi pengelolaan media tanam, input pertanian yang intensif berbasis IPTEKIN yang ramah lingkungan, infrastruktur yang efisien dan modern, dll, implementasi teknologi pasca panen (pengudangan, *solar dryer*, *cornsheller*, *Agro-industry* dll), modernisasi budidaya perikanan, peningkatan produksi ternak dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan distribusi/akses pasar domestik/global, sektor pertanian dan perikanan dalam arti luas yang meliputi komoditi perkebunan, hortikultura, pangan, peternakan dan perikanan.
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana yang unggul serta infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta sektor lainnya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal, Arah kebijakan bertujuan antara lain penyediaan bibit/benih dan varietas unggul, pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, penguatan alat dan mesin pertanian, *Demonstration Plot* (Demplot) dan sekolah lapang, pembangunan/pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, sistem drainase jalan usaha tani, jembatan/jalan penghubung ke sentra produksi pertanian dan perikanan,

peningkatan sarana dan prasarana peternakan, fasilitas/sarana pengolahan pasca panen untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta sarana prasarana pendukung lainnya.

- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia sektor pertanian dan perikanan baik kapasitas individu petani, penyuluh maupun kelembagaan serta terus Mendukung keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi melalui regenerasi petani, arah kebijakan bertujuan antara lain peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudi daya ikan, Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan, dukungan pelatihan dan pendampingan bagi peternak, penguatan penyuluh dan pendayagunaan penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan ekonomi petani dan perikanan mencakup model korporasi berbasis koperasi, BUMDes Agro atau *holding* usaha tani dan perikanan, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan.
- d. Peningkatan pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan sektor pendukung, arah kebijakan bertujuan antara lain untuk Penerapan *Integrated Eco Farming*, meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, penguatan kolaborasinya dengan dunia usaha, bank, akademisi, lembaga riset, asuransi pertanian dan asuransi perikanan, Pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan mendukung ekonomi hijau dan biru, mendukung kolaborasi pengembangan pertanian dan perikanan prioritas Nasional dan provinsi Sumatera Utara.

2. Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan/hilirisasi produk, perdagangan yang padat karya berorientasi ekspor dan berkelanjutan, arah kebijakan yaitu:

- a. Peningkatan kapasitas dan daya saing industri pengolahan/hilirisasi hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis Sumber Daya Alam Unggulan dan IPTEKIN, arah kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian agar tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Kebijakan ini meliputi antara lain melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan produk yang memiliki standar pasar, mendukung iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan, pengembangan aglomerasi industri sesuai dengan industri unggulan kabupaten, percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang handal, regulasi dan kebijakan yang mendukung. Arah kebijakan ini juga mendukung pengembangan hilirisasi dan industrialisasi prioritas Nasional dan provinsi Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan aktivitas pasar dan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor melalui peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana, kerjasama antar daerah. Kebijakan ini bertujuan menciptakan rantai pasok pertanian yang efisien, terhubung, dan berbiaya rendah, meningkatkan akses petani terhadap pasar yang lebih luas, efisien, dan transparan. Meningkatkan pemasaran berbasis teknologi antara lain melalui digitalisasi, seperti pemanfaatan *platform e-commerce* pertanian, aplikasi distribusi hasil tani, hingga sistem informasi harga dan permintaan pasar, petani dapat terhubung langsung dengan konsumen, pelaku usaha, dan distributor tanpa perantara yang merugikan, meningkatkan

kesejahteraan petani melalui jaminan pasar yang lebih luas, stabil, dan menguntungkan, mengembangkan pola kemitraan.

- c. Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kebijakan ini bertujuan antara lain sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah, penyediaan barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja.

3. Meningkatkan daya saing sektor pariwisata, arah kebijakan yaitu,

- a. Pemenuhan aspek 6A (*Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Ancillary Services, Aktivitas, Available Packages*) secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan arah kebijakan ini bertujuan untuk pengembangan pariwisata yang komprehensif, berdaya saing dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh elemen penting pada setiap destinasi wisata.
- b. Meningkatkan tata kelola destinasi dan industri pariwisata, kebijakan ini antara lain bertujuan untuk pengelolaan yang terkoordinasi, partisipatif, profesional dan berkelanjutan yang aman serta nyaman dalam pengembangan dan menjalankan destinasi wisata dengan melibatkan kolaborasi multi pihak.
- c. Pengembangan destinasi wisata prioritas, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing destinasi pariwisata prioritas yang memiliki potensi unggul secara berkelanjutan.
- d. Penguatan pemasaran/promosi, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan citra dan daya tarik destinasi pariwisata melalui pemasaran dan promosi yang terarah, kreatif, dan berbasis digital, sehingga mampu memperluas jangkauan pasar, menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara, serta mendorong peningkatan kunjungan wisata yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- e. Peningkatan kualitas SDM serta peningkatan sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- f. Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan dan pengembangan destinasi wisata berbasis pengetahuan. Arah kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelestarian warisan budaya dan daya tarik pariwisata melalui pendekatan inovatif.

4. Mendorong pertumbuhan penanaman modal, arah kebijakan yaitu:

- a. Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui ketersediaan (sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan) kebijakan serta regulasi investasi, penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha,
- b. Pemberian insentif dan kemudahan investasi yang efektif,
- c. Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha,
- d. Peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah termasuk proyek yang siap ditawarkan (*Investment Project Ready to Offer/IPRO*)

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran kedua yaitu meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau, ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan Kemandirian Pangan, arah kebijakan yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan, arah kebijakan ini untuk memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses yang cukup terhadap pangan.
- b. Meningkatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, kebijakan ini bertujuan

mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak tergantung pada satu jenis pangan dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi aneka ragam Pangan dengan prinsip gizi seimbang, mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan, meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal, mengembangkan dan mendiseminasikan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal.

2. **Peningkatan ketersediaan air baku untuk irigasi** dengan arah kebijakan meningkatkan ketersediaan air baku untuk irigasi.

Untuk mencapai sasaran ketiga yaitu penguatan stabilitas ekonomi daerah, ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. **Tingkat inflasi yang rendah dan stabil**, inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan antara lain yaitu menjaga keterjangkauan harga produk pangan strategis dan ketersediaan pasokan pangan, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar serta mendorong peningkatan dan penguatan kerjasama antar daerah (kelancaran distribusi), perlindungan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah.
2. **Peningkatan IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah)**, Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di daerah, semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Arah kebijakan antara lain peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), meningkatkan akses, literasi dan pemanfaatan layanan keuangan yang aman, terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, percepatan implementasi inklusi keuangan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait.
3. **Peningkatan Pendapatan Daerah**, dengan arah kebijakan mencakup antara lain mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, inovasi dalam peningkatan pendapatan alternatif, memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, penguatan sistem pemungutan pajak, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD. Kebijakan tersebut tentunya didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Arah kebijakan peningkatan pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah secara mandiri dan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat serta dapat mendukung belanja pembangunan yang lebih berkualitas.

Misi 5 Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang Intelektual, Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing melalui adanya Sekolah Unggulan dan Rumah Pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik, memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda.

- 2) Terwujudnya kesejahteraan keluarga, Perlindungan sosial, pemuda berkualitas, lingkungan sosial yang aman, dan harmonisasi.
- 3) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa.

Misi 5 ini merupakan upaya menciptakan masyarakat Karo yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, menumbuhkan generasi muda yang intelektual, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman, memperluas akses pendidikan dan pelatihan berkualitas yang berbasis pada potensi lokal dan kebutuhan masa depan sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sasaran pertama dalam pencapaian misi ini adalah meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda. Sasaran ini diwujudkan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran. Tujuan arah kebijakan ini menjamin setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang layak, meningkatkan mutu pembelajaran, dan pemerataan sarana, prasarana, dan teknologi pendidikan. Beberapa langkah strategis dilakukan dengan pembangunan dan rehabilitasi sekolah, tata kelola distribusi tenaga pendidik, beasiswa siswa miskin dan rentan putus sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran serta digitalisasi sekolah.
- b. Peningkatan pengelolaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas. Tujuan arah kebijakan ini untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan, mewujudkan sistem pengelolaan SDM pendidikan yang transparan, terstandar, dan berkelanjutan, serta menjamin mutu proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui peningkatan kapasitas SDM. SDM pendidikan berkualitas adalah fondasi utama untuk mencetak generasi unggul untuk itu akan dilakukan langkah strategis dengan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan tata kelola SDM pendidikan.
- c. Pengembangan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Tujuan arah kebijakan ini meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan berhitung sebagai fondasi utama pembelajaran dan menanamkan budaya literasi dan berpikir kritis sejak dini di seluruh jenjang pendidikan sehingga meningkatkan dapat nilai literasi dan numerasi siswa. Kemampuan literasi dan numerasi adalah kunci keberhasilan pembelajaran di semua mata pelajaran dan jenjang pendidikan, pengembangannya dilakukan melalui gerakan literasi sekolah, pelatihan guru dalam pengajaran berbasis literasi numerasi, kegiatan literasi berbasis proyek, pembelajaran kontekstual dan menyenangkan, kompetisi dan festival matematika dan lain-lain.
- d. Pengembangan kelas unggulan. Tujuan arah kebijakan ini meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembentukan kelas dengan standar pembelajaran lebih tinggi dari rata-rata sekolah reguler, Menampung dan mengembangkan potensi siswa berprestasi di bidang akademik, seni, olahraga, dan kepemimpinan serta Menjadi pusat inovasi pembelajaran dan model praktik baik pendidikan serta pengimbasan mutu pembelajaran ke sekolah lain. Pengembangan kelas unggulan dilakukan antara lain dengan penetapan sekolah penyelenggara, peningkatan sarana prasarana layanan unggul, peningkatan kualitas guru kelas unggulan, pengembangan program

pembinaan prestasi, promosi dan replikasi, pengawasan dan kolaborasi lintas pihak.

Kelas unggulan dirancang sebagai fondasi sekolah bertransformasi menuju sekolah unggulan, dengan menjadikan kelas unggulan:

1. sebagai *role model* dalam upaya menjadikan sekolah sebagai institusi pendidikan unggulan
2. menjadi wadah pembinaan siswa terbaik dan pionir menuju sekolah unggulan
3. penguatan mutu di kelas unggulan diharapkan mendorong terciptanya budaya unggul di seluruh lingkungan sekolah
- e. Peningkatan prestasi peserta didik melalui pengembangan minat, bakat dan kreativitas. Arah kebijakan ini bertujuan mengembangkan minat, bakat dan kreativitas untuk membantu peserta didik mengenali potensi diri, serta mengembangkannya melalui kegiatan yang mendukung pencapaian prestasi di bidang akademik maupun nonakademik.
- f. Peningkatan Kompetensi Lulusan. Arah kebijakan ini bertujuan menyiapkan lulusan yang berdaya saing tinggi, menyesuaikan kompetensi lulusan dengan tuntutan perkembangan teknologi dan pasar kerja. Arah kebijakan ini difokuskan pada penyelarasan kurikulum, dan metode pembelajaran.
- g. Beasiswa Pendidikan. Tujuan arah kebijakan ini memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi siswa berprestasi meskipun memiliki keterbatasan ekonomi, meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan menumbuhkan budaya prestasi di lingkungan sekolah.
- h. Meningkatkan pendidikan karakter siswa dengan nilai-nilai moral, etika dan berkepribadian baik. Tujuan arah kebijakan ini membangun nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik sejak dini, baik melalui pembelajaran di kelas maupun kegiatan di luar kelas, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, kerja sama dan lain sebagainya.

2. Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan, dengan arah kebijakan:

- a. Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan serta pelayanan perpustakaan. Tujuan arah kebijakan ini untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi, mengembangkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang modern, nyaman, dan ramah anak dan mendorong transformasi perpustakaan dari tempat penyimpanan buku menjadi ruang edukatif dan interaktif.
- b. Meningkatkan aktivitas literasi masyarakat. Arah kebijakan ini akan dilakukan dengan penguatan fasilitas literasi, kampanye dan gerakan literasi, pemberdayaan komunitas, digitalisasi literasi dan lain sebagainya.

Sasaran kedua yaitu terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni. Sasaran ini diwujudkan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga, dengan arah kebijakan:

- a. Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi serta meningkatkan pemberdayaan perempuan. Tujuan arah kebijakan ini untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, maupun diskriminasi, mewujudkan lingkungan aman, inklusif, dan

setara gender, meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian perempuan di berbagai bidang kehidupan dan mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sesuai prinsip hak asasi manusia.

- b. Memperkuat peran keluarga dalam menerapkan 8 tugas fungsi keluarga (kegamaan, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi, perlindungan, sosialisasi, dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan). Tujuan arah kebijakan ini untuk menjadikan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang kuat, tangguh, dan harmonis, mendorong keluarga agar berfungsi optimal dalam mendidik, melindungi, dan membina anggotanya, mengurangi permasalahan sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, dan kemiskinan, dan membangun masyarakat yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual, dimulai dari keluarga.
- c. Pengendalian penduduk. Tujuan arah kebijakan ini untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk agar seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mewujudkan kualitas penduduk yang lebih baik, sehat, produktif, dan berpendidikan, mengurangi dampak kepadatan penduduk terhadap kemiskinan, pengangguran, dan pelayanan publik, dan mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
- d. Meningkatkan pengasuhan anak yang layak dan simulasi dini pada anak. Tujuan arah kebijakan ini untuk menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal secara fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual, memberikan lingkungan pengasuhan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, dan bebas kekerasan, meningkatkan peran orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini, dan mencegah stunting, keterlambatan perkembangan, dan gangguan psikososial pada anak.

2. Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusi, dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan cakupan jaminan sosial. Peningkatan cakupan jaminan sosial mengacu pada upaya memperluas akses dan partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan sosial. Tujuan arah kebijakan ini mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, dan menjamin keamanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan.
- b. Penguatan data dan informasi serta tata kelola perlindungan sosial. Penguatan data, informasi, dan tata kelola perlindungan sosial merupakan kunci utama dalam menciptakan sistem perlindungan sosial yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Langkah strategis yang akan dilakukan yaitu penguatan data dan informasi pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta penguatan tata kelola perlindungan sosial yang baik melibatkan transparansi, akuntabilitas, koordinasi, dan efisiensi.
- c. Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Tujuan arah kebijakan ini meningkatkan akses dan keberlanjutan perlindungan sosial bagi kelompok yang paling membutuhkan, mengurangi risiko masyarakat rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem dan mendorong inklusi sosial dan ekonomi.
- d. Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tujuan arah kebijakan ini adalah memberikan perlindungan dan kepastian bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial maupun ekonomi yang timbul akibat hubungan kerja, seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan,

maupun hari tua, sehingga dapat meningkatkan rasa aman, kesejahteraan, dan produktivitas tenaga kerja serta mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan

3. Menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah. Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan hidup bersama di masyarakat. Tujuan arah kebijakan ini menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda, mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu ketertiban umum, mendukung pembangunan daerah yang tertib dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan yaitu sosialisasi dan edukasi, pelibatan aktif aparat dan masyarakat, peningkatan penegakan hukum, serta digitalisasi dan inovasi layanan.
- b. Peningkatan upaya preventif tindakan kejahatan. Tujuan arah kebijakan ini mengurangi angka kejahatan melalui pencegahan dini, meningkatkan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Langkah strategis peningkatan upaya preventif antara lain peningkatan patroli dan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dan edukasi keamanan kerjasama lintas sektor serta penataan lingkungan.
- c. Penguatan kemitraan *stakeholder* untuk Kamtibmas. Tujuan arah kebijakan ini membangun sinergi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam menjaga keamanan, meningkatkan efektivitas pengawasan dan penanganan potensi gangguan ketertiban, dan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
- d. Menekan angka penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat adalah perilaku sosial yang menyimpang dan berpotensi mengganggu ketenteraman serta ketertiban umum, seperti penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, perjudian dan prostitusi, tindak premanisme, kenakalan remaja dan tawuran dan penyimpangan moral dan sosial lainnya. Tujuan arah kebijakan ini Menciptakan lingkungan sosial yang sehat, aman, dan kondusif, Melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari pengaruh negatif serta Menumbuhkan kesadaran hukum dan moral di masyarakat.

4. Peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan serta kebebasan berdemokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Pelaksanaan edukasi tentang hak dan kewajiban berdemokrasi. Tujuan arah kebijakan ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makna demokrasi Pancasila, menumbuhkan sikap aktif, bertanggung jawab, dan beretika dalam kehidupan demokratis dan mencegah penyalahgunaan kebebasan yang dapat mengancam ketertiban dan persatuan bangsa.
- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Tujuan arah kebijakan ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi, meningkatkan legitimasi hasil pemilu melalui partisipasi yang luas dan menumbuhkan kesadaran politik yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. Peningkatan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan. Tujuan arah kebijakan ini menanamkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, membentuk karakter warga negara yang cinta tanah air, toleran, dan menjunjung persatuan

dan menanggulangi radikalisme, intoleransi, dan disintegrasi bangsa melalui penguatan kesadaran kebangsaan.

5. Optimalisasi penguatan peran olahraga dan pemuda, arah kebijakan yaitu:

- a. Optimalisasi pembinaan olahraga berprestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif;
- c. Penguatan peran dan daya saing pemuda dan olahraga; dan
- d. Penguatan kolaborasi dan sinergi antar sektor/stakeholders terkait.

Sasaran ketiga yaitu meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa. Sasaran ini diwujudkan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sumber daya manusia, dengan arah kebijakan:

- a. Penguatan ekonomi desa dan kewirausahaan berbasis potensi lokal. Tujuan arah kebijakan ini mendorong kemandirian ekonomi desa melalui optimalisasi potensi lokal, membangun ekosistem kewirausahaan berbasis komunitas dan sumber daya lokal. Diharapkan hal ini berdampak bertambahnya unit usaha produktif yang dikelola warga desa, meningkatnya pendapatan wirausaha desa dan tumbuhnya produk unggulan desa.
- b. Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan responsif. Tujuan arah kebijakan ini mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, mendorong pelayanan publik desa yang cepat, tepat, dan berpihak pada kebutuhan warga dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dan korupsi di tingkat desa.
- c. Pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas desa. Tujuan arah kebijakan ini meningkatkan konektivitas dan mobilitas warga desa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah antara desa dan kota, mempercepat pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan distribusi logistik dan mendukung pembangunan berkelanjutan dan inklusif di pedesaan

Misi 6 Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, Mendorong Kewirausahaan, Industri Kreatif serta Sentra Produksi memanfaatkan potensi Pertanian, dan Pariwisata, tujuan yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata. Sasaran dari tujuan tersebut yaitu meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja, hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja yang adil, merata dan terbuka untuk semua kelompok Masyarakat adapun strategi dan kebijakan adalah

1. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil, arah kebijakan yaitu:

- a. Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja, sertifikasi tenaga kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, arah kebijakan ini bertujuan antara lain memperluas peluang kerja dan mendorong kemandirian ekonomi melalui pelatihan vokasional, pengembangan kewirausahaan, serta

pendampingan intensif, peningkatan daya saing tenaga kerja baik formal maupun nonformal.

- b. Memperluas lapangan kerja yang inklusif dan penguatan sistem informasi pasar kerja untuk meningkatkan konektivitas antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja

2. Pengembangan UMKM, IKM, koperasi, kewirausahaan, industri kreatif melalui pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing, arah kebijakan yaitu:

- a. Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda dan perempuan yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan kapasitas kewirausahaan melalui akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha
- b. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku UMKM, IKM dan koperasi secara menyeluruh melalui strategi pendampingan intensif, peningkatan inovasi, perluasan jaringan usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan akses terhadap pasar dan pembiayaan, memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah melalui pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, mulai dari proses produksi, pemasaran, hingga pengelolaan usaha.
- c. Meningkatkan pemasaran berbasis teknologi dan mengembangkan pola kemitraan pelaku UMKM, IKM dan koperasi dengan pelaku usaha besar dan stakeholders terkait, Arah kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara industri besar, *startup*, dan UMKM dalam rangka memperkuat rantai nilai dan mendorong inovasi usaha
- d. Penguatan peran dan daya saing pelaku ekonomi kreatif, arah kebijakan bertujuan antara lain penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas, akses, kolaborasi dan perlindungan hukum terhadap karya dan pelaku ekonomi kreatif.

Misi 7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas

yang memiliki dua tujuan yang ingin dicapai yakni tujuan pertama meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan dan kedua meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan upaya antara lain pengembangan dan penataan infrastruktur yang berkualitas, estetik, ramah lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan ketahanan bencana. Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana dimaksud, peran penting dari berbagai pihak sangat penting. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan sinergi dalam pelaksanaan program. Selain itu peran sektor swasta diharapkan dapat berinvestasi, mengembangkan masyarakat inovatif, dan bekerja sama dengan pemerintah. Tujuan tersebut juga mendukung terwujudnya swasembada pangan, air dan energi. Kabupaten Karo merupakan salah satu lokasi prioritas untuk kawasan swasembada pangan, air dan energi. Sejalan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menjadikan Kabupaten Karo sebagai lokasi prioritas untuk swasembada pangan, air dan energi. Untuk memastikan pencapaian tujuan tersebut dapat berjalan sesuai rencana, dijabarkan dalam beberapa sasaran pembangunan, sebagai berikut:

- 1) Sasaran pertama terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan melalui strategi untuk mencapai sasaran tersebut adalah melalui **Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi** dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur

dasar dan infrastruktur ekonomi. Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang akan ditingkatkan adalah:

a. Jalan dan jembatan

Jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Karo akan dibangun ditingkatkan. Jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Karo terbagi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa. Oleh karena itu sinergi antara stakeholder terkait sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Pembangunan dan peningkatan jembatan dimaksud diharapkan akan meningkatkan konektivitas antar wilayah Kabupaten Karo.

b. Sanitasi

Untuk mewujudkan kawasan permukiman yang nyaman dan sehat, pembangunan dan penyediaan infrastruktur sanitasi sangat diperlukan. Semua masyarakat diharapkan dapat mengakses sanitasi layak dan aman melalui pembangunan tanki septik individual, pembangunan instalasi air limbah komunal maupun penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah Terpusat (IPLT)

c. Air Minum

Air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat harus dapat dipenuhi baik kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Untuk menyediakan kebutuhan air minum masyarakat, pembangunan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang sudah ada harus terus dilaksanakan, hal ini juga penting untuk mendukung swasembada air.

d. Irigasi

Kewenangan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Karo juga terbagi menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yakni DI Paya Lahlah di Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng, kewenangan Pemerintah Pusat yakni DI Parit Lompatan di Kecamatan Juhar dan Tigabinanga dan DI Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang tersebar di wilayah Kabupaten Karo. Peningkatan kondisi DI tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian khususnya padi yang nantinya akan meningkatkan swasembada dan ketahanan pangan.

e. Drainase

Genangan banjir yang menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat dan menyebabkan terganggunya kesehatan dan kenyamanan masyarakat diharapkan dapat dikurangi. Untuk mengatasi banjir dan genangan tersebut maka pembangunan dan normalisasi saluran drainase akan dilaksanakan. Pembangunan harus terintegrasi sehingga tidak ada lagi saluran yang tidak berfungsi.

f. Gedung Pemerintahan

Gedung Pemerintahan sebagai salah satu simbol keberhasilan pembangunan harus terus diperbaiki. Pembangunan dan penyediaan gedung pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan gedung Pemerintah tidak hanya baik dari segi struktur tetapi harus baik dari segi estetik dan budaya.

g. Persampahan

Fasilitas yang digunakan untuk mengelola sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pembuangan akhir, antara lain TPS3R/TPST/TPA.

- 2) Sasaran kedua meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman melalui strategi **Peningkatan kualitas infrastruktur**

perumahan dan permukiman dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman yakni:

- a. **Penyediaan Rumah Layak Huni**
Sebagai salah satu kebutuhan dasar, penyediaan rumah layak huni menjadi sangat penting. Rumah layak huni akan disediakan terutama bagi masyarakat miskin.
- b. **Penanganan Kawasan Kumuh**
Untuk menciptakan kehidupan yang baik dan sehat, diharapkan kawasan permukiman kumuh tidak ada lagi. Penanganan kawasan kumuh akan dibagi sesuai kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- c. **Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan**
PSU perumahan seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, sanitasi, pemadam kebakaran harus disediakan, PSU tersebut sangat dibutuhkan untuk menunjang permukiman yang layak dan nyaman
- d. **Penyelesaian permasalahan pertanahan**
Masalah pertanahan merupakan salah satu isi yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Oleh karena itu penyelesaian permasalahan pertanahan akan menjadi perhatian pemerintah ke depannya.

- 3) Sasaran ketiga terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau melalui strategi **Peningkatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan transportasi** dengan arah kebijakan meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan transportasi yakni penyediaan sarana prasarana keselamatan dan kenyamanan transportasi. Sarana prasarana keselamatan dan kenyamanan jalan seperti rambu lalu lintas, pengaman jalan, parkir dan lampu jalan akan disediakan untuk menunjang konektivitas dan kenyamanan pengguna jalan. Selanjutnya, peningkatan transportasi darat lainnya seperti pembangunan jalur kereta api dan peningkatan dermaga Tongging juga akan dilaksanakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Tujuan pembangunan kedua dalam pencapaian misi ini yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana memiliki sasaran yaitu terwujudnya kelestarian lingkungan dan penataan ruang wilayah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, strategi dan arah kebijakan adalah yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:

- a. Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
- b. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy* (penerapan efisiensi sumber daya dan peningkatan daur ulang, pengelolaan susut dan sisa pangan, pengembangan produk ramah lingkungan, penguatan ekosistem daur ulang)
- c. Peningkatan pengelolaan limbah (padat dan cair)
- d. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi maupun listrik dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan serta mendukung penurunan emisi GRK)
- e. **Penataan Ruang**
Pemanfaatan ruang akan menjadi isu pembangunan ke depan. Pemanfaatan dan penggunaan ruang harus dapat dikendalikan dan harus sesuai dengan RTRW maupun RDTR yang sudah ditetapkan.

Selain itu penyediaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau khususnya di wilayah perkotaan juga harus dipenuhi.

2. Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dengan arah kebijakan meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bencana yang dapat dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana terhadap masyarakat. Untuk itu penyediaan dokumen penanggulangan bencana seperti Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontijensi sangat diperlukan.
- b. Mitigasi struktural yakni membangun infrastruktur untuk memitigasi bencana seperti tembok penahan tanah di daerah rawan longsor
- c. Penyediaan sumber daya manusia serta peralatan penanggulangan bencana
- d. Penyelesaian penanganan bencana erupsi Gunung Sinabung.

Misi 8 Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah, dengan tujuan meningkatnya pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan maka pengembangan dan pemanfaatan teknologi inovasi akan dipercepat lima tahun ke depan. Untuk mencapai tujuan dimaksud maka dilakukan upaya antara lain pembangunan infrastruktur teknologi dan inovasi dan pengembangan SDM teknologi dan inovasi. Sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah meningkatnya layanan publik berbasis digital dan keamanan informasi.

Adapun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah **peningkatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi** dengan arah kebijakan meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi melalui:

- a) Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Kabupaten Karo, termasuk perluasan jaringan internet *broadband* dan satelit internet hingga ke daerah tertinggal.
- b) Pengembangan Digitalisasi Layanan Publik. Mengembangkan dan memperluas layanan publik berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.
- c) Peningkatan pemanfaatan *E-Commerce* dan *Digital Marketplaces* bagi pelaku ekonomi. Mendukung pengembangan dan kerja sama *e-commerce* dan platform digital untuk memperluas pasar bagi produk lokal.
- d) Pelatihan Literasi Digital. Menyediakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan teknologi.

Misi 9 Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas, dengan tujuan terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi yang diwujudkan dengan sasaran peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi.

Adapun strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain:

1. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran daerah dengan agenda Nasional dan Provinsi dengan arah kebijakan Sinkronisasi RPJMD/RKPD dengan RPJMN, RKP, dan RPJMD Provinsi yang dilakukan melalui penyesuaian indikator kinerja dan program prioritas serta integrasi pendanaan lintas sumber.

- 2. Penguatan kolaborasi dan kapasitas pemerintahan daerah** dengan arah kebijakan peningkatan peran daerah dalam forum pusat-provinsi (Musrenbangnas, Rakortek) dan penguatan SDM dan perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan terintegrasi.
- 3. Penguatan monitoring, evaluasi, dan inovasi pembangunan daerah** yang mendukung target Nasional dengan arah kebijakan penyesuaian sistem evaluasi dan pelaporan dengan indikator makro nasional serta dorongan inovasi daerah yang mendukung agenda prioritas nasional dan provinsi.

Tabel 3.7

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Peningkatan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah
					Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
					Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan anggaran serta Pengendalian belanja maupun evaluasi kinerja keuangan daerah
					Meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah,
					Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
				Mendorong Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil	Pendekatan berbasis kemitraan strategis, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat, sinergi yang terjalin dapat mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
				Penguatan pemerintahan yang dinamis dan responsif	Optimalisasi sumber daya aparatur, sarana prasarana, dan regulasi dalam peningkatan pelayanan publik
					Peningkatan pelayanan one day servis dan one stop service
		1.3.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)	Peningkatan manajemen kepegawaian ASN	Melaksanakan penilaian kinerja dan pengembangan kompetensi yang terintegrasi
2	Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	2.1	Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya dan toleran	Pembangunan spritualitas dan toleransi antar umat beragama	Penguatan spritualitas masyarakat, serta kerukunan antar umat beragama
				Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan sosial dan ekonomi dan lingkungan	Penguatan nilai-nilai kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat
				Pengembangan Nilai dan warisan budaya daerah	Peningkatan inventarisasi, identifikasi dan pelestarian seni budaya daerah
3	Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk	3.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup	Optimalisasi pelayanan kesehatan dengan peningkatan kualitas sistem, tenaga kesehatan dan sarana prasaran kesehatan	Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan secara merata dan terjangkau
					Pengembangan layanan kesehatan berbasis <i>medical tourism</i>
					Perbaikan layanan kesehatan secara manajerial maupun kualitas teknis profesional kesehatan

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	meningkatnya kesehatan masyarakat				Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak
					Peningktan gizi dan penurunan prevalensi stunting
					Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular
					Perluasan upaya promotif-preventif dan gerakan prilaku hidup bersih dan sehat
					Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
				Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif	Peningkatan penyadaran Masyarakat dalam berolahraga;
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Produksi dan produktivitas yang berkualitas sektor pertanian dan perikanan serta sektor lainnya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal	Penguatan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan melalui modernisasi dan implementasi IPTEKIN yang ramah lingkungan
					Peningkatan sarana dan prasarana yang unggul serta infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta sektor lainnya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal
					Peningkatan Sumber Daya Manusia sektor pertanian dan perikanan baik kapasitas individu maupun kelembagaan serta Mendukung keberlanjutan usaha tani dan adopsi teknologi melalui regenerasi petani
					Peningkatan Pengembangan pertanian dan perikanan yang berkelanjutan serta meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan sektor pendukung.
				Mendorong pertumbuhan penanaman modal	Penciptaan iklim investasi dan usaha yang kondusif melalui ketersediaan (sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan) kebijakan serta regulasi investasi, penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha,
					Pemberian insentif dan kemudahan investasi yang efektif,
					Pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha,
					Peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah termasuk proyek yang siap ditawarkan (<i>Investment Project Ready to Offer</i> /IPRO)
				Meningkatkan produktivitas sektor industri pengolahan/hilirisasi produk, perdagangan yang padat karya berorientasi ekspor dan berkelanjutan	Peningkatan kapasitas dan daya saing industri pengolahan/hilirisasi hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis Sumber Daya Alam Unggulan dan IPTEKIN
					Meningkatkan aktivitas pasar dan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor
					Mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatkan daya saing sektor pariwisata	Pemenuhan aspek 6A (<i>Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, Ancillary Services, Aktivitas, Available Packages</i>) secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan
					Meningkatkan tata kelola destinasi dan industri pariwisata
					Pengembangan destinasi Wisata Prioritas
					Penguatan pemasaran/promosi pariwisata
					Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pariwisata serta peningkatan sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif
					Optimalisasi daya tarik objek wisata melalui pengembangan kebudayaan dan pengembangan destinasi wisata berbasis pengetahuan
		4.2	Meningkatnya ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Penguatan Kemandirian Pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan pangan
				Peningkatan ketersediaan air baku untuk irigasi	Meningkatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal
		4.3	Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	Tingkat inflasi yang rendah dan stabil	Penjaga keterjangkauan harga produk pangan strategis dan ketersediaan pasokan pangan
					Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pasar serta mendorong peningkatan dan penguatan kerjasama antar daerah (kelancaran distribusi)
					Perlindungan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan penguatan Tim Pengendali Inflasi Daerah
				Peningkatan IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah)	Peningkatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)
				Peningkatan pendapatan daerah	Meningkatkan akses, literasi dan pemanfaatan layanan keuangan yang aman, terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
					Percepatan implementasi inklusi keuangan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait
					Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD
					Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, secara inovatif dan kreatif
					Memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD dan penguatan sistem pemungutan pajak
					Mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
5	Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	5.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda	Optimalisasi kualitas pelayanan pendidikan yang berkelanjutan	Peningkatan dan pemenuhan akses pemerataan layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran
					Peningkatan pengelolaan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
					Pengembangan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik
					Pengembangan kelas unggulan
					Peningkatan prestasi peserta didik melalui pengembangan minat, bakat dan kreativitas
					Peningkatan Kompetensi Lulusan
					Beasiswa Pendidikan
					Meningkatkan pendidikan karakter siswa dengan nilai-nilai moral, etika dan berkepribadian baik
		5.2	Terwujudnya kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni	Peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan	Meningkatkan Sarana Prasarana Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan
					Meningkatkan aktivitas literasi membaca masyarakat
				Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga	Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan diskriminasi serta meningkatkan pemberdayaan perempuan
					Memperkuat peran keluarga dalam menerapkan 8 tugas fungsi keluarga (kegamaan, sosial budaya, cinta kasih, reproduksi, perlindungan, sosialisasi, dan pendidikan, ekonomi, pembinaan lingkungan)
					Pengendalian penduduk
					Meningkatkan pengasuhan anak yang layak dan simulasi dini pada anak
				Penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusi	Peningkatan cakupan jaminan sosial
					Penguatan data dan informasi serta tata kelola perlindungan sosial
					Penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan
				Menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
					Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan daerah
					Peningkatan upaya preventif tindakan kejahatan
					Penguatan kemitraan stakeholder untuk Kamtibmas

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				Peningkatan ideologi dan wawasan kebangsaan serta kebebasan berdemokrasi	Menekan angka penyakit masyarakat
					Pelaksanaan edukasi tentang hak dan kewajiban berdemokrasi
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
					Peningkatan pemahaman idiologi dan wawasan kebangsaan
				Optimalisasi penguatan peran olahraga dan pemuda	Optimalisasi pembinaan olahraga berprestasi dan Penyediaan sarana dan prasarana olahraga
					Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif
					Penguatan peran dan daya saing pemuda dan Olahraga
					Penguatan Kolaborasi dan sinergi antar sektor/stakeholders terkait
		5.3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pengembangan sumber daya manusia.	Penguatan Ekonomi Desa dan Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal
					Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Transparan dan Responsif
					Pembangunan Infrastruktur dan Aksesibilitas Desa
6	Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, IKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	6.1	Meningkatnya kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja yang siap pakai dan terampil	Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja, sertifikasi tenaga kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung
					Memperluas lapangan kerja yang inklusif dan penguatan sistem informasi pasar kerja untuk meningkatkan konektivitas antara pencari kerja dan penyedia lapangan kerja
				Pengembangan UMKM, koperasi, kewirausahaan, industri kreatif melalui pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing	Pengembangan kewirausahaan bagi pemuda dan perempuan yang inklusif dan berkelanjutan
					Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha mikro, kecil, menengah, IKM dan koperasi
					Meningkatkan Pemasaran berbasis teknologi dan Mengembangkan pola kemitraan pelaku UMKM, IKM dan Koperasi dengan pelaku usaha besar dan stakeholders terkait
					Penguatan peran dan daya saing pelaku ekonomi kreatif
7	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur	7.1	Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi

No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
	yang andal, merata, dan berkelanjutan	7.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman
		7.3	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Peningkatan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan	Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	8.1	Terwujudnya kelestarian lingkungan dan penataan ruang wilayah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan	Peningkatan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan
				Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta integrasi pengelolaan sampah dengan mendorong penerapan <i>circular economy</i>	
				Peningkatan pengelolaan limbah	
		8.2	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan)	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik dengan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan serta mendukung penurunan emisi GRK)
Penataan ruang					
9	Meningkatnya pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	9.1	Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah	Peningkatan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
				Peningkatan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi	Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi
10	Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	10.1	Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi	Penyelarasan Perencanaan dan Penganggaran Daerah dengan Agenda Nasional dan Provinsi	Sinkronisasi RPJMD/RKPD dengan RPJMN, RKP, dan RPJMD Provinsi * Penyesuaian indikator kinerja dan program prioritas * Integrasi pendanaan lintas sumber
				Penguatan kolaborasi dan kapasitas pemerintahan daerah	Peningkatan peran daerah dalam forum pusat-provinsi (Musrenbangnas, Rakortek, dsb) * Penguatan SDM dan perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan terintegrasi
				Penguatan monitoring, evaluasi, dan inovasi pembangunan daerah yang mendukung target nasional	Penyesuaian sistem evaluasi dan pelaporan dengan indikator makro nasional * Dorongan inovasi daerah yang mendukung agenda prioritas nasional dan provinsi

3.2.2. Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan yang merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran, memiliki fokus berdasarkan identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja *outcome*. Berikut ini perubahan arah kebijakan tahunan Kabupaten Karo dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2030.

Tabel 3.8
Arah Kebijakan Tahunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2026-2030

Tahun				
2026	2027	2028	2029	2030
Implementasi Awal dan Konsolidasi	Penguatan dan Ekspansi	Perluasan dan Optimalisasi	Konsolidasi Lanjutan dan Penyelesaian	Keberlanjutan dan Legacy
Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (<i>Quick Win</i>) dan Program Strategis Daerah	Akselerasi Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (<i>Quick Win</i>) dan Program Strategis Daerah	Penyelesaian Program Hasil Terbaik Cepat (<i>Quick Win</i>) dan Pengoptimalan Pelaksanaan Program Strategis Daerah	Penyelesaian Program Strategis Daerah	Penyiapan Skema Program Strategis Daerah Lanjutan
Penataan struktur dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta koordinasi lintas lembaga dan sektor	Akselerasi sinergitas program antar Perangkat Daerah dan lintas pemerintah pusat-daerah	Optimalisasi sinergitas program antar Perangkat Daerah dan lintas pemerintah pusat-daerah	Penguatan sinergitas program antar Perangkat Daerah dan lintas pemerintah pusat-daerah	Pelembagaan sistem integrasi kelembagaan dan kolaborasi multipihak
Review dan harmonisasi regulasi sektoral, dan perumusan regulasi pendukung pembangunan	Finalisasi peraturan pendukung, advokasi dan sosialisasi implementasi	Penegakan regulasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan regulasi	Penyempurnaan regulasi berdasarkan hasil evaluasi, dan harmonisasi dengan regulasi di tingkat nasional	Finalisasi regulasi pendukung pembangunan jangka panjang
Peningkatan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan masyarakat	Ekspansi Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	Optimalisasi Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	Konsolidasi Lanjutan Kemitraan berbasis proyek unggulan dan berdampak	Pembentukan ekosistem kemitraan multi sektor

Sumber: Bappedalitbang Karo, data diolah

3.2.3. Program Strategis Daerah

Dalam periode perencanaan tahun 2025-2029 ini terdapat beberapa program strategis daerah yang direncanakan agar pada akhir periode terdapat perubahan Kabupaten Karo ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Program strategis daerah tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dengan Mewujudkan Ekosistem Pendidikan Unggul
- Merupakan inisiatif strategis Kabupaten Karo dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia yang unggul melalui penyediaan dan pengembangan kelas unggulan yang akan bertransformasi menjadi sekolah unggulan serta pemberian beasiswa berprestasi. Program ini juga mengambil peluang kawasan strategis Kabupaten Karo yang menjadi sentral dan jalur lintasan berbagai kabupaten/kota Sumatera Utara dan sebagian wilayah Aceh.

Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul berarti menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat, kolaboratif, dan inovatif, dimana semua unsur pendidikan saling bersinergi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.

Tujuan Program

Tujuan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul adalah:

- Menciptakan peserta didik unggul berprestasi dengan memberikan pembelajaran dan sarana prasana berkualitas kepada peserta didik berprestasi.
- Meningkatkan peserta didik SMP melanjut ke SMA unggulan/terkemuka dengan meningkatnya jumlah peserta didik dari Kabupaten Karo masuk SMA unggulan seperti SMA Taruna Nusantara, SMA DEL dan SMA Ketarunaan lainnya.
- Mewujudkan Kabupaten Karo sebagai kawasan strategis pusat pendidikan unggulan skala nasional.
- Mencetak generasi unggul dan berkarakter skala *top leader* dengan nilai-nilai kepemimpinan yang berkualitas dan berkarakter, wawasan kebangsaan, dan kebudayaan, memiliki daya saing nasional dan internasional serta respon terhadap tantangan digitalisasi dan globalisasi.

Strategi Pembiayaan

Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo:

- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan melalui APBN.
- Dukungan pendanaan dari propinsi.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan kemitraan yayasan.

Ruang Lingkup Program

- Transformasi Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama dengan pengembangan kelas unggulan menjadi sekolah unggulan melalui kolaborasi sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas profesional dan kurikulum yang mendorong kompetensi abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan literasi digital.
- Memfasilitasi siswa berprestasi seleksi dan masuk ke SMA unggulan
- Pemberian beasiswa pendidikan terhadap peserta didik berprestasi
- Meningkatkan prestasi peserta didik melalui pembelajaran yang efektif, penguatan karakter dan motivasi, pemanfaatan teknologi, lingkungan belajar yang kondusif serta penguatan *parenting*
- Penguatan Guru Masa Depan: Adaptif, Digital, pembinaan akademik intensif, dan Transformatif.
- Revitalisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui fokus pendekatan berbasis komunitas dan pedagogi holistik
- Membangun manajemen sekolah yang profesional, akuntabel, inovatif, adaptif dan unggul.

Dampak yang diharapkan

- Meningkatnya prestasi akademik dan non akademik peserta didik.
- Meningkatnya SDM yang bermutu dan berdaya saing menuju Indonesia Emas
- Meningkatnya generasi-generasi unggul yang menjadi calon pemimpin berpengaruh yang berkarakter, karismatik serta visioner.
- Meningkatnya kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2) **Transformasi Kabupaten Karo Menjadi Sentra Pelayanan Kesehatan Unggul dan Berkelanjutan:**

Merupakan inisiatif strategis Kabupaten Karo dalam mewujudkan transformasi kesehatan yang unggul melalui pembangunan layanan dasar kesehatan yang inklusi dan merata serta pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang berlokasi di Desa Rumah Kabanjahe/Lingga. Program ini juga mengambil peluang kawasan strategis Kabupaten Karo yang menjadi sentral dan jalur lintasan berbagai kabupaten/kota Sumatera Utara dan sebagian wilayah Aceh.

Tujuan Program

Tujuan pusat kesehatan layanan unggul adalah:

- Mewujudkan Kabupaten Karo sebagai pusat pelayanan kesehatan yang unggul, merata, dan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur, sumber daya manusia kesehatan, tata kelola sistem kesehatan berbasis data, serta pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan infrastruktur kesehatan yang unggul berbasis *medical tourism*.
- Meningkatkan pelayanan kesehatan yang unggul dan prima, melalui peningkatan kenyamanan pelayanan kesehatan dan mendekatkan akses kesehatan kepada masyarakat.
- Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, *stroke* serta kesehatan ibu dan anak

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo
- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN serta dukungan pendanaan swasta.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Optimalisasi Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan integrasi layanan primer yaitu layanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif pada semua siklus hidup.

Ruang Lingkup Program

- Meningkatkan layanan dasar kesehatan melalui peningkatan layanan yang unggul di puskesmas, pembangunan fasilitas kesehatan, standarisasi sarana dan prasarana puskesmas, pemberdayaan kader kesehatan dan kader posyandu serta masyarakat tingkat desa/kelurahan untuk menekan angka kesakitan masyarakat.
- Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah lengkap berkualitas Tipe B pembangunan rumah sakit umum dilahan yang baru, dengan konsep rumah sakit regional yang memiliki *Center of Excellent* berbasis *Medical Tourism*.
- Integrasi kesehatan tradisional melalui klinik herbal berbasis bukti ilmiah dan pembangunan "*Karo Healing Village*".

Dampak yang diharapkan

Kabupaten Karo menjadi pusat kesehatan di kawasan, sehingga selain meningkatkan derajat kesehatan masyarakat juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Karo.

3) **Mewujudkan Layanan Pemerintahan yang Responsif, Inklusif, dan Berbasis Data:**

Merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Karo untuk menciptakan pelayanan publik yang unggul dan prima, melalui program digitalisasi pelayanan publik dan penerapan “*One Day Service*”.

Tujuan Program

Tujuan pusat kesehatan layanan unggul adalah

- Membangun Pemerintahan yang Responsif terhadap kebutuhan masyarakat
- Minimalisir antrean di kantor pemerintahan, karena sebagian besar layanan sudah tersedia secara online
- Penyediaan internet gratis di ruang publik memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan digital setiap saat.
- Masyarakat mendapat Pelayanan yang lebih cepat dan mudah melalui Digitalisasi Pelayanan Publik dan penerapan “*One Day Service*”.

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR.
- Skema *co-financing* BTS mikro bersama operator seluler, Pemda, dan desa.
- Pemanfaatan CSR perusahaan dan BUMDes dalam penyediaan akses *WiFi* publik desa.

Ruang Lingkup Program

Dampak yang diharapkan:

- Penguatan arsitektur digital pemerintah daerah melalui pembangunan super app layanan publik yang mengintegrasikan seluruh layanan lintas Perangkat daerah secara terpadu;
- Penerapan *One Day Service* (ODS) melalui *Redesign* proses bisnis pelayanan dasar seperti KTP, KK, akta kelahiran, perizinan dengan pendekatan *Business Process Reengineering* (BPR) dan automasi *system*
- Penyediaan Layanan Terintegrasi Lintas Instansi melalui Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dengan sistem *front-office* terpadu dan *back-end* lintas lembaga dan Penyediaan *Government Collaborative Platform* (GCP)
- Desentralisasi dan digitalisasi layanan adminduk melalui pendirian unit pelayanan adminduk kecamatan, pelayanan dukcapil digital dan keliling dan penggunaan *e-form*/unggah dokumen *online*
- Penguatan infrastruktur jaringan wilayah secara bertahap melalui kolaborasi dengan kementerian terkait dan operator seluler dan penguatan jaringan fiber optik daerah
- Penguatan inklusi dan literasi digital
- Perlindungan data dan keamanan siber
- Mendorong transparansi dan *Open Government*.

Dampak yang diharapkan

Tersedianya pelayanan publik prima dan unggul yang responsif cepat berbasis digital.

4) Penguatan Desa dan Pelestarian Budaya Karo

Kabupaten Karo memiliki kekayaan budaya yang unik, mulai dari sistem sosial dan adat, bahasa, hingga warisan kuliner dan arsitektur tradisional. Namun, arus modernisasi dan globalisasi kerap kali menggerus eksistensi budaya lokal. Untuk menjaga kesinambungan identitas masyarakat Karo, diperlukan kebijakan pelestarian budaya yang sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada pembangunan yang berbasis budaya.

Beberapa tantangan yang timbul dalam pelestarian budaya antara lain, pengetahuan dan pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap adat dan budaya Karo mulai menurun; nama kelembagaan pemerintahan desa masih menggunakan nomenklatur nasional seperti “desa” dan “kepala desa”, belum mencerminkan identitas budaya Karo seperti “kuta” dan “pengulu”. Fasilitas publik dan kantor pemerintahan belum seluruhnya bernuansa budaya lokal dalam desain dan arsitektur, peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa belum optimal, kegiatan pelestarian budaya (upacara adat, pertunjukan seni, pelatihan tenun, kuliner tradisional) belum terintegrasi dalam program pembangunan desa.

Pelestarian Budaya Karo memperkuat identitas dan martabat masyarakat Karo, melindungi warisan budaya, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lokal. Dengan demikian, budaya Karo tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tetapi juga fondasi masa depan yang bermartabat.

Tujuan Program

- Mendorong pembangunan daerah yang berwawasan budaya
- Meningkatkan martabat dan posisi budaya Karo dalam kehidupan sosial modern
- Desa memiliki struktur pemerintahan dan kelembagaan adat (*Kuta–Pengulu*), kantor desa dan fasilitas publik menggunakan desain budaya Karo.
- Terbentuknya desa wisata berbasis budaya edukatif.
- Dokumen budaya terdigitalisasi dan terakses publik.
- UMKM/Ekonomi Kreatif berbasis budaya tumbuh dan berkembang.

Dampak yang diharapkan dari Program

- Pelestarian budaya yaitu masyarakat memahami dan melestarikan budaya Karo.
- Memperkuat identitas dan martabat masyarakat Karo, melindungi warisan budaya, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lokal

Ruang Lingkup Program

- Penguatan tata kelola desa berbasis budaya antara lain mengembalikan struktur pemerintahan desa sesuai adat Karo (desa menjadi kuta, kepala desa menjadi pengulu); Mendorong peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah mengenai nomenklatur lokal; Menyusun regulasi pelibatan lembaga adat dalam musyawarah desa dan penyusunan RPJMDes; Pendataan dan Pengusulan WBTb menjadi WBTbi, Penguatan pemanfaatan/pelestarian aksara Karo, pakaian adat, dan lain lain.
- Revitalisasi budaya melalui pendidikan dan komunitas melalui integrasi muatan lokal budaya Karo ke dalam kurikulum PAUD dan SD, pelatihan tari, musik tradisional, dan kuliner lokal bagi generasi muda melalui sanggar budaya dan desa wisata. Digitalisasi arsip budaya dan penulisan sejarah lokal berbasis komunitas.

- Penataan Fasilitas dan Arsitektur Berbasis Kearifan Lokal. Desain kantor desa, balai desa, dan fasilitas publik dengan sentuhan arsitektur Karo; Mewajibkan unsur ornamen budaya lokal dalam pembangunan fasilitas pemerintah baru.
- Ekonomi Budaya dan Daya Tarik Wisata; Mendukung produk UMKM/IKM/ekonomi kreatif berbasis budaya: tenun, ukiran, kuliner, dan pertunjukan adat, Mengembangkan kalender event budaya tahunan untuk menarik wisatawan dan memperkuat kebanggaan lokal.
- Kolaborasi Multisektor dan Pendanaan Inovatif dengan mendorong pelibatan Perangkat Daerah terkait, CSR, dana desa, APBD, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN hingga kerjasama internasional untuk program budaya, bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029 dan PHTC Nasional serta Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kabupaten Karo merupakan salah satu lokasi prioritas untuk Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Danau Toba. Sejalan hal tersebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 juga telah menjadikan Kabupaten Karo sebagai lokasi prioritas untuk pembentukan dan pengembangan Kawasan strategis budaya, pariwisata dan ekonomi kreatif provinsi yang terintegrasi pada KARDAPAK dan Kabupaten Karo juga menjadi Lokasi untuk kegiatan strategis provinsi dalam pelaksanaan event internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global. Selain itu, Kabupaten Karo termasuk kawasan prioritas dan rekomendasi tema Festival Seni dan Budaya Daerah yaitu “*Heritage Highland Festival*” dengan fokus pengembangan event budaya lokal. Hal ini tentunya akan memiliki dampak terhadap pelestarian budaya Karo dan memperkuat kolaborasi dengan sektor lainnya untuk mendukung pemanfaatan budaya lokal dalam peningkatan ekonomi Masyarakat.

5) Transformasi Pertanian Kabupaten Karo: Mewujudkan *Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming* Menuju Swasembada dan Kedaulatan Pangan

Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Karo, hal ini tergambar dari kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang menyumbang 53,04 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2024. Lapangan usaha ini mampu menyerap angkatan kerja yang bekerja sebanyak 60,09 persen. Namun, kontribusi besar ini belum berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani dan daya saing sektor pertanian. Laju pertumbuhan sektor ini sangat fluktuatif, tahun 2024 hanya sebesar 2,54 persen menurun dari kondisi sebelumnya, tertinggal dibandingkan sektor lainnya, dan menunjukkan adanya stagnasi struktural.

Berbagai permasalahan mengemuka seperti 1. Penyusutan kualitas Sumber Daya Alam (semakin rendahnya tingkat kesuburan tanah), Hal ini terjadi karena pemanfaatan lahan yang tidak tepat karena Pemanfaatan tanah dan air secara terus menerus serta penggunaan

pupuk kimia yang tidak sesuai dan tidak menerapkan metode pertanian berkelanjutan menyebabkan penurunan kualitas SDA; 2. Terbatasnya Adopsi Teknologi Modern maupun penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi (IPTEKIN), Penggunaan alat mesin pertanian, sistem irigasi cerdas, dan teknologi berbasis data (*precision farming*) masih sangat terbatas; 3. Sumber Daya Manusia Pertanian yang terbatas dan minimnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian, tingkat pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan petugas dan petani belum mendukung dalam penerapan teknologi pertanian modern, sehingga adaptasi terhadap teknologi baru dan adopsi inovasi berjalan lambat dan membatasi transformasi sektor pertanian, Jumlah penyuluh ideal adalah satu orang untuk satu desa, kenyataan satu penyuluh sampai melayani tiga desa sehingga tidak semua memperoleh pendampingan, selain itu Sektor pertanian seringkali dianggap kurang menjanjikan, berpenghasilan rendah, dan kurang bergengsi oleh generasi muda; 4. Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagian besar belum membentuk Kelembagaan Ekonomi Petani KEP merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing petani, memperkuat posisi tawar mereka, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani; 5. sarana dan prasarana/ infrastruktur yang belum merata, infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, *cold storage*, pengolahan hasil panen dan logistik pemasaran belum tersebar merata, sarana seperti pupuk, benih/bibit unggul bersertifikat, alsintan, belum tersedia secara baik menjadi penghambat dalam mempercepat distribusi barang, penghambat proses pertanaman dan menekan biaya produksi; 6. Potensi sektor pertanian yang belum terkelola optimal, Kabupaten Karo memiliki peluang untuk menjadi sentra produksi hortikultura organik, agroindustri berbasis olahan, dan agrowisata berbasis komunitas bertaraf nasional dan internasional jika dikelola dengan lebih baik; 7. Keterbatasan akses pasar, akses pasar terbatas, menghambat penjualan produk pertanian dengan harga menguntungkan; 8. Panjangnya rantai pemasaran akibat kurangnya kerjasama pemasaran baik petani dan kelompok tani serta para pelaku bisnis mulai dari daerah produsen sampai dengan daerah konsumen; 9. Minimnya pengelolaan pasca panen (GHP), sarana pengolahan (GMP), dan kesesuaian sarana transportasi (GDP), GHP, GMP, dan GDP yang tidak memadai dapat menyebabkan penurunan kualitas produk, termasuk penurunan nilai gizi, kerusakan fisik, dan kontaminasi mikroba yang mengakibatkan penurunan permintaan terutama tujuan ekspor; 10. Bencana pertanian, merugikan sektor pertanian, seperti banjir, kekeringan, atau hama penyakit; 11. pertanian tersekat-sekat oleh batasan administratif Pembangunan pertanian dan basis sumberdaya alam harus serentak dan komprehensif serta melibatkan pendukung penting seperti sektor infrastruktur, pembiayaan, perdagangan, pemasaran, penyuluhan, pengembangan sumber daya manusia, dll; 12. Tingginya biaya sarana produksi (pupuk dan pestisida); 13. Tingginya gangguan hama dan penyakit (OPT penting), gangguan hama dan penyakit tanaman membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak maksimal dan berdampak terhadap penurunan hasil panen bahkan berakibat gagal panen; dan 14. Pertanian yang dipengaruhi musim dan perubahan iklim global yang mengakibatkan anomali cuaca dan fluktuasi harga, Sistem pertanian yang hasil dan prosesnya sangat bergantung pada perubahan musim,

terutama musim hujan dan kemarau selain itu Perubahan iklim dan cuaca ekstrem dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangan hama dan penyakit, serta menyebabkan fluktuasi siklus hidup OPT yang tidak menentu.

Di sisi lain, potensi lokal Kabupaten Karo sangat besar seperti tanah vulkanik yang subur, keanekaragaman hayati, posisi geografis strategis, serta kekayaan budaya yang kuat. Momentum ini harus dimanfaatkan dengan melakukan transformasi menyeluruh melalui penerapan *Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming* untuk mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan daerah.

Tujuan Program

- Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian
- 17 kecamatan mengadopsi teknologi *smart farming* pada tahun 2030
- 17 Kecamatan menerapkan pola sistem pertanian terpadu pada tahun 2030
- Ekspor hasil pertanian meningkat setiap tahun dan produk unggulan terdaftar sebagai produk indikasi geografis.
- Bertumbuh desa Wisata tematik Agrowisata berbasis pertanian dan budaya Karo
- Optimalisasi pemanfaatan lahan penggembalaan umum.
- Mendukung pengembangan energi baru terbarukan untuk sektor pertanian.

Dampak yang diharapkan

- Mewujudkan swasembada dan kedaulatan pangan daerah
- Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani.

Ruang Lingkup Program

Konsolidasi Lahan dan Pembentukan *Corporate Farming*, Transformasi harus dimulai dari penetapan Lokasi dan penguatan kelembagaan petani melalui model korporasi petani berbasis koperasi, BUMDes Agro, atau holding usaha tani. Petani mengelola lahan secara kolektif, sehingga tercapai skala ekonomi yang lebih efisien, memungkinkan penggunaan alat modern dan adopsi teknologi canggih secara lebih masif. Kemitraan antara korporasi petani dengan perusahaan agribisnis nasional atau multinasional harus difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mempercepat alih teknologi, pembiayaan, hilirisasi dan akses pasar.

Penerapan *Integrated Eco Farming*, Sistem pertanian yang berkelanjutan harus dibangun melalui model *Integrated Farming* yang memadukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan skala desa. Pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber energi terbarukan (biogas), kompos, dan pakan ternak menjadi bagian integral. Selain itu, penerapan agroforestry berbasis tanaman pangan dan tanaman keras (kopi, alpukat, kayu manis) harus diperluas untuk memperkuat ketahanan ekosistem dan meningkatkan diversifikasi pendapatan petani. Penerapan *Integrated Eco Farming* akan dilakukan pada beberapa kecamatan yang potensial untuk komoditas pangan, perkebunan dan hortikultura, salah satu lokus *penerapan Integrated Eco Farming* yaitu Kawasan Persawahan Paya Lah-Lah dan penggembalaan Mbal-Mbal Nodi. Integrasi antara kedua Kawasan ini akan diperkuat melalui Pengolahan limbah pertanian dan peternakan secara sirkular, untuk menghasilkan pakan, energi, dan pupuk; Pengembangan *agroforestry* terpadu berbasis tanaman keras bernilai tinggi seperti kemiri yang memperkuat konservasi tanah dan keberlanjutan ekonomi petani, Konektivitas logistik dan kelembagaan

petani melalui koperasi modern dan digitalisasi rantai pasok dari hulu ke hilir. Penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan, dapat membantu menjaga kualitas lingkungan (tanah, air, keanekaragaman hayati), pengurangan emisi serta dampak perubahan iklim.

Akselerasi *Smart Farming* dan Digitalisasi, Adopsi *Smart Farming* berbasis *Internet of Things (IoT)*, *drone*, *big data analytics*, dan kecerdasan buatan (AI) harus menjadi tulang punggung modernisasi pertanian Karo. Penggunaan sensor tanah, sistem irigasi otomatis, drone untuk pemetaan lahan dan pemantauan tanaman, serta aplikasi digital untuk penyuluhan, pemasaran, dan pembiayaan tani menjadi bagian dari ekosistem pertanian baru. Pemerintah daerah perlu mengembangkan platform digital Pertanian Karo untuk mempertemukan petani, penyuluh, pembeli, lembaga pembiayaan, dan pasar ekspor.

Pengembangan *Agro-Industry* dan Diversifikasi Ekspor

Mendorong investasi dalam industri pengolahan hasil pertanian antara lain tepung, sayuran/buah beku, minuman herbal, sari buah dan produk organik premium dan pengolahan lainnya baik olahan jadi maupun setengah jadi yang memanfaatkan hasil pertanian, hal ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah termasuk pengembangan pertanaman komoditi hingga pengolahan/hilirisasi di kawasan yang potensial. Kabupaten Karo harus menetapkan strategi branding produk lokal berbasis indikasi geografis (IG) untuk komoditas unggulan seperti “*Jeruk Karo*”, “*Kopi Karo*”, “*Kentang Karo*” dan “*Wortel Karo*” serta komoditi lainnya, memperluas jangkauan pasar ekspor, serta meningkatkan posisi tawar petani. Pengembangan Desa wisata berbasis Agro-Wisata Tematik juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pertanian dan pariwisata.

Strategi Pembiayaan

Transformasi ini tentu memerlukan strategi pembiayaan yang inovatif, terdiversifikasi, dan berkelanjutan. Pendekatan pembiayaan yang dilakukan melalui APBD Kabupaten Karo, APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara, Skema *Public-Private Partnership* (PPP), CSR, Dana Hibah Internasional, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan *Agri-Fintech*, Skema *Green Financing* serta sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan dan tidak mengikat.

Program strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan berbagai pihak/sector yang terkait.

Beberapa daerah yang terus didorong dalam pelaksanaan program strategis antara lain komoditi hortikultura di Liang Melas Datas (Jeruk), Kecamatan Namanteran dan Barusjahe (Kentang), Kecamatan Payung (Bawang Merah), Kecamatan Simpang Empat, Merek dan Namanteran (Cabai), Komoditi Pangan di Kecamatan Laubaleng, Mardinding, Tigabinanga, Munte, Juhar (Padi dan Jagung); Komoditi Perkebunan di Kecamatan Barusjahe, Tigapanah, Merek, Munte, Juhar, Kecamatan Tigabinanga (Kopi dan Kakao); Peternakan di Kawasan Penggembalaan Umum Nodi Kecamatan Lau Baleng serta daerah lain yang potensial untuk dikembangkan dalam pelaksanaan program strategis transformasi pertanian tersebut.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029 dan PHTC Nasional serta Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kabupaten Karo merupakan salah satu lokasi prioritas untuk kawasan swasembada pangan, air dan energi. Sejalan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menjadikan Kabupaten Karo sebagai lokasi prioritas untuk swasembada pangan, air dan energi antara lain pengembangan kawasan perkebunan kopi, pembentukan dan pengembangan kawasan unggulan padi, jagung, cabe merah, pembentukan dan pengembangan kawasan peternakan unggulan dan lokasi prioritas lainnya. Selain itu, untuk mendukung bahan baku industri, Provinsi Sumatera Utara juga telah menetapkan beberapa jenis hasil produksi dari Kabupaten Karo yang dapat dijadikan bahan baku bio-industri antara lain kakao, sayuran, buah-buahan, kopi, kentang, tanaman hortikultura dan tanaman pangan.

Untuk itu dalam mendukung prioritas Nasional dan provinsi Sumatera Utara serta pengembangan kawasan tersebut dilaksanakan melalui beberapa indikasi intervensi antara lain ketersediaan infrastruktur esensial dan sarana prasarana yang mendukung mekanisasi pertanian mulai dari produksi, distribusi, hilirisasi/nilai tambah hingga pemasaran secara holistik dan terintegrasi; Ekstensifikasi pertanian dan intensifikasi pertanian untuk peningkatan daya guna Lahan pertanian; Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewan (termasuk pengembangan kawasan peternakan -Lahan Penggembalaan Nodi); Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura, perkebunan dan pangan; Pembangunan dan pengelolaan irigasi primer, sekunder dan tersier maupun tampungan air lainnya, serta penyediaan air Berkelanjutan (termasuk Paya Lah-lah Lau baleng-Mardinding, Parit Lompatan Kecamatan Juhar-Tigabinanga serta penyediaan air pada kawasan potensial lainnya); Penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan dapat membantu menjaga kualitas lingkungan (tanah, air, dan keanekaragaman hayati), pengurangan emisi serta dampak perubahan iklim; Peningkatan SDM pertanian petani maupun penyuluh pertanian berbasis IPTEKIN, pendayagunaan penyuluh pertanian dan perluasan akses pasar; serta peningkatan ketersediaan bibit/benih unggul sektor pertanian.

6) Mengakselerasi Keunggulan Ekonomi Karo: Penguatan UMKM, Koperasi, Hilirisasi Industri, dan Modernisasi Pusat Perdagangan Berbasis Potensi Lokal

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi ekonomi besar berbasis pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Posisi geografis Kabupaten Karo sebagai jalur utama dari dan ke Medan (antar provinsi) serta perlintasan antar kabupaten menjadikan wilayah ini sebagai simpul penting dalam konektivitas kawasan. Namun demikian, tantangan struktural seperti lemahnya industrialisasi pascapanen, rendahnya adopsi teknologi, keterbatasan akses pembiayaan, serta belum optimalnya integrasi antara sektor pariwisata dan UMKM, menghambat potensi Kabupaten Karo. Untuk itu, dibutuhkan intervensi strategis yang sistematis dan berbasis bukti, guna mempercepat transformasi ekonomi lokal yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta pariwisata masih mendominasi PDRB Kabupaten Karo sebesar 53,04 persen pada tahun 2024, sementara kontribusi sektor industri pengolahan hanya sekitar

3,73 persen, menunjukkan belum maksimalnya hilirisasi hasil pertanian. Rendahnya kewirausahaan dan aktivitas UMKM, produk unggulan daerah yang belum diolah secara maksimal, sistem distribusi dan pemasaran yang belum modern, serta potensi geografis yang belum dimanfaatkan.

Tujuan Program

- Terbentuknya BUMD, BUMDesa dan Koperasi berbasis penguatan ekonomi lokal;
- Sebanyak 300 UMKM Naik kelas;
- Meningkatkan peran UMKM, Industri pengolahan dan koperasi dalam ekonomi Masyarakat;
- Produk lokal Karo mulai menembus pasar nasional dan internasional; dan
- Meningkatkan ketersediaan pasar sebagai pusat ekonomi Tradisional-Modern.

Dampak yang diharapkan

Melalui optimalisasi tersebut dampak yang diharapkan akan meningkatkan kewirausahaan dan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Ruang lingkup Program

- Pembangunan dan revitalisasi pasar seperti revitalisasi pusat pasar Berastagi sebagai Pusat Ekonomi Tradisional-Modern melalui revitalisasi sarana prasarana pasar dengan konsep *Experiential Market*, pembangunan Pasar Tematik Pariwisata Berastagi, perencanaan Pasar Induk, pembangunan Pasar Kabanjahe, serta pasar lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
- Penerapan *Industrial Collaborative-Oriented Educational Design* (ICOED) untuk transformasi keterampilan melalui identifikasi profil pekerjaan baru, analisis gap keterampilan, penyusunan program *upskilling-reskilling*, rekomendasi pelatihan *upgrading skills* maupun peningkatan kualitas SDM pendukung lainnya, fasilitasi/kerja sama untuk program magang, pelatihan kerja serta penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah.
- Pengembangan Sentra UMKM perlintasan berbasis Agrowisata dan Kuliner melalui penempatan sentra UMKM di titik strategis perlintasan utama. Konsep agrowisata, kuliner lokal, dan produk kreatif dikembangkan untuk memperkuat nilai tambah ekonomi lokal.
- Hilirisasi produk pertanian melalui Industri Pengolahan Kecil-Menengah melalui pengolahan produk hortikultura menjadi produk bernilai tambah berbasis komunitas seperti hilirisasi produk unggulan buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi produk bernilai tambah (olahan beku, makanan kemasan, minuman premium, tepung, teh produk bernilai tambah lainnya) berbasis industrialisasi komoditas seperti kopi, kentang, kakao, jagung, cabai, bunga krisan, wortel dan komoditas lainnya. Beberapa lokasi antara lain kawasan Liang Melas Datas yang potensial untuk pertanaman jeruk sehingga dapat dikembangkan hilirisasi komoditi jeruk menjadi olahan beku, minuman kemasan, manisan, tepung, produk kosmetik, dan produk lainnya. Sama halnya dengan kecamatan Namanteran dan Barusjahe yang potensial untuk penanaman kentang sehingga berpotensi mendukung hilirisasi kentang seperti tepung kentang dan makanan ringan. Kecamatan Simpang Empat, Merek, dan Namanteran yang

potensial untuk penanaman cabai sehingga mendukung hilirisasi cabai seperti tepung cabai, pasta cabai, minyak cabai, bumbu instan dan produk lainnya. Komoditi pangan di Kecamatan Laubaleng, Mardinding, Tigabinanga, Munte, Juhar untuk padi dan jagung mendukung hilirisasi seperti tepung, makanan ringan, pakan ternak, minyak jagung, bahan baku industri dan produk lainnya. Komoditi perkebunan di Kecamatan Barusjahe, Tigapanah, Merek, Munte, Juhar, Tigabinanga untuk kopi dan kakao potensi hilirisasi seperti minuman kemasan, kosmetik, makanan, farmasi dan produk lainnya serta komoditi dan kawasan lain yang potensial untuk dikembangkan.

- Digitalisasi Ekonomi Lokal melalui Transformasi UMKM Go Digital dengan mendorong UMKM masuk ke platform digital untuk pemasaran, pembayaran, dan pengelolaan usaha, disertai pelatihan digitalisasi skala massal.
- Penguatan Ekosistem Kelembagaan melalui BUMD aneka usaha, BUMDesa dan Koperasi Modern maupun Koperasi Merah Putih yang didorong dengan mengelola sektor produktif seperti pengelolaan sektor perdagangan, pertanian, pariwisata serta sektor produktif lainnya.
- Fasilitasi sertifikasi produk dan akses pembiayaan inklusif produk lokal difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi mutu (SNI, Halal, BPOM) dan akses ke pembiayaan lembaga keuangan untuk mendorong kelayakan pasar produk
- Industri, pusat UMKM, *Cold Storage*, pengemasan, dan distribusi logistik/ Pengembangan Branding Daerah melalui strategi *City Branding dan Festival* Ekonomi Lokal, Strategi *city branding* diterapkan untuk meningkatkan *positioning* Kabupaten Karo sebagai pusat agrowisata dan industri kreatif di Provinsi Sumatera Utara, melalui event tahunan dan promosi digital nasional.

Keterkaitan dengan RPJMD 2025-2029 dan PHTC Nasional serta Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Sei Mangkei merupakan salah satu lokasi prioritas, pengembangan koridor industri Kualatanjung-Sei Mangkei dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penguatan UMKM, Koperasi, Hilirisasi atau Industri pengolahan, perdagangan dari Kabupaten Karo ke kawasan tersebut seperti bahan baku untuk hilirisasi makanan dan minuman, industri kimia, industri kosmetik dan farmasi, serta industri potensial lainnya. Sejalan hal tersebut pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah menjadikan Kabupaten Karo sebagi lokasi prioritas untuk penguatan hilirisasi komoditas unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara, antara lain untuk produk pangan seperti cabai kering, bubuk, saus serta produk non-pangan seperti ekstrak *capsaicin*, *oleoresin* dan pestisida organik.

Untuk itu dalam mendukung prioritas Nasional dan provinsi Sumatera Utara serta pengembangan kawasan tersebut dilaksanakan melalui beberapa indikasi intervensi antara lain meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing tenaga kerja baik formal maupun nonformal. penguatan kapasitas kewirausahaan melalui akses modal, pelatihan, dan pendampingan usaha, Peningkatan produktivitas dan daya saing

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi antara lain dengan memperkuat kapasitas pelaku UMKM, IKM dan koperasi secara menyeluruh melalui strategi pendampingan intensif, peningkatan inovasi, perluasan jaringan usaha, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan akses terhadap pasar dan pembiayaan, memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah melalui pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, meningkatkan pemasaran berbasis teknologi dan mengembangkan pola kemitraan pelaku UMKM, IKM dan Koperasi dengan pelaku usaha besar dan stakeholders terkait, Arah kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sinergi antara industri besar, *startup*, dan UMKM dalam rangka memperkuat rantai nilai dan mendorong inovasi usaha.

7) Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan: Mewujudkan *The Paradise of Karo Highland*

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi yang luar biasa yang tidak kalah menariknya dengan daerah wisata lainnya yang ada di Indonesia. Pariwisata Kabupaten Karo memiliki prospek yang sangat strategis bagi daerah dan menjadi sektor penting yang dapat diandalkan ke depan untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup masyarakat untuk mengenal alam dan budaya ke beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Karo.

Kabupaten Karo juga berada pada posisi strategis dalam pengembangan pariwisata yaitu letak geografis yang strategis, Kabupaten Karo merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) serta salah satu wilayah pada Geopark Kaldera Toba, Kabupaten Karo juga sebagai perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata. Kabupaten Karo memiliki banyak potensi wisata antara lain wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata Sejarah dan memiliki potensi alam dengan udara pegunungan yang sejuk dan asri. Sektor pariwisata diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan daya tarik obyek wisata yang meliputi keindahan dan kekayaan alam flora, daya tarik tradisi yang mengandung seni dan budaya serta adat istiadat. Semua itu ditunjang jasa dan sarana pariwisata seperti biro perjalanan, penyediaan akomodasi serta pembangunan dan pembenahan fasilitas wisata.

Melihat potensi tersebut seharusnya Kabupaten Karo mampu menjadi episentrum pariwisata alam dan budaya di Sumatera Utara. Namun demikian, kontribusi sektor pariwisata yang digambarkan oleh sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Karo hingga 2024 masih relatif rendah di bawah 10 persen, Hal ini menunjukkan adanya gap besar antara potensi dan realisasi.

Sektor pariwisata Karo menghadapi berbagai tantangan seperti : Potensi Alam yang Belum Terkelola Maksimal, keterbatasan 6A di Destinasi Wisata (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, *Ancillary* dan *Available Packages*), kapasitas pengelolaan penerapan pariwisata berkelanjutan belum optimal, Belum Optimalnya Pengembangan

Industri Pariwisata, Belum optimalnya peran Masyarakat sadar wisata dan pelaku pariwisata (Pemandu Wisata, Pokdarwis, Pengelola Desa Wisata dan Destinasi Wisata) dalam menerapkan Sapta Pesona, kemitraan, kolaborasi maupun sinergitas *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata belum optimal.

Menyadari tantangan tersebut, diperlukan sebuah terobosan besar dalam bentuk strategi terpadu, inovatif, dan berbasis keberlanjutan untuk membangkitkan pariwisata Karo, menjadikannya lebih kompetitif di tingkat regional bahkan nasional.

Tujuan Program

- Penguatan 6A (Aksesibilitas, Amenitas, Atraksi, Aktivitas, *Ancillary* dan *Available Packages*) Pariwisata/Daya tarik wisata, Fasilitas penunjang pariwisata, Aksesibilitas, Akomodasi, Aktivitas, Layanan tambahan secara kolaboratif, partisipatif dan berkelanjutan;
- Pengembangan Desa Wisata berbasis Budaya, kearifan lokal dan Alam
- Pengembangan daya Tarik pariwisata Urban Tourism;
- Peningkatan kualitas SDM dan Pelaku usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Pengembangan Ekosistem Pariwisata Berbasis Digital;
- Peningkatan Promosi dan pemasaran pariwisata serta Ekonomi Kreatif;
- Peningkatan kemitraan, Kolaborasi dan sinergitas *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata.

Ruang Lingkup Program

Penguatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar potensi pariwisata Karo dapat dimaksimalkan. Pembangunan dan Revitalisasi Dermaga Tongging Sebagai pintu masuk utama menuju Kawasan Danau Toba dan destinasi wisata lainnya, Dermaga Tongging perlu dibangun menjadi dermaga modern yang dapat menampung kapal wisata dengan kapasitas besar dan mobil angkutan yang ingin melanjutkan perjalanan ke pulau Samosir.

Perbaikan jalan akses wisata seperti jalan menuju Tongging, Kawasan Sipisopiso, Gundaling, Lau Kawar, Kawasan permandian air panas Semangat Gunung-Doulu, kawasan Gunung Sibayak, kawasan Gunung Sinabung, kawasan Liang Melas Datas dan Kawasan Berastagi serta Kawasan lainnya yang potensial harus menjadi prioritas termasuk jalan penghubung antar kabupaten maupun provinsi; Pengembangan infrastruktur pendukung seperti toilet bersih, tempat parkir, dan penerangan jalan umum di area-area wisata. Akses wifi gratis dan signal telekomunikasi yang lebih baik juga perlu diperhatikan untuk memfasilitasi kebutuhan digitalisasi wisatawan.

Diversifikasi atraksi wisata, Agar wisatawan betah berlama-lama di Kabupaten Karo dan mendatangkan lebih banyak wisatawan, perlu dilakukan diversifikasi atraksi wisata yang tidak hanya bergantung pada objek alam yang sudah ada. Beberapa inisiatif yang dapat diterapkan antara lain pengembangan wisata buatan seperti Kereta gantung (*Cable car*) ataupun *Gondola*, spot foto, jembatan kaca, taman, serta jenis wisata buatan lainnya. Pengembangan *Sport Tourism* dan *Adventure Tourism* seperti paralayang di Bukit Gajah Bobok dan Sipisopiso dan potensi *vulcanology tourism* maupun *Lavatour* di Gunung berapi seperti Area Gunung Sinabung-Lau Kawar, Liang Melas Datas, Kawasan Sipisopiso-Tongging, Kawasan Berastagi-Gundaling dan

Gunung Sibayak, Kawasan Pemandian air panas dan lain-lain. Musik dan festival budaya seperti Festival Musik Danau Toba di Kabupaten Karo, yang menggabungkan musik tradisional dengan elemen modern. Wisata kesehatan tradisional seperti pengembangan wisata kesehatan berbasis herbal Karo, Keberagaman tanaman obat dan minyak herbal di kawasan ini dapat dikembangkan menjadi wisata terapi herbal yang semakin diminati wisatawan yang mencari alternatif pengobatan alami dan relaksasi. Wisata kesehatan berbasis herbal Karo yang menggabungkan terapi alami dengan pengalaman wisata, seperti pijat tradisional, aromaterapi, atau spa herbal, bisa menjadi daya tarik yang menarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman relaksasi dan penyembuhan alami. Inovasi ini dapat menjadi pilihan baru bagi wisatawan yang mencari alternatif kesehatan yang lebih alami, sesuai dengan tren *wellness tourism* yang semakin berkembang.

Agrowisata dan edukasi pertanian seperti kopi arabika, markisa, *strawberry* dan jeruk, bunga dan komoditi lainnya sangat mendukung pengembangan agrowisata. Dengan mengembangkan *farm tour* atau tur kebun, wisatawan dapat belajar tentang proses produksi, serta menikmati produk lokal yang khas. Konsep agrowisata berbasis kopi atau jeruk juga akan menarik wisatawan untuk menikmati pengalaman wisata yang edukatif. Selain itu ekowisata, wisata edukasi lingkungan dan Konservasi, wisata berbasis geopark, wisata kuliner, wisata budaya terus dikembangkan.

Revitalisasi dan penguatan budaya lokal sebagai daya tarik wisata perlu menjadi perhatian, kekayaan budaya Karo harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menarik wisatawan, baik domestik maupun internasional. Beberapa langkah yang perlu dilakukan Revitalisasi Rumah Adat Siwaluh Jabu, Promosi Aksara Karo, Pengembangan Festival Budaya Karo, pengemasan wisata budaya.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) di sektor pariwisata yang difokuskan pada penguatan kapasitas pelaku wisata melalui pelatihan *hospitality*, bahasa asing, dan *digital marketing*, serta sertifikasi bertahap standar CHSE pada destinasi dan akomodasi. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan vokasi termasuk SMK pariwisata juga didorong untuk menciptakan tenaga kerja lokal yang profesional, sekaligus menjamin layanan pariwisata yang aman, bersih, dan berdaya saing tinggi.

Pengembangan ekosistem pariwisata berbasis digital agar pariwisata Kabupaten Karo dapat berdaya saing Pemerintah Kabupaten Karo perlu membangun platform digital wisata berbasis AI yang menyediakan informasi lengkap tentang destinasi, atraksi, event, serta pemesanan akomodasi berbasis komunitas. *Smart tourism platform* ini akan mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan, serta mendukung pengelolaan destinasi berbasis data.

Kolaborasi Antar Stakeholder melalui Public-Private-Community Partnership (PPCP), Untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting. Melalui model *Public-Private-Community Partnership* (PPCP), semua pihak dapat terlibat dalam pengelolaan, promosi, dan pengembangan destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten Karo dapat menginisiasi *Karo Tourism Consortium*, yang menghimpun pelaku usaha, akademisi, dan komunitas lokal untuk bersama-sama mengembangkan sektor pariwisata.

City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan, hal ini dapat dilakukan dengan mempercantik ruang publik seperti taman, trotoar dan bangunan bersejarah, pengembangan seni jalanan (mural, patung, seni lainnya) untuk mempercantik lingkungan kota, penerangan kota yang artistik menciptakan suasana malam yang menarik, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda yang aman dan nyaman serta infrastruktur pendukung lainnya.

Dampak yang diharapkan

Peningkatan kunjungan dan lama tinggal wisatawan.

Strategi Pembiayaan

APBD Kabupaten Karo, APBD Provinsi Sumatera Utara, APBN, kolaborasi/sinergitas dengan pendanaan non pemerintah (Dunia usaha, Akademisi, NGO/LSM, masyarakat).

Program strategis tersebut dilaksanakan dengan melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah dan berbagai pihak/sector yang terkait seperti akademisi, dunia usaha, komunitas, media, Pemerintah dan Masyarakat untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dengan saling mendukung sesuai peran masing-masing. Pengembangan pariwisata antara lain dilaksanakan di Kawasan strategis Gajah Bobok-Tongging antara lain Gunung sipiso-piso, Air Terjun Sipiso-piso, Tongging, Sibolangit, Gajah bobok, daya Tarik budaya, dan daerah lainnya ; Kawasan Strategis Barus-Sibayak antara lain kawasan Gunung Sibayak, Bukit Gundaling, Kawasan permandian air panas Semangat Gunung-Doulu, Taman mejuah-juah Berastagi, dan daerah lainnya; Kawasan Strategis Sinabung antara lain Gunung Sinabung, Danau Lau Kawar serta pengembangan potensi gunung api yang ada di Kabupaten Karo dan daerah lainnya; Kawasan Liang Melas, Kawasan Namokarang-Siosar, Kawasan Liang Dahar-Titan Arum, dan Kawasan Berastagi serta Kawasan strategis pariwisata lainnya yang siap untuk dikembangkan.

Keterkaitan dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan PHTC Nasional maupun Provinsi

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, Kabupaten Karo merupakan salah satu lokasi prioritas untuk Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif unggulan di Danau toba/Merek, Kabupaten Karo juga merupakan bagian dari kawasan Toba Caldera UGGp/Geopark Kaldera Toba, selanjutnya sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Provinsi Sumatera Utara yaitu KARDAPAK (Karo, Dairi dan Pakpak Bharat), hal ini tentu akan berdampak terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Karo.

Berdasarkan potensi dan peluang yang ada, ke depan diperkirakan prospek pengembangan pariwisata akan semakin cerah. Hal ini yang terus mendorong pemerintah daerah untuk menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata akan berdampak sangat luas dan signifikan dalam peningkatan kesejahteraan Masyarakat, kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, membuka peluang usaha dan kesempatan kerja serta sekaligus berfungsi menjaga kelestarian kekayaan alam dan hayati.

8) Peningkatan Infrastruktur dan Penataan Kawasan: Mewujudkan Ruang Hidup yang Aman, Tertata, dan Produktif di Kabupaten Karo

Kawasan perkotaan Kabanjahe dan Berastagi merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo. Selain wilayah perkotaan, 5 (lima) tahun ke depan ibukota kecamatan juga diharapkan dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cepat harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, perhubungan, ruang terbuka hijau dan perumahan menjadi kebutuhan yang mutlak.

Tujuan Program

Tujuan peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan adalah

- Meningkatkan konektivitas antarwilayah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, mempercepat distribusi barang dan jasa menuju perkotaan Kabanjahe dan Berastagi, serta menghubungkan sentra produksi dengan pasar.
- Menyediakan hunian layak yang dilengkapi dengan akses air bersih, sanitasi dan perumahan yang memadai, serta infrastruktur lingkungan yang mendukung seperti ruang terbuka hijau dan sarana prasarana persampahan.
- Melalui peningkatan dan penataan kawasan tersebut diharapkan akan dapat mewujudkan ruang hidup yang aman, Tertata, dan Produktif di Kabupaten Karo.

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo
- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan Perumahan melalui APBN.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Optimalisasi Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya sebagai bentuk kolaborasi pembangunan berbasis komunitas.

Ruang Lingkup Program

- Meningkatkan Aksesibilitas Ekonomi dan Konektivitas Wilayah melalui Peningkatan kemandirian jalan dan jembatan pada koridor penghubung pertanian, wisata, dan pusat logistik dan perluasan jalan strategis menuju wilayah dengan potensi ekonomi yang belum tergarap secara optimal. Selanjutnya pembangunan jalur kereta api jalur Siantar-Pematang Raya-Merek-Kabanjahe-Berastagi dan peningkatan Dermaga Tongging akan dikoordinasikan dengan Pemerintah atasan untuk mempercepat pelaksanaannya.
- Pemeliharaan Infrastruktur Penunjang dan Adaptif melalui Penataan sistem drainase terpadu di kawasan padat penduduk untuk mengurangi genangan dan kerusakan jalan serta Pemanfaatan teknologi konstruksi yang sesuai karakteristik geografis wilayah Karo.
- Peningkatan Infrastruktur Dasar Masyarakat melalui Pengembangan sistem air minum yang memenuhi standar kuantitas, kontinuitas, dan kualitas (3K), pembangunan rumah layak huni dan bersanitasi sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penataan kawasan permukiman kumuh dan pengembangan infrastruktur lingkungan perkotaan yang ramah masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, optimalisasi lahan kosong untuk proyek infrastruktur.

Dampak yang diharapkan

- Meningkatnya aksesibilitas ekonomi dan konektivitas wilayah melalui peningkatan kemantapan jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api dan peningkatan dermaga Tongging.
- Terpeliharanya infrastruktur penunjang melalui penataan sistem drainase terpadu di kawasan padat penduduk untuk mengurangi genangan dan kerusakan jalan serta pemanfaatan teknologi konstruksi yang sesuai karakteristik geografis wilayah Karo
- Meningkatnya infrastruktur dasar masyarakat melalui pengembangan sistem air minum yang memenuhi standar kuantitas, kontinuitas, dan kualitas (3K), Pembangunan rumah layak huni dan bersanitasi sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Penataan kawasan permukiman kumuh dan pengembangan infrastruktur lingkungan perkotaan yang ramah masyarakat.

9) Percepatan Pembangunan Daerah 3T (Termiskin, Tertinggal, Terluar): Jalan Menuju Pemerataan dan Inklusi

Kriteria penentuan lokus pembangunan untuk daerah 3T (Termiskin, Tertinggal dan Terluar) di Kabupaten Karo diantaranya sebagai berikut:

- Termiskin: diperoleh dari data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem)
- Tertinggal: merupakan daerah-daerah yang minim fasilitas infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan serta permukiman
- Terluar: merupakan daerah/kecamatan terluar di Kabupaten Karo seperti kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Juhar, Tigabinanga dan Kuta Buluh.

Beberapa permasalahan daerah 3T (Termiskin, Tertinggal dan Terluar) dimaksud antara lain:

- Aksesibilitas menuju desa masih sangat rendah akibat jalan yang rusak dan transportasi yang sangat minim
- Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi dan rumah layak huni belum optimal
- Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan masih belum baik
- Jaringan telekomunikasi belum tersedia

Tujuan Program

Tujuan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah

- Meningkatkan aksesibilitas menuju desa melalui peningkatan jalan dan peningkatan konektivitas
- Menyediakan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi hunian layak, pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

Strategi Pembiayaan

- Pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karo
- Dukungan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Infrastruktur dan Perumahan melalui APBN.
- Kemitraan strategis dengan pihak swasta melalui skema CSR dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
- Optimalisasi Dana Desa dan partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya sebagai bentuk kolaborasi pembangunan berbasis komunitas.

Ruang Lingkup Program

- Meningkatkan Aksesibilitas Ekonomi dan Konektivitas Wilayah melalui Peningkatan kemandirian jalan dan jembatan
- Peningkatan infrastruktur dasar masyarakat melalui Pengembangan sistem air minum yang memenuhi standar kuantitas, kontinuitas, dan kualitas (3K), Pembangunan rumah layak huni dan bersanitasi sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

Dampak yang diharapkan

- Meningkatnya aksesibilitas ekonomi dan konektivitas wilayah melalui Peningkatan kemandirian jalan dan jembatan
- Tersedianya infrastruktur dasar masyarakat melalui Pengembangan sistem air minum yang memenuhi standar kuantitas, kontinuitas, dan kualitas (3K), Pembangunan rumah layak huni dan bersanitasi sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan dan telekomunikasi.

3.2.4. Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan merupakan arah kebijakan utama yang ditentukan oleh pemerintah daerah untuk diwujudkan dalam jangka menengah (5 tahun) sebagai jawaban atas permasalahan pembangunan, isu strategis, serta tuntutan kebutuhan masyarakat di daerah. Prioritas ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, yang kemudian diselaraskan dengan kebijakan pembangunan provinsi maupun nasional.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Prioritas Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 meliputi:

1) *Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik*

Prioritas ini diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sebagai pondasi utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, Kabupaten Karo diharapkan mampu menghadirkan birokrasi yang responsif, inovatif, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kepentingan pembangunan daerah

Fokus utamanya adalah pada penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan yang terintegrasi dan berbasis data. Pemerintah Kabupaten Karo akan mendorong pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan akan menjadi lebih efisien dalam penggunaan anggaran, efektif dalam pencapaian program, transparan dalam proses, dan akuntabel terhadap hasil.

Pemerintah Kabupaten Karo akan memperkuat sistem layanan berbasis elektronik (*e-government*), meningkatkan integrasi data antar-instansi, serta menjamin perlindungan terhadap data pribadi dan informasi

publik. Dengan penerapan digitalisasi dan keamanan informasi yang andal, diharapkan tercipta pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan terpercaya. Selain itu, Pemerintah juga akan fokus pada pengembangan kapasitas melalui pelatihan, pendidikan, serta sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Selain itu, penguatan etika kerja, disiplin, dan orientasi pelayanan publik akan menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

2) *Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal*

Prioritas ini diarahkan untuk membangun karakter masyarakat Kabupaten Karo yang berlandaskan pada nilai spiritualitas, kerukunan, serta penghormatan terhadap keberagaman budaya. Dengan memperkuat nilai-nilai religius dan toleransi, diharapkan tercipta kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan saling menghargai antarumat beragama maupun kelompok sosial. Di sisi lain, pelestarian budaya Karo dan pengembangan kearifan lokal akan menjadi modal sosial yang penting dalam memperkuat identitas daerah, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong sektor pariwisata berbasis budaya yang berdaya saing.

Prioritas ini bertujuan untuk membangun karakter masyarakat Kabupaten Karo yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, memiliki wawasan modern, serta mengamalkan kehidupan beragama secara harmonis. Pemerintah daerah akan mendorong pelestarian adat dan tradisi Karo, memperkuat pendidikan karakter, serta mendukung kehidupan keagamaan yang toleran dan inklusif. Dengan demikian, terbentuk masyarakat yang berakar pada nilai luhur budaya, terbuka terhadap kemajuan, dan hidup dalam suasana sosial yang damai serta saling menghargai.

3) *Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat*

Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Karo melalui penyediaan layanan kesehatan yang lebih merata, mudah diakses, serta terjamin kualitasnya. Layanan kesehatan tidak hanya difokuskan pada aspek kuratif, tetapi juga preventif dan promotif, sehingga mampu menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan sistem layanan yang terintegrasi antar fasilitas kesehatan, serta didukung tenaga medis yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai, diharapkan tercipta masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari usia dini hingga lanjut usia. Pemerintah Kabupaten Karo akan memperkuat layanan kesehatan dasar, meningkatkan akses dan kualitas fasilitas kesehatan, serta mendorong pola hidup sehat melalui edukasi dan promotif-preventif. Fokus juga diberikan pada penurunan angka stunting, kematian ibu dan anak, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Dengan pendekatan menyeluruh sepanjang siklus hidup, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan sejahtera.

4) *Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan*

Prioritas ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat Kabupaten Karo melalui sektor unggulan, yaitu pertanian dan pariwisata.

Sebagai daerah dengan potensi lahan subur dan destinasi wisata alam serta budaya yang melimpah, pengembangan kedua sektor ini menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pertanian akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, kualitas, serta akses pasar (hulu-hilir), sementara pariwisata dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan sinergi kedua sektor tersebut, diharapkan tercipta nilai tambah ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru, serta meningkatnya daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

Untuk mengoptimalkan potensi unggulan daerah seperti pertanian dan pariwisata dilakukan melalui peningkatan kualitas, inovasi, dan pemasaran produk. Pemerintah Kabupaten Karo juga akan mendorong hilirisasi produk lokal, penerapan teknologi tepat guna, serta penguatan kemitraan dengan pelaku usaha dan investor. Dengan strategi ini, produk-produk lokal diharapkan memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar regional, nasional, maupun global, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karo akan memperkuat sektor pertanian melalui peningkatan produktivitas, penguatan infrastruktur pendukung, pengelolaan pasca-panen, serta stabilisasi harga.

5) *Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat*

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Kabupaten Karo agar lebih sehat, cerdas, berkarakter, dan produktif sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan generasi muda agar tumbuh menjadi insan yang unggul, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain, kesejahteraan keluarga, perlindungan sosial, penguatan pemuda, peningkatan prestasi olahraga, serta terciptanya lingkungan sosial yang aman dan harmonis menjadi fokus penting dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat. Selanjutnya, pembangunan juga menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa dengan memperkuat kapasitas pemerintahan desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Strategi pencapaian dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan keterampilan kerja, pemerataan layanan kesehatan, penguatan program perlindungan sosial, pembinaan generasi muda dan olahraga, hingga pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal. Dengan langkah ini, Kabupaten Karo diharapkan mampu melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkehidupan sosial yang harmonis.

6) *Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, Kewirausahaan, Industri Kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata*

Prioritas ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang merata dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Karo akan mengembangkan program pelatihan keterampilan, mendukung kewirausahaan, serta memperkuat sektor-sektor produktif yang dapat menyerap tenaga kerja. Dengan meningkatkan kualitas dan

produktivitas tenaga kerja, diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih berkelanjutan.

Pemanfaatan potensi unggulan daerah, khususnya pertanian dan pariwisata, akan didorong sebagai basis pengembangan usaha baru, inovasi produk, serta diversifikasi ekonomi yang mampu memberikan nilai tambah. Upaya pencapaian dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan kewirausahaan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, penguatan koperasi sebagai wadah ekonomi kolektif akan difokuskan untuk meningkatkan daya tawar pelaku usaha kecil dan petani, sekaligus mendorong terciptanya rantai pasok yang lebih adil dan menguntungkan. Dengan strategi tersebut, Kabupaten Karo diharapkan mampu menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

7) Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan

Prioritas pembangunan ini menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur yang memadai, merata, dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah. Infrastruktur yang andal bukan hanya berfungsi untuk membuka keterisolasian wilayah, tetapi juga mempercepat arus barang, jasa, dan mobilitas masyarakat sehingga memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup.

Fokus utama diarahkan pada terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan, melalui pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, irigasi, jaringan air bersih, serta infrastruktur pendukung pertanian dan pariwisata. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas sektor unggulan daerah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Selain itu, prioritas ini juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman, dengan memperhatikan standar hunian layak, penataan kawasan perkotaan dan perdesaan, serta penyediaan sarana sanitasi dan pengelolaan lingkungan yang sehat. Pembangunan infrastruktur perumahan yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan terciptanya permukiman yang tertata, nyaman, dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya, diarahkan pula pada terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau, melalui penguatan jaringan transportasi darat yang terintegrasi, penyediaan sarana transportasi publik, serta peningkatan keselamatan dan kenyamanan perjalanan masyarakat. Dengan tersedianya transportasi yang baik, konektivitas antarwilayah semakin lancar, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat hubungan sosial antar komunitas.

Dengan keseluruhan fokus tersebut, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karo diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, tetapi juga menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, serta layanan transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.

8) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Prioritas pembangunan ini diarahkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana. Kabupaten Karo sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam sekaligus potensi kerentanan bencana, seperti

erupsi gunung berapi, banjir, longsor, maupun kebakaran hutan, membutuhkan upaya pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana yang lebih sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas lingkungan hidup difokuskan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, rehabilitasi hutan dan pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu, serta pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan. Upaya ini dilaksanakan bersamaan dengan edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal dasar pembangunan daerah.

Sementara itu, penguatan ketahanan bencana dilakukan melalui peningkatan sistem peringatan dini, penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur, pengembangan infrastruktur mitigasi, serta pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana. Pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Karo yang tangguh terhadap bencana.

Dengan terjaganya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya ketahanan bencana, pembangunan Kabupaten Karo diharapkan berjalan secara berkelanjutan, memberikan perlindungan bagi masyarakat, serta menjamin keberlangsungan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

9) Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah

Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat pondasi digital yang dapat mendukung berbagai aspek pembangunan, baik di sektor pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Beberapa fokus utama dalam prioritas ini meliputi peningkatan infrastruktur TIK, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dan pengembangan ekonomi digital. Dengan strategi ini, Kabupaten Karo berharap mampu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga mempercepat laju pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

10) Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi

Prioritas ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen meningkatkan kontribusi kinerja pembangunan daerah agar selaras dan mendukung pencapaian target nasional dan provinsi. Fokus utama adalah memperkuat koordinasi, sinkronisasi program, serta optimalisasi sumber daya untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan peningkatan kinerja yang terukur dan terintegrasi, Kabupaten Karo diharapkan dapat berperan aktif dalam percepatan pembangunan skala regional dan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam mencapai Indonesia Emas dalam jangka panjang pembangunan.

Tabel 3.9
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Outcome, Indikator dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Karo

VISI : MEWUJUDKAN KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO MODERN, KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
I. Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik	1.1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
				Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)		
				Indeks Reformasi Hukum (Indeks)		
				Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah (Opini)		
				Nilai SAKIP kabupaten (Nilai)		
				Level Maturitas SPIP (Level)		
				Belanja Riset (%)		
				Indeks Integritas (Angka)		
				Indeks Inovasi Daerah (Indeks)		
				Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan produk hukum yang dihasilkan.	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
					Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
					Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level kapabilitas apip (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
					Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
					Persentase Penetapan Ranperda tahun N (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
				Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Juhar	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1 (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Barusjahe	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Berastagi	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Dolat Rayat	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Juhar	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Kabanjahe	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang efektif dan Partisipatif di Kecamatan Kutabuluh	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Lau Baleng	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Mardinding	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Merdeka	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Merek	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Munte	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Naman Teran	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Payung	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Simpang Empat	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Tigabinanga	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Tiganderket	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Tigapanah	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		1.2. Meningkatkan layanan publik berbasis digital dan keamanan informasi		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)		
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigapanah	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Barusjahe	Nilai IKM (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Berastagi	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Dolat Rayat	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Juhar	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kabanjahe	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lau Baleng	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mardinding	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Merdeka	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Merek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Munte	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Payung	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Simpang Empat	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tiganderket	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kutabuluh	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Naman Teran	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
				Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
		1.3. Meningkatnya kapasitas dan profesionalis me Aparatur Sipil Negara (ASN)	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya Layanan Penjaminan mutu, Pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
II. Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan	2. Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal	2.1. Terwujudnya masyarakat yang religius, berbudaya dan toleran		Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
				Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama(%)		
				Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan(%)		
				Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (%)		
				Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan (%)		
			Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
III. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi	3. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada semua siklus hidup		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
				Prevalensi Stunting pada balita (%)		
				Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)		
				Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((kasus))		
			Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (Kasus)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio puskesmas per 1.000 penduduk (Rasio)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
IV. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata	4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan			Prevalensi Stunting ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk (Rasio)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan masyarakat	BOR (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				ALOS RSUD (Hari)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		4.1. Meningkatnya Nilai tambah dan Daya Saing Produk Berbasis Sumber Daya Lokal	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
				Tingkat Kemiskinan(%)		
				Rasio Gini(Rasio)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
				Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota(%)		
				PDRB perkapita (Rp Juta)(Rp. Juta Per Tahun)		
				Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		
				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)		
				Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)		
				Net Ekspor (SBM/Milyar Rupiah)		
				Kontribusi Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (%)		
				Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha) (Pelaku Usaha)		
			Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian dan Meningkatkan Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Peningkatan produksi komoditi pertanian unggulan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi komoditi pertanian unggulan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor	Net Ekspor (SBM/Milyar Rupiah)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang masuk kedalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas Lahan yang Dilakukan Pengendalian OPT (Ha)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner	Persentase Jumlah HPR yang Divaksin (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Realisasi Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri/IKM (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota (%)	3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
			Terkendalnya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		4.2. Meningkatkan ketersediaan dan ketahanan pangan yang berkualitas dan terjangkau		Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)		
				Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati perairan umum daratan		3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN	
			Meningkatnya Perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		
		4.3. Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		
				Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)			
				Tingkat Inflasi (%)			
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (% PDRB) (%)			
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		
			Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		
V. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik	5. Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat	5.1. Meningkatkan kualitas pendidikan, literasi, dan kualitas generasi muda		Indeks Pembangunan Manusia (Angka)			
				Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP (%)			
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)			
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)			
				Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMP (%)			
				Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD (%)			
				Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk A Numerasi SD (%)			
				Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)			
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Ketersediaan arsip di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang dapat diakses oleh masyarakat (Berkas)	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	
				Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
					Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		
			Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
				Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indeks Capaian Rapor Pendidikan (Indeks)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
			Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		5.2. Terwujudnya kesejahteraan keluarga, pemuda berkualitas, prestasi olahraga serta lingkungan sosial yang aman dan harmoni		Persentase prestasi olahraga (%)		
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)		
				Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)		
				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
				Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)		
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Keluarga (%)		
				Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Angka)		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Barusjahe	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Berastagi	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Dolat Rayat		7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Juhar	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabanjahe	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kutabuluh	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Lau Baleng	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Mardinding	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Merdeka	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Merek	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Munte	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Naman Teran	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Payung	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Simpang Empat	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tigabinanga	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tiganderket	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tigapanah	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Indeks)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapat Pelayanan Pemulangan (Orang)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)		2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat Yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)		2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
		5.3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa		Persentase Desa/Kelurahan Mandiri (%)		
			Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Berastagi	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kabanjahe	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kutabuluh	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Merdeka	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Munte	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tigabinanga	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Barusjahe	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Dolat Rayat	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Lau Baleng	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mardinding	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Payung	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Tiganderket	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Barusjahe	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Berastagi	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Dolat Rayat	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Kabanjahe	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Lau Baleng	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Mardinding	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Merdeka	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Payung	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Tigabinanga	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Tiganderket	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Merek	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Munte	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Tigapanah	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Kutabuluh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Naman Teran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
VI. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan pariwisata	6. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata	6.1. Meningkatkan kesempatan kerja yang inklusif dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka(%)		
				Rasio kewirausahaan daerah (Rasio)		
				Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase umkm yang bermitra (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN		
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
			Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
			Meningkatnya persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
			Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
			Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
			Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Tersedianya dokumen rencana tenaga kerja (*)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
		VII. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas	7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan	7.1. Terwujudnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi yang baik dan berkelanjutan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)(Angka)		
						Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		
Gedung pemerintah dalam kondisi baik (%)								
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)								
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)							
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman (%)							
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman				Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				Persentase Rumah tangga mendapat akses terhadap Sanitasi Aman (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi				Jumlah SDM Tenaga terampil konstruksi (Orang)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		
	Meningkatnya kualitas bangunan gedung				Gedung Pemerintahan yang layak dan baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan				Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
	7.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman					Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau ((%))		
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)								
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria					Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman					Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong					Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
		7.3. Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman, dan terjangkau	Meningkatnya Penyediaan PSU perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
			Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
			Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP (Persentase)	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	
	8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana			Penurunan Emisi GRK (TON CO2 EQ)		
				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)		
		8.1. Terwujudnya kelestarian lingkungan dan ketahanan energi guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan		Ketaatan terhadap RTRW (%)		
				Timbulan sampah yang ditangani (%)		
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota (*)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (*)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah (*)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (Kali)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
				Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (*)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas RTH yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup (Ha)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase penanganan sampah (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Terlesainya Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUJ LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan sampah yang ditangani (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (Ton)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Persentase cakupan area pelayanan (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		8.2. Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana		Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan pasca bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
VIII. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah	9. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah	9.1. Meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah		Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)(Angka)		
				Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Angka)		
				Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Indeks)		
				Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Angka)		
				Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
			Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Angka)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
IX. Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas	10. Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi	10.1. Peningkatan kontribusi kinerja terhadap target nasional dan provinsi		Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah(%)		
				Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah (%)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA,	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo

3.2.5. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah kebijakan pembangunan wilayah dimaksudkan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Karo sebagai salah satu pusat pengembangan bioindustri dan pariwisata bertaraf global dengan mengimplementasikan Misi ke-6 yaitu mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah dan Misi ke-7 yaitu mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Pengembangan wilayah sangat erat kaitannya dengan letak geografis suatu daerah, dimana Kabupaten Karo merupakan daerah strategis yang terletak di dua Kawasan Strategis Nasional yakni Kawasan Metropolitan Mebidangro dan KSPN danau Toba. Selain itu Kabupaten Karo menjadi penghubung Ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten lain seperti Simalungun, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir dan Provinsi Aceh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo 2022–2042, adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Karo terbagi sesuai rencana struktur ruang dan pola ruang.

A. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karo terdiri dari:

1. Sistem Pusat Permukiman yang terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi yang meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, dan Merdeka.
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan yang meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Kutabuluh, Merek, Tigabinanga.
 - c. Pusat-Pusat Lain terdiri dari Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi Kecamatan Munte, Simpang Empat, Tiganderket, Tigapanah, dan Pusat Pelayanan Lingkungan yang meliputi Kecamatan Juhar, Laubaleng, Mardinding, Naman Teran dan Payung.
2. Sistem jaringan prasarana yang terdiri dari:
 - a. Sistem Jaringan Transportasi berupa sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
 - b. Sistem Jaringan Energi berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - c. Sistem Jaringan Telekomunikasi berupa Jaringan Tetap dan Jaringan Bergerak.
 - d. Sistem Jaringan Sumber Daya Air berupa Prasarana Sumber Daya Air yang meliputi sistem jaringan irigasi; dan sistem pengendalian banjir.
 - e. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya meliputi sistem penyediaan air minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (Spal), Sistem Jaringan Persampahan dan Sistem Jaringan Evakuasi Bencana.

B. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022–2042 meliputi:

1. Kawasan Lindung yang meliputi:
 - a. Badan Air dengan luas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Kecamatan Kutabuluh, Laubaleng, Munte, Naman Teran, Payung, Tigabinanga, Tigapanah, dan Tiganderket.
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 63.291 (enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Simpang Empat dan Tigabinanga.
 - c. Kawasan konservasi berupa Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional meliputi Taman Nasional seluas kurang lebih 23.525 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Naman Teran, Payung dan Tiganderket.
2. Kawasan Budi Daya yang meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi terdiri dari Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 9.528 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar, meliputi Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding; Merdeka, Naman Teran, Payung, Simpang Empat dan Tiganderket, serta Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 6.689 (enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Merek, Munte dan Tigabinanga.
 - b. Kawasan Pertanian terdiri dari:
 - Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 37.093 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga, Tiganderket.
 - Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 47.371 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.
 - Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 21.621 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigapanah, Tigabinanga dan Tiganderket.
 - Kawasan Peternakan seluas kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) hektar, meliputi Kecamatan Laubaleng, Merek dan Tigapanah.
 - Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) merupakan bagian dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.768 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi: Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.

- Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, meliputi Kecamatan Berastagi, Merek, Merdeka dan Munte.
- Kawasan Permukiman terdiri dari Kawasan Permukiman Perkotaan seluas kurang lebih 2.809 hektar meliputi Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Merdeka, Merek, Tigabinanga, Tigapanah.
- Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 4.922 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar, meliputi Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolat Rayat, Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Naman Teran, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, Tiganderket dan Tigapanah.
- Kawasan Pertahanan dan Keamanan 23 (dua puluh tiga) hektar, meliputi Markas Komando Distrik Militer 0205/TK di Kecamatan Berastagi, Batalyon Infantri (Yonif) 125/Simbisa Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe, Komando Rayon Militer 01/Barusjahe di Kecamatan Barusjahe, Komando Rayon Militer 02/Tigapanah di Kecamatan Tigapanah, Komando Rayon Militer 03/Berastagi di Kecamatan Berastagi, Komando Rayon Militer 04/Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat, Komando Rayon Militer 05/Payung di Kecamatan Payung, Komando Rayon Militer 06/Munte di Kecamatan Munte, Komando Rayon Militer 07/Juhar di Kecamatan Juhar, Komando Rayon Militer 08/Tigabinanga di Kecamatan Tigabinanga, Komando Rayon Militer 09/Laubaleng di Kecamatan Laubaleng.

Selanjutnya sesuai dengan RTRW Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 di wilayah Kabupaten Karo terdapat Kawasan Strategis yang meliputi:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN)
KSN meliputi Kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deliserdang-Karo (Mebidangro) di wilayah Kecamatan Berastagi, Merdeka, Dolat Rayat, Barusjahe dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di wilayah Kecamatan Merek.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP)
KSP meliputi Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan di Kecamatan Merek, Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.
3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
KSK berupa kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan perkotaan Berastagi, Kabanjahe, Merek, dan Tigabinanga.

Sesuai penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pola ruang dijelaskan sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun muatan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Karo tahun 2022-2042 dijelaskan melalui arah pemanfaatan pola ruang dan indikasi program pola ruang yakni:

1. Perwujudan kawasan lindung yakni perwujudan badan air, perwujudan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan perwujudan kawasan konservasi
2. Perwujudan kawasan hutan produksi
3. Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi dan rehabilitasi kawasan pertanian;

4. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi, pengembangan dan pengelolaan dan pengendalian dan pemanfaatan kawasan peruntukan pariwisata;
5. Pengembangan dan penataan kawasan permukiman;
6. Penataan dan pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
7. Pengembangan/peningkatan kualitas dan rehabilitasi/revitalisasi kawasan strategis kabupaten.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program pengembangan wilayah Pemerintah Kabupaten Karo akan mencari sumber pendanaan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, masyarakat maupun sumber pendanaan lainnya. Sumber pendanaan lainnya misalnya CSR Perusahaan yang berada di Kabupaten Karo, Hibah atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Khusus untuk KPBU Pemerintah Kabupaten Karo sedang berupaya untuk mendanai kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di wilayah Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Simpang Empat dan Tigapanah.

Potensi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Karo

Pengembangan wilayah pariwisata diupayakan untuk meningkatkan potensi suatu daerah melalui sektor pariwisata, dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, dan melestarikan kekayaan alam dan budaya. Hal ini melibatkan berbagai aspek seperti pembangunan infrastruktur, pengelolaan destinasi wisata, promosi daya tarik wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan perjalanan dan tinggal sementara di luar lingkungan biasa seseorang untuk tujuan rekreasi, bisnis atau kegiatan lainnya. Industri pariwisata mencakup berbagai layanan dan produk yang mendukung aktivitas, termasuk akomodasi, transportasi, makanan dan minuman serta atraksi wisata. Kabupaten Karo memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam dan kaya dengan keindahan alam, warisan budaya serta keragaman etnis dan tradisi.

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah. Destinasi Pariwisata Daerah merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata daerah, yang diantaranya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah (KPPD) memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan dan memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing serta memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan Kepariwisata dan memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah Kabupaten Karo meliputi 5 (lima) Destinasi Pariwisata Daerah; 6 (enam) KSPD yang tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan. Perwilayahan 5 (lima) Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari 1) Destinasi Pariwisata Daerah Berastagi dan sekitarnya; 2) Destinasi Pariwisata Daerah Gunung Sibayak dan sekitarnya; 3) Destinasi Pariwisata Daerah Tongkoh dan sekitarnya; 4) Destinasi Pariwisata Daerah Simpang Empat dan sekitarnya; dan 5) Destinasi Pariwisata Daerah Merek dan sekitarnya.

Berikut ini diuraikan beberapa daftar potensi wisata prioritas di Kabupaten Karo sesuai dengan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi a) KSPD Liang Melas; b) KSPD Namokarang –Siosar; c) KSPD Gajah Bobok – Tongging; d) KSPD Liang Dahar – Titan Arum; e) KSPD Sinabung; dan f) KSPD Barus – Sibayak sebagai berikut:

Tabel 3.10
Potensi Wisata berdasarkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

No	Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	Potensi Wisata
1	KSPD Liang Melas	Monumen Abdul Kadir dan Rumah Gara di Mardinding
		Rumah Raja Urung Seberaya
		Hamparan Kebun Jeruk di Kutambelin
		Air Terjun Pola Tebu dan Bunga Titan Arum
		Hamparan Kebun Jagung di Kutambarupunti
		Hamparan Kebun Jagung di Sukajulu;
		Karst (Batu Kapur) Mbal-mbal Petarum
		Hamparan Sawah di Paya Lah-Lah di Mardinding
2	KSPD Namokarang-Siosar	Makam Nabung Surbakti
		Spot Wisata Sungai di Gunung;
		Monumen TNI Sektor III Napindo di Bertah
		Hamparan Persawahan di Munte
		Puncak Menara Api di Gunung Saribu
		Monumen Pertempuran Pang Aman Dimot di Sukaramai
		Hamparan Sawah Berteras Sugihen
		Ekowisata Buluh Pancur
		Ekowisata Lau Jandi
		Agrowisata Siosar
		Wisata Sungai Namo Karang
		Arung Jeram Perbesi
3	KSPD Gajah Bobok – Tongging	Desa Budaya Dokan
		Palas Sipitu Ruang Ajinembah
		Geowisata Gunung Sibuatan
		Lansekap Budaya Karo “Sipituhuta”
		Ekowisata Daerah Aliran Sungai Aek Hotang-Air Terjun Sipiso-piso
		Ekowisata Gajah Bobok
		Geowisata Gunung Sipiso-piso
		Agrowisata Manukmulia
4	KSPD Liang Dahar – Titan Arum	Tugu Perjuangan Kutabuluh
		Spot Pertempuran Bintang Meriah dan Uruk Ndoholi
		Danau Susuk
		View Point Penampen
		Bunga Titan Arum di Karangen Penggurun Gunung Merlawan
		Gua Liang Dahar
5	KSPD Sinabung	Gunung Sinabung
		Danau Lau Kawar
		Hamparan Tanaman Hortikultura di Naman Teran
		Tugu Pertempuran Rata Perangin-angin
		Tugu Pertempuran Sibintun
		Desa Budaya Lingga.
6	KSPD Barus – Sibayak	Gunung Sibayak dan Kaldera Gunung Pintau;
		Ekowisata Kawasan Wisata Air Panas Semangat Gunung-Daulu;
		Rumah Interniran Sukarno, Agus Salim, Sutan Sahrir di Lau Gumba
		Geowisata Gunung Barus
		Hamparan Kebun Bunga Desa Raya
		Geowisata Deleng Kutu
		Pemandian Lau Tapin Desa Sempajaya
		Situs Putri Hijau Seberaya
		Meriam Puntung di Sukanalu
		Museum Djamin Gintings
		Bukit Gundaling;
		Taman Mejuah-Juah di Berastagi

Pengembangan desa wisata juga akan terus didorong dan disesuaikan dengan Keputusan Bupati yang di evaluasi setiap tahun. Konsep

pengembangan pariwisata tersebut akan tetap dilaksanakan secara kolaboratif dan terintegrasi dengan kekayaan kebudayaan daerah sebagai daya tarik pariwisata seperti pelestarian dan revitalisasi cagar budaya, kesenian tradisional, penetapan cagar budaya dan pendataan objek duga cagar budaya.

Selain wilayah tersebut, Kabupaten Karo merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) serta salah satu wilayah pada Geopark Kaldera Toba, Kabupaten Karo juga sebagai perlintasan Kota Medan dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Samosir dan beberapa kabupaten/kota Provinsi NAD sehingga posisinya menjadi sangat strategis dalam pengembangan ekonomi dan daerah tujuan wisata. Potensi tersebut menjadi potensial dalam pengembangan pariwisata antara lain Ekowisata dan wisata petualang, wisata edukasi lingkungan dan Konservasi, wisata berbasis geopark, Agrowisata, Wisata Alam, Wisata Kuliner, Wisata Budaya, dll. Pengembangan tersebut tidak terlepas dari kolaborasi dan sinergitas berbagai pihak pada wilayah tersebut antara lain untuk peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur, pengembangan destinasi, pemasaran dan promosi pariwisata bersama, paket wisata bersama, pemberdayaan Masyarakat, keamanan dan ketertiban, dll

Potensi Pengembangan Pertanian Kabupaten Karo

Secara umum komoditi yang diusahakan oleh petani di Kabupaten Karo dapat dibagi ke beberapa subsektor, seperti tanaman hortikultura, tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan peternakan. Setiap subsektor memiliki komoditi unggulan yang dapat dilihat dari luas pertanaman yang diusahakan oleh petani serta potensi dan orientasi pasar yang bagus.

Komoditi unggulan pertanian Kabupaten Karo diantaranya padi, jagung, jeruk, salak, bawang merah, cabe merah, kentang, kubis, tomat, wortel, salak, kopi, kakao dan bunga potong. Beberapa komoditi unggulan Kabupaten Karo bahkan memberi kontribusi terbesar di Sumatera Utara. Komoditi unggulan tersebut tersebar di 17 (tujuh belas) kecamatan di Kabupaten Karo.

Tabel 3.11
Komoditi Unggulan di setiap Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Komoditi Utama
1	Mardingding	Padi, Jagung, Jeruk, Kakao
2	Lau Baleng	Padi, Jagung, Jeruk, Kakao
3	Tiga Binanga	Padi, Jagung, Jeruk, Kakao
4	Juhar	Padi, Jagung, Kakao
5	Munte	Padi, Jagung, Jeruk, Kakao, Buah Naga
6	Kuta Buluh	Jagung, Jeruk, Kakao
7	Payung	Padi, Jagung, Bawang Merah, Salak, Buah Naga
8	Tiganderket	Jagung, Bawang Merah, Salak, Buah Naga
9	Simpang Empat	Cabe, Kubis, Wortel, Kopi, Buah Naga
10	Naman Teran	Cabe, Kentang, Tomat, Kopi
11	Merdeka	Cabe, Kubis, Tomat, Wortel, Kopi, Kentang
12	Kabanjahe	Kubis, Wortel, Bunga Potong, Kopi
13	Berastagi	Kubis, Wortel, Bunga Potong, Kopi
14	Tiga Panah	Bunga Potong, Jeruk, Kubis, Cabe, Wortel, Kentang, Kopi, Buah Naga
15	Dolat Rayat	Cabe, Kubis, Kentang, Wortel, Jeruk, Kopi
16	Merek	Cabe, Kubis, Tomat, Kentang, Bawang Merah, Kopi
17	Barus Jahe	Padi, Cabe, Kubis, Tomat, Wortel, Kopi, Kentang

Subsektor peternakan juga terus menunjukkan perkembangannya di Kabupaten Karo. Hewan ternak yang banyak dibudidayakan diantaranya sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, babi dan kelinci. Komoditas peternakan sebagai penghasil daging, akan terus dikembangkan di Kawasan Penggembalaan Umum Nodi kecamatan Lau Baleng. Kawasan ini memiliki potensi untuk peningkatan populasi ternak dan mencukupi ketersediaan daging di Kabupaten Karo.

3.2.5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan pertimbangan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah yang dilihat dari susunan sebaran pusat kegiatan, karakteristik pola pergerakan lalu-lintas wilayah, lokasi hub logistik dan prioritas industri, serta jarak posisi wilayah administrasi, Provinsi Sumatera Utara terbagi dalam 6 (enam) kelompok wilayah kabupaten/kota. Enam kelompok wilayah kabupaten/kota tersebut menjadi dasar pembagian Provinsi Sumatera Utara menjadi 6 wilayah pengembangan (WP), yaitu:

- 1. WP Utara:** meliputi kota-kota dengan pola lalu lintas yang tinggi, terutama Medan yang menjadi pusat ekonomi utama dan memiliki banyak aktivitas logistik. Deli Serdang juga penting sebagai hub regional untuk industri pertanian dan manufaktur. Kabupaten Karo mendukung sektor pertanian, agro-industri, dan pariwisata.
- 2. WP Timur:** termasuk kawasan dengan aktivitas pelabuhan dan industri berat seperti Batu Bara dan Tanjungbalai. Wilayah ini juga mendukung pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- 3. WP Selatan:** memiliki fokus pada pengolahan hasil pertanian dan industri ringan, dengan Padangsidimpuan sebagai hub utama.
- 4. WP Barat:** termasuk kota-kota dengan aktivitas pelabuhan seperti Sibolga dan mendukung industri perikanan serta pariwisata.
- 5. WP Kepulauan Nias:** fokus pada inter-konektivitas pulau dan mendukung industri perikanan serta pariwisata.
- 6. WP Tengah:** termasuk hub industri utama seperti Pematangsiantar dan Sei Mangkei yang mendukung bioindustri dan pengolahan hasil pertanian, serta pariwisata.

Kabupaten Karo masuk ke dalam kelompok **Wilayah Pengembangan Utara meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Karo, dan Kabupaten Langkat**. Kota Medan berperan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) dan pusat distribusi utama. Kota Medan adalah pusat ekonomi dan logistik utama yang mendukung berbagai sektor industri dan perdagangan. Kabupaten Deli Serdang, juga berstatus PKN, memiliki volume lalu lintas sedang hingga tinggi dengan lalu lintas industri yang signifikan, menjadikannya hub logistik regional yang mendukung produk pertanian dan industri. Kota Binjai, yang juga PKN, memiliki volume lalu lintas sedang dan dominasi lalu lintas komuter. Kota ini berfungsi sebagai dukungan untuk industri lokal. **Kabupaten Karo**, berstatus PKN, menunjukkan pola lalu lintas sedang dengan dominasi lalu lintas pertanian dan pariwisata, mendukung sektor pertanian, agro-industri, dan pariwisata. Kabupaten Langkat, memiliki pusat kegiatan lokal (PKL) di Pangkalan Brandan dan Stabat, kabupaten ini memiliki volume lalu lintas sedang dengan fokus pada lalu lintas pertanian, mendukung pengolahan hasil pertanian dan pariwisata

A. Pengembangan Bioindustri

Bioindustri secara umum adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang industri. Bioteknologi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk penanganan dan pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis yang menghasilkan barang dan jasa. Bahan baku untuk bioindustri ini umumnya berupa: 1) hasil pertanian seperti sereal, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan; 2) hasil peternakan misalnya susu sapi, daging; 3) hasil perkebunan contohnya kopi, coklat, tebu; maupun 4) limbah industri seperti molase, jerami, dedak, kulit kopi, kulit coklat, sabut kelapa, ampas tahu, ampas biji yang telah diambil minyaknya, air limbah, dan sampah. Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi hasil pertanian, peternakan, perkebunan, maupun industri dimana Kabupaten Karo merupakan wilayah penghasil kakao, sayuran, buah-buahan, kopi, kentang, tanaman hortikultura, tanaman pangan dijadikan bahan baku untuk bioindustri.

B. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata merupakan aktivitas yang melibatkan perjalanan dan tinggal sementara di luar lingkungan biasa seseorang untuk tujuan rekreasi, bisnis, atau kegiatan lainnya. Industri pariwisata mencakup berbagai layanan dan produk yang mendukung aktivitas ini, termasuk akomodasi, transportasi, makanan dan minuman, serta atraksi wisata. Dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045, Kabupaten Karo memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam dan kaya dengan keindahan alam, warisan budaya, serta keragaman etnis dan tradisi. Berikut ini diuraikan beberapa daftar potensi wisata prioritas di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Tabel 3.12
Potensi Wisata Prioritas Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Potensi Wisata Prioritas
1	Medan	Istana Maimun, Masjid Raya, pusat perbelanjaan, museum.
2	Deli Serdang	Wisata agro, wisata pantai.
3	Binjai	Taman kota, fasilitas rekreasi keluarga.
4	Langkat	Bukit Lawang (ekowisata orangutan), Tangkahan (ekowisata hutan).
5	Karo	Wisata pegunungan, kebun buah, pasar tradisional
6	Samosir	Pulau Samosir (budaya Batak, wisata alam).
7	Toba	Danau Toba (wisata alam dan budaya).
8	Pematangsiantar	Kebun binatang, warisan kolonial, pusat perbelanjaan.
9	Sibolga	Pantai, pelabuhan, akses ke pulau-pulau terdekat.
10	Nias	Surfing, budaya lompat batu, wisata pantai.
11	Tapanuli Selatan	Wisata agro, wisata sejarah, air terjun.
12	Labuhanbatu	Pengolahan hasil pertanian, wisata alam.
13	Padangsidempuan	Wisata agro, budaya lokal.
14	Mandailing Natal	Ekowisata hutan, air terjun, wisata alam.
15	Dairi	Perkebunan kopi, wisata alam.
16	Pakpak Bharat	Wisata alam, budaya lokal.
17	Tapanuli Tengah	Pantai, pelabuhan, wisata alam dan budaya.
18	Humbang Hasundutan	Wisata alam, perkebunan.
19	Tapanuli Utara	Wisata alam, budaya lokal.
20	Gunungsitoli	Wisata budaya dan sejarah, pantai.
21	Labuhanbatu Utara	Wisata alam, agro wisata.
22	Labuhanbatu Selatan	Wisata alam, agro wisata.
23	Serdang Bedagai	Wisata pantai, ekowisata.
24	Tebingtinggi	Wisata sejarah dan budaya, agro wisata.
25	Padanglawas	Wisata alam, sejarah dan budaya.
26	Padanglawas Utara	Wisata alam, sejarah dan budaya.
27	Asahan	Wisata pantai, sejarah, dan budaya lokal.

No	Kabupaten/Kota	Potensi Wisata Prioritas
28	Batu Bara	Wisata pantai, sejarah, dan budaya lokal.
29	Nias Barat	Wisata pantai, budaya lokal, surfing.
30	Nias Selatan	Wisata pantai, budaya lompat batu, surfing.
31	Nias Utara	Wisata pantai, budaya lokal, surfing.
32	Simalungun	Kebun teh, wisata alam, Danau Toba.
33	Tanjungbalai	Wisata pantai, sejarah dan budaya, wisata kuliner.

Sumber: RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045

Potensi wisata prioritas di atas akan dikembangkan dalam paket pengembangan wisata dalam 20 tahun ke depan. Pengembangan paket wisata tersebut terbagi dalam 3 prioritas pengembangan yaitu prioritas pertama, kedua, dan ketiga, dimana Kabupaten Karo menjadi Prioritas Pertama dan Kedua. Prioritas Pertama dalam Paket Pengembangan Pariwisata Sirkuit Danau Toba bersama dengan Kabupaten Toba, Samosir, Pematangsiantar, Simalungun, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Dairi. Selanjutnya, Prioritas Kedua dalam Paket Pengembangan Pariwisata Rute Pariwisata Bukit Barisan bersama dengan Kabupaten Dairi, Pakpak Bharat, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal. Selain potensi wisata tersebut, Kabupaten Karo juga memiliki keindahan alam yang sangat potensial untuk mendukung sektor pariwisata, antara lain wisata alam, wisata budaya, wisata petualangan, bisnis, belanja, religius, wisata kuliner dan lain lain yang dapat dikembangkan nilai tambah dari sektor pariwisata.

Selain itu, sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan agenda pembangunan provinsi dan nasional, Pemerintah Kabupaten Karo merumuskan dukungan strategis melalui 9 (sembilan) PHTC dan 10 (sepuluh) Program Prioritas yang diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dan sinergi dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. PSN mencakup berbagai agenda strategis, mulai dari penanggulangan kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, Sekolah Rakyat, pembangunan 3 juta rumah, program makan bergizi gratis, hingga pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. PSN dikelompokkan ke dalam beberapa Program Strategis Nasional (ProSN), yaitu: pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, pertumbuhan ekonomi, serta PSN khusus untuk Sumatera Utara.

Penyelarasan terhadap PSN diwujudkan melalui rencana tindak lanjut beserta lokus pelaksanaan yang telah dijadwalkan untuk periode 2025–2030 pada masing-masing proyek strategis nasional. Melalui pemetaan dan sinergi ini, Kabuptaen Karo tidak hanya memastikan bahwa seluruh prioritas daerah selaras dengan arah pembangunan nasional, tetapi juga mendorong keterpaduan lintas sektor dan perangkat daerah agar dampak pembangunan dapat dirasakan secara luas di berbagai wilayah dan berkelanjutan. Bentuk penyelarasan yang dimaksud dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 3.13
Penyelarasan PHTC/PSD Kabupaten Karo terhadap Proyek Strategis Nasional

NO	Program Strategis Nasional (ProSN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	Penyelarasan dengan PHTC dan PSD Kabupaten Karo
1	Pengentasan Kemiskinan	
	1. Penanggulangan Kemiskinan	PHTC 9. Percepatan Pembangunan Daerah 3T (Termiskin, Tertinggal, Terluar): Jalan Menuju Pemerataan dan Inklusi
		PHTC 6. Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
		PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
		PSD 6. Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata
		PSD 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
		PSD 10. Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi
	2. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	PHTC 9. Percepatan Pembangunan Daerah 3T (Termiskin, Tertinggal, Terluar): Jalan Menuju Pemerataan dan Inklusi
		PHTC 6. Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
		PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
		PSD 6. Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata
		PSD 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
	3. Sekolah Rakyat	PHTC 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
	4. Pembangunan 3 Juta Rumah	PHTC 8. Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dengan mewujudkan ruang hidup yang aman, tertata, dan produktif di Kabupaten Karo; dan
		PSD 7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan
2	Ketahanan Pangan	
	1. Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)	PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
		PHTC 8. Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dengan mewujudkan ruang hidup yang aman, tertata, dan produktif di Kabupaten Karo; dan
		PSD 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan

NO	Program Strategis Nasional (ProSN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	Penyelarasan dengan PHTC dan PSD Kabupaten Karo
		PSD 7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan
		PSD 10. Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi
	2. Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
		PSD 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
	3. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
		PSD 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
	4. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
3	Kesehatan untuk semua	PSD 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
	1. Stunting	PHTC 2. Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
		PSD 3. Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
	2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PHTC 2. Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
		PSD 3. Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat
	3. Jaminan Kesehatan Nasional	PHTC 2. Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
		PSD 3. Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat
	4. Penuntasan TBC	PHTC 2. Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
		PSD 3. Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat
	5. Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	PHTC 2. Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
		PHTC 8. Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dengan mewujudkan ruang hidup yang aman, tertata, dan produktif di Kabupaten Karo; dan
		PSD 3. Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat
4	Perluasan Akses Pendidikan	
	1. Pembangunan dan Revitalisasi PAUD	PHTC 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;

NO	Program Strategis Nasional (ProSN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	Penyelarasan dengan PHTC dan PSD Kabupaten Karo
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
		PSD 2. Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal
	2. Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	PHTC 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;
		PHTC 4. Pelestarian Budaya Karo dengan mewujudkan identitas, martabat, dan pembangunan berwawasan budaya;
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
	3. Pembangunan dan Revitalisasi SMA Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	PSD 2. Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal
		PHTC 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
	4. Makan Bergizi Gratis	PSD 2. Perwujudan masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal
		PHTC 2. Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
		PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
		PHTC 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;
		PHTC 6. Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
		PSD 5. Perwujudan SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat
5	Pertumbuhan Ekonomi	PSD 3. Perwujudan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk meningkatnya kesehatan masyarakat
	1. Pengendalian Inflasi	PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
		PHTC 6. Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
		PSD 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
		PSD 7. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan
	2. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PSD 6. Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata
		PHTC 6. Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
		PSD 6. Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata

NO	Program Strategis Nasional (ProSN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN)	Penyelarasan dengan PHTC dan PSD Kabupaten Karo
	3. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	PHTC 3. Mewujudkan layanan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data;
		PHTC 7. Pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan dengan mewujudkan The Paradise of Karo Highland;
		PSD 1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
		PSD 9. Peningkatan pemanfaatan teknologi inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah
		PSD 10. Perwujudan kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi
	4. Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan)	PHTC 5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
		PHTC 6. Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
		PHTC 7. Pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan dengan mewujudkan The Paradise of Karo Highland;
		PSD 6. Peningkatan lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, Koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata
		PSD 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
	5. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	PHTC 8. Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dengan mewujudkan ruang hidup yang aman, tertata, dan produktif di Kabupaten Karo; dan
		PHTC 4. Pelestarian Budaya Karo dengan mewujudkan identitas, martabat, dan pembangunan berwawasan budaya;
		PSD 8. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Sumber: Bappedalitbang Karo, 2025

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Visi dan misi Kabupaten Karo lima tahun ke depan diterjemahkan menjadi program-program pembangunan daerah yang terhubung dengan program nomenklatur perangkat daerah. Program tersebut merupakan terjemahan praktis dari visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan hingga program prioritas. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karo yang diturunkan ke dalam Program Prioritas Daerah, melebur ke dalam program-program nomenklatur Perangkat Daerah. Kinerja pencapaian tujuan pembangunan diukur melalui serangkaian indikator utama yang bersifat *ultimate outcome*, yang selanjutnya indikator-indikator terpilih menjadi indikator kinerja utama Kepala Daerah. Sedangkan kinerja pencapaian dari sasaran pembangunan yang dideteksi melalui serangkaian indikator turunan, akan menjadi indikator utama Perangkat Daerah, yang selanjutnya akan menjadi indikator tujuan dan sasaran di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat pagu indikatif yang menggambarkan dukungan finansial serta level konsentrasi atas pelaksanaan program-program kerja Perangkat Daerah, yang saling terlibat dan berkolaborasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Pembangunan selama lima tahun ke depan diarahkan untuk mewujudkan visi “*Mewujudkan Karo Beriman, Karo Berbudaya, Karo Modern, Karo Unggul dan Karo Sejahtera Menuju Indonesia Emas*” dengan misi yang ingin dicapai yaitu :

1. Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal;
3. Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian, dan pariwisata;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang intelektual, kreatif, inovatif dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan nonakademik;
6. Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian, dan pariwisata;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
8. Meningkatkan pemanfaatan teknologi inovasi digital mempercepat pembangunan daerah; dan
9. Mendukung dan menyelaraskan program Nasional dan Provinsi ke Daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas.

Visi misi tersebut dicapai dengan pelaksanaan terhadap 9 (sembilan) Program Strategis Daerah atau Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*) yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan mewujudkan ekosistem pendidikan unggul;
2. Transformasi Kabupaten Karo menjadi sentra pelayanan kesehatan unggul dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan layanan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan berbasis data;
4. Penguatan Desa dan Pelestarian Budaya Karo;

5. Transformasi Pertanian Kabupaten Karo dengan mewujudkan *Corporate, Integrated, Smart, Eco, and Agro-Industry Farming* menuju swasembada dan kedaulatan pangan;
6. Mengakselerasi keunggulan ekonomi Karo dengan penguatan UMKM, Hilirisasi Industri, dan modernisasi pusat perdagangan berbasis potensi lokal;
7. Pengembangan pariwisata terpadu dan berkelanjutan dengan mewujudkan *The Paradise of Karo Highland*;
8. Peningkatan infrastruktur dan penataan kawasan dengan mewujudkan ruang hidup yang aman, tertata, dan produktif di Kabupaten Karo; dan
9. Percepatan Pembangunan Daerah 3T (Termiskin, Tertinggal, Terluar): Jalan Menuju Pemerataan dan Inklusi)

Dan 10 (sepuluh) Program Prioritas Pembangunan daerah yang merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan selama masa jabatan. Prioritas pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Program Prioritas Pembangunan tersebut yaitu:

- 1) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 2) Terwujudnya masyarakat yang religius, toleran, dan berbudaya melalui penguatan nilai-nilai spiritual, pelestarian budaya, serta kearifan lokal;
- 3) Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan terintegrasi untuk Meningkatkan kesehatan masyarakat;
- 4) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan
- 5) Terwujudnya SDM Kabupaten Karo yang unggul dan berdaya saing serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
- 6) Meningkatnya lapangan pekerjaan yang produktif, inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan UMKM, koperasi, kewirausahaan, industri kreatif dengan pemanfaatan potensi pertanian dan pariwisata;
- 7) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang andal, merata, dan berkelanjutan;
- 8) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- 9) Meningkatnya kapasitas dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah; dan
- 10) Terwujudnya kontribusi terintegrasi daerah terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Pencapaian visi misi melalui pelaksanaan Program Strategis Daerah atau Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Win*) dan 19 (sembilan belas) Program Prioritas Pembangunan tersebut di atas dilakukan melalui pelaksanaan program perangkat daerah. Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Karo. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

4.1. Program Perangkat Daerah

Pencapaian visi misi tersebut di atas dilakukan melalui pelaksanaan program Perangkat Daerah. Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di Kabupaten Karo. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Program pembangunan daerah adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Program ini merupakan implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan permasalahan spesifik di daerah yang memiliki tujuan yang jelas dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented*). Program harus memberikan dampak nyata dan melibatkan berbagai pihak serta mendukung program pemerintah pusat

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Setiap program yang dilaksanakan haruslah selektif dan menggambarkan hasil (*outcome*) yang jelas dan terukur sehingga semua program yang disertai pendanaan akan mendorong tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan daerah sebagai perwujudan visi dan misi Pembangunan Daerah.

Program sebagai prioritas pembangunan daerah akan dijalankan oleh perangkat daerah setiap tahunnya yang disertai pendanaan sehingga harus dapat dipastikan bahwa setiap dana yang dikucurkan adalah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan. Untuk itu strategi yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan pembangunan ini sangat penting, selain untuk memastikan program pembangunan daerah mengarah kepada tujuan dan sasaran pembangunan, juga memastikan adanya efektifitas dan efisiensi penggunaan dana pembangunan daerah yang akan dirumuskan dalam program, kegiatan dan subkegiatan perangkat daerah.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030 sehingga secara eksplisit program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab Kepala Daerah periode 2030-2034.

Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

Perencanaan program pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Penjabaran visi, misi, dan prioritas pembangunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
2. Berbasis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;
3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
4. Pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals);
5. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta kualitas lingkungan

hidup; dan

6. Penerapan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Karo 5 (lima) tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1.1. Urusan Pendidikan

Rencana program prioritas urusan pendidikan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Pendidikan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
2. **Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**, program ini diarahkan pada Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh masyarakat.
3. **Program Pengembangan Kurikulum**, program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
4. **Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
5. **Program Pengembangan Bahasa dan Sastra**, program ini untuk pencapaian terlestarikannya bahasa dan sastra daerah.

4.1.2. Urusan Kesehatan

Rencana program prioritas urusan kesehatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, serta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
4. **Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**, program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

5. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
5. **Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. **Program Penataan Bangunan Gedung**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
7. **Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
8. **Program Penyelenggaraan Jalan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
9. **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
10. **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**, program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota serta Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas urusan perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Perumahan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban

Bencana atau Relokasi Program Kabupaten, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, serta Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

2. **Program Kawasan Permukiman**, program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha serta Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
3. **Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**, program ini diarahkan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

4.1.5. Urusan Pertanahan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum**, program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota.
2. **Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee**, program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
5. **Program Pengelolaan Tanah Kosong**, program ini diarahkan pada kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong.
6. **Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah**, program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah.
7. **Program Survei, Pengukuran dan Pemetaan**, program ini diarahkan pada kegiatan Survey, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong.
8. **Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan**, program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

4.1.6. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**, program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota.
2. **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**, program ini diarahkan pada

kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. **Program Penanggulangan Bencana**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

4.1.7. Urusan Sosial

Rencana program prioritas urusan sosial yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemberdayaan Sosial**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.
3. **Program Rehabilitasi Sosial**, program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
4. **Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
5. **Program Penanganan Bencana**, program ini diarahkan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota.
6. **Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

4.1.8. Urusan Tenaga Kerja

Rencana program prioritas urusan tenaga kerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.
2. **Program Penempatan Tenaga Kerja**, program ini diarahkan pada kegiatan **Pengelolaan** Informasi Pasar Kerja.
3. **Program Hubungan Industrial**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota serta Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Perencanaan Tenaga Kerja**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK).

4.1.9. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program prioritas urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
2. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**, program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
5. **Program Pengembangan UMKM**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.
6. **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam**, program ini diarahkan untuk meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam.
7. **Program Penilaian Keheatan KSP/USP Koperasi**, program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan koperasi.

4.1.10. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.
2. **Program Perlindungan Perempuan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
3. **Program Peningkatan Kualitas Keluarga**, program ini diarahkan pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. **Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota serta Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
6. **Program Perlindungan Khusus Anak**, program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan

koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota serta Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota.

7. **Program Pengendalian Penduduk**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
8. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
9. **Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

4.1.11. Urusan Pangan

Rencana program prioritas urusan pangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi serta Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
3. **Program Penanganan Kerawanan Pangan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
4. **Program Pengawasan Keamanan Pangan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.12. Urusan Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas urusan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat

Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
3. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
4. **Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota serta Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil.

4.1.13. Urusan Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas urusan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**, program ini diarahkan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
2. **Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
3. **Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.
4. **Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. **Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
6. **Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
7. **Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota.
8. **Program Pengelolaan Persampahan**, program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan sampah.

4.1.14. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Rencana program prioritas urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pendaftaran Penduduk**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

2. **Program Pencatatan Sipil**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Data Kependudukan, dan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

4.1.15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas urusan pemberdayaan masyarakat dan desa akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Kerja Sama Desa**, program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Program Penataan Desa**, program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penataan desa.
4. **Program Administrasi Pemerintahan Desa**, program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

4.1.16. Urusan Perhubungan

Rencana program prioritas urusan perhubungan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**, program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota serta Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Pengelolaan Pelayaran**, program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau Sesuai Dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia Atau Badan

Usaha, Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Terkait Dengan Perawatan Dan Perbaikan Kapal serta Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

3. **Program Pengelolaan Perkeretaapian**, program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian dan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1(Satu)Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pengelolaan Penerbangan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter serta Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi.

4.1.17. Urusan Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas urusan komunikasi dan informatika akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.18. Urusan Statistik

Rencana program prioritas urusan statistik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.19. Urusan Persandian

Rencana program prioritas urusan persandian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.20. Urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rencana program prioritas urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**, program ini diarahkan pada kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
2. **Program Promosi Penanaman Modal**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Program Pelayanan Penanaman Modal**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

4. **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
5. **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal** program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.21. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Rencana program prioritas urusan kepemudaan dan olahraga akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.
2. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi.
3. **Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

4.1.22. Urusan Kebudayaan

Rencana program prioritas urusan kebudayaan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Kebudayaan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam kabupaten/Kota serta Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Pengembangan Kesenian Tradisional**, program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
3. **Program Pembinaan Sejarah**, program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya**, program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
5. **Program Permuseuman**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

4.1.23. Urusan Pariwisata

Rencana program prioritas urusan pariwisata akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
2. **Program Pemasaran Pariwisata**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

3. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar serta Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
4. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**, program ini diarahkan untuk meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif.

4.1.24. Urusan Perpustakaan

Rencana program prioritas urusan perpustakaan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pembinaan Perpustakaan**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. **Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota.

4.1.25. Urusan Kearsipan

Rencana program prioritas urusan kearsipan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Arsip**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, serta Pengawasan Kearsipan di Kabupaten/Kota.
2. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**, program ini diarahkan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota serta Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
3. **Program Perizinan Penggunaan Arsip**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

4.1.26. Urusan Pertanian

Rencana program prioritas urusan pertanian akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota serta Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
2. **Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian serta Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum.
3. **Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**, program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota.

4. **Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota.
5. **Program Penyuluhan Pertanian**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

4.1.27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas urusan bidang energi dan sumber daya mineral akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penatausahaan izin Pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam Wilayah Kabupaten/Kota.

4.1.28. Urusan Perdagangan

Rencana program prioritas urusan bidang perdagangan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**, program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya.
2. **Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting**, program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan.
3. **Program Pengembangan Ekspor**, program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
4. **Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen**, program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.
5. **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**, program ini diarahkan untuk meningkatkan kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan.
6. **Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**, program ini diarahkan untuk meningkatkan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri.

4.1.29. Urusan Perindustrian

Rencana program prioritas urusan perindustrian akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan dan Pembangunan Industri**, program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota.
2. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri**, program ini diarahkan dalam rangka peningkatan kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian dan meningkatkan realisasi pembangunan industri.
3. **Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**, program ini diarahkan untuk peningkatan pemanfaatan informasi industri.

4.1.30. Unsur Sekretariat Daerah

Rencana program prioritas pada unsur sekretariat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**, program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan produk hukum yang dihasilkan.
2. **Program Perekonomian dan Pembangunan**, program ini diarahkan meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan.

4.1.31. Unsur Sekretariat DPRD

Rencana program prioritas pada unsur sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**, program ini diarahkan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD serta Fasilitasi Tugas DPRD.

4.1.32. Unsur Perencanaan

Rencana program prioritas pada unsur penunjang urusan perencanaan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah serta Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
2. **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

4.1.33. Unsur Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas pada unsur penunjang urusan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**, program ini diarahkan pada kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan dan pengembangan inovasi dan teknologi.

4.1.34. Urusan Keuangan

Rencana program prioritas pada unsur penunjang urusan keuangan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Keuangan Daerah**, program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah serta Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**, program ini diarahkan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

4.1.35. Urusan Kepegawaian

Rencana program prioritas pada unsur penunjang urusan kepegawaian yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Kepegawaian Daerah**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN serta Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

4.1.36. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas pada unsur pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis serta Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

4.1.37. Unsur Pengawasan

Rencana program prioritas pada unsur pengawasan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pengawasan**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
2. **Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**, program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan serta Pendampingan dan Asistensi.

4.1.38. Unsur Kewilayahan

Rencana program prioritas pada unsur kewilayahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum serta Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
2. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
3. **Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**, program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**, program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.
5. **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**, program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4.1.39. Unsur Pemerintahan Umum

Rencana program prioritas pada urusan kesatuan bangsa dan politik yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**, program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

2. **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**, program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.
3. **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**, program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**, program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**, program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Tabel 4.1
Rencana Pagu Indikatif Bidang Urusan Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	465.070.634.415	465.201.812.307	452.823.916.091	443.676.436.631	437.114.320.850
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	225.187.979.410	231.191.738.998	237.695.498.586	244.199.258.174	251.703.017.763
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.669.259.250	111.497.506.170	117.360.161.806	125.430.672.124	131.902.219.646
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.772.474.984	8.349.924.483	8.702.373.983	8.842.823.483	9.014.272.982
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.655.574.802	22.088.686.298	22.521.797.794	22.954.909.290	23.388.020.787
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.275.171.472	5.380.674.902	5.486.178.331	5.591.681.760	5.697.185.190
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.170.000.000	1.310.000.000	1.520.000.000	1.555.000.000	1.635.000.000
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.851.334.470	6.137.592.055	6.249.000.874	6.308.632.556	6.381.228.059
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	9.130.162.183	9.340.162.182	9.399.621.242	9.751.871.099	9.966.330.158
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	350.000.000	955.000.000	785.000.000	827.000.000	838.000.000
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25.907.803.074	26.425.959.136	26.944.115.197	27.462.271.259	27.980.427.320
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.561.404.422	5.672.632.511	5.783.860.599	5.895.088.687	6.006.316.776
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.410.116.311	10.618.318.637	10.826.520.963	11.034.723.289	11.242.925.616
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.775.932.251	3.682.220.000	3.763.356.516	3.896.270.168	4.016.220.000
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	21.590.364.745	22.022.172.040	22.453.979.335	22.885.786.630	23.317.593.925
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.517.770.184	8.696.457.849	8.828.545.258	8.930.632.667	9.042.720.075
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	7.019.169.709	7.042.953.104	6.996.736.498	7.125.519.892	7.209.303.286
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.531.922.531	5.642.560.981	5.753.199.432	5.863.837.882	5.974.476.333
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAHA	2.750.000.000	3.925.000.000	4.249.800.000	4.367.618.000	5.013.225.978
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	286.600.256	280.000.000	320.000.000	390.000.000	450.000.000
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	50.000.000	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	10.082.061.155	11.621.000.000	11.634.748.285	11.917.252.262	12.685.527.106

BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF TAHUN				
	2026	2027	2028	2029	2030
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.546.938.150	5.657.876.913	5.768.755.676	5.879.573.239	5.990.328.380
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	150.000.000	153.000.000	156.060.000	159.181.200	162.364.822
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.592.790.797	1.597.249.857	1.782.249.857	1.624.459.060	1.624.459.060
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	10.162.023.735	9.407.966.588	11.529.300.000	13.588.859.721	15.634.858.597
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.027.296.444	31.107.842.373	33.688.388.302	36.268.934.231	39.849.480.160
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	230.000.000	240.000.000	250.000.000	260.000.000	270.000.000
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.093.840.967	12.294.764.626	12.560.328.638	12.726.892.651	12.940.456.663
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.104.359.647	1.162.000.000	1.155.000.000	1.247.000.000	1.292.000.000
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH	32.554.023.266	33.205.103.732	33.856.184.197	34.507.264.662	35.158.345.128
4.02 - SEKRETARIAT DPRD	59.851.947.595	61.048.986.547	62.246.025.498	63.443.064.450	64.640.103.402
5.01 - PERENCANAAN	9.703.393.826	9.897.461.698	10.091.246.904	10.284.913.716	10.478.466.600
5.02 - KEUANGAN	313.739.409.487	320.014.197.678	326.288.985.868	332.563.774.057	338.838.562.246
5.03 - KEPEGAWAIAN	5.803.496.673	5.919.566.607	6.035.636.540	6.151.706.474	6.267.776.407
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	209.791.122	213.986.944	218.182.767	222.378.589	226.574.412
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	494.263.581	504.148.857	514.316.800	524.603.136	535.003.400
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH	10.014.543.499	10.214.834.369	10.415.125.239	10.615.416.109	10.815.706.979
7.01 - KECAMATAN	59.268.385.980	60.453.753.697	61.639.121.416	62.824.489.139	64.009.856.856
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.380.255.544	9.567.860.655	9.755.465.766	9.943.070.877	10.130.675.988
TOTAL	1.510.542.495.937	1.539.797.972.794	1.558.108.784.258	1.581.807.867.164	1.609.513.350.950

Tabel 4.2
Program Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					465.070.634.415,00		465.201.812.307,00		452.823.916.091,00		443.676.436.631,00		437.114.320.850,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					374.900.713.562,00		368.444.338.969,00		348.091.260.284,00		329.477.246.884,00		372.317.479.540,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pendidikan	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	80	85	86	374.900.713.562,00	88	368.444.338.969,00	90	348.091.260.284,00	92	329.477.246.884,00	93	372.317.479.540,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					89.640.470.853,00		95.954.518.338,00		103.917.761.307,00		113.239.613.437,00		63.837.265.000,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Indeks Capaian Rapor Pendidikan (Indeks)	73,57	73,57	77,3	89.640.470.853,00	80,02	95.954.518.338,00	82,69	103.917.761.307,00	85,29	113.239.613.437,00	87,75	63.837.265.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					100.000.000,00		210.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	100	100.000.000,00	100	210.000.000,00	100	200.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					130.000.000,00		273.560.000,00		273.560.000,00		364.108.360,00		364.108.360,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	82	82	82,5	130.000.000,00	83	273.560.000,00	83,5	273.560.000,00	84	364.108.360,00	84,5	364.108.360,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	25	28	30		50		60		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					199.450.000,00		219.395.000,00		241.334.500,00		265.467.950,00		265.467.950,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	37,96	39,96	42,89	199.450.000,00	48,46	219.395.000,00	54,76	241.334.500,00	61,88	265.467.950,00	69,93	265.467.950,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	37,96	39,96	42,89		48,46		54,76		61,88		68,93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					225.187.979.410,00		231.191.738.998,00		237.695.498.586,00		244.199.258.174,00		251.703.017.763,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					152.750.105.652,00		156.135.488.111,00		156.734.553.321,00		159.827.259.409,00		161.217.745.059,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Kesehatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	87,39	88	89	100.131.823.190,00	90	102.515.740.000,00	90	102.113.339.561,00	90	104.204.580.000,00	90	104.594.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Rumah Sakit Umum Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	90	91	92	52.618.282.462,00	93	53.619.748.111,00	94	54.621.213.760,00	95	55.622.679.409,00	96	56.623.745.059,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					70.075.600.758,00		72.139.250.887,00		77.978.945.265,00		81.398.998.765,00		87.506.872.704,00	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) (Kasus)	6	5	4	69.562.660.758,00	4	71.565.052.087,00	4	77.343.487.665,00	4	80.702.282.365,00	4	86.748.897.504,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk (Rasio)	0,04	0,04	0,04		0,04		0,04		0,04		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting ((%))	8,7	8,7	8,5		8,5		8		8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk (Rasio)	0,01	0,01	0,01		0,01		0,01		0,01		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan masyarakat	BOR (%)	45	50	60	512.940.000,00	62	574.198.800,00	64	635.457.600,00	66	696.716.400,00	70	757.975.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan masyarakat	ALOS RSUD (Hari)	6-9	6-9	6-9		6-9		6-9		6-9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.625.000.000,00		2.110.000.000,00		2.165.000.000,00		2.170.000.000,00		2.175.400.000,00	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	78,95	78,95	84,21	1.370.000.000,00	89,47	1.850.000.000,00	94,74	1.900.000.000,00	94,74	1.900.000.000,00	100	1.900.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	80	80	80	255.000.000,00	80	260.000.000,00	80	265.000.000,00	80	270.000.000,00	80	275.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					222.273.000,00		280.000.000,00		252.000.000,00		238.000.000,00		238.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Distribusi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	94	95	95	222.273.000,00	95,5	280.000.000,00	96	252.000.000,00	97	238.000.000,00	98	238.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	(Persentase)													
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					515.000.000,00		527.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00		565.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	0	85	515.000.000,00	86	527.000.000,00	87	565.000.000,00	88	565.000.000,00	90	565.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					105.669.259.250,00		111.497.506.170,00		117.360.161.806,00		125.430.672.124,00		131.902.219.646,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.462.470.062,00		9.512.470.062,00		9.784.670.062,00		11.734.670.062,00		10.134.670.062,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	9.462.470.062,00	100	9.512.470.062,00	100	9.784.670.062,00	100	11.734.670.062,00	100	10.134.670.062,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					13.695.398.000,00		14.695.398.000,00		15.195.398.000,00		15.095.398.000,00		15.095.398.000,00	
Meningkatnya Perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	55.21%	55,5	56	13.695.398.000,00	56,5	14.695.398.000,00	57	15.195.398.000,00	57,5	15.095.398.000,00	58	15.095.398.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					300.000.000,00		300.000.000,00		1.000.000.000,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	38,12	38,12	38,3	300.000.000,00	38,5	300.000.000,00	38,7	1.000.000.000,00	38,9	1.100.000.000,00	39,1	1.100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0		0		0		0		1.050.000.000,00	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase penanganan sampah (%)	84	-	-	0	84	0	84	0	84	0	85	1.050.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.459.323.000,00		4.959.323.000,00		5.269.323.000,00		5.269.323.000,00		5.919.323.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah tangga mendapat akses terhadap Sanitasi Aman (%)	3,64	3,8	4	4.459.323.000,00	4,2	4.959.323.000,00	4,4	5.269.323.000,00	4,6	5.269.323.000,00	4,8	5.919.323.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.090.000.000,00		5.090.000.000,00		5.278.185.185,00		5.378.185.185,00		5.678.185.185,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	63,7	64	64,5	5.090.000.000,00	65	5.090.000.000,00	65,5	5.278.185.185,00	66	5.378.185.185,00	66,5	5.678.185.185,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.357.000.000,00		1.357.000.000,00		300.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik (%)	61,5	62	63	1.357.000.000,00	63,2	1.357.000.000,00	63,4	300.000.000,00	63,7	150.000.000,00	64	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					600.000.000,00		600.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	25	26	25	600.000.000,00	25	600.000.000,00	25	800.000.000,00	25	800.000.000,00	25	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					70.505.068.188,00		74.783.315.108,00		79.282.585.559,00		85.503.095.877,00		91.474.643.399,00	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	63,4	64	64	70.505.068.188,00	64,5	74.783.315.108,00	65	79.282.585.559,00	65,5	85.503.095.877,00	66	91.474.643.399,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					0		0		100.000.000,00		0		100.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi (Orang)	0	0	0	0	0	0	50	100.000.000,00	0	0	50	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					200.000.000,00		200.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW (%)	73	74	74	200.000.000,00	74,5	200.000.000,00	75	350.000.000,00	75,5	400.000.000,00	76	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					8.772.474.984,00		8.349.924.483,00		8.702.373.983,00		8.842.823.483,00		9.014.272.982,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.353.062.099,00		4.440.123.341,00		4.527.184.583,00		4.614.245.826,00		4.701.307.067,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	0	0	100	4.353.062.099,00	100	4.440.123.341,00	100	4.527.184.583,00	100	4.614.245.826,00	100	4.701.307.067,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					150.000.000,00		600.000.000,00		624.000.000,00		636.000.000,00		648.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	3	150.000.000,00	24,2	600.000.000,00	24,2	624.000.000,00	24,2	636.000.000,00	24,2	648.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					406.192.906,00		470.000.000,00		488.800.000,00		498.200.000,00		507.600.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase)	0	0	20	406.192.906,00	20	470.000.000,00	20	488.800.000,00	20	498.200.000,00	20	507.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					3.863.219.979,00		2.839.801.142,00		3.062.389.400,00		3.094.377.657,00		3.157.365.915,00	
Meningkatnya Penyediaan PSU perumahan	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	15,19	15,19	15,19	3.863.219.979,00	20,17	2.839.801.142,00	21,55	3.062.389.400,00	21,55	3.094.377.657,00	21,55	3.157.365.915,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					21.655.574.801,61		22.088.686.298,00		22.521.797.794,00		22.954.909.290,00		23.388.020.787,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.628.523.960,00		20.243.253.810,00		20.659.889.405,00		21.080.236.801,00		21.498.290.209,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	98,99	99,24	99,49	14.329.015.405,00	99,73	14.615.727.117,00	99,98	14.902.156.306,00	100	15.188.297.296,00	100	15.474.144.298,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	5.299.508.555,00	100	5.627.526.693,00	100	5.757.733.099,00	100	5.891.939.505,00	100	6.024.145.911,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					666.239.109,00		679.432.807,00		692.888.388,00		706.612.089,00		720.608.969,00	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	61,53	69,23	69,23	23.268.109,00	76,92	23.802.067,00	76,92	24.345.360,00	84,61	24.898.200,00	84,61	25.460.803,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	50	57,14	64,28	621.371.000,00	71,42	633.598.740,00	71,42	646.070.388,00	78,57	658.791.796,00	78,57	671.767.632,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	70	71,75	73,54	20.000.000,00	75,38	20.400.000,00	77,27	20.808.000,00	79,19	21.224.160,00	81,18	21.648.643,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	1.600.000,00	100	1.632.000,00	100	1.664.640,00	100	1.697.933,00	100	1.731.891,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.310.811.732,61		1.115.000.000,00		1.117.000.000,00		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	801.000.000,00	100	629.000.000,00	100	668.000.000,00	100	627.000.000,00	100	629.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100	198.000.000,00	100	160.000.000,00	100	111.000.000,00	100	162.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya penanganan pasca bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	311.811.732,61	100	326.000.000,00	100	338.000.000,00	100	326.000.000,00	100	336.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					50.000.000,00		50.999.681,00		52.020.001,00		53.060.400,00		54.121.609,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	80	82	84,05	17.500.000,00	84,05	17.849.681,00	86,15	18.207.001,00	86,15	18.571.140,00	88,31	18.942.564,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	84	86,1	88,25	32.500.000,00	88,25	33.150.000,00	90,46	33.813.000,00	90,46	34.489.260,00	92,72	35.179.045,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.275.171.472,00		5.380.674.902,00		5.486.178.331,00		5.591.681.760,00		5.697.185.190,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.214.381.762,00		4.298.669.398,00		4.382.957.033,00		4.467.244.668,00		4.551.532.304,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Sosial	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	89	89	89	4.214.381.762,00	89	4.298.669.398,00	89	4.382.957.033,00	89	4.467.244.668,00	89	4.551.532.304,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					270.000.000,00		275.400.000,00		280.800.000,00		286.200.000,00		291.600.000,00	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100	270.000.000,00	100	275.400.000,00	100	280.800.000,00	100	286.200.000,00	100	291.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					20.000.000,00		20.400.000,00		20.800.000,00		21.200.000,00		21.600.000,00	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapat Pelayanan Pemulangan (Orang)	5	10	10	20.000.000,00	10	20.400.000,00	10	20.800.000,00	10	21.200.000,00	10	21.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					310.789.710,00		317.005.504,00		323.221.298,00		329.437.092,00		335.652.886,00	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100	310.789.710,00	100	317.005.504,00	100	323.221.298,00	100	329.437.092,00	100	335.652.886,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					100.000.000,00		102.000.000,00		104.000.000,00		106.000.000,00		108.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Fakir Miskin (%)	50,85	80	80	100.000.000,00	80	102.000.000,00	80	104.000.000,00	80	106.000.000,00	80	108.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Penerima Manfaat Yang	2	2	2		2		2		2		Dinas/Badan yang menangani Bidang		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)													Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					110.000.000,00		112.200.000,00		114.400.000,00		116.600.000,00		118.800.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	100	110.000.000,00	100	112.200.000,00	100	114.400.000,00	100	116.600.000,00	100	118.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					250.000.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik (%)	100	100	100	250.000.000,00	100	255.000.000,00	100	260.000.000,00	100	265.000.000,00	100	270.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.170.000.000,00		1.310.000.000,00		1.520.000.000,00		1.555.000.000,00		1.635.000.000,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0		100.000.000,00		0		0		100.000.000,00	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Tersedianya dokumen rencana tenaga kerja (*)	0	0	0	0	1	100.000.000,00	0	0	0	0	1	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	11,11	12	14	1.000.000.000,00	16	1.000.000.000,00	18	1.200.000.000,00	20	1.200.000.000,00	22	1.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					50.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya Penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (%)	20	20	20	50.000.000,00	22	70.000.000,00	25	100.000.000,00	26	100.000.000,00	28	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					120.000.000,00		140.000.000,00		220.000.000,00		255.000.000,00		260.000.000,00	
Meningkatnya persentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenaga kerjaan (%)	36	36	37	120.000.000,00	38,5	140.000.000,00	40,5	220.000.000,00	42,5	255.000.000,00	44,5	260.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.851.334.470,00		6.137.592.055,00		6.249.000.874,00		6.308.632.556,00		6.381.228.059,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.350.334.470,00		5.290.592.055,00		5.362.000.874,00		5.363.632.556,00		5.381.228.059,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada DP3AP2KB	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	85,5	86	86,5	5.350.334.470,00	87	5.290.592.055,00	87,5	5.362.000.874,00	88	5.363.632.556,00	88,5	5.381.228.059,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
														Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					80.000.000,00		124.000.000,00		142.000.000,00		152.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	78,82	78,84	78,85	80.000.000,00	78,86	124.000.000,00	78,87	142.000.000,00	78,88	152.000.000,00	78,89	160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	50	55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					50.000.000,00		116.000.000,00		121.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	83	84	85	50.000.000,00	86	116.000.000,00	87	121.000.000,00	88	100.000.000,00	89	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					95.000.000,00		128.000.000,00		142.000.000,00		152.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (Indeks)	30	30	40	95.000.000,00	50	128.000.000,00	60	142.000.000,00	70	152.000.000,00	80	160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					40.000.000,00		70.000.000,00		71.000.000,00		76.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	10	40	45	40.000.000,00	50	70.000.000,00	55	71.000.000,00	60	76.000.000,00	70	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					160.000.000,00		244.000.000,00		247.000.000,00		279.000.000,00		300.000.000,00	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak secara Komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60	62,25	65,54	160.000.000,00	68,82	244.000.000,00	71,25	247.000.000,00	73,55	279.000.000,00	74,85	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					76.000.000,00		165.000.000,00		164.000.000,00		186.000.000,00		200.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	65,34%	65,35	66,4	76.000.000,00	67	165.000.000,00	69	164.000.000,00	71	186.000.000,00	86	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	65,34%	65,35%	66.4%		67%		69%		71%		86%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					9.130.162.183,00		9.340.162.182,00		9.399.621.242,00		9.751.871.099,00		9.966.330.158,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.325.162.182,00		8.200.162.182,00		8.074.621.242,00		8.506.871.099,00		8.631.330.159,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	83,72	84	84,5	8.325.162.182,00	85	8.200.162.182,00	85,5	8.074.621.242,00	86	8.506.871.099,00	86,5	8.631.330.159,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0		75.000.000,00		0		0		100.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	100	100	100	0	100	75.000.000,00	100	0	100	0	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					370.000.001,00		670.000.000,00		665.000.000,00		605.000.000,00		594.999.999,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	90,5	92	92,5	370.000.001,00	93	670.000.000,00	93,5	665.000.000,00	94	605.000.000,00	94,5	594.999.999,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					170.000.000,00		170.000.000,00		200.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00	
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1	1	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	200.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					265.000.000,00		225.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	100	100	100	265.000.000,00	100	225.000.000,00	100	460.000.000,00	100	460.000.000,00	100	460.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					350.000.000,00		955.000.000,00		785.000.000,00		827.000.000,00		838.000.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					150.000.000,00		120.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	70	70	70	150.000.000,00	75	120.000.000,00	80	90.000.000,00	85	100.000.000,00	90	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					200.000.000,00		265.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	66,6	66,6	66,6	200.000.000,00	100	265.000.000,00	100	230.000.000,00	50	230.000.000,00	50	230.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					0		500.000.000,00		400.000.000,00		427.000.000,00		438.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	50	50	50	0	50	500.000.000,00	50	400.000.000,00	100	427.000.000,00	100	438.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0		70.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	0	0	0	0	100	70.000.000,00	100	65.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					25.907.803.074,00		26.425.959.136,00		26.944.115.197,00		27.462.271.259,00		27.980.427.320,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.308.797.825,00		11.542.929.881,00		11.834.095.940,00		12.199.737.152,00		12.477.893.213,00	
Meningkatnya layanan urusan umum dan kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dinas melalui perencanaan yang efisien dan efektif	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	11.308.797.825,00	100	11.542.929.881,00	100	11.834.095.940,00	100	12.199.737.152,00	100	12.477.893.213,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota (*)	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	40.000.000,00	ADA	40.000.000,00	ADA	40.000.000,00	ADA	40.000.000,00	ADA	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana	Tidak ada	Tidak ada	Ada		Ada		Ada		Ada		Ada		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
memitigasi dampak KRP	pembangunan kabupaten/kota (*)													Lingkungan Hidup
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah (*)	Ada	Ada	Ada				Ada		Ada		Ada		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					740.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00		840.000.000,00	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	72,21	79,23	79,4	740.000.000,00	79,57	740.000.000,00	79,74	740.000.000,00	79,92	740.000.000,00	80,09	840.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air (Indeks)	60,91	82,29	8.249		82,69		82,89		83,09		83,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara (Indeks)	93,37	81,3	81,5		81,7		81,9		82,1		82,3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan (Indeks)	52,47	70,16	70,23		70,3		70,37		70,43		70,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Penurunan intensitas emisi GRK ((%))	0	130.887,52	189.631		#####		#####		#####		#####		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas RTH yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup (Ha)	1,35	1,35	1,35	20.000.000,00	1,35	20.000.000,00	1,35	20.000.000,00	1,35	40.000.000,00	1,35	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota (%)	104	100	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas	-	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota (Kali)													
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup (*)	Ada	Ada	Ada	100.000.000,00	Ada	100.000.000,00	Ada	100.000.000,00	Ada	150.000.000,00	Ada	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					70.230.107,00		70.230.107,00		97.230.107,00		70.230.107,00		90.230.107,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Terlesaikannya Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota. (%)	100	100	100	70.230.107,00	100	70.230.107,00	100	97.230.107,00	100	70.230.107,00	100	90.230.107,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					13.543.775.142,00		13.827.799.148,00		14.027.789.150,00		14.137.304.000,00		14.237.304.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	-	0,5	0,75	13.543.775.142,00	1	13.827.799.148,00	1,25	14.027.789.150,00	1,5	14.137.304.000,00	1,75	14.237.304.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan sampah yang ditangani (%)	78,03	77	77		77		78		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R (Ton)	78	78	78		78		78		78		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase cakupan area pelayanan (%)	41	41	41		41		41		41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.561.404.422,00		5.672.632.511,00		5.783.860.599,00		5.895.088.687,00		6.006.316.776,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.643.810.634,00		4.394.896.650,00		4.394.564.002,00		4.387.413.052,00		4.462.825.384,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.643.810.634,00	100	4.394.896.650,00	100	4.394.564.002,00	100	4.387.413.052,00	100	4.462.825.384,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					644.159.474,00		613.168.306,00		641.029.038,00		646.538.306,00		630.660.306,00	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	0	15	20	644.159.474,00	25	613.168.306,00	30	641.029.038,00	35	646.538.306,00	40	630.660.306,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	60	62	65		67		68		70		72		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					149.105.534,00		136.446.000,00		178.146.000,00		170.747.070,00		153.747.070,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0	60	65	149.105.534,00	70	136.446.000,00	75	178.146.000,00	80	170.747.070,00	90	153.747.070,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0	60	70		75		80		90		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0	41,5	42		42,3		42,5		42,75		43		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	0	27,7	27,75		27,8		27,9		27,95		28		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					79.640.100,00		477.432.584,00		520.432.586,00		645.121.573,00		712.395.328,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	0	60	70	79.640.100,00	80	477.432.584,00	85	520.432.586,00	90	645.121.573,00	95	712.395.328,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					44.688.680,00		50.688.971,00		49.688.973,00		45.268.686,00		46.688.688,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	44.688.680,00	100	50.688.971,00	100	49.688.973,00	100	45.268.686,00	100	46.688.688,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					10.410.116.311,00		10.618.318.637,00		10.826.520.963,00		11.034.723.289,00		11.242.925.616,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.200.808.811,00		5.579.336.319,00		5.696.475.916,00		5.644.339.064,00		5.928.943.298,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	89	90	92	5.200.808.811,00	94	5.579.336.319,00	96	5.696.475.916,00	98	5.644.339.064,00	100	5.928.943.298,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					0		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	0	0	0	0	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					29.999.999,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	0	0	0	29.999.999,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.579.307.501,00		4.263.982.318,00		4.280.045.047,00		4.563.982.319,00		4.358.982.318,00	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	0	100	100	4.579.307.501,00	100	4.263.982.318,00	100	4.280.045.047,00	100	4.563.982.319,00	100	4.358.982.318,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	0	60	77		81		84		92		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					600.000.000,00		645.000.000,00		670.000.000,00		646.401.906,00		750.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	75	80	85	600.000.000,00	90	645.000.000,00	93	670.000.000,00	95	646.401.906,00	100	750.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.775.932.251,00		3.682.220.000,00		3.763.356.516,00		3.896.270.168,00		4.016.220.000,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					315.750.000,00		329.937.750,00		383.640.266,00		436.479.600,00		469.147.560,00	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	25,6	25,6	25,6	315.750.000,00	25,6	329.937.750,00	25,6	383.640.266,00	25,5	436.479.600,00	25,5	469.147.560,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,19	2,18	2,16		2,15		2,14		2,13		2,12		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.033.660.000,00		2.017.760.000,00		2.045.194.000,00		2.152.951.400,00		2.181.064.540,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	52,58	54,5	52,5	2.033.660.000,00	60,7	2.017.760.000,00	64,3	2.045.194.000,00	67,9	2.152.951.400,00	71,5	2.181.064.540,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	22,9	20,01	20		19,22		18,84		18,46		18,09		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.426.522.251,00		1.334.522.250,00		1.334.522.250,00		1.306.839.168,00		1.366.007.900,00	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga (%)	25	50,8	55,5	1.426.522.251,00	60,2	1.334.522.250,00	65,4	1.334.522.250,00	70	1.306.839.168,00	75,5	1.366.007.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					21.590.364.745,00		22.022.172.040,00		22.453.979.335,00		22.885.786.630,00		23.317.593.925,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.260.653.686,00		7.949.854.970,00		8.183.854.970,00		8.407.854.970,00		8.631.854.970,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	7.260.653.686,00	100	7.949.854.970,00	100	8.183.854.970,00	100	8.407.854.970,00	100	8.631.854.970,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					14.314.711.059,00		14.033.317.070,00		14.219.624.365,00		14.431.431.660,00		14.639.238.955,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Darat	Konektivitas Darat (Persentase)	4	3,6	3,2	14.314.711.059,00	2,8	14.033.317.070,00	2,4	14.219.624.365,00	2	14.431.431.660,00	1,6	14.639.238.955,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					15.000.000,00		39.000.000,00		43.000.000,00		39.000.000,00		39.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Laut	Konektivitas Laut (Unit)	1	1	1	15.000.000,00	1	39.000.000,00	2	43.000.000,00	2	39.000.000,00	2	39.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					0		0		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Meningkatnya Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Persentase Pengendalian KKOP (Persentase)	0	0	0	0	0	0	3,33	3.000.000,00	3,33	3.000.000,00	3,33	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					0		0		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00	
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	0	0	0	0	0	0	3,33	4.500.000,00	3,33	4.500.000,00	3,33	4.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.517.770.184,00		8.696.457.849,00		8.828.545.258,00		8.930.632.667,00		9.042.720.075,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.218.647.105,00		4.365.487.105,00		4.345.487.105,00		4.359.581.490,00		4.345.323.205,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.218.647.105,00	100	4.365.487.105,00	100	4.345.487.105,00	100	4.359.581.490,00	100	4.345.323.205,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.207.303.659,00		947.790.744,00		980.355.092,00		1.093.051.177,00		1.160.396.870,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	65	67	1.207.303.659,00	69	947.790.744,00	70	980.355.092,00	71	1.093.051.177,00	72	1.160.396.870,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.091.819.420,00		3.383.180.000,00		3.502.703.061,00		3.478.000.000,00		3.537.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) (Angka)	3,04	3.04-0	3.1-1.3	3.091.819.420,00	3.2-1.4	3.383.180.000,00	3.3-1.5	3.502.703.061,00	3.4-1.6	3.478.000.000,00	3.5-1.7	3.537.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					7.019.169.709,00		7.042.953.104,00		6.996.736.498,00		7.125.519.892,00		7.209.303.286,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.690.379.512,00		4.765.000.000,00		4.862.000.000,00		5.026.000.000,00		5.110.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UKM	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.690.379.512,00	100	4.765.000.000,00	100	4.862.000.000,00	100	5.026.000.000,00	100	5.110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					85.802.144,00		76.690.832,00		60.519.279,00		61.307.728,00		61.333.333,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase)	0	5	11	85.802.144,00	24	76.690.832,00	39	60.519.279,00	56	61.307.728,00	75	61.333.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					85.802.144,00		76.690.832,00		60.519.279,00		61.307.728,00		61.333.333,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	0	10	15	85.802.144,00	17	76.690.832,00	23	60.519.279,00	28	61.307.728,00	33	61.333.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					85.802.144,00		76.690.832,00		60.519.279,00		61.307.728,00		61.333.333,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	51	51	60	85.802.144,00	62	76.690.832,00	65	60.519.279,00	67	61.307.728,00	70	61.333.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					1.142.241.040,00		1.020.946.705,00		805.662.917,00		816.159.123,00		951.050.001,00	
Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	0	10	13,5	1.142.241.040,00	20	1.020.946.705,00	30	805.662.917,00	40	816.159.123,00	50	951.050.001,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					209.142.725,00		186.933.903,00		147.515.744,00		149.437.585,00		14.950.000,00	
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	0	0	3,3	209.142.725,00	3,5	186.933.903,00	4	147.515.744,00	4,2	149.437.585,00	4,5	14.950.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					480.000.000,00		570.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00		760.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	1	1	1	480.000.000,00	1,1	570.000.000,00	1,2	700.000.000,00	1,2	750.000.000,00	2	760.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					240.000.000,00		270.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		189.303.286,00	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase umkm yang bermitra (%)	0,13	0,14	0,14	240.000.000,00	0,17	270.000.000,00	0,2	300.000.000,00	0,22	200.000.000,00	0,25	189.303.286,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.531.922.531,00		5.642.560.981,00		5.753.199.432,00		5.863.837.882,00		5.974.476.333,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.466.041.787,00		4.597.560.981,00		4.779.099.432,00		4.745.337.882,00		4.903.476.333,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.466.041.787,00	100	4.597.560.981,00	100	4.779.099.432,00	100	4.745.337.882,00	100	4.903.476.333,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					150.000.000,00		135.000.000,00		10.000.000,00		110.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	110	100	100	150.000.000,00	100	135.000.000,00	100	10.000.000,00	100	110.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					351.880.744,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	14,81	4	4	351.880.744,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					253.944.450,00		242.000.000,00		234.100.000,00		236.500.000,00		238.000.000,00	
Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Persentase Realisasi Peningkatan Perizinan dan Non Perizinan (%)	12	4,5	4,5	253.944.450,00	4,5	242.000.000,00	4,5	234.100.000,00	4,5	236.500.000,00	4,5	238.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					270.055.550,00		308.000.000,00		370.000.000,00		412.000.000,00		453.000.000,00	
Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	270.055.550,00	100	308.000.000,00	100	370.000.000,00	100	412.000.000,00	100	453.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					40.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	0	100	100	40.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA					2.750.000.000,00		3.925.000.000,00		4.249.800.000,00		4.367.618.000,00		5.013.225.978,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					400.000.000,00		580.000.000,00		643.800.000,00		714.618.000,00		793.225.978,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0	7	7	400.000.000,00	10	580.000.000,00	13	643.800.000,00	15	714.618.000,00	17	793.225.978,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAAHRAGAAN					2.350.000.000,00		3.135.000.000,00		2.756.000.000,00		3.303.000.000,00		3.720.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	1	1	2.350.000.000,00	2	3.135.000.000,00	3	2.756.000.000,00	4	3.303.000.000,00	5	3.720.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					0		210.000.000,00		850.000.000,00		350.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0	2	0	0	4	210.000.000,00	6	850.000.000,00	8	350.000.000,00	10	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					286.600.256,00		280.000.000,00		320.000.000,00		390.000.000,00		450.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					286.600.256,00		280.000.000,00		320.000.000,00		390.000.000,00		450.000.000,00	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks)	2,71	0	2,81	286.600.256,00	2,82	280.000.000,00	2,83	320.000.000,00	2,84	390.000.000,00	2,85	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka)	0	25	30	50.000.000,00	40	55.000.000,00	50	60.000.000,00	60	65.000.000,00	70	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					10.082.061.155,00		11.621.000.000,00		11.634.748.285,00		11.917.252.262,00		12.685.527.106,00	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.782.061.155,00		8.613.535.552,00		9.413.088.875,00		9.398.040.262,00		10.333.201.788,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	0	90	91	8.782.061.155,00	92	8.613.535.552,00	93	9.413.088.875,00	94	9.398.040.262,00	95	10.333.201.788,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					400.000.000,00		580.000.000,00		643.800.000,00		714.618.000,00		793.225.978,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	30	30	400.000.000,00	30	580.000.000,00	30	643.800.000,00	30	714.618.000,00	30	793.225.978,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					250.000.000,00		200.000.000,00		222.000.000,00		246.420.000,00		273.526.200,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan	0	10	10	250.000.000,00	10	200.000.000,00	10	222.000.000,00	10	246.420.000,00	10	273.526.200,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kesenian Tradisional	Dikembangkan (Persentase)													
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					0		160.000.000,00		177.600.000,00		197.136.000,00		218.820.960,00	
Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	0	0,24	0	0	0,24	160.000.000,00	0,24	177.600.000,00	0,24	197.136.000,00	0,24	218.820.960,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					650.000.000,00		1.667.464.448,00		1.178.259.410,00		961.038.000,00		1.066.752.180,00	
Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	45	45	650.000.000,00	45	1.667.464.448,00	45	1.178.259.410,00	45	961.038.000,00	45	1.066.752.180,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapan (Persentase)	0	45	45		45		45		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0		400.000.000,00		0		400.000.000,00		0	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	0	0,24	0	0	0,24	400.000.000,00	0	0	0,24	400.000.000,00	0	0	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					5.546.938.150,00		5.657.876.913,00		5.768.755.676,00		5.879.573.239,00		5.990.328.380,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.679.360.630,00		4.772.947.842,00		4.866.528.024,00		4.965.774.935,00		5.065.090.434,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Kearsipan	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	80	85	87	4.679.360.630,00	90	4.772.947.842,00	92	4.866.528.024,00	95	4.965.774.935,00	98	5.065.090.434,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					802.577.520,00		799.829.071,00		814.405.652,00		824.219.864,00		833.867.938,00	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	55,85	60	60,3	802.577.520,00	60,5	799.829.071,00	60,6	814.405.652,00	60,8	824.219.864,00	70	833.867.938,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					65.000.000,00		85.100.000,00		87.822.000,00		89.578.440,00		91.370.008,00	
Terlaksananya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	0	100	65.000.000,00	100	85.100.000,00	100	87.822.000,00	100	89.578.440,00	100	91.370.008,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					150.000.000,00		153.000.000,00		156.060.000,00		159.181.200,00		162.364.822,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					55.000.000,00		56.100.000,00		57.222.000,00		58.366.440,00		59.533.768,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan	Persentase Perangkat Daerah yang	78,8	65,2	67,9	55.000.000,00	69,56	56.100.000,00	71,73	57.222.000,00	73,91	58.366.440,00	76,08	59.533.768,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
statis	mengelola arsip secara baku (%)													Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					85.000.000,00		86.700.000,00		88.434.000,00		90.202.680,00		92.006.733,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	0	0	100	85.000.000,00	100	86.700.000,00	100	88.434.000,00	100	90.202.680,00	100	92.006.733,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					10.000.000,00		10.200.000,00		10.404.000,00		10.612.080,00		10.824.321,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Ketersediaan arsip di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang dapat diakses oleh masyarakat (Berkas)	0	0	5	10.000.000,00	7	10.200.000,00	9	10.404.000,00	11	10.612.080,00	12	10.824.321,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.592.790.797,00		1.597.249.857,00		1.782.249.857,00		1.624.459.060,00		1.624.459.060,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					140.000.000,00		140.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	30	38	38,5	140.000.000,00	42	140.000.000,00	44	205.000.000,00	46	205.000.000,00	48	205.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.302.790.797,00		1.307.249.857,00		1.397.249.857,00		1.309.459.060,00		1.309.459.060,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.199	880	713	1.302.790.797,00	456	1.307.249.857,00	380	1.397.249.857,00	217	1.309.459.060,00	213	1.309.459.060,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					0		0		30.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya kelestarian dan keanekaragaman hayati perairan umum daratan					0		0		30.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	61	61,5	62	150.000.000,00	62,5	150.000.000,00	63	150.000.000,00	63,5	100.000.000,00	64	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10.162.023.735,00		9.407.966.588,00		11.529.300.000,00		13.588.859.721,00		15.634.858.597,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.929.103.420,00		5.207.966.588,00		6.333.100.000,00		8.313.477.721,00		9.661.051.000,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	81,4	10	10	4.929.103.420,00	10	5.207.966.588,00	10	6.333.100.000,00	10	8.313.477.721,00	10	9.661.051.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					3.759.920.315,00		2.250.000.000,00		2.496.200.000,00		2.505.382.000,00		3.720.290.810,00	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	0	33	33	3.759.920.315,00	33	2.250.000.000,00	33	2.496.200.000,00	33	2.505.382.000,00	33	3.720.290.810,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					550.000.000,00		325.000.000,00		925.000.000,00		800.000.000,00		850.000.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	0	3	3	550.000.000,00	4,5	325.000.000,00	5,5	925.000.000,00	6,5	800.000.000,00	8	850.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					923.000.000,00		1.625.000.000,00		1.775.000.000,00		1.970.000.000,00		1.403.516.787,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi (%)	0	20	23	923.000.000,00	26	1.625.000.000,00	29	1.775.000.000,00	32	1.970.000.000,00	35	1.403.516.787,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					29.027.296.444,00		31.107.842.373,00		33.688.388.302,00		36.268.934.231,00		39.849.480.160,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					19.791.000.794,00		20.371.546.723,00		20.952.092.652,00		21.532.638.581,00		22.113.184.510,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Dinas Pertanian	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	19.791.000.794,00	100	20.371.546.723,00	100	20.952.092.652,00	100	21.532.638.581,00	100	22.113.184.510,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					6.043.776.500,00		6.043.776.500,00		6.243.776.500,00		6.243.776.500,00		6.243.776.500,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi komoditi pertanian unggulan (%)	3,8	-4,69	1,66	6.043.776.500,00	1,68	6.043.776.500,00	1,7	6.243.776.500,00	1,72	6.243.776.500,00	1,74	6.243.776.500,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					2.050.000.000,00		3.550.000.000,00		5.350.000.000,00		7.350.000.000,00		10.350.000.000,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Peningkatan produksi komoditi pertanian unggulan (%)	3,8	-4,69	1,66	2.050.000.000,00	1,68	3.550.000.000,00	1,7	5.350.000.000,00	1,72	7.350.000.000,00	1,74	10.350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					458.793.600,00		458.793.600,00		458.793.600,00		458.793.600,00		458.793.600,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan veteriner	Persentase Jumlah HPR yang Divaksin (%)	70	70	70	458.793.600,00	70	458.793.600,00	70	458.793.600,00	70	458.793.600,00	70	458.793.600,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					196.424.796,00		196.424.796,00		196.424.796,00		196.424.796,00		196.424.796,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Luas Lahan yang Dilakukan Pengendalian OPT (Ha)	0	300	140	196.424.796,00	140	196.424.796,00	140	196.424.796,00	140	196.424.796,00	140	196.424.796,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					487.300.754,00		487.300.754,00		487.300.754,00		487.300.754,00		487.300.754,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	12,25	12,6	12,95	487.300.754,00	13,3	487.300.754,00	13,65	487.300.754,00	14	487.300.754,00	14,35	487.300.754,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					230.000.000,00		240.000.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		270.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Persentase Perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota (%)	0,04	0,04	0,04	230.000.000,00	0,04	240.000.000,00	0,04	250.000.000,00	0,04	260.000.000,00	0,04	270.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					12.093.840.967,00		12.294.764.626,00		12.560.328.638,00		12.726.892.651,00		12.940.456.663,00	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.991.840.967,00		9.101.764.626,00		9.259.990.967,00		9.563.892.651,00		9.602.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	8.991.840.967,00	100	9.101.764.626,00	100	9.259.990.967,00	100	9.563.892.651,00	100	9.602.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	0	0	12,65	20.000.000,00	17,75	20.000.000,00	22,65	20.000.000,00	27,65	20.000.000,00	32,65	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.180.000.000,00		2.200.000.000,00		2.220.337.671,00		2.220.000.000,00		2.340.456.663,00	
Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang Yang Efisien, Merata dan Terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	12	29	41	2.180.000.000,00	59	2.200.000.000,00	59	2.220.337.671,00	71	2.220.000.000,00	82	2.340.456.663,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		48.000.000,00		53.000.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	48.000.000,00	100	53.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					658.000.000,00		720.000.000,00		770.000.000,00		600.000.000,00		625.000.000,00	
Meningkatnya Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor	Net Ekspor (Milyar) (SBM/Milyar Rupiah)	1.691,13	1.794,11	1.847,93	658.000.000,00	1.903,36	720.000.000,00	1.960,46	770.000.000,00	2.019,27	600.000.000,00	2.079,64	625.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					144.000.000,00		148.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (Persentase)	100	100	100	144.000.000,00	100	148.000.000,00	100	175.000.000,00	100	200.000.000,00	100	220.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					70.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00	
meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.104.359.647,00		1.162.000.000,00		1.155.000.000,00		1.247.000.000,00		1.292.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					934.359.647,00		977.000.000,00		950.000.000,00		1.027.000.000,00		1.052.000.000,00	
Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri/IKM (%)	4	4,5	5	934.359.647,00	5,5	977.000.000,00	6	950.000.000,00	6,5	1.027.000.000,00	7	1.052.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	
Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian dan Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	4	5	6	20.000.000,00	7	20.000.000,00	8	25.000.000,00	9	25.000.000,00	10	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					150.000.000,00		165.000.000,00		180.000.000,00		195.000.000,00		210.000.000,00	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang masuk kedalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)	4	4	4	150.000.000,00	4,3	165.000.000,00	4,6	180.000.000,00	5	195.000.000,00	5,4	210.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					32.554.023.266,00		33.205.103.732,00		33.856.184.197,00		34.507.264.662,00		35.158.345.128,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.745.724.796,00		30.205.703.000,00		30.935.564.197,00		31.530.420.337,00		32.125.392.127,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	29.745.724.796,00	100	30.205.703.000,00	100	30.935.564.197,00	100	31.530.420.337,00	100	32.125.392.127,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					1.867.636.000,00		1.904.985.000,00		1.942.337.000,00		1.979.689.000,00		2.017.044.000,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan produk hukum yang dihasilkan.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	2,83	2,92	2,93	1.867.636.000,00	2,95	1.904.985.000,00	3	1.942.337.000,00	3,3	1.979.689.000,00	3,4	2.017.044.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan produk hukum yang dihasilkan.	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	87,22	87,4	87,6		87,8		88		88,5		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan produk hukum yang dihasilkan.	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	71%	73%	73%		75%		80%		83%		85%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					940.662.470,00		1.094.415.732,00		978.283.000,00		997.155.325,00		1.015.909.001,00	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	70	70	70	940.662.470,00	75	1.094.415.732,00	80	978.283.000,00	85	997.155.325,00	85	1.015.909.001,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	60	60	65		70		75		80		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	Esensi	Proaktif	Proaktif		Proaktif		Strategis		Strategis		Strategis		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					59.851.947.595,00		61.048.986.547,00		62.246.025.498,00		63.443.064.450,00		64.640.103.402,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.405.961.014,00		32.034.080.234,00		33.192.494.437,00		33.808.462.768,00		34.412.809.686,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Sekretariat DPRD	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	31.405.961.014,00	100	32.034.080.234,00	100	33.192.494.437,00	100	33.808.462.768,00	100	34.412.809.686,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					28.445.986.581,00		29.014.906.313,00		29.053.531.061,00		29.634.601.682,00		30.227.293.716,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	100	100	100	26.552.616.581,00	100	27.083.668.913,00	100	27.083.668.913,00	100	27.625.342.291,00	100	28.177.849.137,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda tahun N (%)	62,5	70	75		80		84		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	1.893.370.000,00	100	1.931.237.400,00	100	1.969.862.148,00	100	2.009.259.391,00	100	2.049.444.579,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					9.703.393.826,00		9.897.461.698,00		10.091.246.904,00		10.284.913.716,00		10.478.466.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.108.522.194,00		7.258.214.806,00		7.399.621.660,00		7.543.599.664,00		7.694.208.438,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	7.108.522.194,00	100	7.258.214.806,00	100	7.399.621.660,00	100	7.543.599.664,00	100	7.694.208.438,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.382.186.840,00		1.402.308.404,00		1.429.940.000,00		1.454.414.504,00		1.474.624.462,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan, pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100	1.382.186.840,00	100	1.402.308.404,00	100	1.429.940.000,00	100	1.454.414.504,00	100	1.474.624.462,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.212.684.792,00		1.236.938.488,00		1.261.685.244,00		1.286.899.548,00		1.309.633.700,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA,	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	1.212.684.792,00	100	1.236.938.488,00	100	1.261.685.244,00	100	1.286.899.548,00	100	1.309.633.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA,	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam (%))	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA,	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan		
5.02 - KEUANGAN					313.739.409.487,00		320.014.197.678,00		326.288.985.868,00		332.563.774.057,00		338.838.562.246,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.460.756.132,00		16.661.647.433,00		17.144.769.235,00		17.462.999.425,00		18.041.303.387,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	7.087.737.982,00	100	7.229.492.741,00	100	7.371.247.502,00	100	7.513.002.260,00	100	7.654.757.019,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Persentase pemenuhan layanan	100	100	100	8.373.018.150,00	100	9.432.154.692,00	100	9.773.521.733,00	100	9.949.997.165,00	100	10.386.546.368,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Pemerintahan pada Badan Pendapatan Daerah	penunjang perangkat daerah (%)													Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					292.908.007.502,00		298.766.167.654,00		304.624.327.802,00		310.482.487.954,00		316.340.648.103,00	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	30	30	30	2.074.268.804,00	30	2.115.754.181,00	30	2.157.239.556,00	30	2.198.724.933,00	30	2.240.210.308,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	40	40	40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan		
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	80	81	82		83		84		85		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	2,43	2,68	2,68		2,81		2,95		3,1		3,26		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu (%)	100	100	100	290.470.712.408,00	100	296.280.126.656,00	100	302.089.540.905,00	100	307.898.955.153,00	100	313.708.369.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					918.961.369,00		937.340.596,00		955.719.824,00		974.099.051,00		992.478.279,00	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	50	55	56	918.961.369,00	57	937.340.596,00	58	955.719.824,00	59	974.099.051,00	60	992.478.279,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					4.451.684.484,00		3.649.041.995,00		3.564.169.007,00		3.644.187.627,00		3.464.132.477,00	
Meningkatnya Upaya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	7,31	7,37	7,43	3.032.010.809,00	7,49	2.167.298.320,00	7,55	2.070.010.809,00	7,61	2.142.010.809,00	7,67	1.885.010.809,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	0	60	70	1.419.673.675,00	70	1.481.743.675,00	70	1.494.158.198,00	70	1.502.176.818,00	70	1.579.121.668,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.803.496.673,00		5.919.566.607,00		6.035.636.540,00		6.151.706.474,00		6.267.776.407,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.791.363.754,00		4.887.191.029,00		4.983.018.304,00		5.078.845.579,00		5.174.672.854,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	4.791.363.754,00	100	4.887.191.029,00	100	4.983.018.304,00	100	5.078.845.579,00	100	5.174.672.854,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.012.132.919,00		1.032.375.578,00		1.052.618.236,00		1.072.860.895,00		1.093.103.553,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	100	100	100	536.132.919,00	100	546.855.578,00	100	557.578.236,00	100	568.300.895,00	100	579.023.553,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir dan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1,52	1,57	1,62	341.000.000,00	1,67	347.820.000,00	1,72	354.640.000,00	1,77	361.460.000,00	2	368.280.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	98	98,1	98,2	135.000.000,00	98,3	137.700.000,00	98,4	140.400.000,00	98,5	143.100.000,00	98,6	145.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					209.791.122,00		213.986.944,00		218.182.767,00		222.378.589,00		226.574.412,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					209.791.122,00		213.986.944,00		218.182.767,00		222.378.589,00		226.574.412,00	
Meningkatnya Layananana Penjaminan mutu, Pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	50	51	52	173.791.122,00	53	177.266.944,00	54	180.742.767,00	55	184.218.589,00	56	187.694.412,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
Meningkatnya Layananana Penjaminan mutu, Pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan		
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (%)	1,52	1,57	1,62	36.000.000,00	1,67	36.720.000,00	1,72	37.440.000,00	1,77	38.160.000,00	2	38.880.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					494.263.581,00		504.148.857,00		514.316.800,00		524.603.136,00		535.003.400,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					494.263.581,00		504.148.857,00		514.316.800,00		524.603.136,00		535.003.400,00	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100	494.263.581,00	100	504.148.857,00	100	514.316.800,00	100	524.603.136,00	100	535.003.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					10.014.543.499,00		10.214.834.369,00		10.415.125.239,00		10.615.416.109,00		10.815.706.979,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.369.066.189,00		7.516.447.513,00		7.666.776.463,00		7.820.111.992,00		7.976.514.232,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan pada Inspektorat Daerah	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	7.369.066.189,00	100	7.516.447.513,00	100	7.666.776.463,00	100	7.820.111.992,00	100	7.976.514.232,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.617.904.130,00		1.650.262.213,00		1.683.267.457,00		1.716.932.806,00		1.751.271.462,00	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase TindakanJut Rekomendasi BPK dan APIP Tahun Anggaran N-1 (%)	83,7	83,7	83,8	1.617.904.130,00	83,9	1.650.262.213,00	84	1.683.267.457,00	84,1	1.716.932.806,00	84,2	1.751.271.462,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.027.573.180,00		1.048.124.643,00		1.065.081.319,00		1.078.371.311,00		1.087.921.285,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian pemerintah (SPIP) (Level)	2	2	2	1.027.573.180,00	3	1.048.124.643,00	3	1.065.081.319,00	3	1.078.371.311,00	3	1.087.921.285,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Level kapabilitas apip (Level)	3	3	3		3		3		4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah		
7.01 - KECAMATAN					59.268.385.980,00		60.453.753.697,00		61.639.121.416,00		62.824.489.139,00		64.009.856.856,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					48.783.154.175,00		49.648.412.499,00		50.614.247.210,00		51.595.155.194,00		52.540.864.531,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Kabanjahe	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	6.847.096.686,00	100	7.009.113.820,00	100	7.201.476.914,00	100	7.375.740.009,00	100	7.562.553.103,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Berastagi	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	5.441.043.886,00	100	5.571.922.300,00	100	5.696.763.913,00	100	5.833.895.518,00	100	5.994.447.141,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Barusjahe	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	87,8	89	89	2.723.631.127,00	90	2.733.732.441,00	92	2.767.037.213,00	94	2.825.853.701,00	95	2.857.802.361,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada kecamatan Tigapanah	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.784.953.527,00	100	2.798.755.542,00	100	2.825.557.558,00	100	2.855.359.573,00	100	2.871.761.589,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada kecamatan Merek	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.783.218.099,00	100	2.842.530.461,00	100	2.901.842.823,00	100	2.961.155.185,00	100	3.020.467.547,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada kecamatan Munte	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.201.848.102,00	100	2.251.031.058,00	100	2.300.214.015,00	100	2.349.396.971,00	100	2.398.579.927,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Juhar	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.718.154.206,00	100	2.759.811.702,00	100	2.818.691.893,00	100	2.875.572.083,00	100	2.920.452.273,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Tigabinanga	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	88,72	88,9	89	2.607.409.442,00	90	2.657.169.173,00	91	2.712.752.430,00	93	2.756.587.873,00	95	2.815.755.561,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Dolatrayat	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	86,96	90	96	2.044.349.554,00	96,5	2.073.922.771,00	97	2.108.147.714,00	97,6	2.150.520.128,00	98	2.152.070.332,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Lau Baleng	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	86,96	100	100	2.263.834.278,00	100	2.307.438.503,00	100	2.323.717.074,00	100	2.351.508.473,00	100	2.402.471.451,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Mardinding	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.140.020.105,00	100	2.173.111.936,00	100	2.217.276.854,00	100	2.261.425.587,00	100	2.305.557.985,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Payung	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	86,96	100	100	1.941.812.387,00	100	1.983.097.622,00	100	2.024.382.856,00	100	2.065.668.091,00	100	2.106.953.325,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Simpang Empat	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	85	88	90	2.941.629.256,00	92	3.003.539.076,00	93	3.065.649.646,00	94	3.127.760.217,00	95	3.189.870.787,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada kecamatan Kutabuluh	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.206.100.621,00	100	2.243.801.745,00	100	2.291.502.869,00	100	2.339.203.994,00	100	2.386.905.118,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Merdeka	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.173.685.410,00	100	2.219.855.974,00	100	2.256.695.974,00	100	2.295.086.538,00	100	2.328.176.538,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada kecamatan Namanteran	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.466.043.033,00	100	2.483.776.430,00	100	2.534.204.030,00	100	2.560.158.330,00	100	2.590.599.768,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Kecamatan Tiganderket	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	100	100	100	2.498.324.456,00	100	2.535.801.945,00	100	2.568.333.434,00	100	2.610.262.923,00	100	2.636.439.725,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.362.174.036,00		1.533.992.789,00		1.615.431.192,00		1.676.941.681,00		1.793.790.749,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,5	3,55	3,6		42.189.000,00	3,67		81.404.000,00	3,69		106.404.000,00	3,72		122.404.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kecamatan Kabanjahe														
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Berastagi	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	-	3,6	45.000.000,00	3,7	65.000.000,00	3,75	100.000.000,00	3,8	125.000.000,00	3,9	135.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Munte	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,37	3,38	3,39	151.000.000,00	3,4	151.000.000,00	3,41	151.000.000,00	3,42	151.000.000,00	3,4	151.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Barusjahe	Nilai IKM (Indeks)	3,56	3,57	3,58	43.600.700,00	3,59	69.600.700,00	3,62	69.600.700,00	3,65	72.600.700,00	3,7	77.600.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigapanah	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,05	3,05	3,25	110.924.000,00	3,3	120.924.000,00	3,35	128.924.000,00	3,36	128.924.000,00	3,4	148.924.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Merek	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Angka)	3,06	3,1	3,2	109.050.000,00	3,25	109.050.000,00	3,3	109.050.000,00	3,35	109.050.000,00	3,4	109.050.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mardingding	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,16	3,26	3,36	100.047.280,00	3,46	102.647.753,00	3,57	103.674.231,00	3,68	104.710.976,00	3,79	105.758.076,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Juhar	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,5	3,5	3,6	99.034.340,00	3,65	110.978.000,00	3,67	105.978.000,00	3,68	105.978.000,00	3,7	110.978.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tigabinanga	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,46	3,48	3,56	69.883.420,00	3,6	83.377.591,00	3,62	87.546.470,00	3,67	91.923.794,00	3,7	96.519.984,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Lau Baleng	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,96	3,3	3,5	72.935.130,00	3,6	84.935.130,00	3,7	92.935.130,00	3,8	104.935.130,00	3,9	102.935.130,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Payung	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	84,3	3,4	3,45	57.599.940,00	3,5	57.599.940,00	3,6	57.599.940,00	3,7	57.599.940,00	3,8	57.599.940,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Simpang Empat	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,8	3,9	4	106.600.000,00	4,2	106.600.000,00	4,3	106.600.000,00	4,4	106.600.000,00	4,5	106.600.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kutabuluh	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,5	3,55	3,6	121.925.900,00	3,65	126.925.900,00	3,67	126.925.900,00	3,7	126.925.900,00	3,72	126.925.900,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Merdeka	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,5	3,55	3,6	66.417.820,00	3,65	66.417.820,00	3,67	67.417.820,00	3,68	68.197.820,00	3,7	80.278.384,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Naman Teran	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,51	3,55	3,6	60.590.856,00	3,65	73.836.105,00	3,7	86.079.151,00	3,75	97.079.151,00	3,8	104.512.705,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tiganderket	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,55	3,6	3,65	54.000.000,00	3,7	61.000.000,00	3,75	66.000.000,00	3,8	69.000.000,00	3,95	76.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Dolat Rayat	Tingkat Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86,96	3,3	3,5	51.375.650,00	3,6	62.695.850,00	3,7	62.695.850,00	3,8	51.012.270,00	3,9	81.703.930,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					8.175.722.475,00		8.202.798.205,00		8.244.140.505,00		8.261.346.742,00		8.261.929.145,00	
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Dolat Rayat					14.979.600,00		25.025.353,00		20.133.580,00		20.683.580,00		9.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Kabanjahe	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	4.017.100.000,00	100	4.019.950.000,00	100	4.034.400.000,00	100	4.035.950.000,00	100	4.045.950.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Berastagi	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa dan Kelurahan (%)	100	100	100	3.200.000.000,00	100	3.200.000.000,00	100	3.200.000.000,00	100	3.200.000.000,00	100	3.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Tigapanah	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	26.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Merek	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Munte	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	16.150.000,00	100	16.150.000,00	100	16.150.000,00	100	16.150.000,00	100	16.150.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Lau Baleng	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	9.683.580,00	100	10.048.753,00	100	20.133.580,00	100	20.683.580,00	100	9.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Mardinding	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	0	100	4.800.000,00	100	4.848.000,00	100	4.896.480,00	100	4.945.444,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Tigabinanga	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan (%)	100	100	100	800.000.000,00	100	800.000.000,00	100	802.000.000,00	100	809.724.177,00	100	810.308.356,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Payung	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	23.987.100,00	100	23.987.100,00	100	23.987.100,00	100	23.987.100,00	100	23.987.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Barusjahe	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	6.533.950,00	100	10.048.754,00	100	20.900.000,00	100	20.683.580,00	100	18.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Kutabuluh	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	7.570.000,00	100	7.570.000,00	100	7.570.000,00	100	7.570.000,00	100	7.570.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Merdeka	Tingkat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan (%)	100	100	100	17.174.610,00	100	17.174.610,00	100	20.174.610,00	100	22.174.610,00	100	22.174.610,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan di Kecamatan Naman Teran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	8.843.635,00	100	11.843.635,00	100	14.843.635,00	100	17.843.635,00	100	19.843.635,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa atau kelurahan di Kecamatan Tiganderket	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Desa atau Kelurahan (%)	100	100	100	29.700.000,00	100	32.200.000,00	100	35.000.000,00	100	37.000.000,00	100	41.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					178.758.035,00		226.896.845,00		270.604.825,00		303.587.844,00		352.414.607,00	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Barusjahe	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	0	100	5.000.000,00	100	15.450.000,00	100	0	100	15.962.989,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Berastagi	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	37,28	100	100	16.036.800,00	100	20.000.000,00	100	15.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabanjahe	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	3.100.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tigapanah	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	16.623.246,00	100	37.623.246,00	100	47.623.246,00	100	57.623.246,00	100	67.623.246,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Merek	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	15.350.000,00	100	15.350.000,00	100	15.350.000,00	100	15.350.000,00	100	15.350.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Munte	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	18.684.000,00	100	18.684.000,00	100	18.684.000,00	100	18.684.000,00	100	18.684.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Juhar	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	6.053.140,00	100	6.100.000,00	100	9.100.000,00	100	9.100.000,00	100	9.100.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tigabinanga	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	20.600.000,00	100	21.630.000,00	100	24.711.500,00	100	33.947.075,00	100	35.644.429,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Lau Baleng	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	90	100	100	5.000.000,00	100	0	100	10.450.000,00	100	8.000.000,00	100	11.534.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Mardinding	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	80	100	100	4.800.000,00	100	9.648.000,00	100	9.744.480,00	100	9.841.924,00	100	9.940.344,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Payung	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	11.980.000,00	100	11.980.000,00	100	11.980.000,00	100	11.980.000,00	100	11.980.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Simpang Empat	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	4.299.250,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	100	4.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kutabuluh	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	5.917.000,00	100	5.917.000,00	100	5.917.000,00	100	5.917.000,00	100	5.917.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Merdeka	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	13.209.824,00	100	13.209.824,00	100	15.209.824,00	100	17.209.824,00	100	17.209.824,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Naman Teran	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	15.254.775,00	100	24.254.775,00	100	19.434.775,00	100	28.434.775,00	100	33.434.775,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Dolat Rayat					5.000.000,00		0		10.450.000,00		5.000.000,00		11.534.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan Tiganderket	Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat di Tingkat Kecamatan (%)	0	100	100	16.850.000,00	100	18.000.000,00	100	22.000.000,00	100	23.000.000,00	100	29.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					667.047.009,00		729.652.160,00		759.014.409,00		820.831.377,00		854.537.930,00	
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Berastagi	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	2	100	100	40.000.000,00	100	55.000.000,00	100	72.500.000,00	100	75.710.010,00	100	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Kabanjahe	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	28.729.039,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	40.000.000,00	100	45.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	61.315.713,00	100	61.315.713,00	100	61.315.713,00	100	61.315.713,00	100	61.315.713,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kecamatan Munte														
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Payung	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	20.882.304,00	100	20.882.304,00	100	20.882.304,00	100	20.882.304,00	100	20.882.304,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Mardinding	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	80	100	100	41.575.700,00	100	41.991.457,00	100	42.411.371,00	100	42.835.485,00	100	43.263.840,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Barusjahe	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	80	90	95	26.732.685,00	95	36.732.685,00	100	36.732.685,00	100	46.732.685,00	100	46.732.685,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Tigapanah	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	65.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Dolat Rayat					24.275.707,00		24.275.707,00		24.275.707,00		41.348.043,00		50.038.930,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Merek	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif danPartisipatif di Kecamatan Naman Teran	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	45.000.000,00	100	53.936.000,00	100	45.000.000,00	100	47.960.346,00	100	55.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Simpang	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	100	53.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Empat														
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Tiganderket	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	55.200.000,00	100	57.000.000,00	100	59.000.000,00	100	63.000.000,00	100	67.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Juhar	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	20.767.826,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	24.000.000,00	100	31.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Tigabinanga	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	39.005.173,00	100	40.955.432,00	100	43.003.203,00	100	45.153.365,00	100	47.411.032,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Lau Baleng	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	40.038.930,00	100	40.038.930,00	100	40.038.930,00	100	50.038.930,00	100	50.038.930,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang efektif dan Partisipatif di Kecamatan Kutabuluh	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	35.982.700,00	100	40.982.700,00	100	40.982.700,00	100	40.982.700,00	100	40.982.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan yang Efektif dan Partisipatif di Kecamatan Merdeka	Tingkat Kesadaran Masyarakat akan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	100	100	100	34.541.232,00	100	34.541.232,00	100	35.871.796,00	100	37.871.796,00	100	37.871.796,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					101.530.250,00		112.001.199,00		135.683.275,00		166.626.301,00		206.319.894,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Berastagi	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	0	100	100	0	100	5.000.000,00	100	7.500.000,00	100	7.000.000,00	100	12.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di	100	100	100	2.440.000,00	100	4.000.000,00	100	4.000.000,00	100	9.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kabanjahe	Tingkat Kecamatan (%)													
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Munte	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	10.150.000,00	100	10.150.000,00	100	10.150.000,00	100	10.150.000,00	100	10.150.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Barusjahe	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	75	80	85	7.004.950,00	90	8.538.900,00	95	10.082.950,00	100	10.082.950,00	100	16.004.950,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas dan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di kecamatan Tigapanah	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	11.600.000,00	100	11.600.000,00	100	11.600.000,00	100	31.600.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tigabinanga	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	0	100	4.503.799,00	100	8.360.353,00	100	11.775.633,00	100	14.210.515,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Lau Baleng	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	3.078.000,00	100	0	100	3.078.000,00	100	3.078.000,00	100	10.156.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Mardinding	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	2.720.000,00	100	2.747.200,00	100	2.774.672,00	100	2.802.418,00	100	2.830.442,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Kecamatan Payung														
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kutabuluh	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	7.560.000,00	100	7.560.000,00	100	7.560.000,00	100	7.560.000,00	100	7.560.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Merdeka	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	3.499.300,00	100	3.499.300,00	100	5.499.300,00	100	6.499.300,00	100	7.499.300,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Tiganderket	Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Tingkat Kecamatan (%)	90	100	100	42.400.000,00	100	46.402.000,00	100	54.000.000,00	100	56.000.000,00	100	62.752.687,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya Kualitas efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Dolat Rayat					3.078.000,00		0		3.078.000,00		3.078.000,00		10.156.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					9.380.255.544,00		9.567.860.655,00		9.755.465.766,00		9.943.070.877,00		10.130.675.988,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.897.406.994,00		4.995.356.655,00		5.096.085.766,00		5.195.163.877,00		5.292.561.988,00	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah (%)	85	90	92	4.897.406.994,00	93	4.995.356.655,00	94	5.096.085.766,00	95	5.195.163.877,00	96	5.292.561.988,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.193.768.000,00		1.217.643.000,00		1.240.778.000,00		1.264.352.000,00		1.288.374.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	70	71	72	1.193.768.000,00	74	1.217.643.000,00	75	1.240.778.000,00	76	1.264.352.000,00	78	1.288.374.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.134.061.000,00		1.156.742.000,00		1.178.720.000,00		1.201.115.000,00		1.223.936.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	72	72	73	1.134.061.000,00	74	1.156.742.000,00	75	1.178.720.000,00	76	1.201.115.000,00	76	1.223.936.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					39.661.000,00		40.454.000,00		41.222.000,00		42.005.000,00		42.803.000,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	78	80	80,5	39.661.000,00	81	40.454.000,00	81,5	41.222.000,00	82	42.005.000,00	82,5	42.803.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.777.888.000,00		1.813.445.000,00		1.847.900.000,00		1.883.010.000,00		1.918.785.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	75	76	76	1.777.888.000,00	77	1.813.445.000,00	78	1.847.900.000,00	79	1.883.010.000,00	80	1.918.785.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					337.470.550,00		344.220.000,00		350.760.000,00		357.425.000,00		364.216.000,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	80	100	100	337.470.550,00	100	344.220.000,00	100	350.760.000,00	100	357.425.000,00	100	364.216.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.510.542.495.936,61		1.539.797.972.794,00		1.558.108.784.258,00		1.581.807.867.164,00		1.609.513.350.950,00	

Sumber: Bappedalitbang Kab. Karo

Tabel 4.3
Dukungan Daerah terhadap Astacita/Prioritas Nasional Tahun 2025-2029

ASTACITA/PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	BIDANG URUSAN
Astacita 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN
Astacita 2	Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	URUSAN PANGAN
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	URUSAN PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	URUSAN PANGAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	URUSAN PANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Astacita 3	Melanjutkan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	URUSAN PARIWISATA

ASTACITA/PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	BIDANG URUSAN
pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim dan industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	URUSAN PARIWISATA
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	URUSAN PARIWISATA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	URUSAN PARIWISATA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	URUSAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	URUSAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	URUSAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	URUSAN TENAGA KERJA
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	URUSAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	URUSAN PERHUBUNGAN

ASTACITA/PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	URUSAN PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	URUSAN PERHUBUNGAN
Astacita 4	Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	URUSAN KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	URUSAN KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	URUSAN KESEHATAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	URUSAN PENDIDIKAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	URUSAN PENDIDIKAN
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	URUSAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	URUSAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

ASTACITA/PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Astacita 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	URUSAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	URUSAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	URUSAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	URUSAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	URUSAN PENANAMAN MODAL
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	URUSAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	URUSAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	URUSAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	URUSAN PERINDUSTRIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	URUSAN PERINDUSTRIAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	URUSAN PERINDUSTRIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	URUSAN PERTANIAN
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	URUSAN PERTANIAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Astacita 6	Membangun dari desa dan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	URUSAN PERDAGANGAN

ASTACITA/PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	BIDANG URUSAN
	dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	URUSAN PERDAGANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	UNSUR KEUANGAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	URUSAN SOSIAL
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	URUSAN SOSIAL
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	URUSAN SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	URUSAN SOSIAL
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	URUSAN SOSIAL
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	URUSAN SOSIAL
		PROGRAM PENATAAN DESA	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Astacita 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	UNSUR SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	UNSUR SEKRETARIAT DAERAH
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	UNSUR SEKRETARIAT DPRD

ASTACITA/PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	UNSUR KEUANGAN
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	UNSUR KEUANGAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	UNSUR PENGAWASAN
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	UNSUR PENGAWASAN
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	URUSAN STATISTIK
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	URUSAN PERSANDIAN
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	UNSUR KEPEGAWAIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	URUSAN PERPUSTAKAAN
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	URUSAN KEARSIPAN
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	URUSAN KEARSIPAN
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	UNSUR PERENCANAAN
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	UNSUR PERENCANAAN
Astacita 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	URUSAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	URUSAN KEBUDAYAAN

ASTACITA/PRIORITAS NASIONAL		PROGRAM	BIDANG URUSAN
antar umat beragama untuk masyarakat yang adil dan makmur.		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	URUSAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	URUSAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	URUSAN KEBUDAYAAN
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NONKEBAKARAN	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Tabel 4.4
Dukungan Program Daerah terhadap Kegiatan Utama dalam RPJMN 2025-2029

PRIORITAS NASIONAL	NO	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	PROGRAM DAERAH
Prioritas Nasional 1			
Prioritas Nasional 2	1	Pembangunan pangan akuatik (<i>blue food</i>)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
	2	Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	3	Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
	4	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	5	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Prioritas Nasional 3	6	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
	7	Percepatan Pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Prioritas Nasional 4	8	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	PENGELOLAAN PENDIDIKAN
	9	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
	10	Pembangunan RS lengkap berkualitas di Kabupaten/ Kota dan pengembangan Pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Prioritas Nasional 5	11	Pengembangan KEK Sei Mangke	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Prioritas Nasional 6	12	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Prioritas Nasional 7			
Prioritas Nasional 8			

Tabel 4.5
Dukungan Program Daerah terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Provinsi Sumatera Utara
dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 – 2030

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
1. Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) Kepulauan Nias (2026), Kepulauan Nias dan Pantai Barat (2027), Kepulauan Nias, Pantai Barat dan Dataran Tinggi (2028), Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur (2029)	2025	Penyusunan kajian akademik tentang bersekolah gratis, Pembentukan Tim Pokja, Validasi data siswa SMA/SMK/SLB Negeri di zona kepulauan Nias, zona Pantai Barat, zona Dataran Tinggi, zona Pantai Timur	Dinas Pendidikan	Diskominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan basis data siswa SMP/SLTP kelas IX yang akan melanjutkan SLTA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
33 Kabupaten/Kota		• 33 Kabupaten/Kota			- Melakukan edukasi kepada siswa SLTP agar seluruhnya melanjutkan kepada jenjang SLTA	
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	Implementasi Program Bersekolah Gratis				
		•Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan Dataran Tinggi				
	2029	Implementasi Program Bersekolah Gratis				
		•Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur				
	2030	Implementasi Program Bersekolah Gratis				
		•Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur				
2. Program Berobat Gratis (Probis) melalui Program Universal Health Coverage (UHC) (mulai Oktober tahun 2025, UHC+ tahun 2026 - 2030).	2025	Melakukan Launching UHC	Dinas Kesehatan	1. Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Penyusunan regulasi (Pergub/SK Gub UHC)		2. Dinas Sosial (Pembinaan kepada	- Dukungan penganggaran APBD Kabupaten/Kota untuk UHC/PBPU yaitu pada Tahun 2025 sebesar 80%, tahun 2026 sebesar 77,5%, tahun 2027 sebesar 75%, tahun 2028 sebesar 72,5%, tahun 2029 dan 2030 sebesar 70%.	
		MoU 33 Kabupaten/Kota		3. Dinsos kab/kota untuk melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya),	- Melakukan penginputan, pemutakhiran dan verifikasi data DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) pada Pusdatin Kemensos setiap bulannya	
		Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara Triwulan IV		4. Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data	- Dinas PMD Dukcapil (Penyediaan data kependudukan kab/kota)	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
				kependudukan Provsu)		
		dimulai Oktober 2025		5. Diskominfo (Publikasi Kegiatan),		
		• 33 Kabupaten/Kota				
	2026	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara		1. Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		• 33 Kabupaten/Kota				
	2027	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara		1. Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		• 33 Kabupaten/Kota				
	2028	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara		1. Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		• 33 Kabupaten/Kota				
	2029	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara		1. Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		- Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus				
		• 33 Kabupaten/Kota				
	2030	- Pemenuhan jaminan kesehatan melalui peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara		1. Dinas Kesehatan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		- Peningkatan Pelayanan Kesehatan menjadi UHC Plus				
		• 33 Kabupaten/Kota				
3. Program Jaminan Kestabilan Harga Komoditi Pangan (JASKOP)	2025	1. Pembentukan Tim Khusus Kestabilan Harga di semua level.	Dinas TPH	- Disperindag ESDM (Memfasilitasi kemitraan antara petani dan pelaku usaha)	Disperindag kab/kota : Melakukan fasilitasi dan pameran produk cabai kering di tingkat lokal	Program Pengembangan Ekspor
						Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
		2. Pelatihan teknis tim dan sosialisasi Perda terkait mekanisme HET.		- Diskop UMKM (Mendorong koperasi tani dan mengkoordinasikan ke koperasi merah putih)	Dinas Pertanian kab/kota : Menyiapkan lahan dan kelompok tani (CPCL) serta pendampingan kelompok tani	
		3. Pilot project diversifikasi produk turunan cabai merah (uji resep, branding awal).		- PUPR (Perbaikan akses jalan ke sentra produksi dan koordinasi dengan PUPR kab/kota terkait akses jalan)	Dinas Koperasi kab/kota : Mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama yang mengelola SDD	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
		4. Pembangunan 10 unit Solar Dryer Dome di 2 kabupaten (Kab. Batu Bara 5 unit, Kab. Karo 5 unit).		- BUMD Dirga Surya (Skema pembelian hasil pertanian cabai merah ketika harga turun)	Total Solar Dry Dome: 70	
		5. Skema kemitraan dengan BUMD potensial untuk proses penyerapan, pengolahan, distribusi dan proses bisnis skema BUMD mulai dari pengumpulan,pembelian sampai distribusi penjualan.		- Biro Pemotda (fasilitasi kerja sama antar pemerintah daerah)		
		6. Identifikasi Kontrak farming dengan kelompok tani .		- Diskominfo (Publikasi Kegiatan)		
	2026	tidak ada				
	2027	tidak ada				
	2028	1. Identifikasi mitra pembeli tetap dan pembentukan forum harga.				
		2. Negosiasi dan MoU harga tetap antara pembeli dan kelompok tani.				
		3. Pendampingan kontrak dan distribusi, penguatan kelembagaan koperasi petani.				
		4.Monitoring dan evaluasi produktivitas mutu kualitas bibit dan cabai				
		5.Perluasan kemitraan dengan sektor swasta				
		6. Pembangunan 10 unit SDD (Kab. Karo 4 Unit, Kab. Humbahas 3 Unit, dan Kab. Langkat 3 Unit)				
	2029					
	2030					
4. Digitalisasi Pelayanan Publik “Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif” (CERDAS)	2025	Identifikasi dan pemetaan pelayanan publik yang akan di digitalisasi	Dinas Kominfo	DPMPSTP	3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		1. Pemetaan layanan publik yang akan didigitalisasi, Audit kesiapan infrastruktur dan SDM dan kebijakan pendukung		Dinas Pendidikan		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		2. Penyusunan roadmap dan desain awal sistem Layanan digital.		Dinas Kesehatan	Mempersiapkan data Faskes yang telah terintegrasi SIKN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Lokasi:		Bapenda	4. Penentuan lokasi	
		• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.		Disperindag ESDM		
		Identifikasi Penetapan Lokasi		BPSDM	2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan	
		1. Pelaksanaan Survei lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan potensi gangguan jaringan.		Biro Adpem		
		2. Integrasi Sistem (Layanan).				
		3. Pemetaan Lokasi Strategis.		BUMD: PDAM, Bank Sumut		
		4. Koordinasi kepada Stake Holder dan Penyusunan dokumen perencanaan Teknis dan Administratif.				

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Lokasi Kegiatan:				
		- 33 kabupaten/kota				
	2026	Pembangunan integrasi portal aplikasi		Dinas Kesehatan	1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
					1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi .			2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.	
		2. Integrasi Sistem (Layanan).			3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota	
		3. Pelatihan penggunaan Aplikasi.			4. Penentuan lokasi	
		4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.				
		Lokasi Kegiatan:				
		• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.				
		tidak ada				
					1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.	
	2027	Pengembangan dan penambahan		Dinas Kesehatan	1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.			1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		2. Integrasi Sistem (Layanan).			2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.	
		3. Pelatihan penggunaan Aplikasi.			3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota	
		4. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.			4. Penentuan lokasi	
		5. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur				
		Lokasi:				
		• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.				
		Pembangunan dan implementasi serta titik pemasangan jaringan internet			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.	
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.			2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
		2. Pemasangan Titik akses Wifi.				
		3. Sosialisasi Penggunaan.				
		4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring.				
		Lokasi Penggunaan:				
		- 25 Kab				
	2028	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet			1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.			2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.	
		2. Pelatihan penggunaan Aplikasi.			3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota	
		3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.			4. Penentuan lokasi	
		4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infastruktur		Dinas Kesehatan	1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Lokasi Kegiatan:				
		• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.				
		tidak ada			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.	
	2029	Perluasan area layanan dan akses jaringan internet			2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan	
		1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.			1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		2. Pelatihan penggunaan Aplikasi.			2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.	
		3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.			3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota	
		4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infastruktur			4. Penentuan lokasi	
		Lokasi Kegiatan:		Dinas Kesehatan	1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.				
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.	
		2. Pemasangan Titik akses Wifi.			2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan	

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
		3. Sosialisasi Penggunaan.				
		4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring.				
		Lokasi Perluasan Area Layanan:				
		- 25 Kab				
	2030	Evaluasi dan Monitoring			1.Penyiapan dan penguatan infastruktur digital.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
		1. Pengembangan dan Implementasi Aplikasi.			2. Penyiapan Peningkatan kapasitas SDM di kabupaten/kota.	
		2. Pelatihan penggunaan Aplikasi.			3.Penyiapan data-data aplikasi yang ada di pemerintahan kab/kota.	
		3. Sosialisasi peggunaan aplikasi kepada masyarakat.			4. Penentuan lokasi	
		4. Peningkatan kapasitas jaringan dan infrastruktur		Dinas Kesehatan	Evaluasi Monitoring Penggunaan Aplikasi SIKN (SISTEM Informasi Kesehatan Nasional)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Lokasi kegiatan:				
		33 kab/kota				
		1. Pengadaan Perangkat Jaringan dan akses internet.			1. Kesiapan Infrastruktur Internet, dan Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota.	
		2. Pemasangan Titik akses Wifi.			2. Melakukan Pemeliharaan dan Pengawasan.	
		3. Sosialisasi Penggunaan.				
		4. Evaluasi dan Pengembangan Sistem Mointoring.				
		Lokasi Perluasan Area Layanan:				
		- 33 kab/kota				
5 a. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI)	2025	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/ AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas Perhubungan terkait Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	1. Dukungan penanganan akses jalan dalam koridor pembangunan jalan provinsi yang mendukung kawasan prioritas.	
		2.Penyusunan Leger jalan			2.Dukungan penyediaan lahan pada rencana pelebaran yang tidak sesuai dengan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).	
		3.Pelaksanaan penanganan Jalan				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Gunungsitoli				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Padang Lawas Utara				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Dairi, Kab. Toba				

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan				
		4.Pelaksanaan penanganan Jembatan				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Kota Gunungsitoli				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Tapanuli Selatan				
		Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat, Kota Padangsidimpuan				
		Target pembangunan tahun ini mencakup 49,92 km jalan dan 244,20 meter jembatan				
	2026	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)				
		2.Penyusunan Leger jalan				
		3.Pelaksanaan penanganan Jalan				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kab. Pakpak Bharat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan				
		Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Selatan, Kab. Nias Barat				
		4.Pelaksanaan penanganan Jembatan				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Simalungun, Kab. Samosir				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal				
		Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat				
		target: jalan 202,84 km jembatan 202,90 m.				
	2027	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)				
		2.Penyusunan Leger jalan				
		3.Pelaksanaan penanganan Jalan				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan				

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
	2028	Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Selatan				
		Kawasan Afirmasi: Kab. Nias, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias Selatan				
		Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat				
		4.Pelaksanaan penanganan Jembatan				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Batu Bara, Kab. Deli Serdang				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Serdang Bedagai, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Serdang Bedagai, Kab. Pakpak Barat				
		serta target: jalan 130,99 km & jembatan 708,45 m				
		1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)				
		2.Penyusunan Leger jalan				
		3.Pelaksanaan penanganan Jalan				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan,Kab. Tapanuli Tengah, Kab Toba,Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidempuan				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Padang Lawas				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat				
		Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat				
		Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana : Kab. Langkat				
		4.Pelaksanaan penanganan Jembatan				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Dairi				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Tapanuli Selatan				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Pakpak Bharat				
		serta target: jalan 135,10 km & jembatan 438,90 m				
	2029	1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)				
		2.Penyusunan Leger jalan				
		3.Pelaksanaan penanganan Jalan				

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas Utara				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun,Kab. Deli Serdang, Kab. Toba, Kota Padangsidimpuan				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara				
		Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat				
		Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat				
		4.Pelaksanaan penanganan Jembatan				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Samosir, Kab. Toba				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Nias Utara				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Mandailing Natal, Kab. Toba				
		Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat				
		serta target: jalan 87,60 km & jembatan 147,20 m				
		1.Penyediaan penyusunan desain Perencanaan (DED)				
	2030	2.Penyusunan Leger jalan				
		3.Pelaksanaan penanganan Jalan				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Mandailing Natal, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Selatan				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Karo, Kab. Labuhanbatu, Kab. Asahan, Kab. Padang Lawas, Kab. Tapanuli Selatan				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Karo, Kab. Simalungun, Kab. Batu Bara, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Dairi				
		Kawasan Afirmasi: Kab. Nias Barat				
		Kawasan Konservasi/ Rawan Bencana: Kab. Langkat				
		4.Pelaksanaan penanganan Jembatan				
		Kawasan Pertumbuhan: Kab. Deli Serdang				
		Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu, Kab. Serdang Bedagai				
		Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi: Kab. Serdang Bedagai				
		serta target: jalan 126,20 km & jembatan 51 m				

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
b. Penguatan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Air Pertanian untuk Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	2025	Pelaksanaan awal di 4 DI prioritas dengan target 1.857 Ha	Dinas PUPR	OPD Dinas LHK terkait penyiapan dokumen lingkungan/AMDAL, Dinas TPH melakukan pemataan terhadap kawasan swasembada dan dukungan terhadap irigasi tersier dan kuarter, benih, pupuk, alsintan, penyuluh pertanian. Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas Kominfo untuk publikasi Media	- Sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Kab. Mandailing Natal - DI Roburan Maga, Kota P. Siantar/Simalungun - DI.Bah Kora II/Negeri Bosar, Kab. Serdang Bedagai - DI. Pekan Kemis, Kab. Karo - DI.Parit Lompaten			- Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan.	
					- Digitalisasi sistem irigasi (<i>smart irrigation</i>) berbasis sensor dan aplikasi.	
					- Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi.	
					- Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.	
	2026	Peningkatan jaringan irigasi sekunder di Kab. Batu Bara, Kab. Padanglawas Utara, dan Kab. Simalungun; target 6.776 Ha.				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Kab. Batu Bara - DI.Cinta Maju/Cinta Damai, Kab. Batu Bara- DI. Purwodadi, Kota P.Siantar/Simalungun-. DI. Rambung Merah, Kab. Batu Bara- DI.Simodong, Kab. Batu Bara- DI.Tanjung Muda, Kab. Padang Lawas Utara- DI.Padang Garugur, Kab. Karo- DI.Parit Lompaten, Kab. Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Serdang Bedagai- DI. Pekan Kemis				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
	2027	tidak ada				
	2028	Penguatan jaringan teknis				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Kab. Batu Bara-(D.I.Simodong, D.I. Purwodadi,DI. Sei Balai,DI. Suka Makmur,DI. Sijambi), Kab. Simalungun-DI. Bah Horas Hulu/Tongah, Kab. Padang Lawas Utara-DI.Padang Garugur, Kab. Padang Lawas - DI.Sigorbus, Kab. Labuhanbatu- (D.I.R Cinta Makmur,D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kab. Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Mandailing Natal- DI Roburan Maga, Kab. Langkat- D.I.R Gebang,Kab. Tapanuli Tengah- D.I Pandurungan/Sitandiang, Kab. Karo- DI.Parit Lompaten, Kab. Toba- DI.Hinalang, Kab. Tapanuli Utara- DI.Sigeon, Kab. Tapanuli Utara- (DI.Simok Mok,D.I Aek Sarulla), Kab. Deli Serdang- D.I Medan Krio, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus, Kab. Dairi- D.I. Buluh Duri, Kab. Mandaling Natal-D.I. Siulang Aling,Kab. Tapanuli Tengah- D.I Badiri Lopian				
	2029	Penyempurnaan konektivitas saluran				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Kab. Batu Bara- D.I.Simodong, Kab. Tapanuli Selatan- D.I.Sipirok Komplek, Kab. Labuhanbatu- (D.I.R Cinta Makmur, D.I.R. Sei Serdang/sei Rakyat), Kab. Tapanuli Utara- DI.Simok Mok, Kab. Mandailing Natal- D.I. Tapus, Kab. Dairi-D.I. Buluh Duri, Kab. Mandailing Natal- D.I. Siulang-Aling, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Mombangboru, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Pandurungan/Sitandiang, Kab. Tapanuli Tengah- D.I Badiri Lopian, Kab. Toba- D.I Sijambur , Kab. Simalungun-D.I. Naga Sompah, Kab. Karo- DI.Parit Lompaten				
	2030	tidak ada				

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
c. Peningkatan Kualitas Permukiman Layak, Terjangkau, dan Inklusif melalui Penyediaan Hunian Murah serta dukungan terhadap pelaksanaan program 3 juta rumah	2025	tidak ada	Dinas PKP	Dinas PUPR terkait dukungan terkait Tata Ruang, Jalan, dan Keciptakaryaan (sanitasi dan air minum),	Bupati/Wali Kota:	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				BPBD koordinasi terhadap Rehab rumah akibat bencana	1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = by name by address)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				Biro Adpem melaksanakan movev terhadap pelaksanaan dan evaluasi	2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
				Biro Pemotda (memfasilitasi kerja sama antar Pemerintah Daerah)	3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota	
				Badan Kepegawaian dan BP Tapera untuk penyediaan data ASN yang belum milik rumah	4. Melakukan sosialisasi kepada MBR dan ASN	
				Dinas Kominfo untuk publikasi Media		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
	2026	tidak ada			Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di kab/kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan.	
	2027	tidak ada			Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada pelaksana di lapangan.	
	2028	- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya			Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal.	
		- Survei Lokasi di setiap kab/kota			Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan.	
		- Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerja sama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll)			Badan Kepegawaian dan BP Tapera: Penyediaan data ASN yang belum milik rumah	
		- Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah				
		- Pembangunan Fisik setiap Tahun				

PHTC	TAHUN	RENCANA AKSI DAN LOKUS PELAKSANAAN	DUKUNGAN OPD PROVSU		DUKUNGAN KAB/KOTA	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
			UTAMA	PENDUKUNG		
		- Perluasan pemasaran dan kepemilikan rumah bagi MBR dan ASN				
		- Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan				
		• Kab. Nias, Kab. Karo, Kab. Langkat, Kab. Nias Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Pematangsiantar, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, Kab. Labuhanbatu dan Kab. Labuhanbatu Utara				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				
6. Bantuan Hukum dan perlindungan rakyat melalui Restorative Justice (PRESTICE).	2025	tidak ada	Biro Hukum	Dinas PMD Capil (memberikan data/pemetaan desa prioritas kegiatan PRESTICE yaitu desa dengan karakteristik konflik yang tinggi)	1. Replikasi Kegiatan Prestice pada tingkat Kabupaten/Kota	
	2026	- Pembentukan kelembagaan Prestice, Bimbingan Teknis Paralegal Desa dan Edukasi dan Sosialisasi PRESTICE di 25 kabupaten/kota (Asahan, Batu Bara, Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Karo, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba		Diskominfo (Publikasi),	2. Edukasi dan Sosialisasi Prestice di tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan ke level Kecamatan dan Desa.	
		- Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum selain kasus KDRT dan Narkoba			3. Pendampingan dari bagian hukum kabupaten/kota dari kasus tidak pidana ringan yang ditangani oleh PRESTICE	
		- Pendampingan bagi masyarakat yang berhadapan dengan kasus tindak pidana ringan.				
		- Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota (2 orang per kab/kota, dilaksanakan di Kota Medan)				
	2027	tidak ada				
	2028	tidak ada				
	2029	tidak ada				
	2030	tidak ada				

Tabel 4.6

Dukungan Program Daerah terhadap 17 (Tujuh belas) Program Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
PP1. PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM SEKOLAH UNGGULAN BERBASIS PENINGKATAN SKILL YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI DAN POTENSI WILAYAH DI TINGKAT LOKAL				
1. Pemenuhan 100% Fasilitas Listrik dan Layanan Internet pada Seluruh SMA/SMK/SLB di Sumatera Utara	Dinas Pendidikan	Disperindag ESDM (pendampingan terhadap akses listrik), Dinas Kominfo (pendampingan terhadap akses internet dan publikasi kegiatan).	Pembangunan akses jalan yang baik ke sekolah yang akan dibangun akses listrik dan layanan internet.	
2. Pembangunan 4 SMA/SMK/SLB Unggulan (Nias/SMA - 2026, Asahan/SMK - 2027, Samosir/SMK – 2028, Karo/SLB - 2029)	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)	- Penyediaan lahan/hibah lahan yang diperlukan	
		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Pembangunan akses jalan yang baik dari dan ke sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3. Rehabilitasi Ruang Kelas SMA/SMK/SLB sebanyak 490 Sekolah	Dinas Pendidikan	PUPR (Appraisal/Penilaian Kerusakan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)	Pembangunan infrastruktur akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi ruangan kelas rusak	
		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)		
4. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru	Dinas Pendidikan	PUPR (Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)	Penyediaan atau hibah Lahan dari kabupaten/kota untuk lokasi Pembangunan RKB sesuai kebutuhan.	
		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	Pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan akses jalan yang baik dari dan menuju sekolah.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
05. Optimalisasi Sarana dan Prasarana BLK Provsu menuju BLK Tematik Bioindustri dan Pariwisata	DISNAKER	Dinas Perindustrian Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral: Disperindag ESDM bersifat mendukung dan lintas sektor, bukan pelaksana utama pelatihan. Maka Disperindag ESDM mendukung proyek strategis BLK, sebagai berikut:	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:	
		• Menjadi penghubung antara pelaku industri/perusahaan dengan Disnaker dan BLK.	1. Dukungan sarana dan prasaran pendukung sesuai kewenangan kabupaten	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		• Memfasilitasi program magang industri dan penempatan lulus BKL ke industri lokal.	2. Memfasilitasi kerja sama antara BLK dan perusahaan lokal untuk program magang, pelatihan kerja, atau penyerapan tenaga kerja berbasis potensi daerah	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
		• Disperindag ESDM dapat menjadi mitra dalam pengembangan program pelatihan vokasi di BLK melalui fasilitasi pelatihan berbasis proyek industri, penyediaan instruktur ahli dari sektor industri dan akses terhadap bantuan alat pelatihan.		
		Dinas Pendidikan: Dinas Pendidikan memiliki peran dalam proyek strategis ini dalam hal pelatihan kerja, sebagai berikut:		
		• Mendorong sinkronisasi kurikulum SMK/vokasi dengan skema pelatihan BLK agar lulusan SMK lebih siap kerja.		
		• Memastikan kompetensi lulusan SMK sejalan dengan kebutuhan industri dan program <i>pelatihan BLK</i> .		
		• Mengintegrasikan teaching factory di SMK dengan fasilitas pelatihan <i>BLK untuk</i> menciptakan ekosistem pelatihan dual system.		
		• Mendorong peserta didik SMK mengikuti sertifikasi kompetensi melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terhubung dengan BLK.		
		• Bersama Disnaker, mendata dan menyiapkan guru produktif/tenaga pelatih yang memenuhi standar pelatihan.		

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
		Dinas Koperasi dan UMKM:		
		Mengintegrasikan hasil pelatihan BLK dengan program inkubasi usaha UMKM		
		Membina lulusan BLK agar mampu mengembangkan usaha mandiri berbasis keahlian yang telah diperoleh		
		Menyediakan pendampingan usaha lanjutan bagi peserta pelatihan BLK yang ingin berwirausaha		
		Menyediakan ruang inkubasi bisnis di sentra-sentra UMKM daerah yang terhubung dengan BLK		
		Membantu lulusan BLK yang berwirausaha dalam promosi dan digitalisasi produk melalui <i>E-commerce</i> dan platform digital UMKM.		
		Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:		
		Menyediakan ruang promosi bagi hasil karya lulusan BLK di sektor kriya, kuliner, dan fesyen etnik melalui festival budaya, event pariwisata, serta platform pemasaran digital.		
		Menjalin kolaborasi dengan Disnaker untuk mendukung pengembangan ekosistem pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dan budaya lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan.		
		Memberikan dukungan fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi bagi peserta pelatihan BLK untuk meningkatkan daya saing dan kesiapan kerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.		
		Bekerja sama dengan Disnaker dalam menyusun kurikulum pelatihan di BLK yang relevan dengan kebutuhan industri pariwisata dan subsektor ekonomi kreatif.		
		Dinas Sosial:		
		Menjangkau dan Memberdayakan Kelompok Rentan Sosial.		
		Integrasi Program Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Kerja.		
		Bersinergi dengan Disnaker dalam memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan program pelatihan BLK tepat sasaran, terutama bagi warga miskin dan rentan sosial.		
		Melalui tenaga pekerja sosial, Dinas Sosial dapat melakukan pendampingan bagi peserta pelatihan selama dan setelah masa pelatihan, untuk memastikan mereka mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, baik untuk bekerja maupun memulai usaha secara mandiri.		
		Badan Kepegawaiaan Daerah:		
		BKD berperan dalam mendukung ketersediaan ASN dengan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan BLK, baik sebagai instruktur, tenaga administrasi, maupun pengelola program pelatihan.		
		Melakukan pemetaan dan perencanaan kebutuhan SDM aparatur di bidang pelatihan vokasional agar sejalan dengan arah pengembangan BLK, termasuk dalam pengadaan, rotasi, dan pengembangan karier ASN yang ditempatkan di unit-unit pelatihan.		

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
		BKD dapat mengintegrasikan program pelatihan teknis fungsional dan manajerial bagi ASN yang bertugas di lingkungan BLK ke dalam rencana pengembangan kompetensi tahunan, guna meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan pelatihan.		
		Berperan dalam membangun sistem penilaian kinerja yang berbasis output dan dampak, termasuk mengawasi efektivitas kinerja ASN di BLK dalam menyelenggarakan pelatihan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja.		
		Kominfo: Dukungan Publikasi Kegiatan		
PP2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PEMUDA, DAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM BERKARYA DAN BERPRESTASI				
6. Liga Olahraga Pelajar Sumut Piala Gubernur Sumatera Utara Cabang Olahraga Sepak Bola dan Voli tahun 2026 - 2030	Dispora	Dinas Pendidikan/Cabang Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan (pembinaan, edukasi dan sosialisasi kepada pelajar untuk dapat menjadi atlet pelajar)	- Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan liga olahraga pelajar Sumut untuk cabor sepak bola dan voli	
		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)	- Melaksanakan <i>side event</i> pada saat pelaksanaan liga olahraga (pameran UMKM) dan sejenisnya	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
7. Pekan Olahraga Paralimpik Pelajar Sumatera Utara pada Cabang Olahraga Atletik Tahun 2026 - 2030	Dispora	Dinas pendidikan / Cabang Dinas Pendidikan (Edukasi dan Sosialisasi bagi Pelajar Difabel untuk dapat mendata dan membina atlet sesuai potensi dan minat siswa)	NPC kab/kota dan Dispora kab/kota memperkuat perekrutan dan pembinaan para atlet disabilitas pelajar di kab/kota	
		Dinas Kominfo (Publikasi kegiatan)		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PP 3 KESEHATAN YANG TERINTEGRASI DI BEBERAPA TITIK KAWASAN YANG MENJADI SENTRA LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT TERPADU				
8. Digitalisasi sistem kesehatan terintegrasi (<i>Sumut e-Health Integration system</i>)	Dinas Kesehatan	Dinas Kominfo (Penyediaan Web,Server dan Publikasi Kegiatan)	-Penyediaan data kepesertaan JKN kab/kota	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
			-Sosialisasi dan edukasi platform kepada faskes tingkat kab/kota	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
9. Beasiswa Ikatan Dinas bagi Dokter Spesialis dan dokter spesialis residen di Wilayah Kurang Terlayani (2025 - 2030)	Dinas Kesehatan	Badan Kepegawaian (Pelaksanaan assesmen kompetensi dokter spesialis sesuai kebutuhan, Pembinaan Monitoring kepada Badan Kepegawaian kab/kota agar Dokter Spesialis yang sudah dididik tidak berpindah tempat kerja)	-Menyediakan data dokter umum yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh beasiswa dokter spesialis dan Mengidentifikasi jenis dan jumlah spesialis yang dibutuhkan di RSUD atau faskes daerah	
		Biro Pemotda (Fasilitasi Penyusunan Dokumen kerja sama dengan USU dan UGM)	- Menyiapkan surat komitmen bersama dengan para Bupati/Wali Kota yang menyatakan bahwa peserta dokter spesialis akan kembali ke daerah asal dan RSUD setempat	
		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menentukan jenis spesialis yang paling dibutuhkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			- Kesiapan Sarana dan Prasarana RSUD	
			- Surat Penugasan & Dukungan Legal Formal	
			- penyediaan Akomodasi dokter residen	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
10. Dukungan Pengembangan Rumah Sakit Unggulan (Pengembangan Rumah Sakit Unggulan dan Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan	PUPR (Manajamen Konstruksi, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi)	- Penyediaan Lahan dan Dokumen Legalitas	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menyediakan tenaga non-medis, mendukung rekrutmen tenaga kesehatan, dan pemeliharaan fasilitas	
			Koordinasi Linta Pemerintahan	
11. Bantuan Sosial Produktif melalui Program Masyarakat Produktif (MAPRO).	Dinas Sosial	Disperindag dan Dinas Koperasi UMKM (Dukungan Pelatihan dan Pendampingan bagi sasaran kegiatan Mapro yaitu KUBe dan UEP, fasilitasi keikutsertaan Kelompok Usaha Bersama/Usaha Ekonomi Produktif Mapro dalam pameran/expo yang dilaksanakan oleh Dinas)	Dukungan penjjajakan calon penerima bantuan agar tepat sasaran.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Dukungan koordinasi penyiapan kegiatan pelatihan bagi calon penerima bantuan di kab/kota.	
			Replikasi kegiatan serupa di kab/kota masing-masing.	
12. Pelaksanaan Program Pasar Murah Bergerak (PMB)	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH : Data pangan strategis dan penyediaan stok • Dinas Perhubungan : Transportasi logistik • Dinas Sosial : Data P3KE <i>by name by address</i> (untuk menentukan titik titik PMB dilakukan) • Dinas Koperasi & UMKM : Pelibatan UMKM dan Koperasi dalam penyediaan stok • Biro Perekonomian : pelibatan TPID untuk menghitung dampak terhadap pengendalian inflasi • Dinas Kominfo : Publikasi Pelaksanaan • Bappelitbang: Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan (Tahun 2025-2030):	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			1. Pendataan kecamatan dan jumlah penduduk miskin dan rawan miskin;	
			2. Pendataan jumlah KUMKM penyedia Bahan Kebutuhan Pokok;	
			3. Pengawasan distribusi dan harga bahan kebutuhan pokok;	
			4. kerja sama antar kabupaten dalam penyediaan Bahan Kebutuhan Pokok	
			5. Penyediaan lokasi untuk pelaksanaan;	
			6. Monitoring dan evaluasi	
13. Perlindungan Sosial bagi Tenaga Kerja Rentan (Subsidi BPJS Ketenagakerjaan)	DISNAKER	• Dinas Sosial	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:	
		• Dinas Sosial berperan dalam memberikan data dukung DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk memastikan penerima termasuk dalam kategori penerima bantuan.	1. Mendukung pelaksanaan agar bisa mencapai target <i>Universal Coverage Jamsostek</i> (UCJ) sebesar 60% sesuai RPJMD 2025-2029	
		• Pendataan dan Validasi Calon Penerima, Mengelola dan memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar penetapan penerima bantuan iuran BPJS.	2. Memberikan sosialisasi untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga kerja rentan dan masyarakat yang berada di garis kemiskinan	
			3. Pengalokasian DBH sawit dan APBD dengan persentase pembagian 80 persen kab/kota dan 20 persen provinsi utk perlindungan pekerja rentan miskin	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
			ekstrem desil 1 dan 2	
		• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil		
		• Penyediaan dan Verifikasi Data Identitas		
		• Menyediakan data kependudukan yang valid (NIK, KK, KTP) sebagai prasyarat utama pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan.		
		• Melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan sistem BPJS, DTKS (Dinas Sosial), dan lembaga lain untuk memastikan data pekerja rentan terverifikasi secara administratif.		
		• Dukungan Pemutakhiran Data DTKS, Bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data identitas dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang digunakan untuk menetapkan penerima bantuan iuran BPJS.		
		• Membantu mempercepat proses registrasi atau koreksi data calon penerima manfaat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap.		
		• BPJS Ketenagakerjaan		
		BPJS Ketenagakerjaan berperan menyelenggarakan perlindungan sosial bagi pekerja melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Perlindungan atas risiko kecelakaan selama bekerja.		
		• Jaminan Kematian (JKm): Santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal.		
		• Jaminan Hari Tua (JHT): Tabungan jangka panjang bagi pekerja saat pensiun.		
		• Jaminan Pensiun (JP): Penghasilan berkala untuk pekerja setelah pensiun.		
		• Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP): Bantuan uang tunai, akses informasi kerja, dan pelatihan bagi pekerja yang terkena PHK.		
		• Kominfo: Publikasi Kegiatan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
14. Revitalisasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Panti Sosial Provinsi		PUPR (Dokumen appraisal, pendampingan, monitoring dan evaluasi untuk revitalisasi panti sosial)	- kab/kota mendukung pelaksanaan pelatihan bimbingan mental, dan pendidikan paket A/B/C bagi penerima manfaat yang dirujuk dari panti sosial provinsi khususnya panti anak dan remaja	
		Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, Disnaker (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan Kerja bagi sasaran Penghuni Panti)	- Kabupaten/Kota bersama Provinsi melakukan pemantauan, evaluasi atas keberlanjutan penerima manfaat.	
		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)		"PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK"
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
PP 5 PENGUATAN STABILITAS MAKRO EKONOMI DAN KESINAMBUNGAN FISKAL DAERAH				

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
15. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Pertanian dan pariwisata	DISBUDPAREKRAF DAN DINAS KETAPANG TPH	• Bappelitbang : Menyelaraskan rencana pengajuan KEK Pariwisata dan Pertanian dengan RPJMD, RTRW, RPJPD, dan RIPPARNAS/RIPPARDA , Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Dinas Lingkungan Hidup : Kajian AMDAL dan pengelolaan lingkungan • Dinas Ketenagakerjaan : Peningkatan Capacity Building Pariwisata dan Pertanian • Dinas Pendidikan : Penguatan Vokasi SMK Pariwisata dan Pertanian • Dinas PUPR : Percepatan Perda RTRW Perubahan, sinkronisasi lokasi KEK pada RTRW • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan • Biro Hukum : Penetapan Regulasi Perda/Pergub	2025: 'Dukungan kab/kota untuk Pengembangan KEK Pariwisata Koordinasi terkait rencana pengajuan DPSP Danau Toba menjadi KEK	
		• DPMPTSP : fasilitasi perizinan	2026: '• Persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba dan Penetapan Lokasi	
			• Penertapan Pebup RTRW; Kesesuaian Dokumen RTRW dan RDTR	
			2027: '• Penyediaan Lahan (Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KEK dalam hal	
			terdapat lahan yang belum dibebaskan)	
			• Peningkatan infrastruktur kewenangan kabupaten (jalan, air, sarana persampahan, sanitasi)	
			• Kemudahan Perizinan Usaha Kewenangan kab/kota	
			2028: '• Peningkatan SDM Pariwisata dan Pertanian	
16. Penguatan Hilirisasi Komoditas Unggulan di Kawasan Industri Sumatera Utara	DISPERINDAG ESDM	• Dinas TPH : Peningkatan Produksi Cabe melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Cabai varietas tahan hama & cocok untuk pengeringan, <i>capacity building</i> bagi petani	Dukungan kab/kota: • Menyediakan Data IKM sektor Kopi, Kelapa, Aren, Cabe (jenis produk, data produksi, nilai omset produksi)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		• Dinas Perkebunan dan Peternakan : Peningkatan Produksi Kelapa, Aren dan Kopi melalui Sarprodi; Pemberian Bibit Kelapa genjah, Kopi Unggu, Aren, <i>capacity building</i> bagi petani • Dinas PUPR : Penguatan Infratraktur Jalan dan Jembatan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Peningkatan <i>capacity building</i> pada IKM (kelapa, cabe, kopi, aren); menyusun regulasi pengembangan hilirisasi,	
			Penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota. Pemasaran, dukungan promosi, <i>capacity buliding</i> diversifikasi produk hilirisasi , Penyediaan Rumah kemasan oleh kab/kota	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
			Menentukan IKM yang akan dilakukan <i>capacity building</i> , menyusun regulasi pengembangan hilirisasi, penguatan kemitraan hilirisasi antar kab/kota, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR atau Koperasi, fasilitasi <i>capacity building</i> standarisasi ekspor bagi pelaku IKM.	
			Dukungan pembiayaan KUR , identifikasi IKM berpotensi untuk dilakukan <i>business matching</i> .	
			<i>Branding</i> Ekspor	
17. BUMD Reform Program (Penguatan Peran BUMD sebagai Motor Ekonomi)	-	Bappelitbang: Penyusunan konsep dan perencanaan kesehatan BUMD, GCG	-	
		Biro Hukum : percepatan fasilitasi regulasi		
		Biro PemOtda : Fasilitasi Kerja sama		
		Diskominfo : Publikasi Kegiatan		
		Inspektorat : Audit BUMD		
18. Pemanfaatan Aset barang milik daerah melalui kerja sama ekonomi	BKAD	Bapenda Provsu : Dukungan dalam proses bisnis pendapatan melalui pemafaatan aset BMD dengan kerja sama ekonomi	Dukungan Pemerintah kab/kota pada pelaksanaan pengamanan BMD dalam penerbitan SKT lahan (Surat Keterangan Kepemilikan Lahan) dari Pemerintah Setempat (Kelurahan atau Kepala Desa)	
		Bappelitbang Provsu : Dukungan dalam penyusunan konsep dan perencanaan		
		Diskominfo : Dukungan dalam penyediaan web aplikasi dan promosi		PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
		OPD Pengguna BMD : Dukungan dalam inventarisir dan pengamanan aset serta pemeliharaan BMD		
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PP.6 PENGEMBANGAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU				
19. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Kelapa, Kopi, Aren)	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi dalam rangka hilirisasi hasil Perkebunan kelapa seperti alat untuk menjadikan air kelapa menjadi minyak kelapa/VCO, dan <i>coconut milk</i> , kemudian biji kopi menjadi kopi bubuk dan kopi ekstrak, kemudian aren menjadi gula aren dan bioetanol	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:	
		2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok pekebun dan alat pengolah hasil produksi kelapa, kopi dan aren;	1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi	
		3. Dinas PMD Dukcapil: untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan	2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan perkebunan	
		4. Diskominfo: untuk publikasi media		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
20. Pengembangan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya	DISKANLA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Pengolahan, pemasaran, dan ekspor produk perikanan.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:	
		Dinas Koperasi dan UKM – Penguatan kelembagaan usaha nelayan/pembudidaya.	- Pendataan kelompok nelayan dan pembudidaya kab/kota	
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Pembangunan infrastruktur pendukung (jalan dan pelabuhan).	- Klasterisasi	
		Dinas Kominfo: Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat	- Sosialisasi dan Edukasi	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			-Replikasi di daerah yang sama	
21. Pengawasan Konservasi Laut SEMESTA (Pemberdayaan Nelayan Sebagai Pasukan Penjaga Laut)	DISKANLA	BAPPELITBANG : Integrasi program SEMESTA dalam perencanaan daerah.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:	
		Dinas Lingkungan Hidup Provsu : Kebijakan dan pemantauan kualitas lingkungan laut.	- Pendataan Nelayan kab/kota	
		Dinas Perhubungan Provsu : Dukungan transportasi laut dan keselamatan pelayaran patroli.	- Klasterisasi	
		Satpol PP Provsu : Penegakan perda terkait konservasi laut.	- Sosialisasi dan Edukasi	
		Dinas Pariwisata Provsu : Sinergi dengan wisata bahari berkelanjutan.		
		Dinas Kominfo Provsu : Publikasi, sosialisasi, dan edukasi masyarakat.		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		Dinas Koperasi & UKM Provsu : Penguatan kelembagaan nelayan pengawas.		
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provsu : Kesiapsiagaan dan tanggap darurat di laut.		
		Inspektorat: Pengawasan dan pendampingan jalannya program		
22. Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir berbasis Masyarakat	DLHK	1. Dinas Kominfo	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DLHK dengan dukungan <i>Stakeholder</i> terkait diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kementerian Kehutanan, Kelompok Masyarakat Pesisir dan LSM/NGO/pemerhati Lingkungan. adapun dukungan kabupaten/kota pada kegiatan ini diantaranya:	
		- Media massa	1. Kolaborasi <i>Multistakeholder</i> dalam kegiatan	
		-Publikasi kegiatan	2. Pemberdayaan Masyarakat: Program rehabilitasi yang sukses tidak hanya tentang menanam pohon, tapi juga tentang memberdayakan masyarakat.	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
		2. Kementerian Kehutanan	3. Membantu dalam proses pengadaan lahan dan memastikan status hukum lahan tersebut jelas	
		- Penyediaan Regulasi	4. Pemerintah kabupaten melakukan pemantauan dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan pertumbuhan mangrove berjalan baik dan program mencapai tujuannya.	
		- Koordinasi program-program		
23. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (PLTS Pompa Air Untuk Irigasi Pertanian/PLTA Mikrohidro dan lainnya)	DISPERINDAG ESDM	TPH : Pembinaan Kelompok Petani dalam penggunaan PLTS . • Bappelitbang : Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan • Inspektorat : Pengawasan Pelaksanaan • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan untuk Tahun 2025-2030:	
			1. Data Kelompok Tani (CPCL) 2. data penentuan lokasi 3. pengadaan lahan 4. Data produksi pertanian; kondisi air 5. Data readiness criteria	
PP 7 KETAHANAN PANGAN MELALUI PENGUATAN NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL AGAR DIVERSIFIKASI HASIL PERTANIAN MENJADI LEBIH PRODUKTIF DAN BERTAMPAK PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LOKAL				
24. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Unggulan Padi, Jagung, Cabai Merah, dan bawang merah	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran krusial dalam pembangunan infrastruktur dasar pendukung pertanian. Ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur penunjang lainnya yang memperlancar distribusi hasil panen dan aksesibilitas kawasan pertanian. Penataan ruang juga menjadi fokus penting untuk memastikan kawasan pertanian unggulan tidak terganggu oleh alih fungsi lahan.	• Memfasilitasi penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat pertanian dasar.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) turut berperan dalam mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil tani, seperti pengeringan, pengemasan, dan pengolahan lanjutan produk padi, jagung, cabai, dan bawang merah. Di sisi perdagangan, dinas ini memastikan akses pasar yang lebih luas dan stabil melalui promosi, fasilitasi perdagangan, dan penguatan sistem rantai pasok. Adanya kegiatan Gerakan pangan Murah membuat Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat berkolaborasi dengan Dinas ketahanan Pangan dan TPH dalam menjalankan kegiatan ini	• Mendorong sinergi antar pemangku kepentingan lokal (petani, penyuluh, BUMDes).	
		3) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) memegang peranan sebagai koordinator perencanaan strategis lintas sektor. Bappelitbang merumuskan arah kebijakan, menyusun rencana aksi, serta memastikan sinergi antar-dinas dalam pengembangan kawasan unggulan.	• Memfasilitasi pembangunan/peningkatan akses jalan produksi di kawasan unggulan.	
		4) Diskominfo (Publikasi)	• Mendukung pembangunan fasilitas pascapanen: gudang, alat pengering, rumah sortasi.	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
			• Mengkoordinasikan petani/UMKM untuk mengikuti pelatihan sertifikasi ekspor dan standar internasional.	
			• Memberikan laporan lengkap atas capaian program, kendala, dan peluang lanjutan.	
			Replikasi di daerah yang sama	
25. Pembentukan dan Pengembangan Kawasan Peternakan unggulan	DISBUNAK	1. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara: Memberikan pelatihan pengemasan izin edar hasil produk, pelatihan pengemasan produk dan sertifikasi halal serta pemberian alat untuk mengolah hasil produksi	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:	
		2. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara: Koordinasi pembentukan dan pelatihan UMKM bagi kelompok peternak	1. Dukungan data CPCL di lokasi intervensi	
		3. Dinas PMD Dukung: Untuk pembentukan dan pemberdayaan BUMDes di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan	2. Melakukan Pembinaan dan pelatihan peningkatan produksi atau peningkatan pasca produksi di lokasi intervensi pengembangan kawasan peternakan 3. Pemberian izin usaha untuk koperasi, UMKM, BUMDes yang mengolah hasil produksi berada di kawasan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
		4. Diskominfo: Untuk publikasi media	4. Replikasi di daerah yang sama	
26. Program Pengembangan Bibit Unggul Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH Provinsi berperan sebagai inisiator utama program. Mereka bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, penyediaan alokasi anggaran, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya, mereka juga menetapkan lokasi uji multilokasi dan mendukung pelepasan varietas secara resmi	PT. Dirga Surya : memasarkan produksi bibit unggul padi	Dinas Pertanian Kabupaten mempromosikan dan menggunakan bibit unggul padi varietas baru.	
27. Fasilitasi Akses Permodalan Terhadap Kelompok Tani	Dinas Ketahanan Pangan dan TPH bertindak sebagai penghubung antara kelompok tani dengan lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, serta lembaga penjaminan kredit. Melalui penyediaan data kelompok tani, pelatihan manajemen usaha tani, serta pembentukan kelembagaan petani yang kuat, dinas	a) Dinas Koperasi dan UKM memiliki peran sentral dalam penguatan kelembagaan kelompok tani melalui pembinaan koperasi tani dan UMKM berbasis pertanian. Dinas ini dapat memfasilitasi akses permodalan bagi kelompok tani melalui penguatan koperasi simpan pinjam, pelatihan manajemen usaha tani, hingga menjembatani kerja sama antara koperasi dan lembaga keuangan.	Memetakan kelompok tani yang layak dan potensial untuk memperoleh akses permodalan, berdasarkan data luas lahan, komoditas yang diusahakan, serta rekam jejak kelembagaan kelompok	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
	membantu petani memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar layak mengakses program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan skema pembiayaan pertanian lainnya.			
		b) Disperindag ESDM berkontribusi dalam mendorong hilirisasi produk pertanian dan menjaga stabilitas harga hasil tani. Melalui penguatan rantai nilai dan pasar hasil tani, dinas ini dapat membuka peluang tambahan pendapatan bagi petani yang dapat digunakan sebagai modal atau premi asuransi.		
		c) Dinas Kominfo memainkan peran dalam penyebarluasan informasi terkait program bantuan iuran premi asuransi dan akses permodalan. Melalui berbagai saluran komunikasi digital dan non-digital, Kominfo dapat menjamin transparansi program, meningkatkan literasi digital kelompok tani, dan mendorong penggunaan teknologi informasi dalam pengajuan permodalan dan asuransi pertanian.		
		e) Dinas Pemdesdukcapil memiliki peran strategis dalam verifikasi dan validasi data kependudukan serta kelembagaan desa sebagai basis penyaluran bantuan. Melalui data kependudukan dan basis kelompok tani di desa, Pemdesdukcapil memastikan agar bantuan permodalan maupun iuran premi asuransi diberikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan riil kelompok tani.		
		f) Diskominfo (Publikasi)		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PP 8 PARIWISATA YANG MENGGERAKKAN POTENSI ALAM LOKAL DI PEDESAAN DAN PERKOTAAN DENGAN MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA LANGSUNG (KOMUNITAS, PEMERINTAH DAERAH/DESA/KELURAHAN DAN PENGUSAHA LOKAL)				
28. Dukungan terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	DISBUDPAREKRAF	KOMINFO : Publikasi Media		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			1. Memastikan keselarasan Program/Kegiatan dalam Rencana Aksi Tahap II telah sesuai dengan Dokumen Perencanaan di daerah (RPJMD Kab & RKPD Kab) dan Integrasi RIPDN kedalam renja OPD	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		DISBUDPAREKRAF : Penguatan Atraksi Budaya dan Pariwisata; Pengembangan SDM dan Ekonomi Kreatif; Promosi dan Pemasaran Destinasi; Pengembangan Infrastruktur dan Amenitas Pariwisata; Kolaborasi dan Sinkronisasi Program; Penguatan Tata Kelola Destinasi;	2. Menyusun rencana aksi tahunan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			3. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba 4. Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik)	
		PERAN BPODT (Badan Pelaksana Otorita Danau Toba) : Koordinasi Pengelolaan Kawasan Pariwisata Strategis; Pengembangan infrastruktur dan Investasi; Promosi dan Branding Kawasan; Pengembangan SDM dan Ekosistem Wisata	5. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi;	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
			6. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;	
		PERAN BAPPELITBANG (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) : Integrasi Perencanaan Pengembangan DPP Danau Toba; Sinkronisasi Program Daerah dengan Nasional; Litbang & Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata; Dukungan Kebijakan Inovatif & Kolaboratif	7. Pendampingan Desa Wisata;	
			8. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif;	
		Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/159/KTPS/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja P3TB Provinsi Sumatera Utara, seluruh Opd Pemprov yg termasuk dalam SK Gubsu tersebut berperan dalam mendukung Pengembangan DPSP Danau Toba sesuai dengan Rencan Aksi yang disusun	9. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa Travel Agent));	
			10. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata	
			11. Pelaksanaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional	
29. Pengelolaan dan Penataan Kawasan Toba Caldera UGGp dan Kawasan Geopark lainnya	DISBUDPAREKRAF	1. DISBUDPAREKRAF : Penyaluran Belanja Operasional BP TCUGGp; Pembangunan <i>Visibilities di</i> Geosite; Pelatihan dan Pembinaan Pelaku Pariwisata dan Pengelola Desa Wisata; Identifikasi dan Penetapan Cultural Heritage di Kawasan Geopark; Melaksanakan <i>Event Geofest</i> . 2. DINAS Koperasi &UMK: Melakukan Pelatihan & Pembinaan UMKM terutama di Kawasan <i>Geosite</i> ; 3. Dinas Pendidikan: Melaksanaa kegiatan <i>Geopark to School</i> dan edukasi terkait Geopark kepada pelajar; 4. Dinas PUPR : Peningkatan kualitas jalan/jembatan di ruas jalan Provinsi yang menghubungkan antar geosite; 5.Bappelitbang: Melaksanakan penelitian terkait <i>Geological Heritage/Natural/Biological Heritage/Cultural Heritage</i> di Kawasan Toba Caldera UGGp maupun di Kawasan Geopark yang baru; 6. BPBD : Mitigasi Bencana & Sosialisasi; 7. Dinas LHK : Pelestarian Hutan dan ekosisten di Kawasan Danau Toba 8. Dinas Kominfo: Publikasi kegiatan;	1. Memastikan ketersediaan dukungan anggaran dalam pengelolaan Geosite di masing-masing Kabupaten;	
			2. Penyusunan muatan Lokal;	
			3. Bekerja sama dengan BP dalam melaksanakan sosialisasi & edukasi kepada Masyarakat, Pelaku Wisata, Pelajar dan ASN tentang <i>Geopark</i> ;	
			4. Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terutama dalam pengembangan Geoproduk;	
			5. Mengidentifikasi dan menginventarisasi serta melakukan penelitian terkait potensi <i>Geological Heritage, Biological/Natural Heritage</i> dan <i>Cultural Heritage</i> ;	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
			6. Rutin melaksanakan <i>Event GeoFest</i> ;	
			7. Menyusun kajian awal terkait Kawasan Geopark baru;	
			8. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi;	
			9. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;	
			10. Pendampingan Desa Wisata;	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
			11. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Jasa Travel Agent);	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			12. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
30. Pembentukan & Pengembangan Kawasan Strategis Budaya, Parawisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi yang Terintegrasi (TATABUSE, SIBANDAN, SIPUAN, KARDAPAK dan BAHLIKE)	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Pembangunan Kawasan (jika ada pembangunan fisik); Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan.	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, sementara kabupaten/kota berperan dalam:	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		2.467.287.986	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis; 2. Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik);	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			3. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi;	
			4. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;	
			5. Pendampingan Desa Wisata;	
			6. Pendataan Potensi Unggulan Daerah di bidang Kebudayaan, Pariwisata & Ekonomi Kreatif;	
			7. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa Travel Agent));	
			8. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 9. Pendataan dan inventarisasi pelaku UMKM; 10. Pendampingan kepada pelaku UMKM;	
			11. Pelaksaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional	
31. Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Sumatera Utara	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Koperasi & UMKM: Pelatihan dan Pembinaan kepada UMKM di Kawasan. 2. Dinas PUPR: Peningkatan Akses Ruas Jalan Provinsi menuju Kawasan. 3. Dinas PMD: Pelatihan dan Pembinaan pengelola BUMDes Wisata 4. Dinas Kominfo: Penyediaan Failitas Digital di Kawasan; Publikasi Kegiatan 5. Dinas Pendidikan: Edukasi kepada pelajar tentang Situs Cagar Budaya	1. Memastikan ketersediaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Provinsi; 2.Penyediaan Lahan yang Clean & Clear (jika terdapat pembangunan fisik); 3. Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Tingkat kab/kota; 4. Pembentukan Pengelola Kawasan Situs Cagar Budaya; 5. Melaksanakan Program edukasi kepada masyarakat dan pelajar tentang Kawasan Situs Cagar Budaya; 6. Pendataan, Inventarisasi, Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya di kab/kota	
			7. Pembentukan Desa Wisata sesuai dengan potensi;	
			8. Pembentukan Tata Kelola / Kelembagaan untuk Desa Wisata;	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
			9. Pendampingan Desa Wisata;	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			10. Pendataan jumlah Pelaku Usaha Industri Pariwisata (Usaha Penyediaan Makan-Minum, Penyediaan Akomodasi (Homestay/Hotel), Penyedia Jasa Transportasi, Penyeda Jasa Travel Agent));	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			11. Pendampingan Pelaku Usaha Pariwisata; 12. Pendataan dan Pendampingan UMKM;	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			13. Pelaksanaan Event Budaya, Pariwisata dan Ekonomi Keratif berskala Nasional	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
32. Pelaksanaan Event Internasional, pengembangan paket wisata dan digitalisasi promosi pariwisata global	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan: Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat event internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan: Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM: Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksaan event internasional 4. Dinas Kominfo: Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra event-event-pasca event internasional; publikasi kegiatan	1. Pelaksanaan Side Event saat pelaksanaan Event Internasional;	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
		5. Satpol PP: Keamanan Pelaksanaan Event dan ketertiban penyelenggaraan acara 6. Dinas Pemuda dan Olahraga; Pembinaan Pemuda untuk partisipasi dalam penyelenggaraan event (sport, <i>e-sport</i> , dsb)	2. Pelaksanaan Promosi melalui media digital dan cetak;	
			3. Sosialisasi & Edukasi kepada Pelaku Usaha Pariwisata (Penyedia Jasa Akomodasi (Hotel & Homestay),Penyedia Jasa makan-minum, Penyedia Jasa Transportasi, dan Travel Agent); 4. Pendataan & pendampingan terhadap UMKM; 5. Memastikan kelancaran aksesibilitas terutama saat pelaksanaan Event internasional (Pengaturan lalu lintas; Peningkatan kualitas jalan)	
PP 9 EKONOMI KREATIF DAN INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI				

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
33. Sentra industri kreatif di Kawasan Sport Center Sumatera Utara	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas PUPR: Pembangunan Sentra Industri Kreatif 2. Biro Perekonomian : Menyusun Kajian pembentukan BLUD; Pembentukan BLUD pengelola Sentra Industri Kreatif. 3. Dinas PerindagESDM: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan IKM Kreatif. 4. Dinas Koperasi UMK: Pendataan, Pelatihan & Pembinaan UMKM 5. Dinas Kominfo : Penyediaan Fasilitas Digital (Internet, dll) di Kawasan Sentra Industri Kreatif; Publikasi Kegiatan	1. Pendataan Pelaku Industri Kreatif & Data UMKM Potensial; 2. Kurasi Pelaku Ekonomi Kreatif; 3. Fasiitasi HAKI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; 4.Pelaksanaan Event Ekonomi Kreatif secara rutin di Sentra Industri Kreatif; 5. Promosi terkait Sentra Industri Kreatif melalui media digital dan cetak;	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
34. Sumut digital market dan galeri virtual produk UMKM kreatif	DISKOP UMKM	KOMINFO : Publikasi Media	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - Pendataan UMKM binaan kab/kota	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan	- Kurasi Produk UMKM - Klasterisasi UMKM yang dapat dimasukkan ke dalam Galeri	
			- <i>Capacity Building</i>	
		DISKOP UKM : Pendataan dan Kurasi Produk UMKM; Pelatihan dan Literasi Digital UMKM; Pembangunan dan Pengelolaan Platform; Promosi dan Akses Pasar; Pendampingan dan Skema Dukungan Lanjutan		
PP 10 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN				
35. Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Bappelitbang	Seluruh Perangkat Daerah	1. Penyusunan dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs kab/kota se-Sumut tahun 2025-2030 2. Dukungan pelaksanaan skema BRS Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs : identifikasi UMKM/IMK serta pelaku usaha 3. Dukungan pelaksanaan <i>North Sumatera SDGs Action Awards</i>	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			4. Dukungan proses penginputan E- Monev Kabupaten/Kota	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
			5. Peningkatan Kapasitas untuk implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	
36 kerja sama APIP dan APH dalam Pendampingan Proyek Strategis dan Kegiatan Unggulan Daerah melalui pendampingan sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan dan serah terima kegiatan proyek strategis	Inspektorat	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Inspektorat kab/kota : Koordinasi Pengawasan dengan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terkait pelaksanaan Proyek Strategis yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		Perangkat Daerah yang memiliki Proyek Strategis		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PP 11. TRANSFORMASI DIGITAL DAN INOVASI TEKNOLOGI PADA PELAYANAN PUBLIK DAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT				
37. Pemanfaatan Satu Data SUMUT pusat data dan informasi pembangunan	Dinas Kominfo	Seluruh OPD menginput data statistik sektoral	Replikasi aplikasi, menyediakan SDM, menyiapkan regulasi terkait	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
				PROGRAM STATISTIK SEKTORAL
PP 12. INFRASTRUKTUR DENGAN PRIORITAS JALAN, JEMBATAN, DAN IRIGASI YANG LANGSUNG BERDAMPAK PADA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT LOKAL				
38. Pembangunan Ruas Jalan Baru Penghubung Wilayah Terisolir atau Strategis yang Merupakan kewenangan Provinsi	Dinas PUPR	Dinas Kominfo, untuk publikasi kegiatan, Dinas LHK mendukung proses penyusunan dokumen lingkungan, AMDAL dan izin pinjam pakai Hutan, Dinas Perhubungan untuk penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan, Biro Adpem melaksanakan money terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Memberikan dukungan administratif atas pembangunan jalan yang berada di wilayah kewenangannya, mendukung penyediaan lahan pada trase jalan serta perizinan 2. Menyelaraskan program jalan dengan perencanaan pembangunan daerah dan usulan prioritas lokal. 3. Melaksanakan koordinasi teknis lapangan dan penyedia data kondisi eksisting jalan serta kebutuhan daerah.	
39. Pemerataan Infrastruktur Layanan Dasar bagi Kawasan Afirmasi, Terluar, dan Terpencil untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan, AMDAL, Dinas Kominfo untuk publikasi kegiatan, Biro Adpem melaksanakan money terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota: Menyediakan lahan, mengarahkan program RTLH (Air Minum dan Sanitasi), menetapkan penerima bantuan, dan mengalokasikan anggaran daerah.	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
		pengawasan		
			2. Dinas Perumahan Rakyat kab/kota: Pelaksana utama di lapangan yang mengurus pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan.	
			3. Dinas PUPR kab/kota: Memberikan dukungan teknis konstruksi, membuat RAB, dan mengawasi pelaksanaan di lapangan.	
			4. Dinas Sosial kab/kota: Membantu memperbaiki dan memverifikasi data kemiskinan lokal.	
			5. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada kab/kota: Melakukan identifikasi penerima bantuan, sosialisasi, memfasilitasi gotong royong, serta membantu pemantauan di lapangan.	
PP13. PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK DAN TRANSPORTASI YANG MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN DAYA SAING				
40. Dukungan Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Melalui Pembangunan BRT dan Peningkatan Kereta <i>Commuter</i>	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Organisasi membentuk kelembagaan (BLUD) BRT Mebidang, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	Dinas Perhubungan Kab/Kota Pelaksana operasional harian, koordinator lapangan.	
			Kota Binjai: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT	
			Kab. Deli Serdang: Dukungan penetapan lokasi lahan depo BRT	
41. Subsidi Transportasi Bus Perintis untuk Daerah- Daerah Terpencil	Dinas Perhubungan	Dinas Kominfo untuk publikasi Media, Dinas PUPR terkait penyelenggaraan Jalan Provinsi (jika trayek melalui jalan provinsi) Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, Biro Adpem melaksanakan monev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Inspektorat melaksanakan pengawasan	1. Koordinasi dan Penyediaan Data: Pemerintah kabupaten/kota berperan menyediakan data dan kebutuhan daerah terkait angkutan perintis serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar subsidi dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil yang membutuhkan akses transportasi.	
			2. Fasilitasi Pelaksanaan Program: Kabupaten/kota membantu pelaksanaan program subsidi dengan memastikan armada bus perintis dapat beroperasi di wilayahnya, menyediakan dukungan administratif, dan memantau pelaksanaan layanan agar berjalan lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu penyediaan fasilitas pendukung untuk kelancaran operasional, berupa lahan untuk titik keberangkatan	
			3. Penentuan Rute dan Kebijakan Lokal: Pemerintah daerah menetapkan rute bus perintis yang strategis sesuai kebutuhan wilayah dan sinkron dengan program nasional, serta mengeluarkan kebijakan pendukung agar subsidi bisa dimanfaatkan optimal untuk membuka keterisolasian daerah, yaitu pengusulan dan penetapan trayek dan sosialisasi program kepada masyarakat serta kesiapan infrastruktur jalan di kabupaten dalam kondisi layak dan aman, yang akan dilalui oleh trayek	
			4. Pengawasan dan <i>Monitoring</i> : Kabupaten/kota melakukan pemantauan operasional bus perintis di lapangan untuk memastikan layanan tetap berjalan dengan baik, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah terpencil.	
PP 14. PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN DAN				

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA				
42. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk dokumen lingkungan dan AMDAL, BPBD menyusun kajian resiko bencana, rencana mitigasi, dan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat pada wilayah bencana, Diskominfo untuk publikasi kegiatan	1. Penyediaan Data dan Koordinasi: Kabupaten/kota berperan menyediakan data wilayah yang terdampak banjir serta kebutuhan teknis di lapangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan bisa tepat sasaran dan efektif (BPBD) 2. Fasilitasi Pelaksanaan dan Administrasi: Kabupaten/kota membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan dengan menyediakan dukungan administratif, perizinan, penyediaan lahan, dan tenaga lokal di wilayahnya (PUPR) 3. Pemeliharaan dan Pengawasan: Setelah pembangunan infrastruktur pengendali banjir dilakukan, pemerintah kabupaten/kota turut bertanggung jawab melakukan pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian agar fasilitas yang dibangun tetap berfungsi sesuai perencanaan dan umur yang diharapkan (PUPR) 4. Pemberdayaan Masyarakat dan Kolaborasi: Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah provinsi dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan pengendalian banjir melalui manajemen drainase, normalisasi sungai, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (LHK, Dinas PKP kab/kota) 5. Penyesuaian Kebijakan Lokal: Kabupaten/kota juga menetapkan kebijakan lokal yang mendukung implementasi program pengendalian banjir provinsi, termasuk pengelolaan tata ruang dan penggunaan teknologi mitigasi banjir (LHK, Dinas PKP kab/kota, BPBD)	
43. Pembangunan TPST Regional	Dinas PUPR : pelaksana	PUPR:	1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah	
		-Penyiapan dokumen Lingkungan,	2. Penyediaan dan penentuan lokasi	
		-Dalam pembuatan FS dan DED, dan pembangunan infrastruktur serta pendukungnya,	3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	
		Dinas LHK :	4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan	
		- Dukungan dalam proses penyusunan dokumen lingkungan hidup	5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan	
		-Biro Adpem melaksanakan movev terhadap pelaksanaan dan evaluasi,	6. Dukungan SDM	
		-Dinas Kominfo untuk publikasi media		
44. Pembangunan PLTSa	DISPERINDAG ESDM	• PUPR : Pembangunan TPST	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan:	
		• LHK: Pengelolaan Sampah • Dinas Kominfo : Dukungan Publikasi Kegiatan	Lahan dan wilayah untuk pembangunan PLTSa, Penerapan Sistem Persampahan Terpilah	
			Perizinan	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
			1. Penyusunan peraturan atau SK terkait pengelolaan sampah terpilah	
			2. Penyediaan dan penentuan lokasi	
			3. Dukungan pengumpulan sampah terpilah oleh Dinas Lingkungan Hidup kab/kota	
			4. Dukungan pengangkutan sampah terpilah ke tempat pengolahan	
			5. Dukungan pemilahan sampah terpilah dan pra pengolahan	
			6. Dukungan SDM	
45 Pengembangan SPAL Regional	Dinas PUPR	Dinas LHK untuk penyediaan dokumen lingkungan dan AMDAL, PDAM dalam peningkatan layanan, Biro Adpem melaksanakan movev terhadap pelaksanaan dan evaluasi, Dinas kominfo untuk publikasi media	1. Perencanaan tata ruang (PKP Tata Ruang)	
			2. Membuat regulasi dan menerbitkan perizinan (LHK, DPMPTSP)	
			3. Sosialisasi kepada masyarakat (Dinas Kesehatan)	
			4. Dukungan penyediaan lahan (PKP Tata Ruang)	
			5. Menyediakan alokasi anggaran (BKAD)	
			6. Pembentukan kelembagaan untuk mengelola operasional IPLT (Biro Organisasi)	
46. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati	DLHK	1. Biro Pem Otda	1. Dukungan terhadap pengadaan lahan	
		- SK Penlok	2. Penetapan Taman Kehati pada RTRW kab/kota	
		2. BPN		
		- Sertifikat Lahan		
		3. Diskominfo		
		- Publikasi Media		
PP 15. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA				
47. Penguatan Ekonomi Desa untuk Mengurangi Ketergantungan pada Pusat Kota dengan Penguatan Ekonomi Lokal melalui Pembuatan Master Plan Desa Produktif dan Mandiri.		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	-Menyediakan data potensi desa yang akurat termasuk peta sebaran komoditi unggulan.	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
		Dinas Perkebunan (Pemberian bantuan/pelatihan pengembangan komoditas gula aren, kopi, dan kelapa kepada kelompok yang terdapat pada desa yang menjadi sasaran intervensi kegiatan ini)	-Memperbaiki jalan produksi, pasar desa, gudang, sentra dan pengolahan	
			-Memfasilitasi kerja sama antar desa atau antar BUMDes untuk memperkuat rantai pasok.	
			-Memfasilitasi sertifikasi produk (halal, organik, SNI) untuk meningkatkan daya saing.	
			-Pembinaan Penggunaan dana desa untuk ekonomi desa pada Lokus yang di intervensi	
48. Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan bagi Pengelola BUMDES		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	- Menugaskan tenaga pendamping desa atau penyuluh ekonomi untuk mendampingi operasional BUMDES.	Administrasi Pemerintahan Desa
		Disperindag, Dinas Koperasi UMKM, (Dukungan Pelatihan dan Keterampilan bagi pengelola BUMDES/Masyarakat Desa).	- Memfasilitasi akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung pemasaran digital.	
			- Memfasilitasi sertifikasi kompetensi pengelola BUMDES melalui lembaga pelatihan resmi.	
PP 16. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL DAN BUDAYA YANG MENDUKUNG SUASANA YANG HARMONIS, TOLERAN DAN RUKUN				
49. Bantuan Hibah Rumah Ibadah di 33 Kabupaten/Kota	Biro KESRA	Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	-	
		Inspektorat (pendampingan menyeluruh dan tinjauan terhadap tata kelola pemberian bantuan hibah rumah ibadah)		
50. Festival Seni dan Budaya Daerah	DISBUDPAREKRAF	1. Dinas Perhubungan : Memastikan ketersediaan transportasi dan lalu lintas saat <i>event</i> internasional dilaksanakan 2. Dinas Kesehatan : Dukungan Tenaga Kesehatan dan Ambulans 3. Dinas Koperasi &UMKM : Pelatihan dan pendampingan UMKM untuk mendukung pelaksa ⁿ <i>event</i> internasional 4. Dinas Kominfo : Memastikan ketersediaan jaringan digital saat pra <i>event-event</i> -pasca <i>event</i> internasional; publikasi kegiatan 5. Satpol PP : Keamanan Pelaksanaan <i>Event</i> dan ketertiban penyelenggaraan acara	1. Memastikan ketersediaan anggaran dalam mendukung Proyek Strategis Provinsi; 2. Pelatihan dan pembinaan Sanggar Kesenian Daerah; 3. Pendataan/Inventarisasi potensi Festival Seni Budaya di masing-masing daerah; 4. Memastikan kontinyuitas pelaksanaan Festival Seni Budaya di masing-masing daerah 5. Promosi pelaksanaan Festival Seni-Budaya; 6. Penyusunan Kalender Budaya	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
51. Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat		Dinas Pendidikan (Koordinasi rekomendasi satuan pendidikan yang membutuhkan pembekalan terhadap edukasi wawasan kebangsaan)	Replikasi pelaksanaan kegiatan Edukasi dan Pembekalan Solidaritas, Ketahanan Sosial Dan Wawasan Kebangsaan bagi Organisasi Masyarakat Dan Kelompok Masyarakat di Kabupaten/kota	

PROYEK STRATEGIS	PERANGKAT DAERAH		DUKUNGAN kab/kota	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN DALAM RPJMD KARO 2025-2029
	UTAMA	PENDUKUNG		
		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
PP 17. TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG LEBIH AMAN DAN TERTIB				
52. Patroli Gabungan untuk Narkoba di Pintu Masuk Narkoba dan Kawasan-Kawasan Kenakalan Remaja (Genk Motor).	Satpol PP	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba)	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota terkait dukungan personel dalam pelaksanaan kegiatan.	
		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Kesbangpol (Penyediaan data dan peta daerah rawan narkoba di Kab/Kota)	
53. Pemberantasan Pengguna dan Bandar Narkoba melalui Pemindahan Gembong Narkoba dari Lapas ke Nusakambangan		Dinas Kominfo (Publikasi Kegiatan)	Penguatan pencegahan narkoba di pemerintahan daerah	
		Dinas Perhubungan (pengaturan lalu lintas untuk pemindahan gembong narkoba)		
		Satpol PP (pendampingan saat pemindahan gerbong narkoba)		

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah selama 5 (lima) tahun dibutuhkan suatu ukuran yang disajikan dengan indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karo pada masa periode RPJMD Tahun 2025-2029. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya. Selain itu, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah dalam jangka menengah serta dukungan terhadap pencapaian IKU dan IKD, pemerintah daerah Kabupaten Karo menetapkan indikator makro pembangunan tersebut tersebut menjadi parameter keberhasilan pembangunan Kabupaten Karo, sekaligus memberi dukungan bagi pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional.

4.2.1. Indikator Kinerja Makro Kabupaten Karo

Indikator kinerja makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan Kabupaten Karo terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan manusia dan Rasio Gini. Indikator makro selain menjadi parameter keberhasilan pembangunan di Kabupaten Karo, juga sebagai indikator pendukung dalam pencapaian indikator kinerja makro pembangunan provinsi dan nasional. Proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Karo mulai tahun 2025 sampai 2029 sebagai berikut.

Tabel 4.7
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Karo Tahun 2025-2030

No	Indikator Makro Pembangunan	Baseline Tahun 2024	Satuan	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,22	Persen	4,90-5,27	5,46-5,83	6,03-6,40	6,59-6,96	7,15-7,53	7,71-8,10
2	PDRB perkapita (Rp Juta)	67,69016	Rp Juta	75,24-75,51	82,17-82,76	89,73-90,67	98,03-99,27	107,10-109,02	116,94-119,68
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,52	persen	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55	2,54
4	Tingkat Kemiskinan	7,37	Persen	6,20-6,53	5,36-4,79	4,40-3,70	3,61-2,86	2,98-2,15	2,46-1,62
5	Rasio Gini	0,214	Rasio	0,214	0,214	0,213	0,212	0,212-0,210	0,210
6	Indeks Pembangunan Manusia	77,49	Indeks	76,90-77,40	77,60-78,20	78,30-78,90	79,00-79,60	80,52-81,02	81,50-82,00
7	Penurunan Emisi GRK	N/A	ton CO2 Eq2	130.888	154.234	178.546	201.987	223.175	245.678
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,21	Indeks	79,23	79,46	79,69	79,92	79,92	80,3
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,4	persen	2,38-2,07	2,27-1,98	2,15-1,88	2,09-1,74	2,02-1,57	1,90-1,40

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2025 (diolah)

4.2.2. Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan tujuan pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disebut IKU pemerintah daerah, memuat indikator kinerja sebagai tolok ukur penilaian kinerja Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2025-2029. IKU pemerintah daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. IKU Perangkat Daerah yang secara langsung mendukung pencapaian IKU pemerintah daerah memiliki makna bahwa Perangkat Daerah tersebut secara tugas dan fungsi memiliki peran lebih dominan dibandingkan dengan IKU perangkat daerah lainnya dalam pencapaian indikator kinerja dari setiap misi pembangunan jangka menengah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2025-2030 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Karo Tahun 2025-2030

N O	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	69,9	70,1	70,4	70,8	71,3	71,8	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	
3	Indeks Inovasi Daerah	Angka	63	64	65	66	67	68	
4	Indeks Integritas	Angka	77	78	79	79	80	80	
5	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
6	Nilai SAKIP kabupaten	Nilai	61	61,25	61,5	61,75	62	62,5	
7	Indeks Pelayanan Publik.	Angka	3,7	3,8	3,9	4	4,01	4,02	
8	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	75,7	75,8	75,9	76	76,1	76,2	
9	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	96	97	98	99	100	100	
10	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	%	45	45	45	45	45	45	
11	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	73	73,5	74	74,5	75	75	
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4.90-5.27	5.46-5.83	6.03-6.40	6.59-6.96	7.15-7.53	7.71-8.10	
13	Tingkat Kemiskinan	%	6.20-6.53	5.36-4.79	4.40-3.70	3.61-2.86	2.98-2.15	2.46-1.62	
14	Rasio Gini	Rasio	0,214	0,214	0,213	0,212	0,212	0,21	
15	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55	2,54	
16	PDRB perkapita (Rp Juta)	Rp. Juta Per Tahun	75.24-75.51	82.17-82.76	89.73-90.67	98.03-99.27	107.10-109.02	116.94-119.68	
17	Tingkat Inflasi	%	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	
18	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,28	82,3	82,32	82,34	82,36	82,4	
19	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	76.90-77.40	77.60-78.20	78.30-78.90	79.00-79.60	80.52-81.02	81.50-82.00	
20	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10.13-10.25	10.26-10.35	10.36-10.40	10.41-10.46	10.47-10.40	10.41-10.45	
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.27-13.37	13.38-13.49	13.50-13.61	13.62-13.62	13.74-13.80	13.81-13.85	
22	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	59,9	61,3	62,6	63,8	65	66,2	
23	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,303	0,302	0,301	0,3	0,299	0,298	
24	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri	%	3,9	5,4	6,6	7,7	9,3	10,4	
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.38-2.07	2.27-1.98	2.15-1.88	2.09-1.74	2.02-1.57	1.90-1.40	
26	Rasio kewirausahaan daerah	Rasio	4,11	4,15	4,22	4,3	4,37	4,41	
27	Rasio volume	%	1,95	1,95	1,96	1,97	1,98	1,99	

N O	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	usaha koperasi terhadap PDRB								
28	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Angka	65	66	67	68	69	70	
29	Penurunan Emisi GRK	TON CO2 EQ	130.888	154.234	178.546	201.987	223.175	245.678	
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	79,23	79,46	79,69	79,92	79,92	80,3	
31	Indeks Risiko Bencana	Angka	103	102,5	102	101,5	101	100,5	
32	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	
33	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Angka	3.04-0	3.1-1.3	3.2-1.4	3.3-1.5	3.4-1.6	3.5-1.7	
34	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	40	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	
35	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (<i>shared development indicators</i>) pusat-daerah	%	82	84	86	88	90	92	

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2025 (diolah)

4.2.3. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada masa jabatan pemerintah daerah. Indikator Kinerja Daerah disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintah Daerah.

Indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) atau Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKU PD/IKK merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang juga merupakan IKU pemerintah daerah, serta indikator kinerja sasaran seluruh Renstra Perangkat Daerah yang juga merupakan IKU perangkat daerah. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan indikator kinerja mulai dari IKU pemerintah daerah dan perangkat daerah memberikan gambaran kinerja pembangunan jangka menengah Kabupaten Karo Tahun 2025-2029. Gambaran kinerja ini dapat juga disebut *cascading* yang merupakan penjabaran dan penyelarasan indikator kinerja mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai paling rendah. Penetapan indikator kinerja kunci Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 selanjutnya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2026-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,27	82,28	82,3	82,32	82,34	82,36	82,4	
2	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	193,25	195,775	198,267	200,71	203,111	205,454	207,738	
3	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	m3/detik	0	1	2	3	4	5	6	
4	Rasio Penduduk	%	47,42	47,271	47,194	47,192	47,292	47,465	47,668	
5	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,35	1,308	1,273	1,232	1,197	1,153	1,112	
6	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,48	0,49	0,51	0,52	0,53	0,54	0,55	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	72,21	79,23	79,46	79,69	79,92	79,92	80,3	
8	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Aman	%	3,64	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,8	
9	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	-	130.888	154.234	178.546	201.987	223.175	245.678	
10	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	38,12	38,12	38,3	38,5	38,7	38,9	39,1	
11	Timbulan sampah yang ditangani	%	78,03	78,03	78,03	78,05	78,05	78,075	78,075	
12	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Udernourishment)	%	0	6,12	6,11	6,1	6,09	6,08	6,07	
13	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	535,8	529	559	593	632	675	723	
14	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103,81	103	102,5	102	101,5	101	100,5	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	77,49	76.90-77.40	77.60-78.20	78.30-78.90	79.00-79.60	80.52-81.02	81.50-82.00	
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,4	2.38-2.07	2.27-1.98	2.15-1.88	2.09-1.74	2.02-1.57	1.90-1.40	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,22	4.90-5.27	5.46-5.83	6.03-6.40	6.59-6.96	7.15-7.53	7.71-8.10	
4	Tingkat Kemiskinan	%	7,37	6.20-6.53	5.36-4.79	4.40-3.70	3.61-2.86	2.98-2.15	2.46-1.62	
5	Rasio Gini	Rasio	0,214	0,214	0,214	0,213	0,212	0,212	0,21	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	2,52	2,59	2,58	2,57	2,56	2,55	2,54	
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,54	2,74	2,94	3,14	3,39	3,64	3,89	
8	Kontribusi Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	11,36	11,58	11,81	12,04	12,28	12,52	12,77	
9	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	67,69	75.24-75.51	82.17-82.76	89.73-90.67	98.03-99.27	107.10-109.02	116.94-119.68	
10	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	0,55	0,576	0,585	0,594	0,603	0,613	0,622	
11	Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi	%	0	17	18,5	20	22	24	25	
12	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	0,34	0,35	0,38	0,4	0,43	0,46	0,5	
13	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	89	89	89	89	89	89	89	
14	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	72,44	73	73,5	74	74,5	75	75	
15	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan dan Perindustrian terhadap Pertumbuhan Ekonomi	%	0,89	0,9	0,93	0,97	1,02	1,07	1,13	
16	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	58,49	59,9	61,3	62,6	63,8	65	66,2	
17	Koperasi yang meningkat unit usahanya	%	2	2	12	12	12	12	12	
18	Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Â Numerasi SD	%	70,68	73,18	75,68	78,18	80,68	83,18	85,68	
19	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kasus	6	5	4	4	4	4	4	
20	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi SMPÂ	%	72,79	75,29	77,79	80,29	82,79	85,29	87,79	
22	Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca SD	%	70,85	73,35	75,85	78,35	80,85	83,35	85,85	
23	Persentase Peserta Didik yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca SMP	%	74,56	77,06	79,56	82,06	84,56	87,06	89,56	
24	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	10,12	10.13-10.25	10.26-10.35	10.36-10.40	10.41-10.46	10.47-10.50	10.51-10.56	
25	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,26	13.27-13.37	13.38-13.49	13.50-13.61	13.62-13.73	13.74-13.80	13.81-13.85	
26	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,5	25,5	
27	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,19	2,18	2,16	2,15	2,14	2,13	2,12	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
28	Skor Kemampuan Numerasi peserta didik Sekolah Dasar (SD)	Nilai	53,26	56,16	59,06	61,96	64,86	67,76	70,66	
29	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan	%	0	45	45	45	45	45	45	
30	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	57,69	
31	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,304	0,303	0,302	0,301	3	0,299	0,298	
32	Persentase Prasarana Rumah Sakit sesuai standar	%	80	82	85	90	92	95	95	
33	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	70,88	71,88	72,88	73,88	74,88	75,88	76,88	
34	Persentase Sarana Rumah Sakit sesuai standar	%	80	82	85	87	90	92	95	
35	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	%	29,29	32,82	37,5	40	42,5	45	47,5	
36	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,98	2,98	2,98	2,5	2,5	2	2	
37	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/ Demand Satisfied	%	67,1	67,8	67,9	68	68,2	68,5	69	
38	Rate nett recent migrasi	%	2,11	2	1,8	1,6	1,4	1,2	1	
39	Persentase koperasi aktif	%	51	52	54	57	62	64	67	
40	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/D IV	%	73,04	72,67	73,42	74,17	74,92	75,67	76,42	
41	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100	
42	Angka Partisipasi Kasar SD	%	101,85	101,9	102	102,2	102,3	102,4	102,5	
43	Skor Kemampuan Literasi peserta didik Sekolah Dasar (SD)	Nilai	58,86	61,36	63,86	66,36	68,86	71,36	78,36	
44	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	0	0	0	0	0	0	0	
45	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	68,8	76,5	81,4	84,5	86,5	86,5	87,8	
46	indeks Lansia Berdaya	Indeks	60,2	61,3	62,4	63,5	64,6	65,7	66,8	
47	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-15 tahun	Nilai	98,38	98,5	98,61	98,73	98,84	98,96	9.908	
48	Persentase keakuratan data program perlindungan jaminan sosial	%	58,59	58,59	58,59	58,59	58,59	58,59	58,59	
49	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0	0	0	0	0	0	0	
50	Iklim Kebinekaan SD	%	69,88	70,88	71,88	72,88	73,88	74,88	75,88	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
51	Skor Kemampuan Literasi Peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Nilai	68,72	69,82	70,92	72,02	73,12	74,22	75,32	
52	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,25	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49	0,5	
53	Persentase balita gizi buruk	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
54	Kehamilan tidak diinginkan	%	14,5	11,6	9,8	8,9	8,3	8,3	8	
55	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	85,9	85,92	85,96	85,99	86,2	86,44	86,6	
56	Indeks Pengasuhan Keluarga Yang memiliki Remaja	Indeks	83,5	84,8	86	87,1	88,1	89	90	
57	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	33,3	35	37	39	42	45	47	
58	Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	58	58,5	59	59,5	60	60,5	61	
59	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (sengketa)	Angka	1	0	0	0	0	0	0	
60	Persentase Kampung Keluarga Berencana Berkualitas Mandiri	%	37,2	39,4	41,7	44,2	46,8	49,6	50	
61	Skor Kemampuan Numerasi Peserta didik Sekolah Menegah Pertama (SMP)Ā	Nilai	62,05	63,55	65,05	66,55	68,05	69,55	71,05	
62	Iklim Keamanan SMP	Nilai	68,35	69,85	71,35	72,85	74,35	75,85	77,35	
63	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Tingkat Inflasi	%	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	3-1	
2	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,29	4,33	4,34	4,36	4,38	4,4	4,4	
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (% PDRB)	%	0,21	0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	31,8	31,91	32,02	32,13	32,24	32,35	32,46	
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,02	63	64	65	66	67	68	
6	Belanja Riset (% APBD)	%	0,03	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	
7	Kontribusi industri pengolahan	%	3,82	3,85	3,88	3,92	3,95	3,98	4,02	
8	Angka Ketergantungan	%	0	47,271	47,194	47,192	47,292	47,465	47,668	
9	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	84,13	84,26	84,36	84,4	84,44	84,48	84,53	
10	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	%	63	65	68	71	73	75	77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	0	65	66	67	68	69	70	
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,95	1,95	1,95	1,96	1,97	1,98	1,99	
13	Persentase UMKM Naik Kelas	%	0,35	0,38	0,64	1,28	1,28	1,3	1,35	
14	persentase peningkatan PAD	%	1,86	3,09	3,11	3,13	3,15	3,17	3,19	
15	Persentase Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan yang terkelolaA denganA baik	%	12	29	41	59	59	71	82	
16	Persentase peningkatan UMKM yang bermitra	%	0,35	0,38	0,64	1,28	1,28	2	2	
17	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	3,82	3,85	3,88	3,92	3,95	3,98	4,02	
18	Persentase lulusan pelatihan yang berwirausaha	%	32	32	32	32	32	32	32	
19	Persentase Desa Mandiri	%	2,3	3,9	5,4	6,6	7,7	9,3	10,4	
20	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	7,31	7,37	7,43	7,49	7,55	7,61	7,67	
21	Net Ekspor		1.691,13	1.794,11	1.847,93	1.903,36	1.960,46	2.019,27	2.079,64	
22	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	27	57	87	117	147	177	207	
23	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	-	6,05	6,06	6,07	6,08	6,09	6,1	
24	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	71	71,5	72	72,5	73	73,5	74	
25	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	5,56	5,57	5,58	5,59	5,6	5,61	562	
26	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	100	100	100	100	100	100	100	
27	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	Persentase	0,258	0,26	0,262	0,265	0,269	0,27	0,275	
28	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	
29	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	0	15	17	19	21	23	25	
30	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	13,31	13,5	13,8	14	14,2	14,3	14,5	
31	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	11	11,01	11,02	11,03	11,04	11,05	11,06	
32	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,6	3,7	3,8	3,9	4	4,1	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	69,8	69,9	70,1	70,4	70,8	71,3	71,8	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2	Indeks Integritas	Angka	76,1	77	78	79	79	80	80	
3	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	100	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	%	95	96	97	98	99	100	100	
5	Persentase Penegakan Perda	%	81,82	83,62	85,21	86,84	88,51	90,22	90,39	
6	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Indeks	39,99	40	40,1	40,2	40,3	40,4	40,5	
7	Predikat Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Karo	Inovasi	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	3,47	3,49	3,51	3,53	3,55	3,57	3,59	
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	60,5	62,01	63,56	65,15	66,78	68,45	70,16	
10	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	60,41	61	61,25	61,5	61,75	62	62,5	
11	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,63	3,7	3,8	3,9	4	4,01	4,02	
12	Skor Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Skor	1,6907	2,1	2,3	2,55	2,7	2,85	3	
13	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	87,22	87,4	87,6	87,8	88	88,5	90	
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	37,79	38	38,5	39	40	40,5	41	
15	Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	%	93,33	93,4	93,5	93,6	93,7	93,8	93,9	
16	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	0	50	53	56	59	62	65	
17	Persentase pertumbuhan industri/IKM	%	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	
18	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi (pengusaha)	*	1	2	3	3	4	4	5	
19	Cakupan bina kelompok pengrajin	%	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	
20	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	13	12	12	12	12	12	12	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Angka partisipasi kasar SMP	%	108,52	108,62	108,72	108,82	108,9	108,92	108,98	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	37,01	38,14	39,65	42	48,39	56,07	63,74	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Angka partisipasi sekolah usia (APS) Usia 5-6 tahun	%	57,17	60,35	63,53	66,72	69,9	73,08	76,12	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 13-15 tahun	%	99,41	99,41	100	100	100	100	100	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57,98	60,48	62,98	65,48	67,98	70,48	72,98	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten/Kota	%	73,04	72,67	73,42	74,17	74,92	75,67	76,42	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
7	Kualitas Pembelajaran SD	%	68,5	70,85	72,97	75,16	77,41	79,74	80,13	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
8	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	56,6	59	61,4	63,8	66,2	68,6	71	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
9	Kualitas Pembelajaran SMP	%	67,25	74,56	76,79	79,2	81,47	82,91	84,43	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	85,7	91,43	92,5	94,5	96,5	98	100	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
11	Angka partisipasi sekolah (APS) Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan	%	3,94	5,89	7,84	8,6	9,36	10,12	10,89	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	94,85	95,79	96,75	98,2	99,18	99,2	99,3	1.01 - Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Prevalensi Stunting pada balita	(%)	17,6	16,6	15,5	14,3	13,2	12	10,9	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
2	Persentasi Angka Keberhasilan Pengobatan TBC Sensitif Obat (TBC SO)	%	96	97	98	99	99,5	99,9	99,99	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	96	99	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
4	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	79,1	80	80	80	80	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	55,6	60	75	75	75	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	92,36	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	87,36	88	88	88	90	90	90	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
8	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	78,95	78,95	84,21	89,47	94,74	94,74	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
9	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	41,52	55	65	75	86	91	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
10	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	58,08	70	75	80	85	90	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
11	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	51,88	60	70	76	85	98	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	99,9	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
14	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	67,8	70	70	75	75	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus	0	190	170	150	100	65	65	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
16	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	69,1	70	70	75	75	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
17	Persentase Pemberian Makanan Bergizi seimbang pada Ibu Hamil	%	0	0	0	0	10	10	10	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
18	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	93	93,5	93,7	94	94,5	94,7	95	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
19	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	85,08	50	60	72	80	90	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
20	Persentase Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas	%	0	36	38	40	42	44	46	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
21	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	61	70	75	80	88	95	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
22	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	70	75	80	85	90	95	95	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
23	Persentase calon pengantin mendapatkan bimbingan perkawinan tentang pencegahan stunting	%	9,4	10	15	30	30	50	50	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
24	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	(%)	95	98,6	98,7	98,8	98,9	98,95	99	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
25	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	92,6	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
26	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	80	80	80	80	80	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
27	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	%	61,8	62	64	66	68	70	72	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
28	Proporsi Fasyankes terintegrasi SIKN	%	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
29	Rasio Tenaga Medis per 1000 penduduk	Rasio	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
30	Cakupan anak usia 0-23 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	0	30	30	50	50	70	70	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
31	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	Rasio	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
32	Prevalensi Kab/Kota mencapai STBM	%	75,8	76	78	80	82	84	86	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
33	Cakupan anak usia 0-23 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	71,56	75	75	80	80	85	85	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
34	Cakupan pembantu puskesmas	%	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	78,8	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
35	Cakupan anak usia 24-59 bulan yang menderita Gizi Buruk mendapatkan tata laksana Gizi Buruk	%	55,82	60	60	70	70	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
36	Cakupan kunjungan Ibu hamil K6	%	0	80	80	80	80	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
37	Cakupan pelayanan nifas	%	69,3	70	70	70	75	75	75	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
38	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	94,5	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
39	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
40	Cakupan anak usia 6-23 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	%	0	90	90	90	90	90	90	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
41	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	75	80	80	85	90	95	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
42	Persentase Rumah tangga mendapat akses terhadap Sanitasi Aman	%	75	80	80	85	90	95	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
43	Cakupan anak usia 24-59 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
44	Prevalensi Depresi Pada Usia >= 15 Tahun	%	0	3	3	3	3	3	3	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
45	Proporsi fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	0	80	80	85	85	90	90	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
46	Rasio posyandu per 1000 balita	Rasio	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
47	Cakupan penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
48	Persentase Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	96,19	98	98	98	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
49	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	86	90	90	90	90	90	90	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
50	Cakupan anak usia 0-23 bulan yang menderita Gizi Buruk mendapatkan tata laksana Gizi Buruk	%	55,82	60	60	70	70	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
51	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
52	Cakupan Skrining Anemia Terhadap Remaja Putri	%	48,5	50	50	60	60	70	70	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
53	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	Rasio	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
54	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	75,48	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
55	Cakupan anak usia 24-59 bulan yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	71,56	75	75	80	80	85	85	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
56	Persentase Calon pengantin mendapatkan pemeriksaan kesehatan	%	9,4	10	15	30	30	50	50	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
57	Cakupan Skrining Anemia Terhadap Remaja Putri	%	48,5	50	50	70	70	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
58	Cakupan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Pasca Persalinan	%	6,3	10	10	30	30	50	50	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
59	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk di bawah umur 15 Tahun	Orang	0	2	2	2	2	2	2	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
60	Persentase Bayi Usia <6 bulan Mendapatkan ASI Eksklusif	%	45,8	47	47	50	50	60	60	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
61	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	Rasio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
62	Angka Kematian Balita	Kasus	22	25	23	22	21	20	19	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
63	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	%	98	90	90	90	90	90	90	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
64	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	41,52	55	65	75	86	91	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
65	Proporsi Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai Standar	%	0	80	80	85	85	90	90	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
66	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	92,6	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
67	Persentase Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) sebanyak 180 butir selama masa kehamilan	%	0	0	75	85	85	90	95	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
68	Cakupan anak usia 24-59 bulan gizi kurang mendapat tambahan asupan gizi	%	0	30	30	50	50	70	70	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
69	Cakupan puskesmas	%	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	111,8	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
70	Persentase Rumah Tangga mendapat akses terhadap air minum aman	%	70	75	80	85	90	95	95	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
71	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
72	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	9,49	9,5	10	10	10	15	15	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
73	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	96	97	98	99	99	99,5	99,99	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
74	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
75	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kasus	20	21	18	18	15	15	13	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
76	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
77	Cakupan Anak Usia 6-23 bulan yang masih mendapat ASI	%	0	30	45	50	50	60	60	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
78	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	%	92,36	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
79	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	67,6	70	75	75	80	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
80	Rasio Dokter Umum per 1000 penduduk	Rasio	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
81	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
82	Prevalensi Obesitas	%	32	32	30	28	25	23	20	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
83	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.	Orang	20	19	18	17	16	15	14	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
84	Persentase Lanjut Usia Mandiri	%	79,89	80	80	85	85	85	85	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
85	Cakupan kunjungan bayi	%	73,9	80	80	80	80	80	80	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
86	Persentase Penduduk Penerima PKG	%	0	90	92	95	96	98	98	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
87	Persentase ketersediaan obat essensial di Puskesmas	%	95	95	95	95	95	95	95	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
88	Persentase praktik Inisiasi Menyusui Dini	%	49,4	50	50	60	60	70	70	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
89	Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Rasio	6	6	6	6	6	6	6	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
90	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	0	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
91	Cakupan anak usia 24-59 bulan mendapatkan obat cacing (POPM)	%	0	90	90	90	90	90	90	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
92	Proporsi Fasyankes terakreditasi Paripurna	%	36,84	36,84	36,84	36,84	50	50	50	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
93	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan	%	85	90	90	95	95	98	98	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
94	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	1	1	1	1	1	1	1	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
95	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	0	10	10	8	8	5	5	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
96	Cakupan anak usia 6-23 bulan diare mendapatkan oralit dan zinc sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
97	Cakupan Anak Usia 6-23 bulan mendapatkan makanan pendamping ASI (MP ASI) beragam	%	0	0	30	30	50	50	50	1.02 - Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	25	26	25	25	25	25	25	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	55,21	55,5	56	56,5	57	57,5	58	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Ketaatan terhadap RTRW	%	73	74	74	74,5	75	75,5	76	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	63,7	64	64,5	65	65,5	66	66,5	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Gedung Pemerintah yang layak dan baik	%	61,5	62	63	63,2	63,4	63,7	64	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	63,4	64	64	64,5	65	65,5	66	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Jumlah SDM Tenaga terampil konstruksi	Orang	0	0	0	0	50	0	50	1.03 - Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	98,91	99,12	99,34	99,56	99,78	99,93	99,97	1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	%	0	0	29,56	42,35	42,7	42,7	42,7	1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	%	72,52	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	0,32	1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	100	100	100	100	100	100	100	1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyedia rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Rasio rumah layak huni	%	98,91	98,92	98,93	98,94	98,95	98,96	98,97	1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Jumlah lokasi pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Lokasi	2	10	10	12	12	12	12	1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	1.04 - Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan trantibum dan kebakaran	Index	86,85	89,02	90,75	90,93	91,11	91,29	91,47	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	0	60	65	67	69	71	73	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
3	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	84	86,1	88,25	88,25	90,46	90,46	92,72	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
5	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	70	71,75	73,54	75,38	77,27	79,19	81,18	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
6	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	61,53	69,23	69,23	76,92	76,92	84,61	84,61	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
7	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	80	82	84,05	84,05	86,15	86,15	88,31	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
8	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	50	57,14	64,28	71,42	71,42	78,57	78,57	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
9	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	11.816	11.916	12.091	12.291	12.461	12.661	12.811	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
10	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	23.713	23.793	24.057	24.227	24.491	24.805	24.925	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
11	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	5.666	6.176	6.686	7.148	7.660	8.122	8.634	1.05 - Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani	%	90	91	92	93	94	95	96	1.06 - Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Rasio kewirausahaan daerah	Rasio	3,78	4,11	4,15	4,22	4,3	4,37	4,41	2.07 - Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
2	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0,13	0,34	0,59	0,84	1,13	1,22	1,63	2.07 - Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,36	96,37	96,38	96,39	96,4	96,41	96,42	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	60	62,25	65,54	68,82	71,25	74	74,85	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	10	40	45	50	55	60	70	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	65,34%	65,35	66,4	67	69	71	86	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Indeks	30	30	40	50	60	70	80	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60	62,25	65,54	68,82	71,25	73,55	74,85	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	65,34%	65,35%	66,4%	67%	69%	71%	86%	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100	100	100	100	100	100	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100	100	100	100	100	100	100	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	100	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100	100	100	100	100	100	100	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Cakupan layanan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	30	30	30	30	30	30	30	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16	Rasio KDRT	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	0	0	0	0	0	0	0	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
18	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100	100	100	100	100	100	100	2.08 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Ketersediaan program pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi di desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	2.09 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2	Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	63	63	65	68	70	73	76	2.09 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (PSAT)	%	90	90	90	90	90	90	90	2.09 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Ketersediaan Energi	Kkal/Kapita/Hari	2.490	2.492	2.494	2.498	2.500	2.502	2.505	2.09 - Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	50	50	51	60,75	63,56	68,55	71,67	2.10 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
2	Indeks Pelayanan Pertanahan	%	0	0	68,3	67,9	70	72,1	74,3	2.10 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
3	Penyelesaian kasus tanah Negara	Kasus	100	1	2	2	2	2	2	2.10 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
4	Penyelesaian izin lokasi	Lokasi	100	2	2	2	2	2	2	2.10 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
5	Persentase luas lahan bersertifikat	%	0	145	145	150	150	155	155	2.10 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	-	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	Indeks	93,37	81,3	81,5	81,7	81,9	82,1	82,3	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
3	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	Indeks	52,47	70,16	70,23	70,3	70,37	70,43	70,5	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
4	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	*	TIDAK ADA	TIDAK ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
5	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	0	1	1	1	1	1	1	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
6	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat terkait 3R dan Bank Sampah	Kali	13	10	10	10	10	10	10	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
8	Persentase cakupan area pelayanan	%	41	41	41	41	41	41	41	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
9	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
10	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	104	100	100	100	100	100	100	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
11	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	Indeks	60,91	82,29	82,49	82,69	82,89	83,09	83,29	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
12	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	*	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
13	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Ton	78	78	78	78	78	78	78	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
14	Terlesaikannya Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100	100	100	100	100	100	2.11 - Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	99,99	99	99,3	99,5	99,8	99,9	100	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rasio bayi berakte kelahiran	%	99,15	98	99	99,05	100	100	100	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Rasio pasangan berakte nikah	%	60,03	60	65	70	75	80	90	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	62,18	60	65	70	75	80	90	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	60	62	65	67	68	70	72	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	99,51	99	99,3	99,5	99,8	99,85	100	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Anak usia 0-59 bulan mendapatkan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	0	75	80	85	90	95	100	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	*	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	2.12 - Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	2.13 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Persentase LPM Berprestasi	%	0,2	5,8	11,7	17,4	23,5	29	34,8	2.13 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	70	70,6	71	72	73	74	75	2.13 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan Pkk	%	100	100	100	100	100	100	100	2.13 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	2.13 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Rata-rata kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	15	17	17	17	17	17	17	2.13 - Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,5	25,5	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	63,64	65	70	75	80	85	90	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3	Total Fertility Rate (TFR) (kelahiran)	*	2,19	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	580	580	600	620	640	660	680	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Orang	458	458	460	462	464	466	468	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Orang	690	690	695	700	705	710	715	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	46,7	48,04	50,04	51,04	52,86	53,1	0	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	Kelompok Sasaran Mendapatkan Pendampingan	Orang	790	800	850	900	950	1.000	1.055	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10	Calon Pengantin Mendapatkan Bimbingan Perkawinan dengan Materi Pencegahan Stunting	Orang	270	300	350	400	450	500	550	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Orang	800	800	805	810	815	820	825	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	81,82	85	88	91	94	98	100	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	41,86	42,69	43,55	44,42	45,31	46,21	47,14	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Ratio Akseptor KB	%	53,04	54,64	55,74	56,85	57,99	5,15	60,33	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	53,04	51,04	52,06	53,1	54,16	52,24	56,35	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	25	50,8	56,5	60,2	65,4	70	75,5	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kelompok	7	7	7	7	7	7	7	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	%	80	0	0	0	0	0	0	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
21	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	%	150	150	155	160	165	170	175	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	Orang	461	461	465	469	473	477	481	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan	Orang	270	300	350	400	450	500	550	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Orang	1.816	1.816	1.820	1.825	1.830	1.835	1.840	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Rata-Rata Jumlah Anak	2,19	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	22,9	20,01	19,61	19,22	18,84	18,46	18,09	2.14 - Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	3,6	3,6	3,2	2,8	2,4	2	1,6	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2	Indeks Kinerja Infrastruktur Transportasi	Indeks	3,6	3,2	2,8	2,4	2	1,6	1,2	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
3	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	4.095.356	4.113.375	4.131.394	4.149.413	4.167.432	4.185.451	4.203.470	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Buah	4	4	4	4	5	5	5	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
5	Pemasangan Rambu-rambu	%	12	17	24	30	35	41	47	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
6	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	%	95	96	97	97,5	98	99	99	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
7	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang	Unit	945	995	1.200	1.400	1.600	1.700	1.900	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
8	Rasio ijin trayek	%	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007	0,00007	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
9	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	4.095.356	4.113.375	4.131.394	4.149.413	4.167.432	4.185.451	4.203.470	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
10	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	13	35	37	40	45	47	51	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
11	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,0141	0,014	0,0139	0,0138	0,0137	0,0136	0,0135	2.15 - Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Angka	3,04	3.04-0	3.1-1.3	3.2-1.4	3.3-1.5	3.4-1.6	3.5-1.7	2.16 - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
2	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	15,78	15,83	15,88	15,93	15,98	16,03	16,08	2.16 - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	60,64	60,69	60,74	60,79	60,84	60,89	60,94	2.16 - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
4	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85,5	85,55	85,6	85,65	85,7	85,75	85,8	2.16 - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	48,49	48,54	48,59	48,64	48,69	48,74	48,79	2.16 - Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
AQ	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	14,81	4	4	4	4	4	4	2.18 - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	7,3	2,09	2,34	2,54	2,74	2,84	3	2.18 - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
3	Kenaikan/ Penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	18,52	5,5	5,7	5,9	6,1	6,3	6,5	2.18 - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
4	Jumlah tenaga kerja PMA/PMDN	Angka	7.227	7.247	7.267	7.287	7.307	7.327	7.347	2.18 - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
5	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional	Rp	7.163.852.813.999	7.363.852.813.999	7.563.852.813.999	7.763.852.813.999	7.963.852.813.999	8.163.852.813.999	8.363.852.813.999	2.18 - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
6	Jumlah Investor Berskala Nasional	Investor	96	100	103	106	110	114	119	2.18 - Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AR	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	220	230	245	260	275	280	295	2.19 - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
2	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	7	15	17	19	21	23	24	2.19 - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	0	7	7	10	13	15	17	2.19 - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
4	Persentase prestasi olahraga	%	19	20	21	22	23	24	25	2.19 - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	56	46	51	56	61	66	71	2.19 - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
6	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	0	25	27	30	33	35	37	2.19 - Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
AS	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,71	2,8	2,81	2,82	2,83	2,84	2,85	2.20 - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2	Buku PDRB	Buku	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	2.20 - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
3	Buku Kabupaten Karo Dalam Angka	Buku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	2.20 - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
4	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	*	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	2.20 - Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
AT	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	25	30	35	40	45	50	55	2.21 - Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
AU	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
1	Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan diinventarisasi	Karya Budaya	27	3	3	3	3	3	3	2.22 - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	11	1	1	1	1	1	1	2.22 - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
3	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	15	1	1	1	1	1	1	2.22 - Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
AV	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	68,08	69	69,3	69,5	69,7	70	70,2	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2	Persentase pemenuhan layanan penunjang perangkat daerah	%	80	85	87	90	92	95	98	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	55,85	60	60,3	60,5	60,6	60,8	70	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	Orang	28.747	30.000	33.000	36.000	39.000	42.000	45.000	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
5	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Rasio	1,107	1,109	1,111	1,113	1,115	1,117	1,119	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	29.376	30.000	33.000	36.000	39.000	42.000	45.000	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
7	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	260.541	8.600	9.200	9.800	10.400	11.000	11.600	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
8	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Rasio	0,3	0,43	0,438	0,445	0,452	0,58	0,464	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
9	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	0,82	0,856	0,856	0,867	0,879	0,897	0,909	2.23 - Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
AW	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	42,39	42,04	42,45	42,5	42,8	43	43,25	2.24 - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
2	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	78,8	65,2	67,9	69,56	71,73	73,91	76,08	2.24 - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
3	Ketersediaan arsip di Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) yang dapat diakses oleh masyarakat	Berkas	0	0	5	7	9	11	12	2.24 - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
4	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	1	2	2	3	3	3	3	2.24 - Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
AX	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Konsumsi ikan	Kg/KAP/TH	61	61,5	62	62,5	63	64	64,5	3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
2	Produksi Hasil Pengolahan Perikanan	Ton	5	12	16	17	18	19	20	3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3	Produksi perikanan Budidaya	Ton	1.199	880	713	456	380	217	213	3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	30	35	38,5	42	44	46	48	3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
5	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	Kelompok	20	15	20	20	20	20	20	3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
6	Produksi Benih Ikan	Ekor	650.000	747.452	850.000	918.000	1.000.000	1.262.000	1.325.100	3.25 - Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
AY	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	3.26 - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	81,4	10	10	10	10	10	10	3.26 - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.434.797	1.578.277	1.736.105	1.909.716	2.100.688	2.310.757	2.541.833	3.26 - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
4	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI	Pelaku Usaha	27	57	87	117	147	177	207	3.26 - Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
AZ	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Produksi Komoditi Pertanian Unggulan	Ton	1.841.950	1.755.541	1.784.770	1.814.816	1.845.706	1.877.463	1.910.114	3.27 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
2	Penerapan pola sistem pertanian terpadu	Angka	2,46	2,51	2,56	2,61	2,66	2,71	2,76	3.27 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Produktivitas padi per hektar	kWh	60,71	60,86	61,01	61,17	61,32	61,47	61,63	3.27 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
4	Produktivitas palawija per hektar (Jagung)	kWh	68,73	68,9	69,07	69,25	69,42	69,59	69,77	3.27 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
5	Cakupan bina kelompok petani	%	12,25	12,6	12,95	13,3	13,65	14	14,35	3.27 - Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
BA	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Tingkat Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD	%	80,56	81	82	84	85	86	87	4.02 - Sekretariat DPRD
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	4.02 - Sekretariat DPRD
3	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	4.02 - Sekretariat DPRD
4	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	4.02 - Sekretariat DPRD
BB	5.01 - PERENCANAAN									
1	Tingkat Ketercapaian Target Indikator Makro Pembangunan Daerah	%	80	81	82,5	85	87	89	91	5.01 - Perencanaan
2	Capaian kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	%	98	80	82	84	86	88	90	5.01 - Perencanaan
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	5.01 - Perencanaan
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	*	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	5.01 - Perencanaan
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	5.01 - Perencanaan
6	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	*	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	5.01 - Perencanaan
7	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	*	Ada	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	5.01 - Perencanaan
8	Tingkat pencapaian indikator makro bersama (shared development indicators) pusat-daerah	%	96	82	84	86	88	90	92	5.01 - Perencanaan
BC	5.02 - KEUANGAN									
1	Proporsi Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah	%	66,71	70,05	73,55	77,23	81,09	85,14	89,4	5.02 - Keuangan
2	Proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah	%	14,71	15,45	16,22	17,03	17,88	18,77	19,71	5.02 - Keuangan
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,43	2,55	2,68	2,81	2,95	3,1	3,26	5.02 - Keuangan
4	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	30,99	32,54	34,17	35,87	37,67	39,55	41,53	5.02 - Keuangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	0,65	0,68	0,72	0,75	0,79	0,83	0,87	5.02 - Keuangan
6	Persentase SILPA	%	2,43	2,55	2,68	2,81	2,95	3,1	3,26	5.02 - Keuangan
7	Persentase Program yang tidak terlaksana	%	0	0	0	0	0	0	0	5.02 - Keuangan
8	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	18,74	19,68	20,66	21,69	22,78	23,92	25,11	5.02 - Keuangan
9	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja Daerah	%	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	5.02 - Keuangan
10	Persentase Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	0	0	0	0	0	0	0	5.02 - Keuangan
11	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap Total Belanja Daerah	%	42,12	44,23	46,44	48,76	51,2	53,76	56,44	5.02 - Keuangan
BD	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Persentase Keterisian Jabatan Struktural	%	90,16	90,6	91	91,5	92	92,5	93	5.03 - Kepegawaian
2	Persentase Penyelesaian Penetapan NIP CPNS/NI PPPK	%	100	100	100	100	100	100	100	5.03 - Kepegawaian
3	Persentase Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian	%	100	100	100	100	100	100	100	5.03 - Kepegawaian
4	Persentase Implementasi E-Kinerja BKN	%	100	100	100	100	100	100	100	5.03 - Kepegawaian
5	Persentase Layanan Kepegawaian Berbasis Digital, Mencakup Layanan Kenaikan Pangkat, Layanan Pensiun PNS dan janda/duda dan lain-lain	%	100	100	100	100	100	100	100	5.03 - Kepegawaian
6	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang diproses	%	100	100	100	100	100	100	100	5.03 - Kepegawaian
7	Indeks NSPK	Indeks	82,25	82,3	82,35	82,4	82,45	82,5	82,55	5.03 - Kepegawaian
8	Persentase Penyelesaian Disparitas Data ASN	%	100	100	100	100	100	100	100	5.03 - Kepegawaian
BE	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75,69	75,7	75,8	75,9	76	76,1	76,2	5.04 - Pendidikan dan Pelatihan
BF	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	5.05 - Penelitian dan Pengembangan
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100	5.05 - Penelitian dan Pengembangan
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	5.05 - Penelitian dan Pengembangan
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	5.05 - Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
BG	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian pemerintah (SPIP)	Level	2	2	2	3	3	3	3	6.01 - Inspektorat Daerah
2	Level kapabilitas apip	Level	3	3	3	3	3	3	4	6.01 - Inspektorat Daerah
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	83,7	83,7	83,8	83,9	84	84,1	84,2	6.01 - Inspektorat Daerah
4	Persentase tindak lanjut temuan	%	83,42	83,5	83,75	83,8	84	84,25	84,5	6.01 - Inspektorat Daerah
5	Persentase pelanggaran pegawai	%	0	0,05	0,048	0,047	0,046	0,045	0,044	6.01 - Inspektorat Daerah
BH	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	80	80	81	82	83	84	85	8.01 - Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Karo, 2025 (diolah)

Tabel 4.10
Penyelarasan Indikator Kinerja Utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Karo dengan Sasaran Pembangunan RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

No	RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Karo tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Provinsi)			Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029						
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,73	74,54	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	73	75
2	Kesehatan Ibu dan Anak:			Kesehatan Ibu dan Anak:					
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	94	a) Angka Kematian Ibu (AKI)	5	4
	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,4	12,3	b) Prevalensi <i>stunting</i> pada balita (%)	16,6	12
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)			Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	90	90	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)	90	90
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	90	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	93,5	94,7
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	99	99,8
5	Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:			Hasil Pembelajaran:		
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
	- Literasi membaca	6,06 –12,12	27.27-30.30	- Literasi membaca	6,06 –12,12	27.27-30.30	- Literasi Membaca SD	73,35	83,35
	- Numerasi	00,00 – 3,03	6.06 - 9.09	- Numerasi	00,00 – 3,03	6.06 - 9.09	- Numerasi SD	73,18	83,18
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat tingkat nasional untuk:		
	- Literasi membaca	35,99–38,49	41.53-44.03	- Literasi membaca	35,99–38,49	41.53-44.03	- Literasi Membaca SMP	77,06	87,06
	- Numerasi	33,70–36,20	37.70 - 40.20	- Numerasi	33,70–36,20	37.70 - 40.20	- Numerasi SMP	75,29	85,29
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	10.83 - 10.84	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.3 - 10.33	10.83 - 10.84	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10.13-10.25	10.47-10.50
	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	13.86 - 13.87	d) Harapan Lama Sekolah	13.61 - 13.63	13.86 - 13.87	d) Harapan Lama Sekolah	13.27-13.37	13.74-13.80
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12 - 11,40	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,12	11,12 - 11,40	Rasio lulusan S1/S2/S3	13,5	14,3

No	RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Karo tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Provinsi)			Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029						
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	71,1	76,59	Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	95-96,96	96,97-96,99
8	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6,96-7,46	2,82-3,82	Tingkat Kemiskinan (%)	6.20-6.53	2.98-2.15
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,27	40,61	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	32,82	45
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)			Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0,34	1,22
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4-15,1	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19-19,5	15,4-15,1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	3,85	3,98
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	7,8	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,2	7,8	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,74	3,64
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata		
	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,42	2,73	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,26	0,27
	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	300,00-350,00	421,14	b. Jumlah Kunjungan Wisatawan	1.578.277	2.310.757
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)*	5,45	5,43	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HAKI (Pelaku Usaha)	57	177
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN		
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,20%	3,51%			
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	4,06%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,63%	4,06%	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	4,11	4,37
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,79%	0,81%	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,95	1,98
	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	1,97	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,24	1,97			
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,27 - 5,56	4,74 - 5,20	a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.38-2.07	2.02-1.57
	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50,4	b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	43	50,4	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	65	75
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,29 - 61,67	59,48 - 63,87	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	84,26	84,48
17	Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK			Tingkat Penguasaan IPTEK		
	Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Disesuaikan dengan karakteristik daerah			Belanja Riset (% APBD)	0,06	0,10

No	RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Karo tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Provinsi)			Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029						
							Indeks Inovasi Daerah	63	67
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	51,12	51,18	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,74	3,64
	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	18,42	21,49			
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,05	6,05
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	10,1	9,5			
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 - 30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,7	29,76 - 30,04	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31,91	32,35
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 - 17,41	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,45 - 16,54	17,13 - 17,41	Net Ekspor (Milyar)	1.794,11	2.019,27
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	2,33%	a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	2,26%	2,33%	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	2,59	2,55
	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	b. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	74,36	81,01	Rasio Rumah Layak Huni	98,92	98,93
	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%	c. Persentase Desa Mandiri (%)	8,44%	8,93%	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri (%)	3,9	9,3
24	Indeks Materi Hukum	70	71,5	Indeks Materi Hukum	70	71,5	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	87,4	88,5
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	3,71	Indeks SPBE / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	3.04-0	3.4-1.6
26	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	3,57	3,69	Indeks Pelayanan Publik	8,5	90,5
27	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	Indeks Integritas Nasional	77	79,5
28	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>			<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>			<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah</i>		
	<i>Usulan Proksi:</i>			<i>Usulan Proksi:</i>					
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	a) Persentase Penegakan Peraturan Daerah	83,62	90,22
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	93,4	93,8
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	58,5	62	Persentase gangguan dan ketertiban yang dapat diselesaikan	81,75	83,29
30	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	86.83 - 90.08	Indeks Demokrasi Indonesia	82.58 - 85.83	86.83 - 90.08			

No	RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Karo tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Provinsi)			Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029						
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak terhadap PDB (%)			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (% PDRB)	0,3	0,5
32	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	1,8-3,8	1,4-3,7	Tingkat Inflasi (%)	3-1	3-1
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	28,77	33,92			
	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14	b. Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,13	0,14			
	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39	c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	8.103.064,03	10.402.072,39			
	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49	d. Total Kredit/PDRB (%)	25,7	31,49			
34	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Inklusi Keuangan (%)	97,52	97,88	Indikator Akses Keuangan Daerah (IKAD)	4,33	4,40
35	<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i>			<i>Dsisesuaikan dengan karakteristik daerah</i>					
	<i>Usulan Proksi:</i>			<i>Usulan Proksi:</i>					
	<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>			<i>Jumlah Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten/ Kota Kembar/ Bersaudara (Sister Province/ Sister City)</i>					
36	<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>			<i>Disesuaikan dengan karakteristik daerah (Asia Power Indeks - Military Capability)</i>					
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,44 - 55,48	57,56 - 57,67	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	1	1
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	81,17 - 81,2	82,62 - 82,79	Persentase pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama	96	100
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	73,67	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	59,9	65
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,37	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	96,37	96,41
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,562	0,581			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup					
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,2	77,87	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,23	79,92
	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00%	15%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	10,00%	15%	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	3,8	4,6
	c. Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah					
	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,00%	28%	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	16,00%	28%	- Timbulan sampah yang ditangani	78,03	78,075

No	RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029			RPJMD Kabupaten Karo tahun 2025-2029		
	(Sasaran per Provinsi)			Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029						
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%	- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	62%	100%			
43	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
	a. Ketahanan Energi			a. Ketahanan Energi					
	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	850	1282	- Konsumsi listrik per kapita (kWh)	529	675
	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	141,175	- Intensitas energi primer (SBM/ Rp milyar)	170,57	141,175	Konsumsi listrik per Kapita	559	593
	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	4,48	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	7,35	4,48	b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,12	6,08
	c. Ketahanan Air			c. Ketahanan Air					
	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)			Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)			Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	1	5
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	53	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	40,95	53	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	38,12	38,90
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	157,53	152,55 - 147,69	Indeks Risiko Bencana (IRB)	103	101
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq)	130.888	223.175
	a. Kumulatif	10,06%	12,92%	a. Kumulatif	10,06%	12,92%			
	b. Tahunan	19,04%	25,38%	b. Tahunan	19,04%	25,38%			

BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah dalam lima tahun ke depan, serta menjadi arah kebijakan yang menyeluruh bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Karo. RPJMD ini tidak hanya menjadi rujukan teknokratis bagi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga menjadi komitmen politik dan sosial untuk membawa Kabupaten Karo menuju perubahan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya-saing.

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025–2045, dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029, serta berbagai kebijakan sektoral dan kewilayahan yang relevan.

Kaidah pelaksanaan dalam RPJMD ini mencakup prinsip-prinsip dasar dan kerangka sistemik untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dapat diwujudkan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Kaidah tersebut mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, serta strategi komunikasi publik. Cakupan ini menjadi sistem safeguarding yang menjamin keterhubungan antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program, serta evaluasi dan akuntabilitas pembangunan daerah.

5.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. RPJMD Kabupaten Karo menjadi landasan utama dalam merancang RKPD, Renja Perangkat Daerah, dan KUA-PPAS, sehingga diperlukan penjaminan konsistensi antar dokumen tersebut dalam tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian.

Perencanaan yang berkualitas menjadi kunci bagi pelaksanaan pembangunan yang mampu mencapai tujuan secara berkelanjutan. Hal ini menuntut integrasi lintas sektor dan wilayah, serta pemetaan isu strategis dan potensi lokal secara holistik. Konsistensi perencanaan juga penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dan provinsi.

Konsistensi pendanaan dicapai melalui pendekatan *money follows program*, di mana penganggaran diarahkan pada kegiatan yang memiliki nilai strategis dan berdampak langsung kepada masyarakat. Keterkaitan antara usulan program dengan target kinerja menjadi dasar penyusunan anggaran yang lebih akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Untuk mendukung konsistensi ini, penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif dan berbasis bukti menjadi keharusan. Penentuan prioritas pembangunan hingga level proyek/keluaran harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Proses ini juga diperkuat

melalui forum-forum koordinasi lintas perangkat daerah, konsultasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah.

5.1.1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 memiliki posisi strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi pembangunan, serta program prioritas daerah. Sebagai dokumen utama dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten, RPJMD menjadi acuan bagi seluruh dokumen perencanaan teknis di tingkat perangkat daerah, seperti Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta menjadi dasar dalam penyusunan RKPD dan penganggaran daerah melalui APBD setiap tahun.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan keterkaitan secara vertikal maupun horizontal dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional (RPJMN Tahun 2025–2029), dokumen perencanaan jangka panjang nasional (RPJPN 2025–2045), serta dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara, khususnya RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2029.

Keterkaitan ini dimaksudkan agar pembangunan di Kabupaten Karo sejalan dengan arah, tujuan, dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta dapat berkontribusi nyata terhadap pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, Tujuan Pembangunan Nasional, dan Sumatera Utara Maju dan Bermartabat.

Adapun bentuk-bentuk keterkaitan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Karo memberikan arah pembangunan jangka menengah selama lima tahun, yang memuat visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi ini dirumuskan dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan visi besar pembangunan nasional dan provinsi, sehingga arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Karo berada dalam koridor pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
2. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Karo disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Sinkronisasi ini dilakukan secara teknokratis melalui analisis keselarasan indikator, serta secara partisipatif melalui forum Musrenbang RPJMD yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah pusat dan provinsi.
3. Indikator makro dan indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD Kabupaten Karo dirancang agar kompatibel dengan indikator prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Hal ini dilakukan agar pencapaian target pembangunan daerah dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian target pembangunan di level yang lebih tinggi.
4. Sasaran dan indikator program pada RPJMD Kabupaten Karo menjadi dasar utama dalam penyusunan program prioritas tahunan di dalam RKPD, dan selanjutnya diturunkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) tahunan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang jelas dari perencanaan lima tahunan ke perencanaan tahunan, serta dari tingkat kabupaten ke tingkat

perangkat daerah. Hal ini memperkuat pengendalian dan pengukuran akuntabilitas pembangunan daerah secara sistemik.

5. Keterkaitan perencanaan juga harus ditopang oleh kebijakan kelembagaan, regulasi daerah yang harmonis, serta skema pendanaan yang selaras dengan sumber pembiayaan dari pusat dan provinsi.

5.1.1.2. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2025–2045 dan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 memerlukan dukungan pendanaan yang memadai, terencana, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan penganggaran daerah. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan kebijakan penganggaran menjadi prasyarat utama agar pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran.

Optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan perlu dilakukan secara inovatif, integratif, partisipatif, dan adaptif, baik dari sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah. Pemerintah Kabupaten Karo akan mengembangkan pendekatan pembiayaan yang tidak hanya mengandalkan dana APBD, namun juga mendorong kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan peluang pendanaan lainnya. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.1.2. Kerangka Pengendalian dan Penjaminan Kualitas Pembangunan Daerah

Dalam rangka memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan mekanisme pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan partisipasi berbagai pihak, dengan dukungan sistem elektronik terpadu serta tata kelola data pembangunan yang baik. Proses pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.

Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, penerapan manajemen risiko daerah mengacu pada kerangka Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). MRPN didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan, serta mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko lintas sektor. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan peluang tercapainya sasaran pembangunan nasional.

MRPN menyinergikan praktik manajemen risiko organisasi yang sudah ada ke dalam suatu kerangka pengendalian risiko lintas sektor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Kerangka kerja MRPN dijadikan pedoman dalam implementasinya, termasuk di tingkat pemerintah daerah. Sebagai bagian dari entitas MRPN, pemerintah daerah berkewajiban menerapkan prinsip-prinsip MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan. Penerapan tersebut dilakukan melalui pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko daerah. Tahapan yang ditempuh mencakup

perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penetapan objek dan entitas MRPN, serta pelaksanaan proses asesmen risiko. Penerapan manajemen risiko ini diharapkan mampu meningkatkan probabilitas tercapainya tujuan pembangunan, sekaligus meminimalkan dampak merugikan dari peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian target pembangunan daerah.

Tahapan Manajemen Risiko dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 yaitu:

1. Perumusan RPJMD Periode 2025–2029

Tahap awal dimulai dengan penetapan arah pembangunan daerah melalui perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan jangka menengah. RPJMD Kabupaten Karo 2025–2029 diarahkan untuk mewujudkan visi “*KARO BERIMAN, KARO BERBUDAYA, KARO MODERN, KARO UNGGUL DAN KARO SEJAHTERA MENUJU INDONESIA EMAS.*” Dalam proses ini dilakukan analisis kesenjangan (*gap analysis*) guna menilai perbedaan antara hasil capaian RPJMD periode sebelumnya dengan target yang direncanakan. Hasil *gap analysis* menjadi dasar dalam menyusun langkah strategis agar arah pembangunan lebih tepat sasaran, terukur, serta mampu mengatasi hambatan yang pernah muncul pada periode sebelumnya.

2. Analisis Profil Risiko (*Risk Profile Analysis*)

Tahap berikutnya adalah melakukan pemetaan risiko melalui proses identifikasi dan penilaian (*assessment*) risiko. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali potensi ancaman yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, yang dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian target pembangunan. Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besaran dampak yang ditimbulkan. Hasil penilaian ini memberikan gambaran mengenai tingkat kritikalitas risiko, sehingga dapat diprioritaskan mana yang harus segera ditangani, sekaligus memudahkan penyusunan strategi pengendalian dalam RPJMD Kabupaten Karo periode 2025-2029.

3. Perumusan Rencana Mitigasi (*Mitigation Plan Formulation*)

Tahap ini berfokus pada penyusunan strategi mitigasi risiko dengan melibatkan kerja sama antar perangkat daerah, lembaga, maupun pemangku kepentingan terkait. Rencana mitigasi disusun berdasarkan prioritas risiko yang dinilai paling signifikan dan memerlukan penanganan segera. Dalam penyusunannya, ditetapkan pula jadwal implementasi yang jelas agar langkah-langkah mitigasi dapat berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, RPJMD 2025–2029 diharapkan mampu meminimalkan potensi hambatan serta meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian target.

4. Monitoring dan Pelaporan (*Monitoring and Reporting*)

Tahap terakhir adalah pemantauan dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan RPJMD. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh rencana yang telah disusun dapat diimplementasikan sesuai target, sekaligus memberikan ruang untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian jika diperlukan. Proses monitoring dilakukan secara internal oleh Pemerintah Kabupaten Karo, dan juga melibatkan pihak eksternal seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, maupun stakeholder lainnya. Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memperoleh masukan konstruktif dari berbagai pihak guna memperkuat kualitas implementasi RPJMD Kabupaten Karo periode 2025-2029.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Pencapaian Misi 1 yaitu *“Mewujudkan roda pemerintahan yang profesional, bersih, efektif, dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik”* memerlukan analisis risiko yang cermat. Risiko utama yang berpotensi menghambat misi ini antara lain masih adanya praktik penyalahgunaan wewenang, lemahnya budaya integritas, serta rendahnya tingkat kepatuhan aparatur terhadap regulasi dan standar pelayanan. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta terhambatnya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi faktor risiko penting. Kompetensi ASN yang belum merata, kurangnya penguasaan teknologi informasi, serta lemahnya disiplin dan profesionalisme dapat memengaruhi kualitas tata kelola birokrasi. Risiko ini dapat menimbulkan inefisiensi, keterlambatan pelayanan, serta menurunkan kualitas keputusan strategis yang diperlukan untuk mendukung pembangunan daerah.

Risiko lain juga muncul dari sisi tata kelola sistem dan proses pemerintahan. Masih terdapat kelemahan dalam integrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi program pembangunan. Demikian pula, pengelolaan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi akan memperlambat transformasi digital dalam birokrasi, sehingga kualitas pelayanan publik tidak optimal.

Untuk memitigasi berbagai risiko tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif. Penguatan integritas ASN melalui penerapan zona integritas, sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), serta budaya kerja anti korupsi menjadi langkah mendasar. Di sisi lain, peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan kompetensi digital, serta penerapan merit system dalam pola karier.

Selain itu, perbaikan sistem tata kelola dilakukan dengan memperkuat integrasi perencanaan–penganggaran–pelaporan, serta mendorong digitalisasi layanan publik secara merata di seluruh perangkat daerah. Fungsi pengawasan juga harus diperkuat melalui optimalisasi peran APIP, monitoring capaian kinerja, serta penindakan tegas terhadap temuan audit yang tidak ditindaklanjuti. Dengan strategi mitigasi tersebut, risiko dapat dikendalikan sehingga misi terwujudnya pemerintahan yang profesional, bersih, efektif, dan efisien benar-benar menjadi landasan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Karo.

2. Pencapaian Misi 2 yaitu *“Meningkatkan pembangunan rohani masyarakat melalui kehidupan beragama yang toleran serta menguatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal”* menuntut sinergi antara pembangunan kehidupan beragama yang harmonis dengan upaya pelestarian budaya lokal. Risiko utama yang mungkin muncul adalah potensi terjadinya gesekan antarumat beragama apabila toleransi dan dialog antar komunitas tidak terbangun dengan baik. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama dapat menimbulkan kerentanan terhadap radikalisme maupun sikap eksklusif yang mengganggu kohesi sosial.

Risiko lain datang dari sisi pelestarian budaya dan kearifan lokal. Globalisasi, modernisasi, serta perkembangan teknologi informasi dapat

menyebabkan menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi dan budaya daerah. Hilangnya praktik budaya yang diwariskan secara turun-temurun akan berdampak pada melemahnya identitas lokal serta berkurangnya nilai kearifan lokal yang menjadi perekat sosial masyarakat Karo.

Untuk mengatasi risiko tersebut, strategi mitigasi perlu diarahkan pada penguatan pendidikan dan pembinaan keagamaan yang menekankan nilai-nilai toleransi, moderasi, serta kerukunan antarumat. Pemerintah daerah perlu mendorong kolaborasi antar tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan dalam menjaga harmoni sosial. Di sisi lain, pelestarian budaya harus diperkuat melalui pengembangan kegiatan seni, budaya, dan tradisi lokal, serta mendukung peran generasi muda dalam mengembangkan inovasi berbasis kearifan lokal yang relevan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, penguatan regulasi dan kelembagaan juga penting dilakukan untuk memastikan keberlanjutan program-program keagamaan dan kebudayaan. Pemerintah daerah dapat mengintegrasikan aspek budaya dan nilai toleransi dalam kurikulum pendidikan, memperluas festival budaya, serta menyediakan ruang publik yang menjadi wadah ekspresi keagamaan dan kebudayaan. Dengan demikian, Misi 2 dapat tercapai secara berkelanjutan, yakni terwujudnya masyarakat Karo yang religius, toleran, sekaligus bangga dan konsisten melestarikan budaya serta kearifan lokalnya.

3. Pencapaian Misi 3 yaitu *“Meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi”*. Peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi merupakan komitmen penting dalam pembangunan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah risiko yang dapat menghambat pencapaian misi ini. Risiko pertama adalah keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar, keterbatasan alat kesehatan modern, serta distribusi fasilitas yang tidak merata, khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil.

Risiko kedua terkait dengan sumber daya manusia kesehatan. Jumlah tenaga medis dan paramedis di Kabupaten Karo masih belum sebanding dengan kebutuhan, sementara kompetensi yang dimiliki juga belum merata. Kesenjangan antara kebutuhan layanan dengan ketersediaan SDM dapat menurunkan mutu pelayanan, memperpanjang waktu tunggu pasien, bahkan meningkatkan angka rujukan ke luar daerah.

Risiko ketiga berasal dari sistem manajemen layanan kesehatan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem rujukan, rekam medis elektronik, maupun monitoring layanan kesehatan masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan data kesehatan masyarakat tidak tersaji secara real time dan terintegrasi, sehingga menyulitkan pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.

Selain itu, terdapat risiko dari sisi eksternal seperti meningkatnya prevalensi penyakit menular maupun tidak menular, kondisi geografis Kabupaten Karo yang rawan bencana alam, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan. Faktor-faktor tersebut berpotensi menambah beban pelayanan kesehatan dan menurunkan efektivitas intervensi pemerintah daerah.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, diperlukan strategi mitigasi yang komprehensif. Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur kesehatan dengan meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas pelayanan, terutama di daerah pedesaan. Di sisi lain, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan

berkelanjutan, pemerataan distribusi tenaga medis, serta insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil menjadi sangat penting.

Digitalisasi layanan kesehatan juga harus dipercepat dengan membangun sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, termasuk penerapan rekam medis elektronik, telemedicine, dan sistem rujukan online. Upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat perlu digalakkan melalui edukasi, kampanye kesehatan, serta peningkatan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Dengan strategi tersebut, risiko dapat dikendalikan sehingga Misi 3 benar-benar terwujud, yaitu meningkatnya layanan kesehatan yang berkualitas dan terintegrasi di Kabupaten Karo.

4. Pencapaian Misi 4 yaitu *“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata”* memiliki tantangan risiko yang kompleks. Dari sisi sektor pertanian, risiko utama adalah masih rendahnya produktivitas akibat keterbatasan akses petani terhadap benih unggul, pupuk, teknologi modern, serta sarana irigasi yang memadai. Perubahan iklim juga menimbulkan risiko gagal panen, serangan hama, dan penurunan kualitas hasil pertanian yang berdampak langsung pada pendapatan petani.

Di sisi lain, sektor pariwisata menghadapi risiko terkait keterbatasan infrastruktur pendukung, rendahnya kualitas layanan wisata, serta kurangnya promosi yang inovatif dan terintegrasi. Selain itu, perkembangan pariwisata juga memiliki risiko lingkungan apabila tidak dikelola secara berkelanjutan, seperti degradasi ekosistem alam, pencemaran, serta konflik kepentingan dengan masyarakat lokal. Risiko ini dapat menurunkan daya tarik wisata Kabupaten Karo dalam jangka panjang.

Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah rendahnya kapasitas kelembagaan dan SDM lokal dalam mengelola potensi pertanian dan pariwisata. Kurangnya akses permodalan, lemahnya kelembagaan petani maupun pelaku UMKM pariwisata, serta terbatasnya literasi digital dan manajerial dapat menghambat transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Jika tidak ditangani, risiko ini akan memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama misi pembangunan.

Untuk memitigasi risiko tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat ketahanan sektor pertanian dengan pengembangan teknologi pertanian modern, diversifikasi komoditas, serta program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Penguatan infrastruktur dasar seperti irigasi, jalan produksi, pasar tani, serta akses pembiayaan bagi petani dan UMKM juga menjadi kunci.

Dalam sektor pariwisata, mitigasi risiko dapat dilakukan melalui pengembangan destinasi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta promosi berbasis digital yang lebih masif. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata akan meminimalkan konflik sosial sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh warga.

Dengan strategi mitigasi yang terintegrasi tersebut, risiko-risiko dapat diminimalisir sehingga Misi 4 benar-benar menjadi pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo melalui penguatan sektor pertanian dan pariwisata yang berdaya saing serta berkelanjutan.

5. Pencapaian Misi 5 yaitu *“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang intelektual, kreatif, inovatif, dan berdaya saing melalui adanya sekolah unggulan dan rumah pelatihan Karo sehingga menciptakan masyarakat Karo yang berprestasi baik di bidang akademik dan*

nonakademik” menghadapi sejumlah risiko yang perlu diantisipasi sejak awal. Risiko pertama adalah ketimpangan mutu pendidikan antar sekolah. Keterbatasan fasilitas belajar, minimnya tenaga pendidik yang kompeten, serta kurang meratanya akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan, dapat menghambat lahirnya SDM yang unggul.

Risiko kedua berkaitan dengan rendahnya minat dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan. Faktor ekonomi keluarga, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta keterbatasan dukungan lingkungan sosial dapat menyebabkan tingkat putus sekolah tetap tinggi dan menurunkan capaian kualitas SDM daerah.

Selain itu, terdapat risiko dari sisi kualitas dan relevansi kurikulum pelatihan. Program sekolah unggulan maupun rumah pelatihan berpotensi tidak adaptif dengan perkembangan zaman apabila kurikulum tidak menekankan keterampilan abad 21 seperti literasi digital, kreativitas, kewirausahaan, serta inovasi teknologi. Jika hal ini tidak diantisipasi, lulusan yang dihasilkan berisiko tidak mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global.

Perubahan sosial akibat globalisasi dan kemajuan teknologi juga menimbulkan risiko lain, seperti meningkatnya pengaruh negatif media sosial, pergeseran nilai budaya, hingga kecenderungan generasi muda untuk lebih memilih jalur instan dibanding pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Hal ini dapat menurunkan motivasi belajar dan mengurangi fokus pada pengembangan prestasi akademik maupun nonakademik.

Untuk memitigasi berbagai risiko tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas sekolah unggulan dan rumah pelatihan dengan menyediakan sarana prasarana modern, memperbanyak tenaga pengajar yang berkualitas, serta memperluas akses pendidikan di seluruh kecamatan. Selain itu, strategi penting lainnya adalah memperbarui kurikulum agar relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global, termasuk integrasi literasi digital, kewirausahaan, serta pengembangan soft skills.

Mitigasi juga harus diarahkan pada peningkatan peran masyarakat dan keluarga dalam mendukung pendidikan. Program beasiswa, dukungan bagi siswa berprestasi, dan penyediaan ruang kreativitas serta inovasi bagi generasi muda akan memperkuat pencapaian tujuan Misi 5. Dengan langkah mitigasi yang tepat, Kabupaten Karo dapat melahirkan generasi yang berprestasi, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga pada bidang seni, budaya, olahraga, dan inovasi kreatif lainnya.

6. Pencapaian Misi 6 yaitu *“Meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas melalui memperkuat UMKM, mendorong kewirausahaan, industri kreatif serta sentra produksi memanfaatkan potensi pertanian dan pariwisata”* menghadapi tantangan risiko yang cukup besar. Risiko pertama adalah keterbatasan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan wirausaha baru. Banyak pelaku usaha mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan karena keterbatasan jaminan, literasi keuangan yang rendah, dan minimnya rekam jejak usaha. Hal ini berpotensi menurunkan pertumbuhan UMKM dan melemahkan penciptaan lapangan kerja.

Risiko kedua berkaitan dengan rendahnya kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM maupun calon wirausaha. Minimnya pelatihan kewirausahaan, keterampilan manajerial, serta literasi digital menghambat pengembangan usaha agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar yang lebih luas. Akibatnya, banyak usaha hanya

bertahan pada skala kecil dengan produktivitas rendah, sehingga kualitas lapangan pekerjaan yang tercipta tidak optimal.

Selain itu, terdapat risiko dari sisi pasar dan persaingan. Produk UMKM berbasis pertanian maupun pariwisata sering kalah bersaing dengan produk luar daerah karena keterbatasan inovasi, standar mutu, dan strategi pemasaran. Risiko ini semakin besar dengan adanya arus globalisasi dan perdagangan digital, yang menuntut pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dengan tren dan permintaan pasar yang cepat berubah.

Risiko lain yang perlu diantisipasi adalah keterbatasan infrastruktur penunjang sentra produksi dan industri kreatif. Jalan produksi, pasar rakyat, fasilitas logistik, serta jaringan internet yang belum merata dapat menghambat efisiensi usaha dan menurunkan daya tarik investasi di sektor UMKM dan pariwisata. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengembangan sentra ekonomi berbasis potensi lokal akan sulit berkembang secara berkelanjutan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, strategi mitigasi perlu diarahkan pada perluasan akses permodalan melalui kerjasama dengan perbankan, lembaga keuangan mikro, dan program kredit usaha rakyat. Di sisi lain, peningkatan kapasitas pelaku usaha dilakukan melalui program pelatihan kewirausahaan, literasi digital, serta pendampingan UMKM secara berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong inovasi produk dan penguatan branding lokal melalui promosi digital dan pengembangan ekonomi kreatif. Peningkatan infrastruktur dasar seperti akses jalan, pasar, kawasan wisata, serta jaringan internet juga menjadi prioritas agar UMKM, industri kreatif, dan sentra produksi dapat tumbuh lebih cepat. Dengan strategi mitigasi tersebut, risiko dapat dikendalikan sehingga Misi 6 benar-benar berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo

7. Pencapaian Misi 7 yaitu *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas”* merupakan pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat sejumlah risiko yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Risiko utama adalah keterbatasan anggaran pembangunan dibandingkan dengan kebutuhan infrastruktur yang cukup besar. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, sehingga sebagian daerah masih tertinggal dalam akses jalan, air bersih, energi, maupun infrastruktur sosial dasar. Risiko lain muncul dari sisi teknis dan kualitas pembangunan. Keterbatasan pengawasan, lemahnya perencanaan teknis, serta penggunaan material yang tidak sesuai standar dapat menurunkan kualitas infrastruktur. Jika risiko ini terjadi, umur manfaat infrastruktur menjadi lebih pendek, biaya pemeliharaan meningkat, dan pelayanan publik yang dihasilkan menjadi tidak optimal.

Selain itu, terdapat risiko eksternal berupa kerusakan infrastruktur akibat bencana alam. Kabupaten Karo merupakan daerah yang rawan gempa bumi, tanah longsor, serta aktivitas vulkanik dari Gunung Sinabung. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan jalan, jembatan, maupun fasilitas umum, sehingga pembangunan infrastruktur harus selalu disertai perencanaan mitigasi bencana.

Risiko juga muncul dari sisi sosial dan lingkungan. Pembangunan infrastruktur skala besar seringkali menimbulkan potensi konflik lahan, relokasi penduduk, maupun dampak negatif terhadap ekosistem. Apabila tidak dikelola dengan baik, risiko ini dapat menghambat

pelaksanaan proyek, menimbulkan penolakan dari masyarakat, serta memperlambat pencapaian target pembangunan daerah.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, strategi mitigasi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data kebutuhan prioritas masyarakat, meningkatkan inovasi pembiayaan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta memperkuat transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Pengawasan kualitas konstruksi harus diperketat agar hasil pembangunan sesuai standar teknis dan berumur panjang.

Selain itu, pembangunan infrastruktur harus dirancang adaptif terhadap risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang, aspek keselamatan, serta penerapan teknologi konstruksi yang tahan bencana. Dari sisi sosial, perlu ada dialog partisipatif dengan masyarakat sejak tahap perencanaan, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya berkualitas secara fisik, tetapi juga bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat Kabupaten Karo.

8. Pencapaian Misi 8 yaitu *“Meningkatkan pemanfaatan teknologi dan inovasi digital untuk mempercepat pembangunan daerah”* menghadapi berbagai tantangan risiko yang perlu diantisipasi sejak awal. Risiko utama adalah masih terbatasnya infrastruktur digital, khususnya jaringan internet di wilayah pedesaan dan terpencil. Kesenjangan akses ini dapat menyebabkan ketidakmerataan pemanfaatan teknologi, sehingga manfaat transformasi digital hanya dirasakan sebagian masyarakat.

Risiko lain yang cukup signifikan adalah rendahnya literasi digital masyarakat dan aparatur pemerintah. Banyak pelaku usaha, pelajar, maupun ASN yang belum sepenuhnya mampu memanfaatkan teknologi informasi secara produktif dan aman. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan kompetensi digital yang menghambat peningkatan daya saing daerah serta memperlambat modernisasi pelayanan publik.

Selain itu, terdapat risiko dari sisi keamanan siber dan perlindungan data. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan sistem digital, ancaman kebocoran data, serangan malware, maupun penyalahgunaan informasi pribadi juga meningkat. Jika tidak diantisipasi, risiko ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah dan dunia usaha.

Risiko lain yang harus diperhatikan adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan dalam mengembangkan sistem digital yang terintegrasi. Pembangunan aplikasi yang tidak berkelanjutan, tumpang tindih, atau tidak terintegrasi justru dapat menimbulkan inefisiensi dan membebani anggaran daerah. Tanpa koordinasi yang kuat, transformasi digital berisiko hanya sebatas proyek jangka pendek, bukan solusi berkelanjutan.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, strategi mitigasi yang dapat dilakukan adalah mempercepat pembangunan infrastruktur digital hingga ke desa-desa melalui kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi, serta memperluas akses perangkat teknologi yang terjangkau bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kapasitas ASN, pelaku UMKM, dan masyarakat melalui program literasi digital, pelatihan, serta pendampingan pemanfaatan teknologi untuk produktivitas dan inovasi.

Selain itu, penguatan regulasi dan sistem keamanan siber sangat penting untuk melindungi data publik maupun individu. Pembangunan platform digital daerah harus mengedepankan prinsip integrasi,

keberlanjutan, dan efisiensi, sehingga seluruh perangkat daerah dapat saling terhubung dalam satu ekosistem digital. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko dapat dikendalikan sehingga pemanfaatan teknologi dan inovasi digital benar-benar mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Karo.

9. Pencapaian Misi 9 yaitu *“Mendukung dan menyelaraskan program nasional dan provinsi ke daerah untuk mencapai cita-cita bangsa menjadi Indonesia Emas”* sangat bergantung pada sinergi lintas level pemerintahan. Risiko utama yang dapat muncul adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Perbedaan prioritas program, keterlambatan regulasi turunan, maupun tumpang tindih kebijakan dapat menyebabkan implementasi program tidak berjalan optimal.

Risiko lain berasal dari keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya daerah dalam menindaklanjuti arahan program nasional dan provinsi. Tidak semua perangkat daerah memiliki kemampuan perencanaan, penganggaran, maupun monitoring yang adaptif dengan kebijakan pusat. Hal ini berpotensi menyebabkan program yang seharusnya menjadi prioritas nasional tidak terimplementasi dengan baik di daerah.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi risiko signifikan. Program prioritas nasional maupun provinsi seringkali membutuhkan dukungan APBD sebagai bentuk sharing cost, sementara kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Jika tidak ada strategi pembiayaan alternatif, risiko terjadinya ketidaksinkronan antara rencana dan realisasi program sangat besar.

Faktor eksternal seperti dinamika politik nasional, perubahan kebijakan pemerintah pusat, maupun gejolak ekonomi global juga dapat memengaruhi keberlanjutan sinkronisasi program. Risiko ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program prioritas di tingkat daerah, khususnya terkait sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

Untuk memitigasi berbagai risiko tersebut, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan melalui forum formal seperti Musrenbang, Rakor, dan forum sinkronisasi perencanaan pusat-daerah. Penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis evidence juga penting untuk memastikan bahwa program daerah selalu sejalan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

Selain itu, strategi pembiayaan inovatif perlu dikembangkan, seperti skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pemanfaatan dana desa untuk program-program prioritas. Dengan mitigasi yang tepat, Misi 9 dapat terwujud sehingga Kabupaten Karo mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui sinergi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo akan dilaksanakan secara periodik dalam jangka pendek (tahunan) dan disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan penyesuaian kebijakan, perbaikan program, serta pengambilan keputusan strategis.

Ruang lingkup pengendalian pembangunan meliputi dua tahapan utama:

- a. Pengendalian Tahap Perencanaan

Pengendalian ini bertujuan untuk memastikan konsistensi rancangan perencanaan jangka menengah dan tahunan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan nasional (RPJMN). Evaluasi dilakukan terhadap logika program, desain sasaran, kelayakan

kegiatan, serta ketersediaan sumber daya, baik dari APBD, APBN, maupun sumber pendanaan alternatif lainnya.

b. Pengendalian Tahap Pelaksanaan

Difokuskan pada pemantauan dan evaluasi implementasi program/kegiatan tahunan, termasuk pencapaian indikator output dan outcome yang telah ditetapkan. Evaluasi ini juga menjadi sarana deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, stagnasi, atau risiko deviasi yang signifikan dari target kinerja.

Pengendalian dan penjaminan kualitas pembangunan daerah harus ditopang oleh regulasi yang kuat, tata kelola kelembagaan yang efektif, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Penguatan regulasi akan diarahkan untuk menjamin koordinasi antar perangkat daerah, sinergi dalam pelaksanaan evaluasi, integrasi manajemen risiko, dan penerapan sistem manajemen kinerja daerah.

Kerangka kelembagaan pengendalian juga akan diperkuat dengan membentuk unit koordinatif yang berfungsi sebagai simpul integrasi dan *clearing house* terhadap seluruh upaya pengendalian pembangunan daerah. Kelembagaan ini akan mengkoordinasikan proses pemantauan dan evaluasi secara lintas sektor dan lintas perangkat daerah.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 akan dilakukan secara terpadu, kolaboratif, dan berbasis data elektronik, bekerja sama dengan lembaga akademik dan profesional independen yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Evaluasi ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan adaptif di masa mendatang, sekaligus memperkuat fungsi pengendalian internal yang andal dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berdampak nyata, berkelanjutan, dan inklusif.

5.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Karo sangat bergantung pada kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan atau pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan ini mencakup unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga riset dan pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta komunitas lokal yang memiliki kontribusi terhadap percepatan pembangunan.

Untuk mendorong keterlibatan yang lebih luas, berkelanjutan, dan bermakna dari seluruh pelaku pembangunan, Pemerintah Kabupaten Karo akan membangun dan mengimplementasikan sistem insentif yang komprehensif, transparan, dan berbasis kinerja. Sistem insentif ini dirancang untuk meningkatkan motivasi, mendorong inovasi, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung capaian prioritas pembangunan daerah.

1. Sistem Insentif untuk Pelaku Pembangunan Unsur Pemerintah

Bagi pelaku pembangunan dari unsur Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, sistem insentif akan diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam dua instrumen utama, yaitu:

- a. Sistem Manajemen Kinerja: Penilaian kinerja perangkat daerah akan didasarkan pada capaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Indikator kinerja utama yang dinilai meliputi:
 - ◆ Konsistensi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan;
 - ◆ Kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran (integrasi RENJA-KUA-PPAS-APBD);
 - ◆ Pencapaian indikator makro daerah;
 - ◆ Realisasi program prioritas dan pelaksanaan reformasi birokrasi.

- b. Sistem Manajemen Anggaran Berbasis Kinerja: Insentif dalam bentuk pengalokasian anggaran akan diberikan berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah. Perangkat daerah yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan alokasi tambahan atau prioritas pendanaan untuk program/kegiatan inovatif yang berdampak tinggi bagi masyarakat.

Selain itu, insentif non-fiskal berupa penghargaan, pelatihan pengembangan kompetensi, dan promosi jabatan berbasis prestasi akan menjadi bagian dari strategi pembinaan sumber daya manusia aparatur.

2. Sistem Insentif untuk Pelaku Pembangunan Non-Pemerintah

Bagi pelaku pembangunan non-pemerintah, sistem insentif akan diberikan dalam bentuk:

- a. Dukungan regulasi yang kondusif, seperti kemudahan perizinan, insentif perpajakan daerah, atau kemudahan pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. Fasilitasi kemitraan publik-swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau kemitraan berbasis tanggung jawab sosial perusahaan (CSR);
- c. Pemberian penghargaan daerah kepada pelaku non-pemerintah yang berkontribusi nyata dalam bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan inovasi pembangunan;
- d. Dukungan akses informasi dan teknologi melalui pelibatan dalam forum konsultasi publik, penyediaan data terbuka pembangunan, dan penguatan jejaring inovator lokal.

Sistem insentif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pembangunan daerah yang kolaboratif, kompetitif, dan inklusif, serta mempercepat transformasi Kabupaten Karo menjadi daerah yang unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun nasional.

5.1.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah harus memiliki sifat adaptif dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perubahan yang terstruktur, sah secara hukum, dan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan.

Mekanisme perubahan terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 dapat dilakukan apabila terjadi kondisi tertentu yang menyebabkan target-target pembangunan tidak dapat dicapai sebagaimana direncanakan. Kondisi tersebut antara lain:

- a. Keadaan kahar (*force majeure*), seperti bencana alam besar, krisis kesehatan, perubahan drastis kondisi geoekonomi atau geopolitik global dan nasional;
- b. Terjadinya penyimpangan signifikan antara capaian dengan target indikator pembangunan yang telah ditetapkan, yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan strategis jangka menengah;
- c. Perubahan kebijakan nasional atau provinsi yang berdampak langsung terhadap struktur, arah, dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karo dapat melakukan penyesuaian target pembangunan jangka menengah melalui dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Penyesuaian ini tetap harus dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan pelaksanaan RPJMD, dengan memperhatikan integrasi antar dokumen perencanaan, konsistensi arah pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan sinergi dengan arah pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Utara.

5.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik memegang peranan penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang dinamis, transparan, inklusif, responsif, dan akuntabel. Melalui komunikasi publik yang efektif, kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Karo dapat dipahami secara luas, diterima oleh masyarakat, serta mendorong tumbuhnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Komunikasi publik RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 dibangun atas dasar prinsip “tidak ada yang tertinggal” (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*), dengan menjamin keterlibatan kelompok masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Terdapat tiga prinsip dasar komunikasi publik yang menjadi fondasi utama dalam pengelolaan komunikasi pembangunan daerah:

1. Struktur dan Tata Kelola Komunikasi yang Objektif dan Profesional

Pengelolaan komunikasi dilakukan melalui sistem kelembagaan komunikasi lintas perangkat daerah yang objektif, inovatif, akuntabel, dan profesional. Penguatan kapasitas komunikasi publik perangkat daerah akan menjadi prioritas untuk membangun kepercayaan publik dan responsivitas pemerintah.

2. Penyediaan Informasi yang Transparan, Akurat, dan Mudah Diakses

Informasi pembangunan disediakan secara terbuka dan tepat waktu, dengan format yang menarik, inklusif, dan mudah dimengerti oleh berbagai kelompok masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital, media sosial resmi pemerintah daerah, dan saluran informasi publik lainnya akan terus dioptimalkan agar informasi dapat tersebar secara merata, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pelibatan Seluruh Kelompok Masyarakat secara Demokratis dan Berbasis Data

Komunikasi publik akan dilaksanakan dengan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Karo. Metode komunikasi disesuaikan dengan segmentasi audiens, termasuk masyarakat umum, swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora/perantau, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Dalam pelaksanaan komunikasi publik RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Karo menetapkan tiga klaster pemangku kepentingan utama, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah, melalui penguatan komunikasi berjenjang antara Bupati, perangkat daerah, kecamatan, hingga desa/kelurahan, termasuk forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di semua level;
- b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melalui Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah untuk memastikan setiap OPD memiliki pemahaman dan kontribusi terhadap prioritas pembangunan;
- c. Masyarakat Umum dan Nonpemerintah, melalui berbagai pendekatan komunikatif seperti kampanye informasi, forum dialog masyarakat, tatap muka, media daring dan luring, serta diseminasi informasi berbasis komunitas.

Komunikasi publik juga akan difokuskan pada menyampaikan capaian pembangunan dan penyesuaian kebijakan secara berkala, sebagai bentuk akuntabilitas publik dan edukasi pembangunan. Dalam hal ini, media massa lokal, nasional, serta media digital akan dijadikan mitra

strategis dalam menyampaikan narasi pembangunan yang inklusif, progresif, dan membangun optimisme kolektif.

5.2. Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan pembangunan merupakan instrumen penting dalam menjamin pelaksanaan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029. Mengingat keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta tingginya kebutuhan investasi pembangunan, diperlukan pendekatan pembiayaan yang holistik, integratif, dan adaptif dengan mengombinasikan sumber daya dari sektor publik maupun nonpublik.

Strategi pembiayaan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pendanaan pembangunan melalui penguatan kapasitas fiskal daerah, optimalisasi pembiayaan inovatif, dan perluasan partisipasi sektor swasta dan masyarakat, guna menjamin keberlanjutan pembangunan dan inklusivitas manfaatnya bagi seluruh masyarakat Karo.

Sektor publik tetap menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah, yang bersumber dari APBD, APBN, dan pembiayaan daerah lainnya. Upaya peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik diarahkan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, meningkatkan kualitas belanja publik, serta mendorong sinergi pendanaan lintas sektor dan lintas pemerintahan.

Kebijakan utama peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik meliputi:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah; Digitalisasi sistem pemungutan dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi; dan Pengembangan potensi PAD baru berbasis layanan publik dan ekonomi lokal.
2. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Daerah yang terdiri dari Penguatan penganggaran berbasis kinerja dan integrasi sistem perencanaan-penganggaran-pelaksanaan; Penajaman prioritas belanja langsung yang mendukung capaian indikator makro dan program strategis daerah; dan peningkatan kualitas belanja modal dan pengadaan berbasis hasil.
3. Pemanfaatan Dana Transfer dan Dukungan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Optimalisasi pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa; Peningkatan kapasitas teknis dalam mengakses program nasional dan hibah sektoral lintas kementerian; Sinergi dengan provinsi dan pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas lintas wilayah.
4. Pengelolaan Pembiayaan Daerah yang Bijak dan Terukur yang terdiri dari Penggunaan SiLPA, dana cadangan, dan pinjaman daerah secara hati-hati dan produktif; Penyusunan proyek investasi strategis dengan pendekatan value for money dan kelayakan ekonomi jangka panjang; dan Penerapan blended finance untuk memperluas basis pembiayaan proyek pembangunan.
5. Optimalisasi Aset Daerah yang terdiri dari Inventarisasi dan penilaian aset tetap, tanah, dan bangunan milik daerah untuk dimanfaatkan secara produktif; Revitalisasi aset idle menjadi aset komersial melalui kerja sama pemanfaatan (KSP), sewa, atau BOT dengan pihak ketiga; dan Penguatan kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam tata kelola aset berbasis teknologi informasi.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah, partisipasi sektor nonpublik menjadi semakin penting. Pembiayaan sektor nonpublik diarahkan untuk

mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan penciptaan nilai tambah melalui investasi swasta dan kemitraan inovatif.

Kebijakan utama peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik meliputi:

1. Pengembangan Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang terdiri dari Mendorong proyek-proyek strategis seperti pengelolaan air bersih, energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan kawasan pariwisata agar dapat dibangun melalui skema KPBU serta Penyusunan daftar proyek prioritas KPBU Kabupaten Karo dan peningkatan kapasitas kelembagaan KPBU daerah.
2. Peningkatan Investasi Swasta dan Sinergi Dunia Usaha yang terdiri dari Penyederhanaan perizinan berusaha melalui OSS (Online Single Submission) dan reformasi birokrasi investasi daerah; Promosi potensi investasi unggulan Kabupaten Karo kepada investor nasional dan internasional; dan Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) sektor pertanian, agrowisata, dan energi terbarukan.
3. Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) yang terdiri dari Penguatan kemitraan strategis antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam mendukung program pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta Pembentukan forum CSR Kabupaten Karo dan integrasi program CSR ke dalam sistem perencanaan daerah.
4. Mobilisasi Peran Masyarakat dan Diaspora yang terdiri dari Mendorong partisipasi filantropi, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan perantau Karo dalam mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, budaya, dan sosial serta Pengembangan platform digital untuk donasi publik, sponsor komunitas, dan inisiatif pembangunan berbasis warga.
5. Akses Pembiayaan UMKM dan Koperasi yang terdiri dari Kolaborasi dengan lembaga keuangan dan fintech untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi petani serta Pendampingan dan peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kelayakan usaha dan akses modal.

5.3. Kesimpulan

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja pembangunan daerah selama lima tahun.

Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian pembangunan sebelumnya, permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis yang berkembang, dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karo Tahun 2025–2045.

RPJMD ini menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara terarah, terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Perwujudan visi pembangunan dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan berbagai unsur, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan RPJMD diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, daya saing daerah, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, sehingga pembangunan daerah

dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Karo.

Dengan semangat kebersamaan, komitmen, dan tanggung jawab bersama, pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pondasi yang kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan menuju pencapaian visi jangka panjang dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

